MADIUN
Kota Pendekar

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)

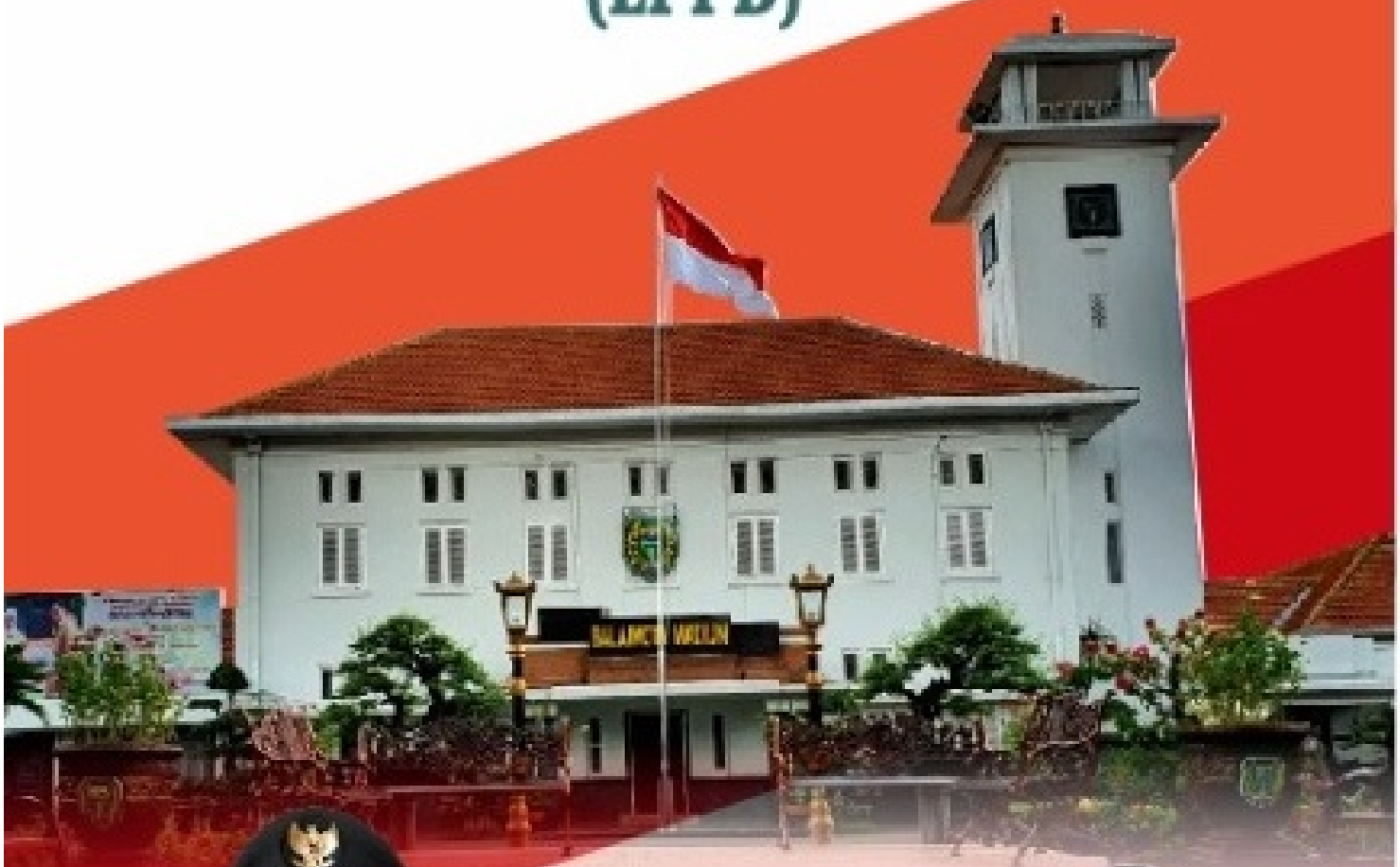

WALIKOTA MADIUN
TAHUN 2019

KATA PENGANTAR

Assalamu' alaikum warahmatullahi wabarokatuh

Salam sejahtera bagi kita semua

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, akhirnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Madiun Tahun 2019 dapat diselesaikan.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disamping merupakan aktualisasi dari penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas, juga merupakan media evaluasi penyelenggaraan tugas pemerintahan, penyelenggaraan urusan desentralisasi dan penyelenggaraan tugas pembantuan yang dilaksanakan Kota Madiun pada tahun 2019, dan selanjutnya disampaikan kepada Pemerintah sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan terselesaikannya dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Madiun Tahun 2019, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak atas sumbang saran dan pemikiran. Semoga dapat menjadi bahan evaluasi dan acuan guna perumusan kebijakan dalam pembangunan dimasa mendatang.

Sekian terima kasih.

Wassalamu' alaikum warahmatullahi wabarokatuh

Madiun, Maret 2020

WALIKOTA MADIUN

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL v

BAB I : PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum I-2

B. Gambaran Umum Daerah

1. Kondisi Geografis I-3
2. Kondisi Demografis I-5
3. Kondisi Ekonomi I-7
4. Inflasi I-13
5. Indeks Pembungan Manusia (IPM) I-15
6. Kemiskinan I-19
7. Ketenagakerjaan I-21

C. Sistematika I-25

BAB II : KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH

A. Visi dan Misi..... II-1

B. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah II-6

C. Prioritas Pembangunan Daerah II-8

D. Indikator Kinerja II-8

1. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar II-8
2. Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar II-13
3. Urusan Pemerintahan Pilihan II-19
4. Fungsi Penunjang Pemerintahan II-21

BAB III : URUSAN KONKUREN, FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

A. Urusan Konkuren III-1

I. Urusan Wajib Pelayanan Dasar III-1

1. Urusan Bidang Pendidikan III-1
2. Urusan Bidang Kesehatan III-24
3. Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang III-42
4. Urusan Bidang Sosial III-51
5. Urusan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman III-55
6. Urusan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat..... III-64

URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR
1. Urusan Bidang Tenaga Kerja III-75
2. Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak III-80
3. Urusan Bidang Ketahanan Pangan III-85
4. Urusan Bidang Pertanahan III-89
5. Urusan Bidang Lingkungan Hidup III-91
6. Urusan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil III-99
7. Urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana III-107
8. Urusan Bidang Perhubungan III-110
9. Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika III-117
10. Urusan Bidang Persandian III-123
11. Urusan Bidang Koperasi dan UKM III-127
12. Urusan Bidang Penanaman Modal III-130
13. Urusan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga III-133
14. Urusan Bidang Statistik III-135
15. Urusan Bidang Kebudayaan III-138
16. Urusan Bidang Perpustakaan III-142
17. Urusan Bidang Kearsipan III-146

III. URUSAN PILIHAN
1. Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan III-149
2. Urusan Bidang Pariwisata III-153
3. Urusan Bidang Pertanian III-156
4. Urusan Bidang Perdagangan III-162
5. Urusan Bidang Perindustrian III-168
6. Urusan Bidang Transmigrasi III-170

B. RINGKASAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, INSPEKTORAT DAN FUNGSI PENUNJANG LAINNYA)
1. Fungsi Penunjang Unsur Staf III-173
7. Fungsi Penunjang Unsur Pengawas III-193
8. Fungsi Penunjang Unsur Pelayanan Administrasi DRPD .. III-197
9. Fungsi Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan III-202
10. Fungsi Penunjang Keuangan III-208
11. Fungsi Penunjang Perencanaan III-220
12. Fungsi Penunjang penelitian dan Pengembangan III-225

13. Fungsi Penunjang Kecamatan III-227
C. RINGKASAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM (KESBANGPOL)
- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik III-243

BAB IV : REALISASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) TAHUN 2019 ..... IV-1

BAB V : TUGAS PEMBANTUAN
1. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun V-1
2. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak V-2

BAB VI : TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
A. Kerjasama Daerah VI-1
B. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga VI-8
C. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah VI-26
D. Pembinaan Batas Wilayah (Tidak Ada)
E. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana VI-33
F. Pengelolaan Kawasan Khusus (tidak Ada)
G. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

BAB VII : PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM
A. Bidang Pendidikan VII-1
B. Bidang Kesehatan VII-4
C. Bidang Pekerjaan Umum VII-12
D. Bidang Perumahan dan Permukiman VII-14
E. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum VII-17
F. Bidang Sosial VII-28

BAB VIII : AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH
A. Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja VIII-1
B. Akuntabilitas Keuangan VIII-36

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	:	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran Kota Madiun 2014-2019	II-5
Tabel I.2	:	Pembagian Wilayah Administrasi Kota Madiun	I-4
Tabel I.3	:	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin per Kecamatan Tahun 2019	I-5
Tabel I.4	:	Jumlah Kepala Keluarga (KK) Menurut Jenis Kelamin per Kecamatan Tahun 2019..	I-5
Tabel I.5	:	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2019...	I-6
Tabel I.6	:	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Pendidikan Tahun 2019...	I-6
Tabel I.7	:	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan Tahun 2019	I-6
Tabel I.8	:	Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan Tahun 2015-2019 (Juta Rupiah)	I-9
Tabel I.9	:	Perkembangan PDRB Kota Madiun Menurut Harga Berlaku Tahun 2015-2019	I-10
Tabel I.10	:	Perkembangan PDRB Kota Madiun Menurut Harga Konstan Tahun 2015-2019	I-11
Tabel I.11	:	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun Tahun 2015-2019 (%).....	I-12
Tabel I.12	:	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Wilayah Karesidenan Madiun Tahun 2015-2019	I-13
Tabel I.13	:	Perkembangan IPM Kota Madiun Tahun 2015-2019	I-15
Tabel I.14	:	Angka Harapan Hidup Tahun 2015-2019	I-16
Tabel I.15	:	Angka Harapan Lama Sekolah, Angka Rata-rata Lama Sekolah Kota Madiun Tahun 2015-2019.	I-18
Tabel I.16	:	Paritas Daya Beli (Rp) Kota Madiun Tahun 2015-2019 .	I-18
Tabel I.17	:	Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin di Kota Madiun .	I-19
Tabel I.18	:	Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Wilayah Karesidenan Madiun.	I-20
Tabel I.19	:	Kantong Kemisikinan di Kota Madiun Tahun 2019.	I-20
Tabel I.20	:	Penduduk Usia 15 Tahun ke atas menurut kegiatan Agutus Tahun 2018-2019.	I-23
Tabel III.1	:	Program dan Kegiatan Urusan Pendidikan Tahun 2019	III-1
Tabel III.2	:	Program dan kegiatan urusan Kesehatan Tahun 2019	III-24
Tabel III.3	:	Program dan Kegiatan urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2019	III-42

Tabel III.4	:	Program dan Kegiatan Urusan Sosial Tahun 2019 .	III-51
Tabel III.5	:	Program dan Kegiatan Urusan Bidang Perumahan dan Kawasan permukiman di Kota Madiun Tahun 2019	III-56
Tabel III.6	:	Program dan Kegiatan Urusan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kota Madiun Tahun 2019.....	III-64
Tabel III.7	:	Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja di Kota Madiun tahun 2019	III-75
Tabel III.8	:	Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Anak di Kota Madiun	III-80
Tabel III.9	:	Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan di Kota Madiun	III-85
Tabel III.10	:	Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan bidang Pertanahan di Kota Madiun Tahun 2019.....	III-89
Tabel III.11	:	Program dan Kegiatan urusan Pemerintahan bidang Lingkungan Hidup di Kota Madiun Tahun 2019	III-92
Tabel III.12	:	Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Madiun Tahun 2019.....	III-99
Tabel III.13	:	Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kota Madiun Tahun 2019.....	III-107
Tabel III.14	:	Program dan Kegiatan Urusan pemerintahan bidang Perhubungan di Kota Madiun Tahun 2019	III-110
Tabel III.15	:	Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika di Kota Madiun Tahun 2019	III-117
Tabel III.16	:	Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan bidang Persandian di Kota Madiun Tahun 2019	III-124
Tabel III.17	:	program dan Kegiatan urusan Pemerintahan bidang Koperasi dan UKM di Kota Madiun Tahun 2019	III-127
Tabel III.18	:	Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal di Kota Madiun tahun 2019.....	III-130
Tabel III.19	:	Program dan Kegiatan urusan Pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga di Kota Madiun tahun 2019	III-133
Tabel III.20	:	program dan Kegiatan Urusan Pemrintahan bidang Statistik di Kota Madiun Tahun 2019.....	III-135
Tabel III.21	:	Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan bidang Kebudayaan di Kota Madiun Tahun 2019	III-138

Tabel III.22 : Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan bidang Perpustakan di Kota Madiun Tahun 2019 ..... III-142
Tabel III.23 : Program dan Kegitan Urusan Pemerintahan bidang Kearsipan di Kota Madiun Tahun 2019 ..... III-146
Tabel III.24 : Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan bidang kelautan dan Perikanan di Kota Madiun Tahun 2019 III-149
Tabel III.25 : Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan bidang Pariwisata di Kota Madiun Tahun 2019 ..... III-153
Tabel III.26 : Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan bidang Pertanian di Kota Madiun Tahun 2019..... III-156
Tabel III.27 : Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan di Kota Madiun Tahun 2019 ..... III-162
Tabel III.28 : Program dan Kegiatan urusan Pemerintahan bidang Perindustrian di Kota Madiun Tahun 2019 ..... III-168
Tabel III.29 : Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan bidang Transmigrasi di Kota Madiun Tahun 2019 ..... III-171
Tabel III.30 : Program dan Kegiatan Fungsi Penunjang Unsur Staf di Kota Madiun Tahun 2019..... III-173
Tabel III.31 : Program dan Kegiatan Fungsi Penunjang Unsur Pengawas Inspektorat di Kota Madiun Tahun 2019..... III-193
Tabel III.32 : Progam dan Kegiatan Fungsi Penunjang Unsur Pelayanan Administrasi DPRD di Kota Madiun Tahun 2019 ... III-197
Tabel III.33 : Program dan Kegiatan Fungsi Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan di Kota Madiun Tahun 2019 III-202
Tabel III.34 : Program dan Kegiatan Fungsi Pemerintahan bidang Keuanga di Kota Madiun Tahun 2019 ..... III-208
Tabel III.35 : Program dan Kegiatan Fungsi Penunjang Perencanaa di Kota Madiun Tahun 2019 ..... III-220
Tabel III.36 : Program dan kegiatan Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan di Kota Madiun Tahun 2019 ..... III-225
Tabel III.37 : Program dan Kegiatan Fungsi Penunjang Kecamatan di Kota Madiun tahun 2019 ..... III-227
Tabel III.38 : Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum di Kota Madiun Tahun 2019..... III-243
Tabel IV.1 : Prioritas Nasional/ prioritas Provinsi/ Prioritas Kota/ Program prioritas IV-1
Tabel VIII.1 : Pengukuran Realisasi Kinerja 2019..... VIII-2
Tabel VIII.2 : Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan I..... VIII-4
Tabel VIII.3 : Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir periode RPJMD VIII-4

Tabel VIII.4 : Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Provinsi dan Nasional VIII-4
Tabel VIII.5 : Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan I..... VIII-7
Tabel VIII.7 : Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir periode RPJMD VIII-7
Tabel VIII.8 : Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Provinsi dan Nasional VIII-8
Tabel VIII.7 : Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan I..... VIII-13
Tabel VIII.8 : Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RPJMD VIII-13
Tabel VIII.9 : Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Provinsi dan Realisasi Nasional VIII-13
Tabel VIII.10 : Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan II..... VIII-15
Tabel VIII.11 : Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RPJMD VIII-15
Tabel VIII.12 : Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi provinsi dan Realisasi Nasional VIII-16
Tabel VIII.13 : Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan III..... VIII-17
Tabel VIII.14 : Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RPJMD VIII-17
Tabel VIII.15 : Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Provinsi dan Nasional VIII-18
Tabel VIII.16 : Perkembangan Kondisi Jalan di Kota Madiun dalam Km VIII-18
Tabel VIII.17 : Kondisi Jalan di Kota Madiun VIII-19
Tabel VIII.18 : Ruang Terbuka Hijau di Kota Madiun VIII-25
Tabel VIII.19 : Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan I..... VIII-25
Tabel VIII.20 : Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RPJMD VIII-26
Tabel VIII.23 : Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Provinsi dan Realisasi Nasional VIII-25
Tabel III.22 : Penduduk Usia 15 Tahun Kota Madiun ke atas menurut kegiatan Agustus Tahun 2018-2019 ..... VIII-29
Tabel VIII.23 : Kategori Pengangguran Terbuka di Kota Madiun Tahun 2019..... VIII-29
Tabel VIII.24 : Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan II..... VIII-32
Tabel VIII.25 : Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RPJMD VIII-33
Tabel VIII.26 : Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Provinsi dan Realisasi Nasional VIII-33
Tabel VIII.27 : Realisasi APBD Kota Madiun Tahun 2019..... VIII-36
Tabel VIII.28 : Realisasi Belanja Langsung untuk Program rutin dan operasional seluruh Perangkat Daerah..... VIII-36
Tabel VIII.29 : Penyerapan Anggaran per sasaran sesuai APBD Tahun 2109..... VIII-37
Tabel VIII.30 : Efisiensi Anggaran belanja per sasaran tahun 2019 VIII-38

DAFTAR GRAFIK

Grafik I.1 : Perkembangan Tingkat Inflasi Kota Madiun Tahun 2015 - 2019 ..... I-14

Grafik I.2 : Perkembangan Tingkat Partisispasi Angkatan Kerja Kota Madiun Tahun 2015-2019 ..... I-21

Grafik I.3 : Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Madiun Tahun 2015-2019..... I-23

Gambar VIII.1: Perkembangan Indeks Pembangunan Gender Kota Madiun Tahun 2015- 2019 ..... VIII-6

Gambar VIII.2: Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kota Madiun Tahun 2015- 2019 ..... VIII-9

Gambar VIII.3: Perkembangan Indeks Kepuasan Masyrakat Kota Madiun Tahun 2015- 2019 ..... VIII-11

Gambar VIII.4: Perkembangan Indeks Pendidikan Kota Madiun Tahun 2015- 2019 ..... VIII-14

Gambar VIII.5: Trend Angka Harapan Hidup Kota Madiun Tahun 2015- 2019 .... VIII-16

Gambar VIII.6: Grafik Kondisi Jalan di KotaMadiun VIII-19

Gambar VIII.6: Perkembangan Nilai Investasi Kota Madiun Tahun 2015- 2019 .... VIII-27

Gambar VIII.7: Perkembangan Tingkat pengangguran Terbuka Kota Madiun Tahun 2015-2019 ..... VIII-28

Gambar VIII.8: Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Kota Madiun VIII-32

Gambar VIII.9: Gambar Potensi Konflik di Kota Madiun Tahun 2015- 2019 ..... VIII-35

BAB I
PENDAHULUAN

Paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan berkaitan erat dengan akuntabilitas administrasi publik dalam menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya. Setiap pejabat publik dituntut untuk dapat bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan kebijakannya kepada publik tentang tugas, wewenang dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, pada pasal 69 ayat (1) mengamanatkan bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Selanjutnya pada pasal 70 ayat (3) disebutkan bahwa Kepala Daerah menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pertanggungjawaban kepala daerah juga tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pada pasal 4 disebutkan ruang lingkup LPPD meliputi capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang meliputi capaian kinerja makro, capaian kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dan capaian akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah; serta capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan.

Untuk menjamin adanya kesinambungan dalam perumusan kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun Tahun 2014-2019 dengan 2019-2024 yang memuat visi, misi dan program kerja Walikota dan Wakil Walikota terpilih, maka perumusan berbagai kebijakan juga tertuang dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Madiun ini.

A. Dasar Hukum

Peraturan Perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019, adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2005-2025 ;
7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kota Madiun Tahun 2014-2019 ;
8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 40 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 ;
9. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 ;
10. Peraturan Walikota Madiun Nomor 60 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 ;
11. Peraturan Walikota Madiun Nomor 36 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 60 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 ;
12. Peraturan Walikota Madiun Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Madiun Tahun 2019 ;
13. Peraturan Walikota Madiun Nomor 28 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Madiun Tahun 2019.

B. Gambaran Umum Daerah

1. Kondisi Geografis

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2010 tentang Batas Daerah Kota Madiun dengan Kabupaten Madiun dan Batas Daerah Kota Madiun dengan Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur, disebutkan bahwa Kota Madiun terletak pada 111^0 BT – 112^0 BT dan 7^0 LS – 8^0 LS dengan batas meliputi :

- Sebelah utara : Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun;
- Sebelah selatan : Kecamatan Geger Kabupaten Madiun;
- Sebelah timur : Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun;
- Sebelah barat : Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun dan Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan.

Gambar I.1
Peta Administrasi Kota Madiun

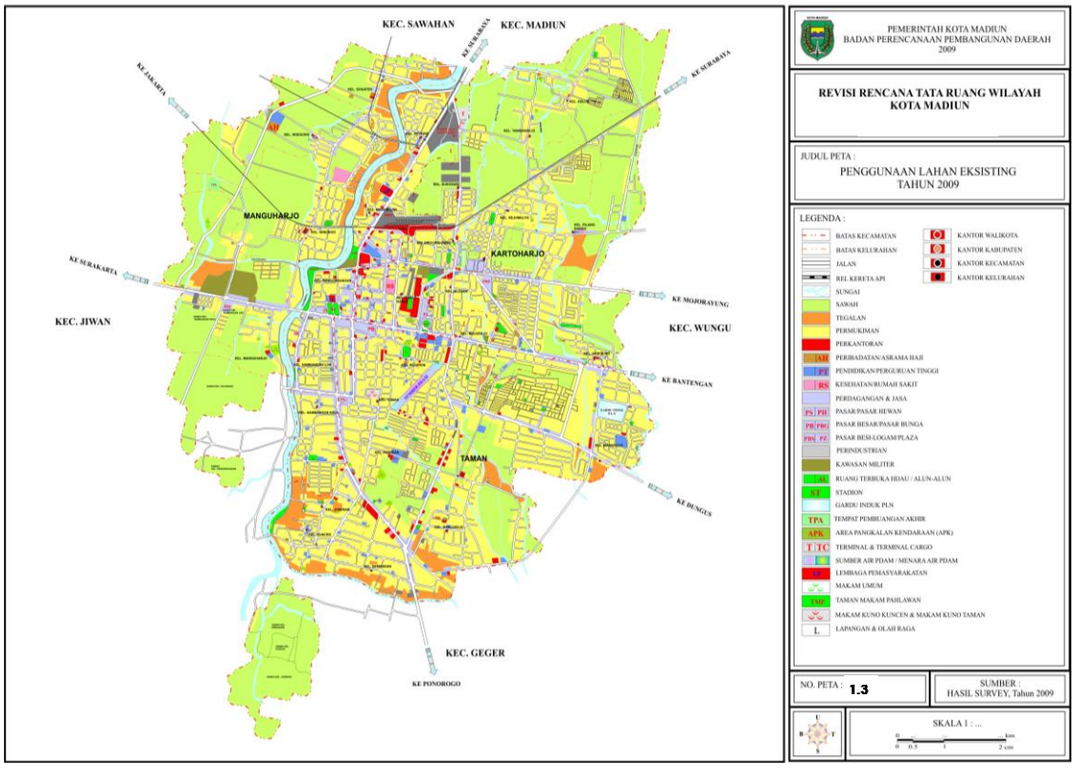

Secara geografis, letak Kota Madiun termasuk sangat strategis karena jalur Kota Madiun adalah jalur penghubung antara Pusat Jawa Timur dan Pusat perekonomian di jawa Tengah dan Jogjakarta. Letak geografis Kota Madiun juga memberi pengaruh terhadap Wilayah se eks-Karesidenan Madiun yang merupakan Pusat Kegiatan Wilayah Jawa Timur bagian barat yang memiliki fungsi sebagai pusat pelayanan pemerintahan, perdagangan, jasa, industri, pendidikan dan kesehatan.

Berdasarkan RTRW Kota Madiun Tahun 2010-2030, Kota Madiun memiliki wilayah seluas 33,23 km^2 yang terbagi menjadi 3 (tiga) kecamatan, yaitu Kecamatan Manguharjo, Kecamatan Taman, dan Kecamatan Kartoharjo. Kecamatan dengan wilayah terluas di Kota Madiun adalah Kecamatan Taman dengan luasan sebesar 12,46 km^2 (37,50%), disusul Kecamatan Kartoharjo seluas 10,73 km^2 (32,29%), dan Kecamatan Manguharjo seluas 10,04 km^2 (30,21%). Berikut ditampilkan jumlah Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) ditiap kecamatan di Kota Madiun, yaitu :

- Kecamatan Manguharjo terdiri dari 324 RT dan 88 RW ;
- Kecamatan Taman terdiri dari 392 RT dan 105 RW ;
- Kecamatan Kartoharjo terdiri dari 309 RT dan 74 RW.

Secara rinci untuk luas wilayah dan jumlah RT, RW di Kelurahan dan Kecamatan se Kota Madiun dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel I.2
Pembagian Wilayah Administrasi Kota Madiun

No.	Kecamatan / Kelurahan	Luas Wilayah (Km^2)	Jumlah	
			RW	RT
I.	**Manguharjo**	**10,04**	**88**	**324**
1.	Manguharjo	1,40	8	36
2.	Sogaten	1,12	9	29
3.	Patihan	0,84	6	22
4.	Ngegong	1,34	5	17
5.	Winongo	2,00	11	37
6.	Madiun Lor	0,73	9	41
7.	Pangongangan	0,61	9	26
8.	Nambangan Lor	0,98	16	70
9.	Nambangan Kidul	1,02	15	46
II.	**Taman**	**12,46**	**105**	**393**
1.	Mojorejo	1,54	14	64
2.	Pandean	0,32	18	60
3.	Banjarejo	1,92	8	32
4.	Kuncen	1,83	4	9
5.	Manisrejo	0,92	12	60
6.	Kejuron	1,59	15	50
7.	Josenan	1,06	9	31
8.	Demangan	1,26	10	36
9.	Taman	2,02	15	51
III.	**Kartoharjo**	**10,73**	**74**	**309**
1.	Kartoharjo	0,94	9	38
2.	Oro-Oro Ombo	0,81	9	43
3.	Klegen	0,84	10	48
4.	Kanigoro	1,62	12	52
5.	Pilangbango	1,21	5	22
6.	Rejomulyo	2,03	11	38
7.	Sukosari	0,55	6	18
8.	Tawangrejo	1,77	6	24
9.	Kelun	0,96	6	26
	Jumlah	**33,23**	**267**	**1.026**

Sumber : Buku Kecamatan Dalam Angka 2019

Ditinjau menurut topografinya, wilayah Kota Madiun didominasi oleh dataran rendah yang landai dan membentang dari utara ke selatan. Kota Madiun secara umum berada pada ketinggian ± 63 meter di atas permukaan laut (dpl). Di bagian selatan ketinggian wilayah mencapai 77 meter dpl dan di bagian utara selanjutnya menurun hingga 64 meter dpl, sedang di bagian tengah kota, ketinggian rata-rata mencapai 63 meter dpl. Secara rinci, Kecamatan Manguharjo berada pada ketinggian 76 meter dpl, Kecamatan Taman di ketinggian 77 meter dpl, dan Kecamatan Kartoharjo di ketinggian 68 meter dpl. Perbedaan ketinggian antar wilayah yang satu dengan wilayah yang lainnya sangat kecil dengan kemiringan lahan rata-rata 1-2° atau dapat dikatakan relatif datar. Kondisi tersebut merupakan potensi besar untuk pengembangan fisik Kota Madiun di masa yang akan datang.

2. Kondisi Demografis

Jumlah penduduk Kota Madiun tahun 2019 berdasarkan hasil registrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun adalah sebanyak 210.115 jiwa. Dengan komposisi jumlah penduduk laki-laki sebanyak 102.851 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 107.264 jiwa. Sedangkan jumlah Kepala Keluarga di Kota Madiun sebanyak 71.995 KK tersebar di tiga wilayah kecamatan.

Jumlah penduduk Kota Madiun Tahun 2019 menurut kelompok umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan sebagaimana tabel berikut :

Tabel I.3
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin per Kecamatan
Tahun 2019

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Total
1.	Manguharjo	30.824	32.193	63.017
2.	Taman	43.751	45.599	89.350
3.	Kartoharjo	28.276	29.472	57.748
Jumlah		**102.851**	**107.264**	**210.115**

Sumber : Dinas Dukcapil Kota Madiun

Tabel I.4
Jumlah Kepala Keluarga (KK) Menurut Jenis Kelamin per Kecamatan
Tahun 2019

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Total
1.	Manguharjo	16.400	5.875	22.275
2.	Taman	22.805	7.154	29.959
3.	Kartoharjo	14.963	4.798	19.761
Jumlah		**54.168**	**17.827**	**71.995**

Sumber : Dinas Dukcapil Kota Madiun

Tabel I.5
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2019

No	Kelompok Umur (Tahun)	Uraian		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	0 – 4	4.970	5.929	10.899
2.	5 – 9	7.062	5.522	12.584
3.	10 – 14	7.721	7.470	15.191
4.	15 – 19	8.604	8.084	16.688
5.	20 – 24	8.084	7.712	15.796
6.	25 – 29	7.163	7.217	14.380
7.	30 – 34	6.883	6.914	13.796
8.	35 – 39	8.336	8.367	16.703
9.	40 – 44	8.548	8.604	17.152
10.	45 – 49	7.988	7.874	15.862
11.	50 – 54	6.946	7.475	14.421
12.	55 – 59	5.971	6.851	12.822
13.	≥ 60	14.576	19.245	33.821
Jumlah		102.851	107.264	**210.115**

Sumber : Dinas Dukcapil Kota Madiun

Tabel I.6
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan
Tahun 2019

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Tidak/ Belum Sekolah	31.374
2.	Belum Tamat SD/ Sederajat	19.887
3.	Tamat SD/ Sederajat	29.266
4.	SLTP/ Sederajat	28.787
5.	SLTA/ Sederajat	73.045
6.	D-I/ II	498
7.	Akademi/ D-III/ Sarjana Muda	5.761
8.	D-IV/ Strata-I	20.071
9.	Strata-II	1.391
10.	Strata-III	35
Jumlah		**210.115**

Sumber : Dinas Dukcapil Kota Madiun

Tabel I.7
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan
Tahun 2019

NO	Nama Pekerjaan	Jumlah
1	Belum/ Tidak Bekerja	36.390
2	Mengurus Rumah Tangga	34.412
3	Pelajar/ Mahasiswa	44.940
4	Pensiunan	6.095
5	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	6.826
6	Tentara Nasional Indonesia (TNI)	1.771
7	Kepolisian RI (POLRI)	1.027
8	Jasa	8.653
9	Karyawan	46.311
10	Buruh/ Tukang	4.390
11	Wiraswasta	18.994
12	Lain	306
	Jumlah	**210.115**

Sumber : Dinas Dukcapil Kota Madiun

3. Kondisi Ekonomi

a. Potensi Unggulan Daerah

Kondisi karakteristik wilayah Kota Madiun dari aspek fisik dan non fisik, bahwa Kota Madiun sebagai pusat wilayah pengembangan Madiun dan sekitarnya memiliki fungsi antara lain pusat pelayanan pemerintahan, perdagangan, jasa, industri, pendidikan, kesehatan bagi daerah hinterland. Kota Madiun sebagai pusat kegiatan wilayah (PKW) di Jawa Timur bagian barat yang berfungsi sebagai pelayanan dalam lingkup provinsi. Kondisi Topografi & geografi Kota Madiun yang mendukung sebagai kota transit adalah dengan adanya fasilitas berupa sarana transportasi kereta api (DAOP VII) dan terminal Tipe A yang mendukung potensi pengembangan wilayah Kota Madiun sebagai pusat perdagangan, jasa dan pendidikan.

Luas wilayah yang relatif kecil di Kota Madiun memudahkan akses komunikasi dan koordinasi dalam rangka pelaksanaan pemerintahan, kondisi topografi yang landai atau datar, serta dilewati jaringan jalan kereta api lintas utama Pulau Jawa bagian selatan menjadi potensi bagi Kota Madiun dalam mempermudah pembangunan fisik untuk pembangunan daerah, dengan harapan dapat mendukung peran Kota Madiun sebagai Pusat Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) yang dapat menjadi katalisator peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Upaya mendorong pertumbuhan perekonomian, Kota Madiun mengandalkan pada sektor industri pengolahan, perdagangan, hotel dan restoran. Hal ini dikarenakan Kota Madiun yang tidak memiliki sumber daya alam (SDA) dan lahan pertanian yang terbatas. Potensi sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan restoran dan sektor jasa-jasa tumbuh paling tinggi dan kontribusinya paling besar terhadap perekonomian Kota Madiun. Sebagai kota transit, Kota Madiun mempunyai berbagai sarana dan prasarana akomodasi yang memadai antara lain hotel berbintang, penginapan dan biro perjalanan serta sarana umum lainnya. Kota Madiun mempunyai kekhasan dalam makanan yaitu berupa nasi pecel, lempeng, madumongso dan roti bluder yang mempunyai daya tarik tersendiri. Berdasarkan nilai perbandingan absolut antar kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur, Kota Madiun termasuk dalam kategori pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Kota Karismatik Madiun sebagai Sub Sentra pengembangan Wilayah Jawa Timur di Bagian Barat mengembangkan Gerakan UMKM Naik Kelas yang merupakan upaya Pemerintah Kota Madiun untuk meningkatkan kualitas produksi, kapasitas produksi dan pemasaran hasil

produksi melalui kemudahan legalitas usaha mikro kecil, fasilitasi permodalan, fasilitasi pelatihan dan fasilitasi pemasaran.

Pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat dari tahun ke tahun dengan rata-rata selalu di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Pendapatan perkapita juga terus mengalami kenaikan serta inflasi yang cenderung menurun dan didukung oleh kondisi keamanan, politik, sosial budaya dan pemerintahan yang stabil dan kondusif merupakan potensi yang baik bagi perkembangan Kota Madiun. Namun kedepan masih terdapat tantangan besar untuk meningkatkan daya saing, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan infrastruktur, kesehatan dan pendidikan, efisiensi pasar tenaga kerja, penguasaan teknologi dan inovasi, serta kelembagaan.

b. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Beragamnya kegiatan perekonomian yang dikembangkan oleh pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat telah memberikan warna pada struktur perekonomian suatu wilayah. Hal ini dipengaruhi oleh potensi sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang tersedia. Salah satu indikator yang sering digunakan untuk menggambarkan struktur ekonomi suatu wilayah adalah distribusi persentase sektoral. Distribusi persentase PDRB secara sektoral menunjukan peranan masing-masing sektor dalam sumbangannya terhadap PDRB secara keseluruhan. Semakin besar persentase suatu sektor, semakin besar pula pengaruh sektor tersebut dalam perkembangan ekonomi suatu daerah. Tingkat kontribusi terhadap pembentukan PDRB dapat memperlihatkan kontribusi nilai tambah setiap sektor, sehingga akan tampak sektor-sektor yang menjadi pemicu pertumbuhan (sektor andalan) di wilayah yang bersangkutan. Struktur ekonomi yang dinyatakan dalam persentase, menunjukkan besarnya peran masing-masing sektor ekonomi dalam kemampuan menciptakan nilai tambah. Hal tersebut menggambarkan ketergantungan daerah terhadap kemampuan produksi dari masing-masing sektor ekonominya.

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro yang dapat digunakan untuk mengukur pembangunan ekonomi di suatu wilayah, ketika pertumbuhan ekonomi meningkat maka pembangunan ekonomi pada daerah tersebut pun meningkat. Nilai pertumbuhan ekonomi didapatkan dari perhitungan pertumbuhan (Produk Domestik Regional Bruto) PDRB di suatu wilayah. Definisi PDRB sendiri adalah jumlah nilai tambah yang timbul dari produksi seluruh

sektor perekonomian di suatu wilayah pada periode tertentu. PDRB dapat juga diartikan sebagai nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh sektor perekonomian atau unit ekonomi di suatu wilayah pada periode tertentu. Terdapat dua jenis penilaian produk domestik regional bruto (PDRB) dibedakan dalam dua jenis penilaian yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Sedangkan untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi adalah dengan melihat data tentang pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan.

PDRB atas dasar harga berlaku disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (riil) disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Sedang PDRB atas dasar harga konstan dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar yakni tahun 2010, perhitungan ini digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil yang tidak dipengaruhi oleh kenaikan harga atau inflasi. Dengan demikian laju pertumbuhan ekonomi yang dihitung dengan data PDRB atas dasar harga konstan ini dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk menentukan arah kebijakan pembangunan yang akan datang.

Tabel I.8
Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan
Tahun 2015-2019 (Juta Rupiah)

Tahun	PDRB (Rp)	
	ADHB	ADHK
2019**	14.208.213,5	10.635.464,3
2018	13.150.858,7	10.053.582,4
2017	12.140.200,5	9.486.136,6
2016	11.185.109,4	8.954.697,1
2015	10.192.067,5	8.455.436,3

Sumber : BPS Kota Madiun
**) Angka sangat sementara

Selama 5 tahun terakhir PDRB Kota Madiun terus mengalami peningkatan. Terlihat dari nilai PDRB pada tahun 2015 atas dasar harga berlaku 10,19 triliun rupiah dan terus meningkat hingga mencapai 14,21 triliun rupiah tahun 2019 atau naik sebesar 39,4%. Sejalan dengan PDRB atas dasar harga berlaku, PDRB atas dasar harga konstan juga terus mengalami peningkatan dalam 5 tahun terakhir. Tahun 2015 sebesar 8,45 triliun rupiah terus meningkat menjadi 10,63 triliun rupiah tahun 2019.

Secara terperinci pertumbuhan ekonomi di masing-masing sektor pada Tahun 2015 dan Tahun 2019 ditunjukkan tabel berikut:

Tabel I.9
Perkembangan PDRB Kota Madiun Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2015-2019

SEKTOR		NILAI PDRB ADHB (Rp. JUTA)				
		2015	2016	2017	2018	2019*
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	98.020,1	102.288,5	100.958,5	99.191,8	106,813.50
B	Pertambangan dan Penggalian	2.477,4	2.616,4	2.727,4	2.906,6	3,049.10
C	Industri Pengolahan	1.637.081,5	1.807.895,0	1.991.440,2	2.095.797,2	2,290,021.70
D	Pengadaan Listrik dan Gas	7.775,3	8.393,3	9.820,3	10.454,7	11,222.20
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	22.645,1	24.461,4	26.744,4	29.109,5	29,039.70
F	Konstruksi	664.080,2	718.117,5	767.940,9	823.107,1	834,712.10
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.529.951,0	2.791.973,3	3.051.458,8	3.289.129,5	3,658,646.60
H	Transportasi dan Pergudangan	321.165,2	360.088,4	407.727,1	459.090,9	498,887.00
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	464.842,5	523.628,0	574.364,4	629.380,0	705,629.50
J	Informasi dan Komunikasi	1.393.956,6	1.524.590,8	1.660.030,1	1.834.504,9	1,851,667.80
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.056.626,6	1.177.737,2	1.259.761,0	1.388.196,0	1,432,481.00
L	Real Estate	274.014,6	297.817,3	318.811,7	355.584,5	374,195.00
M,N	Jasa Perusahaan	69.258,5	75.725,3	82.453,6	90.302,3	98,169.60
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	329.408,9	350.207,4	366.763,0	384.280,7	438,156.30
P	Jasa Pendidikan	802.998,2	862.990,1	923.493,1	1.008.647,1	1,067,457.60
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	131.102,2	141.938,6	155.984,0	174.231,7	189,687.40
R,S, T,U	Jasa lainnya	386.663,5	413.640,8	439.721,9	476.944,2	518,484.30
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		**10.192.067,5**	**11.184.109,4**	**12.140.200,5**	**13.150.858,7**	**14,108,321.50**

Sumber : BPS Kota Madiun
*) Angka sementara

Struktur lapangan usaha masyarakat Kota Madiun tetap bertumpu pada lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Hal ini dapat terlihat dari besarnya peranan lapangan usaha kategori ini terhadap total PDRB yang memberikan sumbangan terbesar selama tahun 2015-2019. Kategori ini meliputi kegiatan ekonomi/ lapangan usaha di bidang perdagangan besar dan eceran dari berbagai jenis barang dan memberikan imbalan jasa yang mengiringi penjualan barang-barang tersebut.

Tabel I.10
Perkembangan PDRB Kota Madiun Menurut Harga Konstan
Tahun 2015-2019

Kategori		NILAI PDRB ADHK (Rp. JUTA)				
		2015	2016	2017	2018	2019*
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	75.389,8	76.374,6	75.018,4	72.663,3	75,634.0
B	Pertambangan dan Penggalian	2.039,0	2.077,9	2.125,9	2.148,6	2,200.5
C	Industri Pengolahan	1.448.902,0	1.553.358,8	1.677.594,5	1.757.359,9	1,878,541.2
D	Pengadaan Listrik dan Gas	7.024,1	7.295,2	7.653,3	8.083,5	8,610.0
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	18.381,8	19.084,3	20.389,4	21.294,6	22,256.2
F	Konstruksi	548.471,1	572.823,2	604.746,4	636.993,4	647,196.1
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.979.784,5	2.080.949,4	2.202.184,4	2.333.116,8	2,515,131.3
H	Transportasi dan Pergudangan	242.757,2	260.069,3	281.347,3	303.628,2	332,996.8
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	407.814,0	437.587,7	470.288,2	504.321,3	559,236.8
J	Informasi dan Komunikasi	1.332.551,5	1.421.031,9	1.517.253,9	1.617.457,4	1,671,410.6
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	780.748,8	836.281,7	868.721,0	933.812,2	947,538.7
L	Real Estate	217.675,2	229.959,0	239.665,2	255.826,4	263,019.0
M,N	Jasa Perusahaan	61.455,1	65.102,8	69.233,1	74.912,0	77,362.4
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	281.384,6	289.960,1	297.094,3	310.961,0	322,375.7
P	Jasa Pendidikan	623.549,4	655.602,4	685.126,0	727.149,8	768,654.8
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	107.794,6	114.103,3	120.873,7	131.001,3	139,551.3
R,S,T,U	Jasa lainnya	319.713,7	333.035,5	346.821,7	362.852,6	392,098.8
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		**8.455.436,**	**8.954.697,1**	**9.486.136,6**	**10.053.582,4**	**10,623,814.3**

Sumber : BPS Kota Madiun
*) Angka Sementara

Tabel I.11
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun
Tahun 2015-2019 (%)

Kategori		2015	2016	2017	2018	2019*
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,58	1,31	-1,78	1,78	-0.94
B	Pertambangan dan Penggalian	1,98	1,91	2,31	1,07	2.41
C	Industri Pengolahan	6,51	7,21	8,00	7,01	4.64
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3,73	3,86	4,91	5,45	6.69
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,58	3,82	6,84	4,44	4.52
F	Konstruksi	5,48	4,44	5,57	2,03	4.90
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,48	5,11	5,83	7,54	6.20
H	Transportasi dan Pergudangan	6,78	7,13	8,18	8,48	9.11
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,28	7,30	7,47	9,23	8.86
J	Informasi dan Komunikasi	8,13	6,64	6,77	5,34	4.58
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	7,52	7,11	3,88	4,08	4.79
L	Real Estate	6,76	5,64	4,22	3,57	5.96
M,N	Jasa Perusahaan	8,41	5,94	6,34	5,31	6.1
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,88	3,05	2,46	4,48	3.85
P	Jasa Pendidikan	6,30	5,14	4,50	4,21	7.65
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,35	5,85	5,93	7,38	7.52
R,S,T, U	Jasa lainnya	4,28	4,17	4,14	5,74	6.92
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		**6,15**	**5,90**	**5,93**	**5,98**	**5.69**

Sumber : BPS Kota Madiun
*) Angka Sementara

Jika dilihat pada tahun 2019, pertumbuhan tertinggi ditempati oleh sektor transportasi dan pergudangan (9,11%), disusul sektor penyediaan akomodasi dan makan minum (8,86%), dan sektor jasa pendidikan (7,65%). Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa sektor sekunder di Kota Madiun memiliki kinerja yang lebih baik.

Pertumbuhan yang tinggi pada sektor transportasi dan pergudangan disusul sektor penyediaan akomodasi dan makan minum karena ditopang oleh status Kota Madiun sebagai kota transit maupun pusat bisnis yang mendorong berdirinya jasa hotel dan rumah makan. Sedang sektor dengan pertumbuhan terendah yakni sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (-0,94%).

Untuk pertumbuhan ekonomi di wilayah eks Karesidenan Madiun yang meliputi Kabupaten Pacitan, Ponorogo, Madiun, Magetan, Ngawi, dan Kota Madiun, pertumbuhan ekonomi Kota Madiun selama kurun waktu 2015-2019 selalu lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah-wilayah tersebut. Data tersebut mengindikasikan bahwa Kota Madiun merupakan pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah barat Provinsi Jawa

Timur. Data mengenai pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota eks Karesidenan Madiun ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel I.12
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota
Di Wilayah Karesidenan Madiun Tahun 2015-2019

Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018	2019**
Kota Madiun	6,15	5,91	5,93	5,96	5,69
Madiun	5,26	5,27	5,42	5,10	
Magetan	5,17	5,30	5,09	5,25	
Ngawi	5,08	5,21	5,07	5,26	
Pacitan	5,10	5,21	4,98	5,51	
Ponorogo	5,25	5,29	5,10	5,31	

Sumber : BPS Kota Madiun
**) Angka Sangat Sementara

4. Inflasi

Secara umum inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan tingkat harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus selama waktu tertentu. Inflasi merupakan salah satu indikator penting yang dapat memberikan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Perkembangan harga barang dan jasa ini berdampak langsung terhadap tingat daya beli dan biaya hidup masyarakat.

Tingkat inflasi yang berfluktasi tinggi menggambarkan besarnya ketidakpastian nilai uang, tingkat produksi, distribusi dan arah perkembangan ekonomi, sehingga dapat membahayakan perekonomian secara keseluruhan. Sebaliknya inflasi yang rendah juga tidak menguntungkan perekonomian karena menggambarkan rendahnya daya beli dan permintaan masyarakat akan barang dan jasa yang pada gilirannya memperlambat pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, kestabilan dan pengendalian inflasi perlu dijaga agar pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Jika dilihat dari tingkat keparahannya, inflasi dibagi menjadi 4 tingkatan yaitu inflasi ringan ketika laju inflasi kurang dari 10% per tahun, inflasi sedang ketika laju inflasi antara 10-30% per tahun, inflasi berat saat lajunya berada di kisaran 30-100% per tahun, dan inflasi sangat berat/hiperinflasi ketika laju inflasi lebih dari 100% per tahun. Pengukuran inflasi di Indonesia hanya dilakukan di 66 kota dan salah satunya adalah Kota Madiun yang dijadikan rujukan bagi beberapa daerah di sekitar Kota Madiun.

Grafik I.1
Perkembangan Tingkat Inflasi
Kota Madiun Tahun 2015-2019

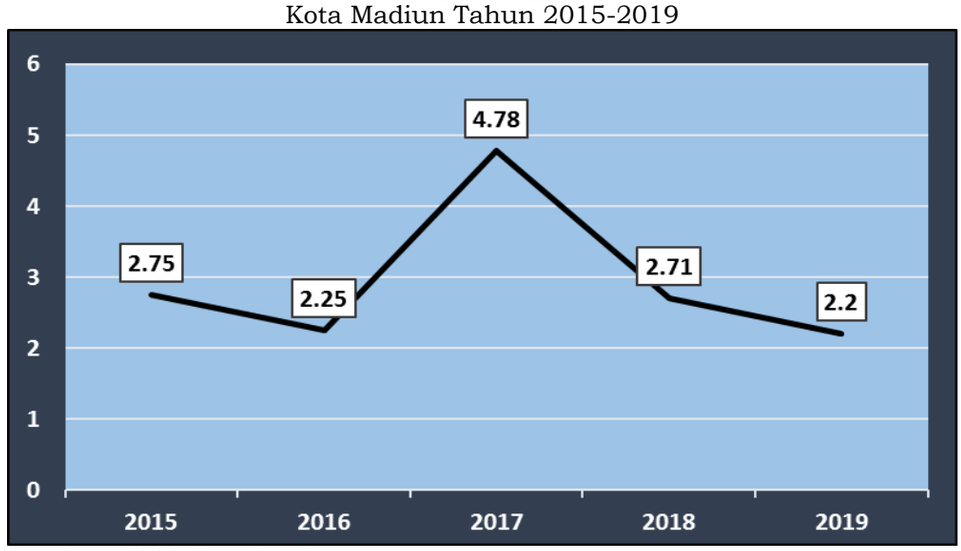

Sumber : BPS Kota Madiun

Inflasi terjadi karena adanya kenaikan Indeks Harga Konsumen pada kelompok Bahan Makanan sebesar 1,05 persen, kelompok Transpor, Komunikasi dan Jasa sebesar 0,59 persen, kelompok Kesehatan sebesar 0,23 persen, dan kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau sebesar 0,17 persen. Kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olah Raga mengalami deflasi sebesar 0,01 persen, kelompok Sandang sebesar 0,06 persen dan kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar sebesar 0,07 persen.

Tingkat inflasi tahun kalender Desember 2019 dan inflasi tahun ke tahun (Desember 2019 terhadap Desember 2018) masing-masing sebesar 2,20 persen. Kenaikan Indeks Harga Konsumen di Kota Madiun dipicu oleh naiknya harga pada beberapa komoditas yang dominan diantaranya: telur ayam ras, tarip kereta api, bawang merah, pepaya, dan tomat sayur.

Berdasarkan kelompok komoditas, dari 7 (tujuh) kelompok yang ada, 4 (empat) kelompok mengalami inflasi dan 3 (tiga) kelompok mengalami deflasi. Kelompok Bahan Makanan memberikan andil inflasi terbesar yaitu 0,1992 persen, disusul kelompok Transportasi, Komunikasi dan jasa Keuangan sebesar 0,1007 persen, kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau sebesar 0,0342 persen dan kelompok Kesehatan memberikan andil inflasi terendah sebesar 0,0131 persen. Kelompok yang mengalami deflasi tertinggi adalah kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar dengan andil sebesar -0,0168 persen, disusul kelompok Sandang dengan andil sebesar -0,0036 persen dan kelompok Pendidikan Rekreasi dan Olah raga dengan andil sebesar -0,0006 persen.

5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan bagi penduduk (*enlarging people choice*). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

Untuk menganalisis seberapa tinggi pembangunan manusia di suatu daearah dapat pula diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Perhitungan IPM terdiri dari tiga aspek dasar pembangunan manusia, yaitu aspek kesehatan, aspek pendidikan, dan aspek ekonomi. Aspek kesehatan direpresentasikan oleh angka harapan hidup, aspek pendidikan oleh indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, sedang aspek ekonomi ditunjukkan dengan indikator pengeluaran per kapita disesuaikan. Perhitungan IPM dalam ketiga aspek tersebut bukan hanya diterapkan di Indonesia tetapi juga menjadi rujukan negara-negara di dunia karena dianggap mampu merepresentasikan pembangunan manusia.

IPM merupakan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia di suatu daerah, sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang telah berjalan di daerah tersebut. Selain itu, IPM juga menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. Peningkatan atau penurunan angka IPM merupakan indikasi keefektifan kinerja pembangunan manusia di suatu daerah pada kurun waktu tertentu. Dan untuk perkembangan IPM di Kota Madiun adalah sebagai berikut :

Tabel I.13
Perkembangan IPM Kota Madiun Tahun 2015-2019

Kabupaten/ Kota	2015	2016	2017	2018	2019**
Kabupaten Pacitan	64,92	65,74	66,51	67,33	68,16
Kabupaten Ponorogo	68,16	68,93	69,26	69,91	70,56
Kabupaten Madiun	69,39	69,67	70,27	71,01	71,69
Kabupaten Magetan	71,39	71,94	72,60	72,91	73,69
Kabupaten Ngawi	68,32	68,96	69,27	69,91	70,41
Kota Madiun	79,48	80,01	80,13	**80,33**	**80,88**
Jawa Timur	**68,95**	**69,74**	**70,27**	**70,77**	**71,50**

Sumber : BPS Kota Madiun
**) Angka Sangat Sementara

IPM Kota Madiun mengalami kenaikan secara signifikan selama rentang waktu lima tahun terakhir, dan terus meningkat setiap tahunnya. Capaian IPM Kota Madiun sebesar 79,48 persen pada 2015 silam, dan pada Tahun 2019 IPM Kota Madiun mencapai 80,88. IPM di atas 80 persen merupakan kategori sangat tinggi. Sedang, dibawah 60 masuk kategori rendah.

IPM Kota madiun terus mengalami tren positif, dan diprediksi juga masih terjadi beberapa tahun kedepan. Hal itu dapat dilihat dari capaian sejumlah item yang mengalami tren serupa seperti bidang kesehatan dan pendidikan.

Angka Harapan Hidup (AHH)

Angka Harapan Hidup (AHH) adalah perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Indikator ini sering digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk di bidang kesehatan. Semakin tinggi AHH, memberikan indikasi bahwa semakin tinggi kualitas fisik penduduk suatu daerah. Angka harapan hidup (AHH) Kota Madiun juga mengalami peningkatan setiap tahun.

Angka Harapan Hidup di Kota Madiun Tahun 2019 mencapai 72,75 tahun. Artinya, rata-rata masyarakat Kota Madiun dapat mencapai usia 72 tahun lebih. Capaian ini juga terus mengalami peningkatan sejak 2015 lalu yang angkanya hanya 72,41. Ini tak terlepas dari peran Pemerintah dalam bidang kesehatan. Baik sejak bayi hingga lansia. Posyandu balita dan lansia cukup berjalan baik.

Tabel I.14
Angka Harapan Hidup Tahun 2015-2019

Tahun	AHH
2015	72,41
2016	72,44
2017	72,48
2018	72,59
2019*	72,75

Sumber : BPS Kota Madiun
**) Angka sementara

Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah

Indikator pendidikan yang merepresentasikan dimensi pengetahuan dalam IPM adalah harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Kedua indikator ini dapat dimaknai sebagai ukuran kualitas sumber daya manusia. Angka Harapan Lama Sekolah menggambarkan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh

anak pada umur tertentu di masa mendatang. Sementara indikator rata-rata lama sekolah menggambarkan rata-rata jumlah tahun yang dijalani oleh penduduk usia 25 tahun keatas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal.

Derajat pendidikan suatu daerah dapat dilihat dari rata-rata lama sekolah penduduknya. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah penduduk suatu daerah, maka dapat diartikan semakin tinggi tingkat pendidikan penduduk daerah tersebut dan diyakini memiliki sumber daya manusia lebih berkualitas.

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Madiun selama periode 2015-2019 selalu mengalami peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2015, angka HLS Kota Madiun hanya sebesar 14,06 tahun, kemudian meningkat setiap tahun menjadi 14,39 tahun pada tahun 2019. HLS sebesar 14,39 tahun pada tahun 2019 berarti bahwa lamanya sekolah yang akan dicapai oleh anak umur tertentu di masa yang akan datang adalah 14,39 tahun atau telah mencapai pendidikan di level perguruan tinggi. HLS di Kota Madiun masih berada di bawah HLS ideal yaitu sebesar 18 tahun sehingga pemerintah Kota Madiun harus memberikan prioritas dan pemantauan secara terus menerus terhadap program pembangunan pendidikan serta perbaikan sistem pendidikan di Kota Madiun.

Selama periode 2015-2019, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kota Madiun mengalami peningkatan setiap tahun walaupun tidak signifikan. RLS Kota Madiun pada tahun 2015 adalah sebesar 11,08 tahun, dan meningkat setiap tahunnya hingga menjadi sebesar 11,13 tahun pada tahun 2019. Berarti bahwa rata-rata penduduk di Kota Madiun baru mampu menempuh pendidikan hingga kelas 1 SMA atau putus sekolah pada kelas 2 SMA. Angka RLS Kota Madiun pada tahun 2019 lebih tinggi jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur yang sebesar 7,59 tahun. Walaupun angka RLS Kota Madiun lebih tinggi dibandingkan angka RLS Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kota Madiun harus terus menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai bagi masyarakatnya dan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat pendidikan formal.

Berbagai pelayanan pendidikan memang menjadi prioritas Pemerintah Kota Madiun. Peningkatan akses masyarakat pada layanan pendidikan menjadi salah satu kunci untuk mengurangi kesenjangan di masyarakat. Wajib belajar (Wajar) sembilan tahun hingga Bantuan Beasiswa Mahasiswa (BBM). Sarana dan prasarana pendidikan juga terus ditingkatkan diantaranya adalah wifi gratis di sejumlah fasilitas umum. Harapannya, masyarakat dapat meningkatkan kapasitas pendidikan

secara mandiri dengan akses informasi yang mudah. Disisi lain, juga didukung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, dimana selain peningkatan akses pada layanan pendidikan, Kemendikbud juga merevitalisasi fungsi sekolah, baik secara infrastruktur fisik maupun nonfisik. Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk pertama kalinya menggunakan zonasi. Hal tersebut dilakukan untuk menghilangkan dikotomi sekolah unggulan dan non unggulan. Dengan adanya sistem ini diharapkan dapat meratakan kualitas pendidikan, salah satunya adalah meningkatkan rata-rata lama sekolah.

Tabel I.15
Angka Harapan Lama Sekolah, Angka Rata-rata Lama Sekolah
Kota Madiun Tahun 2015-2019

Tahun	Angka Harapan Lama Sekolah	Angka Rata-rata Lama Sekolah
2015	14,06	11,08
2016	14,19	11,09
2017	14,20	11,10
2018	14,21	11,10
2019*	14,39	11,13

Sumber : BPS Kota Madiun
*) Angka sementara

Paritas Daya Beli

Daya beli merupakan kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya untuk barang dan jasa. Kemampuan ini sangat dipengaruhi oleh harga-harga riil antar wilayah, karena nilai tukar yang digunakan dapat menurunkan atau menaikkan nilai daya beli. Dengan demikian kemampuan daya beli antar satu wilayah dengan wilayah lain berbeda. Perbedaan kemampuan daya beli masyarakat antar wilayah masih belum terbanding, untuk itu perlu dibuat standarisasi. Dengan standarisasi ini perbedaan kemampuan daya beli masyarakat antar wilayah dapat dibandingkan. Kemampuan setiap orang untuk membeli/ mendapatkan barang dan jasa berbeda-beda tergantung dari pendapatan dan kebutuhannya.

Tabel I.16
Paritas Daya Beli (Rp) Kota Madiun
Tahun 2015-2019

Tahun	Daya Beli
2015	14.723
2016	15.300
2017	15.415
2018	15.616
2019*	16.040

Sumber : BPS Kota Madiun
**) Angka sementara

Perekonomian yang semakin membaik berdampak pada naiknya kemampuan daya beli masyarakat Kota Madiun. Tren peningkatan perekonomian tersebut tercemin dari peningkatan rata-rata pengeluaran riil per kapita. Dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan dari 14.723 rupiah pada tahun 2015 menjadi 16.040 rupiah pada tahun 2019, sehingga mengalami kenaikan sebesar 1.317 rupiah.

6. Kemiskinan

Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas kemampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Pengentasan kemiskinan selalu menjadi prioritas utama dalam kebijakan pembangunan oleh pemerintah. Berbagai upaya nyata di berbagai bidang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Madiun demi tercapainya upaya pengentasan kemiskinan, mulai dari program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan sosial, berbasis pemberdayaan masyarakat serta pemberdayaan usaha kecil.

Tabel I.17
Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin di Kota Madiun

Tahun	Garis Kemiskinan (Rupiah)	Penduduk Miskin	
		Jumlah	Persentase
2015	359.771	8.550	4,89
2016	376.956	9.050	5,16
2017	404.959	8.700	4,94
2018	446.525	7.920	4,49
2019*	468.304	7.690	4,35

Sumber : BPS Kota Madiun

Perkembangan penduduk miskin di Kota Madiun menunjukkan hasil yang menggembirakan dilihat dari terus menurunnya baik jumlah maupun persentase penduduk miskin selama periode 2015-2019. Hal ini tentunya disebabkan adanya pembangunan yang terus dilaksanakan dan memberikan hasil bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Madiun. Garis kemiskinan Kota Madiun pada Tahun 2019 berada pada level Rp 468.304,- per Kapita per Bulan atau meningkat hampir 24 ribu rupiah dibanding Garis kemiskinan pada tahun 2019. Walaupun terjadi kenaikan Garis Kemiskinan, jumlah penduduk miskin pada tahun 2018 di Kota madiun justru berkurang 230 jiwa dari 2018 sebesar 7,92 ribu orang (4,49%) menjadi 7,69 ribu orang (4,35%) di 2019.

Tabel I.18
Penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota di wilayah karesidenan Madiun

Kabupaten/ Kota	2015	2016	2017	2018	2019*
Kabupaten Pacitan	92,08	85,53	85,26		
Kabupaten Ponorogo	103,22	102,06	99,03		
Kabupaten Madiun	84,74	85,97	83,43		
Kabupaten Magetan	71,16	69,24	65,87		
Kabupaten Ngawi	129,32	126,65	123,76		
Kota Madiun	8,55	9,05	8,70	7,92	**7,69**

Sumber : BPS Kota Madiun

Tren penurunan kemiskinan di Kota Madiun hingga tahun 2019 terus menunjukan kinerja yang sangat baik karena pada tahun ini kembali terjadi penurunan persentase penduduk miskin hingga level 4,35%, meski pada 2015 dan 2016 sempat mengalami sedikit kenaikan. Jumlah penduduk miskin di Kota Madiun akan mengalami peningkatan lagi jika banyak penduduk Kota Madiun masuk dalam golongan rawan miskin (*vulnerable*). Golongan *vulnerable* merupakan penduduk yang pengeluarannya berada persis di atas garis kemiskinan namun jaraknya tidak terlalu jauh. Peningkatan tersebut dapat terjadi karena adanya guncangan misalnya kenaikan harga BBM yang mengakibatkan harga-harga kebutuhan pokok naik dan hal tersebut sangat berpengaruh terhadap penduduk miskin.

Tabel I.19
Kantong Kemiskinan di Kota Madiun Tahun 2019

Kecamatan/ Kelurahan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (Km^2)	Penduduk Miskin (Jiwa)
Kecamatan Kartoharjo	**57.748**	**10,73**	**2.368**
1. Kelurahan Kartoharjo	5.215	0,94	359
2. Kelurahan Oro oro ombo	6.922	0,81	292
3. Kelurahan Klegen	8.871	0,84	253
4. Kelurahan Kanigoro	9.328	1,62	291
5. Kelurahan Pilangbango	4.606	1,21	315
6. Kelurahan Rejomulyo	10.797	2,03	432
7. Kelurahan Sukosari	3.106	0,55	114
8. Kelurahan Tawangrejo	4.224	1,77	159
9. Kelurahan Kelun	4.679	0,96	153
Kecamatan Manguharjo	**63.017**	**10,04**	**2.655**
1. Kelurahan Nambangan kidul	10.322	1,02	456
2. Kelurahan Nambangan lor	13.411	0,98	719
3. Kelurahan Manguharjo	7.958	1,4	344
4. Kelurahan Pangongangan	3.706	0,61	254
5. Kelurahan Winongo	7.861	2,00	310
6. Kelurahan Madiun lor	6.898	0,73	208
7. Kelurahan Patihan	5.480	0,84	149

Kecamatan/ Kelurahan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (Km^2)	Penduduk Miskin (Jiwa)
8. Kelurahan Ngegong	3.156	1,34	111
9. Kelurahan Sogaten	4.225	1,12	104
Kecamatan Taman	**89.350**	**12,46**	**3.439**
1. Kelurahan Josenan	7.483	1,06	487
2. Kelurahan Kuncen	1.434	1,83	93
3. Kelurahan Demangan	9.551	1,26	603
4. Kelurahan Banjarejo	9.179	1,92	463
5. Kelurahan Pandean	10.641	0,32	261
6. Kelurahan Kejuron	9.951	1,59	378
7. Kelurahan Taman	13.172	2,02	374
8. Kelurahan Mojorejo	11.669	1,54	427
9. Kelurahan Manisrejo	16.270	0,92	353

Sumber data : Dinas Sosial dan PPPA

7. Ketenagakerjaan

Tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah sangat tergantung pada potensi sumber daya yang dimiliki daerah tersebut. Salah satu indikator yang biasa dipakai dalam melihat tingkat kesejahteraan masyarakat adalah laju pertumbuhan angkatan kerja yang terserap di lapangan pekerjaan. Tingginya angkatan kerja di suatu daerah akan menggerakkan perekonomian daerah tersebut.

- Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah situasi yang menggambarkan jumlah angkatan kerja dalam suatu kelompok umum sebagai presentase penduduk dalam kelompok umur tersebut.

Grafik I.2
Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Kota Madiun Tahun 2015-2019

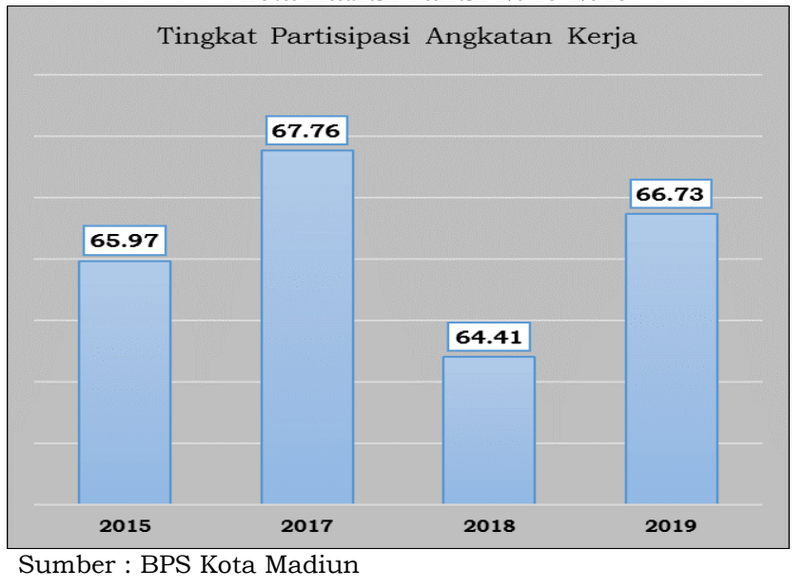

Sumber : BPS Kota Madiun

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Madiun dari tahun ke tahun cenderung meningkat, dimana pada tahun 2015 adalah sebesar 65,95 persen menjadi 66,73 persen pada tahun 2019. TPAK merupakan indikator yang menggambarkan seberapa banyak dari penduduk usia kerja yang aktif bekerja dan aktif mencari pekerjaan. Daya serap pasar kerja terbatas serta masalah permintaan tenaga kerja dengan tingkat keahlian khusus menyebabkan banyaknya angkatan kerja tidak terserap atau menganggur.

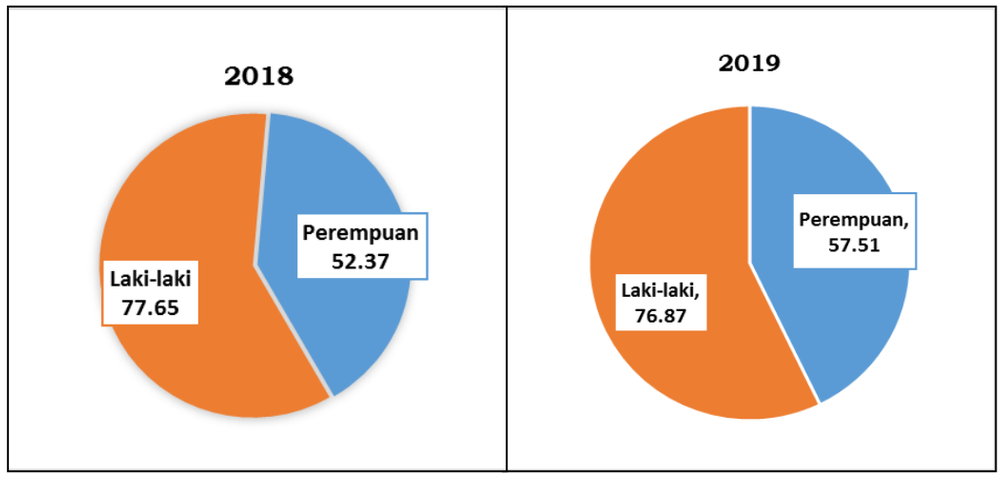

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) jika dilihat berdasarkan jenis kelamin seperti grafik di atas menunjukkan bahwa dari tahun 2018 ke tahun 2019 TPAK laki-laki selalu lebih besar dibandingkan perempuan, TPAK laki-laki pada tahun 2018 sebesar 77,66 persen sedangkan perempuan hanya 52,37 persen, demikian juga pada tahun 2019 TPAK laki laki sebesar 76,87 persen sementara perempuan hanya 57,51 persen. TPAK perempuan pada tahun 2019 mencapai 57,51 persen menggambarkan bahwa dari 100 orang usia kerja perempuan (perempuan 15 tahun ke atas) 58 orang masuk dalam kategori angkatan kerja (bekerja dan pengangguran) sedangkan 42 orang masuk dalam kategori bukan angkatan kerja (sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya selain kegiatan pribadi).

- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pengangguran terbuka atau sering juga diistilahkan dengan pengangguran penuh adalah jumlah penduduk usia kerja yang sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan usaha, atau merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, atau sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Tingkat Pengangguran Terbuka adalah perbandingan antara jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja.

TPT di Kota Madiun tercatat 5,1 di tahun 2015 dan terus mengalami penurunan dan pada tahun 2019 TPT Kota Madiun mencapai 4,01 persen, meskipun TPT ini sedikit mengalami kenaikan apabila dibandingkan tahun 2018 yang TPT nya 3,85 persen atau naik sebesar 0,16 persen.

Grafik I.3
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka
Kota Madiun Tahun 2015-2019

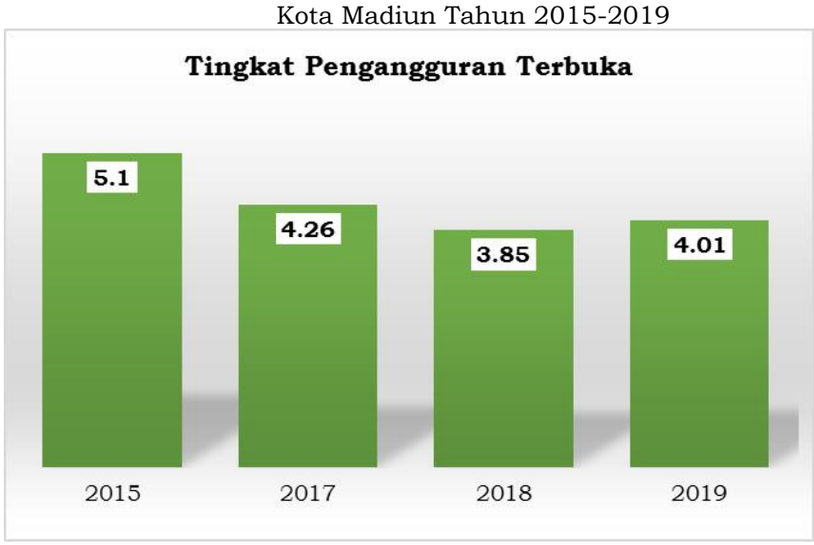

Sumber Data : BPS Kota Madiun

Kenaikan angka TPT di Kota Madiun terjadi karena jumlah angkatan kerja yang ada juga mengalami kenaikan pada periode yang sama, ada pergeseran dari mereka yang statusnya bukan angkatan kerja pada tahun 2018 menjadi angkatan kerja pada tahun 2019.

Lebih detailnya penduduk usia kerja di Kota Madiun tahun 2018 sebagian besar adalah penduduk yang bekerja dengan jumlah mencapai 86.875 jiwa, mengurus rumah tangga sebesar 32.708 jiwa, sekolah sebesar 11.526 jiwa, lainnya 5.698 jiwa dan pengganggguran sebesar 3.483 jiwa.Sedangkan untuk kondisi tahun 2019 penduduk bekerja sebesar 90.329 jiwa, mengurus ruta 28.445, sekolah 13.199, lainnya 5.273 dan pengangguran 3.776 jiwa.

Tabel I.20
Penduduk Usia 15 Tahun ke atas menurut kegiatan Agustus
Tahun 2018-2019

Kegiatan	2018	2019
Angkatan Kerja	**90.358**	**94.105**
- Bekerja	86.875	90.329
- Pengangguran	3.483	3.776
Bukan Angkatan Kerja	**49.932**	**46.917**
- Sekolah	11.526	13.199
- Mengurus Rumah tangga	32708	28.445
- Lainnya	5.698	5.273
Jumlah	**140.290**	**141.022**

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Madiun

Kenaikan jumlah angkatan kerja juga dibarengi dengan jumlah Bekerja dan pengangguran yang naik pada tahun 2019 jumlah penduduk bekerja naik sebesar 3.454 jiwa atau naik sebesar 3.97 persen. Sedangkan pengangguran naik dari 3.483 menjadi 3.776 atau naik sebesar 293 jiwa atau 8.41 persen.

Penurunan bukan angkatan kerja dari 2018 ke 2019 dibarengi dengan penurunan jumlah penduduk yang mengurus rumah tangga dan melakukan kegiatan lainnya. Penduduk yang mengurus rumah tangga turun dari 32.708 jiwa menjadi 28.445 turun sebesar 4.263 jiwa atau 13,03 persen. Untuk penduduk yang melakukan kegiatan lainnya turun dari 5.698 menjadi 5.273, turun sebesar 425 jiwa atau 7,45 persen. Sedangkan untuk penduduk sekolah justru mengalami kenaikan sebesar 1.673 jiwa (14,51 persen) atau naik dari 11.526 menjadi 13.199 jiwa.

Untuk tahun 2019 kedaaan ketenagakerjaan apabila dibedakan berdasarkan jenis kelamin maka kelompok angkatan kerja lebih didominasi oleh laki-laki dengan penduduk bekerja laki laki yaitu sebanyak 49.032 jiwa sedangkan pekerja perempuan hanya 41.297 jiwa. Untuk pengangguran juga lebih banyak pengangguran laki-laki daripada pengangguran perempuan yaitu laki laki sebanyak 2.598 dan perempuan 1.178. Sedangkan perempuan lebih mendominasi pada kelompok bukan angkatan kerja yaitu pada kegiatan sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya.

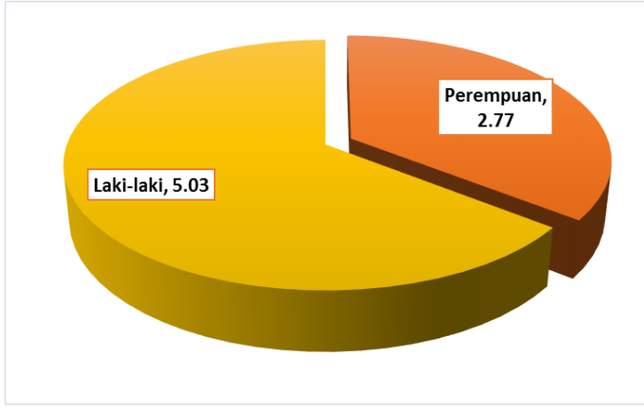

Sumber Data : BPS Kota Madiun

Apabila dilihat berdasarkan jenis kelamin maka TPT laki-laki pada tahun 2019 lebih besar dibandingkan TPT perempuan. Dari 100 orang angkatan kerja laki-laki yang berusia 15 tahun keatas ada sekitar 5 orang yang menganggur sedangkan pada perempuan dari 100 orang angkatan kerja perempuan hanya ada 3 orang yang menganggur.

Jumlah pengangguran terbuka tahun 2019 sejumlah 3.776 orang tersebut di atas dapat dikelompokan sebagai berikut :

No	Kategori	Jumlah
1	Tidak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan	2.735
2	Tidak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha	272
3	Tidak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan	171
4	Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja	598

Sumber data: Badan Pusat Statistik Kota Madiun

8. Pendapatan Per Kapita

Pendapatan per kapita adalah ukuran jumlah uang yang diperoleh per orang di suatu negara atau wilayah geografis. Pendapatan per kapita dapat digunakan untuk menentukan pendapatan rata-rata per orang untuk suatu daerah dan untuk mengevaluasi standar hidup dan kualitas hidup penduduk. Pendapatan per kapita untuk suatu wilayah Kota/Kabupaten dihitung dengan membagi pendapatan regional wilayah Kota/Kabupaten tersebut dengan penduduknya.

Sedangkan Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Makanan dan Bukan Makanan di Kota Madiun dan Provinsi Jawa Timur sebagai berikut :

	Kota Madiun			Jawa Timur		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Makanan	584,040	650,775	604,752	476,861	502,761	502,892
Bukan Makanan	782,304	814,793	838,459	461,940	503,317	533,285
Jumlah	**1,366,344**	**1,465,568**	**1,443,211**	**938,801**	**1,006,078**	**1,036,177**

9. Gini Ratio

Tingkat ketimpangan atau kesenjangan pengeluaran penduduk, diukur dengan menggunakan indikator Gini Ratio dan Distribusi pengeluaran menurut World Bank. Koefisien Gini atau Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama.

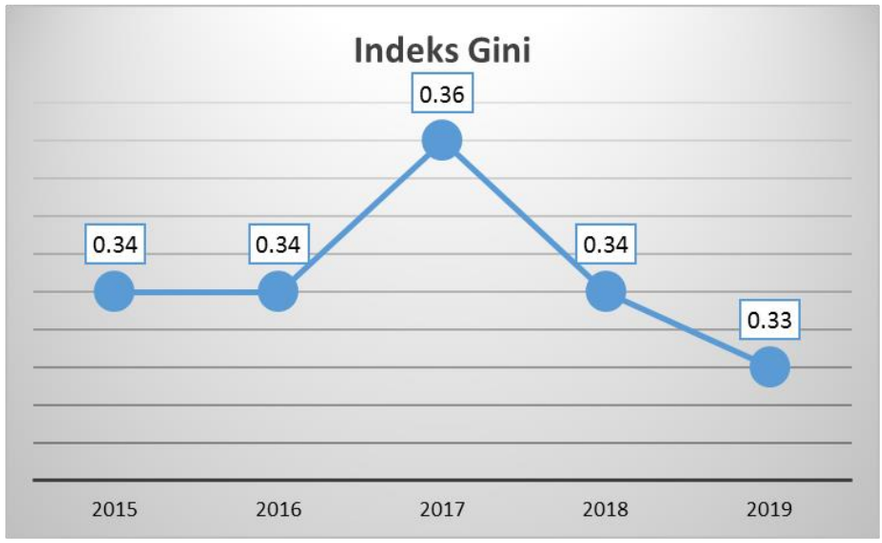

Pada Tahun 2019 Gini Ratio Kota Madiun tercatat sebesar 0,33 hal ini jauh lebih baik jika dibandingkan dengan Gini Ratio Provinsi Jawa Timur sebesar 0,37 sedangkan Nasional sebesar 0,38.

C. Sistematika

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Madiun Tahun 2019, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, menggunakan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Uraian tentang Dasar Hukum, Gambaran Umum Daerah (Kondisi Geografis, Gambaran Umum Demografis dan Kondisi Ekonomi), Indikator Kinerja Makro (Indeks Pembangunan Manusia, Angka Kemiskinan, Angka Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Perkapita dan Indeks Gini).

BAB II : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

Uraian tentang Visi dan Misi Kepala Daerah, Strategi dan Arah Kebijakan serta Prioritas Pembangunan Daerah.

BAB III : URUSAN KONKUREN, FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Uraian tentang Implementasi Kebijakan dan hasil-hasil pembangunan terhadap Urusan Wajib, Pilihan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Urusan Pemerintahan Umum pada Tahun 2019.

BAB IV : REALISASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) TAHUN 2019

Uraian tentang Implementasi pelaksanaan program nasional yang dilaksanakan oleh Pemerintah daerah berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019.

BAB V : TUGAS PEMBANTUAN

Uraian tentang implementasi kebijakan terhadap pelaksanaan Tugas Pembantuan yang diterima dan diberikan pada Tahun 2019.

BAB VI : TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

Uraian tentang implementasi kebijakan terhadap pelaksanaan Tugas Umum Pemerintahan pada Tahun 2019.

BAB VII : PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM

BAB VIII : AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH

BAB IX : PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH

Untuk mewujudkan visi dan misi, beserta tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, diperlukan penetapan mengenai upaya mencapai tujuan dan sasaran misi tersebut dalam bentuk strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperehensif tentang bagaimana mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Strategi dan arah kebijakan pencapaian tujuan dan sasaran masing-masing misi dilaksanakan berpedoman pada ”payung besar” strategi umum yang menjadi landasan utama pembangunan utama pembangunan Kota Madiun 2014-2019.

A. VISI DAN MISI

Visi Kota Madiun pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Madiun Tahun 2014-2019 sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2014 Tahun 2014 adalah **“Terwujudnya Kota Madiun yang lebih Maju dan Sejahtera”.**

Visi tersebut diatas, memiliki makna yang sangat dalam dan mendasar serta strategis, sebagai landasan bagi seluruh masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di Kota Madiun.

Lebih Maju diartikan bahwa Kota Madiun senantiasa meningkatkan kualitas pembangunan disegala bidang untuk mewujudkan daerah yang modern menurut ukuran dan tuntutan nilai-nilai universal yang tidak menyimpang dan atau bertentangan dengan nilai-nilai agama, tidak bertentangan dengan adat istiadat dan tidak berseberangan dengan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang berkembang di masyarakat. Sedangkan inti dari **kesejahteraan** adalah kondisi masyarakat yang relatif terpenuhi kebutuhan hidupnya baik spiritual maupun material secara layak dan berkeadilan sesuai dengan perannya dalam kehidupan. Implementasinya adalah mewujudkan Kota Madiun yang maju, sehingga diharapkan akan memberi dampak pada upaya meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakatnya.

Misi merupakan komitmen untuk melaksanakan agenda-agenda utama yang menjadi penentu keberhasilan pencapaian visi pembangunan daerah.Dengan rumusan misi yang baik akan dapat membantu memberi gambaran tentang visi yang ingin dicapai dan menjelaskankan langkah-langkah upaya yang perlu dilakukan untuk mencapai visi. Rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka berfikir dan kerangka bertindak untuk mencapai tujuan, sasaran dan arah kebijakan yang ingin dicapai dan merumuskan peta jalan yang akan dilalui untuk mencapai visi dimaksud.

Dan sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan Pemerintah Kota Madiun, dirumuskan misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan pembangunan berbasis pada partisipasi masyarakat (Partisipatoris).
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik.
4. Meningkatkan dan memeratakan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Pada Tahun 2018 Kota Madiun telah melaksanakan pesta demokrasi dengan terpilihnya **Walikota Madiun Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd dan Wakil Walikota Madiun INDA RAYA AYU MIKO SAPUTRI, SE, MIB** yang dilantik pada tanggal 29 April 2019 sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah periode Tahun 2019-2024 setelah terbit keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.35-8262 Tahun 2018 tanggal 12 Oktober 2018 sebagai tindak lanjut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun Nomor : 49/PL.03-Kpt/3577/KPU-Kot/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2018. Untuk mengimplementasikan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih tersebut juga diperlukan instrumen perencanaan pembangunan daerah yang berisi upaya sistematis yang dilengkapi dengan langkah-langkah strategis, taktis dan praktis serta penetapan tahapan-tahapan serta prioritas yang bertolak dari sejarah, karakter sumber daya yang dimiliki dan tantangan yang sedang dihadapi, baik dalam jangka panjang, menengah dan tahunan.

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024 yang merupakan penjabaran dari Visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kota Madiun adalah :

“Terwujudnya Pemerintahan Bersih
Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera”

Makna substantif visi di atas diturunkan dari pokok-pokok visi sebagaimana berikut :

1. **Bersih** mempunyai makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang terhindar dari praktik KKN, mengedepankan pelayanan prima yang didukung oleh profesionalisme aparatur, transparansi dan akuntabel.
2. **Berwibawa** mempunyai makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan ke depan mendengarkan aspirasi masyarakat, mengedepankan keterbukaan informasi publik, dan adanya kepemimpinan publik yang dihormati dalam mendorong peningkatan kinerja.
3. **Sejahtera** mempunyai makna bahwa kondisi masyarakat yang mampu melangsungkan kehidupan individu maupun kelompok secara layak, sehat dan produktif, adanya ketenteraman lahir batin serta tidak diliputi oleh rasa takut.

Memperhatikan perubahan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang dan dalam rangka mewujudkan Visi Kota Madiun 2019-2024, maka misi pembangunan daerah Kota Madiun pada periode 2019-2024 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*);
2. Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan;
3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Madiun;
4. Mewujudkan kemandirian ekonomi dan memeratakan tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Madiun.

Misi pembangunan Kota Madiun tersebut disarikan dalam **PANCA KARYA** yang melekat dalam semboyan Kota Madiun, yaitu : **PENDEKAR**. Panca Karya dalam akronim PENDEKAR tersebut meliputi: **PINTAR, MELAYANI, MEMBANGUN, PEDULI dan TERBUKA yang KHARISMATIK**.

Berbagai misi dan orientasi pembangunan akan dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan dimana setiap tujuan dan sasaran tersebut akan dicapai melalui program kegiatan pembangunan pada setiap tahunnya.

Dengan demikian, tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan penegasan kembali tentang visi dan misi RPJMD Kota Madiun secara lebih detil, terinci, serta tergambar dengan jelas yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kerangka kinerja pembangunan secara keseluruhan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Selanjutnya masih tetap berpedoman pada rumusan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kota Madiun Tahun 2014 – 2019 sebagaimana tersebut diatas, maka rumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang dilaporkan dalam tahun terakhir LKPJ 2019, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Berdasarkan tujuan “Terwujudnya Partisipasi Pemangku Kepentingan (stakeholder) dalam Pembangunan” ditetapkan sasaran :
   a. Meningkatnya partisipasi masyarakat dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan ;
   b. Meningkatnya pemberdayaan perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan.
2. Berdasarkan tujuan “Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang baik” ditetapkan sasaran :
   a. Meningkatnya tata kelola birokrasi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah ;
   b. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Berdasarkan tujuan “Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas pendidikan” ditetapkan sasaran : meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas pendidikan.
4. Berdasarkan tujuan “Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat” ditetapkan sasaran : meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat.
5. Berdasarkan tujuan “Meningkatnya kualitas infrastruktur, prasarana transportasi, serta daya dukung kota yang berwawasan lingkungan” ditetapkan sasaran :
   a. Meningkatnya kualitas infrastruktur, permukiman dan prasarana transportasi kota ;
   b. Meningkatnya penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup.
6. Berdasarkan tujuan “Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat” ditetapkan sasaran :
   a. Meningkatnya iklim investasi yang kondusif dan penyerapan tenaga kerja ;
   b. Meningkatnya kontribusi sektor Perdagangan besar dan eceran, Reparasi mobil dan motor serta Industri Pengolahan Terhadap Perekonomian Daerah ;
   c. Meningkatnya kontribusi sektor komunikasi dan informasi terhadap perekonomian daerah ;
   d. Terwujudnya stabilitas ketersediaan pangan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.
7. Berdasarkan tujuan “Mewujudkan stabilitas kehidupan sosial masyarakat yang dinamis dan kondusif” ditetapkan sasaran :
   a. Meningkatnya kerukunan dalam kehidupan masyarakat yang berbudaya ;
   b. Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan

Tabel I.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran
Kota Madiun 2014 – 2019

VISI : Terwujudnya Kota Madiun Yang Lebih Maju Dan Sejahtera			
No	**Tujuan**	**Sasaran**	**Indikator Kinerja Sasaran**
	MISI 1 : Mewujudkan pembangunan berbasis pada partisipasi masyarakat		
1.	Terwujudnya Partisipasi Pemangku Kepentingan (stake holder) dalam Pembangunan	Meningkatnya partisipasi masyarakat dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Jumlah kelompok Masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
		Meningkatnya pemberdayaan perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
			Indeks Pembangunan Gender (IPG)
	MISI 2 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa		
1.	Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya tata kelola birokrasi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah
			Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah daerah
			Indeks Kepuasan Masyarakat
		Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah
	MISI 3 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan Publik		
1.	Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah
			Angka Harapan Lama Sekolah
			Angka Melek Huruf
2.	Meningkatkan derajat kesehatan masya rakat	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)
			Angka Kematian Ibu (AKI)
			Angka Kematian Bayi (AKB)
3.	Meningkatnya kualitas infra struktur, prasarana transpor tasi, serta daya dukung kota yang berwawasan lingkungan	Meningkatnya kualitas infrastruktur, permukiman dan prasarana transportasi kota	Rasio Panjang Jalan Kota dalam kondisi baik
			Rasio Rumah layak Huni
			Persentase Penurunan Angka Kecelakaan
		Meningkatnya penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
			Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH)
	Misi 4 : Meningkatkan dan memeratakan tingkat kesejahteraan masyarakat		
1.	Meningkatkan per tumbuhan ekonomi dan peme rataan kesejah teraan masya rakat	Meningkatnya iklim investasi yang kondusif dan penyerapan tenaga kerja	Nilai realisasi Investasi
			Tingkat Pengangguran Terbuka
		Meningkatnya Kontribusi Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor serta industri pengolahan terhadap	Kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor terhadap PDRB
			Kontribusi sektor Industri

VISI : Terwujudnya Kota Madiun Yang Lebih Maju Dan Sejahtera			
No	**Tujuan**	**Sasaran**	**Indikator Kinerja Sasaran**
		perekonomian daerah	pengolahan terhadap PDRB
		Meningkatnya Kontribusi sektor komunikasi dan informasi terhadap perekonomian daerah	Kontribusi sektor komunikasi dan informasi terhadap PDRB
		Terwujudnya stabilitas ketersediaan pangan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat	Rasio Ketersediaan Pangan Utama
			PDRB Perkapita
			Indeks Gini
2.	Mewujudkan stabilitas kehidupan sosial masyarakat yang dinamis dan kondusif	Meningkatnya kerukunan dalam kehidupan masyarakat yang berbudaya	Persentase Konflik bermotif SARA yang terselesaikan
		Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	Angka kriminalitas tertangani
			Angka pelanggaran ketertiban umum

Sumber data : RPJMD Kota Madiun Tahun 2014-2019

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi menjadi salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah *(strategy focussed-management)*. Untuk mencapai tujuan dan sasaran atas misi yang telah ditetapkan diperlukan arah misi atau orientasi pembangunan. Adapun kebijakan umum pembangunan sebagaimana tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun Tahun 2014–2019 adalah sebagai berikut :

1. Strategi dalam misi mewujudkan pembangunan berbasis pada partisipasi masyarakat meliputi :
   a. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan melalui arah kebijakan Peningkatan partisipasi masyarakat dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan
   b. Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan untuk berpartisipasi dalam Pembangunan melalui arah kebijakan Peningkatan Pemberdayaan Perempuan untuk Berpartisipasi dalam Pembangunan
2. Strategi dalam misi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa meliputi :
   a. Meningkatkan tata kelola birokrasi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah melalui arah kebijakan Peningkatan tata kelola birokrasi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

b. Meningkatkan Pengelolaan Keuangan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui arah kebijakan Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

3. Strategi dalam misi meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik meliputi :
   a. Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan pada semua jenjang pendidikan melalui arah kebijakan Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan pada semua jenjang pendidikan.
   b. Meningkatkan Kualitas Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat melalui arah kebijakan Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat.
   c. Meningkatkan kualitas infrastruktur, permukiman dan Sarana Prasarana transportasi melalui arah kebijakan Peningkatan kualitas infrastruktur, permukiman dan Sarana prasarana transportasi.
   d. Meningkatkan penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup melalui arah kebijakan Peningkatan penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup.
4. Meningkatan dan memeratakan tingkat kesejahteraan masyarakat merupakan misi keempat. Strategi yang dipilih untuk mecapai sasaran antara lain:
   a. Meningkatkan iklim investasi yang kondusif serta penyerapan tenaga kerja melalui arah kebijakan Peningkatan iklim investasi yang kondusif serta penyerapan tenaga kerja.
   b. Meningkatkan kontribusi sektor Perdagangan besar dan eceran, Reparasi mobil dan motor serta Industri Pengolahan Terhadap Perekonomian Daerah melalui arah kebijakan Peningkatan kontribusi sektor Perdagangan besar dan eceran, Reparasi mobil dan motor serta Industri Pengolahan Terhadap Perekonomian Daerah.
   c. Meningkatkan kontribusi sektor komunikasi dan informasi terhadap perekonomian daerah melalui arah kebijakan Peningkatan kontribusi sektor komunikasi dan informasi terhadap perekonomian daerah.
   d. Meningkatkan stabilitas ketersediaan pangan serta pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui arah kebijakan Peningkatan stabilitas ketersediaan pangan serta pemerataan kesejahteraan masyarakat.
   e. Meningkatkan kerukunan dalam kehidupan masyarakat yang berbudaya melalui arah kebijakan Peningkatan kerukunan dalam kehidupan masyarakat yang berbudaya.
   f. Meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan melalui arah kebijakan Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan.

C. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kota Madiun merupakan integrasi kebijakan pembangunan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Capaian Kinerja program daerah serta permasalahan tantangan yang harus dihadapi.

Mengacu kepada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2014-2019 Kota Madiun dan arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi, serta dengan memperhatikan kondisi, aspirasi dan kebutuhan masyarakat Kota Madiun, Prioritas Pembangunan Tahun 2019 Kota Madiun adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan untuk meningkatkan kualiats SDM serta percepatan penanggulangan kemiskinan ;
2. Peningkatan Infrastruktur untuk peningkatan pertumbuhan Ekonomi dan Sanitasi Kota untuk meningkatkan kualitas hidup ;
3. Peningktan daya saing perekonomian daerah ;
4. Peningkatan ketahanan pangan serta kualitas lingkungan hidup ;
5. Peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta fasilitasi penyelenggaraan pemilu yang sukses

D. INDIKATOR KINERJA

Dalam upaya mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi hasil, maka untuk masing-masing indikator sasaran yang akan dicapai pada penyelenggaraan urusan pemerintahan baik yang bersifat wajib terkait dengan pelayanan dasar, wajib tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pilihan, serta urusan penunjang, maka pengukuran kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Kota Madiun sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah di Kota Madiun sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun Tahun 2014-2019, menggunakan indikator kinerja sebagai berikut:

1. **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR :**
   - **A. Urusan Pendidikan,** diarahkan untuk mencapai sasaran dengan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah sebagai berikut :
     1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat ditunjukkan melalui indikator kinerja:

a. Angka melek huruf
b. Angka Rata-Rata Lama Sekolah
c. Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A
d. Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B
e. Angka partisipasi murni SD/MI/Paket A
f. Angka partisipasi murni SMP/MTs/Paket B
g. Pendidikan yang Ditamatkan
h. Pendidikan Dasar
i. Angka Harapan Lama Sekolah

2. Aspek Pelayanan Umum ditunjukkan melalui indikator kinerja:
   a. Angka partisipasi sekolah
   b. Rasio ketersedian sekolah/penduduk usia sekolah
   c. Rasio guru/murid
   d. Rasio guru/murid per kelas rata-rata
   e. Angka Partisipasi Murni SD/SMP
   f. Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik
   g. Sekolah pendidikan SMP/Mts dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik
   h. APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
   i. Angka putus sekolah SD/MI, SMP/MTs SMA/SMK/MA
   j. Rata-rata Angka Putus Sekolah
   k. Angka kelulusan SD/MT, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA
   l. Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs dan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA
   m. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/S2/S3
   n. Rata-rata Angka Kelulusan
   o. Pengolahan database informasi pendidikan, dan evaluasi pelaporan berbasis TIK
   p. Satuan pendidikan semua jenjang melaksanakan manejemen berbasis sekolah
   q. Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang mengikuti Pelatihan Profesional

B. Urusan Kesehatan diarahkan untuk mencapai sasaran dengan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah sebagai berikut :

1. Aspek kesejahteraan masyarakat ditunjukan dengan indikator kinerja
   a. Angka Kelangsungan Hidup bayi
   b. Angka Harapan Hidup
   c. Persentase Balita Gizi Buruk

d. Prosentase Pelayanan Kesehatan Dasar pada Bayi, Balita, Anak Remaja dan Ibu sesuai standart yang mencapai target
e. Prosentase Balita Gizi Kurang

2. Aspek pelayanan umum ditunjukan dengan indikator kinerja :
   a. Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per 1.000 penduduk
   b. Jumlah Puskesmas PONED
   c. Rasio Rumah Sakit per 1.000 penduduk
   d. Rasio dokter per 100.000 penduduk
   e. Rasio tenaga kesehatan lainnya per 1.000 penduduk
   f. Puskesmas berstandar ISO
   g. SOP Pelayanan
   h. Cakupan Masyarakat Miskin yang Terlayani
   i. Cakupan kelurahan siaga aktif
   j. Prosentase Rumah Tangga ber-PHBS
   k. Cakupan kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
   l. cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD
   m. angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup
   n. Prosentase Rumah Tangga Sehat
   o. Prosentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Pra Bayar
   p. Jumlah Kasus KLB
   q. Prosentase Penanganan Penyakit
   r. Prosentase Kelurahan Ber STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)
   s. Prosentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
   t. Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Madiun
   u. Persentase Pencapaian Kinerja Badan Layanan Umum Daerah
   v. Prosentase Produk Makanan Olahan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang dinilai memenuhi Syarat
   w. Prosentase Sarana dan Prasarana Rumah Sakit yang sesui Standart
   x. rosentase Penduduk yang di skrining Faktor Resiko PTM
   y. Prosentase Kelurahan Siaga Aktif Berstrata PURI
   z. Jumlah Sarana Pelayanan Kesehatan yang beroperasi sesuai perundangan
   aa. Prosentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai Standart
   bb. Prosentase TTU dan TPM sehat
   cc. Prosentase Kecukupan alat kesehatan di puskesmas dan jaringannya
   dd. Prosentase Kematian Akibat Penyakit Potensial Wabah
   ee. Angka Kematian Bayi

C. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diarahkan untuk mencapai sasaran dengan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah sebagai berikut:

1. Aspek pelayanan umum ditunjukan dengan indikator kinerja :
   a. Rasio Panjang jalan dalam kondisi baik
   b. Rasio Panjang jalan yang bisa dilalui roda 4
   c. Rasio Panjang jalan yang memiliki trotoar
   d. Persentase Drainase dalam kondisi baik/pembuangan air tidak tersumbat
   e. Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar
   f. Panjang jalan memiliki drainase
   g. Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima
   h. Jumlah Ruas Jalan yang diusulkan Pemeliharaannya
   i. Prosentase Tersedianya Informasi Data Base Jalan
   j. Persentase Kualitas Pelayanan Jasa Konstruksi Berdasarkan SPM
   k. Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan
   l. Persentase Bangunan Ber IMB
   m. Ruang Terbuka Hijau Kondisi Baik
   n. Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH)
2. Aspek daya saing daerah ditunjukan dengan indikator kinerja :
   a. Ketaatan terhadap RTRW
   b. Luas wilayah kebanjiran
   c. Luas Wilayah Perkotaan
   d. Tingkat Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap RTRW
   e. Meningkatnya Jumlah Kawasan Bebas Banjir
   f. Jumlah Dokumen Perencanaan Tata Ruang
   g. Tersedianya Pedoman Perencanaan Teknis Tata Ruang
   h. Persentase Pemanfaatan Ruang

D. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman diarahkan untuk mencapai sasaran dengan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah :

1. Aspek pelayanan umum ditunjukan dengan indikator kinerja :
   a. Rumah tangga pengguna air bersih
   b. Rumah tangga pengguna listrik
   c. Persentase rumah tinggal bersanitasi
   d. Rasio rumah layak huni
   e. Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk
   f. Lingkungan pemukiman kumuh
   g. Rasio Tempat Pemakaman Umum yang dikelola

h. Rasio pemukiman layak huni
i. Prosentase penduduk berakses air minum
j. Prosentase luas pemukiman yang tertata
k. Luas area lahan kritis
l. Luas areal lahan penghijauan

E. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas diarahkan untuk mencapai sasaran dengan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah sebagai berikut **:**

1. Aspek Kesejahteraan masyarakat ditunjukkan dengan indikator kinerja :
   a. Angka Kriminalitas yang Tertangani
   b. Angka Pelanggaran Ketertiban Umum
2. Aspek pelayanan umum ditunjukkan dengan indikator kinerja :
   a. Persentase Penegakan Perda
   b. Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk
   c. Jumlah Anggota linmas per jumlah 10.000 penduduk
   d. Rasio pos siskamling per jumlah kelurahan
   e. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3(Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) Kota
   f. Cakupan Patroli Petugas Satpol PP per hari
   g. Petugas Perlindungan Masyarakat
   h. Cakupan Penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Walikota
   i. Cakupan Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kota Madiun
   j. Jumlah Partisipasi Masyarakat dalam menjaga Keamanan dan Ketertiban
   k. Cakupan pelayanan bencana kebakaran kota
   l. Tingkat waktu tanggap (renpons time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)
   m. Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standart
   n. Jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3.000-5.000 liter pada WMK
   o. Persentase Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
   p. Jumlah partai politik yang mendapatkan bantuan
   q. Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP
   r. Jumlah kemitraan dengan elemen masyarakat
   s. Prosentase Parpol yang memahami regulasi

t. Prosentase gangguan Kamtibmas yang terpantau

3. Aspek daya saing daerah ditunjukkan dengan indikator kinerja :
   a. Angka kriminalitas
   b. Jumlah demonstrasi
   c. Jumlah Tindak Kriminal dalam Masyarakat
   d. Konflik horizontal di dalam masyarakat
   e. Persentase konflik bermotif SARA yang terselesaikan

F. Urusan Sosial diarahkan untuk mencapai sasaran dengan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah sebagai berikut **:**

1. Aspek pelayanan umum ditunjukan dengan indikator kinerja :
   a. Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi
   b. Jumlah Penerima Bantuan
   c. Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial
   d. Persentase PMKS yang tertangani
   e. PMKS yang memperoleh bantuan sosial
   f. Angka Kemiskinan
   g. Indeks Gini

2. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR :

G. Urusan Tenaga Kerja diarahkan untuk mencapai sasaran dengan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah sebagai berikut **:**

1. Aspek kesejahteraan masyarakat ditunjukkan dengan indikator kinerja
   a. Rasio Penduduk yang Bekerja
2. Aspek pelayanan umum ditunjukkan dengan indikator kinerja :
   a. Angka sengketa pengusaha pekerja per tahun
   b. Tingkat partisipasi angkatan kerja
   c. Pencari kerja yang ditempatkan
   d. Tingkat pengangguran terbuka
   e. Keselamatan dan perlindungan
   f. Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah
3. Aspek daya saing daerah ditunjukkan dengan indikator kinerja :
   a. Luas wilayah industri
   b. Rasio ketergantungan
   c. Rasio lulusan S1/S2/S3
   d. Rasio Tenaga Kerja Terdidik terhadap tenaga kerja tidak terdidik

H. Urusan PP dan PA diarahkan untuk mencapai sasaran dengan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah sebagai berikut **:**

1. Aspek pelayanan umum ditunjukkan dengan indikator kinerja :
   a. Prosentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan
   b. Prosentase partisipasi perempuan di lembaga swasta
   c. Rasio kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)
   d. Partisipasi angkatan kerja perempuan
   e. Persentase Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan
   f. Indeks Pemberdayaan Gender
   g. Partisipasi Perempuan di lembaga Pemerintah dan Swasta
   h. Indeks pembangunan Gender

I. Urusan Pangan diarahkan untuk mencapai sasaran dengan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah sebagai berikut **:**

1. Aspek pelayanan umum ditunjukkan dengan indikator kinerja :
   a. Regulasi ketahanan pangan
   b. Rasio Ketersediaan pangan utama
   c. Ketersediaan Energi dan Protein

J. Urusan Pertanahan diarahkan untuk mencapai sasaran dengan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah sebagai berikut **:**

1. Aspek kesejahteraan masyarakat ditunjukkan dengan indikator kinerja :
   a. Jumlah Ijin Lokasi dan Ijin Penggunaan Tanah
2. Aspek pelayanan umum ditunjukkan dengan indikator kinerja :
   a. Penyelesaian Konflik – konflik Pertanahan

K. Urusan Lingkungan Hidup diarahkan untuk mencapai sasaran dengan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah sebagai berikut **:**

1. Aspek pelayanan umum ditunjukkan dengan indikator kinerja :
   a. Rasio Tempat Pemrosesan Akhir Sampah per satuan penduduk
   b. Prosentase penanganan sampah
   c. Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL
   d. Prosentase pencemaran status mutu air
   e. Tingkat Pencegahan Pencemaran Air
   f. Volume Sampah yang Tertangani
   g. Prosentase Sarana dan Prasarana Persampahan di Kota Madiun
   h. Prosentase Sarana dan Prasarana Perlindungan Sumber-sumber Air yang berfungsi dengan layak dan baik

i. Tingkat Pencegahan Pencemaran Udara dari Sumber Tidak Bergerak
j. Jumlah Industri yang dibina

2. Aspek daya saing daerah ditunjukkan dengan indikator kinerja :
   a. Pencemaran Status Mutu Air
   b. Hasil Penilaian Memenuhi passing Grade yang ditetapkan Tim Penilai Adipura
   c. Prosentase Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
   d. Persentase Masyarakat yang Peduli dan Berbudidaya Lingkungan
   e. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

L. Urusan Adm. Kependudukan dan Pencatatan Sipil diarahkan untuk mencapai sasaran dengan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah sebagai berikut **:**

1. Aspek pelayanan umum ditunjukkan dengan indikator kinerja :
   a. Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk
   b. Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran
   c. Rasio pasangan berakte nikah
   d. Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian
   e. Ketersedian data base kependudukan skala kota
   f. Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga
   g. Ketersesuaian database Kependudukan Skala Nasional
   h. Persentase Penerbitan Akta Pencatatan Sipil di Kota Madiun
   i. Cakupan Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan Regulasi

M. Urusan Pengendalian Penduduk dan KB diarahkan untuk mencapai sasaran dengan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah sebagai berikut **:**

1. Aspek pelayanan umum ditunjukkan dengan indikator kinerja :
   a. Rata-rata jumlah anak per keluarga
   b. Rasio akseptor KB
   c. Cakupan peserta KB aktif
   d. Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I
   e. Cakupan Peserta KB Baru

N. Urusan Perhubungan diarahkan untuk mencapai sasaran dengan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah sebagai berikut **:**

1. Aspek pelayanan umum ditunjukkan dengan indikator kinerja :
   a. Jumlah arus penumpang angkutan
   b. Rasio ijin trayek

c. Jumlah uji kir angkutan umum
d. Jumlah terminal
e. Angkutan darat
f. Kepemilikan kir angkutan umum
g. Lama pengujian kelayakan angkutan umum
h. Persentase Jumlah Pemasangan rambu-rambu
i. Biaya pengujian kelayakan angkutan umum
j. Angka Kecelakaan Sarana Transportasi Angkutan Darat
k. Jumlah Pengendara Kendaraan yang memiliki Surat Ijin Mengemudi
l. Prosentase Sarana dan Fasilitas LLAJ yang berfungsi Baik
m. IKM terhadap pelayanan angkutan dan lalu lintas
n. Jumlah Kendaraan yang lulus uji (KIR)
o. Persentase Penurunan Angka Kecelakaan

2. Aspek daya saing daerah ditunjukkan dengan indikator kinerja :
   a. Jumlah Orang/barang yang terangkut angkutan umum
   b. Jumlah Orang/barang melalui terminal per tahun

O. Urusan Kominfo diarahkan untuk mencapai sasaran dengan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah sebagai berikut **:**

1. Aspek pelayanan umum ditunjukkan dengan indikator kinerja :
   a. Jumlah jaringan komunikasi
   b. Rasio warnet/gameonline terhadap penduduk
   c. Jumlah surat kabar nasional/lokal
   d. Jumlah penyiaran radio/TV lokal
   e. Web site milik pemerintah daerah
   f. Pameran/expo per tahun
   g. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan komunikasi dan informasi
   h. Jumlah Media Elektronik Milik Pemerintah
   i. Jumlah SDM Penyiaran
   j. Jumlah Menara Telekomunikasi
   k. Jumlah Kegiatan Penyebarluasan Informasi
   l. Web Site PPID Kota Madiun
   m. Persentase PD yang telah mempunyai sistem informasi berbasis WEB
   n. Persentase PD yang telah menggunakan layanan sistem LPSE dalam pengadaan barang dan jasa
   o. Jumlah Kelompok User yang memanfaatkan Teknologi Informasi

p. Ketersediaan Sistem Informasi manajemen pemerintahan daerah

2. Aspek daya saing daerah ditunjukkan dengan indikator kinerja :
   a. Rasio ketersediaan daya listrik
   b. Prosentase penduduk yang menggunakan HP/Telp
   c. Prosentase Rumah tangga yang menggunakan Listrik
   d. Kontribusi Sektor Komunikasi dan Infomasi terhadap PDRB

P. Urusan Persandian

Q. Urusan Koperasi dan UKM diarahkan untuk mencapai sasaran dengan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah sebagai berikut **:**

1. Aspek pelayanan umum ditunjukkan dengan indikator kinerja :
   a. Persentase koperasi aktif
   b. Jumlah UKM
   c. Usaha mikro dan kecil
   d. Persentase Peningkatan Omset KUMKM
   e. Cakupan Bina UKM
   f. Jumlah Koperasi Aktif
   g. Jumlah Promosi KUMKM
   h. Jumlah Koperasi
   i. UKM Non BPR/LKM UKM

R. Urusan Penanaman Modal diarahkan untuk mencapai sasaran dengan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah sebagai berikut **:**

1. Aspek pelayanan umum ditunjukkan dengan indikator kinerja :
   a. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)
   b. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)
   c. Rasio daya serap tenaga kerja
   d. Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN
   e. Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN
   f. Rasio Izin yang diterbitkan
   g. Nilai Realisasi Investasi
   h. Sistem informasi pelayanan perijinan dan administrasi pemerintah
2. Aspek daya saing daerah ditunjukkan dengan indikator kinerja :
   a. Lama proses perijinan
   b. Jumlah perda yang mendukung iklim investasi

S. Urusan Kepemudaan dan OR diarahkan untuk mencapai sasaran dengan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah sebagai berikut **:**

1. Aspek kesejahteraan masyarakat ditunjukkan dengan indikator kinerja :
   a. Jumlah Klub Olah Raga
   b. Jumlah gedung olahraga
2. Aspek pelayanan umum ditunjukkan dengan indikator kinerja :
   a. Jumlah organisasi pemuda
   b. Jumlah kegiatan kepemudaan
   c. Jumlah kegiatan olahraga
   d. Gelanggang/ balai remaja (selain milik swasta)
   e. Lapangan olahraga
   f. Jumlah Organisasi Olah Raga
   g. Jumlah Prestasi di Bidang Pemuda dan Olah Raga Tingkat Nasional
   h. Jumlah Prestasi Olah Raga Tingkat Regional dan Nasional
   i. Jumlah Peserta Olah Raga
   j. Rasio Kondisi Sarpras Olah Raga yang layak

T. Urusan Statistik diarahkan untuk mencapai sasaran dengan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah sebagai berikut **:**

1. Aspek pelayanan umum ditunjukkan dengan indikator kinerja :
   a. Jumlah dokumen statistik Daerah yang tersedia
   b. Ada/tidaknya buku statistik tentang Kota Madiun
   c. Dokumen Statistik daerah yang tersusun

U. Urusan Kebudayaan diarahkan untuk mencapai sasaran dengan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah sebagai berikut **:**

1. Aspek kesejahteraan masyarakat ditunjukkan dengan indikator kinerja :
   a. Jumlah grup kesenian
   b. Jumlah gedung kesenian
2. Aspek pelayanaan umum ditunjukkan dengan indikator kinerja :
   a. Penyelenggaraan festival seni dan budaya
   b. Sarana penyelenggaraan seni dan budaya
   c. Jumlah Seni Budaya, Benda/situs/kawasan cagar budaya yang dilestarikan
   d. Jumlah Prestasi di bidang Seni dan Kebudayaan
   e. Seni Budaya Lokal yang dikompetisikan

f. Jumlah Budaya Lokal yang dipentaskan
g. Jumlah Budaya Lokal yang dilestarikan
h. Jumlah Penonton dalam Pentas seni

V. Urusan Perpustakaan diarahkan untuk mencapai sasaran dengan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah sebagai berikut **:**

1. Aspek pelayanan umum ditunjukkan dengan indikator kinerja :
   a. Jumlah perpustakaan
   b. Jumlah pengunjung perpustakaan
   c. Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah
   d. Prosentase Peningkatan Jumlah Anggota Perpustakaan
   e. Prosentase Pengunjung Perpustakaan

W. Urusan Kearsipan diarahkan untuk mencapai sasaran dengan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah sebagai berikut **:**

1. Aspek pelayanan umum ditunjukkan dengan indikator kinerja :
   a. Jumlah SDM pengelola kearsipan yang mendapatkan pelatihan
   b. Jumlah Berkas Arsip in aktif yang dikelola
   c. Persentase Unit kearsipan yang menyerahkan arsip in aktifnya

3. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN :

A. Urusan Kelautan dan Perikanan diarahkan untuk mencapai sasaran dengan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah sebagai berikut **:**

1. Aspek pelayanan umum ditunjukkan dengan indikator kinerja :
   a. Jumlah Produksi perikanan
   b. Tingkat Konsumsi Ikan
   c. Jumlah SDM (Petani Ikan)

B. Urusan Pariwisata diarahkan untuk mencapai sasaran dengan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah sebagai berikut **:**

1. Aspek pelayanan umum ditunjukkan dengan indikator kinerja :
   a. Kunjungan wisata
   b. Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB
   c. Jumlah Promosi Pariwisata
   d. Jumlah Event Pariwisata

C. Urusan Pertanian diarahkan untuk mencapai sasaran dengan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah sebagai berikut **:**

1. Aspek kesejahteraan masyarakat dengan indikator kinerja :
   a. PDRB Perkapita
2. Aspek pelayanan umum ditunjukkan dengan indikator kinerja :

a. Produktifitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (persentase capaian produktivitas padi terhadap target RPJMD)
b. Cakupan bina kelompok petani
c. jumlah populasi ternak
d. jumlah hewan ternak yang halal dipotong per tahun (sapi dan kambing)
e. Rata-rata produktivitas sapi perah per ekor per hari (L)
f. Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB
g. Rata-rata Peningkatan Pendapatan Petani Per Hektar
h. Jumlah Produk Pertanian Olahan yang dipasarkan
i. Jumlah Kelompok Petani
j. Jumlah Populasi Ternak dan peliharaan Kota Madiun yang mendapatkan pengobatan dan Vaksinasi
k. Produksi Padi Per Hektar
l. Jumlah Produksi daging
m. Jumlah SDM Peternakan yang diberikan penyuluhan (Peternak, Pedagang Daging dan Susu)
n. Produktivitas tanaman pangan (padi) per satuan luas

3. Aspek daya saing daerah ditunjukkan dengan indikator kinerja :
   a. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita
   b. Pengeluaran konsumsi pangan per kapita
   c. Nilai Tukar Petani (NTP)
   d. Luas wilayah produktif

D. Urusan Perdagangan diarahkan untuk mencapai sasaran dengan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah sebagai berikut **:**

1. Aspek pelayanan umum ditunjukkan dengan indikator kinerja :
   a. Cakupan bina kelompok perdagangan/usaha informal
   b. omset pasar tradisional
   c. Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB
   d. Ekspor Bersih Perdagangan
   e. Jumlah Komoditi yang dipamerkan
   f. Cakupan PKL yang dibina
   g. Jumlah Barang Kena Cukai Ilegal yang dimonitor
   h. Jumlah kelompok perdagangan/usaha informal
   i. Intensitas tera timbangan

E. Urusan Perindustrian diarahkan untuk mencapai sasaran dengan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah sebagai berikut **:**

1. Aspek pelayanan umum ditunjukkan dengan indikator kinerja :
   a. Pertumbuhan industri
   b. Cakupan bina kelompok pengrajin
   c. Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB
   d. Frekuensi Pemeriksaan Kadar Tar dan Nikotin dalam satu Tahun
   e. Jumlah IKM dan IRT
   f. Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB
   g. Jumlah Laporan Pengawasan Bidang ESDM

F. Urusan Transmigrasi diarahkan untuk mencapai sasaran dengan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah sebagai berikut **:**

1. Aspek pelayanan umum ditunjukkan dengan indikator kinerja :
   a. Jumlah Sosialisasi
   b. Terwujudnya Peningkatan Kesempatan Kerja

4. FUNGSI PENUNJANG PEMERINTAHAN:

A. Unsur Staf diarahkan untuk mencapai sasaran dengan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah sebagai berikut :

1. Aspek kesejahteraan masyarakat ditunjukkan dengan indikator kinerja :
   a. Pertumbuhan Ekonomi
   b. Indeks Pembangunan Manusia
   c. Laju Inflasi
2. Aspek pelayanan umum ditunjukkan dengan indikator kinerja :
   a. Indeks Kepuasan Masyarakat
   b. Prosentase capaian SPM
   c. Perubahan kelembagaan dan Tupoksi SKPD
   d. Nilai Akuntabilitas Kinerja
   e. Persentase SKPD yang memiliki SOTK sesuai standart yang ditetapkan
   f. Jumlah Pedoman dan Prosedur Kerja Ketatalaksanaan
   g. Prosentase Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sesuai dengan Road Map RB
   h. Persentase SKPD yang menyelesaikan Lap Kinerja (max 31 Maret) tepat waktu
   i. Persentase Jumlah Kelembagaan yang sesuai dengan Perundang-undangan

j. Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan Kota yang baik
k. Nilai EKPPD
l. Jumlah Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Bidang Pemerintahan
m. Jumlah Fasilitasi Kerjasama dengan daerah Lain
n. Jumlah Fasilitas Pelaksanaan Otoda
o. Persentase Perda yang dilakukan konsultasi Publik
p. Persentase Pembinaan Peningkatan Kualitas Pelayanan publik
q. Persentase PD yang telah dilakukan Anjab dan ABK

3. Aspek daya saing daerah ditunjukkan dengan indikator kinerja :
   a. Rasio tempat ibadah per satuan penduduk
   b. Persentasae Perda yang disahkan tepat waktu

B. Unsur Pengawas diarahkan untuk mencapai sasaran dengan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah sebagai berikut :

1. Aspek pelayanan umum ditunjukkan dengan indikator kinerja :
   a. Persentase Entitas yang melakukan Pengelolaan Keuangan dan Kinerja dengan Baik
   b. Persentase temuan (kasus) Keuangan Hasil audit yang telah ditindak lanjuti
   c. Persentase SKPD yang telah melakukan pengelolaan keuangan dan menerapkan sistem akuntabilitas Kinerja secara Baik

C. Unsur Pelayanan Administrasi DPRD

D. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan diarahkan untuk mencapai sasaran dengan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah sebagai berikut :

1. Aspek pelayanan umum ditunjukkan dengan indikator kinerja :
   a. Persentase kasus pelanggaran disiplin pegawai
   b. Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti diklat kepemimpinan sesuai jenjangnya
   c. Persentase jabatan struktural yang dilaksanakan dibanding dengan jabatan menurut PP 18 tahun 2016
   d. Persentase Pendidikan Aparatur yang Terealisasi
   e. Persentase Peningkatan SDM Aparatur
   f. Persentase Realisasi Penataan Pegawai
   g. Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian sesuai dengan peraturan

E. Bidang Keuangan diarahkan untuk mencapai sasaran dengan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah sebagai berikut :

1. Aspek pelayanan umum ditunjukkan dengan indikator kinerja :
   a. Opini BPK terhadap laporan Keuangan
   b. Pengesahan Perda APBD tepat waktu
   c. Persentase SKPD yang menyelesaikan Lap Keuangan Tepat Waktu
   d. Laporan keuangan Pemda disusun tepat waktu
   e. Persentase peningkatan PAD
   f. Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah yang sesuai dengan Landasan Hukum
   g. Persentase Jumlah Aset yang dikelola Pemerintah daerah
   h. Persentase Peningkatan Pajak daerah
   i. Persentase Penerimaan PBB
2. Aspek daya saing daerah ditunjukkan dengan indikator kinerja :
   a. Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah

F. Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan diarahkan untuk mencapai sasaran dengan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah sebagai berikut :

1. Aspek pelayanan umum ditunjukkan dengan indikator kinerja :
   a. Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda
   b. Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA
   c. Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA
   d. Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD
   e. Persentase pelaksanaan musrenbang tepat waktu
   f. Persentase hasil musrenbang yang di akomodasi
   g. Persentase SKPD yang menyusun dokumen Renja
   h. Persentase SKPD bidang ekonomi yang menyusun RENJA
   i. Persentase SKPD bidang sosial budaya yang menyusun RENJA
   j. Persentase SKPD Bidang Fisik dan Prasarana yang menyusun RENJA
   k. Persentase Capaian Sasaran Tahunan Terhadap Target Sasaran RPJMD
   l. Dokumen data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang Tersedia
   m. Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan yang mengakomodir Kepentingan Masyarakat Kota Madiun

n. Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
o. Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya
p. Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah
q. Jumlah Kajian dan Penelitian

G. Kecamatan diarahkan untuk mencapai sasaran dengan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah sebagai berikut :

1. Aspek pelayanan umum ditunjukkan dengan indikator kinerja :
   a. Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan (LPM)
   b. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK
   c. LPM berprestasi
   d. PKK aktif
   e. Posyandu aktif
   f. Swadaya masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat
   g. Prosentase LPMD/Organisasi Pemberdayaan yang aktif menjalankan fungsinya
   h. Persentase Kehadiran Peserta Penguatan Lembaga Kemasyarakatan
   i. Persentase Kehadiran dalam Perencanaan Pembangunan Kelurahan
   j. Jumlah LPMK Aktif
   k. Jumlah Posyandu Balita
   l. Jumlah alat yang dipromosikan
   m. Jumlah LKK sehat

BAB III
URUSAN KONKUREN, FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

A. URUSAN KONKUREN

I. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

1. URUSAN BIDANG PENDIDIKAN

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Pendidikan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan.

b. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Urusan pemerintahan bidang Pendidikan yang dilaksanakan di **Dinas Pendidikan** Kota Madiun pada Tahun Anggaran 2019, yaitu sebagai berikut:

Tabel III.1
Program dan Kegiatan Urusan Pendidikan Tahun 2019

No	Program	Kegiatan	
1	program pelayanan administrasi perkantoran	1	kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor
		2	kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah
2	program pemeliharaan barang milik daerah	1	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan
		2	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas
		3	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala sarana prasarana kantor
3	program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1	kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah
4	program manajemen pelayanan pendidikan	1	kegiatan operasional BOS tingkat kota
		2	kegiatan pengembangan dan implementasi informasi pendidikan berbasis IT
		3	kegiatan operasional BOS madrasah diniyah (BOSDA MADIN) BK Prov
		4	kegiatan BOP bantuan beasiswa mahasiswa (BBM)
5	program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	1	kegiatan sertifikasi guru
		2	kegiatan penilaian angka kredit jabatan fungsional guru
		3	kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendidikan
		4	kegiatan seleksi guru berprestasi, kepala sekolah, dan pengawas sekolah berprestasi dan OSN
		5	kegiatan penilaian kinerja kepala sekolah

No	Program	Kegiatan	
		6	kegiatan bantuan pendidikan S1/S2/S3 PGSD
		7	kegiatan peningkatan SDM tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
6	program pendidikan dasar	1	kegiatan penerimaan peserta didik baru
		2	kegiatan penyelenggaraan SMP terbuka
		3	kegiatan penyelenggaraan SMPN 1
		4	kegiatan penyelenggaraan SMPN 2
		5	kegiatan penyelenggaraan SMPN 3
		6	kegiatan penyelenggaraan SMPN 4
		7	kegiatan penyelenggaraan SMPN 5
		8	kegiatan penyelenggaraan SMPN 6
		9	kegiatan penyelenggaraan SMPN 7
		10	kegiatan penyelenggaraan SMPN 8
		11	kegiatan penyelenggaraan SMPN 9
		12	kegiatan penyelenggaraan SMPN 10
		13	kegiatan penyelenggaraan SMPN 11
		14	kegiatan penyelenggaraan SMPN 12
		15	kegiatan penyelenggaraan SMPN 13
		16	kegiatan penyelenggaraan SMPN 14
		17	kegiatan pembangunan gedung sekolah
		18	kegiatan rehabilitasi bangunan sekolah
		19	Kegiatan Penjaminan Mutu, Akreditasi Sekolah dan Best Practice
		20	Kegiatan Pemberdayaan Tim Pengembang Kurikulum 2013 SD, SMP, Workshop Peningkatan Kualitas KKG dan MGMP, Komunitas Pembelajar
		21	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Kartoharjo
		22	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Kartoharjo
		23	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 03 Kartoharjo
		24	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Klegen
		25	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Klegen
		26	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 03 Klegen
		27	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 04 Klegen
		28	Kegiatan Penyelenggaraan SDN Oro Oro Ombo
		29	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Rejomulyo
		30	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Rejomulyo
		31	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Kanigoro
		32	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Kanigoro

No	Program	Kegiatan	
		33	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 03 Kanigoro
		34	Kegiatan Penyelenggaraan SDN Sukosari
		35	Kegiatan Penyelengaraan SDN Pilangbango
		36	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Tawangrejo
		37	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Tawangrejo
		38	Kegiatan Penyelenggaraan SDN Kelun
		39	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Manguharjo
		40	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Nambangan Lor
		41	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Nambangan Lor
		42	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Madiun Lor
		43	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Madiun Lor
		44	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 03 Madiun Lor
		45	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 04 Madiun Lor
		46	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 05 Madiun Lor
		47	Kegiatan Penyelenggaraan 01 Nambangan Kidul
		48	Kegiatan Penyelenggaraan 02 Nambangan Kidul
		49	Kegiatan Penyelenggaraan 03 Nambangan Kidul
		50	Kegiatan Penyelenggaraan 04 Nambangan Kidul
		51	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Winongo
		52	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Winongo
		53	Kegiatan Penyelenggaraan SDN Ngegong
		54	Kegiatan Penyelenggaraan SDN Patihan
		55	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Pangongangan
		56	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Pangongangan
		57	Kegiatan Penyelenggaraan SDN Sogaten
		58	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Taman
		59	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Taman
		60	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 03 Taman
		61	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Pandean
		62	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Pandean

No	Program	Kegiatan	
		63	Kegiatan Penyelenggaraan SDN Banjarejo
		64	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Mojorejo
		65	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Mojorejo
		66	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Manisrejo
		67	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Manisrejo
		68	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 03 Manisrejo
		69	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 04 Manisrejo
		70	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Demangan
		71	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Demangan
		72	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Josenan
		73	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Josenan
		74	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 03 Josenan
		75	Kegiatan Penyelenggaraan SDN Kejuron
		76	Kegiatan Penyelenggaraan SDN Kuncen
		77	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Kartoharjo
		78	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Kartoharjo
		79	Kegiatan Dana BOS pada SDN 03 Kartoharjo
		80	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Klegen
		81	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Klegen
		82	Kegiatan Dana BOS pada SDN 03 Klegen
		83	Kegiatan Dana BOS pada SDN 04 Klegen
		84	Kegiatan Dana BOS pada SDN Oro Oro Ombo
		85	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Rejomulyo
		86	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Rejomulyo
		87	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Kanigoro
		88	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Kanigoro
		89	Kegiatan Dana BOS pada SDN 03 Kanigoro
		90	Kegiatan Dana BOS pada SDN Sukosari
		91	Kegiatan Dana BOS pada SDN Pilangbango
		92	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Tawangrejo

No	Program	Kegiatan	
		93	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Tawangrejo
		94	Kegiatan Dana BOS pada SDN Kelun
		95	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Manguharjo
		96	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Nambangan Lor
		97	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Nambangan Lor
		98	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Madiun Lor
		99	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Madiun Lor
		100	Kegiatan Dana BOS pada SDN 03 Madiun Lor
		101	Kegiatan Dana BOS pada SDN 04 Madiun Lor
		102	Kegiatan Dana BOS pada SDN 05 Madiun Lor
		103	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Nambangan Kidul
		104	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Nambangan Kidul
		105	Kegiatan Dana BOS pada SDN 03 Nambangan Kidul
		106	Kegiatan Dana BOS pada SDN 04 Nambangan Kidul
		107	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Winongo
		108	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Winongo
		109	Kegiatan Dana BOS pada SDN Ngegong
		110	Kegiatan Dana BOS pada SDN Patihan
		111	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Pangongangan
		112	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Pangongangan
		113	Kegiatan Dana BOS pada SDN Sogaten
		114	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Taman
		115	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Taman
		116	Kegiatan Dana BOS pada SDN 03 Taman
		117	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Pandean
		118	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Pandean
		119	Kegiatan Dana BOS pada SDN Banjarejo
		120	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Mojorejo
		121	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Mojorejo
		122	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Manisrejo
		123	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02

No	Program	Kegiatan	
			Manisrejo
		124	Kegiatan Dana BOS pada SDN 03 Manisrejo
		125	Kegiatan Dana BOS pada SDN 04 Manisrejo
		126	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Demangan
		127	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Demangan
		128	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Josenan
		129	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Josenan
		130	Kegiatan Dana BOS pada SDN 03 Josenan
		131	Kegiatan Dana BOS pada SDN Kejuron
		132	Kegiatan Dana BOS pada SDN Kuncen
		133	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 1
		134	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 2
		135	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 3
		136	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 4
		137	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 5
		138	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 6
		139	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 7
		140	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 8
		141	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 9
		142	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 10
		143	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 11
		144	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 12
		145	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 13
		146	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 14
		147	Kegiatan pelaksanaan Uji coba, USBN dan UN SD dan SMP
		148	Kegiatan Pembinaan Pengembangan Gugus Sekolah TK, SD, Lomba Lingkungan Sekolah Sehat (LLSS), Gerakan Disiplin Siswa, Pengelolaan Kantin Sekolah Sehat
		149	Kegiatan OSN dan Cerdas Cermat SD, SMP
		150	Kegiatan Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional dan Festival lomba seni siswa nasional SD dan SMP
		151	program pendidikan anak usia dini

No	Program	Kegiatan	
		152	kegiatan bantuan BOP PAUD
		153	kegiatan seleksi dan pembinaan apresiasi PTK PAUDNI berprestasi
		154	kegiatan pusat kegiatan gugus PAUD terpadu kota madiun
		155	kegiatan workshop kurikulum PAUD
		156	kegiatan penyelenggaraan TK pembina
		157	kegiatan pagelaran Hari Anak Nasional
		158	program pendidikan non formal
		159	kegiatan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan paket C
		160	kegiatan akreditasi pendidikan non formal dan PAUD
		161	kegiatan workshop peningkatan pengelolaan perpustakaan sekolah
		162	kegiatan bimbingan teknis exstra kurikuler pembina pramuka
		163	kegiatan pembinaan lembaga non formal, kursus dan pendidikan masyarakat
		164	kegiatan gebyar PNF dalam rangka hari aksara internasional (HAI)
		165	kegiatan workhop penyusunan bahan ajar mulok bahasa daerah

c. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Jumlah Pegawai	Kepangkatan	Tingkat Pendidikan	Struktural / Eselon	Fungsional	Staf
	Gol I = Gol II = 27 Gol III = 28 Gol IV = 4 Guru = Gol I = - Gol II = 48 Gol III = 625 Gol IV = 702 Pengawas = Gol III = - Gol IV = 16 Penilik = Gol III = 2 Gol IV = 2	SD = - SMP = - SMA = 29 D3 = 2 D4/ S1 = 26 S2 = 4 Guru = SMA = 11 D1 = 1 D2 = 12 D3 = 3 D4/S1= 1.233 S2 = 97 Pengawas = S1 = 6 S2 = 10 Penilik = S1 = 3 S2 = 1	II = 1 III = 3 IV = 14 V = -	**17**	**54**
Total Pegawai				**1.395**	**54**

d. Alokasi dan Realisasi Anggaran

1. Realisasi Program dan Kegiatan

NO		URAIAN	TARGET	REALISASI
1	Program pelayanan administrasi perkantoran		4.608.027.380,00	3.252.832.231,00
	1	kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	4.204.616.780,00	2.849.421.631,00
		Output : Jumlah lembaga	1 lembaga	1 lembaga
		Outcome : Ankuntabilitas kinerja dinas pendidikan bernilai baik	1 lembaga	1 lembaga
	2	kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	403.410.600,00	403.410.600,00
		Output : Jumlah perjalanan dinas	105 kali	200 kali
		Outcome : Ankuntabilitas kinerja dinas pendidikan bernilai baik	105 kali	200 kali
2	Program pemeliharaan barang milik daerah		384.957.800,00	246.141.800,00
	1	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan	63.868.000,00	63.855.050,00
		Output : Jumlah lembaga lembaga	1 lembaga	1 lembaga
		Outcome : Ankuntabilitas kinerja dinas pendidikan bernilai baik	1 lembaga	1 lembaga
	2	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas	123.744.800,00	79.611.750,00
		Output : Jumlah kendaraan	155 unit kendaraan dinas	3 unit mobil, 216 sepeda motor
		Outcome : Ankuntabilitas kinerja dinas pendidikan bernilai baik	155 unit kendaraan dinas	3 unit mobil, 216 sepeda motor
	3	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala sarana prasarana kantor	197.345.000,00	102.675.000,00
		Output : Jumlah lembaga	1 lembaga	1 lembaga
		Outcome : Ankuntabilitas kinerja dinas pendidikan bernilai baik	1 lembaga	1 lembaga
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		74.961.680,00	67.688.319,00
	1	kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	74.961.680,00	67.688.319,00
		Output : Jumlah dokumen	9 dokumen	9 dokumen
		Outcome : Satuan Penidikan menerapkan manajemen berbasis pendidikan	9 dokumen	9 dokumen
4	program manajemen pelayanan pendidikan		434.981.370,00	395.345.229,00
	1	kegiatan operasional BOS tingkat kota	79.990.600,00	79.420.800,00
		Output : jumlah lembaga	92 lembaga	92 lembaga
		Outcome : Satuan	92 lembaga	92 lembaga

NO		URAIAN	TARGET	REALISASI
		Penidikan menerapkan manajemen berbasis pendidikan		
	2	kegiatan pengembangan dan implementasi informasi pendidikan berbasis IT	200.000.000,00	172.770.922,00
		Output : Jumlah lembaga	142 lembaga	142 lembaga
		Outcome : Satuan Penidikan menerapkan manajemen berbasis pendidikan	201 lembaga	201 lembaga
	3	kegiatan operasional BOS madrasah diniyah (BOSDA MADIN) BK Prov	99.990.770,00	95.246.076,00
		Output : Jumlah lembaga	49 lembaga	49 lembaga
		Outcome : Satuan Penidikan menerapkan manajemen berbasis pendidikan	49 lembaga	49 lembaga
	4	kegiatan BOP bantuan beasiswa mahasiswa (BBM)	55.000.000,00	47.907.431,00
		Output : Jumlah Mahasiswa	300 orang	392 orang
		Outcome : Meningkatnya mahasiswa yang melanjutkan ke perguruan tinggi	300 orang	392 orang
5	Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan		1.802.910.000,00	1.105.929.125,00
	1	kegiatan sertifikasi guru	213.385.000,00	143.339.588,00
		Output : Jumlah guru	16 guru	7 guru
		Outcome : Presentase guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah mengikuti pelatiah profesional berkelanjutan	16 guru	7 guru
	2	kegiatan penilaian angka kredit jabatan fungsional guru	137.500.000,00	89.897.288,00
		Output : Jumlah guru	500 guru	157 guru
		Outcome : Presentase guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah mengikuti pelatiah profesional berkelanjutan	500 guru	157 guru
	3	kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendidikan	100.349.000,00	37.871.398,00
		Output : Jumlah lembaga	75 lembaga	134 lembaga
		Outcome : Presentase guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah mengikuti pelatiah profesional berkelanjutan	75 lembaga	134 lembaga
	4	kegiatan seleksi guru berprestasi, kepala sekolah, dan pengawas sekolah berprestasi dan OSN	300.237.000,00	237.127.915,00
		Output : Jumlah orang	313 orang	313 orang
		Outcome : Presentase guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah mengikuti pelatiah profesional berkelanjutan	313 orang	313 orang
	5	kegiatan penilaian kinerja kepala sekolah	92.772.000,00	55.582.290,00
		Output : Jumlah kepala sekolah	85 kepala sekolah	85 kepala sekolah

NO		URAIAN	TARGET	REALISASI
		Outcome : Presentase guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah mengikuti pelatiah profesional berkelanjutan	85 kepala sekolah	85 kepala sekolah
	6	kegiatan bantuan pendidikan S1/S2/S3 PGSD	140.899.000,00	76.015.054,00
		Output : Jumlah guru	9 guru	9 guru
		Outcome : Presentase guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah mengikuti pelatiah profesional berkelanjutan	4 guru	4 guru
	7	kegiatan peningkatan SDM tenaga pendidik dan tenaga kependidikan	817.768.000,00	466.095.592,00
		Output : Jumlah guru	572 guru	572 guru
		Outcome : Presentase guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah mengikuti pelatiah profesional berkelanjutan	572 guru	572 uru
6	Program pendidikan dasar		97.066.791.389,00	88.719.927.373,18
	1	kegiatan penerimaan peserta didik baru	228.851.920,00	172.766.163,00
		Output : Jumlah lembaga	71 lembaga	71 lembaga
		Outcome : Rata-rata nilai sikap jujur pada peserta didik SD dan SMP minimal baik	71 lembaga	71 lembaga
	2	kegiatan penyelenggaraan SMP terbuka	74.815.000,00	36.597.000,00
		Output : Jumlah lembaga	1 lembaga	1 lembaga
		Outcome : Operasional penyelenggaraan sekolah	1 lembaga	1 lembaga
	3	kegiatan penyelenggaraan SMPN 1	2.148.658.000,00	2.100.856.943,00
		Output : Jumlah lembaga	1 lembaga	1 lembaga
		Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
	4	kegiatan penyelenggaraan SMPN 2	1.413.239.000,00	1.241.079.387,00
		Output : Jumlah lembaga	1 lembaga	1 lembga
		Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
	5	kegiatan penyelenggaraan SMPN 3	1.240.281.000,00	1.201.128.773,00
		Output : Jumlah lembaga	1 lembaga	1 lembaga
		Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
	6	kegiatan penyelenggaraan SMPN 4	1.715.615.100,00	1.635.441.975,00
		Output : Jumah lembaga	1 lembaga	1 lembaga
		Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
	7	kegiatan penyelenggaraan SMPN 5	791.852.000,00	771.504.915,00
		Output : Jumlah lembaga	1 lembaga	1 lembaga
		Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
	8	kegiatan penyelenggaraan SMPN 6	1.126.710.000,00	1.049.446.143,00
		Output : Jumlah lembaga	1 lembaga	1 lembaga
		Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
	9	kegiatan penyelenggaraan SMPN 7	1.678.064.000,00	1.587.250.368,00
		Output : Jumlah lembaga	1 lembaga	1 lembaga
		Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
	10	kegiatan penyelenggaraan	1.311.331.000,00	1.184.875.022,00

NO		URAIAN	TARGET	REALISASI
		SMPN 8		
		Output : Jumlah lembaga	1 lembaga	1 lembaga
		Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
	11	kegiatan penyelenggaraan SMPN 9	1.119.828.000,00	1.057.674.925,00
		Output : Jumlah lembaga	1 lembaga	1 lembaga
		Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
	12	kegiatan penyelenggaraan SMPN 10	1.631.927.000,00	1.365.730.964,00
		Output : Jumlah lembaga	1 lembaga	1 lembaga
		Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
	13	kegiatan penyelenggaraan SMPN 11	1.058.936.000,00	997.169.233,00
		Output : Jumlah lembaga	1 lembaga	1 lembaga
		Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
	14	kegiatan penyelenggaraan SMPN 12	1.385.408.000,00	1.240.649.627,00
		Output : Jumlah lembaga	1 lembaga	1 lembaga
		Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
	15	kegiatan penyelenggaraan SMPN 13	1.095.932.000,00	983.922.658,00
		Output : Jumlah lembaga	1 lembaga	1 lembaga
		Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
	16	kegiatan penyelenggaraan SMPN 14	886.695.000,00	819.345.442,00
		Output : Jumlah lembaga	1 lembaga	1 lembaga
		Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
	17	kegiatan pembangunan gedung sekolah	13.387.450.000,00	12.249.750.440,87
		Output : Jumlah paket	7 paket	7 paket
		Outcome : APS SD dan SMP	7 paket	7 paket
	18	kegiatan rehabilitasi bangunan sekolah	19.170.453.840,00	17.122.421.927,25
		Output : Jumlah paket	21 paket	21 paket
		Outcome : APS SD dan SMP	21 paket	21 paket
	19	Kegiatan Penjaminan Mutu, Akreditasi Sekolah dan Best Practice	930.957.250,00	719.037.712,00
		Output : Jumlah lembaga	106 lembaga	135 lembaga
		Outcome : APS SD dan SMP	106 lembaga	135 lembaga
	20	Kegiatan Pemberdayaan Tim Pengembang Kurikulum 2013 SD, SMP, Workshop Peningkatan Kualitas KKG dan MGMP, Komunitas Pembelajar	867.361.720,00	516.882.678,00
		Output : Jumlah lembaga	93 lembga	95 lembaga
		Outcome : APM SD dan SMP	93 lembaga	95 lembaga
	21	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Kartoharjo	537.917.300,00	501.112.949,00
		Output : Jumlah lembaga	1 lembaga	1 lembaga
		Outcome : APM SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
	22	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Kartoharjo	297.531.000,00	243.834.353,00
		Output : Jumlah lembaga	1 lembaga	1 lembaga
		Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
	23	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 03 Kartoharjo	164.743.000,00	154.726.366,00

NO		URAIAN	TARGET	REALISASI
		Output : Jumlah lembaga	1 lembaga	1 lembaga
		Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
	24	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Klegen	531.986.400,00	525.242.725,00
		Output : Jumlah lembaga	1 lembaga	1 lembaga
		Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
	25	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Klegen	257.823.000,00	247.748.026,00
		Output : Jumlah lembaga	1 lembaga	1 lembaga
		Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
	26	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 03 Klegen	495.590.000,00	465.880.114,00
		Output : Jumlah lembaga	1 lembaga	1 lembaga
		Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
	27	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 04 Klegen	208.635.000,00	203.761.624,00
		Output : Jumlah lembaga	1 lembaga	1 lembaga
		Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
	28	Kegiatan Penyelenggaraan SDN Oro Oro Ombo	468.924.000,00	462.723.738,00
		Output : jumlah lembaga	1 lembaga	1 lembaga
		Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
	29	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Rejomulyo	173.109.000,00	171.280.247,00
		Output : Jumlah lembaga	1 lembaga	1 lembaga
		Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
	30	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Rejomulyo	156.055.000,00	148.405.914,00
		Output : Jumlah lembaga	1 lembaga	1 lembaga
		Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
	31	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Kanigoro	205.984.000,00	202.498.051,00
		Output : Jumlah lembaga	1 lembaga	1 lembaga
		Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
	32	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Kanigoro	286.629.000,00	284.015.458,00
		Output : Jumlah lembaga	1 lembaga	1 lembaga
		Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
	33	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 03 Kanigoro	338.671.000,00	326.067.534,00
		Output : Jumlah lembaga	1 lembaga	1 lembaga
		Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
	34	Kegiatan Penyelenggaraan SDN Sukosari	120.442.000,00	115.025.447,00
		Output : jumlah lembaga	1 lembaga	1 lembaga
		Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
	35	Kegiatan Penyelengaraan SDN Pilangbango	363.741.000,00	354.838.774,00
		Output : Jumlah1 lembaga	1 Lembaga	1 lembaga
		Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
	36	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Tawangrejo	280.264.000,00	276.990.500,00
		Output : Jumlah lembaga	1 lembaga	1 lembaga
		Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
	37	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Tawangrejo	209.517.500,00	204.425.246,00
		Output : Jumlah lembaga	1 lembaga	1 lembaga
		Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga

NO		URAIAN	TARGET	REALISASI
	38	Kegiatan Penyelenggaraan SDN Kelun	284.930.000,00	277.054.013,00
		Output : jumlah lembaga	1 lembaga	1 lembaga
		Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
	39	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Manguharjo	552.894.000,00	552.146.679,00
		Output : Jumlah lembaga	1 lembaga	1 lembaga
		Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
	40	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Nambangan Lor	450.061.000,00	402.455.593,00
		Output : Jumlah lembaga		
		Outcome : AMP SD dan SMP		
	41	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Nambangan Lor	316.617.000,00	299.383.368,00
		Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
		Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
	42	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Madiun Lor	384.799.000,00	375.464.586,00
		Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
		Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
	43	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Madiun Lor	273.877.000,00	269.796.045,00
		Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
		Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
	44	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 03 Madiun Lor	1.009.824.000,00	929.529.335,00
		Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
		Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
	45	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 04 Madiun Lor	454.554.000,00	442.933.815,00
		Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
		Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
	46	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 05 Madiun Lor	596.868.000,00	507.139.118
		Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
		Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
	47	Kegiatan Penyelenggaraan 01 Nambangan Kidul	283.280.000,00	266.097.355,00
		Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
		Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
	48	Kegiatan Penyelenggaraan 02 Nambangan Kidul	200.827.000,00	193.299.978,00
		Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
		Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
	49	Kegiatan Penyelenggaraan 03 Nambangan Kidul	541.555.000,00	455.967.165,00
		Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
		Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
	50	Kegiatan Penyelenggaraan 04 Nambangan Kidul	254.142.000,00	252.140.183,00
		Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
		Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
	51	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Winongo	452.762.000,00	449.987.647,00
		Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
		Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
	52	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Winongo	223.075.000,00	208.980.962,00
		Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga

NO		URAIAN	TARGET	REALISASI
		Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
	53	Kegiatan Penyelenggaraan SDN Ngegong	247.345.000,00	230.122.543,00
		Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
		Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
	54	Kegiatan Penyelenggaraan SDN Patihan	578.550.000,00	575.790.580,00
		Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
		Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
	55	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Pangongangan	202.762.000,00	202.609.338,00
		Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
		Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
	56	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Pangongangan	437.861.000,00	391.639.250,00
		Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
		Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
	57	Kegiatan Penyelenggaraan SDN Sogaten	421.420.000,00	407.232.041,00
		Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
		Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
	58	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Taman	655.101.000,00	618.241.866,00
		Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
		Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
	59	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Taman	221.905.500,00	215.559.790,00
		Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
		Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
	60	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 03 Taman	220.360.000,00	215.693.335,00
		Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
		Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
	61	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Pandean	493.676.000,00	454.331.847,00
		Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
		Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
	62	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Pandean	508.446.000,00	465.173.508,00
		Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
		Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
	63	Kegiatan Penyelenggaraan SDN Banjarejo	629.326.000,00	606.737.282,00
		Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
		Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
	64	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Mojorejo	363.086.000,00	353.527.122,00
		Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
		Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
	65	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Mojorejo	807.787.400,00	773.732.725,00
		Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
		Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
	66	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Manisrejo	588.983.000,00	566.653.185,00
		Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
		Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga

NO		URAIAN	TARGET	REALISASI
	67	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Manisrejo	448.893.000,00	402.721.622,00
		Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
		Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
	68	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 03 Manisrejo	305.535.000,00	280.743.957,00
		Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
		Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
	69	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 04 Manisrejo	434.155.000,00	416.447.574,00
		Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
		Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
	70	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Demangan	287.043.000,00	283.799.351,00
		Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
		Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
	71	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Demangan	299.111.000,00	275.782.411,00
		Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
		Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
	72	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Josenan	287.041.000,00	273.348.553,00
		Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
		Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
	73	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Josenan	286.628.000,00	245.175.323,00
		Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
		Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
	74	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 03 Josenan	265.808.000,00	255.082.823,00
		Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
		Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
	75	Kegiatan Penyelenggaraan SDN Kejuron	181.931.000,00	181.471.173,00
		Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
		Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
	76	Kegiatan Penyelenggaraan SDN Kuncen	197.099.000,00	187.388.628,00
		Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
		Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
	77	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Kartoharjo	293.910.000,00	287.391.183,35
		Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
		Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
	78	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Kartoharjo	52.877.000,00	49.944.927,50
		Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
		Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
	79	Kegiatan Dana BOS pada SDN 03 Kartoharjo	66.731.000,00	61.971.216,55
		Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
		Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
	80	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Klegen	296.265.000,00	283.475.363,30
		Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga

NO		URAIAN	TARGET	REALISASI
		Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
	81	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Klegen	130.933.000,00	116.511.057,23
		Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
		Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
	82	Kegiatan Dana BOS pada SDN 03 Klegen	292.353.000,00	287.066.901,05
		Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
		Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
	83	Kegiatan Dana BOS pada SDN 04 Klegen	85.986.000,00	83.092.180,01
		Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
		Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
	84	Kegiatan Dana BOS pada SDN Oro Oro Ombo	228.887.000,00	219.591.432,40
		Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
		Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
	85	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Rejomulyo	87.130.000,00	83.519.704,54
		Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
		Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
	86	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Rejomulyo	54.130.000,00	49.3443.433,00
		Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
		Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
	87	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Kanigoro	111.701.000,00	101.436.155,67
		Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
		Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
	88	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Kanigoro	136.870.000,00	133.692.424,56
		Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
		Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
	89	Kegiatan Dana BOS pada SDN 03 Kanigoro	144.090.000,00	140.024.089,70
		Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
		Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
	90	Kegiatan Dana BOS pada SDN Sukosari	38.707.000,00	35.617.456,47
		Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
		Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
	91	Kegiatan Dana BOS pada SDN Pilangbango	195.203.000,00	174.806.507,68
		Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
		Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
	92	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Tawangrejo	133.709.000,00	132.714.754,43
		Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
		Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
	93	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Tawangrejo	86.472.000,00	79.748.281,70
		Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
		Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
	94	Kegiatan Dana BOS pada SDN Kelun	142.426.000,00	140.545.188,67
		Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
		Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga

NO		URAIAN	TARGET	REALISASI
	95	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Manguharjo	272.191.000,00	265.016.256,02
		Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
		Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
	96	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Nambangan Lor	248.286.000,00	244.534.628,06
		Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
		Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
	97	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Nambangan Lor	124.648.000,00	120.593.742,59
		Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
		Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
	98	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Madiun Lor	105.762.000,00	104.885.900,09
		Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
		Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
	99	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Madiun Lor	123.298.000,00	119.665.117,29
		Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
		Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
	100	Kegiatan Dana BOS pada SDN 03 Madiun Lor	429.345.000,00	406.281.642,34
		Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
		Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
	101	Kegiatan Dana BOS pada SDN 04 Madiun Lor	318.389.000,00	303.981.516,22
		Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
		Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
	102	Kegiatan Dana BOS pada SDN 05 Madiun Lor	372.672.000,00	369.553.878,53
		Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
		Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
	103	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Nambangan Kidul	125.070.000,00	120.055.281,60
		Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
		Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
	104	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Nambangan Kidul	91.430.000,00	87.598.401,17
		Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
		Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
	105	Kegiatan Dana BOS pada SDN 03 Nambangan Kidul	247.994.000,00	247.451.832,31
		Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
		Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
	106	Kegiatan Dana BOS pada SDN 04 Nambangan Kidul	122.823.000,00	117.686.253,26
		Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
		Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
	107	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Winongo	287.803.000,00	280.492.176,77
		Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
		Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
	108	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Winongo	60.622.000,00	50.966.473,70
		Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
		Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga

NO		URAIAN	TARGET	REALISASI
	109	Kegiatan Dana BOS pada SDN Ngegong	128.224.000,00	127.741.642,59
		Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
		Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
	110	Kegiatan Dana BOS pada SDN Patihan	291.212.000,00	284.828.920,41
		Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
		Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
	111	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Pangongangan	77.921.000,00	72.561.710,76
		Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
		Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
	112	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Pangongangan	257.885.000,00	250.426.72-,880
		Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
		Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
	113	Kegiatan Dana BOS pada SDN Sogaten	146.022.000,00	143.093.604,20
		Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
		Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
	114	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Taman	367.227.000,00	363.467.550,83
		Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
		Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
	115	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Taman	71.120.000,00	59.827.636,58
		Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
		Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
	116	Kegiatan Dana BOS pada SDN 03 Taman	86.179.000,00	82.908.985,48
		Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
		Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
	117	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Pandean	290.872.000,00	282.590.116,08
		Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
		Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
	118	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Pandean	271.960.000,00	266.325.875,16
		Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
		Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
	119	Kegiatan Dana BOS pada SDN Banjarejo	378.982.000,00	370.333.976,37
		Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
		Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
	120	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Mojorejo	110.214.000,00	103.042.417,90
		Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
		Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
	121	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Mojorejo	440.083.000,00	431.775.739,79
		Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
		Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
	122	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Manisrejo	284.729.000,00	281.461.320,61
		Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
		Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga

NO		URAIAN	TARGET	REALISASI
	123	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Manisrejo	261.902.000,00	250.590.239,04
		Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
		Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
	124	Kegiatan Dana BOS pada SDN 03 Manisrejo	149.216.000,00	146.734.269,92
		Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
		Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
	125	Kegiatan Dana BOS pada SDN 04 Manisrejo	195.743.000,00	185.226.546,27
		Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
		Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
	126	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Demangan	131.233.000,00	124.261.859,86
		Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
		Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
	127	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Demangan	141.639.000,00	140.025.264,70
		Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
		Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
	128	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Josenan	153.135.000,00	151.882.214,98
		Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
		Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
	129	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Josenan	155.089.019,00	152.706.691,96
		Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
		Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
	130	Kegiatan Dana BOS pada SDN 03 Josenan	86.594.000,00	83.915.013,80
		Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
		Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
	131	Kegiatan Dana BOS pada SDN Kejuron	50.641.000,00	48.853.325,25
		Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
		Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
	132	Kegiatan Dana BOS pada SDN Kuncen	71.660.000,00	66.173.341,01
		Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
		Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
	133	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 1	828.326.000,00	810.550.948,35
		Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
		Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
	134	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 2	830.497.000,00	747.164.084,30
		Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
		Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
	135	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 3	578.939.000,00	576.753.336,34
		Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
		Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
	136	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 4	941.158.000,00	913.097.871,88
		Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
		Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga

NO		URAIAN	TARGET	REALISASI
	137	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 5	475.864.000,00	470.117.687,83
		Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
		Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
	138	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 6	682.643.000,00	586.663.912,56
		Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
		Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
	139	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 7	862.921.000,00	766.763.365,31
		Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
		Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
	140	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 8	566.117.000,00	537.478.237,38
		Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
		Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
	141	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 9	608.966.000,00	351.011.557,80
		Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
		Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
	142	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 10	774.917.000,00	646.716.4454,80
		Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
		Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
	143	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 11	733.151.000,00	671.652.494,39
		Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
		Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
	144	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 12	891.422.000,00	851.667.800,33
		Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
		Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
	145	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 13	787.469.000,00	687.404.639,00
		Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
		Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
	146	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 14	426.175.000,00	372.540.847,18
		Output : 1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
		Outcome : AMP SD dan SMP	1 lembaga	1 lembaga
	147	Kegiatan pelaksanaan Uji coba, USBN dan UN SD dan SMP	1.006.230.000,00	855.273.838,50
		Output : Jumlah lembaga	93 lembaga	112 lembaga
		Outcome : APS SD dan SMP	93 lembaga	112 lembaga
	148	Kegiatan Pembinaan Pengembangan Gugus Sekolah TK, SD, Lomba Lingkungan Sekolah Sehat (LLSS), Gerakan Disiplin Siswa, Pengelolaan Kantin Sekolah Sehat	471.723.920,00	364.126.680,00
		Output : Jumlah lembaga	106 lembaga	106 lembaga
		Outcome : APS SD dan SMP	106 lembaga	106 lembaga
	149	Kegiatan OSN dan Cerdas Cermat SD, SMP	322.191.920,00	293.059.330,00
		Output : Jumlah siswa	322 siswa	293 siswa
		Outcome : APS SD dan SMP	322 siswa	293 siswa

NO		URAIAN	TARGET	REALISASI
	150	Kegiatan Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional dan Festival lomba seni siswa nasional SD dan SMP	1.158.039.600,00	707.291.888,00
		Output : Jumlah siswa	309 siswa	425 siswa
		Outcome : APS Sd dan SMP	309 siswa	425 siswa
	151	program pendidikan anak usia dini	1.739.905.000,00	1.377.185.712,00
	152	kegiatan bantuan BOP PAUD	166.800.000,00	107.959.765,00
		Output : Jumlah lembaga	177 lembaga	180 lembaga
		Outcome : APK PAUD	177 lembaga	180 lembaga
	153	kegiatan seleksi dan pembinaan apresiasi PTK PAUDNI berprestasi	171.600.000,00	98.888.536,00
		Output : Jumlah orang	200 orang	97 orang
		Outcome : APK PAUD	200 orang	97 orang
	154	kegiatan pusat kegiatan gugus PAUD terpadu Kota Madiun	275.000.000,00	186.696.912,00
		Output : Jumlah gugus	22 gugus	22 gugus
		Outcome : APK PAUD	22 gugus	22 gugus
	155	kegiatan workshop kurikulum PAUD	200.200.000,00	134.274.259,00
		Output : Jumlah lembaga	177 lembaga	180 lembaga
		Outcome : APK PAUD	177 lembaga	180 lembaga
	156	kegiatan penyelenggaraan TK Pembina	308.705.000,00	285.639.320,00
		Output : Jumlah lembaga	1 lembaga	1 lembaga
		Outcome : APK PAUD	1 lembaga	1 lembaga
	157	kegiatan pagelaran Hari Anak Nasional	617.600.000,00	563.726.920,00
		Output : Jumlah anak	2.000 anak	2.000 anak
		Outcome : APK PAUD	2.000 anak	2.000 anak
	158	program pendidikan non formal	1.654.850.000,00	1.092.559.096,00
	159	kegiatan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan paket C	150.000.000,00	75.565.295,00
		Output : Jumlah wajib belajar	120 wajib belajar	150 wajib belajar
		Outcome : Presentase lembaga yang sudah melaksnakan uji kopetensi	120 wajib belajar	150 wajib belajar
	160	kegiatan akreditasi pendidikan non formal dan PAUD	162.300.000,00	81.898.793,00
		Output : Jumlah lembaga	30 lembaga	30 lembaga
		Outcome : Presentase lembaga yang sudah melaksnakan uji kopetensi	30 lembaga	30 lembaga
	161	kegiatan workshop peningkatan pengelolaan perpustakaan sekolah	251.350.000,00	188.497.820,00
		Output : Jumlah lembaga	95 lembaga	95 lembaga
		Outcome : Presentase lembaga yang sudah melaksnakan uji kopetensi	95 lembaga	95 lembaga
	162	kegiatan bimbingan teknis exstra kurikuler pembina pramuka	578.450.000,00	407.452.783,00
		Output : Jumlah orang	324 orang	330 orang

NO		URAIAN	TARGET	REALISASI
		Outcome : Presentase lembaga yang sudah melaksnakan uji kopetensi	324 orang	330 orang
	163	kegiatan pembinaan lembaga non formal, kursus dan pendidikan masyarakat	130.000.000,00	59.269.610,00
		Output : Jumlah lembaga	154 lembaga	50 lembaga
		Outcome : Presentase lembaga yang sudah melaksnakan uji kopetensi	154 lembaga	50 lembaga
	164	kegiatan gebyar PNF dalam rangka hari aksara internasional (HAI)	144.800.000,00	110.225.945,00
		Output : Jumlah lembaga	80 lembaga	80 lembaga
		Outcome : Presentase lembaga yang sudah melaksnakan uji kopetensi	80 lembaga	80 lembaga
	165	kegiatan workshop penyusunan bahan ajar mulok bahasa daerah	237.950.000,00	169.648.850,00
		Output : Jumlah lembaga	95 lembaga	95 lembaga
		Outcome : Presentase lembaga yang sudah melaksnakan uji kopetensi	95 lembaga	95 lembaga

2. Alokasi dan Realisasi Belanja

No	Uraian	Alokasi	Realisasi
1.	Urusan Pendidikan		
	Belanja Tidak Langsung	212.081.812.866,00	181.739.167.319,00
	Belanja Langsung	107.767.384.619,00	96.250.608.885,18
	Total Belanja	319.849.197.485,00	277.989.776.204,18

3. Nilai Asset yang Dikuasai

No.	Urusan	Nilai Asset	Keterangan
1.	Pendidikan	Rp. 47.013.165.021	Terdiri dari Tanah, peralatan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya.

e. Proses Perencanaan Pembangunan Daerah

Pembangunan pendidikan di Kota Madiun dilaksanakan dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun Tahun 2014-2019, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kota Madiun Tahun 2014-2019, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Madiun Tahun 2019 dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kota Madiun Tahun 2019.

f. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1.	Gedung	6.920 m2	Baik
2.	Kendaraan Dinas Bermotor	3	Baik
	Perorangan Lain-lain		Baik
3.	Sepeda Motor	50	Baik
4.	Kendaraan Bermotor Beroda	12	Baik
	Dua Lain-lain		Baik
5.	PC Unit	61	Baik
6.	Printer	87	Baik
7.	Laptop	22	Baik
8.	Notebook	21	Baik
9.	AC Unit	20	Baik
10.	AC Split	19	Baik
11.	Kipas Angin	12	Baik
12.	Televisi	15	Baik

g. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

1. Terdapat beberapa kegiatan perlombaan dengan anggaran sampai tingkat Nasional, namun dikarenakan kejuaraan sampai tingkat Propinsi maka anggaran tidak dapat diserap.
2. Terdapat perbedaan penganggaran honorarium narasumber.
3. Kegiatan Lomba dianggarakan sampai dengan lomba ke tingkat Nasional namun kejuaraan hanya menang sampai tingkat propinsi sehingga anggaran untuk tingkat Nasional tidak terserap.
4. Pelaksanaan ujian Paket A, B dan C yang semula dianggarkan dua tahap namun pelakasanaannya hanya sampai dengan tahap I karena peserta UNBK sudah lulus pada tahap I.

Solusi

Kegiatan tahun yang akan datang dilaksanakan sesuai DPA yang ada dan akan mengadakan perubahan di PAK apabila ada perubahan pelaksanakaan kegiatan

2. URUSAN BIDANG KESEHATAN

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Kesehatan.

b. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Urusan pemerintahan Bidang Kesehatan yang dilaksanakan di **Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana serta Rumah Sakit Umum Daerah** Kota Madiun pada Tahun Anggaran 2019, yaitu sebagai berikut:

Tabel III.3
Program dan Kegiatan Urusan Kesehatan Tahun 2019

No	Program	Kegiatan	
1	Program pelayanan administrasi perkantoran	1	kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor
		2	kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah
2	Program pemeliharaan barang milik daerah	1	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan
		2	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas
		3	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala sarana prasarana kantor
3	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1	kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor
		2	kegiatan rehab gedung dan bangunan
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1	kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah
5	Program peningkatan pelayanan dan sumberdaya kesehatan	1	Kegiatan Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar
		2	Kegiatan Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota Madiun
		3	Kegiatan Pembinaan dan Registrasi Sarana Pelayanan Kesehatan
		4	Kegiatan Pengelolaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
		5	Peningkatan Puskesmas Rawat Inap Menjadi Puskesmas Rawat Inap Standar (BK-Prov)
		6	Kegiatan Pembinaan Upaya Kesehatan Tradisional
		7	Kegiatan Peningkatan Upaya Pelayanan Obat dan Perbekalan Kesehatan
		8	kegiatan pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan (DAK)
		9	Kegiatan rehabilitasi puskesmas, puskesmas pembantu dan rumah dinas medis dan paramedic
		10	Kegiatan penyediaan/ peningkatan/ pemeliharaan sarana/ prasarana fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan badan penyelenggaraan jaminan

No	Program	Kegiatan	
			sosial kesehatan (DBH-CHT)
		11	Kegiatan pengadaan sarana, prasarana dan alat kesehatan Puskesmas (DAK)
6	Program upaya kesehatan masyarakat	1	Kegiatan Upaya Kesehatan Olahraga
		2	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu
		3	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bayi dan Balita
		4	Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Sekolah
		5	Kegiatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
		6	Kegiatan Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan
		7	Kegiatan Pengembangan Kota Sehat
		8	Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat di puskesmas Manguharjo
		9	Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat di puskesmas Patihan
		10	Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat di puskesmas Demangan
		11	Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat di puskesmas Banjarejo
		12	Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat di puskesmas Oro-oro Ombo
		13	Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat di puskesmas Tawangrejo
		14	Kegiatan Upaya Kesehatan Lansia
		15	Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat
		16	kegiatan bantuan operasional kesehatan puskesmas manguharjo (DAK)
		17	kegiatan bantuan operasional kesehatan puskesmas patihan (DAK)
		18	kegiatan bantuan operasional kesehatan puskesmas demangan (DAK)
		19	kegiatan bantuan operasional kesehatan puskesmas banjarejo (DAK)
		20	kegiatan bantuan operasional kesehatan puskesmas oro-oro ombo (DAK)
		21	kegiatan bantuan operasional kesehatan puskesmas tawangrejo (DAK)
		22	kegiatan dukungan manajemen BOK (DAK)
		23	kegiatan pengembangan taman posyandu (BK.Prov)
7	Program pencegahan dan pengendalian penyakit	1	Kegiatan Pencegahan Gangguan Jiwa dan Penyalahgunaan NAPZA
		2	Kegiatan Pencegahan Penyakit DBD (Demam Berdarah)
		3	Kegiatan Pengendalian Penyakit TB (Tuberkolosis)
		4	Kegiatan Pengendalian Penyakit HIV/AIDS
		5	Kegiatan Peningkatan Survellance Epidemiologi dan Penanggulangan KLB
		6	Kegiatan Peningkatan Peningkatan Pelayanan Imunisasi pada Wanita Usia Subur (WUS)

No	Program	Kegiatan	
		7	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Imunisasi pada Balita
		8	Kegiatan Deteksi Dini Pencegahan Penyakit Tidak Menular
8	Program penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan BLUD	1	Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan BLUD pada Puskesmas Banjarejo
		2	Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan BLUD pada Puskesmas Demangan
		3	Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan BLUD pada Puskesmas Manguharjo
		4	Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan BLUD pada Puskesmas Oro-oro Ombo
		5	Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan BLUD pada Puskesmas Patihan
		6	Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan BLUD pada Puskesmas Tawangrejo

Sumber : Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun

No.	**Program**	**Kegiatan**	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
3	Program Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan (BLUD)	1	Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan BLUD RSUD
4	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata	1	Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit
		2	Kegiatan Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit
		3	Kegiatan Pembangunan Gedung Instalasi Farmasi dan Gudang Obat Rumah Sakit
		4	Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit (DAK)

Sumber : RSUD Kota Madiun

c. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

❖ Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana

Jumlah Pegawai	Kepangkatan	Tingkat Pendidikan	Struktural / Eselon	Fungsional	Staf
PNS : 299 Honorer : 109	IV/c : 1 IV/b : 6 IV/a : 18 III/d : 62 III/c : 25 III/b : 45 III/a : 80 II/d : 23 II/c : 34 II/b : 3 II/a : 2	Dokter : 22 Dokter Gigi : 10 Apoteker : 9 Pasca Sarjana (S-2) : 11 Sarjana (S-1) : 57 D-4 : 12 Ahli Madya (D-3) : 122 D-1 : 1 SMA/SMEA/ SMF/SPK/ SPRG/STM : 51 SMP : 3 SD : 1	II : 1 III : 4 IV : 26	- Dokter : 20 - Dokter Gigi : 7 - Apoteker : 7 - Asisten Apoteker : 26 - Bidan : 40 - Epidemiolog Kesehatan : 5 - Administrator kesehatan : 4 - Nutrisionis : 13 - Penyuluh Kesehatan Masyarakat : 8 - Perawat : 48 - Perawat Gigi : 17 - Pranata Labkes : 14 - Sanitarian : 12 - Teknisi Elektro Medis : 3 - Perencana : 1 - Analis Kepegawaian : 1 - Pranata Komputer : 1	- Bendahara : 1 - Pengadministrasi persuratan : 2 - Pengadministrasi kepegawaian :1 - Pengadministrasi keuangan : 1 - Pengadministrasi sarana dan prasarana : 1 - Pengelola Keuangan : 1 - Pengadministrasi Umum : 27 - Pengemudi Ambulan : 2 - Pengemudi : 1 - Petugas keamanan : 4
408	**299**	**299**	**31**	**227**	**41**

❖ Rumah Sakit Umum Daerah

Jumlah Pegawai	Kepangkatan	Tingkat Pendidikan	Struktural/ Eselon	Fungsional	Staf
PNS = 206 Kontrak = 40 BLUD = 327	Gol I = 1 Gol II = 38 Gol III = 151 Gol IV =16	SD = 1 SMP = 31 SMA = 163 D3 = 226 D4/ S1 = 129 S2 = 23	II = 0 III = 5 IV = 9 V = 0	Jumlah = 156 Dr Sp = 19 Dr Umum = 19 Dr Gigi = 1 Dr gigi Spesialis=1 Teknisi Kardiovaskuler = 1 Fisioterapis = 4 Terapis Wicara = 1 Nutrisionis = 8 Kesling = 3 Tenaga Teknis Kefarmasian = 30 Apoteker = 6 Bidan = 63 Perawat = 180 Perawat Gigi = 2 Radiografer = 9 Teknis Elektromedis = 3 Analis Kesehatan = 14 Ortetik Prostetik = 1 Rekam Medis dan Informasi Kes = 4	**190**

d. Alokasi dan Realisasi Anggaran

❖ Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana

1. Realisasi Program dan Kegiatan

No	Uraian		Target	Realisasi
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		4,079,429,000.00	2,182,977,005.00
	1	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3,659,429,000.00	1,763,382,247.00
		Output : Persentase kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%
		Outcome : Akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan	75 BB	A
	2	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	420,000,000.00	419,594,758.00
		Output : Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah	100%	100%
		Outcome : Akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan	75 BB	A
2	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah		339,072,800.00	327,307,060.00
	1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan	70,508,800.00	70,327,000.00
		Output : Persentase terwujudnya sarana kantor yang layak pakai	100%	100%
		Outcome : Akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan	75 BB	A

No	Uraian		Target	Realisasi
	2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	189,240,000.00	178,731,310.00
		Output : Persentase terwujudnya kendaraan dinas yang layak pakai	100%	100%
		Outcome : Akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan	75 BB	A
	3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kantor	79,324,000.00	78,248,750.00
		Output : Persentase terwujudnya sarana kantor yang layak pakai	100%	100%
		Outcome : Akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan	75 BB	A
3	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur		2,476,387,000.00	2,051,631,808.00
	1	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	2,452,687,000.00	2,051,631,808.00
		Output : Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kantor sesuai kebutuhan	100%	100%
		Outcome : Akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan	75 BB	A
	2	Kegiatan Rehab Gedung dan Bangunan	23,700,000.00	-
		Output : Jumlah gedung yang direhabilitasi	1 gedung	0 gedung
		Outcome : Akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan	75 BB	A
4	Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan		307,901,000.00	259,573,754.00
	1	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	307,901,000.00	259,573,754.00
		Output : Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang disusun	11 dokumen	16 dokumen
		Outcome : Akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan	75 BB	A
5	Program Peningkatan Pelayanan Dan Sumberdaya Kesehatan		38,864,076,000.00	29,177,458,673.10
	1	Kegiatan Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar	944,283,000.00	780,090,598.00
		Output : Persentase puskesmas dan klinik terakreditasi	71%	35%
		Outcome : Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun	80.09	81.84
	2	Kegiatan Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota Madiun	26,132,356,000.00	18,518,516,567.22
		Output : Persentase masyarakat memiliki jaminan kesehatan prabayar	100%	97.87%
		Outcome : Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun	80.09	81.84
	3	Kegiatan Pembinaan dan Registrasi Sarana Pelayanan	323,648,000.00	282,719,090.00

No		Uraian	Target	Realisasi
		Kesehatan		
		Output : Jumlah sarana pelayanan kesehatan yang beroperasi sesuai perundangan	200 sarana	200 sarana
		Outcome : Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun	80.09	81.84
	4	Kegiatan Pengelolaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	116,599,000.00	71,014,752.00
		Output : Persentase puskesmas dan puskesmas pembantu yang telah melakukan pelayanan kefarmasian sesuai standar	100%	100%
		Outcome : Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun	80.09	81.84
	5	Peningkatan Puskesmas Rawat Inap Menjadi Puskesmas Rawat Inap Standar (BK-Prov)	31,500,000.00	30,000,000.00
		Output : Ketersediaan tambahan tenaga medis di puskesmas rawat inap standart	1 orang	1 orang
		Outcome : Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun	80.09	81.84
	6	Kegiatan Pembinaan Upaya Kesehatan Tradisional	40,825,000.00	39,395,100.00
		Output : Jumlah sarana pelayanan kesehatan tradisional yang dibina	20 sarana	20 sarana
		Outcome : Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun	80.09	81.84
	7	Kegiatan Peningkatan Upaya Pelayanan Obat dan Perbekalan Kesehatan	225,852,000.00	179,700,245.00
		Output : Persentase obat kadaluarsa	< 1%	0.01%
		Outcome : Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun	80.09	81.84
	8	Kegiatan Pengelolaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK)	31,050,000.00	27,568,500.00
		Output : Persentase pengelolaan obat sesuai standar	100%	100%
		Outcome : Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun	80.09	81.84
	9	Kegiatan Rehabilitasi Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Rumah Dinas Medis dan Paramedis	1,201,323,000.00	1,142,586,764.88
		Output : Jumlah gedung yang direhabilitasi	5 gedung	5 gedung
		Outcome : Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas	80.09	81.84

No	Uraian		Target	Realisasi
		Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun		
	10	Kegiatan Penyediaan / Peningkatan / Pemeliharaan Sarana / Prasarana Fasilitas Kesehatan yang Bekerjasama dengan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan (DBH-CHT)	6,791,746,000.00	5,152,465,931.00
		Output : Jumlah kegiatan penyediaan/peningkatan/pemeli-haraan sarana/prasarana fasyankes	3 kegiatan	3 kegiatan
		Outcome : Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun	80.09	81.84
	11	Kegiatan Pengadaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Puskesmas (DAK)	3,024,894,000.00	2,953,401,125.00
		Output : Jumlah paket yang diadakan	2 paket	2 paket
		Outcome : Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun	80.09	81.84
6	Program Upaya Kesehatan Masyarakat		15,556,211,000.00	13,131,157,400.00
	1	Kegiatan Upaya Kesehatan Olahraga	122,138,000.00	118,492,072.00
		Output : Persentase SD/MI yang melakukan test kebugaran pada siswa kelas IV	100%	95.60%
		Outcome : Persentase keluarga sehat	65%	68.21%
	2	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu	527,550,000.00	432,098,884.00
		Output : Persentase kunjungan ibu hamil paripurna	100%	100%
		Outcome : Persentase keluarga sehat	65%	68.21%
	3	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bayi dan Balita	404,395,000.00	366,755,074.00
		Output : Cakupan kunjungan balita paripurna	98%	100.10%
		Outcome : Persentase keluarga sehat	65%	68.21%
	4	Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Sekolah	82,954,000.00	63,939,884.00
		Output : Persentase sekolah sehat	100%	100%
		Outcome : Persentase keluarga sehat	65%	68.21%
	5	Kegiatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	1,122,571,000.00	1,041,961,617.00
		Output : Persentase kelurahan yang mendapatkan promosi kesehatan minimal 18 kali	80%	100%
		Outcome : Persentase keluarga sehat	65%	68.21%
	6	Kegiatan Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan	121,090,000.00	111,262,127.00

No		Uraian	Target	Realisasi
		Output : Persentase TTU dan TPM sehat	85%	85%
		Outcome : Persentase keluarga sehat	65%	68.21%
	7	Kegiatan Pengembangan Kota Sehat	381,491,000.00	286,772,047.00
		Output : Persentase kelurahan yang menerapkan 3 tatanan kota sehat	66.67%	66.67%
		Outcome : Persentase keluarga sehat	65%	68.21%
	8	Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Manguharjo	887,208,000.00	687,264,406.00
		Output : Persentase capaian indikator PKP bidang UKM yang mencapai target	91.36%	90.65%
		Outcome : Persentase keluarga sehat	65%	68.21%
	9	Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Patihan	957,759,000.00	783,658,525.00
		Output : Persentase capaian indikator PKP bidang UKM yang mencapai target	92%	92.60%
		Outcome : Persentase keluarga sehat	65%	68.21%
	10	Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Demangan	728,280,000.00	549,957,535.00
		Output : Persentase capaian indikator PKP bidang UKM yang mencapai target	93%	92.41%
		Outcome : Persentase keluarga sehat	65%	68.21%
	11	Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat Di Puskesmas Banjarejo	980,112,000.00	706,175,247.00
		Output : Persentase capaian indikator PKP bidang UKM yang mencapai target	91%	92%
		Outcome : Persentase keluarga sehat	65%	68.21%
	12	Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Oro-Oro Ombo	938,112,000.00	660,832,029.00
		Output : Persentase capaian indikator PKP bidang UKM yang mencapai target	91.50%	95%
		Outcome : Persentase keluarga sehat	65%	68.21%
	13	Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Tawangrejo	958,776,000.00	713,009,271.00
		Output : Persentase capaian indikator PKP bidang UKM yang mencapai target	94.10%	94.97%
		Outcome : Persentase keluarga sehat	65%	68.21%
	14	Kegiatan Upaya Kesehatan Lansia	112,800,000.00	96,234,563.00
		Output : Persentase pengunjung	60%	93.20%

No		Uraian	Target	Realisasi
		berusia 60 tahun keatas yang mendapat skrining kesehatan		
		Outcome : Persentase keluarga sehat	65%	68.21%
	15	Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat	3,239,946,000.00	2,790,742,519.00
		Output : Persentase kelurahan siaga aktif berstrata PURI	75%	88.89%
		Outcome : Persentase keluarga sehat	65%	68.21%
	16	Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Manguharjo (DAK)	515,000,000.00	510,623,900.00
		Output : Persentase capaian indikator SPM yang mencapai target	100%	75%
		Outcome : Persentase keluarga sehat	65%	68.21%
	17	Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Patihan (DAK)	428,000,000.00	407,908,900.00
		Output : Persentase capaian indikator SPM yang mencapai target	100%	66.67%
		Outcome : Persentase keluarga sehat	65%	68.21%
	18	Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Demangan (DAK)	532,000,000.00	494,765,150.00
		Output : Persentase capaian indikator SPM yang mencapai target	100%	41.67%
		Outcome : Persentase keluarga sehat	65%	68.21%
	19	Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Banjarejo (DAK)	521,000,000.00	519,643,150.00
		Output : Persentase capaian indikator SPM yang mencapai target	100%	58%
		Outcome : Persentase keluarga sehat	65%	68.21%
	20	Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Oro-Oro Ombo (DAK)	511,000,000.00	498,020,000.00
		Output : Persentase capaian indikator SPM yang mencapai target	100%	66.70%
		Outcome : Persentase keluarga sehat	65%	68.21%
	21	Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Tawangrejo (DAK)	484,000,000.00	474,685,100.00
		Output : Persentase capaian indikator SPM yang mencapai target	100%	66.67%
		Outcome : Persentase keluarga sehat	65%	68.21%
	22	Kegiatan Dukungan Manajemen BOK (DAK)	824,000,000.00	655,327,100.00
		Output : Persentase capaian	100%	66.67%

No	Uraian		Target	Realisasi
		indikator SPM yang mencapai target		
		Outcome : Persentase keluarga sehat	65%	68.21%
	23	Kegiatan Pengembangan Taman Posyandu (BK. Prov)	176,029,000.00	161,028,300.00
		Output : Persentase terbentuknya Posyandu PURI menjadi Taman Posyandu	44%	39.62%
		Outcome : Persentase keluarga sehat	65%	68.21%
7	Program Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit		15,556,211,000.00	13,131,157,400.00
	1	Kegiatan Pencegahan Gangguan Jiwa dan Penyalahgunaan NAPZA	99,470,000.00	63,210,107.00
		Output : Persentase puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa melalui UKJBM	100%	100%
		Outcome : Prosentase penanganan penyakit	100%	87.50%
	2	Kegiatan Pencegahan Penyakit DBD (Demam Berdarah)	511,620,000.00	450,733,498.00
		Output : Angka kesakitan DBD (Insidence Rate DBD)	< 50 per 100.000 penduduk	138,66 / 100.000 penduduk
		Outcome : Prosentase penanganan penyakit	100%	87.50%
	3	Kegiatan Pengendalian Penyakit TB (Tuberkolosis)	80,667,000.00	71,169,838.00
		Output : Persentase kenaikan Case Notification Rate pada TB	5%	2.46%
		Outcome : Prosentase penanganan penyakit	100%	87.50%
	4	Kegiatan Pengendalian Penyakit HIV/AIDS	302,277,000.00	268,736,698.00
		Output : Persentase penemuan kasus HIV	4%	12.24%
		Outcome : Prosentase penanganan penyakit	100%	87.50%
	5	Kegiatan Peningkatan Survellance Epidemiologi dan Penanggulangan KLB	64,632,000.00	52,056,801.00
		Output : Persentase respon sistem kewaspadaan dini dan respon (SKDR) kurang dari 24 jam	100%	100%
		Outcome : Prosentase penanganan penyakit	100%	87.50%
	6	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Imunisasi pada Wanita Usia Subur (WUS)	32,264,000.00	15,369,578.00
		Output : Persentase imunisasi TT pada wanita usia subur	90%	86.98%
		Outcome : Prosentase penanganan penyakit	100%	87.50%
	7	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Imunisasi pada Balita	156,365,000.00	130,634,407.00
		Output : Persentase kelurahan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)	100%	100%
		Outcome : Prosentase penanganan penyakit	100%	87.50%
	8	Kegiatan Deteksi Dini Pencegahan Penyakit Tidak	495,047,000.00	448,124,381.00

No		Uraian	Target	Realisasi
		Menular		
		Output : Persentase penduduk usia > 15 tahun diskrining faktor resiko PTM	100%	90.25%
		Outcome : Prosentase penanganan penyakit	100%	87.50%
8	Program Penyediaan Biaya Operasional Dan Pemeliharaan BLUD		10,814,708,000.00	9,586,477,123.00
	1	Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan BLUD pada Puskesmas Banjarejo	1,943,198,000.00	1,773,386,653.00
		Output : Persentase penanganan pengaduan masyarakat	100%	100%
		Outcome : Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun	80.09	81.84
	2	Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan BLUD pada Puskesmas Demangan	2,062,932,000.00	1,900,132,426.00
		Output : Persentase penanganan pengaduan masyarakat	100%	100%
		Outcome : Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun	80.09	81.84
	3	Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan BLUD pada Puskesmas Manguharjo	2,291,990,000.00	1,929,884,799.00
		Output : Persentase penanganan pengaduan masyarakat	100%	100%
		Outcome : Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun	80.09	81.84
	4	Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan BLUD pada Puskesmas Oro-Oro Ombo	1,700,000,000.00	1,509,616,502.00
		Output : Persentase penanganan pengaduan masyarakat	100%	100%
		Outcome : Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun	80.09	81.84
	5	Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan BLUD pada Puskesmas Patihan	1,199,000,000.00	1,066,971,655.00
		Output : Persentase penanganan pengaduan masyarakat	100%	100%
		Outcome : Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun	80.09	81.84
	6	Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan BLUD pada Puskesmas Tawangrejo	1,617,588,000.00	1,406,485,088.00
		Output : Persentase penanganan pengaduan masyarakat	100%	100%

No	Uraian	Target	Realisasi
	Outcome : Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun	80.09	81.84

2. Alokasi dan Realisasi Belanja

No	Uraian	Alokasi	Realisasi
1.	Urusan Kesehatan		
	Belanja Tidak Langsung	25.721.935.158,00	25.806.080.978,00
	Belanja Langsung	74.180.126.800,00	58.216.618.131,10
	Total Belanja	99.902.061.958,00	84.022.699.109.10

3. Nilai Asset yang dikuasai SKPD

No.	Urusan	Nilai Asset	Keterangan
1.	Kesehatan	87,055.191.769,70	

e. Proses Perencanaan Pembangunan Daerah

Pembangunan pendidikan di Kota Madiun dilaksanakan dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun Tahun 2014-2019, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kota Madiun Tahun 2014-2019, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Madiun Tahun 2019 dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kota Madiun Tahun 2019.

f. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan

NO.	NAMA BARANG	JUMLAH	KONDISI
1	Tanah	19	BAIK
2	Alat-Lat Besar	11	BAIK
3	Alat-Alat Angkutan	212	BAIK
4	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	150	BAIK
5	Alat Pertanian	95	BAIK
6	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	5.934	BAIK
7	Alat Studio Dan Alat Komunikasi	311	BAIK
8	Alat-Alat Kedokteran	7.904	BAIK
9	Alat Laboratorium	1.883	BAIK
10	Bangunan Gedung	65	BAIK
11	Monumen	36	BAIK
12	Bangunan Air / Irigasi	6	BAIK
13	Instalasi	3	BAIK
14	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1	BAIK

❖ Rumah Sakit Umum Daerah

1. Realisasi Program dan Kegiatan

No.		URAIAN	TARGET	REALISASI
1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.121.400.000,00	1.112.750.000,00
	1	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	1.121.400.000,00	1.112.750.000,00
		Output : Honorarium PNS dan non PNS yang disediakan	40 orang	40 orang
		Outcome : Nilai akuntabilitas kinerja RSUD Kota Madiun	BB	A
2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.648.233.700,00	1.376.245.740,00
	1	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	1.648.233.700,00	1.376.245.740,00
		Output : Jumlah sarana dan prasarana kantor	35 jenis	35 jenis
		Outcome : Nilai akuntabilitas kinerja RSUD Kota Madiun	BB	A
3		Program Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan BLUD	82.927.220.000,00	87.924.890.924,15
	1	Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan BLUD RSUD	82.927.220.000,00	87.924.890.924,15
		Output : Jenis barang dan jasa yang disediakan, jumlah dokumen perencanaan, laporan capaian kinerja, dan ikhtisar realisasi kinerja OPD yang disusun	57 jenis	56 jenis
		Outcome : Indeks Kepuasan Masyarakat bidang kesehatan RSUD Kota Madiun	78,8	80,35
4		Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	17.875.933.950,00	15.738.309.776,75
	1	Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit	13.914.327.000,00	11.981.095.098,00
		Output : Jumlah alat kesehatan rumah sakit yang dadakan	63 jenis	48 jenis
		Outcome : Indeks Kepuasan Masyarakat bidang kesehatan RSUD Kota Madiun	78,8	80,35
	2	Kegiatan Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit	347.050.000,00	334.327.316,75
		Output : Jumlah bangunan rumah sakit yang direhab	1 paket	1
		Outcome : Indeks Kepuasan Masyarakat bidang kesehatan RSUD Kota Madiun	78,8	80,35

No.		URAIAN	TARGET	REALISASI
	3	Kegiatan Pembangunan Gedung Instalasi Farmasi dan Gudang Obat Rumah Sakit	2.075.756.950,00	1.960.919.050,00
		Output : Jumlah gedung Instalasi Farmasi dan gudang obat rumah sakit yang dibangun	1 unit	1
		Outcome : Indeks Kepuasan Masyarakat bidang kesehatan RSUD Kota Madiun	78,8	80,35
	4	Kegiatan pengadaan alat kesehatan rumah sakit (DAK)	1.538.800.000,00	1.461.968.312,00
		Output : Jumlah alat kesehatan rumah sakit yang diadakan	1 jenis	1 jenis
		Outcome : Indeks Kepuasan Masyarakat bidang kesehatan RSUD Kota Madiun	78,8	80,35

2. Alokasi dan Realisasi Belanja

No	Uraian	Alokasi	Realisasi
1.	Urusan Bidang Kesehatan		
	Belanja Tidak Langsung	18.797.763.560,00	18.091.001.812,00
	Belanja Langsung	103.572.787.650,00	106.152.196.440,90
	Total Belanja	122.370.551.210,00	124.244.189.872,90

3. Realisasi Pemeliharaan dan penguasaan Asset

No.	Urusan	Nilai Asset	Keterangan
1.	Tanah	15.390.000.000,00	
2.	Peralatan dan Mesin	148.063.034.269,06	
3.	Gedung dan Bangunan	43.899.494.555,75	
4.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.448.073.750,00	
5.	Aset Tetap Lainnya	0	
6.	Konstruksi dalam pengerjaan	152.334.450,00	
	Jumlah	212.952.937.024,81	
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Non Tanah	124.737.486.093,80	
	Koreksi Penghitungan Akumulasi	14,80	
	Akumulasi Penyusutan Koreksi	124.737.486.093,80	
	Nilai Aset Netto	88.215.450.931,01	

g. Proses Perencanaan Pembangunan Daerah

Proses Perencanaan Pembangunan mengacu pada kebijakan Rencana Pembangunan Nasional dimulai dari penyusunan Rencana Kerja Tahunan yang berpedoman pada Renstra dan RPJMD Kota Madiun.

Rencana Kerja Tahunan ini merupakan dokumen perencanaan tahunan yang merupakan sinkronisasi dari Bagian Tata Usaha, Bidang Pelayanan, Bidang Penunjang dan Bidang Keuangan yang telah mengakomodasi usulan dari bawah melalui pembahasan di tingkat Instalasi/ Unit

Pelayanan Fungsional dan dipakai sebagai pedoman arah kebijakan pembangunan jangka pendek, yang disusun berdasarkan Rencana Strategis RSUD Kota Madiun Tahun 2014-2019. Dalam Rencana Kerja Tahunan juga dijabarkan prioritas rencana kegiatan beserta pagu indikatif belanja program dan hasil evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya. Prioritas kegiatan dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang diusulkan dalam penetapan Kebijakan Umum Anggaran – Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Rangkaian kegiatan perencanaan selanjutnya adalah Hearing dengan DPRD Kota Madiun untuk mengerucutkan prioritas kegiatan berdasarkan kebijakan anggaran yang ditetapkan, yang akhirnya disusun dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang merupakan penjabaran dari Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dokumen-dokumen yang digunakan dalam kegiatan perencanaan pembangunan dirinci sebagai berikut :

1. Renstra Kementerian Kesehatan;
2. Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur;
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun;
4. Rencana Kegiatan Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Madiun;
5. Review Renstra RSUD Kota Madiun Tahun 2014-2019.
6. Rencana Kerja dan Rencana Kerja Perubahan RSUD Kota Madiun Tahun 2019

h. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1.	Tanah	1	Baik
2.	Alat-Alat Besar	8	Baik
3.	Alat-Alat Angkutan	29	Baik
4.	Alat Bengkel dan Alat Ukur	156	Baik
5.	Alat Pertanian	18	Baik
6.	Alat Kantor dan Rumah Tangga	5.993	Baik
7.	Alat Studio dan Alat Komunikasi	194	Baik
8.	Alat-Alat Kedokteran	6.819	Baik
9.	Alat Laboratorium	1.348	Baik
10.	Bangunan Gedung	42	Baik
11.	Monumen	11	Baik
12.	Bangunan Air/Irigasi	4	Baik
13.	Instalasi	4	Baik
14.	Jaringan	1	Baik
	Jumlah	**14.629**	

i. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

1. Hasil survey akreditasi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun dari target Paripurna, tercapai Madya
2. Capaian Standart Pelayanan Minimal Rumah Sakit belum optimal

3. Sumber Daya Manusia (SDM), terutama kecukupan Dokter Spesialis, Dokter Gigi, Dokter Umum dan Tenaga Fungsional seperti Apoteker, Rekam Medis, Analis Kesehatan, Elektromedik, Fisikawan Medik, Radiografer, Nutrisionis, Dietesien Tenaga Terapi Okupasi, Tenaga Teknik Kefarmasian, Tenaga Teknis Transfusi Darah, Perawat Terampil bersertifikat keahlian khusus (Untuk kebutuhan Pelayanan Anaestesi, Hemodialisis, dan ICU) dan Tenaga Administrasi di ruangan
4. Implementasi SIMRS belum optimal
5. Jaminan Kesehatan Nasional
   a. Pelaksanaan Universal Health Coverage (UHC) di tahun 2019 Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS Kesehatan dimana rumah sakit harus melaksanakan kendali mutu dan kendali biaya agar tidak terjadi "defisit" tanpa meninggalkan kualitas layanan atau memberikan layanan yang sub-standar
   b. Setiap tahun terdapat hutang klaim pembayaran atas pelayanan yang telah diberikan RSUD Kota Madiun terhadap pasien peserta BPJS, sehingga kemungkinan hutang BPJS juga akan semakin besar dan dikhawatirkan akan mempengaruhi pelayanan di RSUD Kota Madiun

Solusi :

1. Meningkatkan mutu pelayanan di Rumah Sakit sesuai Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit dan Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS) Edisi 1.1 melalui:
   a. Pemenuhan sarana dan prasarana sesuai Permenkes No 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit baik penambahan sarana prasarana baru maupun untuk mengganti sarana prasarana yang sudah rusak atau perlu peremajaan;
   b. Pemenuhan kekurangan Sumber Daya Manusia, baik jumlah maupun jenis tenaganya melalui beberapa cara yaitu melaksanakan reposisi dan/atau rekruitmen pegawai non PNS BLUD, mengusulkan rekruitmen PNS, dan menerima mutasi pegawai dari luar RSUD;
   c. Pemeliharaan Sarana Prasarana Rumah Sakit untuk memastikan tersedianya sarana prasarana kesehatan yang aman, bermutu dan layak pakai serta efisien sehingga meminimalkan resiko yang terkait penggunaan sarana prasarana yang ada;

d. Meningkatkan kepatuhan petugas terhadap Standar Prosedur Operasional yang telah ditetapkan melalui kegiatan *assessment* internal dan kegiatan monitoring dan evaluasi;
e. Membentuk Unit SIM RS serta melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SIM RS untuk mendukung pelayanan.

2. Komitmen seluruh SDM mulai dari pimpinan sampai dengan seluruh staf dan unsur pendukung terhadap implementasi SNARS Edisi 1.1 sehingga bisa memberikan pelayanan yang berorientasi pada keselamatan pasien/patient safety dan meningkatkan manajemen pelayanan kesehatan;
3. Mengoptimalkan budaya organisasi melalui kelompok budaya kerja untuk meningkatkan kedisiplinan dan kualitas pelayanan publik;
4. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan ;
5. Menyelenggarakan Forum Pertemuan dan Focus Group Discussion (FGD) untuk meningkatkan peran serta masyarakat sebagai penerima layanan untuk memberikan saran, pendapat dan evaluasi terhadap pelayanan yang sudah diberikan sehingga berperan aktif dalam mengawasi kinerja pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar pelayanan minimal Rumah Sakit yang telah ditetapkan;

   Melakukan evaluasi penilaian kinerja secara terus menerus melalui kegiatan rapat evaluasi, pertemuan dan audit dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di RSUD Kota Madiun baik antar bidang maupun lintas sektor dengan *stake holder* serta Dewan Pengawas.

3. URUSAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

b. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dilaksanakan di **Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang** Kota Madiun pada Tahun Anggaran 2019, yaitu sebagai berikut:

Tabel III.5
Program dan Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2019

No	Program	Kegiatan	
1	program pelayanan administrasi perkantoran	1	kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor
		2	kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah
2	program pemeliharaan barang milik daerah	1	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan
		2	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas
		3	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala sarana prasarana kantor
3	program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1	kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor
4	program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1	kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah
5	program peningkatan kualitas pembangunan gedung dan infrastruktur kota	1	Kegiatan Operasional Pembinaan Jasa Konstruksi
		2	Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan
6	program pengendalian banjir	1	Kegiatan Operasional Pengendali Banjir dan Pintu Air
		2	Kegiatan Mengendalikan Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai.
		3	Kegiatan Pemeliharaan/Perbaikan Rumah Pompa, Pompa Banjir dan Pintu Air
		4	Kegiatan pengadaan pompa banjir
7	program pembangunan saluran/ drainase/ gorong-gorong;	1	Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong di Kota Madiun
		2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin Saluran Drainase/Gorong-gorong Kecamatan
		3	Kegiatan Perencanaan Saluran Baru Drainase/Gorong-Gorong Tahun 2020
		4	program pembangunan Jalan dan Jembatan
		5	Kegiatan Pembangunan Jembatan
		6	Kegiatan Pemutakiran Data Jalan dan Jembatan
		7	Kegiatan Peningkatan Jalan Inspeksi

No	Program	Kegiatan	
			di Kota Madiun
		8	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan
		9	Kegiatan Peningkatan Jalan (DAK)
		10	Kegiatan Peningkatan Jalan
		11	Kegiatan Inspeksi Jembatan
		12	kegiatan Inspeksi Jalan
8	program rehabilitasi/ pemeliharaan Jalan dan Jembatan	1	Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jalan Paket I
		2	Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jalan Paket II
		3	Kegiatan Pemeliharaan Jembatan
		4	Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jalan Paket III
		5	Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kecamatan Kartoharjo
		6	Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kecamatan Manguharjo
		7	Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kecamatan Taman
		8	Kegiatan Pemeliharaan jalan Ring Road
		9	Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jalan Paket IV
9	program perencanaan, pengendalian dan pemanfaatan ruang	1	Kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Ruang dan Bangunan (AP)
		2	Kegiatan Pendataan IMB
		3	Kegiatan Pengawasan Bangunan (Wasbang)
		4	Kegiatan Survey dan Pemetaan

c. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Jumlah Pegawai	**Kepangkatan**	**Tingkat Pendidikan**	**Struktural/ Eselon**	**Fungsional**	**Staf**
PNS =71 Honorer = 31 Upahan = 83	Gol I = - Gol II = 32 Gol III = 36 Gol IV = 3	SD = 1 SMP = 4 SMA = 31 D3 = 10 D4/S1 = 22 S2 = 3	II = 1 III = 4 IV = 11 V = -	**7**	**55**

d. Alokasi dan Realisasi Anggaran

1. Realisasi Program dan Kegiatan

NO		URAIAN	TARGET	REALISASI
1	program pelayanan administrasi perkantoran		3.322.767.520,00	3.120.778.782,00
	1	kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	3.072.767.520,00	2.870.778.782,00
		Output : Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	10 Jenis	10 Jenis
		Outcome : Nilai akuntabilitas kinerja DPU-TR	B	B
	2	kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	250.000.000,00	250.000.000,00
		Output : Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	50 Kali	50 Kali
		Outcome : Nilai akuntabilitas kinerja DPU-TR	B	B
2	program pemeliharaan barang milik daerah		2.546.994.000,00	2.484.113.643,00
	1	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan	1.761.500.000,00	1.745.925.826,00
		Output : Jumlah gedung	4 Gedung	4 Gedung
		Outcome : Nilai akuntabilitas kinerja DPU-TR	B	B
	2	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas	185.494.000,00	169.811.050,00
		Output : Jumlah kendaraan dinas	63 Unit	63 Unit
		Outcome : Nilai akuntabilitas kinerja DPU-TR	B	B
	3	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala sarana prasarana kantor	600.000.000,00	568.376.767,00
		Output : Jumlah sarpras kantor	6 Jenis	6 Jenis
		Outcome : Nilai akuntabilitas kinerja DPU-TR	B	B
3	program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		607.725.000,00	605.061.000,00
	1	kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor	607.725.000,00	605.061.000,00
		Output : Jumlah sarpras kantor	4 Paket	4 Paket
		Outcome : Nilai akuntabilitas kinerja DPU-TR	B	B
4	program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		50.000.000,00	46.427.110,00
	1	kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	50.000.000,00	46.427.110,00
		Output : Jumlah dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen
		Outcome : Nilai akuntabilitas kinerja DPU-TR	B	B
5	program peningkatan kualitas pembangunan gedung dan infrastruktur kota		37.041.496.080,00	32.637.106.666,00
	1	Kegiatan Operasional Pembinaan Jasa Konstruksi	557.800.000,00	361.251.809,00

NO		URAIAN	TARGET	REALISASI
		Output : Jumlah peserta	200 Orang	200 Orang
		Outcome : Persentase bangunan gedung sesuai dengan ketentuan	100 %	100 %
	2	Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan	36.483.696.080,00	32.275.854.857,00
		Output : Jumlah lokasi	22 Lokasi	22 Lokasi
		Outcome : Persentase bangunan gedung sesuai dengan ketentuan	100 %	100 %
6		program pengendalian banjir	46.850.054.160,00	38.680.202.018,00
	1	Kegiatan Operasional Pengendali Banjir dan Pintu Air	200.000.000,00	192.852.000,00
		Output : Persentase berfungsinya mesin pompa pengendali banjir	90 %	90 %
		Outcome : Persentase panjang drainase dalam kondisi baik/pembuangan air tidak tersumbat	90 %	90,96 %
	2	Kegiatan Mengendalikan Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai	41.250.404.160,00	38.092.039.018,00
		Output : Jumlah daerah bebas banjir	11 Lokasi	11 Lokasi
		Outcome : Persentase panjang drainase dalam kondisi baik/pembuangan air tidak tersumbat	90 %	90,96 %
	3	Kegiatan Pemeliharaan/Perbaikan Rumah Pompa, Pompa Banjir dan Pintu Air	399.650.000,00	395.311.000,00
		Output : Jumlah infrastruktur pendukung pompa pengendali banjir	1 Unit	1 Unit
		Outcome : Persentase panjang drainase dalam kondisi baik/pembuangan air tidak tersumbat	90 %	90,96 %
	4	Kegiatan pengadaan pompa banjir	5.000.000.000,00	-
		Output : Jumlah pompa	3 Unit	-
		Outcome : Persentase panjang drainase dalam kondisi baik/pembuangan air tidak tersumbat	90 %	90,96 %
7		program pembangunan saluran/ drainase/ gorong-gorong	24.952.679.720,00	22.541.544.147,00
	1	Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong di Kota Madiun	22.552.679.720,00	20.547.186.300,00
		Output : Panjang saluran yang di bangun	6,6 Km	6,6 Km
		Outcome : Persentase panjang drainase dalam kondisi baik/pembuangan air tidak tersumbat	90 %	90,96 %
	2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin	900.000.000,00	802.329.647,00

NO		URAIAN	TARGET	REALISASI
		Saluran Drainase/Gorong-gorong Kecamatan		
		Output : Jumlah daerah bebas banjir	3 Lokasi	3 Lokasi
		Outcome : Persentase panjang drainase dalam kondisi baik/pembuangan air tidak tersumbat	90 %	90,96 %
	3	Kegiatan Perencanaan Saluran Baru Drainase/Gorong-Gorong Tahun 2020	1.500.000.000,00	1.192.028.200,00
		Output : Jumlah dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen
		Outcome : Persentase panjang drainase dalam kondisi baik/pembuangan air tidak tersumbat	90 %	90,96 %
8	program pembangunan Jalan dan Jembatan		54.532.818.280,00	50.664.994.975,00
	1	Kegiatan Pembangunan Jembatan	390.300.000,00	352.884.960,00
		Output : Jumlah jembatan yang dibangun	1 Jembatan	1 Jembatan
		Outcome : Persentase tingkat kondisi jalan kota baik dan sedang	93 %	93,63 %
	2	Kegiatan Pemutakhiran Data Jalan dan Jembatan	63.000.000,00	61.300.000,00
		Output : Persentase data yang up to date	100 %	100 %
		Outcome : Persentase tingkat kondisi jalan kota baik dan sedang	93 %	93,63 %
	3	Kegiatan Peningkatan Jalan Inspeksi di Kota Madiun	12.327.737.000,00	11.545.605.000,00
		Output : Panjang jalan yang ditingkatkan	0,475 Km	0,475 Km
		Outcome : Persentase tingkat kondisi jalan kota baik dan sedang	93 %	93,63 %
	4	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan	2.896.150.000,00	2.434.840.737,00
		Output : Jumlah dokumen perencanaan jalan dan jembatan	9 Dokumen	9 Dokumen
		Outcome : Persentase tingkat kondisi jalan kota baik dan sedang	93 %	93,63 %
	5	Kegiatan Peningkatan Jalan (DAK)	9.991.681.280,00	9.035.369.278,00
		Output : Panjang jalan yang ditingkatkan	4 Km	4 Km
		Outcome : Persentase tingkat kondisi jalan kota baik dan sedang	93 %	93,63 %
	6	Kegiatan Peningkatan Jalan	28.732.700.000,00	27.107.045.000,00
		Output : Panjang jalan yang ditingkatkan	12,7 Km	12,7 Km
		Outcome : Persentase tingkat kondisi jalan kota baik dan sedang	93 %	93,63 %

NO		URAIAN	TARGET	REALISASI
	7	Kegiatan Inspeksi Jembatan	55.000.000,00	53.800.000,00
		Output : Jumlah dokumen survey dan kondisi jembatan	1 Dokumen	1 Dokumen
		Outcome : Persentase tingkat kondisi jalan kota baik dan sedang	93 %	93,63 %
	8	kegiatan Inspeksi Jalan	76.250.000,00	74.150.000,00
		Output : Jumlah dokumen survey dan kondisi jalan	1 Dokumen	1 Dokumen
		Outcome : Persentase tingkat kondisi jalan kota baik dan sedang	93 %	93,63 %
9		program rehabilitasi/ pemeliharaan Jalan dan Jembatan	42.216.380.080,00	38.292.922.508,00
	1	Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Berkala Jalan Paket I	9.982.583.000,00	9.249.026.960,00
		Output : Jumlah lokasi	12 Lokasi	12 Lokasi
		Outcome : Panjang jalan kota dalam kondisi baik	400,000 Km	405,540 Km
	2	Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Berkala Jalan Paket II	11.278.008.080,00	10.383.948.431,00
		Output : Jumlah lokasi	12 Lokasi	17 Lokasi
		Outcome : Panjang jalan kota dalam kondisi baik	400,000 Km	405,540 Km
	3	Kegiatan Pemeliharaan Jembatan	149.750.000,00	149.017.000,00
		Output : Jumlah jembatan yang dipelihara	10 Lokasi	10 Lokasi
		Outcome : Panjang jalan kota dalam kondisi baik	400,000 Km	405,540 Km
	4	Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Berkala Jalan Paket III	9.939.000.000,00	9.097.182.428,00
		Output : Jumlah lokasi	10 Lokasi	10 Lokasi
		Outcome : Panjang jalan kota dalam kondisi baik	400,000 Km	405,540 Km
	5	Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Kecamatan Kartoharjo	359.750.000,00	346.356.464,00
		Output : Jumlah lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi
		Outcome : Panjang jalan kota dalam kondisi baik	400,000 Km	405,540 Km
	6	Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Kecamatan Manguharjo	359.750.000,00	348.550.062,00
		Output : Jumlah lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi
		Outcome : Panjang jalan kota dalam kondisi baik	400,000 Km	405,540 Km
	7	Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Kecamatan Taman	359.750.000,00	346.895.000,00
		Output : Jumlah lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi
		Outcome : Panjang jalan kota dalam kondisi baik	400,000 Km	405,540 Km
	8	Kegiatan Pemeliharaan jalan Ring Road	249.750.000,00	243.861.043,00
		Output : Jumlah lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi
		Outcome : Panjang jalan kota dalam kondisi baik	400,000 Km	405,540 Km

NO		URAIAN	TARGET	REALISASI
	9	Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Berkala Jalan Paket IV	9.538.039.000,00	8.128.085.120,00
		Output : Jumlah lokasi	14 Lokasi	14 Lokasi
		Outcome : Panjang jalan kota dalam kondisi baik	400,000 Km	405,540 Km
10	program perencanaan, pengendalian dan pemanfaatan ruang		775.039.920,00	600.656.009,00
	1	Kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Ruang dan Bangunan (AP)	300.000.000,00	219.879.968,00
		Output : Persentase pemanfaatan ruang sesuai RTRW yang di Perdakan	100 %	100 %
		Outcome : Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRW	100 %	100 %
	2	Kegiatan Pendataan IMB	158.346.640,00	125.494.174,00
		Output : Data bangunan ber IMB	500 Bangunan	500 Bangunan
		Outcome : Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRW	100 %	100 %
	3	Kegiatan Pengawasan Bangunan (Wasbang)	158.346.640,00	108.696.207,00
		Output : Persentase surat teguran yang diterbitkan	100 %	100 %
		Outcome : Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRW	100 %	100 %
	4	Kegiatan Survey dan Pemetaan	158.346.640,00	146.585.660,00
		Output : Jumlah dokumen SKRK	500 Dokumen	755 Dokumen
		Outcome : Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRW	100 %	100 %

2. Alokasi dan Realisasi Belanja

No	Uraian	Alokasi	Realisasi
1.	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
	Belanja Tidak Langsung	7.680.082.600	6.757.047.780
	Belanja Langsung	212.895.954.760	189.673.806.859
	Total Belanja	220.576.037.360	196.430.854.639

3. Nilai Asset yang Dikuasai

No.	Urusan	Nilai Asset	Keterangan
1.		Rp.	
2.			

e. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Madiun dalam proses perencanaan pembangunan hal pertama yang dlakukan adalah Forum SKPD. Dalam forum tersebut dilakukan integrasi top down dan bottom up planning dari masyarakat. Dalam forum tersebut tetap berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Madiun Tahun 2014-2019 dan selanjutnya dituangkan dalam Draft Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Madiun dan dijadikan bahan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Kota Madiun.

f. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1.	Gedung	4	Baik
2.	Kendaraan	63	Baik
3.	Alat Kantor	10	Baik
4.	Filling Besi	34	Baik
5.	Laptop	24	Baik
6.	Meja	215	Baik
7.	Kursi	1902	Baik
8.	Kursi Putar	20	Baik
9.	Jam	12	Baik
10.	Alat Pendingin	4	Baik
11.	Kipas Angin	102	Baik
12.	Mesin Las Listrik	3	Baik
13.	Gambar Presiden/Wapres	4	Baik
14.	Tiang Bendera	4	Baik
15.	Telepon	4	Baik
16.	Alat-alat Besar	9	Baik
17.	Mesin Ketik	3	Baik
18.	Lemari Besi	17	Baik
19.	Alat Bengkel	26	Baik
20.	AC	114	Baik
21.	Komputer	82	Baik
22.	Printer	92	Baik
23.	Televisi	15	Baik
24.	Lemari Kayu	7	Baik
25.	Sound System	14	Baik
26.	Mikrophone	14	Baik
27.	Alat Ukur	18	Baik
28.	Alat Pemadam Kebakaran	13	Baik
29.	Dump Truk	2	Baik
30.	Kamera	15	Baik
31.	Kursi Panjang	4	Baik
32.	Kursi Besi	500	Baik
33.	Meja Rapat	6	Baik
34.	Troli Dorong	6	Baik
35.	Papan Tulis	1	Baik
36.	Mimbar	2	Baik
37.	Mesin Cuci	1	Baik
38.	Meja Komputer	2	Baik
39.	Brankas	1	Baik
40.	GPS Geodetik	1	Baik
41.	Total Station	1	Baik
42.	Handie Talkie	2	Baik
43.	Mesin Pembersih Trotoar	7	Baik
44.	Kendaraan Roda 4	16	Baik
45.	Kendaraan Roda 3	6	Baik

No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
46.	Kendaraan Roda 2	42	Baik
47.	Eskavator	1	Baik
48.	Baby Roller	1	Baik
49.	Flat Bed Truk	1	Baik
50.	Alat Survey	5	Baik
51.	Pompa Air	29	Baik
52.	Walles	6	Baik
53.	Mesin Potong Rumput	13	Baik
54.	Hydrant dan Genset	5	Baik
55.	Lift	2	Baik
56.	Eskalator	2	Baik
57.	Gerobak Sampah	4	Baik
58.	Safety Help	40	Baik
59.	Alat Deteksi Tulang Beton	2	Baik

g. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

Kegiatan Pengadaan Pompa Banjir tahun anggaran 2019 tidak dapat terserap karena barang yang dibutuhkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang merupakan barang import dari Amerika dan mengingat barang tersebut datangnya bulan maret tahun 2020 maka pengadaannya tidak memungkinkan untuk dilanjutkan karena melewati tahun anggaran dan melebihi dari 50 hari kalender setelah melewati tahun anggaran. Apabila dilanjutkan maka akan menyalahi peraturan tentang pengadaan barang dan jasa Pemerintah.

Solusi

Pengadaan pompa banjir diusulkan di tahun anggaran selanjutnya.

4. URUSAN BIDANG SOSIAL

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial.

b. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Urusan pemerintahan bidang Sosial yang dilaksanakan di **Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak** Kota Madiun pada Tahun Anggaran 2019, yaitu sebagai berikut:

Tabel III.7
Program dan Kegiatan Urusan Sosial Tahun 2019

No	Program	Kegiatan	
1	program pelayanan administrasi perkantoran	1	kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor
		2	kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah
2	program pemeliharaan barang milik daerah	1	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan
		2	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas
		3	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala sarana prasarana kantor
3	program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1	kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor
4	program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1	kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah
5	program pelayanan rehabilitasi dan pemberdayaan kesejahteraan sosial	1	kegiatan pembinaan perintis kemerdekaan/ keluarganya dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan
		2	Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial.
		3	Kegiatan Pemantapan TAGANA
		4	Kegiatan Pemberdayaan Pelayanan Karang Werdha dan Kesejahteraan Lansia
		5	Kegiatan Pendataan PMKS dan PSKS dan Validasi Verifikasi data BPJS
		6	kegiatan pembinaan PSKS se Kota Madiun
		7	kegiatan sunat dan nikah massal
		8	kegiatan peningkatan dan penanganan PMKS

c. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Jumlah Pegawai	Kepangkatan	Tingkat Pendidikan	Struktural/ Eselon	Fungsional	Staf
17	Gol I = - Gol II = 2 Gol III = 13 Gol IV = 2 Honorer = 3	SD = - SMP = - SMA = 10 D3 = 3 D4/ S1 = 5 S2 = 2	II = 1 III = 1 IV = 4 V = -	-	**14**

d. Alokasi dan Realisasi Anggaran

1. Realisasi Program dan Kegiatan

NO		URAIAN	TARGET	REALISASI
1		program pelayanan administrasi perkantoran	2.104.816.380	1.802.458.404
	1	kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	1.549.453.380	1.247.113.001
		Output : Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 paket	10 paket
		Outcome : Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	73 (BB)	BB (2018)
	2	kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	555.363.000	555.345.403
		Output : Jumlah Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah yang dilaksanakan	70 kali	182 kali
		Outcome : Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	73 (BB)	BB (2018)
2		program pemeliharaan barang milik daerah	433.742.000	406.791.850
	1	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan	246.209.000	244.702.000
		Output : Jumlah Gedung yang dipelihara	2 unit	2 unit
		Outcome : Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	73 (BB)	BB (2018)
	2	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas	131.733.000	106.312.650
		Output : Jumlah Kendaraan yang dirawat	25 unit	25 unit
		Outcome : Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	73 (BB)	BB (2018)
	3	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala sarana prasarana kantor	55.800.000	55.777.200
		Output : Jumlah Sarana dan Prasarana yang dipelihara	5 paket	5 paket
		Outcome : Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	73 (BB)	BB (2018)
3		program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	385.733.711	291.974.500
	1	kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor	385.733.711	291.974.500
		Output : Jumlah Paket Pengadaan Sarana dan Prasarana	1 paket	1 paket

NO		URAIAN	TARGET	REALISASI
		Outcome : Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	73 (BB)	BB (2018)
4		program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	72.277.064	69.744.104
	1	kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	72.277.064	69.744.104
		Output : Jumlah Dokumen	8 dokumen	8 dokumen
		Outcome : Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	73 (BB)	BB (2018)
5		program pelayanan rehabilitasi dan pemberdayaan kesejahteraan sosial	4.438.925.508	4.102.047.603
	1	kegiatan pembinaan perintis kemerdekaan/ keluarganya dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan	38.633.900	37.483.000
		Output : Jumlah peserta sarasehan perintis kemerdekaan	78 orang	78 orang
		Outcome : Prosentase penanganan PMKS	97 %	100,3 %
	2	Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial.	1.074.719.096	963.398.452
		Output : berfungsinya kompetensi sosial dan penanganan PMKS	8645 orang	8645 orang
		Outcome : Prosentase penanganan PMKS	97 %	100,3 %
	3	Kegiatan Pemantapan TAGANA	189.040.000	163.899.500
		Output : Jumlah kesiapsiagaan penanganan bencana	22 orang	22 orang
		Outcome : Prosentase penanganan PMKS	97 %	100,3 %
	4	Kegiatan Pemberdayaan Pelayanan Karang Werdha dan Kesejahteraan Lansia	1.370.996.104	1.353.524.130
		Output : Jumlah kesejahteraan LU dan tertib administrasi karang werdha dan lanjut uisa	1800 orang	1800 orang
		Outcome : Prosentase penanganan PMKS	97 %	100,3 %
	5	Kegiatan Pendataan PMKS dan PSKS dan Validasi Verifikasi data BPJS	624.846.000	553.500.760
		Output : tersedianya data fakir miskin Kota Madiun	27 kelurahan	27 kelurahan
		Outcome : Prosentase penanganan PMKS	97 %	100,3 %
	6	kegiatan pembinaan PSKS se Kota Madiun	335.493.792	313.426.749
		Output : Jumlah peserta bimbingan kewirausahaan UEP, motivasi UKS dan pemberdayaan PSM	4 PSKS	4 PSKS
		Outcome : Prosentase penanganan PMKS	97 %	100,3 %
	7	kegiatan sunat dan nikah massal	151.272.880	150.654.000
		Output : Jumlah Peserta sunat dan nikah massal	90 peserta	56 peserta
		Outcome : Prosentase penanganan PMKS	97 %	100,3 %
	8	kegiatan peningkatan dan	653.923.736	566.161.012

NO		URAIAN	TARGET	REALISASI
		penanganan PMKS		
		Output : Jumlah penerima bimbingan motivasi, peningkatan dan pelayanan PMKS	320 orang	320 orang
		Outcome : Prosentase penanganan PMKS	97 %	100,3 %

2. Alokasi da Realisasi Belanja

No	Uraian	Alokasi	Realisasi
1.	Urusan Sosial		
	Belanja Tidak Langsung	3.185.125.400	2.137.778.300
	Belanja Langsung	7.435.494.663	6.673.016.461
	Total Belanja	10.620.620.063	8.810.794.761

3. Asset yang Dikuasai

No.	Urusan	Nilai Asset	Keterangan
1.	Sosial	Rp. 3.654.564.620,78	

e. Proses Perencanaan Pembangunan Daerah

Proses Perencanaan Pembangunan mengacu pada kebijakan Rencana Pembangunan Nasional yang berlaku, Perencanaan pembangunan pada penyelenggaraan masing-masing urusan pemerintahan daerah dilaksanakan secara bertahap dimulai dari pembahasan di tingkat RT, RW sampai dengan tingkat Kota. Proses perencanaan yang melibatkan partisipasi masyarakat melalui kegiatan Musrenbang RKPD, dan Penetapan RKPD, KUA, PPAS, KUA-P, PPAS-P.

f. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1.	Gedung	1	Baik
2.	Kendaraan	28	Baik
3.	Alat Kantor	90	Baik

g. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

Penanganan permasalahan sosial di Kota Madiun terus menunjukkan peningkatan kualitas pelayanannya, beberapa hal yang memerlukan perbaikan di tahun selanjutnya antara lain :

1. Belum optimalnya sinergi Komda PPKS, masih terdapat beberapa celah penghambat dalam penanganan PPKS seperti mekanisme rujukan ke RSJ Spesialis, mekanisme bagi Orang dengan Tempat Tinggal Tidak tetap (T4) maupun orang terlantar (OT) yang meninggal, dan pendampingan pada saat mengantar dan menjemput klien RSJ.

2. Rehabilitasi sosial memerlukan tenaga khusus yang memiliki kompetensi didalam penanganan PPKS, Shelter yang ada belum mempunyai tenaga khusus dalam menangani klien yang ada.
3. Masih ada fakir miskin yang belum mendapat bantuan. Kecepatan update data daerah belum dapat di akomodir oleh Pusat, sehingga secara administrasi fakir miskin sudah tercatat dalam DTKS dan layak mendapat bantuan tetapi belum mendapatkan bantuannya karena penetapan penerima bantuan dari Pusat belum dapat seiring dengan proses finalisasi dari daerah.

Solusi

Dalam meningkatkan penanganan PPKS diperlukan beberapa upaya terkait dengan permasalahan yang ada, seperti :

1. Meningkatkan sinergi Komda PPKS sehingga masing-masing berperan maksimal dalam penanganan PPKS.
2. Menempatkan ASN yang mempunyai kompetensi di bidang sosial sehingga program dan kegiatan sosial dapat direncanakan dengan tepat oleh SDM yang memahami permasalahan social. Khusus untuk penanganan PMKS yang memerlukan layanan rehabilitasi sosial diperlukan rekruitmen petugas perawatan sosial.
3. Pemberian bantuan sosial mengikuti syarat dan ketentuan masing-masing bantuan, terus diupayakan pemutakhiran data agar masyarakat yang terdata dalam DTKS tepat sasaran.

5. URUSAN BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

b. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dilaksanakan di **Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman** Kota Madiun pada Tahun Anggaran 2019, yaitu sebagai berikut:

Tabel III.9
Program dan Kegiatan Urusan Bidang Perumahan
dan Kawasan Permukiman di Kota Madiun Tahun 2019

No	Program	Kegiatan	
1	program pelayanan administrasi perkantoran	1	kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor
		2	kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah
2	program pemeliharaan barang milik daerah	1	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan
		2	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas
		3	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala sarana prasarana kantor
3	program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1	kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor
4	program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1	kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah
5	program lingkungan sehat perumahan	1	Kegiatan Updating Data Kawasan Permukiman Kumuh
		2	Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan (Pavingisasi)
		3	Kegiatan Pembangunan Sanitasi Lingkungan
		4	Kegiatan Pembangunan Landscape Rusunawa
		5	Kegiatan Operasional Satker Infrastruktur Berbasis Masyarakat
		6	Kegiatan Penerbitan Rekomendasi ijin Perumahan
		7	Kegiatan BOP RTLH
		8	Kegiatan BOP Sanitasi Rumah Tangga
		9	Kegiatan Pemeliharaan MCK, IPAL Wilayah Kota Madiun
		10	kegiatan inventarisasi fasum fasos perumahan
6	program pengelolaan ruang terbuka hijau	1	Kegiatan Pemeliharaan Lampu Taman
		2	Kegiatan Sosialisasi Pertamanan, PJU, Pemakaman
		3	Kegiatan Program Taman Bersih (Protasih)
		4	Kegiatan Perawatan Pohon Lindung pada Tepi Jalan dan RTH Pulau

No	Program	Kegiatan	
			Jalan/Median Jalan
		5	Kegiatan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum
		6	Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana TMP
		7	Kegiatan pemeliharaan makam Pace Keras
		8	Pemeliharaan Kawasan Hutan Kota
		9	Kegiatan Peningkatan Fasilitas Taman Kota
		10	Kegiatan Prometer (Program Madiun Terang)
		11	Kegiatan Penataan Ruang Terbuka Hijau.
		12	Kegiatan Pemasangan Jaringan dan Materisasi PJU.
		13	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman.
		14	Kegiatan Pemeliharaan Taman Alun-Alun
		15	Kegiatan Pemeliharaan Taman Bantaran
		16	Kegiatan Pemasangan Lampu Hemat Energi
		17	kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pertamanan
		18	kegiatan pengadaan kendaraan operasional pertamanan dan PJU

c. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Jumlah Pegawai	Kepangkatan	Tingkat Pendidikan	Struktural/ Eselon	Fungsional	Staf
22	Gol I = - Gol II = 12 Gol III = 8 Gol IV = 2	SD = SMP = SMA = 9 D3 = 6 D4/ S1 = 3 S2 = 2	II = 1 III = 1 IV = 3 V = -	**4**	**15**

d. Alokasi dan Realisasi Anggaran

1. Realisasi Program dan Kegiatan

NO		URAIAN	TARGET	REALISASI
1	**program pelayanan administrasi perkantoran**		**1.845.638.000**	**1.622.023.936,00**
	1	kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	1.661.758.000	1.438.342.336
		Output : Jumlah peralatan dan perlengkapan Kantor	75 jenis	75 jenis
		Outcome : Prosentase Terlaksananya Administrasi Perkantoran	100%	100%
	2	kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	183.880.000	183.681.600
		Output : Jumlah Perjalanan Dinas	50 kali	51 kali

NO		URAIAN	TARGET	REALISASI
		Outcome : Prosentase Terlaksananya Administrasi Perkantoran	100%	100%
2	**program pemeliharaan barang milik daerah**		**2.266.939.400**	**1.357.425.215,88**
	1	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan	244.900.000	238.283.093,88
		Output : Jumlah Gedung	2	2
		Output : Prosentase Barang Inventaris Kantor dalam Kondisi Baik	100%	100%
	2	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas	1.531.973.000	870.725.372
		Output : Jumlah Kendaraan	26	26
		Output : Prosentase Barang Inventaris Kantor dalam Kondisi Baik	100%	100%
	3	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala sarana prasarana kantor	490.066.400	248.416.750
		Output : Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor yang dimaintain	16	16
		Output : Prosentase Barang Inventaris Kantor dalam Kondisi Baik	100%	100%
3	**program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**		**1.041.850.000**	**995.556.962,92**
	1	kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor	1.041.850.000	995.556.962,92
		Output : Jumlah Jenis	4 jenis	4 jenis
		Outcome : Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%
4	program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		31.630.000	27.333.744
	1	kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	31.630.000	27.333.744
		Output : Jumlah Dokumen	10 dokumen	10 dokumen
		Outcome : Prosentase Dokumen Perencanaan/Laporan yang disusun tepat waktu	100%	100%
5	program lingkungan sehat perumahan		7.409.753.840	6.822.002.291,21
	1	Kegiatan Updating Data Kawasan Permukiman Kumuh	100.000.000	98.526.461
		Output : Jumlah Paket	1 paket	1 paket
		Outcome : Rasio Rumah Layak Huni	99,42%	99,95%
	2	Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan (Pavingisasi)	6.242.739.600	5.728.837.826,21
		Output : Jumlah Lokasi	27 lokasi	27 lokasi
		Outcome : Rasio Rumah Layak Huni	99,42%	99,95%
	3	Kegiatan Pembangunan Landscape Rusunawa	359.622.240	313.670.580
		Output : Jumlah Unit	1 unit	1 unit
		Outcome : Rasio Rumah Layak Huni	99,42%	99,95%
	4	Kegiatan Operasional Satker Infrastruktur Berbasis Masyarakat	227.400.000	223.404.023
		Output : Jumlah Paket	1 paket	1 paket
		Outcome : Rasio Rumah Layak	99,42%	99,95%

NO		URAIAN	TARGET	REALISASI
		Huni		
	5	Kegiatan Penerbitan Rekomendasi ijin Perumahan	16.772.000	9.716.377
		Output : Jumlah Unit	1 lokasi	1 lokasi
		Outcome : Rasio Rumah Layak Huni	99,42%	99,95%
	6	Kegiatan BOP RTLH	150.000.000	147.651.710
		Output : Jumlah Dokumen	1 dokumen	1 dokumen
		Outcome : Rasio Rumah Layak Huni	99,42%	99,95%
	7	Kegiatan BOP Sanitasi Rumah Tangga	100.000.000	97.213.490
		Output : Jumlah Lokasi	1 lokasi	1 lokasi
		Outcome : Rasio Rumah Layak Huni	99,42%	99,95%
	8	Kegiatan Pemeliharaan MCK, IPAL Wilayah Kota Madiun	172.220.000	169.058.518
		Output : Jumlah Paket	1 paket	1 paket
		Outcome : Rasio Rumah Layak Huni	99,42%	99,95%
	9	kegiatan inventarisasi fasum fasos perumahan	41.000.000	33.923.306
		Output : Jumlah lokasi	25 lokasi	25 lokasi
		Outcome : Rasio Rumah Layak Huni	99,42%	99,95%
6		program pengelolaan ruang terbuka hijau	28.216.081.500	24.655.980.551
	1	Kegiatan Pemeliharaan Lampu Taman	422.000.000	384.328.185,85
		Output : Jumlah Lokasi	6 lokasi	6 lokasi
		Outcome : Luasan RTH yang dipelihara	16 ha	55,92 ha
	2	Kegiatan Sosialisasi Pertamanan, PJU, Pemakaman	643.500.000	601.940.604
		Output : Jumlah Kegiatan Sosialisasi	3 jenis	3 jenis
		Outcome : Luasan RTH yang dipelihara	16 ha	55,92 ha
	3	Kegiatan Program Taman Bersih (Protasih)	2.983.880.000	2.964.145.350
		Output : Jumlah Tenaga	105 orang	105 orang
		Outcome : Luasan RTH yang dipelihara	16 ha	55,92 ha
	4	Kegiatan Perawatan Pohon Lindung pada Tepi Jalan dan RTH Pulau Jalan/Median Jalan	599.620.000	578.917.514
		Output : Jumlah Jenis	3 jenis	3 jenis
		Outcome : Luasan RTH yang dipelihara	16 ha	55,92 ha
	5	Kegiatan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum	268.500.000	264.131.321
		Output : Jumlah Titik	4502 titik	4502 titik
		Outcome : Luasan RTH yang dipelihara	16 ha	55,92 ha
	6	Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana TMP	723.500.000	658.659.178,38
		Output : Jumlah Lokasi	1 lokasi	1 lokasi
		Outcome : Luasan RTH yang dipelihara	16 ha	55,92 ha
	7	Kegiatan pemeliharaan makam Pace Keras	191.000.000	183.267.881
		Output : Jumlah Lokasi	1 lokasi	1 lokasi

NO		URAIAN	TARGET	REALISASI
		Outcome : Luasan RTH yang dipelihara	16 ha	55,92 ha
	8	Pemeliharaan Kawasan Hutan Kota	620.450.000	569.075.486
		Output : Luas areal Kawasan Hutan Kota yang terpelihara	2 ha	2,76 ha
		Outcome : Luasan RTH yang dipelihara	16 ha	55,92 ha
	9	Kegiatan Peningkatan Fasilitas Taman Kota	7.979.679.120	5.534.483.823,65
		Output : Jumlah lokasi	8 lokasi	13 lokasi
		Outcome : Luasan RTH yang dipelihara	16 ha	55,92 ha
	10	Kegiatan Promater (Program Madiun Terang)	532.039.040	507.635.186
		Output : Jumlah tenaga	16 orang	16 orang
		Outcome : Luasan RTH yang dipelihara	16 ha	55,92 ha
	11	Kegiatan Penataan Ruang Terbuka Hijau.	952.600.000	924.487.641
		Output : Jumlah lokasi	7 lokasi	7 lokasi
		Outcome : Luasan RTH yang dipelihara	16 ha	55,92 ha
	12	Kegiatan Pemasangan Jaringan dan Materisasi PJU.	2.894.270.000	2.743.275.143
		Output : Jumlah titik	350 titik	404 titik
		Outcome : Luasan RTH yang dipelihara	16 ha	55,92 ha
	13	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman.	4.223.297.500	3.822.990.500,56
		Output : Jumlah lokasi	11 lokasi	11 lokasi
		Outcome : Luasan RTH yang dipelihara	16 ha	55,92 ha
	14	Kegiatan Pemeliharaan Taman Alun-Alun	619.049.960	586.218.557
		Output : Jumlah lokasi	1 lokasi	1 lokasi
		Outcome : Luasan RTH yang dipelihara	16 ha	55,92 ha
	15	Kegiatan Pemeliharaan Taman Bantaran	229.000.000	211.938.123
		Output : Jumlah lokasi	1 lokasi	1 lokasi
		Outcome : Luasan RTH yang dipelihara	16 ha	55,92 ha
	16	Kegiatan Pemasangan Lampu Hemat Energi	1.656.650.000	1.630.406.707
		Output : Jumlah lampu hemat energi	300 buah	300 buah
		Outcome : Luasan RTH yang dipelihara	16 ha	55,92 ha
	17	kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pertamanan	271.200.000	259.901.750
		Output : Jumlah jenis	4 jenis	4 jenis
		Outcome : Luasan RTH yang dipelihara	16 ha	55,92 ha
	18	kegiatan pengadaan kendaraan operasional pertamanan dan PJU	2.405.845.880	2.230.177.600
		Output : Jumlah kendaraan operasional	5 unit	5 unit
		Outcome : Luasan RTH yang dipelihara	16 ha	55,92 ha

2. Alokasi dan Realisasi Belanja

Uraian	Alokasi	Realisasi
Urusan Perumahan		
Belanja Tidak Langsung	2.230.566.698	2.034.944.602
Belanja Langsung	40.811.892.740,00	35.480.322.701
Total Belanja	43.042.459.438	37.515.267.303

3. Asset yang dikuasai

Urusan	Nilai Asset	Keterangan
Perumahan dan Permukiman	Rp. 45.924.440.038,16	-

e. Proses Perencanaan Pembangunan

Proses penyusunan rencana kerja 2019 dan dokumen yang dipergunakan (RKA 2019 dan DPA 2019)

f. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1.	Gedung	1	Baik
2.	Kendaraan	29	Baik
3.	Alat Kantor		
	- Meja Kerja	24	Baik
	- Kursi kerja	39	Baik
	- Filling Kabinet	1	Baik
	- Foto Presiden dan Wakil Presiden	2	Baik
	- Garuda Pancasila	1	Baik
	- Kaca Cermin	2	Baik
	- Jam Dinding	3	Baik
	- Lemari Es	1	Baik
	- Pesawat Telepon	2	Baik
	- TV	3	Baik
	- AC	3	Baik
	- Pigura	2	Baik
	- Layar Proyektor dan Proyektor	1	Baik
	- Lemari Arsip Kayu		Baik
	- Komputer	1	Baik
	- Laptop	5	Baik
	- Printer	10	Baik
	- Dispenser	14	Baik
	- Papan Tulis	3	Baik
	- Sofa	2	Baik
	- Kipas Angin	1	Baik
		1	Baik

g. Permasalahan dan Solusi

- Terdapat permasalahan gagal tender pada RTH Cokrobasonto (Kegiatan Peningkatan Fasilitas Taman Kota) dikarenakan rekanan/penyedia tidak memenuhi kualifikasi serta rencananya akan dilakukan retender waktu tidak mencukupi. RTH cokrobasonto tersebut akan dilaksanakan pada tahun 2020. Walaupun terjadi gagal tender capaian kinerja Kegiatan Peningkatan Fasilitas Taman

Kota melebihi dari target (8 lokasi) dengan realisasi 13 lokasi yaitu meliputi 7 lokasi pembangunan RTH baru (RTH Tlogo Mas,RTH Taman Kelir/Asabri Selo,RTH Nusa Penida,RTH Kelapa Sari,RTH Klegen,RTH Adi Sucipto,RTH Ngebrak) dan 6 rehabilitasi RTH yang sudah ada (Taman UKS,Taman Depan INKA,RTH Monumen TGP,RTH Kapten Saputro,Taman Perempatan Jalan Bali, Pembenahan Timur Pos Polisi)

- Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman terus melakukan peningkatan RTH baik melakukan pemeliharaan dan pembangunan. Pemeliharaan dilakukan melalui perapihan, peremajaan, pengendalian pertumbuhan tanaman Ruang Terbuka Hijau dapat berfungsi dan dapat dimanfaatkan masyarakat. Pembangunan RTH meliputi penambahan fasilitas yang tersebar diberbagai wilayah dikota madiun dengan memakai konsep taman tematik yang artinya taman tematik tersebut disesuikan dengan icon wilayah yang akan dibangun. Peran serta masyarakat sangatlah diperlukan untuk turut menjaga agar tidak terjadi aksi vandalisme dan memanfaatkan sarana prasarana taman tersebut baik untuk kegiatan olah raga maupun wisata. RTH saat ini masih terasa kurang dan kedepan akan dilakukan pembangunan secara bertahap. Selain Ruang Terbuka Hijau, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Madiun terus membenahi Penerangan Jalan Umum baik dengan melakukan penambahan titik PJU baru maupun melakukan konversi ke LED yang lebih terang dan hemat energi.
- Disamping RTH dan PJU terdapat 2 lokasi makam yang dikelola oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Madiun yaitu Makam Pace Keras dan Taman Makam Pahlawan. Selain 2 makam tersebut Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Madiun juga menangani makam yang ada dikota madiun yang merupakan asset Pemerintah Kota Madiun dengan meningkatkan fasilitas makam seperti pemagaran,rehabilitasi maupun pengecatan. Sampai pada tahun 2019 sudah 60 makam yang telah ditingkatkan fasilitasnya. Kedepan akan dilakukan kembali peningkatan fasilitasnya demi menjaga asset Pemerintah Kota Madiun.
- Salah satu indikator dalam peningkatan permukiman yang sehat adalah rumah yang layak huni. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman disebutkan Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan

bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Hal ini dapat didefinisikan untuk menuju permukiman yang sehat, dilakukan upaya untuk rehabilitasi rumah tidak layak huni. Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) belum mencapai target karena antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 tidak ada program bantuan RTLH dan baru tahun 2018 ini dilaksanakan. Pada tahun 2019 dari 430 unit rumah yang tidak layak masih terdapat 20 unit rumah yang tidak menerima bantuan RTLH disebabkan beberapa hal antara lain : target sasaran penerima bantuan yang tidak masuk pada Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 57/HUK/2017 tentang Penetapan data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin Tahun 2017,warga melakukan perbaikan sendiri serta adanya penolakan dari penerima bantuan yang menolak program tersebut.

6. URUSAN BIDANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

b. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Urusan pemerintahan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Madiun pada Tahun Anggaran 2019, yaitu sebagai berikut:

Tabel III.11
Program dan Kegiatan Urusan bidang Ketentraman,
Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kota Madiun Tahun 2019

No	Program	Kegiatan	
1	program pelayanan administrasi perkantoran	1	kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor
		2	kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah
2	program pemeliharaan barang milik daerah	1	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan
		2	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas
		3	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala sarana prasarana kantor
3	program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1	kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
		2	kegiatan pembangunan gedung
4	program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1	kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah
5	program pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan walikota	1	Kegiatan Operasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota
		2	Kegiatan Pembinaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota
6	program pemberdayaan satuan polisi pamong praja dalam pelaksanaan tugas	1	Kegiatan Bimtek Anggota Satpol PP
		2	Kegiatan Peringatan HUT Satuan Polisi Pamong Praja se Jawa Timur
		3	Kegiatan Jambore Satuan Polisi Pamong Praja se Jawa Timur
7	program peningkatan pemberdayaan perlindungan masyarakat	1	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
		2	Kegiatan Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
		3	Kegiatan Peningkatan Peran dan

No	Program	Kegiatan	
			Partisipasi Satlinmas dalam Memperingati hari-hari Besar Nasional dan Lainnya
		4	Kegiatan Sosialisasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Persiapan Pengamanan Pilkada, Pileg dan Pilpres
		5	Kegiatan Pengamanan Pilkada, Pileg dan Pilpres di Kelurahan dan Kecamatan se Kota Madiun
		6	Kegiatan Pelepasan dan Penurunan Alat Peraga Peserta Pilkada, Pileg dan Pilpres
8	program pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	1	Kegiatan Penertiban Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
		2	Kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
		3	Kegiatan Patroli Wilayah Satpol PP
		4	Kegiatan Pembinaan, Pengendalian, Pengamanan Kegiatan Pemerintah
9	program peningkatan kesiapsiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	1	Kegiatan Pembekalan dan Pelatihan Penanggulangan Kebakaran
		2	Kegiatan Inspeksi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran di Instansi Pemerintah dan Swasta
		3	Kegiatan Operasi Pemadam Kebakaran
		4	Kegiatan Penyuluhan Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran

Sumber : Satpol PP Kota Madiun

No	**Progam**	**Kegiatan**	
1	program pelayanan administrasi perkantoran	1	kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor
		2	kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah
2	program pemeliharaan barang milik daerah	1	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan
		2	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas
		3	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala sarana prasarana kantor
3	program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1	kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor
4	program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1	kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah
5	program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	1	Kegiatan Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana
		2	Kegiatan Penyuluhan Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Alam

No	Progam	Kegiatan	
		3	Kegiatan Mitigasi Penanggulangan Bencana

Sumber : BPBD Kota Madiun

c. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Jumlah Pegawai	Kepangkatan	Tingkat Pendidikan	Struktural/ Eselon	Fungsional	Staf
PNS = 41	Gol I = 4 Gol II = 11 Gol III = 23 Gol IV = 3	SD = 3 SMP = 4 SMA = 16 D3 = 3 D4/ S1 = 14 S2 = 1	II = 1 III = 1 IV = 7 V = -		

Sumber : Satpol PP Kota Madiun

Jumlah Pegawai	Kepangkatan	Tingkat Pendidikan	Struktural/ Eselon	Fungsional	Staf
8 orang	Gol I = 0 Gol II = 2 Gol III = 5 Gol IV = 1	SD = 0 SMP = 0 SMA = 5 D3 = 0 D4/ S1 = 1 S2 = 2	II = 0 III = 1 IV = 3 V = 0	-	4

Sumber : BPBD Kota Madiun

a. Alokasi dan Realisasi Anggaran

1. Realisasi Program dan Kegiatan

❖ Satpol PP

NO		URAIAN	TARGET	REALISASI
1	program pelayanan administrasi perkantoran		2.676.797.520,00	2.543.590.634,00
	1	kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	2.396.797.520,00	2.396.797.520,00
		Output : Jumlah Barang Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	7 jenis	7 jenis
		Outcome : Nilai Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja	70 BB	76 BB
	2	kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	280.000.000,00	280.000.000,00
		Output : Perjalanan Dinas Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	30 Kali Kegiatan	53 Kali Kegiatan
		Outcome : Nilai Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja	70 BB	76 BB
2	program pemeliharaan barang milik daerah		661.472.000,00	574.643.739,00
	1	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan	50.000.000,00	49.633.000,00
		Output : Gedung kantor yang dipelihara	1 gedung	1 gedung

NO		URAIAN	TARGET	REALISASI
		Outcome : Nilai Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja	76 BB	76 BB
	2	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas	581.472.000,00	495.083.879,00
		Output : Kendaraan Dinas yang dipelihara	33 unit	33 unit
		Outcome : Nilai Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja	70 BB	76 BB
	3	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala sarana prasarana kantor	30.000.000,00	29.926.860,00
		Output : Jenis sarana dan Prasarana Kantor	6 jenis	6 jenis
		Outcome : Nilai Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja	70 BB	76 BB
3	program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		556.050.000,00	544.641.000,00
	1	kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	381.050.000,00	370.941.500,00
		Output : Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	95 orang	95 orang
		Outcome : Nilai Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja	70 BB	76 BB
	2	kegiatan pembangunan gedung	175.000.000,00	173.700.00,00
		Output : Jumlah Pagar dan Tempat Parkir	2 jenis	2 jenis
		Outcome : Nilai Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja	70 BB	76 BB
4	program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		99.850.000,00	82.867.540,00
	1	kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	99.850.000,00	82.867.540,00
		Output : Jumlah Dokumen Perencanaan/Pelaporan	9 dokumen	9 dokumen
		Outcome : Nilai Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja	70 BB	76 BB
5	program pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan walikota		354.787.000,00	273.806.925,00
	1	Kegiatan Operasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	154.787.000,00	124.320.432,00
		Output : Jumlah penyelesaian pelanggaran Perda dan Perwal	100%	100%
		Outcome : Cakupan Penegakan Perda dan Perwal	100%	100%
	2	Kegiatan Pembinaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	200.000.000,00	149.486.493,00
		Output : Jumlah penyelesaian pelanggaran Perda dan Perwal	300 orang	300 orang
		Outcome : Cakupan Penegakan Perda dan PErwal	100%	100%
6	program pemberdayaan satuan polisi		475.391.000,00	422.825.073.00

NO		URAIAN	TARGET	REALISASI
	pamong praja dalam pelaksanaan tugas			
	1	Kegiatan Bimtek Anggota Satpol PP	209.429.000,00	201.554.145,00
		Output : Jumlah Peserta Diklat/ Bimtek yang diikuti	86 orang	39 orang
		Outcome : Cakupan Patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	9 kali	9 kali
	2	Kegiatan Peringatan HUT Satuan Polisi Pamong Praja se Jawa Timur	224.962.000,00	194.970.928,00
		Output : Jumlah Peserta HUT Satpol PP se Jawa Timur	500 orang	1.639 orang
		Outcome : Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	9 kali	9 kali
	3	Kegiatan Jambore Satuan Polisi Pamong Praja se Jawa Timur	41.000.000,00	26.300.000,00
		Output : Jumlah Peserta Jambore Satpol PP	20 orang	16 orang
		Outcome : Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	9 kali	9 kali
7	program peningkatan pemberdayaan perlindungan masyarakat		1.173.652.000,00	1.117.297.495,00
	1	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	98.395.000,00	94.300.000,00
		Output : Jumlah Masyarakat yang diberdayakan dalam peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	801 orang	801 orang
		Outcome : Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) Kota	2 orang	1.3 orang
	2	Kegiatan Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	376.020.000,00	368.352.180,00
		Output : Jumlah Pos Kamling	825 buah	803 buah
		Outcome : Cakupan Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kota	2 orang	1.3 orang
	3	Kegiatan Peningkatan Peran dan Partisipasi Satlinmas dalam Memperingati hari-hari Besar Nasional dan Lainnya	110.000.000,00	88.759.473,00
		Output : Jumlah Personil Satlinmas yang ikut dalam upacara Hari-hari Besar Nasional	1.300 orang	555 orang
		Outcome : Cakupan Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kota	2 orang	1.3 orang
	4	Kegiatan Sosialisasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Persiapan Pengamanan Pilkada, Pileg dan Pilpres	180.000.000,00	163.885.842,00
		Output : Jumlah Peserta Sosialisasi Ketentraman dan	621 orang	1.242 orang

NO		URAIAN	TARGET	REALISASI
		KEtertiban Umum persiapan Pengamanan Pilkada, Pileg dan Pilpres		
		Outcome : Cakupan Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kota	2 orang	1.3 orang
	5	Kegiatan Pengamanan Pilkada, Pileg dan Pilpres di Kelurahan dan Kecamatan se Kota Madiun	409.237.000,00	402.000.000,00
		Output : Jumlah TPS Pengamanan Pilkada, Pileg dan Pilpres di Kelurahan dan Kecamatan se Kota Madiun	30 lokasi	30 lokasi
		Outcome : Cakupan Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kota	2 orang	1.3 orang
	6	Kegiatan Pelepasan dan Penurunan Alat Peraga Peserta Pilkada, Pileg dan Pilpres	0	0
		Output : Alat peraga peserta Pilkada, Pileg dan Pilpres	0 alat peraga	0 alat peraga
		Outcome : Cakupan Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kota	2 orang	1.3 orang
8		program pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	1.582.006.000,00	1.273.903.747,00
	1	Kegiatan Penertiban Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	778.315.000,00	537.601.302,00
		Output : Jumlah Pelanggaran K3 yang terselesaikan	1.420 kasus	3.628 kasus
		Outcome : Cakupan Patroli Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	9 kali	9 kali
	2	Kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	181.590.000,00	159.310.033,00
		Output : Jumlah peserta rapat Koordinasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	390 orang	1.760 orang
		Outcome : Cakupan Patroli Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	9 kali	9 kali
	3	Kegiatan Patroli Wilayah Satpol PP	253.442.000,00	240.644.426,00
		Output : Jumlah Patroli per hari	9 kali	9 kali
		Outcome : Cakupan Patroli Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	9 kali	9 kali
	4	Kegiatan Pembinaan, Pengendalian, Pengamanan Kegiatan Pemerintah	368.659.000,00	336.347.986,00
		Output : Jumlah Pengamanan	240 kali	944 kali
		Outcome : Cakupan Patroli Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	9 kali	9 kali
9		program peningkatan kesiapsiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	751.672.000,00	678.587.986,00
	1	Kegiatan Pembekalan dan	198.388.000,00	167.290.169,00

NO		URAIAN	TARGET	REALISASI
		Pelatihan Penanggulangan Kebakaran		
		Output : Jumlah Peserta Pembekalan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana Kebakaran	200 orang	200 orang
		Outcome : Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kota	100%	100%
	2	Kegiatan Inspeksi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran di Instansi Pemerintah dan Swasta	91.859.000,00	77.577.279,00
		Output : Jumlah Lokasi Instansi Pemerintah dan Swasta	12 lokasi	109 lokasi
		Outcome : Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kota	100%	100%
	3	Kegiatan Operasi Pemadam Kebakaran	375.470.000,00	365.585.542,00
		Output : Jumlah patroli operasi	24 kali	90 kali
		Outcome : Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rite)	100%	100%
	4	Kegiatan Penyuluhan Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	85.955.000,00	68.134.996,00
		Output : Jumlah Peserta Penyuluhan tentang Pencegahan dan Penanggulangan kebakaran	300 orang	300 orang
		Outcome : Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kota	100%	100%

❖ BPBD

NO		URAIAN	TARGET	REALISASI
1	program pelayanan administrasi perkantoran		570.200.000	529.255.019
	1	kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	430.200.000	390.073.069
		Output : Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	11 jenis	11 jenis
		Outcome : Nilai Akuntabilitas Kinerja BPBD	BB	BB
	2	kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	140.000.000	139.181.950
		Output : Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	10 kali	34 kali
		Outcome : Nilai Akuntabilitas Kinerja BPBD	BB	BB
2	program pemeliharaan barang milik daerah		223.800.000	200.862.012
	1	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan	50.000.000	49.500.000
		Output : Jumlah kantor yang dipelihara	1 paket	1 paket
		Outcome : Nilai Akuntabilitas Kinerja BPBD	BB	BB
	2	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas	153.000.000	130.615.141
		Output : Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	5 unit	5 unit
		Outcome : Nilai Akuntabilitas Kinerja BPBD	BB	BB
	3	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala	20.800.000	20.746.871

NO		URAIAN	TARGET	REALISASI
		sarana prasarana kantor		
		Output : Jumlah sarana prasarana kantor yang dipelihara	7 unit	7 unit
		Outcome : Nilai Akuntabilitas Kinerja BPBD	BB	BB
3	program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		595.400.000	584.373.270
	1	kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor	595.400.000	584.373.270
		Output : Jumlah sarana prasarana kantor dan perahu karet	1 paket	1 paket
		Outcome : Nilai Akuntabilitas Kinerja BPBD	BB	BB
4	program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		25.000.000	13.851.829
	1	kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	25.000.000	13.851.829
		Output : Jumlah dokumen perencanaan dan laporan yang disusun	8 dokumen	8 dokumen
		Outcome : Nilai Akuntabilitas Kinerja BPBD	BB	BB
5	program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam		936.028.000	902.749.023
	1	Kegiatan Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana	630.353.000	629.454.558
		Output : Jumlah piket siaga bencana	730 shift	730 shift
		Outcome : Persentase korban bencana yang tertangani saat darurat bencana	100	100
	2	Kegiatan Penyuluhan Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Alam	152.175.000	134.445.271
		Output : Jumlah peserta penyuluhan pencegahan dan penanggulangan bencana alam	750 orang	750 orang
		Outcome : Persentase korban bencana yang tertangani saat darurat bencana	100	100
	3	Kegiatan Mitigasi Penanggulangan Bencana	153.500.000	138.849.194
		Output : Jumlah peserta pelatihan SAR	120 orang	120 orang
		Outcome : Persentase korban bencana yang tertangani saat darurat bencana	100	100

2. Alokasi dan Realisasi Belanja

❖ Satpol PP

Uraian	Alokasi	Realisasi
Urusan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat		
Belanja Tidak Langsung	5.410.738.000,00	3.903.725.038,00
Belanja Langsung	8.331.677.520,00	7.512.164.639,00
Total Belanja	13.742.415.520,00	11.415.889.677,00

❖ BPBD

Uraian	Alokasi	Realisasi
Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat		
Belanja Tidak Langsung	1.171.454.336,00	933.623.301,00
Belanja Langsung	2.350.428.000,00	2.231.091.153,00
Total Belanja	3.521.882.336,00	3.164.714.454,00

3. Asset yang dikuasai

❖ Satpol PP

Urusan	Nilai Asset	Keterangan
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Rp. 42.565.560.615,00	

❖ BPBD

Urusan	Nilai Asset	Keterangan
Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Rp. 5.583.974.798,00	

f. Proses Perencanaan Pembangunan Daerah

Penyusunan Rencana Kerja merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta dokumen perencanaan lainnya. Adapun Hubungan Dokumen Perencanaan SKPD dengan Dokumen perencanaan lainnya yaitu:

1. Renstra SKPD sebagai pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja tahunan SKPD (Renja SKPD) dan selanjutnya Renja SKPD menjadi pedoman penyusunan RKA SKPD.
2. Renstra SKPD dalam penyusunannya berpedoman pada RPJMD dan memperhatikan Renstra kementerian atau lembaga non departeman.
3. RPJMD dalam penyusunannya berpedoman pada RPJP dan memperhatikan RPJM Nasional.

g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

❖ Satpol PP

No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1.	Gedung	3 gedung	Baik
2.	Kendaraan	51 unit	Baik
3.	Alat Kantor	417 buah	Baik
4.	Alat Bengkel dan Alat Ukur	6 buah	Baik
5.	Alat Pertanian	5 buah	Baik
6.	Alat Studio dan Alat Komunikasi	60 buah	Baik
7.	Alat-Alat Persenjataan/Keamanan	30 buah	Baik
8.	Alat Laboratorium	5 buah	Baik
9.	Monumen	24 buah	Baik

❖ BPBD

No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1.	Tanah	1	Baik
2.	Peralatan	589	Baik
3.	Gedung	4	Baik
4.	Jalan Dan Jaringan	3	Baik
	..... (lainnya)		

h. Permasalahan dan Solusi

❖ Satpol PP

Permasalahan:

1. Meningkatnya jumlah penertiban pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat data sampai dengan bulan Desember 2019 diantaranya :
   a. Pelanggaran Reklame (baik Rusak, melanggar dan ijin sudah habis) sebanyak 2. 520 buah.
   b. Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan jumlah pelanggaran 516 kasus.
   c. Anak jalanan sejumlah 277 orang ; dan
   d. Anak Bolos Sekolah sejumlah 114 pelajar.
2. Adanya perubahan iklim dengan kemarau panjang yang mengakibatkan intensitas kebakaran tinggi dengan jumlah kasus kebakaran sebanyak 86 kasus kejadian kebakaran.

Solusi

1. Seiring kemajuan tekhnologi yang rentan pelanggaran maka langkah-langkah yang diambil Satuan Polisi Pamong Praja untuk mengatasi permasalahan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat diantaranya :
   a. Dengan adanya kebijakan Bapak Walikota Madiun yang tidak mengijinkan pemasangan reklame secara fisik karena akan diganti dengan videotron, maka anggota Satuan Polisi Pamong Praja meningkatkan patroli kawasan pemasangan reklame di wilayah Kota Madiun. Sehingga pelanggaran reklame dapat diatasi dan diselesaikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur penertiban.
   b. Sehubungan dengan implementasi Panca Karya Program Kegiatan Bapak Walikota Madiun, utamanya karya membangun. Banyak kebijakan yang dikeluarkan Bapak Walikota Madiun, diantaranya pembangunan taman dan infrastuktur Kota Madiun. Sehingga perlu penertiban dan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk ditertibkan dan berjualan di tempat yang telah disediakan. Seperti

yang telah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan jajaran samping untuk penertiban pra yustisi pelanggaran Perda dan Perwal.

c. Untuk mengatasi pelanggaran anak jalanan Satuan Polisi Pamong Praja mengoptimalkan patroli wilayah Kota Madiun utamanya di perempatan traficlight di wilayah Kota Madiun. Sehingga setiap penertiban anak jalanan diberikan pembinaan dan pengarahan untuk tidak mengamen di lampu merah dan mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

d. Dengan mengoptimalkan patroli dan jejaring sosial untuk mendapatkan informasi pelanggaran anak sekolah yang bolos sekolah, Satuan Polisi Pamong Praja mengadakan operasi penertiban anak sekolah yang bolos sekolah di jam belajar. Dan dilakukan pembinaan yang selanjutnya diserahkan kepada pihak sekolahan melalui Dinas Pendidikan dan memanggil orang tua pelajar.

Dengan banyaknya kasus kebakaran di Kota Madiun maka Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pemadaman kejadian kebakaran sesuai SOP dan melakukan pencegahan dan pelatihan pemadaman kebakaran

❖ BPBD

Permasalahan :

Berdasarkan Peraturan Walikota Madiun Nomor 46 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Walikota Madiun Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun dimana semenjak urusan Pemadam Kebakaran bukan lagi menjadi tugas dan kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun yang beralih ke kantor Satuan Polisi Pamong Praja berdampak berkurangnya personil Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun.

Solusi :

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun telah mengoptimalkan petugas yang ada dan memanfaatkan Relawan sejumlah 30 (tiga puluh) orang yang direkrut dari warga masyarakat peduli kebencanaan dan kemanusiaan guna melaksanakan Piket Siaga Bencana di Posko Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun.

URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR

1. URUSAN BIDANG TENAGA KERJA

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Tenaga Kerja menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja.

b. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja di Kota Madiun pada Tahun Anggaran 2019, yaitu sebagai berikut:

Tabel III.13
Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan bidang Tenaga Kerja
di Kota Madiun Tahun 2019

No	Program	Kegiatan	
1	program pelayanan administrasi perkantoran	1	kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor
		2	kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah
2	program pemeliharaan barang milik daerah	1	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan
		2	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas
		3	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala sarana prasarana kantor
3	program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1	kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor
4	program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1	kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah
5	program perluasan dan pengembangan kesempatan kerja	1	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pencari Kerja
		2	Kegiatan Lomba Cipta Inovasi Teknologi Tepat Guna dan Gelar TTG Tingkat Nasional
		3	Kegiatan Optimalisasi Informasi antar Kerja Melalui Peningkatan Efektifitas Informasi Pasar Kerja (IPK)
		4	Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat (DBH-CHT)
		5	Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Produktifitas dan Pelaksanaan Kewirausahaan
		6	Kegiatan Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja
		7	Kegiatan Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai
		8	kegiatan updating data pengangguran tenaga kerja
		9	kegiatan fasilitas pemberdayaan IKM/IRT oleh dekranasda
		10	kegiatan pengembangan industri kreatif

No	Program	Kegiatan	
6	program perlindungan dan pengembangan kelembagaan Ketenagakerjaan	1	Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
		2	Kegiatan Pemberian Pembinaan Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
		3	Kegiatan Pendataan Wajib Lapor Perusahaan dan Bimbingan Teknis Norma Kerja
		4	Kegiatan Pengendalian dan Pembinaan Lembaga Penyalur Tenaga Kerja
		5	Kegiatan Peningkatan Pengawasan Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja
		6	Kegiatan Peningkatan Peran Lembaga Kerjasama Tripartit
		7	Kegiatan Sosialisasi Peraturan Ketenagakerjaan dan Pembahasan UMK

c. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Jumlah Pegawai	Kepangkatan	Tingkat Pendidikan	Struktural/ Eselon	Fungsional	Staf
17	Gol I = 1 Gol II = 6 Gol III = 8 Gol IV = 2	SD = SMP = 1 SMA = 6 D3 = 2 D4/ S1 = 6 S2 = 2	II = 1 III = 1 IV = 3 V =	**2**	**10**

d. Alokasi dan Realisasi Anggaran

1. Realisasi Program dan Kegiatan

NO		URAIAN	TARGET	REALISASI
1	program pelayanan administrasi perkantoran		905.312.460,00	768.351.281
	1	kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	675.312.460,00	768.351.281
		Output :Penyediaan peralatan bahan penunjang	6 jenis	6 jenis
		Outcome :Meningkatnya kinerja dinas tenaga kerja	100%	100%
	2	kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	230.000.000,00	230.000.000,00
		Output :Jumlah perjalanan dinas keluar daerah bagi pejabat dan staf dinas tenaga kerja	1 kali kegiatan	1 kali kegiatan
		Outcome : Meningkatnya kinerja dinas tenaga kerka	100%	100%
2	program pemeliharaan barang milik daerah		152.546.000,00	151.533.745
	1	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan	90.000.000,00	89.210.000
		Output : Pemeliharaan dan perawatan gedung /lingkungan	2 paket	2 paket
		Outcome : Meningkatnya Kinerja	100%	100%

NO		URAIAN	TARGET	REALISASI
		Perangkat Daerah		
	2	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas	40.546.000,00	40.323.745
		Output : Pemeliharaan rutin kendaraan dinas operasional	3 kegiatan	3 kegiatan
		Outcome : Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%
	3	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala sarana prasarana kantor	22.000.000,00	22.000.000
		Output : Pemeliharaan rutin sarana dan prasarana kantor	1 paket	1 paket
		Outcome : Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%
3	program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		108.400.000,00	106.227.000
	1	kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor	108.400.000,00	106.227.000
		Output : Jumlah sarana dan prasarana kantor	100%	100%
		Outcome : Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%
4	program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		25.000.000,00	4.179.284
	1	kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	25.000.000,00	4.179.284
		Output : Tersedianya Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Capaian Kinerja	6 Dokumen	6 Dokumen
		Outcome : Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%
5	program perluasan dan pengembangan kesempatan kerja		2.650.088.840,00	2.433.526.861
	1	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pencari Kerja	1.125.718.980,00	1.057.005.999
		Output : Jumlah penididikan dan pelatihan ketrampilan	615 orang	615 orang
		Outcome : Pencari kerja yang ditempatkan	79%	85,52%
	2	Kegiatan Lomba Cipta Inovasi Teknologi Tepat Guna dan Gelar TTG Tingkat Nasional	252.821.720,00	191.632.124
		Output : Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	2 Kegiatan	2 Kegiatan
		Outcome : Pencari Kerja Yang ditempatkan	79%	85,52%
	3	Kegiatan Optimalisasi Informasi antar Kerja Melalui Peningkatan Efektifitas Informasi Pasar Kerja (IPK)	60.755.280,00	53.656.147
		Output :Tersedianya dokumen informasi pasar kerja sesuai kebutuhan	1 dokumen	1 dokumen
		Outcome : Pencari Kerja Yang ditempatkan	79%	85,52%
	4	Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat (DBH-CHT)	719.866.500,00	707.503.000
		Output :jumlah pelatihan	235 orang	235 orang
		Outcome : pencari kerja yang dtempatkan	79%	85,52%

NO		URAIAN	TARGET	REALISASI
	5	Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Produktifitas dan Pelaksanaan Kewirausahaan	134.328.960,00	130.770.814
		Output :jumlah wira usaha baru	40 orang	40 orang
		Outcome : pencari kerja yang dtempatkan	79%	85,52%
	6	Kegiatan Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja	63.246.240,00	57.690.057
		Output : Jumlah penyuluhan motivasi kerja	10 lokasi	12 lokasi
		Outcome : Pencari Kerja Yang ditempatkan	79%	85,52%
	7	Kegiatan Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai	42.810.240,00	32.402.651
		Output : Jumlah Pengiriman tenaga kerja siap pakai	150 orang	150 orang
		Outcome : Pencari Kerja Yang ditempatkan	79%	85,52%
	8	kegiatan updating data pengangguran tenaga kerja	250.540.920,00	192.596.069
		Output : tersedianya data ketenagakerjaan dan pengangguran	1 dokumen	1 dokumen
		Outcome : Pencari Kerja Yang ditempatkan	79%	85,52%
6	program perlindungan dan pengembangan kelembagaan Ketenagakerjaan		483.527.540,00	442.736.811
	1	Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	55.000.000,00	52.899.229
		Output : Jumlah penyelesaian perselisihan	10	27
		Outcome : Prosentase penyelesaian pekerja dengan pengusaha	98%	100%
	2	Kegiatan Pemberian Pembinaan Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	97.897.000,00	90.982.782
		Output :Jumlah pembinaan HI dan Jamsos	100 perusahaan	100 perusahaan
		Outcome : Presentase pekerja yang mendapat jaminan social	3700	15976
	3	Kegiatan Pendataan Wajib Lapor Perusahaan dan Bimbingan Teknis Norma Kerja	47.785.000,00	45.784.930
		Output : Jumlah BIMTEK Norma kerja	100 perusahaan	100 perusahaan
		Outcome :Jumlah keselamatan dan perlindungan tenaga kerja	3700	15976
	4	Kegiatan Pengendalian dan Pembinaan Lembaga Penyalur Tenaga Kerja	34.288.440,00	28.125.926
		Output : JUmlah BIMTEK penyedia jasa dan pemborongan	5 perusahaan	50 perusahaan
		Outcome : Jumlah keselamatan dan perlindungan tenaga kerja	3700	15976
	5	Kegiatan Peningkatan Pengawasan Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja	34.474.800,00	31.383.077
		Output : Jumlah BIMTEK perlindungan	3 kegiatan	3 kegiatan
		Outcome : Jumlah keselamatan dan perlindungan tenaga kerja	3700	15976

NO		URAIAN	TARGET	REALISASI
	6	Kegiatan Peningkatan Peran Lembaga Kerjasama Tripartit	166.407.500,00	148.459.196
		Output : jumlah pembahasan masalah ketenagakerjaan	1 paket	1 paket
		Outcome : Jumlah keselamatan dan perlindungan tenaga kerja	3700	15976
	7	Kegiatan Sosialisasi Peraturan Ketenagakerjaan dan Pembahasan UMK	47.674.800,00	45.101.671
		Output : Jumlah sosialisasi Pengupahan bagi Pengusaha dan Pekerja	1 kali	1 kali
		Outcome : Jumlah keselamatan dan perlindungan tenaga kerja	3700	15976

2. Realisasi Anggaran Total Belanja

No	Uraian	Alokasi	Realisasi
1.	Urusan Bidang Tenaga Kerja		
	Belanja Tidak Langsung	Rp. 2.912.086.989	Rp. 1.633.471.420
	Belanja Langsung	Rp. 4.324.874.840	Rp. 3.896.554.982
	Total Belanja	Rp. 7.236.961.829	Rp. 5.530.026.402

3. Asset yang dikuasai

No.	Urusan	Nilai Asset	Keterangan
1.	Bidang Tenaga Kerja	Rp. 3.471.798.250,-	-

e. Proses Perencanaan Pembangunan Daerah

Proses Perencanaan Pembangunan pada urusan ketenagakerjaan mengacu pada kebijakan Rencana Pembangunan Nasional dan peraturan yang berlaku, Perencanaan pembangunan pada penyelenggaraan masing-masing urusan pemerintahan daerah dilaksanakan secara bertahap dimulai dari pembahasan di tingkat RT, RW sampai dengan tingkat Kota. Proses perencanaan yang melibatkan partisipasi masyarakat ini dilaksanakan melalui kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD, dan kegiatan Penetapan RKPD, KUA, PPAS, KUA-P, PPAS-P.

f. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1.	Gedung	1	Baik
2.	Kendaraan	19	Baik
3.	Alat / Sarana Prasarana Kantor	199	Baik

2. URUSAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

b. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Madiun pada Tahun Anggaran 2019, yaitu sebagai berikut:

Tabel III.15
Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak di Kota Madiun Tahun 2019

No	Program	Kegiatan	
1	program pelayanan administrasi perkantoran	1	kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor
		2	kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah
2	program pemeliharaan barang milik daerah	1	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan
		2	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas
		3	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala sarana prasarana kantor
3	program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1	kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor
4	program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1	kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah
5	program pelayanan rehabilitasi dan pemberdayaan kesejahteraan sosial	1	kegiatan pembinaan perintis kemerdekaan/ keluarganya dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan
		2	Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial.
		3	Kegiatan Pemantapan TAGANA
		4	Kegiatan Pemberdayaan Pelayanan Karang Werdha dan Kesejahteraan Lansia
		5	Kegiatan Pendataan PMKS dan PSKS dan Validasi Verifikasi data BPJS
		6	kegiatan pembinaan PSKS se Kota Madiun
		7	kegiatan sunat dan nikah massal
		8	kegiatan peningkatan dan penanganan PMKS

c. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Jumlah Pegawai	Kepangkatan	Tingkat Pendidikan	Struktural/ Eselon	Fungsional	Staf
10	Gol I = - Gol II = 2 Gol III = 6 Gol IV = 2	SD = - SMP = - SMA = 3 D3 = - D4/ S1 = 5 S2 = 2	II = - III = 1 IV = 5 V = -	-	4

d. Alokasi dan Realisasi Anggaran

1. Realisasi Program dan Kegiatan

NO		URAIAN	TARGET	REALISASI
1	program pelayanan administrasi perkantoran		2.104.816.380	1.802.458.404
	1	kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	1.549.453.380	1.247.113.001
		Output : Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 paket	10 paket
		Outcome : Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	73 (BB)	BB (2018)
	2	kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	555.363.000	555.345.403
		Output : Jumlah Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah yang dilaksanakan	70 kali	182 kali
		Outcome : Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	73 (BB)	BB (2018)
2	program pemeliharaan barang milik daerah		433.742.000	406.791.850
	1	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan	246.209.000	244.702.000
		Output : Jumlah Gedung yang dipelihara	2 unit	2 unit
		Outcome : Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	73 (BB)	BB (2018)
	2	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas	131.733.000	106.312.650
		Output : Jumlah Kendaraan yang dirawat	25 unit	25 unit
		Outcome : Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	73 (BB)	BB (2018)
	3	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala sarana prasarana kantor	55.800.000	55.777.200
		Output : Jumlah Sarana dan Prasarana yang dipelihara	5 paket	5 paket
		Outcome : Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	73 (BB)	BB (2018)
3	program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		385.733.711	291.974.500
	1	kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor	385.733.711	291.974.500
		Output : Jumlah Paket Pengadaan Sarana dan Prasarana	1 paket	1 paket
		Outcome : Nilai Akuntabilitas Kinerja	73 (BB)	BB (2018)

NO		URAIAN	TARGET	REALISASI
		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
4		program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	72.277.064	69.744.104
	1	kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	72.277.064	69.744.104
		Output : Jumlah Dokumen	8 dokumen	8 dokumen
		Outcome : Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	73 (BB)	BB (2018)
5		program pelayanan rehabilitasi dan pemberdayaan kesejahteraan sosial	4.438.925.508	4.102.047.603
	1	kegiatan pembinaan perintis kemerdekaan/ keluarganya dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan	38.633.900	37.483.000
		Output : Jumlah peserta sarasehan perintis kemerdekaan	78 orang	78 orang
		Outcome : Prosentase penanganan PMKS	97 %	100,3 %
	2	Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial.	1.074.719.096	963.398.452
		Output : berfungsinya kompetensi sosial dan penanganan PMKS	8645 orang	8645 orang
		Outcome : Prosentase penanganan PMKS	97 %	100,3 %
	3	Kegiatan Pemantapan TAGANA	189.040.000	163.899.500
		Output : Jumlah kesiapsiagaan penanganan bencana	22 orang	22 orang
		Outcome : Prosentase penanganan PMKS	97 %	100,3 %
	4	Kegiatan Pemberdayaan Pelayanan Karang Werdha dan Kesejahteraan Lansia	1.370.996.104	1.353.524.130
		Output : Jumlah kesejahteraan LU dan tertib administrasi karang werdha dan lanjut uisa	1800 orang	1800 orang
		Outcome : Prosentase penanganan PMKS	97 %	100,3 %
	5	Kegiatan Pendataan PMKS dan PSKS dan Validasi Verifikasi data BPJS	624.846.000	553.500.760
		Output : tersedianya data fakir miskin Kota Madiun	27 kelurahan	27 kelurahan
		Outcome : Prosentase penanganan PMKS	97 %	100,3 %
	6	kegiatan pembinaan PSKS se Kota Madiun	335.493.792	313.426.749
		Output : Jumlah peserta bimbingan kewirausahaan UEP, motivasi UKS dan pemberdayaan PSM	4 PSKS	4 PSKS
		Outcome : Prosentase penanganan PMKS	97 %	100,3 %
	7	kegiatan sunat dan nikah massal	151.272.880	150.654.000
		Output : Jumlah Peserta sunat dan nikah massal	90 peserta	56 peserta
		Outcome : Prosentase penanganan PMKS	97 %	100,3 %
	8	kegiatan peningkatan dan penanganan PMKS	653.923.736	566.161.012

NO		URAIAN	TARGET	REALISASI
		Output : Jumlah penerima bimbingan motivasi, peningkatan dan pelayanan PMKS	320 orang	320 orang
		Outcome : Prosentase penanganan PMKS	97 %	100,3 %

2. Alokasi dan Realisasi Belanja

Uraian	Alokasi	Realisasi
Urusan PP dan PA		
Belanja Tidak Langsung	1.873.603.200	1.257.516.724
Belanja Langsung	3.065.883.782	2.697.043.863
Total Belanja	4.939.486.982	3.954.560.587

3. Asset yang dikuasai

Urusan	Nilai Asset	Keterangan
PP dan PA	Rp. 2.312.331.826,00	

e. Proses Perencanaan Pembangunan Daerah

Proses penyusunan rencana kerja dan dokumen yang dipergunakan yaitu Rencana Kerja (RKA) Tahun 2019, Dokumen Penyusunan Anggaran (DPA) Tahun 2019, Rencana Kerja Tahun 2019, Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) Tahun Anggaran 2019, Dokumen Penyusunan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2019 Renja Kerja Perubahan Tahun 2019 (RKP) , APBD dan PAPBD tahun 2019.

f. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1.	Gedung	1	Baik
2.	Kendaraan	10	Baik
3.	Alat Kantor	53	Baik

g. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

Penanganan permasalahan sosial di Kota Madiun terus menunjukkan peningkatan kualitas pelayanannya, beberapa hal yang memerlukan perbaikan di tahun selanjutnya antara lain :

1. Belum optimalnya sinergi Komda PPKS, masih terdapat beberapa celah penghambat dalam penanganan PPKS seperti mekanisme rujukan ke RSJ Spesialis, mekanisme bagi Orang dengan Tempat Tinggal Tidak tetap (T4) maupun orang terlantar (OT) yang meninggal, dan pendampingan pada saat mengantar dan menjemput klien RSJ.
2. Rehabilitasi sosial memerlukan tenaga khusus yang memiliki kompetensi didalam penanganan PPKS, Shelter yang ada belum mempunyai tenaga khusus dalam menangani klien yang ada.

3. Masih ada fakir miskin yang belum mendapat bantuan. Kecepatan update data daerah belum dapat di akomodir oleh Pusat, sehingga secara administrasi fakir miskin sudah tercatat dalam DTKS dan layak mendapat bantuan tetapi belum mendapatkan bantuannya karena penetapan penerima bantuan dari Pusat belum dapat seiring dengan proses finalisasi dari daerah.

Solusi

Dalam meningkatkan penanganan PPKS diperlukan beberapa upaya terkait dengan permasalahan yang ada, seperti :

1. Meningkatkan sinergi Komda PPKS sehingga masing-masing berperan maksimal dalam penanganan PPKS.
2. Menempatkan ASN yang mempunyai kompetensi di bidang sosial sehingga program dan kegiatan sosial dapat direncanakan dengan tepat oleh SDM yang memahami permasalahan social. Khusus untuk penanganan PMKS yang memerlukan layanan rehabilitasi sosial diperlukan rekruitmen petugas perawatan sosial.
3. Pemberian bantuan sosial mengikuti syarat dan ketentuan masing-masing bantuan, terus diupayakan pemutakhiran data agar masyarakat yang terdata dalam DTKS tepat sasaran.

3. URUSAN BIDANG KETAHANAN PANGAN

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan.

b. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Urusan pemerintahan bidang Pangan yang dilaksanakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Kota Madiun pada Tahun Anggaran 2019, yaitu sebagai berikut:

Tabel III.16
Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan bidang Pangan
di Kota Madiun Tahun 2019

No	Program	Kegiatan	
1	program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	1	Kegiatan Jambore Ketahanan Pangan
		2	Kegiatan Penyusunan Neraca Bahan Makanan dan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)
		3	Kegiatan Promosi Ketahanan Pangan
		4	Kegiatan Survey Harga Pangan di Tingkat Produsen dan Pedagang Grosir dan Eceran
		5	Kegiatan Pembinaan Pemanfaatan Lahan Pekarangan dengan Konsep Rumah Pangan Lestari (KRPL), Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) dan Karang Kitri
		6	Kegiatan Sosialisasi Konsumsi makanan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) dan Pemilihan Duta Keamanan Pangan
		7	Kegiatan Survey Pola Pangan Harapan
		8	Kegiatan Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan.
		9	Kegiatan Lomba Cipta Menu.

c. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Jumlah Pegawai	Kepangkatan	Tingkat Pendidikan	Struktural/ Eselon	Fungsional	Staf
PNS = 6 orang	Gol I = 0 Gol II = 0 Gol III = 5 Gol IV = 1	SD = 0 SMP = 0 SMA = 1 D3 = 0 S1 = 5 S2 = 1	II = 0 III = 1 IV = 3 V = 0	1 orang	1

d. Alokasi dan Realisasi Anggaran

1. Realisasi Program dan Kegiatan

NO		URAIAN	TARGET Rp	REALISASI Rp
1		program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	905.760.000,00	859.464.304
	1	Kegiatan Jambore Ketahanan Pangan	137.000.000,00	128.016.320
		Output : Jumlah kegiatan jambore dan dokumen laporan	1 kegiatan dan 1 dokumen	1 kegiatan dan 1 dokumen
		Outcome : Ketersediaan bahan pangan utama	46.5	154,44
	2	Kegiatan Penyusunan Neraca Bahan Makanan dan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	90.000.000,00	84.962.440
		Output : Jumlah kegiatan dan dokumen laporan	2 kegiatan dan 2 dokumen	2 kegiatan dan 2 dokumen
		Outcome : Ketersediaan bahan pangan utama	46.5	154,44
	3	Kegiatan Promosi Ketahanan Pangan	152.700.000,00	146.664.800
		Output : Jumlah pameran yang diikuti dan jumlah produk yang dipamerkan	2 kali pameran dan 20 produk	2 kali pameran dan 33 produk
		Outcome : Ketersediaan bahan pangan utama	46.5	154,44
	4	Kegiatan Survey Harga Pangan di Tingkat Produsen dan Pedagang Grosir dan Eceran	25.000.000,00	19.866.260
		Output : Jumlah dokumen laporan yang disusun	1 dokumen	1 dokumen
		Outcome : Ketersediaan bahan pangan utama	46.5	154,44
	5	Kegiatan Pembinaan Pemanfaatan Lahan Pekarangan dengan Konsep Rumah Pangan Lestari (KRPL), Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) dan Karang Kitri	75.000.000,00	73.027.000
		Output : Jumlah pelatihan dan pekarangan yang dioptimalkan untuk tanaman pangan	1 kegiatan dan 1 monev	1 kegiatan dan 1 monev
		Outcome : Ketersediaan bahan pangan utama	46.5	154,44
	6	Kegiatan Sosialisasi Konsumsi makanan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) dan Pemilihan Duta Keamanan Pangan	224.060.000,00	212.409.920
		Output : Jumlah peserta sosialisasi dan jumlah duta keamanan pangan terpilih	700 siswa sosialisasi dan 70 orang duta keamanan	1000 siswa sosialisasi dan 140 orang duta keamanan
		Outcome : : Ketersediaan bahan pangan utama	46.5	154,44
	7	Kegiatan Survey Pola Pangan Harapan	23.000.000,00	22.948.700
		Output : Jumlah dokumen laporan SPM	1 dokumen 1	1 dokumen
		Outcome : Ketersediaan bahan pangan utama	46.5	154,44

NO		URAIAN	TARGET Rp	REALISASI Rp
	8	Kegiatan Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan.	31.000.000,00	29.058.080
		Output : Jumlah dokumen dan rakor dewan ketahanan pangan	1 kegiatan workshop dan 1 dokumen	1 kegiatan workshop dan 1 dokumen
		Outcome : Ketersediaan bahan pangan utama	46.5	154,44
	9	Kegiatan Lomba Cipta Menu.	148.000.000,00	142.510.764
		Output : jumlah pelaksanaan lomba dan jumlah peserta yang menjadi juara	2 kali lomba dan 1 kegiatan lomba provinsi	2 kali lomba dan 1 kegiatan lomba provinsi
		Outcome : : Ketersediaan bahan pangan utama	46.5	154,44

2. Alokasi dan Realisasi Belanja

URAIAN	ALOKASI	REALISASI
Urusan Ketahanan Pangan		
Belanja Tidak Langsung	Rp 638.812.651,52	Rp 588.405.051,07
Belanja Langsung	Rp 905.760.000	Rp 859.464.304
Total Belanja	Rp 905.760.000	Rp 859.464.304

3. Asset yang dikuasai

Urusan	Nilai Asset	Keterangan
Urusan Pangan	Rp. 812.367.800,-	Peralatan Kantor dan Kendaraan

e. Proses Perencanaan Pembangunan Daerah

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan membidangi urusan pertanian, kelautan dan perikanan, dan pangan. Kegiatan pertanian di Kota Madiun yang meliputi budidaya tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan berfungsi sebagai penyangga (*buffer*) pangan daerah. Oleh karenanya, untuk mewujudkan kestabilan produksi pangan di Kota Madiun, diperlukan perencanaan program dan kegiatan yang baik di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun.

Rencana Kerja adalah suatu dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang memuat program dan kegiatan berdasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di daerah. Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan disusun sebagai pedoman dan arahan dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai tugas pokok dan fungsi. Fungsi dari Renja ini adalah sebagai perencanaan dan tolok ukur dari pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun.

Renja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun memuat program dan kegiatan yang dibiayai oleh APBD Kota Madiun dan sumber pembiayaan lainnya. Renja ini pada dasarnya merupakan dokumen perencanaan tahunan yang telah direncanakan dalam

dokumen *review* Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun 2014- 2019. Sehingga, penyusunan Renja tiap tahun harus selaras dengan dokumen Renstra tersebut. Selain itu, Renja setiap Anggaran juga mengakomodasi hasil penjaringan, diskusi, dan usulan dari masing- masing *stakeholder* dalam hal ini adalah masyarakat pertanian, yang diusulkan dalam Musrenbang (Musyarawah Perencanaan Pembangunan), maupun hasil penjaringan aspirasi masyarakat oleh DPRD.

f. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1	Gedung	0	-
2	Kendaraan	4	BAIK
3	Alat Kantor	116	BAIK

g. Permasalahan dan Solusi

1. Semakin terbatasnya lahan untuk pertanian, peternakan dan perikanan sehingga produksi pangan domestik semakin menurun dan hanya mencukupi sepertiga dari konsumsi pangan utama penduduk. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya peningkatan ketahanan pangan dari sisi akses dan distribusi pangan melalui kegiatan koordinasi dewan ketahanan pangan, survey harga pangan, serta dari sisi produksi pangan rumah tangga yaitu kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), penganekaragaman konsumsi pangan (P2KP) dan karang kitri pada Tahun 2020
2. Masih perlunya ditingkatkan konsumsi pangan masyarakat yang beragam dan bergizi seimbang dan aman melalui kegiatan sosialisasi B2SA, lomba cipta menu, promosi ketahanan pangan, serta jambore ketahanan pangan dan pemilihan duta keamanan pangan sekolah di tahun 2020. Selain itu perlu dilakukan pemantauan konsumsi pangan masyarakat melalui kegiatan penyusunan neraca bahan makanan dan sistem kewaspadaan pangan dan gizi dan survey pola pangan harapan pada Tahun 2020.
3. Belum termanfaatnya produk hasil pekarangan sebagai sumber pendapatan keluarga, sehingga perlu dikembangkan pemasaran produk olahan hasil pekarangan melalui kegiatan pameran yang diakomodasi dari Kegiatan Promosi Ketahanan Pangan pada Tahun 2020.

4. URUSAN BIDANG PERTANAHAN

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanahan.

b. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Urusan pemerintahan bidang Pertanahan yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kota Madiun pada Tahun Anggaran 2019, yaitu sebagai berikut:

Tabel III.18
Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan bidang Pertanahan
di Kota Madiun Tahun 2019

No	Program	Kegiatan	
1	program penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	1	Kegiatan Penerbitan Rekomendasi Ijin Lokasi
		2	Kegiatan Rekomendasi Ijin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT)
		3	Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan
		4	Kegiatan Sosialisasi Undang-undang Pertanahan

c. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Jumlah Pegawai	Kepangkatan	Tingkat Pendidikan	Struktural/ Eselon	Fungsional	Staf
21	Gol I = - Gol II = 9 Gol III = 10 Gol IV = 2	SD = SMP = SMA = 10 D3 = 4 D4/ S1 = 3 S2 = 2	II = - III = 1 IV = 2 V = -	**1**	**15**

d. Alokasi dan Realisasi Anggaran

1. Realisasi Program dan Kegiatan

NO		URAIAN	TARGET	REALISASI
1		program penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	119.279.640	52.327.970
	1	Kegiatan Penerbitan Rekomendasi Ijin Lokasi	56.229.640	18.117.150
		Output : Jumlah lokasi	1 lokasi	2 lokasi
		Outcome : Jumlah Ijin Lokasi dan Ijin Penggunaan Tanah	8 lokasi	25 lokasi
	2	Kegiatan Rekomendasi Ijin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT)	14.025.000	8.700.480
		Output : Jumlah lokasi	1 lokasi	1 lokasi
		Outcome : Jumlah Ijin Lokasi dan Ijin Penggunaan Tanah	8 lokasi	25 lokasi
	3	Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	14.025.000	6.183.448
		Output : Jumlah fasilitasi	2	2

NO		URAIAN	TARGET	REALISASI
		penyelesaian konflik-konflik pertanahan		
		Outcome : Jumlah Ijin Lokasi dan Ijin Penggunaan Tanah	8 lokasi	25 lokasi
	4	Kegiatan Sosialisasi Undang-undang Pertanahan	35.000.000	19.326.892
		Output : Jumlah sosialisasi	1 kali	1 kali
		Outcome : Jumlah Ijin Lokasi dan Ijin Penggunaan Tanah	8 lokasi	25 lokasi

2. Alokasi dan Realisasi Belanja

No	Uraian	Alokasi	Realisasi
1.	Urusan Pertanahan		
	Belanja Tidak Langsung	2.129.177.302	1.942.447.120
	Belanja Langsung	119.279.640	52.327.970
	Total Belanja	2.248.456.942	1.994.775.090

3. Asset yang dikuasai

Urusan	Nilai Asset	Keterangan
Pertanahan	Rp. 45.924.440.038,16	-

e. Proses Perencanaan Pembangunan Daerah

Proses penyusunan rencana kerja 2019 dan dokumen yang dipergunakan (RKA 2019 dan DPA 2019)

f. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1.	Gedung	1	Baik
2.	Kendaraan	28	Baik
3.	Alat Kantor		
	- Meja Kerja	23	Baik
	- Kursi kerja	39	Baik
	- Filling Kabinet	1	Baik
	- Foto Presiden dan Wakil Presiden	1	Baik
	- Garuda Pancasila	1	Baik
	- Kaca Cermin	1	Baik
	- Jam Dinding	3	Baik
	- Lemari Es	1	Baik
	- Pesawat Telepon	2	Baik
	- TV	2	Baik
	- AC	3	Baik
	- Pigura	1	Baik
	- Layar Proyektor dan Proyektor	1	Baik
	- Lemari Arsip Kayu		Baik
	- Komputer	1	Baik
	- Laptop	9	Baik
	- Printer	5	Baik
	- Dispenser	14	Baik
	- Papan Tulis	3	Baik
	- Sofa	2	Baik
	- Kipas Angin	1	Baik
		1	Baik

g. Permasalahan dan Solusi

1. Dengan pelaksanaan program penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah serta didukung oleh kegiatan baik yang bersifat layanan maupun sosialisasi masih terdapat berbagai macam permasalahan terutama konflik pertanahan dan rekomendasi ijin. Terkait permasalahan konflik pertanahan diperlukan pendekatan secara kekeluargaan agar tidak menimbulkan konflik antara pemerintah Kota Madiun dan warganya serta dibutuhkan fasilitasi yang optimal agar tidak terjadi konflik pertanahan secara berkelanjutan. Pada tahun 2019 ini telah dilakukan penertiban dan pembongkaran bangunan illegal di 2 lokasi dan dengan total sekitar 54 KK hanya 28 KK yang bersedia pindah ke Rusunawa dan yang lainnya memilih untuk menempati hunian yang lain.
2. Mengingat Kota Madiun adalah Kota yang strategis dalam iklim investasi wilayah Jawa Timur Bagian Barat, terdapat permintaan rekomendasi ijin pertanahan cukup tinggi yakni 25 rekomendasi ijin (2 ijin lokasi dan 23 IPPT). Dengan pemberian 25 rekomendasi ijin tersebut Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Madiun mengacu regulasi (Peraturan Walikota Madiun No.9 Tahun 2017 tentang Ijin lokasi dan Ijin Perubahan Penggunaan Tanah) agar sejalan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun 2010 – 2030. Pemerintah Kota Madiun terus berupaya meningkatkan layanan tersebut demi memberikan kemudahan/kenyamanan bagi investor serta dapat mensejahterakan masyarakat Kota Madiun.

5. URUSAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan hidup.

b. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup di Kota Madiun pada Tahun Anggaran 2019, yaitu sebagai berikut:

Tabel III.19
Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan bidang Lingkungan Hidup
di Kota Madiun Tahun 2019

No	Program	Kegiatan	
1	program pelayanan administrasi perkantoran	1	kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor
		2	kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah
2	program pemeliharaan barang milik daerah	1	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan
		2	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas
		3	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala sarana prasarana kantor
3	program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1	kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor
		2	kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
4	program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1	kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah
5	program peningkatan kualitas dan akses informasi lingkungan hidup	1	Kegiatan Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan Hidup
		2	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Menuju Kelurahan yang Bersih, Sehat, Lestari dan Asri (KELURAHAN BERSERI)
		3	Kegiatan Peningkatan Edukasi, Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaku Usaha Mengenai Izin Lingkungan
		4	Kegiatan Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura
6	program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	1	Kegiatan Koordinasi Pembinaan Langit Biru
		2	Kegiatan Peringatan Hari Lingkungan Hidup
		3	Kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Kampung Iklim
		4	Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan dan Penyusunan Laporan Standart Pelayanan Minimal (SPM)

No	Program	Kegiatan	
			Bidang Lingkungan Hidup
7	program perlindungan dan konservasi lingkungan hidup	1	Kegiatan Penyusunan Laporan Kualitas Lingkungan (SLHD)
		2	Kegiatan Inventarisasi dan Pemetaan Ekoregion (RPPLH)
		3	Kegiatan Koordinasi Izin TPS B3 dan Rekomendasi Izin Pembuangan Limbah Cair
		4	Kegiatan Pembangunan Sumur Resapan
8	program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	1	Kegiatan Pemantauan dan Pengelolaan Limbah B3
		2	Kegiatan Projasih
		3	Kegiatan Peningkatan TPS
		4	Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Mesin Pengolah Sampah
		5	Kegiatan Controlled LandFill TPA Winongo
		6	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Operasional Pengelolaan Persampahan
		7	Kegiatan Peningkatan Fasilitas TPA Winongo

c. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Jumlah Pegawai	Kepangkatan	Tingkat Pendidikan	Struktural/ Eselon	Fungsional	Staf
118	Gol I =19 Gol II =65 Gol III =28 Gol IV =6	SD =22 SMP =28 SMA =48 D3 = 7 D4/S1 =18 S2 = 3	II = - III =5 IV =14 V =-		

d. Alokasi dan Realisasi Anggaran

1. Realisasi Program dan Kegiatan

NO		URAIAN	TARGET	REALISASI
1	program pelayanan administrasi perkantoran		1.514.023.000,00	1.194.177.749
	1	kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	1.348.885.000,00	1.031.255.801
		Output :jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	9 jenis	9 jenis
		Outcome :prosentase terlaksananya administrasi perkantoran	100%	100%
	2	kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	165.138.000,00	162.921.948
		Output :jumlah perjalanan dinas	38X	135X
		Outcome :prosentase terlaksananya administrasi perkantoran Outcome :	100%	100%
2	program pemeliharaan barang milik daerah		1.915.354.000,00	1.045.239.865
	1	kegiatan pemeliharaan rutin/	81.000.000,00	75.772.000

NO		URAIAN	TARGET	REALISASI
		berkala gedung dan bangunan		
		Output :jumlah gedung dan bangunan	3 gedung	3 gedung
		Outcome :Prosentase barang inventaris dalam kondisi baik	100%	100%
	2	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas	1.724.354.000,00	895.685.115
		Output :jumlah kendaraan dinas	60 unit	60 unit
		Outcome :Prosentase barang inventaris dalam kondisi baik	100%	100%
	3	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala sarana prasarana kantor	110.000.000,00	73.782.750
		Output :jumlah sarana dan prasarana kantor	91 unit	91 unit
		Outcome :Prosentase barang inventaris dalam kondisi baik	100%	100%
3	program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		133.900.000,00	118.156.262
	1	kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor	113.900.000,00	99.842.600
		Output :jumlah sarana dan prasarana kantor yang dibutuhkan	33 unit	33 unit
		Outcome :prosentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%
	2	kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	20.000.000,00	18.313.662
		Output :jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	156 orang	159 orang
		Outcome :prosentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%
4	program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		30.600.000,00	28.455.150
	1	kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	30.600.000,00	28.455.150
		Output :jumlah dokumen yang disusun	10 dokumen	12 dokumen
		Outcome :prosentase dokumen perencanaan /laporan yang disusun tepat waktu	100%	100%
5	program peningkatan kualitas dan akses informasi lingkungan hidup		1.039.366.000,00	806.678.660
	1	Kegiatan Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan Hidup	42.000.000,00	34.874.277
		Output :jumlah pengaduan masyarakat yang tertangani	5 pengaduan	7 pengaduan
		Outcome :Prosentase partisipasi kelompok masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup	86%	100,74%
	2	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Menuju Kelurahan yang Bersih, Sehat, Lestari dan Asri (KELURAHAN BERSERI)	486.000.000,00	447.097.749
		Output : jumlah kelurahan	2 kelurahan	
		Outcome :Prosentase partisipasi kelompok masyarakat dan pelaku	86%	100,74%

NO		URAIAN	TARGET	REALISASI
		usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup		
	3	Kegiatan Peningkatan Edukasi, Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaku Usaha Mengenai Izin Lingkungan	173.366.000,00	130.003.445
		Output :jumlah peserta sosialisasi	127 orang	127 orang
		Outcome :Prosentase partisipasi kelompok masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup	86%	100,74%
	4	Kegiatan Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	338.000.000,00	194.703.189
		Output :jumlah titik pantau	3 kec	3 kec
		Outcome :Prosentase partisipasi kelompok masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup	86%	100,74%
6	program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup		476.650.000,00	447.380.849
	1	Kegiatan Koordinasi Pembinaan Langit Biru	50.000.000,00	49.230.244
		Output :	500 kendaraan	1055 kendaraan
		Outcome :	73% dan 79 %	73% dan 79 %
	2	Kegiatan Peringatan Hari Lingkungan Hidup	66.000.000,00	54.001.507
		Output :	1 kali	1 kali
		Outcome :	73% dan 79 %	73% dan 79 %
	3	Kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Kampung Iklim	100.000.000,00	96.374.722
		Output :	3 kelurahan	3 kelurahan
		Outcome :	73% dan 79 %	73% dan 79 %
	4	Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan dan Penyusunan Laporan Standart Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup	260.650.000,00	247.774.376
		Output :	1 dokumen	1 dokumen
		Outcome :	73% dan 79 %	73% dan 79 %
7	program perlindungan dan konservasi lingkungan hidup		866.990.000,00	682.611.588
	1	Kegiatan Penyusunan Laporan Kualitas Lingkungan (SLHD)	130.845.000,00	97.941.445
		Output : Jumlah dokumen yang disusun	1 dokumen	1 dokumen
		Outcome : Prosentase sarana dan prasarana SDA yang tersedia dan layak	100%	100%
	2	Kegiatan Inventarisasi dan Pemetaan Ekoregion (RPPLH)	220.895.000,00	185.281.480
		Output : Jumlah dokumen yang disusun	1 dokumen	1 dokumen
		Outcome : Prosentase sarana dan prasarana SDA yang tersedia dan layak	100%	100%
	3	Kegiatan Koordinasi Izin TPS B3 dan Rekomendasi Izin Pembuangan Limbah Cair	74.040.000,00	46.113.216
		Output : Jumlah pelaku usaha	5 pemohon	10 pemohon

NO		URAIAN	TARGET	REALISASI
		yang memasukkan rekomendasi izin TPS B3 dan izin pembuangan limbah cair		
		Outcome : Prosentase sarana dan prasarana SDA yang tersedia dan layak	100%	100%
	4	Kegiatan Pembangunan Sumur Resapan	441.210.000,00	353.275.447
		Output :jumlah sumur resapan	20 unit	27 unit
		Outcome : Prosentase sarana dan prasarana SDA yang tersedia dan layak	100%	100%
8		program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	6.496.932.000,00	5.329.948.437
	1	Kegiatan Pemantauan dan Pengelolaan Limbah B3	30.000.000,00	28.772.005
		Output :jumlah pelaku usaha yang mematuhi aturan tentang pengelolaan limbah B3	56 pelaku	60 pelaku
		Outcome :prosentase penurunan volume sampah yang masuk dan ditangani TPA	2 %	2,040 %
	2	Kegiatan Projasih	2.556.000.000,00	2.158.603.103
		Output :jumlah tenaga Projasih	85 orang	85 orang
		Outcome :prosentase penurunan volume sampah yang masuk dan ditangani TPA	2 %	2,040 %
	3	Kegiatan Peningkatan TPS	458.000.000,00	389.455.580
		Output :jumlah TPS yang dibangun/rehab	7 lokasi	7 lokasi
		Outcome :prosentase penurunan volume sampah yang masuk dan ditangani TPA	2 %	2,040 %
	4	Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Mesin Pengolah Sampah	227.932.000,00	153.918.163
		Output :jumlah mesin pengolah sampah yang beroperasi	9 unit	9 unit
		Outcome :prosentase penurunan volume sampah yang masuk dan ditangani TPA	2 %	2,040 %
	5	Kegiatan Controlled LandFill TPA Winongo	2.075.000.000,00	1.592.271.866
		Output :jumlah lokasi	1 lokasi	1 lokasi
		Outcome :prosentase penurunan volume sampah yang masuk dan ditangani TPA	2 %	2,040 %
	6	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Operasional Pengelolaan Persampahan	650.000.000,00	564.785.300
		Output :jumlah pengadaan sarpras operasional persampahan	2 jenis/unit	2 jenis/unit
		Outcome :prosentase penurunan volume sampah yang masuk dan ditangani TPA	2 %	2,040 %
	7	Kegiatan Peningkatan Fasilitas TPA Winongo	500.000.000,00	442.142.420
		Output :jumlah lokasi pemeliharaan dan penambahan fasilitas TPA Winongo	1 lokasi	1 lokasi
		Outcome :prosentase penurunan	2 %	2,040 %

NO		URAIAN	TARGET	REALISASI
		volume samoah yang masuk dan ditangani TPA		

2. Alokasi dan Realisasi Belanja

No	Uraian	Alokasi	Realisasi
1.	Urusan Lingkungan Hidup		
	Belanja Tidak Langsung	11.274.878.000	10.223.570.302
	Belanja Langsung	12.473.815.000	9.652.648.560,17
	Total Belanja	23.748.693.000	19.876.218.862,17

3. Asset yang dikuasai

No.	Urusan	Nilai Asset	Keterangan
1.	Lingkungan Hidup	Rp. 41.901.157.731,96	Data akhir Des"19

e. Proses Perencanaan Pembangunan Daerah

Proses penyusunan rencana kerja 2019 dan dokumen yang dipergunakan (RKA 2019 dan DPA 2019)

f. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1.	Tanah	3	Baik, ada 4 unit alat-alat angkutan yang rusak berat
2.	Alat-alat besar	121	
3.	Alat-alat angkutan	252	
4.	Alat bengkel dan alat ukur	37	
5.	Alat pertanian	597	
6.	Alat kantor dan rumah tangga	1.916	
7.	Alat studio dan alat komunikasi	51	
8.	Alat-alat kedokteran	12	
9.	Alat laboratorium	915	
10.	Alat-alat persenjataan/keamanan	2	
11.	Bangunan gedung	66	
12.	Monumen	22	
13.	Jalan dan jembatan	1	
14.	Bangunan air/irigasi	94	
15.	Instalasi	32	
16.	Jaringan	6	
17.	Konstruksi dalam pengerjaan	1	
	Jumlah	4.128	

g. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

1. Meningkatnya pencemaran baik tanah, air maupun udara yang diakibatkan adanya penambahan jumlah industri dan/atau usaha lainnya;
2. Meningkatnya volume harian sampah sebagai akibat meningkatnya jumlah penduduk dan pola konsumsi dimasyarakat (pendatang musiman),industri/ kegiatan usaha ,dll;

3. Kurang optimalnya kesadaran masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan sehingga terjadi pencemaran baik air dan udara;
4. Adanya usaha/kegiatan yang belum mempunyai dokumen lingkungan dimungkinkan karena kurangnya pengetahuan wajib usaha;
5. Adanya badan usaha/instansi yang belum memenuhi mengelola limbah B3 sesuai prosedur

Solusi

1. Dengan makin banyaknya industri maka Dinas Lingkungan Hidup harus lebih sering melakukan monitoring dan evaluasi terhadap industri-industri tersebut mulai dari awal pendirian sampai dengan pelaksanaan operasional kegiatan ;
2. Sarana dan prasarana sudah banyak di penuhi dan meningkatnya volume sampah dapat ditekan karena banyak berdiri bank-bank sampah baik yang sudah berbadan hukum atau belum, dengan sarana prasarana yang tersedia kinerja meningkat, kerjasama yang baik dengan satgas kebersihan yang masuk ke TPS serta pekerja profesional di TPA yang memilah sampah. Sehingga sampah dari tahun ke tahun yang masuk ke TPA di Winongo dapat di tekan;
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam upaya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan/pelestarian lingkungan hidup maka Dinas Lingkungan Hidup meningkatkan sosialisasi dan pendekatan serta meningkatkan kerjasama dengan masyarakat, Dinas terkait dan pihak-pihak yang terkait untuk memberikan yang terbaik berkenaan dengan lingkungan hidup Kota Madiun agar semakin baik dan sehat
4. Menghadapi permasalahan adanya badan usaha/instansi yang belum mempunyai dokumen lingkungan maka ditingkatkan sosialisasi , pembinaan dan pengawasan serta pendekatan kepada pelaku usaha agar segera memiliki dokumen pengelolaan lingkungan sesuai prosedur yang berlaku.
5. Adanya usaha/kegiatan yang belum memenuhi persyaratan administratif dan teknis tentang pengelolaan limbah B3. Tahun 2018 sudah banyak yang melakukan koordinasi pada DLH tetapi belum memenuhi persyaratan sehingga akan lebih intensif melakukan pembinaan ,sosialisasi dan pemantauan
6. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dengan Dinas terkait .

6. URUSAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Adminisitrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

b. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Urusan pemerintahan bidang Adminisitrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Madiun pada Tahun Anggaran 2019, yaitu sebagai berikut:

Tabel III.21
Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan
bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
di Kota Madiun Tahun 2019

No	Program	Kegiatan	
1	program pelayanan administrasi perkantoran	1	kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor
		2	kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah
2	program pemeliharaan barang milik daerah	1	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan
		2	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas
		3	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala sarana prasarana kantor
3	program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1	kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor
		2	kegiatan rehab gedung dan bangunan
4	program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1	kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah
5	program implementasi sistem informasi administrasi kependudukan	1	Kegiatan Pengolahan dalam Penyusunan Laporan data Kependudukan
		2	Kegiatan Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK) updating dan pemeliharaan
6	program pelayanan dan penataan administrasi pencatatan sipil	1	Kegiatan Penataan dan Perawatan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (KK,KTP dan AKTA-AKTA Pencatatan Sipil) (DAK)
		3	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (KK,KTP dan AKTA-AKTA Pencatatan Sipil)
7	program pelayanan dan penataan	1	Kegiatan Pelayanan Keliling Administrasi

No	Program	Kegiatan	
	administrasi kependudukan		Kependudukan
		2	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Bidang Kependudukan

c. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Jumlah Pegawai	Kepangkatan	Tingkat Pendidikan	Struktural/ Eselon	Fungsional	Staf
29	Gol I = 1 Gol II = 7 Gol III = 15 Gol IV = 6	SD = 1 SMP = 1 SMA = 9 D3 = 3 D4/ S1 = 11 S2 = 4	II = 1 III = 4 IV = 8 V =	4	

d. Alokasi dan Realisasi Anggaran

1. Realisasi Program dan Kegiatan

NO		URAIAN	TARGET	REALISASI
1	program pelayanan administrasi perkantoran		2.774.296.560,00	2.535.528.472,00
	1	kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	2.374.296.560,00	2.140.793.104,00
		Output : Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16	16
		Outcome : akuntabilitas kinerja dinas kependudukan dan pencatatan sipil bernilai baik	BB	BB
	2	kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	400.000.000,00	394.735.368,00
		Output : Jumlah perjalanan dinas selama setahun	40	82
		Outcome : Akuntabilitas kinerja dinas kependudukan dan pencatatan sipil bernilai baik	BB	BB
2	program pemeliharaan barang milik daerah		366.914.580,00	300.200.417,00
	1	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan	80.000.000,00	79.705.000,00
		Output : Jumlah gedung yang dipelihara	1 unit	1 unit
		Outcome : Akuntabilitas kinerja dinas kependudukan dan pencatatan sipil bernilai baik	BB	BB
	2	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas	70.346.000,00	42.970.200,00
		Output : Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	26 unit	26 unit
		Outcome : Akuntabilitas kinerja dinas kependudukan dan pencatatan sipil bernilai baik	BB	BB
	3	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala sarana prasarana kantor	216.568.580,00	177.525.217,00
		Output : Jumlah sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	6 jenis	11 jenis
		Outcome : Akuntabilitas kinerja dinas kependudukan dan pencatatan sipil bernilai baik	BB	BB

NO		URAIAN	TARGET	REALISASI
3		program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	655.100.000,00	604.210.984,00
	1	kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor	630.100.000,00	579.260.984,00
		Output : Jumlah sarana dan prasarana kantor	7 paket	7 paket
		Outcome : Akuntabilitas kinerja dinas kependudukan dan pencatatan sipil	BB	BB
	2	kegiatan rehab gedung dan bangunan	25.000.000,00	24.950.000,00
		Output : Jumlah gedung yang direhab	1 paket	1 paket
		Outcome : Akuntabilitas kinerja dinas kependudukan dan pencatatan sipil	BB	BB
4		program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	58.461.120,00	54.777.342,00
	1	kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	58.461.120,00	54.777.342,00
		Output :Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	8 dokumen	8 dokumen
		Outcome : Akuntabilitas kinerja dinas kependudukan dan pencatatan sipil	BB	BB
5		program implementasi sistem informasi administrasi kependudukan	503.270.770,00	473.250.492,00
	1	Kegiatan Pengolahan dalam Penyusunan Laporan data Kependudukan	113.493.720,00	90.320.760,00
		Output : Jumlah sub kegiatan	3 sub kegiatan	3 sub kegiatan
		Outcome : Tingkat akurasi database kependudukan dan pencatatan sipil	98%	99,99%
	2	Kegiatan Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK) updating dan pemeliharaan	389.777.050,00	382.929.732,00
		Output : Jumlah sub kegiatan	3 sub kegiatan	3 sub kegiatan
		Outcome : Tingkat akurasi database kependudukan dan pencatatan sipil	98%	99,99%
6		program pelayanan dan penataan administrasi pencatatan sipil	1.653.252.440,00	1.604.594.613,00
	1	Kegiatan Penataan dan Perawatan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	130.487.520,00	122.126.000,00
		Output :Jumlah dokumen	13 jenis	13 jenis
		Outcome : Cakupan penerbitan akta kelahiran, cakupan penerbitan akta kematian	97%	99,99%
	2	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (KK,KTP dan AKTA-AKTA Pencatatan Sipil) (DAK)	837.511.000,00	820.062.400,00
		Output :Bintek dan Pelatihan	4 kegiatan	4 kegiatan

NO		URAIAN	TARGET	REALISASI
		Outcome : Cakupan penerbitan akta kelahiran, cakupan penerbitan akta kematian	97%	100%
	3	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (KK,KTP dan AKTA-AKTA Pencatatan Sipil)	685.253.920,00	662.406.213,00
		Output :Jumlah dokumen	4 dokumen	4 dokumen
		Outcome : Cakupan penerbitan akta kelahiran, cakupan penerbitan akta kematian	97%	100%
7		program pelayanan dan penataan administrasi kependudukan	335.897.520,00	295.517.900,00
	1	Kegiatan Pelayanan Keliling Administrasi Kependudukan	154.307.760,00	126.407.221,00
		Output : Jumlah penduduk	27 kelurahan	27 kelurahan
		Outcome : Cakupan penerbitan KK, cakupan penerbitan KTP, Indeks kepuasan masyarakat	97%	99,18%
	2	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Bidang Kependudukan	181.589.760,00	169.110.769,00
		Output : Jumlah penduduk	3 kecamatan	3 kecamatan
		Outcome : Cakupan penerbitan KK, cakupan penerbitan KTP, Indeks Kepuasan Masyarakat	97%	99,18%

2. Alokasi danRealisasi Belanja

Uraian	Alokasi	Realisasi
Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
Belanja Tidak Langsung	5.157.955.064	3.163.683.946
Belanja Langsung	6.347.192.990	5.868.080.310
Total Belanja	11.505.148.054	9.031.764.256

e. Proses Perencanaan Pembangunan Daerah

Penyusunan Rencana Kerja merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta dokumen perencanaan lainnya. Adapun Hubungan Dokumen Perencanaan SKPD dengan Dokumen perencanaan lainnya yaitu:

1. Renstra SKPD sebagai pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja tahunan
2. SKPD (Renja SKPD) dan selanjutnya Renja SKPD menjadi pedoman penyusunan RKA SKPD.
3. Renstra SKPD dalam penyusunannya berpedoman pada RPJMD dan memperhatikan Renstra kementerian atau lembaga non departeman.
4. RPJMD dalam penyusunannya berpedoman pada RPJP dan memperhatikan
5. RPJM Nasional.
6. RPJPD dalam penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional.

f. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1.	Gedung	1	Baik
2.	Kendaraan	26	Baik
3.	Alat Kantor		
	- Mesin pemotong fiberglas/polyster	1	Baik
	- Kotak sound antrian	1	Baik
	- Kotak monitor antrian	1	Baik
	- Rak mesin alat antrian	1	Baik
	- Stand Ipad	2	Baik
	- Mesin ketik manual portable	4	1 Baik 3 Rusak
	- Mesin ketik listrik portable	17	Rusak
	- Mesin foto copy	3	2 Baik 1 Rusak
	- Lemari besi	3	Baik
	- Lemari besi sliding/geser/plat besi	4	Baik
	- Rak besi ruang arsip	19	Baik
	- Rak besi ruang server	2	Baik
	- Rak besi semi kayu coklat	2	Baik
	- Rak besi warna abu-abu	4	Baik
	- Rak besi/plat/gudang	15	Baik
	- Rak kayu+kaca	1	Baik
	- Rak kayu/ Rak buku besar	3	Baik
	- Rak kayu/ Rak buku sedang	1	Baik
	- Rak kayu/ Rak buku kecil	1	Baik
	- Filling besi/metal	11	Baik
	- Band Kas	1	Baik
	- Lemari kaca	2	Baik
	- Alat penyimpanan perlengkapan kantor lain-lain	2	Baik
	- Papan nama instansi	1	Baik
	- Papan pengumuman	4	Baik
	- White board	4	Baik
	- Mesin absensi	1	Baik
	- Mesin penghancur kertas	2	Baik
	- OHP	1	Baik
	- LCD Proyektor/BenQ	1	Baik
	- Alat kantor lainnya	4	Baik
	- Backdrop ruang pelayanan utama	1	Baik
	- Drop ceiling ruang pelayanan utama	1	Baik
	- Tanaman hias	8	
	- Drop ceiling ruang pelayanan KTP	1	Baik
	- Backdrop ruang foto	1	Baik
	- Partisi depan ruang foto	1	Baik
	- Gorden ruang foto	1	Baik
	- Backdrop ruang pengambilan berkas	1	Baik
	- Penutup almari	1	Baik
	- Lis meja stainless ruang pelayanan utama	1	Baik
	- Lis jendela ruang pengambilan dokumen	1	Baik
	- Penutup meja ruang pengambilan dokumen	1	Baik
	- Mesin antrian pengunjung	1	Baik
	- Modem 4G LTE Smartfren	4	Baik
	- Mainan dremolen/APE	1	Baik
	- Signature Pad KTP el	1	Baik
	- Case/koper	1	Baik
	- Kain background rekam KTP El	1	Baik
	- Karpet puzzle	11	Baik
	- Jumping animal	2	Baik
	- Loker KTP	1	Baik
	- Loker charge HP	1	Baik

No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
	- Mainan indoor	1	Baik
	- Billboard	2	Baik
	- Rumah genset dan instalasi	1	Baik
	- Lemari kayu	2	Baik
	- Rak kayu	2	Baik
	- Meja besi/metal	1	Baik
	- Meja kayu	24	Baik
	- Kursi besi/metal	135	Baik
	- Kursi roda	1	Baik
	- Kursi rapat warna biru	50	Baik
	- Kursi kayu/rotan/bambu	8	Baik
	- Kursi abu-abu/ruang tunggu pelayanan	8	Baik
	- Zice/meja kursi tamu	3	Baik
	- Meja resepsion	9	Baik
	- Meja ruang utama	1	Baik
	- Meja ruang pelayanan KTP	1	Baik
	- Meja ruang pengambilan berkas	1	Baik
	- Meja ruang informasi	1	Baik
	- Kursi tamu	8	Baik
	- Kursi sofa	4	Baik
	- Bangku tunggu	2	Baik
	- Kursi lipat	13	Baik
	- Meja komputer	9	Baik
	- Meja ½ biro	16	Baik
	- Tudung saji	5	Baik
	- Meubelair lain-lain	3	Baik
	- Jam mekanis	3	Baik
	- Penghisap debu	1	Baik
	- Lemari es	1	Baik
	- AC unit	52	30 Baik 22 Rusak
	- AC Floor standing	3	Baik
	- Kipas angin	9	Baik
	- Kitchen set +wastafel	1	Baik
	- Gelas berkaki	2	Baik
	- Cangkir lepek putih	2	Baik
	- Televisi /LED	8	Baik
	- Sound system	5	Baik
	- wireless	1	Baik
	- microphone	5	Baik
	- Stand mic	1	Baik
	- Unit power supply	6	Baik
	- Stabilisator	7	Baik
	- Camera pocket	2	Baik
	- Kamera Nikon	1	Baik
	- Lambang garuda pancasila	1	Baik
	- Gambar presiden/wakil presiden	1	Baik
	- Tangga aluminium	1	Baik
	- Taplak meja rempel	1	Baik
	- Vas bunga	4	Baik
	- Tempat tisu keramik	1	Baik
	- Asbak	5	Baik
	- Korden vitrage vertikal	1	Baik
	- Alat pemadam/portable	8	Baik
	- Mini komputer	4	Baik
	- Ipad	2	Baik
	- P.C. Unit	23	Baik
	- P.C. All in One	20	Baik
	- Laptop	17	Baik
	- Note book	11	Baik
	- Hard Disk	1	Baik

No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
	- Keyboard	5	Baik
	- Card reader	5	Baik
	- Printer evolis/cetak KIA	3	Baik
	- Printer fargo/ cetak KTP	1	Baik
	- Finger print scanner	6	Baik
	- Iris scanner	1	Baik
	- Monitor	9	Baik
	- Printer	67	Baik
	- Printer portable	1	Baik
	- Scanner	5	Baik
	- Server	19	Baik
	- Meja kerja pejabat Esl II	1	Baik
	- Meja kerja pejabat esl III	7	Baik
	- Meja kerja pejabat esl IV	10	Baik
	- Meja kerja pegawai non struktural	2	Baik
	- Kursi kerja pejabat esl II	1	Baik
	- Kursi kerja pejabat esl III	6	Baik
	- Kursi kerja pejabat esl IV	9	Baik
	- Kursi tamu di raungan pejabat Esl III	2	Baik
	- Lemari arsip untuk arsip dinamis	4	Baik
	- Disc. Record player	1	Baik
	- Microphone/wireless mic	5	Baik
	- Camera film	2	Baik
	- Mixer	1	Baik
	- Handphone	2	Baik
	- Stabilizer	2	Baik
	- Generator set	1	Baik

g. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

Permasalahan yang dihadapi terkait dengan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil adalah sebagai berikut:

1. Kesadaran masyarakat akan kepemilikan kelengakapan dokumen kependudukan (KK, KTP dan Akta Catatan Sipil) belum maksimal.
2. Seiring dengan kemajuan roda transportasi antar wilayah kab/kota dan antar provinsi, perpindahan penduduk seringkali tidak disertai dan diikuti dengan administrasi kependudukan yang benar, sehingga banyak kepindahan penduduk yang tidak terdeteksi.
3. Integrasi dan pemanfaatan data yang masih tergantung pada koneksi jaringan SIAK Daerah ke pusat dikarenakan semua data harus melalui server pusat, padahal kegiatan pelayanan di Daerah harus tetap dilaksanakan.
4. Data Base Kependudukan sebagai dasar berbagai penyelenggaraan pemerintahan masih perlu ditingkatkan keakuratan dan validitasnya.

Solusi :

Dengan mengembangkan inovasi-inovasi di bidang pelayanan sebagai berikut:

1. Publikasi dan pelayanan keliling.
   a. Sosialisasi kepada masyarakat kota Madiun mengenai pentingnya kelengkapan dokumen Administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil. Sosialisasi dilaksanakan secara rutin baik melalui media pertemuan langsung dengan mengundang RT, RW, wakil kelurahan, tokoh masyarakat, sosialisasi melalui media cetak dan sosialisasi melalui media elektronik
   b. Layanan Pecel Andok (Pelayanan Cepat Keliling Administrasi dan Dokumen Kependudukan).

      Adalah layanan Keliling Dinas Dukcapil melalui mobil keliling yang menjangkau semua kelurahan dan kecamatan se-Kota Madiun. Di layanan Pecel Andok masyarakat bisa mendapatkan layanan kependudukan di hari Sabtu/Minggu, baik pengurusan KK maupun perekaman biometrik untuk KTP-elektronik. Inovasi ini utamanya ditujukan bagi penduduk Kota Madiun yang berdomisili di luar kota dan kembali ke Kota Madiun di akhir pekan.

2. Mengadakan pendataan penduduk non permanen melalui RT/RW di masing-masing kelurahan.
3. Secara rutin mengadakan koordinasi dengan pusat berkaitan dengan jaringan, aplikasi dan regulasi pelaksanaan pelayanan adminduk dan capil setiap triwulan mengadakan validasi data dengan kelurahan dan kecamatan untuk meningkatkan keakuratan data kependudukan.

7. URUSAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

b. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dilaksanakan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana di Kota Madiun pada Tahun Anggaran 2019, yaitu sebagai berikut:

Tabel III.23
Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kota Madiun Tahun 2019

No	Program	Kegiatan	
1	program keluarga berencana dan Keluarga Sejahtera	1	Kegiatan Peningkatan Pemberdayaan Keluarga dan Keluarga Sejahtera
		2	Kegiatan Advokasi, Penggerakan dan Informasi Keluarga Berencana
		3	Kegiatan Pelayanan KB, MKJP dan Konseling
		4	Kegiatan Pengendalian Penduduk dan Kesehatan Reproduksi
		5	Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Tribina
		6	kegiatan bantuan operasional keluarga berencana (KB) (DAK)
		7	kegiatan pengadaan sarana prasarana penyuluhan keluarga berencana (DAK)

c. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Jumlah Pegawai	Kepangkatan	Tingkat Pendidikan	Struktural / Eselon	Fungsional	Staf
PNS : 29 Honorer : 2	IV/c : 1 IV/b : 10 IV/a : 5 III/d : 2 III/c : 5 III/b : 4 III/a : 2	Sarjana (S-1) : 25 D-4 : 1 D-3 : 3	III : 1 IV : 1	- Epidemiolog Kesehatan : 1 - Penyuluh KB : 23 - Bidan : 2 - Pranata Komputer : 1	

d. Alokasi dan Realisasi Anggaran

1. Realisasi program dan Kegiatan

No.	Uraian		Target	Realisasi
1	Program Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera		2,698,892,200.00	2,103,597,509.00
	1	Kegiatan Peningkatan Pemberdayaan Keluarga dan Keluarga Sejahtera	318,495,000.00	287,420,604.00
		Output : Persentase keluarga Tribina yang ber-KB	75%	80%
		Outcome: Total Fertility Rate (Angka Kelahiran Total)	2.03	1,91 *)
	2	Kegiatan Advokasi, Penggerakan dan Informasi Keluarga Berencana	282,610,000.00	212,673,981.00
		Output : Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap kelurahan setiap tahun	100%	100%
		Outcome: Total Fertility Rate (Angka Kelahiran Total)	2.03	1,91 *)
	3	Kegiatan Pelayanan KB, MKJP dan Konseling	424,921,000.00	347,098,382.00
		Output : Persentase peserta KB baru MKJP	39.15%	47.16%
		Outcome: Total Fertility Rate (Angka Kelahiran Total)	2.03	1,91 *)
	4	Kegiatan Pengendalian Penduduk dan Kesehatan Reproduksi	320,920,000.00	252,423,071.00
		Output : Persentase PUS yang istrinya < 20 tahun	≤ 3,5%	0.17%
		Outcome: Total Fertility Rate (Angka Kelahiran Total)	2.03	1,91 *)
	5	Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Tribina	324,979,200.00	282,764,308.00
		Output : Jumlah kejuaraan yang diperoleh	4 juara	4 juara
		Outcome: Total Fertility Rate (Angka Kelahiran Total)	2.03	1,91 *)
	6	Kegiatan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (KB) (DAK)	725,243,000.00	449,695,623.00
		Output : Jumlah Balai Keluarga Berencana memperoleh bantuan operasional	3 balai	3 balai
		Outcome: Total Fertility Rate (Angka Kelahiran Total)	2.03	1,91 *)
	7	Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Penyuluhan Keluarga Berencana (DAK)	301,724,000.00	271,521,540.00
		Output : Jumlah jenis sarana dan prasarana penyuluhan KB yang diadakan	5 jenis	3 jenis
		Outcome: Total Fertility Rate (Angka Kelahiran Total)	2.03	1,91 *)

2. Realisasi Anggaran Total Belanja

Uraian	Alokasi	Realisasi
Urusan Pengendalian Penduduk dan KB		
Belanja Tidak Langsung	1.058.618.842	980.739.084
Belanja Langsung	2.698.892.200	2.103.597.509
Total Belanja	3.757.511.042	3.084.336.593

3. Asset yang dikuasai

Urusan	Nilai Asset	Keterangan
Pengendalian Penduduk dan KB	105.784.754.93	

e. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

NO.	NAMA BARANG	JUMLAH	KONDISI
1	Tanah	0	Baik
2	Alat-Lat Besar	0	Baik
3	Alat-Alat Angkutan	0	Baik
4	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	0	Baik
5	Alat Pertanian	0	Baik
6	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	38	Baik
7	Alat Studio Dan Alat Komunikasi	0	Baik
8	Alat-Alat Kedokteran	0	Baik
9	Alat Laboratorium	0	Baik
10	Bangunan Gedung	0	Baik
11	Monumen	0	Baik
12	Bangunan Air / Irigasi	0	Baik
13	Instalasi	0	Baik
14	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	Baik

f. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

Pada program ini ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena:

1. Adanya kegiatan yang tergantung dengan pelaksanaan kegiatan di tingkat Provinsi yaitu Kegiatan Pramuka Saka Kencana (Pertida dan Pertinas), Lomba Tribina Tingkat Provinsi dan Lomba UPPKS Tingkat Provinsi. Pada Tahun 2019 di tingkat provinsi tidak melaksanakan kegiatan tersebut sehingga di Kota Madiun juga tidak melaksanakan.
2. Adanya honor kader dalam pemberian KIE di Kegiatan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (KB) (DAK) tidak terserap karena sudah dimasukkan anggaran ke poin reward kader kegiatan di Bidang Kesehatan Masyarakat.
3. Adanya petunjuk teknis pemakaian dana BOKB (DAK) yang tidak fleksible sesuai dengan kebutuhan Kota Madiun yaitu menu kegiatan sudah ditentukan oleh BKKBN Pusat sehingga tidak dapat terserap dengan maksimal.

Solusi:

1. Berkoodinasi dengan Provinsi terkait penyelenggaraan kegiatan sehingga kegiatan yang dianggarkan bisa selaras.
2. Mengusulkan petunjuk teknis yang lebih fleksibel menyesuaikan dengan kebutuhan Kota Madiun ke BKKBN Provinsi dan Pusat.

8. URUSAN BIDANG PERHUBUNGAN

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Perhubungan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan.

b. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Urusan pemerintahan bidang Perhubungan yang dilaksanakan Dinas Perhubungan di Kota Madiun pada Tahun Anggaran 2019, yaitu sebagai berikut:

Tabel III.25
Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan bidang Perhubungan
di Kota Madiun Tahun 2019

No	Program	Kegiatan	
1	program pelayanan administrasi perkantoran	1	kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor
		2	kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah
2	program pemeliharaan barang milik daerah	1	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan
		2	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas
		3	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala sarana prasarana kantor
3	program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1	kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor
		2	kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
4	program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1	kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah
5	program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	1	Kegiatan Pengadaan Peralatan Perlengkapan Lalu Lintas
		2	Kegiatan Pengadaan Marka Jalan
		3	Kegiatan Pendataan Sarana Prasarana Jalan
		4	Kegiatan Kalibrasi Alat Pengujian Kendaraan Bermotor
		5	Kegiatan Operasi Penertiban Pembatas Kecepatan
		6	Kegiatan Survey Kinerja Ruas Jalan
6	program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana fasilitas LLAJ	1	Kegiatan Penyusunan Database Perhubungan Darat
		2	Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
		3	Kegiatan Pemeliharaan CCTV dan SIM LLAJ
7	program peningkatan pelayanan angkutan	1	Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalin dan Angkutan
		2	Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya
		3	Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan

No	Program	Kegiatan	
		4	Kegiatan Pembinaan Keselamatan LLAJ
		5	Kegiatan Penyelenggaraan Balik Gratis Angkutan Lebaran
		6	Kegiatan Pemilihan dan Pemberiaan Penghargaan Pemuda Pelopor
		7	Kegiatan Pengamanan Insidentil Terpadu
		8	Kegiatan Pelatihan/Pembinaan SDM Perhubungan
		9	Lomba Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Kota (LLAK) Wahana Tata Nugraha (WTN)
		10	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perijinan Angkutan
		11	Kegiatan Penyelenggaraan Angkutan Umum Sekolah Gratis
		12	Kegiatan Pengelolaan Operasional UPTD Pengujian kendaraan bermotor
		13	kegiatan pengelolaan operasional tempat parkir khusus
		14	kegiatan akriditasi PKB

c. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Jumlah Pegawai	Kepangkatan	Tingkat Pendidikan	Struktural/ Eselon	Fungsional	Staf
56	Gol I = 3 Gol II = 33 Gol III = 18 Gol IV = 2	SD = 3 SMP = 4 SMA = 27 D2 = 6 D3 = 4 D4/ S1 = 10 S2 = 2	II = 1 III = 0 IV = 7 V =	**7**	**41**

d. Alokasi dan Realisasi Anggaran

1. Realisasi Program dan Kegiatan

NO		URAIAN	TARGET	REALISASI
1	program pelayanan administrasi perkantoran		3.191.174.000,00	2.947.985.195
	1	kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	2.961.174.000,00	2.717.986.312
		Output :Jumlahperalatandanperlengkapan kantor	1 paket	1 paket
		Outcome :akuntabilitaskinerjadinasperhubungan	BB	BB
	2	kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	230.000.000,00	229.998.883
		Output :jumlahkoordinasidankonsultasikeluardaerah	137 kali	137 kali
		Outcome :Akuntabilitaskinerjaperhubungan	BB	BB
2	program pemeliharaan barang milik daerah		1.642.440.000,00	1.408.919.146

NO		URAIAN	TARGET	REALISASI
	1	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan	948.000.000,00	946.386.450
		Output :jumlahgedung	2 unit	2 unit
		Outcome :akuntabilitaskinerjaperhubungan	BB	BB
	2	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas	624.940.000,00	393.661.704
		Output :jumlahkendaraandinas	46 unit	46 unit
		Outcome :akuntabilitaskinerjaperhubungan	BB	BB
	3	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala sarana prasarana kantor	69.500.000,00	68.870.992
		Output :jumlahsarpraskantor	136 kali	136 kali
		Outcome :akuntabilitaskinerjadinasperhubungan	BB	BB
3	program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		1.960.130.000,00	1.933.591.858
	1	kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor	1.766.405.000,00	1.747.958.000
		Output :jumlahsaranadanprasaranakantor	16 unit	16 unit
		Outcome :akuntabilitaskinerjaperhubungan	BB	BB
	2	kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	193.725.000,00	185.633.858
		Output :jumlahpakaiandinasdanperlengkapannya	711 buah	711 buah
		Outcome :akuntabilitaskinerjaperhubungan	BB	BB
4	program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		88.990.000,00	88.009.680
	1	kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	88.990.000,00	88.009.680
		Output :jumlahdokumen	19 Dok	19 Dok
		Outcome :akuntabilitaskinerjaperhubungan	BB	BB
5	program pengendalian dan pengamanan lalu lintas		3.191.761.000,00	3.049.133.929
	1	Kegiatan Pengadaan Peralatan Perlengkapan Lalu Lintas	2.072.852.000,00	1.972.928.000
		Output :Jumlahperlengkapanlalulintas yang dipasang	1224 buah	1224 buah
		Outcome :Persentasepenurunanangkakecelakaan	1,64%	1,64%
	2	Kegiatan Pengadaan Marka Jalan	768.593.000,00	735.520.000
		Output :Jumlahmarkajalan	1450 m	1450 m
		Outcome :Persentasepenurunanangkakecelakaan	1,64%	1,64%
	3	Kegiatan Pendataan Sarana Prasarana Jalan	14.616.000,00	14.435.929
		Output :Jumlah data	1 dok	1 dok
		Outcome :Persentasepenurunanangkakecelakaan	1,64%	1,64%
	4	Kegiatan Kalibrasi Alat Pengujian	106.000.000,00	98.900.000

NO		URAIAN	TARGET	REALISASI
		Kendaraan Bermotor		
		Output :Jumlahalatpengujiankendaraanbermotor	12 alat	12 alat
		Outcome :persentasepenurunanangkakecelakaan	1,64%	1,64%
	5	Kegiatan Operasi Penertiban Pembatas Kecepatan	181.700.000,00	180.250.000
		Output :Jumlahpembatas	36 titik	36 titik
		Outcome :Persentasepenurunanangkakecelakaan	1,64%	1,64%
	6	Kegiatan Survey Kinerja Ruas Jalan	48.000.000,00	47.100.000
		Output :Jumlahdokumen	1 dok	1 dok
		Outcome :Persentasepenurunanangkakecelakaan	1,64%	1,64%
6	program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana fasilitas LLAJ		709.488.000,00	680.421.759
	1	Kegiatan Penyusunan Database Perhubungan Darat	19.488.000,00	6.385.059
		Output :Jumlahdokumen	1 dok	1 dok
		Outcome :Persentaseprasaranadanfasilitaslla j yang berfungsibaik	100%	100%
	2	Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	85.000.000,00	82.932.200
		Output :Jumlahperlengkapanjalan	617 unit	617 unit
		Outcome :Persentaseprasaranadanfasilitaslla j yang berfungsibaik	100%	100%
	3	Kegiatan Pemeliharaan CCTV dan SIM LLAJ	605.000.000,00	591.104.500
		Output :Jumlah CCTV dan SIM LLAJ	4 titik	4 titik
		Outcome :Persentaseprasaranadanfasilitaslla j yang berfungsibaik	100%	100%
7	program peningkatan pelayanan angkutan		2.890.872.000,00	2.277.510.711
	1	Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalin dan Angkutan	301.766.000,00	272.583.795
		Output :Jumlahsosialisasi	1500 peserta	1500 peserta
		Outcome :Persentasepenurunanangkakecelakaan	1,64%	1,64%
	2	Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya	660.000.000,00	550.299.205
		Output :Jumlahkegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan
		Outcome :Persentasepenurunanangkakecelakaan	1,64%	1,64%
	3	Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan	48.152.000,00	41.499.440
		Output :Jumlahawakkendaraan yang diberipenghargaan	35 orang	35 orang

NO		URAIAN	TARGET	REALISASI
		Outcome :Persentasepenurunanangkakecelakaan	1,64%	1,64%
	4	Kegiatan Pembinaan Keselamatan LLAJ	106.307.000,00	84.199.500
		Output :Jumlahpelajar yang diberipenghargaan	75 peserta	75 peserta
		Outcome :Persentasepenurunanangkakecelakaan	1,64%	1,64%
	5	Kegiatan Penyelenggaraan Balik Gratis Angkutan Lebaran	63.638.000,00	34.910.000
		Output :Jumlahpenumpang	590 pnp	590 pnp
		Outcome :Persentasepenurunanangkakecelakaan	1,64%	1,64%
	6	Kegiatan Pemilihan dan Pemberiaan Penghargaan Pemuda Pelopor	102.551.000,00	101.723.780
		Output :Jumlahpelajar yang terpilih	5 pelajar	5 pelajar
		Outcome :Persentasepenurunanangkakecelakaan	1,64%	1,64%
	7	Kegiatan Pengamanan Insidentil Terpadu	207.727.000,00	139.647.471
		Output :Jumlahpospengamanan	5 pos	5 pos
		Outcome :Persentasepenurunanangkakecelakaan	1,64%	1,64%
	8	Kegiatan Pelatihan/Pembinaan SDM Perhubungan	40.458.000,00	36.760.000
		Output :Jumlahkegiatan	35 orang	35 orang
		Outcome :Persentasepenurunanangkakecelakaan	1,64%	1,64%
	8	Lomba Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Kota (LLAK) Wahana Tata Nugraha (WTN)	31.337.000,00	2.569.440
		Output :Jumlahpenilaian	1 kali	1 kali
		Outcome :Persentasepenurunanangkakecelakaan	1,64%	1,64%
	9	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perijinan Angkutan	83.594.000,00	79.874.080
		Output :Jumlahangkutan per tahun	23000 kend	25213 kend
		Outcome :Persentasepenurunanangkakecelakaan	1,64%	1,64%
	10	Kegiatan Penyelenggaraan Angkutan Umum Sekolah Gratis	627.440.000,00	406.994.000
		Output :Jumlahpelajar yang terangkut	118560 pnp	118560 pnp
		Outcome :Persentasepenurunanangkakecelakaan	1.64%	1.64%
	11	Kegiatan Pengelolaan Operasional UPTD Pengujian kendaraan bermotor	111.300.000,00	106.750.000
		Output :Jumlahpegawai	6 orang	6 orang
		Outcome	1.64%	1.64%

NO		URAIAN	TARGET	REALISASI
		:Persentasepenurunanangkakecelakaan		
	12	kegiatan pengelolaan operasional tempat parkir khusus	433.100.000,00	419.700.000
		Output :Jumlahpegawai	12 org	12 org
		Outcome :Persentasepenurunanangkakecelakaan	1.64%	1.64%
	13	kegiatan akriditasi PKB	73.502.000,00	-
		Output :JumlahKegiatan	1	
		Outcome :Persentasepenurunanangkakecelakaan	1.64%	1.64%

2. Alokasi dan Realisasi Belanja

Uraian	Alokasi	Realisasi
Urusan Bidang Perhubungan		
Belanja Tidak Langsung	6.183.448.500	5.066.708.163
Belanja Langsung	13.674.855.000	12.385.572.278
Total Belanja	19.858.303.500	17.452.280.441

3. Asset yang dikuasai

Urusan	Nilai Asset	Keterangan
Bidang Perhubungan	Rp. 41.200.860.624,00	

e. Proses Perencanaan Pembangunan Daerah

Proses penyusunan rencana kerja dan dokumen yang dipergunakan.

1. RENSTRA
2. RENJA
3. RKA
4. RKT
5. DPA

f. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1.	Gedung	5	Baik
2.	Kendaraan	59	Baik
3.	Alat Kantor		
	Kursi	173	Baik
	Meja	91	Baik
	Komputer	44	Baik
	Laptop	19	Baik
	Printer	49	Baik
	AC	40	Baik

g. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

1. Pada kegiatan Akreditasi Pengujian Kendaraan Bermotor tidak dilakukan realisasi anggraan dikarenakan kegiatan ini menyesuaikan Kementerian Perhubungan, pada tahun 2019 Kementerian Perhubungan tidak melakukan akreditasi pengujian kendaraan bermotor.
2. Anggaran belanja pegawai dalam hak Uang Kinerja Kegiatan tidak optimal dikarenakan banyaknya jabatans truktural yang kosong.
3. Harga BBM non subsidi yang fluktuatif menyebabkan anggaran yang tersedia tidak dapat diserap dengan maksimal, akan tetapi hal ini telah sesuai dengan aturan karena jumlah liter BBM untuk kendaraan dinas telah diatur dan tidak dapat melebihi jumlah yang ditetapkan.
4. Untuk penilaian lomba Wahana Tata Nugraha pada tahun 2019 terjadi perubahan sistem penilaian yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan. Semula direncanakan penilaiandilakukan sebanyak 2 kali di masing-masing daerah kemudian berubah menjadi terpusa tdi Jakarta dengan mengundang Pemerintah Daerah untuk melakukan paparan di Jakarta.

Solusi :

1. Anggaran akreditasi akan dimunculkan kembali pada anggaran2 020 .
2. Pada tahun 2020 jumlah pejabat struktural di DinasPerhubungan Kota Madiun sudah tercukupi.
3. Untuk penilaian lomba Wahana Tata Nugraha akan tetap berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan

9. URUSAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika.

b. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika di Kota Madiun pada Tahun Anggaran 2019, yaitu sebagai berikut:

Tabel III.27
Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan
bidang Komunikasi dan Informatika
di Kota Madiun Tahun 2019

No	Program	Kegiatan	
1	program pelayanan administrasi perkantoran	1	kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor
		2	kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah
2	program pemeliharaan barang milik daerah	1	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan
		2	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas
		3	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala sarana prasarana kantor
3	program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1	kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor
4	program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1	kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah
5	program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi	1	Kegiatan Pelatihan SDM dalam bidang Informasi dan Komunikasi
		2	Kegiatan Pelaksanaan E-procurement di Pemerintah Kota Madiun
		3	Kegiatan Bimtek Aplikasi SPSE
		4	Kegiatan Integrasi Sistem Informasi
		5	Kegiatan Bimtek Rencana Umum Pengadaan
		6	Kegiatan Maintenance Aplikasi Berbasis Web
		7	Kegiatan Penyampaian Informasi Ketentuan Perundang-undangan Dibidang Cukai kepada Masyarakat (DBH-CHT)
		8	kegiatan pengelolaan call center 112
		9	kegiatan pemeliharaan kualitas jaringan intranet dan internet Kota Madiun
6	program pengembangan komunikasi informasi dan media massa	1	Kegiatan Pengelolaan Operasional Radio Suara Madiun
		2	Kegiatan Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat

No	Program	Kegiatan	
		3	Kegiatan Pertemuan Forum Koordinasi Kehumasan
		4	Kegiatan Jumpa Pers (Press Conference) secara periodik
		5	kegiatan Penerbitan Tabloid Program Pemerintah
		6	Kegiatan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat
		7	Kegiatan Optimalisasi PPID
		8	Kegiatan Peliputan Kegiatan Pemerintah Kota

c. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Jumlah Pegawai	Kepangkatan	Tingkat Pendidikan	Struktural/ Eselon	Fungsional	Staf
28	Gol I = Gol II = 5 Gol III = 20 Gol IV = 3	SD = SMP = SMA = 5 D3 = 8 D4/ S1 = 13 S2 = 2	II = 1 III = 3 IV = 5 V =	**10**	**9**

d. Alokasi dan Realisasi Anggaran

1. Realisasi Program dan Kegiatan

NO		URAIAN	TARGET	REALISASI
1	program pelayanan administrasi perkantoran		2.658.140.000,00	2.527.032.393,00
	1	kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	2.290.500.000,00	2.160.103.459,00
		Output : Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	1 paket	1 paket
		Outcome : Persentase Terlaksana nya Administrasi Perkantoran	100%	100%
	2	kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	367.640.000,00	366.928.934,00
		Output : Jumlah perjalanan dinas luar daerah	82 kali	101 kali
		Outcome : Persentase Terlaksana nya Administrasi Perkantoran	100%	100%
2	program pemeliharaan barang milik daerah		967.990.000,00	955.641.352,00
	1	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan	360.000.000,00	350.364.131,00
		Output : Jumlah gedung yang dipelihara	1 paket	1 paket
		Outcome : Persentase Barang Inventarisasi dalam Kondisi Baik	100%	100%
	2	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas	62.990.000,00	60.917.787,00
		Output : Jumlah Kendaraan Dinas	25 unit	30 unit
		Outcome : Persentase Barang Inventarisasi dalam Kondisi Baik	100%	100%
	3	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala sarana prasarana kantor	545.000.000,00	544,359.434,00
		Output : Jumlah Sarana dan Prasarana	1 paket	1 paket

NO		URAIAN	TARGET	REALISASI
		Outcome : Persentase Barang Inventarisasi dalam Kondisi Baik	100%	100%
3		program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	5.927.650.000,00	5.925.281.800,00
	1	kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor	5.927.650.000,00	5.925.281.800,00
		Output : Jumlah Sarana dan Prasarana	1 paket	1 paket
		Outcome : Persentase Sarana dan Prasarana Kantor	100%	100%
4		program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	45.335.000,00	45.050.171,00
	1	kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	45.335.000,00	45.050.171,00
		Output : Jumlah dokumen	5 dokumen	5 dokumen
		Outcome : Persentase jumlah dokumen pelaporan	100%	100%
5		program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi	22.088.869.000,00	21.590.147.345,00
	1	Kegiatan Pelatihan SDM dalam bidang Informasi dan Komunikasi	346.035.000,00	333.026.737,00
		Output : Jumlah peserta pelatihan TIK	34 OPD	34 OPD
		Outcome : Persentase hosting collocation dan data center Pemerintah Daerah	100%	100%
	2	Kegiatan Pelaksanaan E-procurement di Pemerintah Kota Madiun	337.295.000,00	305.407.295,00
		Output : Persentase uptime server LPSE ; ISO270001	98%	98%
		Outcome : Persentase hosting collocation dan data center Pemerintah Daerah	100%	100%
	3	Kegiatan Bimtek Aplikasi SPSE	320.145.000,00	286.727.929,00
		Output : Jumlah user aplikasi SPSE	240 user	240 user
		Outcome : Persentase hosting collocation dan data center Pemerintah Daerah	100%	100%
	4	Kegiatan Integrasi Sistem Informasi	1.077.539.000,00	1.029.847.686,00
		Output : Jumlah aplikasi sistem informasi	3 sistem	3 sistem
		Outcome : Persentase hosting collocation dan data center Pemerintah Daerah	100%	100%
	5	Kegiatan Bimtek Rencana Umum Pengadaan	305.400.000,00	276.468.844,00
		Output : Jumlah user aplikasi	240 user	240 user
		Outcome : Persentase hosting collocation dan data center Pemerintah Daerah	100%	100%
	6	Kegiatan Maintenance Aplikasi Berbasis Web	11.519.578.000,00	11.426.447.710,00
		Output : Jumlah aplikasi berbasis web	63 Aplikasi	63 Aplikasi
		Outcome : Persentase hosting collocation dan data center Pemerintah Daerah	100%	100%

NO		URAIAN	TARGET	REALISASI
	7	Kegiatan Penyampaian Informasi Ketentuan Perundang-undangan Dibidang Cukai kepada Masyarakat (DBH-CHT)	5.000.000.000,00	4.897.772.547,00
		Output : Jumlah media online guna melaksanakan penyampaian informasi tentang cukai	5 jenis	5 jenis
		Outcome : Persentase hosting collocation dan data center Pemerintah Daerah	100%	100%
	8	kegiatan pengelolaan call center 112	236.050.000,00	229.626.560,00
		Output : Jumlah layanan panggilan	6 layanan	6 layanan
		Outcome : Persentase hosting collocation dan data center Pemerintah Daerah	100%	100%
	9	kegiatan pemeliharaan kualitas jaringan intranet dan internet Kota Madiun	2.946.827.000,00	2.804.822.037,00
		Output : Jumlah client intranet dan internet + titik CCTV	301 titik	301 titik
		Outcome : Persentase hosting collocation dan data center Pemerintah Daerah	100%	100%
6		program pengembangan komunikasi informasi dan media massa	6.104.699.000,00	5.984.914.391,00
	1	Kegiatan Pengelolaan Operasional Radio Suara Madiun	458.131.000,00	422.630.223,00
		Output : Jumlah jam siaran per hari	18 jam/hari	18 jam/hari
		Outcome : Persentase Informasi Publik Pemerintah Daerah yang dipublikasikan	100%	100%
	2	Kegiatan Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	2.874.250.000,00	2.870.177.139,00
		Output : Jumlah media informasi dan komunikasi yang dimanfaatkan Pemda	50 media	50 media
		Outcome : Persentase Informasi Publik Pemerintah Daerah yang dipublikasikan	100%	100%
	3	Kegiatan Pertemuan Forum Koordinasi Kehumasan	500.000.000,00	498.197.420,00
		Output : Jumlah pertemuan forum koordinasi kehumasan	12 kali	12 kali
		Outcome : Persentase Informasi Publik Pemerintah Daerah yang dipublikasikan	100%	100%
	4	Kegiatan Jumpa Pers (Press Conference) secara periodik	526.417.000,00	525.722.640,00
		Output : Jumlah Kegiatan Jumpa Pers	12 kali	12 kali
		Outcome : Persentase Informasi Publik Pemerintah Daerah yang dipublikasikan	100%	100%
	5	kegiatan Penerbitan Tabloid Program Pemerintah	448.800.000,00	431.127.448,00
		Output : Jumlah edisi	13 edisi	13 edisi
		Outcome : Persentase Informasi Publik Pemerintah Daerah yang	100%	100%

NO		URAIAN	TARGET	REALISASI
		dipublikasikan		
	6	Kegiatan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat	612.601.000,00	607.113.720,00
		Output : Jumlah kegiatan pemberdayaan KIM	12 kali	12 kali
		Outcome : Persentase Informasi Publik Pemerintah Daerah yang dipublikasikan	100%	100%
	7	Kegiatan Optimalisasi PPID	285.500.000,00	274.462.277,00
		Output : Jumlah informasi yang dipublikasikan	888 informasi	1208 informasi
		Outcome : Persentase Informasi Publik Pemerintah Daerah yang dipublikasikan	100%	100%
	8	Kegiatan Peliputan Kegiatan Pemerintah Kota	399.000.000,00	355.483.524,00
		Output : Jumlah peliputan dan dokumentasi kegiatan Pemkot	1584 dokumentasi	1919 dokumentasi
		Outcome : Persentase Informasi Publik Pemerintah Daerah yang dipublikasikan	100%	100%

2. Alokasi dan Realisasi Belanja

No	Uraian	Alokasi	Realisasi
1.	Urusan Komunikasi dan Informatika		
	Belanja Tidak Langsung	2.810.813.675,67	2.834.335.311,03
	Belanja Langsung	37.792.683.000,00	37.028.067.452,00
	Total Belanja	41.506.972.500,00	40.773.439.113,00

3. Asset yang dikuasai

No.	Urusan	Nilai Asset	Keterangan
1.	Komunikasi dan Informatika	22.361.726.538,1	

e. Proses Perencanaan Pembangunan Daerah

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD. Oleh karena itu penyusunan Renja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/ paralel dengan penyusunan RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan melalui 2 (dua) tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup tahap perumusan Rancangan Renja Perangkat Daerah, dan tahap penyajian Rancangan Renja Perangkat Daerah.

Rancangan awal Renja Perangkat Daerah dibahas dalam Forum Perangkat Daerah yang merupakan wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari

program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagai perwujudan dari pendekatan partisipatif perencanaan pembangunan daerah. Hasil pembahasan Forum Perangkat Daerah sebagai bahan pemutakhiran rancangan RKPD Kota Madiun untuk selanjutnya dibahas dalam Musrenbang RKPD Kota Madiun.

Hasil Musrenbang RKPD selanjutnya digunakan untuk mensinkronkan hasil kesepakatan Musrenbang tersebut kedalam rancangan RKPD menjadi rancangan akhir RKPD.

Pada saat bersamaan dilakukan evaluasi terhadap hasil Musrenbang Nasional RKP dan Musrenbang RKPD Provinsi untuk Kabupaten/Kota guna memperoleh tambahan informasi atau kebijakan yang harus diacu atau diselaraskan dalam rancangan akhir RKPD.

Dengan demikian RKPD dirumuskan berdasarkan masukan hasil Musrenbang RKPD Kota, Musrenbang RKPD Provinsi dan Musrenbang Nasional RKP untuk mencapai sinergitas, harmonisasi, dan sinkronisasi pembangunan. Proses selanjutnya setelah diadakan perbaikan terhadap rancangan RKPD adalah penetapan dokumen RKPD dengan Peraturan Walikota.

RKPD yang telah ditetapkan dijadikan pedoman penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah. Penetapan Renja Perangkat Daerah dilakukan dengan penetapan oleh Kepala Perangkat Daerah, selanjutnya Kepala Daerah menetapkan Renja Perangkat Daerah untuk menjadi pedoman di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Perangkat Derah pada tahun anggaran berkenaan.

Dalam proses penganggaran, RKPD menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan umum APBD (KUA) dan KUA menjadi acuan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). KUA dan PPAS menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

f. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1.	Gedung	10	Baik
2.	Kendaraan	28	Baik
3.	Alat Kantor	1513	Baik
	..... (lainnya)		

g. Permasalahan dan Solusi

1. Belum optimalnya pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan pemerintah Kota Madiun;

2. Belum optimalnya penyebarluasan informasi citra positif pemerintah di media massa untuk menangkal berita hoax;
3. Kurangnya ruang informasi publik yang memadai untuk akses informasi bagi masyarakat;
4. Informasi pembangunan yang dilakukan pemerintah belum tersosialisasi dengan baik di masyarakat;
5. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam penyebarluasan informasi program dan kegiatan pemerintah;
6. Belum optimalnya pelaksanaan standart layanan informasi publik di badan publik lingkungan pemerintah Kota Madiun;
7. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi komunikasi (TIK) untuk mendukung pelaksanaan SPBE;
8. Belum optimalnya pemerataan fasilitas akses informasi publik dan internet sehat;
9. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana peningkatan usaha yang produktif berbasis online menuju *e-comerce*;
10. Belum optimalnya regulasi daerah dalam pelaksanaan SPBE dan terwujudnya *Smart City*;
11. Masih terbatasnya sumber daya yang memadai di bidang layanan komunikasi dan informatika.

Solusi

1. Melakukan pengintegrasian sistem *e-goverment;*
2. Pengelolaan website Pemerintah Kota secara terintegrasi;
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayananan publikasi informasi ke masyarakat;
4. Menjalin kerjasama dan hubungan yang lebih harmonis dengan media massa dan instansi terkait;
5. Menyediakan layanan publik berbasis Teknologi Informasi;
6. Menyediakan saluran informasi dan komunikasi yang memadai bagi masyarakat berkaitan dengan implementasi kebijakan dan pembangunan Pemerintah Kota;
7. Mengoptimalkan PPID;
8. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder masyarakat;

10. URUSAN BIDANG PERSANDIAN

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Persandian.

b. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Urusan pemerintahan bidang Persandian yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika di Kota Madiun pada Tahun Anggaran 2019, yaitu sebagai berikut:

Tabel III.29
Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan bidang Persandian
di Kota Madiun Tahun 2019

No	Program		Kegiatan
1	program pengembangan tata kelola persandian	1	Kegiatan Pelatihan SDM dalam Bidang Persandian

c. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Jumlah Pegawai	Kepangkatan	Tingkat Pendidikan	Struktural/ Eselon	Fungsional	Staf
3	Gol I = Gol II = 2 Gol III = 1 Gol IV =	SD = SMP = SMA = 2 D3 = D4/ S1 = 1	II = III = IV = 1 V =	-	**2**

d. Alokasi dan Realisasi Anggaran

1. Realisasi Program dan Kegiatan

NO		URAIAN	TARGET	REALISASI
1	program pengembangan tata kelola persandian		150.000.000,00	132.637.946,00
	1	Kegiatan Pelatihan SDM dalam Bidang Persandian	150.000.000,00	132.637.946,00
		Output : Jumlah peserta pelatihan	34 OPD	34 OPD
		Outcome : Persentase Perangkat daerah yang menggunakan layanan persandian	100%	100%

2. Alokasi dan Realisasi Belanja

Uraian	Alokasi	Realisasi
Urusan Persandian		
Belanja Tidak Langsung	301.158.608,11	303.678.783,32
Belanja Langsung	150.000.000,00	132.637.946,00
Total Belanja	150.000.000,00	132.937.946,00

3. Asset yang dikuasai

Urusan	Nilai Asset	Keterangan
Persandian	4.652,771.448,28	

e. Proses Perencanaan Pembangunan Daerah

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD. Oleh karena itu penyusunan Renja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/ paralel dengan penyusunan RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan melalui 2 (dua) tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup tahap perumusan Rancangan Renja Perangkat Daerah, dan tahap penyajian Rancangan Renja Perangkat Daerah.

Rancangan awal Renja Perangkat Daerah dibahas dalam Forum Perangkat Daerah yang merupakan wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagai perwujudan dari pendekatan partisipatif perencanaan pembangunan daerah. Hasil pembahasan Forum Perangkat Daerah sebagai bahan pemutakhiran rancangan RKPD Kota Madiun untuk selanjutnya dibahas dalam Musrenbang RKPD Kota Madiun.

Hasil Musrenbang RKPD selanjutnya digunakan untuk mensinkronkan hasil kesepakatan Musrenbang tersebut kedalam rancangan RKPD menjadi rancangan akhir RKPD.

Pada saat bersamaan dilakukan evaluasi terhadap hasil Musrenbang Nasional RKP dan Musrenbang RKPD Provinsi untuk Kabupaten/Kota guna memperoleh tambahan informasi atau kebijakan yang harus diacu atau diselaraskan dalam rancangan akhir RKPD.

Dengan demikian RKPD dirumuskan berdasarkan masukan hasil Musrenbang RKPD Kota, Musrenbang RKPD Provinsi dan Musrenbang Nasional RKP untuk mencapai sinergitas, harmonisasi, dan sinkronisasi pembangunan. Proses selanjutnya setelah diadakan perbaikan terhadap rancangan RKPD adalah penetapan dokumen RKPD dengan Peraturan Walikota.

RKPD yang telah ditetapkan dijadikan pedoman penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah. Penetapan Renja Perangkat Daerah dilakukan dengan penetapan oleh Kepala Perangkat Daerah, selanjutnya Kepala Daerah menetapkan Renja Perangkat Daerah untuk menjadi pedoman di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Perangkat Derah pada tahun anggaran berkenaan.

Dalam proses penganggaran, RKPD menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan umum APBD (KUA) dan KUA menjadi acuan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). KUA dan PPAS menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

f. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1.	Gedung	1	Baik
2.	Kendaraan	1	Baik
3.	Alat Kantor	504	Baik
	..... (lainnya)		

g. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

1. Belum optimalnya penyelenggaraan keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
2. Belum optimalnya perangkat daerah yang menggunakan persandian untuk mengamankan setiap jenis informasi yang wajib diamankan;
3. Belum optimalnya sarana dan prasarana jejaring persandian daerah dan informasi;
4. Kurangnya sumber daya manusia di bidang pengelolaan persandian daerah.

Solusi :

1. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) Persandian;
2. Peningkatan koordinasi dan konsolidasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dalam bidang persandian.

11. URUSAN BIDANG KOPERASI DAN UKM

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Penanaman Modal, PTSP, Koperasi dan UM menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi dan UKM.

b. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Urusan pemerintahan bidang Koperasi dan UKM yang dilaksanakan Dinas Dinas Penanaman Modal, PTSP, Koperasi dan UM di Kota Madiun pada Tahun Anggaran 2019, yaitu sebagai berikut:

Tabel III.30
Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan bidang Koperasi dan UKM di Kota Madiun Tahun 2019

No	Program	Kegiatan	
1	program pelayanan administrasi perkantoran	1	kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor
		2	kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah
2	program pemeliharaan barang milik daerah	1	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan
		2	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas
		3	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala sarana prasarana kantor
3	program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1	kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor
4	program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1	kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah
5	program pengembangan sistem Pendukung kewirausahaan dan keunggulan kompetitif KUMKM	1	Kegiatan Pemberdayaan UMKM di Kota Madiun
		2	kegiatan sosialisasi dukungan penyediaan permodalan bagi KUMKM
6	program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	1	Kegiatan Pemeringkatan Koperasi
		2	Kegiatan Pelatihan dan Sosialisasi Kebijakan Perkoperasian
		3	kegiatan pelatihan manajemen pengelola koperasi/ KUD

c. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Jumlah Pegawai	Kepangkatan	Tingkat Pendidikan	Struktural/ Eselon	Fungsional	Staf
PNS =11 Honorer =- Upahan= 5	Gol I = 1 Gol II = 1 Gol III = 7 Gol IV = 2	SD = 1 SMP = - SMA = 3 D3 = 1 D4/ S1 = 9 S2 = 1	II = 1 III = 1 IV = 2 V = -	-	**7**

d. Alokasi dan Realisasi Anggaran

1. Realisasi Program dan Kegiatan

NO		URAIAN	TARGET	REALISASI
1	program pelayanan administrasi perkantoran		1.598.075.000,00	1.425.444.232,00
	1	kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	1.198.075.000,00	1.025.566.732,00
		Output : jumlah peralatan kantor yang terpenuhi	14 jenis	14 jenis
		Outcome : nilai akuntabilitas kinerja	BB	A
	2	kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	400.000.000,00	399.877.500,00
		Output : jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	125 kali	125 kali
		Outcome : nilai akuntabilitas kinerja	BB	A
2	program pemeliharaan barang milik daerah		182.000.000,00	177.316.600,00
	1	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan	80.000.000,00	80.000.000,00
		Output : jumlah gedung kantor yang bersih dan nyaman	1 unit	1 unit
		Outcome : nilai akuntabilitas kinerja	BB	A
	2	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas	42.000.000,00	37.316.600,00
		Output : jumlah kendaraan dinas yang nyaman	29 unit	29 unit
		Outcome : nilai akuntabilitas kinerja	BB	A
	3	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala sarana prasarana kantor	60.000.000,00	60.000.000,00
		Output : jenis sarana kantor yang memadai	3 jenis	3 jenis
		Outcome : nilai akuntabilitas kinerja	BB	A
3	program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		175.000.000,00	166.169.000,00
	1	kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor	175.000.000,00	166.169.000,00
		Output : jumlah sarana prasarana kantor	6 jenis	6 jenis
		Outcome : nilai akuntabilitas kinerja	BB	A
4	program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		74.996.000,00	48.336.306,00
	1	kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	74.996.000,00	48.336.306,00
		Output : jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun	10 dokumen	10 dokumen
		Outcome : nilai akuntabilitas kinerja	BB	A
5	program pengembangan sistem Pendukung kewirausahaan dan keunggulan kompetitif KUMKM		1.224.196.000,00	1.172.439.276
	1	Kegiatan Pemberdayaan UMKM	1.200.446.000,00	1.152.732.126,00

NO		URAIAN	TARGET	REALISASI
		di Kota Madiun		
		Output : Jenis pemberdayaan yang dilaksanakan	20 kegiatan	20 kegiatan
		Outcome : prosentase penumbuhan jumlah usaha mikro	0,40%	0,46%
	2	kegiatan sosialisasi dukungan penyediaan permodalan bagi KUMKM	23.750.000,00	19.707.150
		Output : Jumlah peserta sosialisasi	100 orang	164 orang
		Outcome : prosentase penumbuhan jumlah usaha mikro	0,40%	0,46%
6		program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	475.370.000,00	433.272.268
	1	Kegiatan Pemeringkatan Koperasi	257.523.000,00	237.521.988
		Output : Jumlah koperasi yang diikutkan	210	210
		Outcome : prosentase koperasi aktif	79%	98,05%
	2	Kegiatan Pelatihan dan Sosialisasi Kebijakan Perkoperasian	158.594.000,00	137.795.280
		Output : Jumlah peserta pelatihan dan sosialisasi	300	300
		Outcome : prosentase koperasi aktif	79%	98,05%
	3	kegiatan pelatihan manajemen pengelola koperasi/ KUD	59.253.000,00	57.955.000
		Output : Jumlah pengelola koperasi / KUD yang mengikuti pelatihan	100	100
		Outcome : prosentase koperasi aktif	79%	98,05%

2. Alokasi dan Realisasi Belanja

Uraian	Alokasi	Realisasi
Urusan Bidang Koperasi, Usaha Kecil & Menengah		
Belanja Tidak Langsung	1.751.637.769,18	1.447.727.023,57
Belanja Langsung	3.642.137.000,00	3.339.892.182,00
Total Belanja	5.393.774.769,18	4.787.619.205,57

3. Asset yang dikuasai

Urusan	Nilai Asset	Keterangan
Bidang Koperasi, Usaha Kecil & Menengah	Rp. 2.202.194.596,00	

e. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1.	Gedung	1	Baik
2.	Kendaraan	13	Baik
3.	Alat Kantor	135	Baik

12. URUSAN BIDANG PENANAMAN MODAL

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Penanaman Modal, PTSP, Koperasi dan Usaha Mikro menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal.

b. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal, PTSP, Koperasi dan Usaha Mikro di Kota Madiun pada Tahun Anggaran 2019, yaitu sebagai berikut:

Tabel III.31
Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal
di Kota Madiun Tahun 2019

No	Program	Kegiatan	
1	Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	1	Kegiatan Promosi Investasi
		2	Kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Investasi
		3	Kegiatan kerjasama investasi
		4	kegiatan penyusunan rencana umum penanaman modal (RUPM)
2	Program peningkatan pelayanan perizinan	1	Kegiatan Surveylance ISO 9001 :2008
		2	Kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat
		3	Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan SIM Perizinan
		4	Kegiatan Pelaksanaan Tim Koordinasi Pelayanan Perizinan
		5	kegiatan Sosialisasi Tentang Perizinan

c. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Jumlah Pegawai	Kepangkatan	Tingkat Pendidikan	Struktural/ Eselon	Fungsional	Staf
PNS =15 Honorer =2 Upahan = 2	Gol I = 1 Gol II = 4 Gol III = 8 Gol IV = 2	SD = 1 SMP = - SMA = 4 D3 = 2 D4/ S1 = 11 S2 = 1	II = - III = 2 IV = 5 V =	-	**9**

d. Alokasi dan Realisasi Anggaran

1. Realisasi Program dan Kegiatan

NO		URAIAN	TARGET	REALISASI
1	program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi		969.231.000,00	820.060.472,00
	1	Kegiatan Promosi Investasi	449.872.000,00	373.665.850,00
		Output : Jumlah pameran yang diikuti	1 kali	1 kali
		Outcome : Jumlah nilai realisasi investasi PMDN/PMA dan Non Fasilitas	361 M	968.702.041.674

NO		URAIAN	TARGET	REALISASI
	2	Kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Investasi	84.743.000,00	76.941.053,00
		Output : Jumlah dokumen investasi	1 dokumen	1 dokumen
		Outcome : Jumlah nilai realisasi investasi PMDN/PMA dan Non Fasilitas	361 M	968.702.041.674
	3	Kegiatan Kerjasama Investasi	339.744.000,00	275.834.505,00
		Output : Jumlah kerjasama yang dilaksanakan	1 kali	1 kali
		Outcome : Jumlah nilai realisasi investasi PMDN/PMA dan Non Fasilitas	361 M	968.702.041.674
	4	Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)	94.872.000,00	93.619.064,00
		Output : Jumlah dokumen	1 dokumen	1 dokumen
		Outcome : Jumlah nilai realisasi investasi PMDN/PMA dan Non Fasilitas	361 M	968.702.041.674
2	program peningkatan pelayanan perizinan		428.364.000,00	411.705.218,00
	1	Kegiatan Surveylance ISO 9001 :2008	14.450.000,00	13.200.000,00
		Output : jumlah sertifikasi Manajemen ISO 9001:2008	1 buah	1 buah
		Outcome : perentase izin yang diterbitkan tepat waktu seseui SOP	97 %	97,79 %
	2	Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan SIM Perizinan	51.450.000,00	50.050.000,00
		Output : jumlah SIM untuk proses perijinan	20 izin	20 izin
		Outcome : perentase izin yang diterbitkan tepat waktu seseui SOP	97 %	97,79 %
	3	Kegiatan Pelaksanaan Tim Koordinasi Pelayanan Perizinan	181.232.000,00	171.792.843,00
		Output : Jumlah jenis izin yang dilayani	40 izin	40 izin
		Outcome : perentase izin yang diterbitkan tepat waktu seseui SOP	97 %	97,79 %
	4	kegiatan Sosialisasi Tentang Perizinan	181.232.000,00	176.662.375,00
		Output : Jumlah peserta Sosialisasi	30 Kec/Kel	30 Kec/Kel
		Outcome : perentase izin yang diterbitkan tepat waktu seseui SOP	97 %	97,79 %

2. Alokasi dan Realisasi Belanja

Uraian	Alokasi	Realisasi
Urusan Bidang Penanaman Modal		
Belanja Tidak Langsung	2.080.069.850,82	1.719.175.840,43
Belanja Langsung	1.485.095.000,00	1.314.850.190,00
Total Belanja	3.565.164.850,82	3.034.026.030,43

3. Asset yang dikuasai

Urusan	Nilai Asset	Keterangan
Bidang Penanaman Modal	Rp. 2.000.000.000,00	

e. Proses Perencanaan Pembangunan Daerah

Penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan melalui 2 (dua) tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup tahap perumusan Rancangan Renja Perangkat Daerah, dan tahap penyajian Rancangan Renja Perangkat Daerah.

Rancangan awal Renja Perangkat Daerah dibahas dalam Forum Perangkat Daerah yang merupakan wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagai perwujudan dari pendekatan partisipatif perencanaan pembangunan daerah. Hasil pembahasan Forum Perangkat Daerah sebagai bahan pemutakhiran rancangan RKPD Kota Madiun untuk selanjutnya dibahas dalam Musrenbang RKPD Kota Madiun.

Hasil Musrenbang RKPD selanjutnya digunakan untuk mensinkronkan hasil kesepakatan Musrenbang tersebut kedalam rancangan RKPD menjadi rancangan akhir RKPD.

RKPD yang telah ditetapkan dijadikan pedoman penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah. Penetapan Renja Perangkat Daerah dilakukan dengan penetapan oleh Kepala Perangkat Daerah, selanjutnya Kepala Daerah menetapkan Renja Perangkat Daerah untuk menjadi pedoman di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Perangkat Derah pada tahun anggaran berkenaan.

f. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1.	Gedung	-	
2.	Kendaraan	15	Baik
3.	Alat Kantor	100	Baik

13. URUSAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olah Raga.

b. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olah Raga yang dilaksanakan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga di Kota Madiun pada Tahun Anggaran 2019, yaitu sebagai berikut:

Tabel III.33
Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan
bidang Kepemudaan dan Olah Raga
di Kota Madiun Tahun 2019

No	Uraian	
1	Program Pembinaan Pemuda dan Olah Raga	
	1	Kegiatan Latihan Dasar Kepemimpinan
	2	Kegiatan Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi
	3	Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Olahraga

c. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Jumlah Pegawai	Struktural/ Eselon	Jabatan Fungsional	Jumlah Staf	Jumlah Pejabat yang Diklat Pim
PNS = 5 Upahan = 1	II = 0 III = 1 IV = 2 V = 0	**0**	**3**	**3**

d. Alokasi dan Realisasi Anggaran

1. Realisasi Program dan Kegiatan

No	Uraian	Target	Realisasi
1	Program Pembinaan Pemuda dan Olah Raga	3.659.350.000,00	3.522.136.788,00
1	Kegiatan Latihan Dasar Kepemimpinan	959.350.000,00	917.226.392,00
	Output : Jumlah peserta yang berpartisipasi	800 siswa	1.710
	Outcome : Jumlah kegiatan kepemudaan	3 event	3 event
2	Kegiatan Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi	2.500.000.000,00	2.408.567.396,00
	Output : Jumlah peserta yang berpartisipasi	2000 orang	19.266 orang
	Outcome : Jumlah event olah raga yang diselenggarakan	4 event	18 event
3	Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Olahraga	200.000.000,00	196.343.000,00
	Output : Jumlah sarana prasarana olahraga yang diadakan	2 paket	2 paket
	Outcome : Jumlah event olahraga yang diselenggarakan	4 event	18 event
	JUMLAH BELANJA	**3.659.350.000,00**	**3.522.136.788,00**

2. Alokasi dan Realisasi Belanja

No	Uraian	Alokasi	Realisasi
1	Urusan Kepemudaan dan Olahraga		
	Belanja Tidak Langsung	661.985.800	503.236.442
	Belanja Langsung	2.970.432.961	2.487.729.376
	Total Belanja	3.632.418.761	2.990.965.818

3. Asset yang dikuasai

Urusan	Nilai Asset yang dikuasai	Keterangan
Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	216.722.572,733	-

e. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1	Kursi hadap putar	1	Baik
2	Kursi Susun	1	Baik
3	Almari Arsip Tinggi	1	Baik
4	Printer	2	Baik
5	Kursi Kerja Eselon III	1	Baik
6	Kursi Kerja Eselon IV	1	Baik
7	Komputer Duduk	2	Baik
8	Kursi Putar	1	Baik
9	CPU	2	Baik
10	TV LED	1	Baik
11	Stavol	2	Baik
12	Laptop	1	Baik
13	Timbangan	2	Baik

f. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

1. Kota Madiun memiliki banyak atlit yang potensial untuk dikembangkan bakat dan minat olahraganya untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi lagi dikarenakan untuk pembinaan dan pelatihan kepada para atlit belum terlalu optimal, maka diperlukan pembinaan dan pelatihan agar lebih mengasah keahliannya agar lebih bisa berprestasi baik tingkat provinsi, regional maupun nasional ;
2. Belum adanya penganggaran untuk pembinaan dan pelatihan 10 cabang olahraga unggulan.

Solusi :

1. Pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Madiun memfasilitasi para atlit dengan melengkapi sarana prasarana olahraga secara bertahap pada setiap cabang olahraga serta memberikan sarana prasarana akomodasi bagi para atlit yang akan bertanding tingkat provinsi, regional maupun nasional ;
2. Telah disusun nya penganggaran Tahun 2020 untuk pembinaan dan pelatihan 10 cabang olahraga unggulan.

14. URUSAN BIDANG STATISTIK

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Statistik.

b. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Urusan pemerintahan bidang Statistik yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika di Kota Madiun pada Tahun Anggaran 2019, yaitu sebagai berikut:

Tabel III.34
Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan bidang Statistik
di Kota Madiun Tahun 2019

No	Program		Kegiatan
1	program pengembangan data/ informasi/ statistik daerah	1	Penyusunan dan Pengumpulan Data Statistik Daerah

c. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Jumlah Pegawai	Kepangkatan	Tingkat Pendidikan	Struktural/ Eselon	Fungsional	Staf
6	Gol II = 1 Gol III = 5	SMA = 1 D3 = 2 D4/ S1 = 3	IV = 1	**4**	**1**

d. Alokasi dan Realisasi Anggaran

1. Realisasi Program dan Kegiatan

NO		URAIAN	TARGET	REALISASI
1	program pengembangan data/ informasi/ statistik daerah		388.987.000,00	388.635.824,00
	1	Penyusunan dan Pengumpulan Data Statistik Daerah	388.987.000,00	388.635.824,00
		Output : Jumlah dokumen yang disusun	2 dokumen	5 dokumen
		Outcome : Persentase data statistik Daerah yang dipublikasikan	100%	100%

2. Alokasi dan Realisasi Belanja

Uraian	Alokasi	Realisasi
Urusan Statistik		
Belanja Tidak Langsung	602.317.216,22	607.357.566,65
Belanja Langsung	388.987.000,00	388.635.824,00
Total Belanja	388.987.000,00	388.635.824,00

3. Asset yang dikuasai

Urusan	Nilai Asset	Keterangan
Statistik	4.652,771.448,28	

e. Proses Perencanaan Pembangunan Daerah

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD. Oleh karena itu penyusunan Renja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/ paralel dengan penyusunan RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan melalui 2 (dua) tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup tahap perumusan Rancangan Renja Perangkat Daerah, dan tahap penyajian Rancangan Renja Perangkat Daerah.

Rancangan awal Renja Perangkat Daerah dibahas dalam Forum Perangkat Daerah yang merupakan wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagai perwujudan dari pendekatan partisipatif perencanaan pembangunan daerah. Hasil pembahasan Forum Perangkat Daerah sebagai bahan pemutakhiran rancangan RKPD Kota Madiun untuk selanjutnya dibahas dalam Musrenbang RKPD Kota Madiun.

Hasil Musrenbang RKPD selanjutnya digunakan untuk mensinkronkan hasil kesepakatan Musrenbang tersebut kedalam rancangan RKPD menjadi rancangan akhir RKPD.

Pada saat bersamaan dilakukan evaluasi terhadap hasil Musrenbang Nasional RKP dan Musrenbang RKPD Provinsi untuk Kabupaten/Kota guna memperoleh tambahan informasi atau kebijakan yang harus diacu atau diselaraskan dalam rancangan akhir RKPD.

Dengan demikian RKPD dirumuskan berdasarkan masukan hasil Musrenbang RKPD Kota, Musrenbang RKPD Provinsi dan Musrenbang Nasional RKP untuk mencapai sinergitas, harmonisasi, dan sinkronisasi pembangunan. Proses selanjutnya setelah diadakan perbaikan terhadap rancangan RKPD adalah penetapan dokumen RKPD dengan Peraturan Walikota.

RKPD yang telah ditetapkan dijadikan pedoman penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah. Penetapan Renja Perangkat Daerah dilakukan dengan penetapan oleh Kepala Perangkat Daerah, selanjutnya Kepala Daerah menetapkan Renja Perangkat Daerah untuk menjadi pedoman di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Perangkat Derah pada tahun anggaran berkenaan.

f. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1.	Gedung	1	Baik
2.	Kendaraan	1	Baik
3.	Alat Kantor	504	Baik
	..... (lainnya)		

g. Permasalahan dan Solusi

1. Belum adanya sistem integrasi data-data statistik sektoral daerah;
2. Belum optimalnya ketersediaan data-data statistik sektoral untuk perencanaan pembangunan daerah;
3. Kurangnya koordinasi berbagai pihak dalam penyediaan data statistik pembangunan daerah;
4. Belum memadainya kapasitas sumber daya manusia dalam pendataan dan statistik daerah

Solusi :

1. Meningkatkan koordinasi dan konsolidasi dengan BPS dalam penyediaan data statistik daerah;
2. Melakukan koordinasi dan kerjasama yang terstruktur dengan seluruh Perangkat Daerah dalam pengumpulan dan penyusunan data statistik daerah, sehingga tercipta data terbuka pemerintah;
3. Melaksanakan konsultasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan kewenangan urusan statistik.

15. URUSAN BIDANG KEBUDAYAAN

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan.

b. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Urusan pemerintahan bidang Kebudayaan yang dilaksanakan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga di Kota Madiun pada Tahun Anggaran 2019, yaitu sebagai berikut:

Tabel III.35
Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan bidang Kebudayaan
di Kota Madiun Tahun 2019

No	Uraian	
1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	
	1	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	2	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
2	**Program pemeliharaan barang milik daerah**	
	1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan
	2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
	3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kantor
3	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	
	1	Kegiatan Pengadaan Sarana & Prasarana Kantor
	2	Kegiatan Pembangunan Gedung
4	**Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	
	1	Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
5	**Program Pengelolaan Kekayaan Budaya**	
	1	Festival Seni
	2	Kegiatan Revitalisasi Benda Cagar Budaya
	3	Kegiatan Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya

c. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Urusan	Jumlah Pegawai	Struktural/ Eselon	Jabatan Fungsional	Jumlah Staf	Jumlah Pejabat yang Diklat Pim
BIDANG KEBUDAYAAN	PNS = 11 Honorer= 3 Upahan= 5	II = 1 III = 1 IV = 3 V = 0	0	14	5
Jumlah	19	5	0	14	5

d. Alokasi dan Realisasi Anggaran

1. Realisasi Program dan Kegiatan

No	Uraian	Target	Realisasi
1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**2.310.000.000,00**	**1.193.364.732,00**
1	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.010.000.000,00	898.366.218,00
	Output : Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	1 paket	1 paket
	Outcome : Prosentase terlaksananya administrasi perkantoran	100 %	100 %
2	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	300.000.000,00	294.998.514,00
	Output : Jumlah konsultasi dan koordinasi keluar daerah	35 kali	81 kali
	Outcome : Prosentase terlaksananya administrasi perkantoran	100 %	100 %
2	**Program pemeliharaan barang milik daerah**	**725.000.000,00**	**258.395.777,00**
1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan	600.000.000,00	189.777.013,00
	Output : Jumlah gedung	2 gedung	2 gedung
	Outcome : Prosentase barang-barang milik daerah dalam kondisi baik	100 %	100 %
2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	75.000.000,00	47.361.764,00
	Output : Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	22 unit sepeda motor dan 2 unit mobil	22 unit sepeda motor dan 2 unit mobil
	Outcome : Prosentase barang-barang milik daerah dalam kondisi baik	100 %	100 %
3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kantor	50.000.000,00	21.257.000,00
	Output : Jumlah sarana prasarana kantor yang dipelihara	1 paket	1 paket
	Outcome : Prosentase barang-barang milik daerah dalam kondisi baik	100 %	100 %
3	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**70.000.000,00**	**14.000.000,00**
1	Kegiatan Pengadaan Sarana & Prasarana Kantor	20.000.000,00	14.000.000,00
	Output : Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kantor	1 paket	1 paket
	Outcome : Prosentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %
2	Kegiatan Pembangunan Gedung	50.000.000,00	0,00
	Output : Jumlah dokumen DED Panggung permanen	1 dokumen	1 dokumen
	Outcome : Prosentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %
4	**Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan**	**25.000.000,00**	**24.493.484,00**

No	Uraian	Target	Realisasi
	Keuangan		
1	Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	25.000.000,00	24.493.484,00
	Output : Jumlah dokumen	6	8
	Outcome : Prosentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja Disbudparpora	100 %	134 %
5	**Program Pengelolaan Kekayaan Budaya**	**5.889.912.723,00**	**5.769.989.038,00**
1	Festival Seni	1.180.000.000,00	1.150.975.433,00
	Output : Jumlah festival seni yang diselenggarakan	8 festival	23 festival
	Outcome : Jumlah festival seni yang diselenggarakan	8 festival	23 festival
2	Kegiatan Revitalisasi Benda Cagar Budaya	250.000.000,00	211.950.000,00
	Output : Jumlah bangunan/benda cagar budaya yang dilestarikan	2 unit	2 unit
	Outcome : Jumlah bangunan/benda cagar budaya yang dilestarikan	2 unit	2 unit
3	Kegiatan Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya	4.459.912.723,00	4.407.350.918,00
	Output : Jumlah pagelaran seni budaya yang dilaksanakan	30 pagelaran	54 pagelaran
	Outcome : Jumlah pagelaran seni budaya yang dilaksanakan	30 pagelaran	54 pagelaran

2. Alokasi dan Realisasi Belanja

No	Uraian	Alokasi	Realisasi
1	Urusan Kebudayaan		
	Belanja Tidak Langsung	2.098.494.986	1.595.259.522
	Belanja Langsung	9.416.272.485	7.886.102.121
	Total Belanja	11.514.767.471	9.481.361.643

3. Asset yang dikuasai

Urusan	Nilai Asset yang dikuasai	Keterangan
Bidang Kebudayaan	1.109.619.572,39	

e. Proses Perencanaan Pembangunan Daerah

Pembangunan pendidikan di Kota Madiun dilaksanakan dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun Tahun 2014-2019, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kota Madiun Tahun 2014-2019, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Madiun Tahun 2019 dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kota Madiun Tahun 2019

f. Sarana dan Prasarana Yang Digunakan

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1	Meja Tulis Eselon IV	3	Baik
2	Almari Arsip Rak Tinggi	6	Baik
3	Dispenser	1	Baik
4	Meja Tulis	3	Baik
5	Kursi Putar Pejabat	5	Baik
6	Kursi Kerja Staf	5	Baik
7	Note Book	1	Baik
8	Camera	1	Baik
9	Handycam	1	Baik
10	Kursi Lipat	5	Baik
11	Filing Kabinet	4	Baik
12	Laptop	4	Baik
13	Laptop	2	Kurang Baik
14	Laptop	1	Rusak Berat
15	Printer	7	Baik
16	AC	6	Baik
17	Rak Besi	1	Baik
18	Kursi Kerja Eselon 3	1	Baik
19	Meja Eselon 3	1	Baik
20	LCD Proyektor	1	Baik
21	TV LED	4	Baik
22	Filing Besi	1	Baik
23	Kursi Hadap Putar	3	Baik

16. URUSAN BIDANG PERPUSTAKAAN

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan.

b. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Urusan pemerintahan bidang Perpustakaan yang dilaksanakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan di Kota Madiun pada Tahun Anggaran 2019, yaitu sebagai berikut:

Tabel III.37
Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan bidang Perpustakaan
di Kota Madiun Tahun 2019

No	Program	Kegiatan	
1	program pelayanan administrasi perkantoran	1	kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor
		2	kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah
2	program pemeliharaan barang milik daerah	1	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan
		2	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas
		3	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala sarana prasarana kantor
3	program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1	kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor
4	program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1	kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah
5	program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	1	Kegiatan Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca
		2	Kegiatan Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca
		3	Kegiatan Penyediaan Bahan Pustaka dan Perbaikan Buku Perpustakaan Umum Daerah

c. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Jumlah Pegawai	Kepangkatan	Tingkat Pendidikan	Struktural/Eselon	Fungsional	Staf
18	Gol I = - Gol II = 6 Gol III =10 Gol IV = 2	SD = - SMP = - SMA = 4 D3 = 7 D4/S1 = 7	II = 1 III = 1 IV = 3 V = -	7	6

d. Alokasi dan Realisasi Anggaran

1. Realisasi Program dan Kegiatan

NO		URAIAN	TARGET	REALISASI
1		program pelayanan administrasi perkantoran	669.922.304,00	600.289.187,00
	1	kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	509.922.304,00	440.414.847,00
		Output : Jumlah Peralatan	1	1
		Outcome : Akuntabilitas Kinerja Bernilai Baik	BB	BB
	2	kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	160.000.000,00	159.874.340,00
		Output : Jumlah Koordinasi	135	94
		Outcome : Akuntabilitas Kinerja Bernilai Baik	BB	BB
2		program pemeliharaan barang milik daerah	186.902.000,00	173.706.550,00
	1	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan	75.000.000,00	74.526.850,00
		Output : Jumlah Gedung	2	2
		Outcome : Akuntabilitas Kinerja Bernilai Baik	BB	BB
	2	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas	66.902.000,00	54.179.700,00
		Output : Jumlah Kendaraan yang dipelihara	22	22
		Outcome : Akuntabilitas Kinerja Bernilai Baik	BB	BB
	3	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala sarana prasarana kantor	45.000.000,00	45.000.000,00
		Output : Jumlah Sarana Prasarana yang dipelihara	90	86
		Outcome : Akuntabilitas Kinerja Bernilai Baik	BB	BB
3		program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	518.000.000,00	497.343.540,00
	1	kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor	518.000.000,00	497.343.540,00
		Output : Jumlah Paket		
		Outcome : Akuntabilitas Kinerja Bernilai Baik	BB	BB
4		program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	33.835.200,00	32.910.204,00
	1	kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	33.835.200,00	32.910.204,00
		Output : Dokumen	10	10
		Outcome : Akuntabilitas Kinerja Bernilai Baik	BB	BB
5		program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	1.356.996.880,00	1.198.025.204,00
	1	Kegiatan Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca	680.264.400,00	641.816.694,00
		Output : Jumlah Sosialisasi dan Promosi	16	16
		Outcome : Persentase Pengunjung Perpustakaan	22,19%	45,95%
	2	Kegiatan Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca	379.732.480,00	266.294.405,00
		Output : Jumlah Pengelola	36	36

NO		URAIAN	TARGET	REALISASI
		Perpustakaan		
		Outcome : Persentase Pengunjung Perpustakaan	22,19%	45,95%

2. Alokasi dan Realisasi Belanja

No	Uraian	Alokasi	Realisasi
1.	**Urusan Perpustakan**		
	Belanja Tidak Langsung	Rp 1.650.000.000,00	Rp 508.127.524,00
	Belanja Langsung	Rp 2.765.656.348,00	Rp 2.502.274.685,00
	Total Belanja	Rp 4.415.656.348,00	Rp 3.010.402.209,00

e. Proses Perencanaan Pembangunan Daerah

Proses penyusunan rencana kerja dan dokumen yang dipergunakan.

1. Rencana Strategis Lima Tahunan (RENSTRA)
2. Rencana Kerja (RENJA)
3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan
4. Penetapann Kinerja (PK)

f. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

No	Uraian	Satuan	Volume	Kondisi
1	2	3	4	5
1.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	Bidang	Baik
2.	Gedung Kantor Pemerintah	2	Unit	Kurang
3.	Kendaraan Roda Empat	4	Unit	Baik
4.	Sepeda Motor	17	Unit	Baik
5.	AC	31	Unit	Baik
6.	P.C Unit	40	Unit	Baik
7.	Lap Top	6	Unit	Baik
8.	Printer	25	Unit	Baik
9.	Scanner	7	Unit	Baik
10.	UPS	2	Unit	Baik
11.	Telepon (PABX)	1	Unit	Baik
12.	Televisi	7	Unit	Baik
13.	Equalizer	1	Unit	Baik
14.	Sound system	3	Unit	Baik
15.	Wireless	1	Unit	Baik
16.	Monitor	1	Unit	Baik
17.	Proyektor + Attachment	2	Unit	Baik
18.	Microphone/Wireless Mic	1	Unit	Baik
19.	Peralatan Studio Visual	1	Unit	Baik
20.	Mixer PVC	1	Unit	Baik
21.	Laminating module with 4 reels	1	Unit	Baik
22.	Handy Cam	2	Unit	Baik
23.	Camera + Attacment	1	Unit	Baik
24.	Video Camera Recorder	1	Unit	Baik
25.	Hard Disk	2	Unit	Baik
26.	Mesin Pelubang	1	Unit	Baik
27.	Portable Generating Set	1	Unit	Baik
28.	Termometer Standart	1	Unit	Baik
29.	Alat Penghancur Kertas	1	Unit	Baik
30.	Mesin Penghisap Debu	1	Unit	Baik
31.	Lemari Es	1	Unit	Baik
32.	Alat Pemadam Portable	1	Unit	Baik
33.	Personal komputer lain	2	Unit	Baik

No	Uraian	Satuan	Volume	Kondisi
1	2	3	4	5
34.	Komputer Lain	1	Unit	Baik
35.	Photo Micrograph Camera	2	Unit	Baik
36.	Rak Besi Metal	16	Unit	Baik
37.	Rak Kayu	2	Unit	Baik
38.	Filling Besi Metal	1	Unit	Baik
39.	Kursi Rapat	1	Unit	Baik
40.	Lemari Arsip Untuk Arsip Dinamis	15	Unit	Baik
41.	Papan Pengumuman	1	Unit	Baik
42.	Lemari Kayu	4	Unit	Baik
43.	Meja Reseption	1	Unit	Baik
44.	Sofa	10	Unit	Baik
45.	Meja Tulis	2	Unit	Baik
46.	Kursi Tamu	1	Unit	Baik
47.	Meja Komputer	2	Unit	Baik
48.	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	6	Unit	Baik
49.	Kursi Tamu di Ruang Pejabat Lain-Lain	1	Unit	Baik
50.	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	Unit	Baik
51.	Meja Kerja Pejabat Eselon III	3	Unit	Baik
52.	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	6	Unit	Baik
53.	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	Unit	Baik
54.	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	3	Unit	Baik
55.	Lemari Buku Pejabat Eselon II	1	Unit	Baik
56.	Lemari Buku Pejabat Eselon III	1	Unit	Baik
57.	Lemari dan Arsip Pejabat Lain-Lain	1	Unit	Baik
58.	Papan Nama Instansi	1	Unit	Baik
59.	Meja tamu Biasa	1	Unit	Baik
60.	Meja Operator	1	Unit	Baik
61.	Kursi Hadap Depan	1	Unit	Baik
62.	Buku	46.500	Eksemplar	Baik

g. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

1. Kurangnya sarana dan prasarana Perpustakaan.
2. Rendahnya kualitas dan kuantitas tenaga pengelola Perpustakaan
3. Kurangnya pengetahuan dan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap arti pentingnya perpustakaan
4. Pesatnya Perkembangan Teknologi Informasi
5. Kemampuan SDM pengelolaan perpustakaan belum optimal.

Solusi :

1. Pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai;
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya aparatur yaitu tenaga administrasi, operator dan programer pengolahan
3. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap arti pentingnya perpustakaan;
4. Meningkatkan Jumlah Bahan Pustaka berupa konvensional dan Digital baik kualitas maupun kuantitas

17. URUSAN BIDANG KEARSIPAN

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kearsipan.

b. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Urusan pemerintahan bidang Kearsipan yang dilaksanakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan di Kota Madiun pada Tahun Anggaran 2019, yaitu sebagai berikut:

Tabel III.38
Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan bidang Kearsipan
di Kota Madiun Tahun 2019

No	Program	Kegiatan	
1	program penyelamatan, peningkatan SDM dan layanan arsip daerah	1	Kegiatan Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah
		2	Kegiatan Sosialisasi dan Pendampingan Kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintah/Swasta

c. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Jumlah Pegawai	Kepangkatan	Tingkat Pendidikan	Struktural/ Eselon	Fungsional	Staf
	Gol I = - Gol II = 1 Gol III = 3 Gol IV = 1	SD = - SMP = - SMA = - D3 = 2 D4/S1= 3	II = - III = 1 IV = 1 V = -	3	-

d. Alokasi dan Realisasi Anggaran

1. Realisasi Program dan Kegiatan

NO		URAIAN	TARGET	REALISASI
1		program penyelamatan, peningkatan SDM dan layanan arsip daerah	474.719.560,00	396.770.373
	1	Kegiatan Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah	238.846.280,00	211.956.996
		Output : Jumlah Unit Kearsipan	2 unit kearsipan	5 unit kearsipan
		Outcome :Jumlah berkas Arsip In Aktif yang dikelola	46.671 berkas	57.615 berkas
	2	Kegiatan Sosialisasi dan Pendampingan Kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintah/Swasta	235.873.280,00	184.813.377
		Output : Jumlah Peserta Sosialisasi Pengelola Kearsipan	200 orang	200 orang
		Outcome : Jumlah berkas Arsip In Aktif yang dikelola	46.671 berkas	57.615 berkas

2. Alokasi dan Realisasi Belanja

Uraian	Alokasi	Realisasi
Urusan Kearsipan		
Belanja Tidak Langsung	Rp 660.152.000,00	Rp 183.120.000,00
Belanja Langsung	Rp 474.719.560,00	Rp 396.770.373,00
Total Belanja	Rp 1.134.871.560,00	Rp 579.890.373,00

e. Proses Perencanaan Pembangunan Daerah

Proses penyusunan rencana kerja dan dokumen yang dipergunakan. Rencana Strategis Lima Tahunan (RENSTRA)

1. Rencana Kerja (RENJA)
2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan
3. Penetapan Kinerja (PK)

f. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

No	Uraian	Satuan	Volume	Kondisi
1	2	3	4	5
1.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	Bidang	Baik
2.	Gedung Kantor Pemerintah	2	Unit	Kurang
3.	Kendaraan Roda Empat	4	Unit	Baik
4.	Sepeda Motor	17	Unit	Baik
5.	AC	31	Unit	Baik
6.	P.C Unit	40	Unit	Baik
7.	Lap Top	6	Unit	Baik
8.	Printer	25	Unit	Baik
9.	Scanner	7	Unit	Baik
10.	UPS	2	Unit	Baik
11.	Telepon (PABX)	1	Unit	Baik
12.	Televisi	7	Unit	Baik
13.	Equalizer	1	Unit	Baik
14.	Sound system	3	Unit	Baik
15.	Wireless	1	Unit	Baik
16.	Monitor	1	Unit	Baik
17.	Proyektor + Attachment	2	Unit	Baik
18.	Microphone/Wireless Mic	1	Unit	Baik
19.	Peralatan Studio Visual	1	Unit	Baik
20.	Mixer PVC	1	Unit	Baik
21.	Laminating module with 4 reels	1	Unit	Baik
22.	Handy Cam	2	Unit	Baik
23.	Camera + Attacment	1	Unit	Baik
24.	Video Camera Recorder	1	Unit	Baik
25.	Hard Disk	2	Unit	Baik
26.	Mesin Pelubang	1	Unit	Baik
27.	Portable Generating Set	1	Unit	Baik
28.	Termometer Standart	1	Unit	Baik
29.	Alat Penghancur Kertas	1	Unit	Baik
30.	Mesin Penghisap Debu	1	Unit	Baik
31.	Lemari Es	1	Unit	Baik
32.	Alat Pemadam Portable	1	Unit	Baik
33.	Personal komputer lain	2	Unit	Baik
34.	Komputer Lain	1	Unit	Baik
35.	Photo Micrograph Camera	2	Unit	Baik
36.	Rak Besi Metal	16	Unit	Baik
37.	Rak Kayu	2	Unit	Baik
38.	Filling Besi Metal	1	Unit	Baik
39.	Kursi Rapat	1	Unit	Baik
40.	Lemari Arsip Untuk Arsip			

No	Uraian	Satuan	Volume	Kondisi
1	2	3	4	5
	Dinamis	15	Unit	Baik
41.	Papan Pengumuman	1	Unit	Baik
42.	Lemari Kayu	4	Unit	Baik
43.	Meja Reseption	1	Unit	Baik
44.	Sofa	10	Unit	Baik
45.	Meja Tulis	2	Unit	Baik
46.	Kursi Tamu	1	Unit	Baik
47.	Meja Komputer	2	Unit	Baik
48.	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	6	Unit	Baik
49.	Kursi Tamu di Ruang Pejabat Lain-Lain	1	Unit	Baik
50.	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	Unit	Baik
51.	Meja Kerja Pejabat Eselon III	3	Unit	Baik
52.	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	6	Unit	Baik
53.	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	Unit	Baik
54.	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	3	Unit	Baik
55.	Lemari Buku Pejabat Eselon II	1	Unit	Baik
56.	Lemari Buku Pejabat Eselon III	1	Unit	Baik
57.	Lemari dan Arsip Pejabat Lain-Lain	1	Unit	Baik
58.	Papan Nama Instansi	1	Unit	Baik
59.	Meja tamu Biasa	1	Unit	Baik
60.	Meja Operator	1	Unit	Baik
61.	Kursi Hadap Depan	1	Unit	Baik
62.	Buku	46.500	Eksemplar	Baik

g. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

1. Kurangnya sarana dan prasarana Perpustakaan maupun Kearsipan.
2. Rendahnya kualitas dan kuantitas tenaga pengelola Kearsipan
3. Kurangnya pengetahuan dan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap arti pentingnya kearsipan
4. Belum semua perangkat daerah memiliki unit pengelola arsip tersendiri sehingga keberadaan arsip baik dinamis dan statis belum mendapatkan penanganan secara khusus;
5. Kualitas dan kuantitas tenaga kearsipan rendah. Pengadaan formasi pegawai belum mengacu kebutuhan personil sesuai disiplin ilmu yang dibutuhkan;
6. Fasilitas-fasilitas pendukung kearsipan belum sesuai standar kearsipan baik di depo arsip dan unit kearsipan;
7. Kemampuan SDM pengelolaan kearsipan belum optimal.

Solusi :

1. Pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai;
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya aparatur yaitu tenaga administrasi, operator dan programer pengolahan
3. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap arti pentingnya kearsipan

III. URUSAN PILIHAN

1. URUSAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan.

b. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Kota Madiun pada Tahun Anggaran 2019, yaitu sebagai berikut:

Tabel III.39
Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan di Kota Madiun Tahun 2019

No	Program	Kegiatan	
1	program peningkatan produksi dan pengolahan/ pemasaran hasil perikanan	1	Kegiatan Pendampingan Pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan
		2	Kegiatan Pembenihan Ikan
		3	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rantai Dingin Produk Perikanan
		4	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengolahan Tradisional
		5	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Budidaya
		6	Kegiatan Pengembangan Promosi dan Pemasaran Hasil Perikanan

c. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Jumlah Pegawai	Kepangkatan	Tingkat Pendidikan	Struktural/ Eselon	Fungsional	Staf
PNS = 5 orang	Gol I = 0 Gol II = 2 Gol III = 2 Gol IV = 1	SD = 0 SMP = 0 SMA = 1 D3 = 2 S1 = 2 S2 = 0	II = 0 III = 1 IV = 0 V = 0	2 orang	2

d. Alokasi dan Realisasi Anggaran

1. Realisasi Program dan Kegiatan

NO		URAIAN	TARGET	REALISASI
1		program peningkatan produksi dan pengolahan/ pemasaran hasil perikanan	519.600.000,00	461.357.279
	1	Kegiatan Pendampingan Pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan	60.000.000,00	53.650.333
		Output : Jumlah kelompok pembudidaya yang diberikan pendampingan	2 penyuluhan	2 penyuluhan

NO		URAIAN	TARGET	REALISASI
		Outcome : Jumlah produksi perikanan	361 ton	357,7 ton
	2	Kegiatan Pembenihan Ikan	116.000.000,00	108.615.690
		Output : Jumlah benih yang di hasilkan BBI	275.000 ekor	
		Outcome : Jumlah produksi perikanan	361 ton	357,7 ton
	3	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rantai Dingin Produk Perikanan	50.000.000,00	41.817.845
		Output : Jumlah pemasar ikan yang diberikan pelatihan	1 kali bintek	1 kali bintek
		Outcome : Jumlah produksi perikanan	361 ton	357,7 ton
	4	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengolahan Tradisional	55.000.000,00	48.296.052
		Output : Jumlah pengolah ikan yang di berikan pelatihan	3 kali pelatihan	3 kali pelatihan
		Outcome : Jumlah produksi perikanan	361 ton	357,7 ton
	5	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Budidaya	55.600.000,00	42.170.773
		Output : Jumlah pembudidaya ikan yang di beri pelatihan	1 kali penyuluhan	1 kali penyuluhan
		Outcome : Jumlah produksi perikanan		
	6	Kegiatan Pengembangan Promosi dan Pemasaran Hasil Perikanan	183.000.000,00	169.806.586
		Output : Tingkat konsumsi ikan, jumlah peserta lomba masak, dan jumlah siswa sekolah disosialisasi gemar ikan	15 kg/kapita/th, 15 peserta lomba masak, 200 siswa sosialisasi	15,18 kg/kapita/th, 15 peserta lomba masak, 200 siswa sosialisasi
		Outcome : Jumlah produksi perikanan	361 ton	357,7 ton

2. Alokasi dan Realisasi Belanja

URAIAN	ALOKASI	REALISASI
Urusan Perikanan		
Belanja Tidak Langsung	Rp 766.575.181,82	Rp 706.086.601,27
Belanja Langsung	Rp 519.600.000	Rp 461.357.279
Total Belanja	Rp 519.600.000	Rp 461.357.279

3. Asset yang Dikuasai

No.	Urusan	Nilai Asset	Keterangan
1.	Urusan Perikanan dan Kelautan	Rp. 13.276.558.002,95-	Balai Benih Ikan, Peralatan Kantor dan indukan ikan
JUMLAH ASET		Rp 45.337.671.305,95	

e. Proses Perencanaan Pembangunan Daerah

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan membidangi urusan pertanian, kelautan dan perikanan, dan pangan. Kegiatan pertanian di Kota Madiun yang meliputi budidaya tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan berfungsi sebagai penyangga (*buffer*) pangan daerah. Oleh karenanya, untuk mewujudkan kestabilan produksi pangan di Kota Madiun, diperlukan perencanaan program dan kegiatan yang baik di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun.

Rencana Kerja adalah suatu dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang memuat program dan kegiatan berdasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di daerah. Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan disusun sebagai pedoman dan arahan dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai tugas pokok dan fungsi. Fungsi dari Renja ini adalah sebagai perencanaan dan tolok ukur dari pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun.

Renja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun memuat program dan kegiatan yang dibiayai oleh APBD Kota Madiun dan sumber pembiayaan lainnya. Renja ini pada dasarnya merupakan dokumen perencanaan tahunan yang telah direncanakan dalam dokumen *review* Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun 2014- 2019. Sehingga, penyusunan Renja tiap tahun harus selaras dengan dokumen Renstra tersebut. Selain itu, Renja setiap Anggaran juga mengakomodasi hasil penjaringan, diskusi, dan usulan dari masing- masing *stakeholder* dalam hal ini adalah masyarakat pertanian, yang diusulkan dalam Musrenbang (Musyarawah Perencanaan Pembangunan), maupun hasil penjaringan aspirasi masyarakat oleh DPRD.

f. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1	Gedung	14	BAIK
2	Kendaraan	3	BAIK
3	Alat Kantor	168	BAIK
4	Bibit Induk Ikan	14850	

g. Permasalahan dan Solusi

1. Masih terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM perikanan

   Sumber daya petani ikan maupun petugas perikanan di Kota Madiun masih sangat terbatas, baik dari segi kualitas dan kuantitasnya. Dalam upaya meningkatkan minat dan pengetahuan SDM perikanan dilakukan bimtek/ sosialisasi dan studi banding yang mengikutsertakan masyarakat petani ikan serta petugas perikanan. Petani ikan akan dilatih mengenai teknologi budidaya ikan serta teknologi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan melalui kegiatan pengembangan olahan berbahan dasar ikan dan lomba masak ikan.

2. Kurangnya penerapan teknologi perikanan

   Penerapan teknologi perikanan khususnya teknologi perbenihan ikan di Balai Benih Ikan akan lebih dimaksimalkan sesuai dengan prosedur dan teknik budidaya yang benar, misalnya pengelompokan ikan/ grading berdasarkan ukuran ikan yang lebih baik, perhitungan kepadatan ikan dalam kolam untuk efektifitas penyerapan makanan dan pembakaran energi bagi ikan sehingga mengoptimalkan ukuran/ bobot ikan, pengukuran PH dan kualitas air kolam secara periodik, seleksi induk ikan yang berkualitas untuk meningkatkan jumlah produksi benih yang dihasilkan. Adapun penerapan teknologi budiadaya dan pengolahan ikan di masyarakat dilakukan melalui kegiatan bimbingan teknis/ pelatihan diantaranya bimtek kolam bundar, penananganan rantai dingin produk perikanan untuk menjaga kualitas dan kesegaran ikan saat dikirim dan sebagainya. Pendampingan dan monitoring ke pembudidaya ikan dan penangkap ikan akan dilakukan secara rutin untuk updating data, untuk melakukan pembinaan/ anjangsana kepada petani ikan serta untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada.

3. Kurangnya akses permodalan

   Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun mendukung kegiatan usaha perikanan melalui pemberian rekomendasi kredit bagi petani ikan. Selain itu juga memberikan dukungan sarana kios, kafe dan kolam ikan dengan biaya sewa yang cukup terjangkau.

4. Kurang optimalnya kelembagaan perikanan

   Peningkatan peran kelembagaan perikanan dilakukan dengan memfasilitasi pertemuan kelompok pembudidaya ikan dalam kegiatan penyuluhan/ sosialisasi yang diadakan di dinas. Selain itu akan dilakukan upaya peningkatan kelas terhadap kelompok petani ikan untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha secara bersama-sama dengan tujuan peningkatan produktivitas sekaligus peningkatan kesejahteraan yang lebih baik.

   Dengan demikian, seiring tumbuhnya minat masyarakat untuk berbudiaya ikan, berkembangnya perbenihan ikan di Kota Madiun, dan peluang pasar perikanan, diharapkan target kinerja tahun mendatang dapat tercapai.

2. URUSAN BIDANG PARIWISATA

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata.

b. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Urusan pemerintahan bidang Pariwisata yang dilaksanakan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga di Kota Madiun pada Tahun Anggaran 2019, yaitu sebagai berikut:

Tabel III.40
Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan bidang Pariwisata
di Kota Madiun Tahun 2019

No	Uraian	
1	**Program Pengembangan Pemasaran dan Destinasi Pariwisata**	
	1	Kegiatan Pemberdayaan Generasi Muda Bidang Kepariwisataan
	2	Kegiatan Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri
	3	Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pariwisata
	4	Kegiatan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan makanan khas
	5	Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kemitraan di Bidang Pariwisata

c. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Jumlah Pegawai	Struktural/ Eselon	Jabatan Fungsional	Jumlah Staf	Jumlah Pejabat yang Diklat Pim
PNS = 4 Upahan = 1	II = 0 III = 1 IV =1 V =0	**0**	**3**	**2**

d. Alokasi dan Realisasi Anggaran

1. Realisasi Program dan Kegiatan

No	Uraian	Target	Realisasi
1	**Program Pengembangan Pemasaran dan Destinasi Pariwisata**	**2.172.902.080,00**	**1.656.267.059,00**
1	Kegiatan Pemberdayaan Generasi Muda Bidang Kepariwisataan	640.000.000,00	542.068.670,00
	Output : Jumlah peserta	100 orang	139 orang
	Outcome : Jumlah fasilitasi dan promosi pariwisata yang dilaksanakan	9 event	12 event
2	Kegiatan Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri	882.902.080,00	783.580.380,00
	Output : Jumlah promosi pariwisata yang diselenggarakan	5 kali	5 kali
	Outcome : Jumlah fasilitasi dan promosi pariwisata yang	9 event	12 event

No	Uraian	Target	Realisasi
	dilaksanakan		
3	Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pariwisata	100.000.000,00	61.843.291,00
	Output : Dokumen hasil monitoring dan evaluasi	1 dokumen	1 dokumen
	Outcome : Jumlah fasilitasi dan promosi pariwisata yang dilaksanakan	9 event	12 event
4	Kegiatan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan makanan khas	240.000.000,00	199.489.227,00
	Output : Jumlah festival pariwisata	1 festival	4 festival
	Outcome : Jumlah fasilitasi dan promosi pariwisata yang dilaksanakan	9 event	12 event
5	Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kemitraan di Bidang Pariwisata	310.000.000,00	69.285.491,00
	Output : Jumlah peserta	120 orang	90 orang
	Outcome : Jumlah fasilitasi dan promosi pariwisata yang dilaksanakan	9 event	12 event

2. Alokasi dan Realisasi Belanja

Uraian	Alokasi	Realisasi
Urusan Pariwisata		
Belanja Tidak Langsung	552.758.143	420.202.429
Belanja Langsung	2.480.311.522	2.077.254.029
Total Belanja	3.033.069.665	2.497.456.458

3. Asset yang Dikuasai

Urusan	Nilai Asset yang dikuasai	Keterangan
Bidang Pariwisata	277.404.893,099	0

e. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1	Kursi Hadap	2	Baik
2	Kursi Susun/Besi	3	Baik
3	Meja Eselon IV	3	Baik
4	Komputer	1	Baik
5	Printer	2	Baik
6	UPS BR 500-CI-AS	1	Baik
7	CPU	2	Baik
8	Radio HT	6	Baik
9	Kursi Lipat Hitam	4	Baik
10	Meja Kursi Tamu	1	Baik
11	Home Teather	1	Baik
12	AC ½ PK	2	Baik
13	Laptop	3	Baik
14	Gorden	1	Baik

f. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

1. Tidak terlaksananya event Gebyar Batik dan Fashion Show.
2. Di Kota Madiun belum banyak memiliki obyek wisata yang mampu menarik kunjungan wisatawan untuk berkunjung di Kota Madiun, sehingga diperlukan promosi kepariwisataan terutama di dalam Kota Madiun yang mampu menarik minat wisatawan luar kota untuk berkunjung ke Kota Madiun yang harus meningkat dan menimbulkan ketertarikan yang besar baik bagi masyarakat Kota Madiun sendiri maupun di luar Kota Madiun.

Solusi **:**

1. Tahun 2020 direncanakan dilaksanakan gebyar batik dengan format berbeda yaitu Batik Fashion on The Street.
2. Pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Madiun menyelenggarakan event promosi di dalam Kota Madiun salah satunya adalah “Madiun Tempo Doeloe” untuk menggali sejarah Kota Madiun agar bisa menarik wisatawan luar Kota Madiun untuk menyaksikan dan menikmati acara tersebut.

3. URUSAN BIDANG PERTANIAN

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian.

b. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Urusan pemerintahan bidang Pertanian yang dilaksanakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Kota Madiun pada Tahun Anggaran 2019, yaitu sebagai berikut:

Tabel III.41
Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan bidang Pertanian
di Kota Madiun Tahun 2019

No	Program	Kegiatan	
1	program pelayanan administrasi perkantoran	1	kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor
		2	kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah
2	program pemeliharaan barang milik daerah	1	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan
		2	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas
		3	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala sarana prasarana kantor
3	program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1	kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor
4	program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1	kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah
5	program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan	1	Kegiatan Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani
		2	Kegiatan Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis
		3	Kegiatan Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis
		4	Kegiatan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan
		5	Kegiatan Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/ perkebunan
		6	Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur Pertanian
		7	kegiatan pembangunan/ perbaikan sumber-sumber air (jaringan irigasi tersier) DAK
6	program peningkatan produksi hasil peternakan dan pelayanan kesehatan hewan	1	Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Hewan Peliharaan
		2	Kegiatan Kesehatan Masyarakat Veteriner
		3	Penyuluhan Kualitas Gizi Pakan Ternak
		4	Kegiatan Penyuluhan Pemasaran Produksi Peternakan
		5	Kegiatan Penyuluhan Penerapan

No	Program	Kegiatan	
			Teknologi Peternakan Tepat Guna
		6	Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak

c. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Jumlah Pegawai	Kepangkatan	Tingkat Pendidikan	Struktural/ Eselon	Fungsional	Staf
PNS = 22 orang	Gol I = 0 Gol II = 2 Gol III = 18 Gol IV = 2	SD = 0 SMP = 0 SMA = 4 D3 = 1 S1 = 10 S2 = 2	II = 1 III = 0 IV = 6 V = 0	1 orang	17

d. Alokasi dan Realisasi Anggaran

1. Realisasi Program dan Kegiatan

NO		URAIAN	TARGET Rp	REALISASI Rp
1	program pelayanan administrasi perkantoran		1.022.063.520,00	959.072.527
	1	kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	757.513.520,00	694.550.527
		Output : Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan dan perkantoran	10 paket	10 paket
		Outcome : Akuntabilitas kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan bernilai Baik	BB	BB
	2	kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	264.550.000,00	264.522.000
		Output : Jumlah koordinas dan konsultasi	131	154
		Outcome : Akuntabilitas kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan bernilai Baik	BB	BB
2	program pemeliharaan barang milik daerah		311.208.000,00	304.703.800
	1	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan	210.000.000,00	206.411.000
		Output : Jumlah lokasi gedung dan bangunan	1 lokasi	1 lkasi
		Outcome : Akuntabilitas kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan bernilai Baik	BB	BB
	2	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas	61.208.000,00	58.350.400
		Output : Jumlah kendaraan dinas	3 mobil dan 25 pajak sepeda motor	3 mobil dan 25 pajak sepeda motor
		Outcome : Akuntabilitas kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan bernilai Baik	BB	BB
	3	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala sarana prasarana kantor	40.000.000,00	39.942.400
		Output : Jumlah sarana dan	55 unit	55 unit

NO		URAIAN	TARGET Rp	REALISASI Rp
		prasarana kantor		
		Outcome : Akuntabilitas kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan bernilai Baik	BB	BB
3		program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	222.250.000,00	222.242.000
	1	kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor	222.250.000,00	222.242.000
		Output : Jumlah sarana dan prasarana kantor	25 unit	33 unit
		Outcome : Akuntabilitas kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan bernilai Baik	BB	BB
4		program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	113.439.840,00	101.907.200
	1	kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	113.439.840,00	101.907.200
		Output : Jumlah dokumen	16 dokumen	20 dokumen
		Outcome : Akuntabilitas kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan bernilai Baik	BB	BB
5		program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan	4.447.080.000,00	3.918.483.712
	1	Kegiatan Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	181.000.000,00	155.339.610
		Output : Jumlah gapoktan penerima PUAP	6 gapoktan	15 gapoktan
		Outcome : jumlah produksi tanaman pangan (pajale)	18550 ton	18571 ton
	2	Kegiatan Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis	197.400.000,00	177.479.786
		Output : Jumlah petani atau kelompok tani dan petugas penyukuh yang dilatih	39 kelompok tani	39 kelompok tani
		Outcome : jumlah produksi tanaman pangan (pajale)	18550 ton	18571 ton
	3	Kegiatan Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis	125.000.000,00	103.281.920
		Output : Jumlah gapoktan dan kelompok tani yang diberikan penyuluhan	39 kelompok tani dan 15 gapoktan	39 kelompok tani dan 15 gapoktan
		Outcome : jumlah produksi tanaman pangan (pajale)	18550 ton	18571 ton
	4	Kegiatan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan	349.480.000,00	288.387.127
		Output : Jumlah sarana dan prasarana pertanian	3 paket (benih, obat kimia, isolat)	3 paket (benih, obat kimia, isolat)
		Outcome : jumlah produksi tanaman pangan (pajale)	18550 ton	18571 ton
	5	Kegiatan Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/ perkebunan	95.000.000,00	80.542.680
		Output : Jumlah alokasi pembuatan pupuk	3 lokasi	3 lokasi
		Outcome : jumlah produksi tanaman pangan (pajale)	18550 ton	18571 ton

NO		URAIAN	TARGET Rp	REALISASI Rp
	6	Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur Pertanian	3.499.200.000,00	3.113.452.589
		Output : Jumlah infrastruktur pendukung pertanian	4 paket	3 paket
		Outcome : jumlah produksi tanaman pangan (pajale)	18550 ton	18571 ton
6	program peningkatan produksi hasil peternakan dan pelayanan kesehatan hewan		735.298.720,00	682.685.578
	1	Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Hewan Peliharaan	50.000.000,00	44.703.684
		Output : Jumlah ternak yang mendapatkan pengobatan dan pemeriksaan kesehatan serta penyuluhan	1200 ekor dan 1 penyuluhan	1636 ekor dan 1 penyuluhan
		Outcome : Jumlah produksi daging	1800 ton	1861 ton
	2	Kegiatan Kesehatan Masyarakat Veteriner	185.000.000,00	158.698.349
		Output : pemeriksaan daging, sosialisasi pemotongan hewan qurban, sampel air susu dan pangan olahan ternak	365 hari, 100 sampel makanan, 40 sampel air susu, 3 kali penyuluhan	365 hari, 100 sampel makanan, 50 sampel air susu, 3 kali penyuluhan
		Outcome : Jumlah produksi daging	1800 ton	1861 ton
	3	Penyuluhan Kualitas Gizi Pakan Ternak	125.000.000,00	119.290.860
		Output : Jumlah bintek, monitoring, dan pengawasan mutu ternak	4 kali bintek dan 2 kali monev	4 kali bintek dan 2 kali monev
		Outcome : Jumlah produksi daging	1800 ton	1861 ton
	4	Kegiatan Penyuluhan Pemasaran Produksi Peternakan	137.000.000,00	135.177.610
		Output : Jumlah bintek, kontes burung berkicau, dan monev	5 bintek, 1 kali kontes, 7 monev	5 bintek, 1 kali kontes, 6 monev
		Outcome : Jumlah produksi daging	1800 ton	1861 ton
	5	Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna	97.300.000,00	94.261.435
		Output : Jumlah peternak pemanfaatan teknologi pakan	4 kali	4 kali
		Outcome : Jumlah produksi daging	1800 ton	1861 ton
	6	Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	140.998.720,00	130.553.640
		Output : Jumlah hewan peliharaan yang mendapatkan pengobatan dan pemeriksaan kesehatan	250 ekor	221 ekor
		Outcome : Jumlah produksi daging	1800 ton	1861 ton

2. Alokasi dan Realisasi Belanja

NO	URAIAN	ALOKASI	REALISASI
1.	**Urusan Pertanian**		
	Belanja Tidak Langsung	Rp 2.810.775.666,66	Rp 2.588.984.204,66
	Belanja Langsung	Rp 6.901.340.080	Rp 6.189.094.817

3. Asset yang Dikuasai

No.	Urusan	Nilai Asset	Keterangan
1.	Urusan Pertanian	Rp. 31.248.745.503,-	Bangunan, Peralatan, Perpustakaan, Jaringan Irigasi

e. Proses Perencanaan Pembangunan Daerah

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan membidangi urusan pertanian, kelautan dan perikanan, dan pangan. Kegiatan pertanian di Kota Madiun yang meliputi budidaya tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan berfungsi sebagai penyangga (*buffer*) pangan daerah. Oleh karenanya, untuk mewujudkan kestabilan produksi pangan di Kota Madiun, diperlukan perencanaan program dan kegiatan yang baik di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun.

Rencana Kerja adalah suatu dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang memuat program dan kegiatan berdasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di daerah. Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan disusun sebagai pedoman dan arahan dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai tugas pokok dan fungsi. Fungsi dari Renja ini adalah sebagai perencanaan dan tolok ukur dari pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun.

Renja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun memuat program dan kegiatan yang dibiayai oleh APBD Kota Madiun dan sumber pembiayaan lainnya. Renja ini pada dasarnya merupakan dokumen perencanaan tahunan yang telah direncanakan dalam dokumen *review* Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun 2014- 2019. Sehingga, penyusunan Renja tiap tahun harus selaras dengan dokumen Renstra tersebut. Selain itu, Renja setiap Anggaran juga mengakomodasi hasil penjaringan, diskusi, dan usulan dari masing- masing *stakeholder* dalam hal ini adalah masyarakat pertanian, yang diusulkan dalam Musrenbang (Musyarawah Perencanaan Pembangunan), maupun hasil penjaringan aspirasi masyarakat oleh DPRD.

f. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
	URUSAN PERTANIAN		
1	Gedung	26	BAIK
2	Kendaraan	21	BAIK
3	Alat Kantor	228	BAIK
4	Jalan Irigasi dan Jaringan	19	BAIK
5	Buku Perpustakaan	1475	BAIK

g. Permasalahan dan Solusi

Kualitas sumberdaya lahan pertanian semakin menurun dikarenakan struktur tanah yang telah jenuh dengan bahan kimia anorganik atau pupuk kimia/ buatan, maupun pestisida (obat tanaman) anorganik yang dapat mempengaruhi struktur, tekstur dan kesuburan tanah. Penggunaan bahan kimia dapat memperkeras tekstur tanah, mengganggu keseimbangan PH tanah, serta membunuh mikroorganisme yang bermanfaat bagi kesuburan tanah. Oleh karena itu upaya yang harus dilakukan adalah membatasi penggunaan bahan kimia dan mengimbangi dengan penggunaan bahan organik dengan tetap melaksanaan kegiatan dan pendampingan pembuatan pupuk organik serta penggunaan agens hayati maupun pestisida nabati. Penggunaan pupuk organik yang dapat memperbaiki struktur dan tekstur tanah, memperbanyak daya jerap air, dan memperbanyak suplai makanan bagi mikroorganisme tanah. Sedangkan penggunaan agens hayati yaitu mikroorganisme (nematode, jamur, bakteri dsb) yang bermanfaat dalam pengendalian organisme pengganggu tanaman atau hama dan penyakit tanaman serta penggunaan pestisida nabati (dari rimpang toga, jarak, alang-alang dsb) yang lebih ramah lingkungan, dapat menggantikan penggunaan pestisida kimia.

4. URUSAN BIDANG PERDAGANGAN

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Perdagangan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan.

b. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Urusan pemerintahan bidang Perdagangan yang dilaksanakan Dinas Perdagangan di Kota Madiun pada Tahun Anggaran 2019, yaitu sebagai berikut:

Tabel III.42
Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan bidang Perdagangan
di Kota Madiun Tahun 2019

No	Uraian	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	
	1	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	2	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
2	Program pemeliharaan barang milik daerah	
	1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan
	2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
	3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kantor
3	Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	
	1	Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
4	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
	1	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
5	Program Peningkatan dan Pengembangan Eksport serta Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	
	1	Kegiatan Pameran Dagang
	2	Kegiatan Pengembangan Pasar dan Distribusi Produk
	3	Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang tidak dilekati Pita Cukai atau dilekati Pita Cukai Palsu di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran (DBH-CHT)
	4	Kegiatan Membangun Jejaring dengan Exportir
	5	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Perdagangan
	6	Kegiatan Pengawasan Perijinan Perdagangan
	7	Kegiatan Pengawasan terhadap Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)
	8	Pengawasan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT)
	9	Kegiatan Pelaksanaan Tertib Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)
6	Program Pembinaan PKL dan Asongan	
	1	Kegiatan Pembinaan PKL
7	Program Pengelolaan Pasar Rakyat	
	1	Kegiatan Pendataan Sirkulasi Perputaran Uang/Modal di Pasar
	2	Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar
	3	Kegiatan Program Pasar Bersih (PROPASIH)
	4	Kegiatan Pengamanan Terpadu Pasar-Pasar di Kota Madiun
	5	Kegiatan Gebyar Undian dan Pemberian Cenderamata Kepada Wajib Retribusi/Sewa Pasar Tradisional
	6	Kegiatan Gerakan Kembali Ke Pasar
	7	Kegiatan Pengembangan Fasilitas Pendukung Pasar-pasar
	8	Kegiatan Pendataan Pengunjung Pasar yang dikelola Dinas Pasar

c. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Jumlah Pegawai	Kepangkatan	Tingkat Pendidikan	Struktural/ Eselon	Fungsional	Staf
82 orang	Gol I = 8 Gol II = 45 Gol III = 24 Gol IV = 4	SD = 14 SMP = 17 SMA = 34 D3 = 1 D4/ S1 = 14 S2 = 1	II = 1 III = 13 IV = 68		

d. Alokasi dan Realisasi Anggaran

1. Realisasi Program dan Kegiatan

No	Uraian	Target	Realisasi
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	914.180.232,00	866.939.753,00
1	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	471.167.944,00	434.499.197,00
	Output : Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	8 jenis	8 jenis
	Outcome : Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perdagangan	B	BB
2	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	443.012.288,00	432.440.556,00
	Output : Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	82 kali	88 kali
	Outcome : Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perdagangan	B	BB
2	Program pemeliharaan barang milik daerah	548.152.598,00	368.047.933,00
1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan	48.598.118,00	42.629.200,00
	Output : Jumlah gedung dan bangunan dalam kondisi baik	3 gedung	3 gedung
	Outcome : Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perdagangan	B	BB
2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	403.347.408,00	246.857.153,00
	Output : Jumlah kendaraan dinas dalam kondisi baik	40 unit	40 unit
	Outcome : Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perdagangan	B	BB
3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kantor	96.207.072,00	78.561.580,00
	Output : Jumlah sarana dan prasarana kantor yang layak pakai	47 unit alat kantor, 4 software, jaringan telekomunikasi dan repeater	47 unit alat kantor, 4 software, jaringan telekomunikasi dan repeater
	Outcome : Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perdagangan	B	BB
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	83.591.440,00	26.073.566,00
1	Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	83.591.440,00	26.073.566,00

No	Uraian	Target	Realisasi
	Output : Penyusunan laporan tepat waktu	5 Dokumen	5 Dokumen
	Outcome : Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perdagangan	B	BB
4	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	95.000.000,00	93.498.000,00
1	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	95.000.000,00	93.498.000,00
	Output : Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kantor	14 unit alat kantor	14 unit alat kantor
	Outcome : Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perdagangan	B	BB
5	Program Peningkatan dan Pengembangan Eksport serta Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	1.011.645.000,00	783.911.615,00
1	Kegiatan Pameran Dagang	169.937.040,00	135.817.318,00
	Output : Jumlah produk yang dipamerkan	13 jenis	13 jenis
	Outcome : Persentase Peningkatan dan Pengembangan Eksport serta Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	100%	100 %
2	Kegiatan Pengembangan Pasar dan Distribusi Produk	330.527.040,00	251.604.585,00
	Output : Jumlah partisipasi dalam pameran perdagangan	3 kota	3 kota
	Outcome : Persentase Peningkatan dan Pengembangan Eksport serta Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	100%	100 %
3	Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang tidak dilekati Pita Cukai atau dilekati Pita Cukai Palsu di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran (DBH-CHT)	41.288.816,00	30.512.900,00
	Output : Jumlah informasi hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai atau dilekati pita cukai palsu di peredaran atau tempat penjualan eceran	Nihil	Nihil
	Outcome : Persentase Peningkatan dan Pengembangan Eksport serta Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	100%	100 %
4	Kegiatan Membangun Jejaring dengan Exportir	37.750.520,00	27.101.400,00
	Output: Jumlah pengusaha	50 pengusaha	50 pengusaha
	Outcome : Persentase Peningkatan dan Pengembangan Eksport serta Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	100%	100 %
5	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Perdagangan	55.925.744,00	31.779.600,00
	Output : Jumlah lokasi yang diawasi	3 pasar	3 pasar
	Outcome : Persentase Peningkatan dan Pengembangan Eksport serta Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	100%	100 %
6	Kegiatan Pengawasan Perijinan Perdagangan	36.778.144,00	21.998.106,00
	Output : Jumlah perijinan perdagangan	100 perijinan	100 perijinan
	Outcome : Persentase Peningkatan dan Pengembangan Eksport serta Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	100%	100 %
7	Kegiatan Pengawasan terhadap Alat Ukur Takar Timbang dan	20.753.280,00	18.357.326,00

No	Uraian	Target	Realisasi
	Perlengkapannya (UTTP)		
	Output : Jumlah alat UTTP yang diawasi	1000 UTTP	1000 UTTP
	Outcome : Persentase Peningkatan dan Pengembangan Eksport serta Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	100%	100 %
8	Pengawasan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT)	23.753.280,00	23.282.898,00
	Output : Jumlah barang dalam keadaan terbungkus (BDKT) yang diawasi	300 buah	300 buah
	Outcome : Persentase Peningkatan dan Pengembangan Eksport serta Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	100%	100 %
9	Kegiatan Pelaksanaan Tertib Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)	294.931.136,00	243.457.482,00
	Output : Jumlah alat UTTP yang ditera/tera ulang di kantor, diluar kantor dan di tempat pakai	7000 UTTP	7000 UTTP
	Outcome : Persentase Peningkatan dan Pengembangan Eksport serta Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	100%	100 %
6	Program Pembinaan PKL dan Asongan	129.812.040,00	109.316.611,00
1	Kegiatan Pembinaan PKL	129.812.040,00	109.316.611,00
	Output : Jumlah PKL yang dibina	600 PKL	600 PKL
	Outcome : Persentase peningkatan Pembinaan PKL dan Asongan	100%	100 %
7	Program Pengelolaan Pasar Rakyat	6.033.588.464.00	4.196.450.525.00
1	Kegiatan Pendataan Sirkulasi Perputaran Uang/Modal di Pasar	215.924.944.00	174.999.326.00
	Output : Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	Outcome : Omset Pasar Tradisional	522.509.000.000	547.949. 142.888
2	Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar	532.129.240.00	403.372.967.00
	Output : Jumlah pasar yang dikembangkan Sarana dan Prasarananya	17 pasar	17 pasar
	Outcome : Tercapaianya peningkatan PAD sesuai dengan potensi	Rp. 3.400.000.000	Rp. 3.928.311.923
3	Kegiatan Program Pasar Bersih (PROPASIH)	1.432.846.560,00	1.417.811.604,00
	Output : Jumlah Pasar yang dibersihkan oleh unsur masyarakat	17 pasar	17 pasar
	Outcome : Jumlah pengunjung pasar tradisional	1.750.000	8.723.865
4	Kegiatan Pengamanan Terpadu Pasar-Pasar di Kota Madiun	866.795.760,00	771.570.060,00
	Output : Jumlah Pasar yang dijaga petugas keamanan	17 pasar	17 pasar
	Outcome : Omzet Pasar Tradisional	522.509.000.000	547.949. 142.888
5	Kegiatan Gebyar Undian dan Pemberian Cenderamata Kepada Wajib Retribusi/Sewa Pasar Tradisional	424.657.280.00	383.089.251.00
	Output : Jumlah pasar yang mengikuti gebyar undian dan pemberian cinderamata kepada wajib retribusi sewa pasar tradisional	7 pasar	7 pasar
	Outcome : Omzet Pasar Tradisional	522.509.000.000	547.949. 142.888

No	Uraian	Target	Realisasi
6	Kegiatan Gerakan Kembali Ke Pasar	350.494.000,00	331.205.730,00
	Output : Jumlah peserta yang dilibatkan dalam kegiatan gerakan kembali ke pasar	600 Peserta	600 Peserta
	Outcome : Omzet Pasar Tradisional	522.509.000.000	547.949. 142.888
7	Kegiatan Pengembangan Fasilitas Pendukung Pasar-pasar	588.990.680,00	525.733.587,00
	Output : Jumlah pasar yang ditingkatkan kebersihan , pemeliharaan bangunan, listrik dan fasilitas pendukung pasar-pasar	17 Pasar	17 Pasar
	Outcome : Omzet Pasar Tradisional	522.509.000.000	547.949. 142.888
	JUMLAH BELANJA	7.947.731.513.00	7.775.131.234.00

2. Alokasi dan Realisasi Belanja

No	Uraian	Alokasi	Realisasi
1.	Urusan Perdagangan		
	Belanja Tidak Langsung	Rp. 7.947.731.513,00	Rp. 7.775.131.234,00
	Belanja Langsung	Rp. 8.815.969.774,00	Rp. 6.444.238.003,00
	Total Belanja	Rp. 16.763.701.287,00	Rp. 14.219.369.237,00

3. Asset yang Dikuasai

No.	Urusan	Nilai Asset	Keterangan
1.	Perdagangan	Rp. 113.443.553.488,83	Baik

e. Proses Perencanaan Pembangunan Daerah

Perencanaan Pembangunan Daerah pada urusan perdagangan berdasarkan Dokumen perencanaan jangka panjang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, jangka menengah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan perencanaan pembangunan tahunan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

f. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1	Tanah	15	Baik
2	Alat alat angkut	40	Baik
3	Alat-alat bengkel	3	Baik
4	Alat Kantor dan Rumah Tangga	638	Baik
5	Alat Studio dan Komunikasi	43	Baik
6	Bangunan Gedung	146	Baik
7	Jalan dan Jembatan	1	Baik
8	Bangunan Monumen	1	Baik
9	Bangunan dan Irigasi	3	Baik
	Jumlah	890	Baik

g. Permasalahan dan Solusi

1. Pertumbuhan ekonomi Kota Madiun relatif stabil dengan nilai diatas 5 persen. Bila dibandingkan dengan kabupaten lain di wlayah Karesidenan Madiun, pertumbuhan ekonomi Kota Madiun merupakan yang tertinggi. (data demografi ekonomi dan social budaya Kota Madiun Tahun 2018) sehingga sebagai Dinas yang mengurusi urusan perdagangan maka mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi, dengan mengetahui jumlah pertumbuhan ekonomi melalui data perputaran uang yang beredar di Kota Madiun.
2. Dengan adanya beberapa Perguruan Tinggi yang ada di Kota Madiun, antara lain API (Akademi Perkereta Apian) akan ikut memacu dalam Pertumbuhan Ekonomi.
3. Dengan berdirinya beberapa Mall seperti Sun City, Madiun Plaza, Timbul Jaya Plaza, Carrefour, President Plaza, Lawu Plaza semakin mengisyaratkan status Kota Madiun ini sebagai Kota Perdagangan sehingga menambah dan membuat iklim Investasi di kota ini menjadi tumbuh subur. Maka tidak heran jika di Kota ini banyak ditemukan Mall dan Pusat Perdagangan, begitu juga sentra Kuliner dan Hiburan yang semakin menjamur, dan mengisyaratkan Kota ini seakan tidak ada matinya. Sarat akan aktivitas perekonomian yang semakin dinamis berubah mengikuti arah kemajuan zaman.

5. URUSAN BIDANG PERINDUSTRIAN

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Tenaga Kerja menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian.

b. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Urusan pemerintahan bidang Perindustrian yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja di Kota Madiun pada Tahun Anggaran 2019, yaitu sebagai berikut:

Tabel III.43
Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan bidang Perindustrian
di Kota Madiun Tahun 2019

No	Program	Kegiatan	
1	program pengembangan industri kecil menengah	1	Kegiatan Sosialisasi Penerapan Standart Produk Industri Manufactur
		2	Kegiatan Fasilitasi Pameran Industri Mikro, Kecil dan menengah tingkat lokal dan nasional
		3	Kegiatan Fasilitasi Pameran Industri Tingkat Nasional (INACRAFT)
		4	Kegiatan pelatihan peningkatan Ketrampilan Teknik Perbengkelan
		5	Kegiatan Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Bagi IKM/IRT melalui pelatihan makanan olahan
		6	Kegiatan Pembinaan Kemampuan dan ketrampilan bagi IKM/IRT melalui pelatihan peningkatan Produki Souvenir
		7	Kegiatan Pengembangan Industri Hasil Tembakau dengan kadar tar dan nikotin rendah melalui good manufacturing practies DBH-CHT
		8	kegiatan fasilitas pemberdayaan IKM/IRT oleh dekranasda
		9	kegiatan pengembangan industri kreatif
		10	kegiatan sosialisasi dan fasilitasi uji nilai gizi produk makanan olahan

c. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Jumlah Pegawai	Kepangkatan	Tingkat Pendidikan	Struktural/ Eselon	Fungsional	Staf
7	Gol I = Gol II = Gol III = 6 Gol IV = 1	SD = SMP = SMA = D3 = D4/ S1 = 5 S2 = 2	II = III = 1 IV = 3 V =	**1**	**2**

d. Alokasi dan Realisasi Anggaran

1. Realisasi Program dan Kegiatan

NO		URAIAN	TARGET	REALISASI
1		program pengembangan industri kecil menengah	1.152.354.000,00	
	1	Kegiatan Sosialisasi Penerapan Standart Produk Industri Manufactur	75.750.000,00	71. 511.670,-
		Output : jumlah peserta sosialisasi	20	20
		Outcome :meningkatkan pertumbuhan sektor industri	295	390
	2	Kegiatan Fasilitasi Pameran Industri Mikro, Kecil dan menengah tingkat lokal dan nasional	165.000.000,00	150.707.132,-
		Output : jumlah keikut sertaan dalam pameran	1 kegiatan	1 kegiatan
		Outcome : meningkatkan pertumbuhan sektor industri	295	390
	3	Kegiatan Fasilitasi Pameran Industri Tingkat Nasional (INACRAFT)	158.765.000,00	143.321.450.-
		Output :jumlah keikutsertaan dalam pameran	1 kegiatan	1 kegiatan
		Outcome : meningkatkan pertumbuhan sektor industri	295	390
	4	Kegiatan pelatihan peningkatan Ketrampilan Teknik Perbengkelan	98.483.000,00	94.663.603,-
		Output :Jumlah peserta pelatihan Kewirausahaan	10	10
		Outcome :Meningkatnya pertumbuhan Ekonomi sektor Industri	295	390
	5	Kegiatan Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Bagi IKM/IRT melalui pelatihan makanan olahan	46.702.000,00	39.090.897,-
		Output : Jumlah peserta pelatihan Kewirausahaan	10	10
		Outcome : Meningkatnya pertumbuhan Ekonomi sektor Industri	295	390
	6	Kegiatan Pembinaan Kemampuan dan ketrampilan bagi IKM/IRT melalui pelatihan peningkatan Produki Souvenir	58.654.000,00	53.841.069,-
		Output : Jumlah IKM / IRT yang mengikuti pelatihan	30	30
		Outcome : Meningkatnya pertumbuhan Ekonomi sektor Industri	295	390
	7	Kegiatan Pengembangan Industri Hasil Tembakau dengan kadar tar dan nikotin rendah melalui good manufacturing practies DBH-CHT	100.000.000,00	76.966.614,-
		Output :frekfensi pemeriksaan kadar tar dan nikotin	4 pengujian	4 pengujian
		Outcome : meningkatnya petumbuhan industri	295	390
	8	kegiatan fasilitas pemberdayaan IKM/IRT oleh dekranasda	300.000.000,00	271.998.775,-
		Output : jumlah keikut sertaan deskranasda	4 kegiatan	4 kegiatan
		Outcome : meningkatkan	295	390

NO		URAIAN	TARGET	REALISASI
		pertumbuhan sektor industri		
	9	kegiatan pengembangan industri kreatif	65.000.000,00	58.317.416,-
		Output : Jumlah peserta pengembangan Kreatif	20 kegiatan	20 kegiatan
		Outcome : Meningkatnya pertumbuhan Ekonomi sektor Industri	295	390
	10	kegiatan sosialisasi dan fasilitasi uji nilai gizi produk makanan olahan	84.000.000,00	78.824.869,-
		Output : jumlah peserta sosialisasi	20 kegiatan	20 kegiatan
		Outcome : meningkatnya petumbuhan industri	295	390

2. Alokasi dan Realisasi Belanja

No	Uraian	Alokasi	Realisasi
1.	Urusan Bidang Perindustrian		
	Belanja Tidak Langsung	Rp. 800.583.434	Rp. 782.287.893
	Belanja Langsung	Rp. 1.152.354.000	Rp. 1.056.748.254
	Total Belanja	Rp. 1.952.937.434	Rp. 1.839.036.147

3. Realisasi Pemeliharaan dan penguasaan Asset

No.	Urusan	Nilai Asset	Keterangan
1	Bidang Perindustrian	Rp. 1.234.951.521	-

e. Proses Perencanaan Pembangunan Daerah

Dinas Tenaga Kerja Kota Madiun dalam proses perencanaan pembangunan hal pertama yang dilakukan adalah Forum SKPD. Dalam forum tersebut dilakukan integrasi top down dan bottom up planning dari masyarakat. Dalam forum tersebut tetap berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja Kota Madiun Tahun 2014-2019 dan selanjutnya dituangkan dalam Draft Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Madiun dan dijadikan bahan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Kota Madiun

f. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1.	Gedung	-	-
2.	Kendaraan	5	Baik
3.	Alat / Sarana Prasarana Kantor	104	Baik

6. URUSAN BIDANG TRANSMIGRASI

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Tenaga Kerja menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Transmigrasi.

b. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Urusan pemerintahan bidang Transmigrasi yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja di Kota Madiun pada Tahun Anggaran 2019, yaitu sebagai berikut:

Tabel III.44
Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan bidang Transmigrasi
di Kota Madiun Tahun 2019

No	Program	Kegiatan	
1	program ketransmigrasian	1	Kegiatan Penyelenggaraan Ketransmigrasian

c. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Jumlah Pegawai	Kepangkatan	Tingkat Pendidikan	Struktural/ Eselon	Fungsional	Staf
2	Gol I = Gol II = Gol III = 2 Gol IV =	SD = SMP = SMA = D3 = 1 D4/ S1 = 1 S2 =	II = III = IV = 1 V =		**1**

d. Alokasi dan Realisasi Anggaran

1. Realisasi Program dan Kegiatan

NO		URAIAN	TARGET	REALISASI
1		program ketransmigrasian	29.764.480,00	29.294.352
	1	Kegiatan Penyelenggaraan Ketransmigrasian	29.764.480,00	29.294.352
		Output : jumlah program ketrasmigrasian	1 sosialisasi	1 sosialisasi
		Outcome : prosentase pencari kerja yang di tempatkan	79%	85,52%

2. Realisasi Anggaran Total Belanja

No	Uraian	Alokasi	Realisasi
3.	Urusan Bidang Transmigrasi		
	Belanja Tidak Langsung	Rp. 210.935.834	Rp. 211.005.609
	Belanja Langsung	Rp. 29.764.480	Rp. 29.294.352
	Total Belanja	Rp. 240.700.314	Rp. 240.299.961

e. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Pelaksanaan RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024 setiap tahun dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan yang memuat prioritas program dan kegiatan yang dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Madiun yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan hingga kota. Program prioritas pembangunan daerah memuat program-program yang berorentasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan sebagai penjabaran dari RPJMD pada tahun yang direncanakan. Rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD, memuat program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah, disertai perhitungan kebutuhan dana bersumber dari APBD untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan. RKPD merupakan bahan utama penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara, serta bahan penyusunan Rencanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)

f. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1.	Gedung	-	-
2.	Kendaraan	5	Baik
3.	Alat / Sarana Prasarana Kantor	104	Baik

B. RINGKASAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, INSPEKTORAT DAN FUNGSI PENUNJANG LAINNYA)

1. FUNGSI PENUNJANG UNSUR STAF

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Sekretariat Daerah menyelenggarakan Fungsi Penunjang Unsur Staf.

b. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Fungsi Penunjang Unsur Staf yang dilaksanakan Sekretariat Daerah di Kota Madiun pada Tahun Anggaran 2019, yaitu sebagai berikut:

Tabel III.45
Program dan Kegiatan Fungsi Penunjang Unsur Staf
di Kota Madiun Tahun 2019

❖ Bagian Administrasi Pemerintahan Umum

No	Program	Kegiatan	
1	program pelayanan administrasi perkantoran	1	kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor
		2	kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah
2	program pemeliharaan barang milik daerah	1	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan
		2	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas
		3	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala sarana prasarana kantor
3	program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1	kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor
4	program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1	kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah
5	program penataan daerah otonom baru	1	Kegiatan Peringatan Hari Otonomi Daerah
		2	Kegiatan Bintek Administrasi Kelurahan
		3	Kegiatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur
		4	Kegiatan Evaluasi Kelurahan Berhasil
		5	Kegiatan Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah
		6	Kegiatan Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
		7	Kegiatan Koordinasi Penyusunan LKPJ Walikota
		8	Kegiatan Penyusunan LPPD, ILPPD dan EKPPD Kota Madiun
		9	Kegiatan Koordinasi Penyusunan Memori Serah Terima Jabatan
6	program peningkatan kerjasama antar daerah pemerintah daerah	1	Kegiatan Koordinasi Penyusunan MoU
		2	Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama

No	Program	Kegiatan	
			antar Daerah di Bidang Ekonomi (Pameran Apeksi)
		3	Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Bidang Pelayanan Publik (Pawitan Dirogo)
		4	Kegiatan Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintahan non Departemen/Luar Negeri

❖ Bagian Hukum

No	Program	Kegiatan	
1	program pelayanan administrasi perkantoran	1	kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor
		2	kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah
2	program pemeliharaan barang milik daerah	1	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan
		2	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas
		3	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala sarana prasarana kantor
3	program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1	kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor
4	program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1	kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah
5	program penataan peraturan perundang-undangan	1	Kegiatan Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Baru, Lebih Tinggi dan Keserasian antar Peraturan Perundang-undangan Daerah
		2	Kegiatan Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan
		3	Kegiatan Publikasi Peraturan Perundang-undangan

❖ Bagian Administrasi Pembangunan

No	Program	Kegiatan	
1	program pelayanan administrasi perkantoran	1	kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor
		2	kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah
2	program pemeliharaan barang milik daerah	1	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan
		2	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas
		3	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala sarana prasarana kantor
3	program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1	kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor
4	program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1	kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah
5	Program Peningkatan Fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa	1	Kegiatan Penyusunan Buku Petunjuk Operasional
		2	Kegiatan Pengendalian Administrasi

No	Program	Kegiatan	
			Pengadaan Barang/Jasa
		3	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan
		4	Kegiatan Penyusunan Standar Harga Barang Kebutuhan dan Standart Kegiatan Konstruksi

❖ Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesra

No	Program	Kegiatan	
1	program pelayanan administrasi perkantoran	1	kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor
		2	kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah
2	program pemeliharaan barang milik daerah	1	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan
		2	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas
		3	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala sarana prasarana kantor
3	program peningkatan sarana dan prasarana kantor	1	kegiatan pengadaan sarana dan prasarana aparatur
4	program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1	kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah
5	program stabilisasi ekonomi daerah	1	Kegiatan Penyelenggaraan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID)
		2	Kegiatan Pembinaan BUMD
		3	Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi atas Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Cukai
		4	Kegiatan Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Cukai Kepada Masyarakat dan atau Pemangku Kepentingan melalui forum tatap muka, media elektronik, media cetak
		5	Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah
		6	Kegiatan Sosialisasi Kebijakan atau Ketentuan di Bidang Lembaga Keuangan
6	program peningkatan kualitas hidup beragama	1	Kegiatan Pemberangkatan dan Penjemputan Haji
		2	Kegiatan Peningkatan fasilitasi peringatan hari besar keagamaan
		3	Kegiatan pengiriman khafilah MTQ

❖ Bagian Organisasi

No	Program		Kegiatan
1	program pelayanan administrasi perkantoran	1	kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor
			kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah
2	program pemeliharaan barang milik daerah	1	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan
		2	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas
		3	kegiatan pemeliharaan rutin/

No	Program		Kegiatan
			berkala sarana prasarana kantor
3	program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1	kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor
4	program peningkatan ketatalaksanaan perangkat daerah	1	Kegiatan Evaluasi Pelayanan Publik
		2	Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Ketatalaksanaan
		3	kegiatan pembinaan pelayaan publik
5	program pengembangan kinerja dan kelembagaan perangkat daerah	1	Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
		2	Kegiatan Pembinaan Kelompok Budaya Kerja
		3	Kegiatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
		4	kegiatan penataan susunan organisasi dan tata kerja (SOTK) perangkat daerah di lingkungan pemerintah kota madiun
		5	kegiatan analisis jabatan

❖ Bagian Umum

No	Program		Kegiatan
1	program pelayanan administrasi perkantoran	1	kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor
		2	kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah
2	program pemeliharaan barang milik daerah	1	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan
		2	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas
		3	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala sarana prasarana kantor
		4	kegiatan pemeliharaan rumah dinas
3	program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1	kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor
		2	kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
		3	kegiatan rehab gedung dan bangunan
4	program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1	kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah
5	program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah	1	kegiatan keprotokolan acara Pemerintah Kota
		2	kegiatan peningkatan kesegaran jasmani Sekretariat

c. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

❖ Bagian Administrasi Pemerintahan Umum

Jumlah Pegawai	Kepangkatan	Tingkat Pendidikan	Struktural/ Eselon	Fungsional	Staf
11	Gol I = - Gol II = - Gol III = 10 Gol IV = 1	SD = - SMP = - SMA = - D3 = 1 D4/ S1 = 10 S2 = -	II = - III = 1 IV = 3 V = -	- Jabatan fungsional pemetaan surveyor - Jabatan fungsional statistisi	**7**

❖ Bagian Hukum

Jumlah Pegawai	Kepangkatan	Tingkat Pendidikan	Struktural/ Eselon	Fungsional	Staf
10	Gol I = Gol II = 1 Gol III = 7 Gol IV = 1 Tenaga kontrak = 1	SD = SMP = SMA = 1 D3 = D4/ S1 = 8 S2 =	II = III = 1 IV = 3 V =		

❖ Bagian Administrasi Pembangunan

Jumlah Pegawai			Tingkat Pendidikan	Struktural/ Eselon			Jabatan Fungsional	Jumlah Staf
PNS Honorer Upahan	: : :	14 0 1	S2 : 2 S1 : 9 D3 : 1 SMA : 2 SMP : 1	II III IV V	: : : :	0 1 3 0	0	10

❖ Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat

Jumlah Pegawai	Kepangkatan	Tingkat Pendidikan	Struktural/ Eselon	Fungsional	Staf
13	Gol I = Gol II = 4 Gol III = 7 Gol IV = 2	SD = SMP = SMA = 4 D2 = 1 D3 = D4/ S1 = 7 S2 = 1	II = III = IV = 3 V =		**10**

❖ Bagian Organisasi

Jumlah Pegawai	Kepangkatan	Tingkat Pendidikan	Struktural/ Eselon	Fungsional	Staf
PNS = 9 CPNS= 1 Tenaga Upahan = 2	Gol I = - Gol II = 2 Gol III = 7 Gol IV = 1	SD = - SMP = - SMA = 1 D3 = 2 D4/ S1 = 7 S2 = -	II = - III = 1 IV = 2 V = -	-	7

❖ Bagian Umum

Jumlah Pegawai	Kepangkatan	Tingkat Pendidikan	Struktural/ Eselon	Fungsional	Staf
PNS = 64 Kontrak = 33 Upahan = 5	Gol I = 3 Gol II = 33 Gol III = 24 Gol IV = 4	SD = 4 SMP = 5 SMA/K = 30 D3 = - D4/ S1 = 24 S2 = 1	II = 3 III = 1 IV = 3 V = -	Pranata Humas = 2	93

d. Alokasi dan Realisasi Anggaran

1. Realisasi Program dan Kegiatan

❖ Bagian Administrasi Pemerintahan Umum

NO		URAIAN	TARGET	REALISASI
1	program pelayanan administrasi perkantoran		538.291.000,00	522.544.034
	1	kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	308.291.000,00	291.730.768
		Output : Jumlah Peralatan dan perlengkapan Kantor	4 jenis	4 jenis
		Outcome : Akuntabilitas Kinerja bagian Administrasi Pemerintahan Umum dinilai	B	B
	2	kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	230.000.000,00	229.906.416
		Output : Jumlah Koordinasi dan konsultasi keluar Daerah	22 kali	67 kali
		Outcome : Akuntabilitas Kinerja bagian Administrasi Pemerintahan Umum dinilai Baik	B	B
2	program pemeliharaan barang milik daerah		33.974.000,00	33.071.000,00
	1	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan	2.000.000,00	1.952.500
		Output : Pemasangan Wallpaper Bagian Adm. Pemerintahan Umum	1 paket	1 paket
		Outcome : Akuntabilitas Kinerja bagian Administrasi Pemerintahan Umum dinilai Baik	B	B
	2	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas	18.674.000,00	17.818.500
		Output : Jumlah Kendaraan Dinas	1 unit kendaraan roda empat dan 3 unit kendaraan roda dua	1 unit kendaraan roda empat dan 3 unit kendaraan roda dua
		Outcome : Akuntabilitas Kinerja Bagian Administrasi Pemerintahan Umum dinilai Baik	B	B
	3	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala sarana prasarana kantor	13.300.000,00	13.300.000,00
		Output : Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor	4 jenis barang	4 jenis barang
		Outcome : Akuntabilitas Kinerja bagian Administrasi Pemerintahan Umum dinilai Baik	B	B
3	program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		30.000.000,00	29.409.500,00
	1	kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor	30.000.000,00	29.409.500,00

NO		URAIAN	TARGET	REALISASI
		Output : Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor	3 jenis barang	3 jenis barang
		Outcome : Akuntabilitas Kinerja bagian Administrasi Pemerintahan Umum dinilai Baik	B	B
4	program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		7.417.000,00	7.316.375,00
	1	kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	7.417.000,00	7.316.375,00
		Output : Jumlah Dokumen	4 dokumen	4 dokumen
		Outcome : Akuntabilitas kinerja Bag/ Adm. Pem. Umum dinilai baik	B	B
5	program penataan daerah otonom baru		1.475.861.000,00	1.347.277.377,00
	1	Kegiatan Peringatan Hari Otonomi Daerah	29.425.000,00	29.090.727,00
		Output : Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah	1 kali	1 kali
		Outcome : Prosentase penyampaian laporan kinerja pemerintahan tepat waktu	100%	100%
	2	Kegiatan Bintek Administrasi Kelurahan	116.630.000,00	110.611.625,00
		Output : Terlaksananya Bintek tentang administrasi kelurahan	150 peserta	150 peserta
		Outcome : Prosentase penyampaian laporan kinerja tepat waktu	100%	100%
	3	Kegiatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur	58.533.000,00	56.554.418,00
		Output : Upacara Peringatan Hari Provinsi Jawa Timur	1 kali	1 kali
		Outcome : Prosentase penyampaian laporan kinerja pemerintahan tepat waktu	100%	100%
	4	Kegiatan Evaluasi Kelurahan Berhasil	200.520.000,00	186.098.158
		Output : Jumlah kelurahan yang mengikuti evaluasi Kelurahan berhasil	Tingkat kota=3 kelurahan, tingkat provinsi=1 kelurahan	Tingkat kota=3 kelurahan
		Outcome : Prosentase penyampaian laporan kinerja pemerintahan tepat waktu	100%	100%
	5	Kegiatan Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah	208.973.000,00	196.592.107,00
		Output : Jumlah Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah	6 kali	6 kali
		Outcome : Prosentase penyampaian laporan kinerja pemerintahan tepat waktu	100%	100%
	6	Kegiatan Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	677.840.000,00	551.905.303,00
		Output : Jumlah Kunjungan Kerja Walikota ke Kelurahan	6 kali	6 kali
		Outcome : Prosentase penyampaian laporan kinerja	100%	100%

NO		URAIAN	TARGET	REALISASI
		pemerintahan tepat waktu		
	7	Kegiatan Koordinasi Penyusunan LKPJ Walikota	66.600.000,00	65.044.490
		Output : Buku LKPJ Walikota Madiun	1 Dokumen	1 Dokumen
		Outcome : Prosentase penyampaian laporan kinerja pemerintahan tepat waktu	100%	100%
	8	Kegiatan Penyusunan LPPD, ILPPD dan EKPPD Kota Madiun	102.340.000,00	98.581.796,00
		Output : Dokumen LPPD, ILPPD, dan EKPPD Kota Madiun Tahun 2015	3 Dokumen	3 Dokumen
		Outcome : Prosentase penyampaian laporan kinerja pemerintahan tepat waktu	100%	100%
	9	Kegiatan Koordinasi Penyusunan Memori Serah Terima Jabatan	15.000.000,00	14.598.753,00
		Output : Dokumen Memori Serah Terima Jabatan	1 Dokumen	1 Dokumen
		Outcome : Prosentase penyampaian laporan kinerja pemerintahan tepat waktu	100%	100%
6		program peningkatan kerjasama antar daerah pemerintah daerah	251.515.000,00	246.251.770,00
	1	Kegiatan Koordinasi Penyusunan MoU	20.313.000,00	19.758.372,00
		Output : Jumlah MoU	5 dokumen	9 dokumen
		Outcome : Frekuensi Kerjasama dengan daerah lain	12 kali	12 kali
	2	Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama antar Daerah di Bidang Ekonomi (Pameran Apeksi)	59.813.000,00	59.227.843,00
		Output : Rakernas APEKSI, Muskomwil APEKSI dan Rakor JKPI	3 kali	3 kali
		Outcome : Frekuensi Kerjasama dengan daerah lain	4 kali	4 kali
	3	Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Bidang Pelayanan Publik (Pawitan Dirogo)	26.163.000,00	23.726.008,00
		Output : Rakor Pawitan Dirogo	1 kali	1 kali
		Outcome : Frekuensi Kerjasama dengan daerah lain	4 kali	4 kali
	4	Kegiatan Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintahan non Departemen/Luar Negeri	145.226.000,00	143.539.547,00
		Output : Jumlah penerimaan kunjungan kerja di Kota madiun	20 kali	31 kali
		Outcome : Frekuensi Kerjasama dengan daerah lain	4 kali	5 kali

❖ Bagian Hukum

NO		URAIAN	TARGET	REALISASI
1	program pelayanan administrasi perkantoran		368.624.000,00	324.309.192,00
	1	kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	238.624.000,00	195.613.102,00
		Output : Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	1 paket	1 paket
		Outcome : Akuntabilitas Kinerja Bagian Hukum	B	BB
	2	kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	130.000.000,00	128.696.090,00
		Output : Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	60 kali	60 kali
		Outcome : Akuntabilitas Kinerja Bagian Hukum	B	BB
2	program pemeliharaan barang milik daerah		40.009.600,00	31.126.450,00
	1	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan	2.500.000,00	0,00
		Output :Persentase barang inventarisasi dalam kondisi baik	1 unit	0,00
		Outcome : Akuntabilitas Kinerja Bagian Hukum	B	
	2	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas	20.547.600,00	16.253.950,00
		Output :Jumlah kendaraan dinas	1 unit	1 unit
		Outcome : Akuntabilitas Kinerja Bagian Hukum	B	BB
	3	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala sarana prasarana kantor	16.962.000,00	14.872.500,00
		Output : Persentase barang inventarisasi dalam kondisi baik	26 unit	26 unit
		Outcome : Akuntabilitas Kinerja Bagian Hukum	B	BB
3	program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		2.600.000,00	2.500.000,00
	1	kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor	2.600.000,00	2.500.000,00
		Output :Jumlah sarana dan prasarana kantor	2 buah	2 buah
		Outcome : Akuntabilitas Kinerja Bagian Hukum	B	BB
4	program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		33.122.880,00	32.274.974,00
	1	kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	33.122.880,00	32.274.974,00
		Output :Jumlah dokumen	5 dokumen	5 dokumen
		Outcome : Akuntabilitas Kinerja Bagian Hukum	B	BB
5	program penataan peraturan perundang-undangan		1.031.424.964,00	
	1	Kegiatan Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Baru, Lebih Tinggi dan Keserasian antar Peraturan Perundang-undangan Daerah	249.137.120,00	212.614.499,00
		Output : Jumlah raperda/perda, dokumen kompilasi dan sosialisasi	3 jenis	3 jenis

NO		URAIAN	TARGET	REALISASI
		Outcome :Persentase perda yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan	100%	100%
	2	Kegiatan Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan	466.295.464,00	390.963.764,00
		Output :Jumlah pembinaan kadarkum,penyuluhan hokum dan penyelesaian kasus sengketa hukum	3 jenis	3 jenis
		Outcome : Persentase perda yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan	100%	100%
	3	Kegiatan Publikasi Peraturan Perundang-undangan	315.992.380,00	314.203.886,00
		Output : Jumlah himpunan lembaran daerah, bulletin informasi, lembaran lepas perda dan buku peraturan perundang-undangan	3 jenis	3 jenis
		Outcome : Persentase perda yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan	100%	100%

❖ Bagian Administrasi Pembangunan

NO	PROGRAM KEGIATAN		ALOKASI	REALISASI
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		490.034.780	483.862.122
	1	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	334.894.780	330.550.722
		Output : Jenis Barang dan Jasa Kantor	6 paket	6 paket
		Outcome : Nilai Akuntabilitas Bagian Administrasi Pembangunan	100 %	100 %
	2	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	155.140.000	153.311.400
		Output : : Jumlah koordinasi dan onsultasi keluar daerah	1 Tahunan	1 Tahunan
		Outcome Nilai Akuntabilitas Bagian Administrasi Pembangunan	100 %	100 %
2	Program pemeliharaan barang milik daerah		361.680.000	355.631.870
	1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan	317.000.000	313.369.500
		Output : Jumlah Gedung yang dipelihara	1 gedung	1 gedung
		Outcome : Nilai Akuntabilitas Bagian Administrasi Pembangunan	100 %	100 %
	2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	24.680.000	22.267.070
		Output : Jenis/Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	7	7
		Outcome : Nilai Akuntabilitas Bagian Administrasi Pembangunan	100 %	100 %
	3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kantor	20.000.000	19.995.300
		Output : Jenis/Jumlah sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	31	31
		Outcome : Nilai Akuntabilitas Bagian Administrasi Pembangunan	100 %	100 %
3	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		232.700.000	231.928.000
	1	Kegiatan Pengadaan Sarana & Prasarana	232.700.000	231.928.000

NO	PROGRAM KEGIATAN	ALOKASI	REALISASI
	Kantor		
	Output : Jenis/Jumlah sarana dan prasarana	28 unit	28 unit
	Outcome : Nilai Akuntabilitas Bagian Administrasi Pembangunan	100 %	100 %
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	21.752.000	21.738.229
1	Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	21.752.000	21.738.229
	Output : Jumlah Dokumen	5 dokumen	5 dokumen
	Outcome : Nilai Akuntabilitas Bagian Administrasi Pembangunan	100 %	100 %
5	Program Peningkatan Fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa	701.985.760	658.901.293
1	Kegiatan Penyusunan Buku Petunjuk Operasional	55.184.000	44.454.493
	Output : Jumlah dokumen yang disusun	1 dokumen	1 dokumen
	Outcome : Prosentase jumlah pengadaan barang/jasa yang terealisasi	100 %	100 %
2	Kegiatan Pengendalian Administrasi Pengadaan Barang/Jasa	140.752.000	132.023.857
	Output : Jumlah personil PD yang memiliki pengetahuan dengan benar dan aktif terlibat proses pengadaan barang/jasa	150 orang	150 orang
	Outcome : Prosentase jumlah pengadaan barang/jasa yang terealisasi	100 %	100 %
3	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan	117.903.000	116.702.201
	Output : Buku Laporan Bulanan	20 laporan	20 laporan
	Outcome : Jumlah SKPD yang melaporkan Progres Fisik tepat waktu sesuai jadwal pelaksanaan	100 %	100 %
4	Kegiatan Penyusunan Standar Harga Barang Kebutuhan dan Standar Kegiatan Konstruksi	211.486.000	198.096.104
	Output : Jumlah dokumen yang disusun	1 dok	1 dok
	Outcome : Prosentase Jumlah pengadaan barang/jasa yang terealisasi	100 %	100 %
5	Kegiatan Operasional ULP	176.660.760	167.624.638
	Output : Jumlah paket pengadaan barang/jasa yang dilelang	150 paket	150 paket
	Outcome : Prosentase Jumlah pengadaan barang/jasa yang terealisasi	100 %	100 %
	Jumlah	1.808.152.540	1.752.061.514

❖ Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI
1	program pelayanan administrasi perkantoran	458.257.540,00	330.601.042,00
1	kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	278.257.540,00	150.601.042,00
	Output : Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8 Paket	8 Paket
	Outcome : Persentase Terlaksananya Administrasi Perkantoran	100 %	100 %
2	kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	180.000.000,00	180.000.000,00

NO		URAIAN	TARGET	REALISASI
		Output : Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	50 kali	50 kali
		Outcome : Presentase Terlaksananya Administrasi Perkantoran	100 %	100 %
2	program pemeliharaan barang milik daerah		33.042.000,00	25.208.452,00
	1	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan	2.000.000,00	229.500,00
		Output : Jumlah Gedung	1 unit	1 unit
		Outcome : Presentase Barang Inventaris dalam Kondisi Baik	100 %	100 %
	2	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas	21.842.000,00	19.498.452,00
		Output : Jumlah Kendaraan Dinas	11	10
		Outcome : Presentase Barang Inventaris dalam Kondisi Baik	100%	90,9%
	3	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala sarana prasarana kantor	9.200.000,00	5.480.500,00
		Output : Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor	8 Laptop, 3 Unit AC 3 unit Printer, 1 Unit Mesn Ketik	8 Laptop, 3 Unit AC 3 unit Printer
		Outcome : Presentase Barang Inventaris dalam Kondisi Baik	100 %	93,3%
3	program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		14.093.760,00	8.966.381,00
	1	kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	14.093.760,00	8.966.381,00
		Output : Jumlah Dokumen yang DIkerjakan	5 Dokumen (RKT, Renja, PK, Lap.Triwulan, LKJ)	5 Dokumen
		Outcome : Presentase Dokumen Perencanaan/Laporan yang disusun Tepat Waktu	100 %	100%
4	program stabilisasi ekonomi daerah		1.169.000.000,00	858.396.669,00
	1	Kegiatan Penyelenggaraan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID)	150.000.000,00	120.948.360,00
		Output : Jumlah Informasi yang disampaikan	3 jenis	3 jenis
		Outcome : Jumlah Kegiata Pendukung Stabilitas Ekonomi	4 kegiatan	4 kegiatan
	2	Kegiatan Pembinaan BUMD	150.000.000,00	106.567.187,00
		Output : Kontribusi PAD	3 BUMD	3 BUMD
		Outcome : Jumlah Kegiatan Pendukung Stabilitas Ekonomi	4 Kegiatan	4 Kegiatan
	3	Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi atas Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Cukai	150.000.000,00	73.643.000,00
		Output : Jumlah Pemantauan dan Evaluasi	12 Kali	12 kali
		Outcome : Jumlah Kegiatan Pendukung Stabilitas Ekonomi	6 Kegiatan	6 kegiatan
	4	Kegiatan Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Cukai Kepada Masyarakat dan atau Pemangku	350.000.000,00	324.200.000,00

NO		URAIAN	TARGET	REALISASI
		Kepentingan melalui forum tatap muka, media elektronik, media cetak		
		Output : Jumlah Informasi yang Disampaikan	3 Macam	3 macam
		Outcome : Jumlah Kegiatan Pendukung Stabilitas Ekonomi	6 Kegiatan	6 Kegiatan
	5	Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah	309.000.000,00	182.609.043,00
		Output : Jumlah Kegiatan Pengembangan	3 Kegiatan	3 Kegiatan
		Outcome : Jumlah Kegiatan Pendukung Stabilitas Ekonomi	4 kegiatan	4 kegiatan
	6	Kegiatan Sosialisasi Kebijakan atau Ketentuan di Bidang Lembaga Keuangan	60.000.000,00	50.429.079,00
		Output : Jumlah LKM yang sesuai kriteria	200 badan hukum	200 badan hukum
		Outcome : Jumlah Kegiatan Pendukung Stabilitas Ekonomi	6 Kegiatan	6 Kegiatan
5	program peningkatan kualitas hidup beragama		4.080.000.000,00	3.351.987.593,00
	1	Kegiatan Pemberangkatan dan Penjemputan Haji	250.000.000,00	167.850.000
		Output :Jumlah Calon Jamaah Haji yang Terdaftar	250 Orang	197 Orang
		Outcome : Jumlah Kegiatan Keagamaan yang difasilitasi	2 Kali	2 kali
	2	Kegiatan Peningkatan fasilitasi peringatan hari besar keagamaan	3.580.000.000,00	3.019.573.593,00
		Output : Jumlah PHBI dan Kegiatan Keagamaan Lainnya	13 Kegiatan	13
		Outcome : Jumlah Kegiatan Keagamaan yang difasilitasi	13 Kegiatan	13
	3	Kegiatan pengiriman khafilah MTQ	250.000.000,00	164.564.000,00
		Output : Jumlah Peserta yang Menjadi Juara Tingkat Kota	10 Orang	11 Orang
		Outcome : Jumlah Kegiatan Keagamaan yang difasilitasi	2 Kali	2 kali

❖ Bagian Organisasi

NO		URAIAN	TARGET	REALISASI
1	program pelayanan administrasi perkantoran		478.452.516,00	472.557.687,00
	1	kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	186.765.516,00	180.919.552,00
		Output : Jumlah peralatan penunjang	9	9
		Outcome : Nilai Akuntabilitas Kinerja	BB	B
	2	kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	291.687.000,00	291.638.135,00
		Output : Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	42	42
		Outcome : Nilai Akuntabilitas Kinerja	BB	B
2	program pemeliharaan barang milik daerah		38.500.000,00	32.650.153,00
	1	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan	2.000.000,00	1.667.250,00
		Output : Jumlah gedung yang	1	1

NO		URAIAN	TARGET	REALISASI
		representatif		
		Outcome : Nilai Akuntabilitas Kinerja	BB	B
	2	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas	21.500.000,00	15.982.903,00
		Output : Jumlah kendaraan dinas dalam kondisi baik	6	6
		Outcome : Nilai Akuntabilitas Kinerja	BB	B
	3	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala sarana prasarana kantor	15.000.000,00	15.000.000,00
		Output : Jumlah sarana dan prasarana dalam kondisi layak pakai	5	5
		Outcome : Nilai Akuntabilitas Kinerja	BB	B
3	program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		68.000.000,00	67.000.000,00
	1	kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor	68.000.000,00	67.0000.000,00
		Output : Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	3	3
		Outcome : Nilai Akuntabilitas Kinerja	BB	B
4	program peningkatan ketatalaksanaan perangkat daerah		732.228.000,00	700.883.839,00
	1	Kegiatan Evaluasi Pelayanan Publik	288.123.000,00	271.513.608,00
		Output : Jumlah dokumen hasil evaluasi pelayanan publik	14	14
		Outcome : Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemkot	BB	B
	2	Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Ketatalaksanaan	124.820.000,00	120.773.662,00
		Output : Jumlah dokumen Hasil pembinaan dan evaluasi yang disusun	1	1
		Outcome : Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemkot Madiun	BB	B
	3	kegiatan pembinaan pelayaan publik	319.285.000,00	308.596.569,00
		Output : Jumlah Perangkat Daerah yang dibina	28	28
		Outcome : Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemkot	BB	B
5	program pengembangan kinerja dan kelembagaan perangkat daerah		1.024.657.000,00	867.649.175,00
	1	Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	310.000.000,00	191.591.446,00
		Output : Jumlah dokumen yang disusun	3	3
		Outcome : Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemkot	BB	B
	2	Kegiatan Pembinaan Kelompok Budaya Kerja	200.000.000,00	181.455.595,00
		Output : Jumlah Aparatur yang dibina dan keikutsertaan Gelar Budaya Kinerja	203	203
		Outcome : Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemkot	BB	B
	3	Kegiatan Pelaksanaan Reformasi	114.657.000,00	110.388.079,00

NO		URAIAN	TARGET	REALISASI
		Birokrasi		
		Output : Jumlah laporan pelaksanaan reformasi birokrasi	1	1
		Outcome : Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemkot	BB	B
	4	kegiatan penataan susunan organisasi dan tata kerja (SOTK) perangkat daerah di lingkungan pemerintah kota madiun	200.000.000,00	194.950.444,00
		Output : Jumlah rancangan perda/perwal SOTK yang disusun	6	6
		Outcome : Nilai akuntabilitas kinerja Pemkot	BB	B
	5	kegiatan analisis jabatan	200.000.000,00	189.263.611
		Output : Jumlah dokumen yang disusun	28	28
		Outcome : Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemkot	BB	B

❖ Bagian Umum

NO		URAIAN	TARGET	REALISASI
1	program pelayanan administrasi perkantoran		6.687.797.770,00	5.906.104.281,00
	1	kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	4.269.926.770,00	3.508.425.032,00
		Output : Jumlah Belanja Pegawai dan Belanja Barang Jasa	4 BP 19 BBJ	4 BP 19 BBJ
		Outcome : Akuntabilitas Kinerja Bagian Umum	100 %	100 %
	2	kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	2.417.871.000,00	2.397.679.249,00
		Output : Jumlah Koordinasi & Konsultasi Keluar Daerah	563	701
		Outcome : Akuntabilitas Kinerja Bagian Umum	100 %	100 %
2	program pemeliharaan barang milik daerah		3.461.009.400,00	2.544.651.688,00
	1	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan	479.369.500,00	417.977.114,00
		Output : Jumlah Pekerjaan	5 paket	5 paket
		Outcome : Akuntabilitas Kinerja Bagian Umum	100 %	100 %
	2	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas	1.131.220.000,00	685.554.081,00
		Output : Jumlah Kendaraan Dinas	38 unit	38 unit
		Outcome : Akuntabilitas Kinerja Bagian Umum	100 %	100 %
	3	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala sarana prasarana kantor	230.880.000,00	166.001.000,00
		Output : Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor	10 Jenis	10 Jenis
		Outcome : Akuntabilitas Kinerja Bagian Umum	100 %	100 %
	4	kegiatan pemeliharaan rumah dinas	1.619.539.900,00	1.275.119.493,00
		Output : Jumlah Rumah Dinas	4 RD	4 RD
		Outcome : Akuntabilitas Kinerja Bagian Umum	100 %	100 %
3	program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		8.430.568.688,00	7.719.607.349,00
	1	kegiatan pengadaan sarana dan	3.979.014.280,00	3.555.508.564,00

NO		URAIAN	TARGET	REALISASI
		prasarana kantor		
		Output : Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor	113 unit	113 unit
		Outcome : Akuntabilitas Kinerja Bagian Umum	100 %	100 %
	2	kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	4.054.521.680,00	3.781.012.224,00
		Output : Jumlah Pakaian Dinas	3.725 potong	3.725 potong
		Outcome : Akuntabilitas Kinerja Bagian Umum	100 %	100 %
	3	kegiatan rehab gedung dan bangunan	397.032.728,00	383.086.561,00
		Output : Jumlah Gedung	2 Gedung	2 Gedung
		Outcome : Akuntabilitas Kinerja Bagian Umum	100 %	100 %
4		program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	145.008.000,00	126.900.606,00
	1	kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	145.008.000,00	126.900.606,00
		Output :Jumlah Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen
		Outcome : Akuntabilitas Kinerja Bagian Umum	100 %	100 %
5		program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah	3.404.532.480,00	3.147.236.052,00
	1	Kegiatan Keprotokolan acara Pemerintah Kota	3.140.426.160,00	2.898.483.821,00
		Output : Jumlah Acara HBN dan Kegiatan Pemkot Madiun	537 kegiatan & 1 pelatihan	537 kegiatan & 1 pelatihan
		Outcome : Akuntabilitas Kinerja Bagian Umum	100 %	100 %
	2	Kegiatan Peningkatan Kesegaran Jasmani sekretariat	264.106.320,00	248.752.231,00
		Output : Jumlah Senam Yang Dilaksanakan	45 kali	45 kali
		Outcome : Akuntabilitas Kinerja Bagian Umum	100 %	100 %

5. Alokasi dan Realisasi Belanja

❖ Bagian Administrasi Pemerintahan Umum

No	Uraian	Alokasi	Realisasi
1.	Unsur Staf		
	Belanja Tidak Langsung	Rp.439.757.500,00	Rp. 411.154.110,00
	Belanja Langsung	Rp.2.337.058.000,00	Rp. 2.143.057.556,00
	Total Belanja OPD	Rp. 2.776.815.500,00	Rp. 2.554.211.666,00

❖ Bagian Hukum

No	Uraian	Alokasi	Realisasi
1.	Urusan Staf		
	Belanja Tidak Langsung	479.055.000,00	454.605.771,00
	Belanja Langsung	1.475.781.444,00	1.307.992.765,00
	Total Belanja	1.954.836.444,00	1.762.598.536,00

❖ Bagian Administrasi Pembangunan

No	Uraian	Alokasi	Realisasi
1.	Urusan Staf		
	Belanja Tidak Langsung	1.208.185.000	1.145.681.920
	Belanja Langsung	1.808.152.540	1.752.061.514
	Total Belanja	3.016.337.540	2.897.743.434

❖ Bagian Administrasi Perekonomian da Kesejahteraan Rakyat

No	Uraian	Alokasi	Realisasi
1.	Unsur Staf		
	Belanja Tidak Langsung	Rp. 556.175.000	Rp. 445.001.266
	Belanja Langsung	Rp. 5.754.393.300	Rp. 4.575.160.137
	Total Belanja	Rp. 6.310.568.300	Rp. 5.020.161.403

❖ Bagian Organisasi

No	Uraian	Alokasi	Realisasi
1.	Unsur Staf		
	Belanja Tidak Langsung	481.967.500,-	389.533.694,-
	Belanja Langsung	2.341.837.516,-	2.140.740.854,-
	Total Belanja	2.823.805.016,-	2.530.274.548,-

❖ Bagian Umum

No	Uraian	Alokasi	Realisasi
1.	Urusan Unsur Staf		
	Belanja Tidak Langsung	9.873.118.000,00	9.393.763.274,00
	Belanja Langsung	22.128.916.338,00	19.444.499.976,00
	Total Belanja	32.002.034.338,00	28.838.263.250,00

6. Asset yang Dikuasai

No.	Urusan	Nilai Asset	Keterangan
	Unsur Staf	Rp. 317.685.232,44	Bag. Adm. Pemerintahan Umum
	Unsur Staf	Rp. 668.709.880,00	Bagian Hukum
	Unsur Staf	Rp. 1.630.867.504,00	Bagian Adm. Pembangunan
	Unsur Staf	Rp. 219.238.870,00	Bag. Adm. Perekonomian
	Unsur Staf	Rp. 997.267.083,08	Bagian Organisasi
	Unsur Staf	Rp. 55.293.387.242,05	Bagian Umum

e. Proses Perencanaan Pembangunan Daerah

Pelaksanaan RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024 setiap tahun dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan yang memuat prioritas program dan kegiatan yang dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Madiun yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan hingga kota. Program prioritas pembangunan daerah memuat program-program yang berorentasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan sebagai penjabaran dari RPJMD pada tahun yang direncanakan. Rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju

dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD, memuat program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah, disertai perhitungan kebutuhan dana bersumber dari APBD untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan. RKPD merupakan bahan utama penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara, serta bahan penyusunan Rencanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

f. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

❖ Bagian Administrasi Pemerintahan Umum

No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1.	Gedung	1	Baik
2.	Kendaraan	5	Baik
3.	Alat Kantor dan Rumah Tangga	161	Baik
4.	Alat Studio dan Alat Komunikasi	4	Baik
5.	Alat Laboratorium	1	Baik
6.	Monumen	1	Baik

❖ Bagian Hukum

No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1.	Gedung		
2.	Kendaraan	7	5 baik,2 rusak
3.	Laptop	8	7 baik,1 rusak
4	PC unit	9	3 baik, 6 rusak
5.	Televisi	1	Baik
6.	Mesin ketik elektrik	1	Baik
7.	Printer	6	4 baik,2 rusak
8.	Brankas	1	Baik
9.	Meja kursi tamu	1	Baik

❖ Bagian Administrasi Pembangunan

No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1	Mobil	1	
2	Sepeda Motor	6	
3	Laptop	34	
4	Komputer	8	
5	Scener	2	
6	Printer	25	
7	Kamera	4	
8	Handycam	1	
9	LCD Proyektor	5	
10	Layar LCD	5	
11	AC	12	
12	Asustor	1	
13	Internet Jaringan	1	
14	Rak besi	10	
15	Lemari Besi	6	
16	Meja Kursi Tamu (size)	3	
17	Filling Besi	14	
18	Lemari Kayu/kaca	7	
19	Rak kayu/rak kaca	7	
20	Meja kerja eselon III	2	

No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
21	Meja Telepon	2	
22	Meja komputer	7	
23	Meja panjang	2	
24	Meja staf/kasubag/rapat	27	
25	Kursi putar	6	
26	Kursi putar staf	10	
27	Kursi kayu rotan	15	
28	Kursi lipat elephan	5	
29	Kursi biru pokja	62	
30	Kursi Tunggu	1	
31	UPS	1	
32	Telepon	4	
33	Dispenser	2	
34	Kipas Angin	4	
35	Papan Tulis Biasa	3	
36	Headset	1	
37	Televisi	4	
38	Mesin Ketik	4	
39	Tablet	1	
40	Lemari Es	1	
41	Sepeda	1	
42	Bangunan Gedung	1	
43	Wireless	1	
44	Dry Box	1	
45	Brankas	1	

❖ Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat

No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1.	Gedung	1	Baik
2.	Kendaraan	11	Baik
3.	Alat Kantor	54	Baik
4.	Foto Presiden dan Wapres	1	Baik
5.	AC	1	Baik
6.	TV	1	Baik
7	Lemari Es	1	Baik

❖ Bagian Organisasi

No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1.	Kendaraan (Mobil)	1	Baik
2.	Kendaraan (Sepeda Motor)	5	Baik
3.	Sepeda	1	Baik
4.	AC	7	Baik
5.	Mesin Ketik	2	Baik
6.	Lemari Besi	1	Baik
7.	Rak Besi/Metal	2	Baik
8.	Rak Kayu	1	Baik
9.	Filling Besi/Metal	7	Kurang Baik
10.	Brand Kertas	1	Baik
11.	Alat Penghancur Kertas	1	Baik
12.	Papan Tulis	1	Baik
13.	White Board	3	Baik
14.	Overhead Projector	1	Baik
15.	Meja Kayu/Rotan	5	Baik
16.	Kursi Besi/Metal	2	Baik
17.	Kursi Putar	1	Baik
18.	Kursi Lipat	2	Kurang Baik
19.	Meja Komputer	2	Baik
20.	Meja ½ Biro	1	Baik
21.	Sofa	1	Baik
22.	Meubelair lain-lain	3	Baik

No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
23.	Jam Mekanis	1	Baik
24.	Kipas Angin	1	Baik
25.	Televisi	2	Baik
26.	Tangga Aluminium	1	Baik
27.	Dispenser	1	Baik
28.	Handycam	1	Baik
29.	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1	Baik
	PC Unit		
30.	Laptop	3	Baik
31.	Notebook	3	Kurang Baik
32.	Printer	6	Baik
33.	Monitor	17	Baik
34.	Scanner	1	Baik
35.	Peralatan Personal Komputer Lain-lain	1	Baik
36.	Server	1	Baik
37.	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	Baik
38.	Meja Tamu Biasa	1	Baik
39.	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1	Baik
40.	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	2	Baik
41.	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	1	Baik
42.	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	2	Kurang Baik
43.	Proyektor/Attachment		
	Unintemuptible Power Supply (UPS)	2	Baik
44.	Camera electronic		
45.	Tripod Camera	1	Baik
	Layar Film	1	Baik
46.	Pesawat Telepon		
47.	Gambar Presiden	1	Baik
48.	Tape Recorder	1	Baik
		1	Baik

❖ Bagian Umum

No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1.	Gedung	57 Lokasi	Baik
2.	Kendaraan	123 Unit	Baik
3.	Alat Kantor	2.980 Unit	Baik
	..... (lainnya)		

7. FUNGSI PENUNJANG UNSUR PENGAWAS

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Inspektorat menyelenggarakan Fungsi Penunjang Unsur Pengawas.

b. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Fungsi Penunjang Unsur Pengawas yang dilaksanakan Inspektorat di Kota Madiun pada Tahun Anggaran 2019, yaitu sebagai berikut:

Tabel III.46
Program dan Kegiatan Fungsi Penunjang Unsur Pengawas
Inspektorat di Kota Madiun Tahun 2019

No	Program	Kegiatan	
1	program pelayanan administrasi perkantoran	1	kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor
		2	kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah
2	program pemeliharaan barang milik daerah	1	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan
		2	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas
		3	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala sarana prasarana kantor
3	program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1	kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor
4	program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1	kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah
5	program peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	1	Kegiatan Evaluasi Sakip PD
		2	Kegiatan Pengendalian Gratifikasi
		3	Kegiatan Verifikasi Pelaksanaan Reformasi dan Birokrasi
		4	kegiatan optimalisasi saber pungli
6	program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	1	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala
		2	Kegiatan Reviu Atas Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Pelaporan
7	program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	1	Kegiatan Bimtek Peningkatan SDM Aparatur Pengawasan

c. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Jumlah Pegawai	Kepangkatan	Tingkat Pendidikan	Struktural/ Eselon	Fungsional	Staf
38	Gol I = - Gol II = 3 Gol III = 25 Gol IV = 9	SD = - SMP = - SMA = 4 D3 = - D4/ S1 = 31 S2 = 3	II = 1 III = 4 IV = 1 V =	21	11

d. Alokasi dan Realisasi Anggaran

1. Realisasi Program dan Kegiatan

NO		URAIAN	TARGET	REALISASI
1	program pelayanan administrasi perkantoran		896.114.000,00	859.238.206,00
	1	kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	467.131.000,00	430.255.206,00
		Output : Jumlah jasa,peralatan dan perlengkapan kantor	6 jenis	6 jenis
		Outcome : Akuntabilitas kinerja Inspektorat bernilai baik	BB (80)	A(83,72)
	2	kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	428.983.000,00	428.983.000,00
		Output : Jumlah perjalanan dinas keluar daerah	57 kali	77 kali
		Outcome : Akuntabilitas kinerja Inspektorat bernilai baik	BB (80)	A(83,72)
2	program pemeliharaan barang milik daerah		56.892.000,00	56.493.800,00
	1	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan	2.000.000,00	2.000.000,00
		Output : Jumlah bangunan gedung/kantor yang terpelihara/bahan pemeliharaan yang terbeli	1 paket	1 paket
		Outcome : Akuntabilitas kinerja Inspektorat bernilai baik	BB (80)	A(83,72)
	2	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas	24.892.000,00	24.493.800,00
		Output : Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	1 unit	1 unit
		Outcome : Akuntabilitas kinerja Inspektorat bernilai baik	BB (80)	A(83,72)
	3	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala sarana prasarana kantor	30.000.000,00	30.000.00,00
		Output : Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara	5 jenis	5 jenis
		Outcome : Akuntabilitas kinerja Inspektorat bernilai baik	BB (80)	A(83,72)
3	program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		110.600.000,00	110.275.000,00
	1	kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor	110.600.000,00	110.275.000,00
		Output : jumlah sarana dan prasarana kntor yang terpenuhi	2 jenis	2 jenis
		Outcome : Akuntabilitas kinerja Inspektorat bernilai baik	BB (80)	A(83,72)
4	program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		92.348.000,00	88.087.276,00
	1	kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	92.348.000,00	88.087.276,00
		Output : jumlah dokumen evaluasi dan laporan	11 dokumen	11 dokumen
		Outcome : Akuntabilitas kinerja Inspektorat bernilai baik	BB (80)	A(83,72)

NO		URAIAN	TARGET	REALISASI
5		program peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	860.164.000,00	834.734.026,00
	1	Kegiatan Evaluasi Sakip PD	81.290.000,00	80.830.000,00
		Output : Jumlah OPD yang dievaluasi dokumen SAKIPnya	34 OPD	34 OPD
		Outcome : Persentase OPD yang telah menerapkan SAKIP	100%	100%
	2	Kegiatan Pengendalian Gratifikasi	70.900.000,00	60.571.550,00
		Output : Jumlah dokumen laporan Gratifikasi	1 dokumen	1 dokumen
		Outcome : Persentase OPD yang telah menerapkan SAKIP	100%	100%
	3	Kegiatan Verifikasi Pelaksanaan Reformasi dan Birokrasi	190.974.000,00	184.852.476,00
		Output : Jumlah dokumen hasil penilaian , verifikasi dan evaluasi	3 dokumen	3 dokumen

2. Alokasi dan Realisasi Belanja

No	Uraian	Alokasi	Realisasi
1.	Urusan Pengawasan		
	Belanja Tidak Langsung	3.714.770.000	3.553.274.630
	Belanja Langsung	2.892.946.000	2.774.075.799
	Total Belanja	6.607.716.000	6.327.350.429

3. Asset yang Dikuasai

No.	Urusan	Nilai Asset	Keterangan
1.	Pengawasan	Rp. 2.036.351.425,00	

e. Proses Perencanaan Pembangunan Daerah

Penyusunan Renja Perangkat Daerah diawali dengan menyusun rancangan awal yang berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan, untuk menjamin kesesuaiannya.

Penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah dan pengusulan kegiatan baru/alternatif dilaksanakan pada forum Perangkat Daerah, kemudian menjadi Rancangan Renja yang selanjutnya disampaikan kepada Bappeda untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD dan untuk menjamin keselarasan Rancangan Renja dengan Rancangan RKPD.

Verifikasi oleh Bappeda digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah. Setelah tersusun rancangan akhir Renja Perangkat Daerah oleh Bappeda disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan sebagai Peraturan Kepala Daerah.

Renja Perangkat Daerah kemudian digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah.

f. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1.	Gedung	-	-
2.	Kendaraan	28 unit	4 unit RR
3.	Alat Kantor dan RT	521 buah	84 buah RB
4.	Alat Bengkel	10 buah	-
5.	Alat Pertanian	5 buah	-
6.	Alat Studio dan Komputer	41buah	-
7.	Alat Laboratorium	2 buah	-

g. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern pada OPD

BPKP Pusat telah melaksanakan Quality Assurance (QA) terhadap Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kota Madiun dengan hasil QA 3,0375 (terdefinisi). Sampai dengan saat ini Inspektorat Kota Madiun bekerjasama dengan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur terkait Monitoring Pelaksanaan SPIP Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun. Sedangkan saat ini Inspektorat Kota Madiun dalam proses melaksanakan QA (Quality Assurance) terhadap Sistem Pengendalian Intern pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota dan masih mengalami kendala sebagai berikut :

- Bukti pendukung parameter sub unsur SPIP belum sepenuhnya dipenuhi oleh Perangkat Daerah yang dimonitoring, sehingga Tim monitoring Pelaksanaan SPIP kesulitan dalam melaksanakan karena kekurangan data dukung;
- Perangkat Daerah belum mendokumentasikan kegiatan yang termasuk dalam sub unsur SPIP dengan baik dan terstruktur;
- Tim Assesor APIP masih perlu peningkatan kualitas untuk persiapan sebagai Tim penilaian mandiri penyelenggaran SPIP di lingkungan Pemerintah Kota Madiun

Solusi :

- Mengoptimalkan sub unsur yang menjadi bahan penilaian terhadap Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun dan mendokumentasikan dengan baik terhadap bukti pendukung atas pemenuhan parameter sub unsur SPIP dalam bentuk softcopy dan hardcopy secara rapi dan terstruktur;
- Mengadakan Bimbingan Teknis guna mengoptimalkan kualitas Tim Assesor APIP untuk persiapan sebagai Tim penilaian mandiri penyelenggaran SPIP di lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

8. FUNGSI PENUNJANG UNSUR PELAYANAN ADMINISTRASI DPRD

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Sekretariat DPRD menyelenggarakan Fungsi Penunjang Unsur Pelayanan Administrasi DPRD.

b. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Fungsi Penunjang Unsur Pelayanan Administrasi DPRD yang dilaksanakan Sekretariat DPRD di Kota Madiun pada Tahun Anggaran 2019, yaitu sebagai berikut:

Tabel III.47
Program dan Kegiatan Fungsi Penunjang Unsur Pelayanan Administrasi DPRD di Kota Madiun Tahun 2019

No	Program	Kegiatan	
1	program pelayanan administrasi perkantoran	1	kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor
		2	kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah
2	program pemeliharaan barang milik daerah	1	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan
		2	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas
		3	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala sarana prasarana kantor
		4	kegiatan pemeliharaan rumah dinas
3	program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1	kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor
		2	kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
		3	kegiatan pembangunan gedung
4	program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1	kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah
5	program peningkatan kapasitas DPRD	1	Kegiatan Fraksi
		2	Kegiatan Fasilitasi Penyebarluasan Informasi Kegiatan DPRD
		3	Kegiatan Hiereng/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama
		4	Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
		5	Kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD
		6	Kegiatan Peningkatan Kaapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
		7	Kegiatan Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan
		8	Kegiatan Reses
		9	Kegiatan Rapat-Rapat Paripurna

c. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Jumlah Pegawai	Kepangkatan	Tingkat Pendidikan	Struktural/ Eselon	Fungsional	Staf
PNS = 24 Honorer = 4 Upahan = 9	Gol I = 0 Gol II = 5 Gol III = 16 Gol IV = 3	SD = 0 SMP = 0 SMA = 5 D3 = 0 D4/ S1 = 17 S2 = 2	II = 1 III = 2 IV = 6 V = 0	3 (Perancang Peraturan Perundang-Undangan)	28

d. Alokasi dan Realisasi Anggaran

1. Realisasi Program dan Kegiatan

NO		URAIAN	TARGET	REALISASI
1	program pelayanan administrasi perkantoran		6.405.063.000,00	4.747.424.768,00
	1	kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	3.477.531.000,00	2.170.206.976,00
		Output : Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	14 paket	14 paket
		Outcome : Persentase terlaksananya administrasi perkantoran	100 %	100%
	2	kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	2.927.532.000,00	2.577.217.792,00
		Output : Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	47 kali	164 kali
		Outcome : Persentase terlaksananya administrasi perkantoran	100 %	348 %
2	program pemeliharaan barang milik daerah		1.752.468.258,00	1.084.677.062,00
	1	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan	518.834.658,00	480.048.416,00
		Output : Jumlah gedung dan bangunan yang dipelihara	2 unit	2 unit
		Outcome : Persentase barang inventarisasi dalam kondisi baik	100 %	100 %
	2	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas	281.603.600,00	238.257.505,00
		Output : Jumlah kendaraan yang dirawat	5 unit	5 unit
		Outcome : Persentase barang inventarisasi dalam kondisi baik	100 %	100%
	3	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala sarana prasarana kantor	386.500.000,00	135.025.754,00
		Output : Jumlah sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	10 jenis	10 jenis
		Outcome : Persentase barang inventarisasi dalam kondisi baik	100%	100%
	4	kegiatan pemeliharaan rumah dinas	565.530.000,00	231.345.387,00
		Output : Jumlah rumah dinas yang dikelola	1 unit	1 unit
		Outcome : Persentase barang inventarisasi dalam kondisi baik	100%	100%

NO		URAIAN	TARGET	REALISASI
3	program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		16.915.181.000,00	15.892.486.913,00
	1	kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor	15.298.635.000,00	14.365.212.213,00
		Output : Jumlah sarana dan prasarana yang akan dibeli	10 jenis	10 jenis
		Outcome : Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	100%
	2	kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	335.836.000,00	251.554.700,00
		Output : Jumlah pakaian dinas yang akan dipakai DPRD	5 jenis	5 jenis
		Outcome : Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%
	3	kegiatan pembangunan gedung	1.280.710.000,00	1.275.720.000,00
		Output : Jumlah gedung yang akan dibangun	1 unit	1 unit
		Outcome : Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%
4	program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		23.665.000,00	18.931.231,00
	1	kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	23.665.000,00	18.931.231,00
		Output : Jumlah dokumen laporan kinerja SKPD	10 dok	10 dok
		Outcome : Persentase dokumen perencanaan/laporan yang disusun tepat waktu	100%	100%
5	program peningkatan kapasitas DPRD		16.302.273.600,00	12.601.931.552,00
	1	Kegiatan Fraksi	49.334.000,00	46.956.249,00
		Output : Jumlah Pemandangan Umum dan Pemandangan Akhir Fraksi	22 kali	22 kali
		Outcome : Persentase Perda yang disahkan tepat waktu	100%	100%
	2	Kegiatan Fasilitasi Penyebarluasan Informasi Kegiatan DPRD	1.478.518.000,00	1.472.336.067,00
		Output : Jumlah kegiatan DPRD yang bisa diakses publik	135 kali	235 kali
		Outcome : Persentase Perda yang disahkan tepat waktu	100%	174%
	3	Kegiatan Hiereng/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama	44.635.000,00	34.281.185,00
		Output : Jumlah hearing/rapat kerja/dengar pendapat dengan Pemda, Tokoh Masyarakat dan Tokoh agama	50 kali	53 kali
		Outcome : Persentase Perda yang disahkan tepat waktu	100%	106%
	4	Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	3.086.310.000,00	2.636.165.598,00
		Output : Jumlah Rancangan	13 raperda	18 raperda

NO		URAIAN	TARGET	REALISASI
		Perda yang ditetapkan menjadi Perda		
		Outcome : Persentase Perda yang disahkan tepat waktu	100 %	138%
	5	Kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD	5.015.427.000,00	4.042.036.955,00
		Output : Jumlah kunjungan kerja dalam satu tahun	10 kali	10 kali
		Outcome : Persentase Perda yang disahkan tepat waktu	100 %	100%
	6	Kegiatan Peningkatan Kaapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	2.623.669.000,00	1.897.351.494,00
		Output : Jumlah diklat, bintek, dan workshop dalam satu tahun	10 kali	10 kali
		Outcome : Persentase Perda yang disahkan tepat waktu	100%	100%
	7	Kegiatan Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan	3.058.596.600,00	1.623.351.795,00
		Output : Jumlah rapat komisi, rapat pimpinan, rapat gabungan komisi, rapat gabungan pimpinan, rapat badan musyawarah, badan anggaran, badan kehormatan, badan legislasi, dan panitia khusus	40 kali	58 kali
		Outcome : Persentase Perda yang disahkan tepat waktu	100%	145%
	8	Kegiatan Reses	573.150.000,00	520.920.000,00
		Output : Jumlah kegiatan reses	2 kali	2 kali
		Outcome : Persentase Perda yang disahkan tepat waktu	100%	100%
	9	Kegiatan Rapat-Rapat Paripurna	372.634.000,00	328.532.209,00
		Output : Jumlah rapat paripurna	32 kali	58 kali
		Outcome : Persentase Perda yang disahkan tepat waktu	100%	181%

2. Alokasi dan Realisasi Belanja

No	Uraian	Alokasi	Realisasi
1.	Urusan Pelayanan Administrasi dan Pemberian Dukungan terhadap Tugas dan Fungsi DPRD		
	Belanja Tidak Langsung	14.957.386.000,-	14.328.434.142,-
	Belanja Langsung	41.398.650.858,-	34.345.451.526,-
	Total Belanja	56.356.036.858,-	48.673.885.668,-

3. Asset yang dikuasai

No.	Urusan	Nilai Asset	Keterangan
1.	Urusan Pelayanan Administrasi dan Pemberian Dukungan terhadap Tugas dan Fungsi DPRD	Rp. 58.798.666.826,56,-	Nilai Aset Sekretariat DPRD per 31 Desember 2019

e. Proses Perencanaan Pembangunan Daerah

Pembangunan pendidikan di Kota Madiun dilaksanakan dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun Tahun 2014-2019, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kota Madiun Tahun 2014-2019, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Madiun Tahun 2019 dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kota Madiun Tahun 2019.

f. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1.	Gedung	1	Baik
2.	Kendaraan	5 Kendaraan R4	Baik
		14 Kendaraan R2	Baik
3.	Alat Kantor	6 jenis	Baik

g. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

Adanya keterlambatan penanganan Pemeliharaan Gedung DPRD dari PT. RIS Putra Delta, sehingga kerusakan akibat keterlambatan penanganan tersebut dapat berakibat kerusakan yang lebih besar.

Solusi :

Untuk mengatasi kerusakan yang ada diperlukan penanganan yang cepat agar tidak timbul kerusakan yang lebih besar, sehingga Sekretariat DPRD berinisiatif menangani kerusakan tersebut tanpa menunggu penanganan dari PT RIS Putra Delta, dengan melakukan perbaikan menggunakan pos anggaran Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.

9. FUNGSI PENUNJANG KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Badan Kepegawaian Daerah menyelenggarakan Fungsi Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

b. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Fungsi Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah di Kota Madiun pada Tahun Anggaran 2019, yaitu sebagai berikut:

Tabel III.48
Program dan Kegiatan Fungsi Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan di Kota Madiun Tahun 2019

No	Program		Kegiatan
1	program pelayanan administrasi perkantoran	1	kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor
		2	kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah
2	program pemeliharaan barang milik daerah	1	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan
		2	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas
		3	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala sarana prasarana kantor
		4	kegiatan pemeliharaan dan biaya operasional gedung diklat
3	program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1	kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor
		2	kegiatan rehab gedung dan bangunan
4	program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1	kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah
5	program peningkatan manajemen pelayanan kepegawaian	1	Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Sistem Informasi Kepegawaian dan SAPK
		2	Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian
6	program peningkatan kapasitas SDM aparatur	1	Kegiatan Assesment Pegawai
		2	Kegiatan Bimtek/Sosialisasi/Workshop Pengembangan Aparatur
		3	Kegiatan Diklat Kepemimpinan Tingkat III
		4	Kegiatan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
		5	Kegiatan Diklat Teknis dan Fungsional
		6	Kegiatan Diklat Kepemimpinan Tingkat II
		7	Kegiatan Diklat Prajabatan CPNS
		8	kegiatan pembekalan CPNS
7	program pembinaan dan pengembangan aparatur	1	Kegiatan Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang Berprestasi
		2	Kegiatan Pembinaan Pegawai dan Penanganan Masalah Kepegawaian
		3	Kegiatan Pengadaan CPNS

No	Program		Kegiatan
8	program penataan aparatur	1	Kegiatan Penempatan Pegawai
9	program fasilitasi kesejahteraan PNS	1	Kegiatan Pemberhentian PNS yang Pensiun
		2	Kegiatan Penataan Administrasi Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala PNS

c. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Jumlah Pegawai	Kepangkatan	Tingkat Pendidikan	Struktural/ Eselon	Fungsional	Staf
	Gol I = 1 Gol II = 9 Gol III = 21 Gol IV = 5	SD = 0 SMP = 1 SMA = 11 D3 = 5 D4/S1 = 14 S2 = 5	II = 1 III = 4 IV = 9 V = 0	1 Orang Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	21 Orang

d. Alokasi dan Realisasi Anggaran

1. Realisasi Program dan Kegiatan

NO		URAIAN	TARGET	REALISASI
1		program pelayanan administrasi perkantoran	1.450.658.400,00	1.311.298.461,00
	1	kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	842.848.000,00	735.184.012,00
		Output : Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13 Jenis	13 Jenis
		Outcome : Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	B	B
	2	kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	607.810.400,00	576.114.449,00
		Output : Jumlah Perjalanan Dinas	102	145
		Outcome : Meningkatnya Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	B	B
2		program pemeliharaan barang milik daerah	237.596.400,00	218.809.828,00
	1	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan	44.000.000,00	43.998.800,00
		Output : Jumlah Gedung	2 gedung	2 gedung
		Outcome : Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	B	B
	2	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas	20.540.000,00	18.325.700,00
		Output : Jumlah Kendaraan Dinas	20 kendaraan	37 kendaraan
		Outcome : Meningkatnya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	B	B
	3	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala sarana prasarana kantor	24.800.000,00	24.606.800,00
		Output : Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor	9 Jenis	42 Jenis
		Outcome : Meningkatnya Sarana	B	B

NO		URAIAN	TARGET	REALISASI
		dan Prasarana Kantor		
	4	kegiatan pemeliharaan dan biaya operasional gedung diklat	148.256.400,00	131.878.528,00
		Output : Jumlah Acara	300 Acara	198 Acara
		Outcome : Terwujudnya sarana dan prasarana balai diklat yang representatif	B	B
3	program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		472.900.000,00	457.699.850,00
	1	kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor	192.900.000,00	192.199.850,00
		Output : Jenis Barang	8 Jenis	8 Jenis
		Outcome : Terpenuhinya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%
	2	kegiatan rehab gedung dan bangunan	280.000.000,00	265.500.000,00
		Output : Jumlah Gedung	2 Gedung	2 Gedung
		Outcome : Terpenuhinya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%
4	program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		50.371.800,00	49.485.391,00
	1	kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	50.371.800,00	49.485.391,00
		Output : Jumlah Dokumen laporan	7 Dokumen Laporan	7 Dokumen Laporan
		Outcome : Meningkatnya Kinerja BKD	100%	100%
5	program peningkatan manajemen pelayanan kepegawaian		203.300.900,00	190.936.492,00
	1	Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Sistem Informasi Kepegawaian dan SAPK	156.593.400,00	152.502.492,00
		Output : Jumlah Dokumen Yang di Update	3.500	6.325
		Outcome : Prosentase penyelesaian administrasi kepegawaian yang akurat dan tepat waktu	93%	135.36%
	2	Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	46.707.500,00	38.434.000,00
		Output : Prosentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian yang Akurat dan Tepat Waktu	100%	90.1%
		Outcome : Prosentase penyelesaian administrasi kepegawaian yang akurat dan tepat waktu	93%	135.36%
6	program peningkatan kapasitas SDM aparatur		4.824.742.200,00	4.671.417.579,00
	1	Kegiatan Assesment Pegawai	210.450.000,00	191.846.000,00
		Output : Jumlah Pegawai yang mengikuti Assessment	15	24
		Outcome : Meningkatnya Kompetensi, Pengetahuan dan Ketrerampilan Aparatur	100%	118.14%
	2	Kegiatan Bintek/Sosialisasi/Workshop	61.500.000,00	37.740.500,00

NO		URAIAN	TARGET	REALISASI
		Output : Jumlah Pegawai yang mengikuti Workshop	130	236
		Outcome : Meningkatnya Kompetensi, Pengetahuan dan Ketrerampilan Aparatur	100%	118.14%
	3	Kegiatan Diklat Kepemimpinan Tingkat III	192.680.000,00	188.960.000,00
		Output : Jumlah Peserta Diklatpim Tk. III	5 PNS	5 PNS
		Outcome : Meningkatnya Kompetensi, Pengetahuan dan Ketrerampilan Aparatur	100%	118.14%
	4	Kegiatan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV	529.919.000,00	523.777.431,00
		Output : Jumlah Peserta Diklatpim Tk. IV	30 PNS	28 PNS
		Outcome : Meningkatnya Kompetensi, Pengetahuan dan Ketrerampilan Aparatur	100%	118.14%
	5	Kegiatan Diklat Teknis dan Fungsional	1.290.010.200,00	1.242.464.648,00
		Output : Jumlah Pegawai Mengikuti Diklat Teknis/Fungsional	270	301
		Outcome : Meningkatnya Kompetensi, Pengetahuan dan Ketrerampilan Aparatur	100%	118.14%
	6	Kegiatan Diklat Kepemimpinan Tingkat II	100.710.000,00	94.860.000,00
		Output : Jumlah Peserta Diklatpim Tk. II	2 PNS	2 PNS
		Outcome : Meningkatnya Kompetensi, Pengetahuan dan Ketrerampilan Aparatur	100%	118.14%
	7	Kegiatan Diklat Prajabatan CPNS	2.404.350.000,00	2.356.646.000,00
		Output : Jumlah Peserta Diklat Prajabatan	171 PNS	171 PNS
		Outcome : Meningkatnya Kompetensi, Pengetahuan dan Ketrerampilan Aparatur	100%	118.14%
	8	Kegiatan Pembekalan CPNS	35.123.000,00	35.123.000,00
		Output : Jumlah Peserta Diklat Pembekalan CPNS	171 PNS	171 PNS
		Outcome : Meningkatnya Kompetensi, Pengetahuan dan Ketrerampilan Aparatur	100%	118.14%
7	program pembinaan dan pengembangan aparatur		956.479.100,00	323.757.051,00
	1	Kegiatan Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang Berprestasi	61.564.800,00	52.083.958,00
		Output : Jumlah PNS Penerima Penghargaan Satya Lancana Karya Satya	100 PNS	107 PNS
		Outcome : Meningkatnya Kinerja Disiplin Pegawai	0.43%	0.18%
	2	Kegiatan Pembinaan Pegawai dan Penanganan Masalah Kepegawaian	9.380.000,00	8.339.500,00
		Output : Jumlah Permasalahan Kepegawaian selesai ditangani	50	38
		Outcome : Meningkatnya Kinerja Disiplin Pegawai	0.43%	0.18%

NO		URAIAN	TARGET	REALISASI
	3	Kegiatan Pengadaan CPNS	885.534.300,00	263.333.593,00
		Output : Jumlah Peserta	7000 orang	4.426 orang
		Outcome : Meningkatnya Kinerja Disiplin Pegawai	0.43%	0.18%
8	program penataan aparatur		364.489.200,00	251.609.775,00
	1	Kegiatan Penempatan Pegawai	364.489.200,00	251.609.775,00
		Output : Jumlah Mutasi Kepegawaian Struktual dan Fungsional	378	746
		Outcome : Terwujudnya Pembinaan dan Penataan Pegawai yang mengarah pada peningkatan kinerja dan disiplin aparatur	100 %	104.04 %
9	program fasilitasi kesejahteraan PNS		84.640.000,00	79.339.676,00
	1	Kegiatan Pemberhentian PNS yang Pensiun	39.160.000,00	37.871.676,00
		Output : Jumlah Surat Keputusan Pensiun	191 SK	202 SK
		Outcome : Terwujudnya Pelayanan Kesejahteraan PNS	100%	105.76%
	2	Kegiatan Penataan Administrasi Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala PNS	45.480.000	41.468.000
		Output : Jumlah SK KP dan Kenaikan Gaji Berkala	1.882	2.062
		Outcome : Terwujudnya Pelayanan Kesejahteraan PNS	100%	109.56%

2. Alokasi dan Realisasi Belanja

No	Uraian	Alokasi	Realisasi
1.	Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan		
	Belanja Tidak Langsung	4.016.039.500	3.890.320.610
	Belanja Langsung	8.645.178.000	7.554.354.103
	Total Belanja	12.661.217.500	11.444.674.713

3. Asset yang Dikuasai

No.	Urusan	Nilai Asset	Keterangan
1.	Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Rp. 2.622.832.150,67	

e. Proses Perencanaan Pembangunan Daerah

Pelaksanaan RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024 setiap tahun dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan yang memuat prioritas program dan kegiatan yang dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Madiun yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan hingga kota. Program prioritas pembangunan daerah memuat program-program yang berorentasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian

keadilan yang berkelanjutan sebagai penjabaran dari RPJMD pada tahun yang direncanakan. Rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD, memuat program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah, disertai perhitungan kebutuhan dana bersumber dari APBD untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan. RKPD merupakan bahan utama penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara, serta bahan penyusunan Rencanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

f. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1.	Tanah	2 Bidang	
2.	Peralatan dan Mesin	2540 Buah	
3.	Gedung dan Bangunan	25 Buah	
4.	Aset Tetap Lainnya	20 Buah	
5.	Aset Tak Berwujud	1 Aplikasi	
6.	Aset Lain – Lain (Barang Seni/Budaya)	20 Buah	

g. Permasalahan dan Solusi

Untuk Anggaran Kegiatan Pengadaan CPNS Tahun 2019 sebesar Rp. 885.534.300,00 hanya dapat terserap sebesar Rp. 263.333.593,00 yaitu hanya sebesar 29,73 %. Hal tersebut disebabkan Jadwal untuk Pengadaan CPNS tahun 2019 dari BKN mundur dari rencana jadwal semula, sehingga rangkaian dari kegiatan Pengadaan CPNS untuk pelaksanaan Test Kompetensi Dasar (TKD) dan Tes Kompetensi Bidang (SKB) baru dapat dilaksanakan di Tahun 2020.

10. FUNGSI PENUNJANG KEUANGAN

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Pendapatan Daerah menyelenggarakan Fungsi Penunjang Pemerintahan Bidang Keuangan.

b. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Fungsi Penunjang Pemerintahan Bidang Keuangan yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Pendapatan Daerah di Kota Madiun pada Tahun Anggaran 2019, yaitu sebagai berikut:

Tabel III.49
Program dan Kegiatan Fungsi Pemerintahan Bidang Keuangan
di Kota Madiun Tahun 2019

❖ Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

No	Program	Kegiatan	
1	program pelayanan administrasi perkantoran	1	kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor
		2	kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah
2	program pemeliharaan barang milik daerah	1	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan
		2	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas
		3	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala sarana prasarana kantor
3	program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1	kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor
4	program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1	kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah
5	program peningkatan dan pengembangan penatausahaan keuangan daerah	1	Kegiatan Penyusunan dan Penerbitan Anggaran Kas SPD dan SP2D
		2	Kegiatan Pengelolaan Administrasi Gaji/ Kas Daerah
6	program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	1	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah
		2	Kegiatan Penyusunan Rancangan Perda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
		3	Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran
		4	Kegiatan Bimtek Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5	Kegiatan Pendampingan pengelolaan keuangan daerah
7	program pengelolaan anggaran daerah	1	Penyusunan DPA dan DPPA
		2	Kegiatan Penyusunan Rancangan Perda Tentang APBD
		3	Kegiatan Penyusunan Rancangan

No	Program	Kegiatan	
			Perda Tentang Perubahan APBD
		4	Kegiatan Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Keuangan Daerah
		5	Kegiatan Penyusunan standar biaya umum dan standar biaya khusus
8	program peningkatan dan pengembangan pengelolaan aset daerah	1	Kegiatan Penyelenggaraan Asuransi Barang Milik Daerah
		2	Kegiatan Rekonsiliasi Pencatatan Barang Milik Daerah dengan Realisasi Belanja Modal
		3	kegiatan optimalisasi, pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah
		4	kegiatan perencanaan dan penatausahaan barang milik daerah

❖ Badan Pendapatan Daerah

No	Program	Kegiatan	
1	program pelayanan administrasi perkantoran	1	kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor
		2	kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah
2	program pemeliharaan barang milik daerah	1	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan
		2	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas
		3	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala sarana prasarana kantor
3	program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1	kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor
4	program peningkatan pelayanan dan manajemen pengelolaan pajak daerah	1	Kegiatan Pemberian Hadiah Gebyar undian PBB dan Wajib Pajak Prestasi
		2	Kegiatan Cetak Massal dan Penyampaian SPPT
		3	Kegiatan Pelayanan Perpajakan Daerah di Tempat Pelayanan Pajak Daerah Terpadu
		4	Kegiatan Sosialisasi dan Penyebarluasan Informasi Perpajakan Terpadu
		5	Kegiatan Pengamanan Penerimaan Pajak Daerah
		6	Kegiatan Pekan Panutan Pajak Bumi dan Bangunan
		7	kegiatan pelaksanaan pemeriksaan pajak daerah
5	program peningkatan pendataan dan potensi pajak daerah	1	kegiatan pemeliharaan basis data PBB
		2	kegiatan pemeliharaan basis data objek pajak daerah
		3	kegiatan pemeliharaan frame reklame

c. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

❖ BPKAD

Jumlah Pegawai	Kepangkatan	Tingkat Pendidikan	Struktural/ Eselon	Fungsional	Staf
PNS= 34 Tenaga Upahan= 8	Gol I = 0 Gol II = 7 Gol III = 22 Gol IV = 5	SD = 1 SMP = - SMA = 12 D3 = 2 D4/ S1 = 15 S2 = 4	II = - III = 4 IV = 9 V = -	2 orang	19 orang

❖ Badan Pendapatan Daerah

Jumlah Pegawai	Kepangkatan	Tingkat Pendidikan	Struktural/ Eselon	Fungsional	Staf
	Gol I = - Gol II = 10 Gol III = 25 Gol IV = 3	SD = - SMP = - SMA = 13 D1 = 3 D3 = 5 D4/ S1 = 14 S2 = 3	II = 1 III = 2 IV = 8 V =		

d. Alokasi dan Realisasi Anggaran

1. Realisasi Program dan Kegiatan

❖ BPKAD

NO		URAIAN	TARGET	REALISASI
1	program pelayanan administrasi perkantoran		17.650.289.000,00	14.335.045.212,82
	1	kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	17.250.289.000,00	13.935.131.983,82
		Output : Jumlah jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	7 jenis	7 jenis
		Outcome : Nilai akuntabilitas kinerja BPKAD	7 jenis	7 jenis
	2	kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	400.000.000,00	399.913.229,00
		Output : jumlah perjalanan dinas keluar daerah	100 kali	135 kali
		Outcome : Nilai akuntabilitas kinerja BPKAD	100 kali	135 kali
2	program pemeliharaan barang milik daerah		165.500.000,00	100.176.999,00
	1	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan	50.000.000,00	15.570.000,00
		Output : jumlah gedung yang dipelihara	1 gedung	1 gedung
		Outcome : Nilai akuntabilitas kinerja BPKAD	1 gedung	1 gedung
	2	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas	55.000.000,00	34.703.999,00
		Output :Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	45 kendaraan dinas	45 kendaraan dinas

NO		URAIAN	TARGET	REALISASI
		Outcome : Nilai akuntabilitas kinerja BPKAD	45 kendaraan dinas	45 kendaraan dinas
	3	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala sarana prasarana kantor	60.500.000,00	49.903.000,00
		Output :Jumlah sarana prasarana yang dipelihara	11 jenis barang	11 jenis barang
		Outcome : Nilai akuntabilitas kinerja BPKAD	11 jenis barang	11 jenis barang
3	program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		105.000.000,00	89.169.000,00
	1	kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor	105.000.000,00	89.169.000,00
		Output : Jumlah Sarana dan Prasarana aparatur	6 jenis barang	6 jenis barang
		Outcome : Nilai akuntabilitas kinerja BPKAD	6 jenis barang	6 jenis barang
4	program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		47.900.000,00	41.235.190,00
	1	kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	47.900.000,00	41.235.190,00
		Output : Jumlah dokumen	8 dokumen	8 dokumen
		Outcome : Nilai akuntabilitas kinerja BPKAD	8 dokumen	8 dokumen
5	program peningkatan dan pengembangan penatausahaan keuangan daerah		233.406.000,00	231.883065,00
	1	Kegiatan Penyusunan dan Penerbitan Anggaran Kas SPD dan SP2D	107.306.000,00	107.003.443,00
		Output : Jumlah dokumen pengeluaran kas	3 jenis dokumen (Anggaran kas, SPD dan SP2D)	3 jenis dokumen (Anggaran kas, SPD dan SP2D)
		Outcome :Presentase penerbitan SP2D tepat waktu	3 jenis dokumen (Anggaran kas, SPD dan SP2D)	3 jenis dokumen (Anggaran kas, SPD dan SP2D)
	2	Kegiatan Pengelolaan Administrasi Gaji/ Kas Daerah	126.100.000,00	124.879.622,00
		Output : Jumlah dokumen administrasi gaji	50 dokumen gaji/ kasda	103 dokumen gaji/ kasda
		Outcome : Presentase penerbitan SP2D tepat waktu	50 dokumen gaji/ kasda	103 dokumen gaji/ kasda
6	program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah		1.209.000.000,00	1.076.534.252,00
	1	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah	110.000.000,00	98.971.036,00
		Output : Jumlah dokumen kebijakan pengelolaan keuangan daerah	3 dokumen	4 dokumen
		Outcome :Presentase OPD yang menyampaikan Laporan Keuangan sesuai SAP	3 dokumen	4 dokumen

NO		URAIAN	TARGET	REALISASI
	2	Kegiatan Penyusunan Rancangan Perda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	292.200.000,00	272.047.764,00
		Output : Jumlah produk hukum	2 produk hukum (Perda dan Perwal pertanggungjawaban pelaksanaan APBD)	2 produk hukum (Perda dan Perwal pertanggungjawaban pelaksanaan APBD)
		Outcome : Penyampaian laporan pertanggungjawaban APBD tepat waktu	2 produk hukum (Perda dan Perwal pertanggungjawaban pelaksanaan APBD)	2 produk hukum (Perda dan Perwal pertanggungjawaban pelaksanaan APBD)
	3	Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	31.600.000,00	26.717.347,00
		Output : Jumlah laporan keuangan semesteran dan prognosis	2 buku	2 buku
		Outcome : Presentase OPD yang menyampaikan Laporan Keuangan sesuai SAP	2 buku	2 buku
	4	Kegiatan Bimtek Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	238.800.000,00	167.598.105,00
		Output : Jumlah peserta bintek	400 orang	400 orang
		Outcome : Presentase OPD yang menyampaikan Laporan Keuangan sesuai SAP	400 orang	400 orang
	5	Kegiatan Pendampingan pengelolaan keuangan daerah	536.400.000,00	511.200.000,0
		Output : Jumlah pendampingan pengelolaan keuangan daerah	30 kali	62 kali
		Outcome : Presentase OPD yang menyampaikan Laporan Keuangan sesuai SAP	30 kali	62 kali
7	program pengelolaan anggaran daerah		742.821.500,00	694.134.513,00
	1	Penyusunan DPA dan DPPA	51.100.000,00	50.328.755,00
		Output : Jumlah dokumen rencana pelaksanaan anggaran	3 dokumen	3 dokumen
		Outcome :Pengesahan Dokumen DPA dan DPPA	3 dokumen	3 dokumen
	2	Kegiatan Penyusunan Rancangan Perda Tentang APBD	229.927.500,00	213.409.974,00
		Output : Jumlah produk hukum	2 produk hukum (Perda dan Perwal APBD)	2 produk hukum (Perda dan Perwal APBD)
		Outcome : Pengesahan perda APBD tepat waktu	2 produk hukum (Perda dan Perwal APBD)	2 produk hukum (Perda dan Perwal APBD)
	3	Kegiatan Penyusunan Rancangan Perda Tentang Perubahan APBD	184.294.000,00	160.535.564,00

NO		URAIAN	TARGET	REALISASI
		Output : Jumlah produk hukum	2 produk hukum (Perda dan Perwal perubahan APBD)	2 produk hukum (Perda dan Perwal perubahan APBD)
		Outcome :Pengesahan Perda P APBD tepat waktu	2 produk hukum (Perda dan Perwal perubahan APBD)	2 produk hukum (Perda dan Perwal perubahan APBD)
	4	Kegiatan Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Keuangan Daerah	131.680.000,00	129.814.334,00
		Output : Jumlah penambahan/ perbaikan fitur dalam aplikasi	4 fitur	5 fitur
		Outcome : Pengesahan APBD tepat waktu	4 fitur	5 fitur
	5	Kegiatan Penyusunan standar biaya umum dan standar biaya khusus	145.820.000,00	140.045.886,00
		Output : Jumlah dokumen standar biaya	1 dokumen	1 dokumen
		Outcome : Pengesahan APBD tepat Waktu	1 dokumen	1 dokumen
8		program peningkatan dan pengembangan pengelolaan aset daerah	3.678.450.000,00	3.131.383.706,93
	1	Kegiatan Penyelenggaraan Asuransi Barang Milik Daerah	3.000.000.000,00	2.683.025.017,44
		Output : Jumlah aset daerah yang diasuransikan	2 jenis aset (bangunan gedung dan kendaraan dinas)	2 jenis aset (bangunan gedung dan kendaraan dinas)
		Outcome :Presentase aset yang diasuransikan	2 jenis aset (bangunan gedung dan kendaraan dinas)	2 jenis aset (bangunan gedung dan kendaraan dinas)
	2	Kegiatan Rekonsiliasi Pencatatan Barang Milik Daerah dengan Realisasi Belanja Modal	33.400.000,00	27.171.197,00
		Output : Jumlah laporan hasil rekonsiliasi	18 buku	18 buku
		Outcome : Presentase peningkatan Nilai aset pemda	18 buku	18 buku
	3	kegiatan optimalisasi, pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah	424.100.000,00	360.175.977,49
		Output : Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	2 tanah/bangunan	2 tanah/bangunan
		Outcome : Presentase peningkatan Nilai aset pemda	2 tanah/bangunan	2 tanah/bangunan
	4	kegiatan perencanaan dan penatausahaan barang milik daerah	220.950.000,00	61.011.515,00
		Output : Jumlah dokumen perencanaan dan penatausahaan barang milik daerah	2 dokumen	2 dokumen
		Outcome : Jumlah produk hukum	2 dokumen	2 dokumen

❖ Bapenda

NO		URAIAN	TARGET	REALISASI
1	program pelayanan administrasi perkantoran		713.092.000,00	666.562.348,00
	1	kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	624.627.000,00	578.121.975,00
		Output : Jumlah jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	13 Jenis	13 Jenis
		Outcome : Nilai akuntabilitas kinerja Bapenda	100 %	92,55 %
	2	kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	88.465.000,00	88.440.373,00
		Output : Jumlah Perjalanan Dinas keluar Daerah	15 Kali	20 Kali
		Outcome :Nilai akuntabilitas Badan Pendapatan Daerah	100 %	99,97 %
2	program pemeliharaan barang milik daerah		115.840.000,00	90.014.275,00
	1	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan	23.063.000,00	21.884.375,00
		Output : Jumlah Gedung yang dipelihara	1 Unit	1 Unit
		Outcome : Nilai akuntabilitas kinerja Badan Pendapatan Daerah	100 %	94,89 %
	2	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas	55.625.000,00	37.446.900,00
		Output : Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	2 Unit	2 Unit
		Outcome : Nilai akuntabilitas kinerja Badan Pendapatan Daerah	100 %	67,32 %
	3	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala sarana prasarana kantor	37.152.000,00	30.683.000,00
		Output : Jumlah sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	2 Unit	2 Unit
		Outcome : Nilai akuntabilitas kinerja Badan Pendapatan Daerah	100 %	82,59 %
3	program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		140.552.000,00	139.076.160,00
	1	kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor	140.552.000,00	139.076.160,00
		Output :Jumlah sarana dan prasarana aparatur	10 Buah	10 Buah
		Outcome : Nilai akuntabilitas kinerja Badan Pendapatan Daerah	100 %	98,95 %
4	program peningkatan pelayanan dan manajemen pengelolaan pajak daerah		999.655.000,00	838.435.750,00
	1	Kegiatan Pemberian Hadiah Gebyar undian PBB dan Wajib Pajak Prestasi	277.900.000,00	264.253.250,00
		Output : Pemberian hadiah gebyar undian PBB	217 WP	217 WP
		Outcome : Pemberian hadiah gebyar undian PBB	100 %	95,09 %
	2	Kegiatan Cetak Massal dan Penyampaian SPPT	25.000.000,00	22.100.000,00
		Output : Jumlah penerbitan SPPT dan penyampaian SPPT	60.000 SPPT	55.853 SPPT

NO		URAIAN	TARGET	REALISASI
		kepada Wajib Pajak		
		Outcome : Jumlah penerimaan pajak	100 %	88,40 %
	3	Kegiatan Pelayanan Perpajakan Daerah di Tempat Pelayanan Pajak Daerah Terpadu	104.500.000,00	101.500.000,00
		Output : Penyelesaian permohonan keringanan, keberatan, pembatalan dan pembetulan bagi wajib pajak	1.500 Berkas	1.500 Berkas
		Outcome : Prosentase peningkatan pajak daerah	100 %	97,13 %
	4	Kegiatan Sosialisasi dan Penyebarluasan Informasi Perpajakan Terpadu	74.000.000,00	64.175.000,00
		Output :Penyebarluasan informasi perpajakan daerah	1 Paket	1 Paket
		Outcome : Prosentase peningkatan pajak daerah	100 %	86,72 %
	5	Kegiatan Pengamanan Penerimaan Pajak Daerah	17.680.000,00	12.580.000,00
		Output : Jumlah surat himbauan pemberitahuan jatuh tempo pembayaran pajak	150 Petugas Pungut	150 Petugas Pungut
		Outcome : Capaian penerimaan pajak	100 %	71,15 %
	6	Kegiatan Pekan Panutan Pajak Bumi dan Bangunan	469.975.000,00	343.227.500,00
		Output : Jumlah pemberian souvenir kepada wajib pajak PBB sehingga wajib pajak tepat waktu pembayaranya	3.300 WP	3.300 WP
		Outcome : capaian penerimaan pajak	100 %	73,03 %
	7	kegiatan pelaksanaan pemeriksaan pajak daerah	30.600.000,00	30.600.000,00
		Output : Wajib Pajak daerah tepat waktu pembayaranya	2 Dokumen	2 Dokumen
		Outcome : Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	100 %	100 %
5	program peningkatan pendataan dan potensi pajak daerah		97.175.000,00	61.601.400,00
	1	kegiatan pemeliharaan basis data PBB	12.325.000,00	6.650.000,00
		Output : Tersedianya basis data yang update	60.000 WP	60.000 WP
		Outcome : Prosentase ketersediaan basis data pajak daerah	100 %	53,96 %
	2	kegiatan pemeliharaan basis data objek pajak daerah	9.850.000,00	6.650.000,00
		Output : Jumlah wajib pajak	150 WP	150 WP
		Outcome : Prosentase ketersediaan basis data pajak daerah	100 %	67,51 %

2. Alokasi dan Realisasi Belanja

❖ BPKAD

Uraian	Alokasi	Realisasi
Urusan Penunjang Keuangan		
Belanja Tidak Langsung	31.487.927.250,00	12.337.616.639,00
Belanja Langsung	23.832.366.500,00	19.699.561.938,75
Total Belanja	55.320.293.750,00	32.037.178.577,75

❖ Bapenda

Uraian	Alokasi	Realisasi
Urusan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan		
Belanja Tidak Langsung	8.493.089.478,-	8.068.302.358,-
Belanja Langsung	2.066.314.000,-	1.795.689.933,-
Total Belanja	10.559.403.478,-	9.863.992.291,-

3. Aset yang Dikuasai

❖ BPKAD

Urusan	Nilai Asset	Keterangan
Urusan Penunjang Keuangan	Rp.3.248.283.232.191,39	

❖ Bapenda

Urusan	Nilai Asset	Keterangan
Fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan	Rp. 4.271.507.844,-	-

e. Proses Perencanaan Pembangunan Daerah

Penyusunan Rencana Kerja merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta dokumen perencanaan lainnya. Adapun Hubungan Dokumen Perencanaan SKPD dengan Dokumen perencanaan lainnya yaitu:

1. Renstra SKPD sebagai pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja tahunan SKPD (Renja SKPD) dan selanjutnya Renja SKPD menjadi pedoman penyusunan RKA SKPD.
2. Renstra SKPD dalam penyusunannya berpedoman pada RPJMD dan memperhatikan Renstra kementerian atau lembaga non departeman.
3. RPJMD dalam penyusunannya berpedoman pada RPJP dan memperhatikan RPJM Nasional.

   RPJPD dalam penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional

f. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

❖ BPKAD

No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1.	Gedung	1	Baik
2.	Kendaraan	2 mbl+36 motor	Baik
3.	Sepeda	1	Baik
4.	Lemari penyimpanan	2	Baik
5.	Alat Ukur	1	Baik
6.	Mesin ketik elektronik	1	Baik
7.	Mesin Hitung Listrik	1	Baik
8.	Mesin Foto Copy	1	Baik
9.	Lemari besi	6	Baik
10.	Rak Besi	18	Baik
11.	Rak Kayu	3	Baik
12.	Filing besi/Metal	17	Baik
13.	Band Kas	1	Baik
14.	Lemari kaca	30	Baik
15.	Papan Nama Instansi	1	Baik
16.	Mesin Absensi	2	Baik
17.	Overhead projector	3	Baik
18.	Alat kantor lainnya	21	Baik
19.	Meja rapat	33	Baik
20.	Kursi Rapat	100	Baik
21.	Kursi Tamu	2	Baik
22.	Kursi Putar	8	Baik
23.	AC	32	Baik
24.	Televisi	9	Baik
25.	Lemari Es	1	Baik
26.	Sound ystem	3	Baik
27.	Camera video	1	Baik
28.	Dispenser	1	Baik
29.	Alat rumah tangga	71	Baik
30.	Komputer unit/Jaringan	5	Baik
31.	PC Unit	28	Baik
32.	Laptop	25	Baik
33.	Printer	43	Baik
34.	Scanner	1	Baik
35.	Server	3	Baik
36.	Meja Pejabat	25	Baik
37.	Kursi pejabat	16	Baik
38.	Kursi pegawai non stuktural	19	Baik
39.	Lemari arsip	2	Baik
40.	Proyektor	1	Baik
41.	Camera elektronik	4	Baik
42.	Pesawat telephone	3	Baik
43.	Telephone PABX	1	Baik
44.	HT	4	Baik
45.	Facimili	2	Baik
46.	POWER SUPPLY	1	Baik
47.	Tripod camera	1	Baik

❖ Badan Pendapatan Daerah

No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1.	Gedung	1 Unit	Baik
2.	Kendaraan Dinas		
	Roda 4 (Empat)	2 Unit	Baik
	Roda 2 (Dua)	25 Unit	Baik
3.	Alat Kantor		
	- Komputer	19 Unit	Baik
	- Printer	22 Unit	Baik
	- AC	14 Unit	Baik
	- LaptopWirreles	7 Buah	Baik
	- Brankas	2 Unit	Baik
	- Filling Cabinet	7 Unit	Baik
	- Kursi Eselon III	6 Buah	Baik
	- Kursi Eselon IV	11 Buah	Baik
	- Kusi Rapat	70 Buah	Baik
	- dll		

g. Permasalahan dan Solusi

❖ BPKAD

Permasalahan :

Pada Kegiatan Perencanaan dan penatausahaan barang milik daerah dengan anggaran sebesar Rp. 220.950.000,00 dan mengalami realisasi sebesar Rp. 61.011.515,00. Hal ini disebabkan karena proses kerjasama dengan pihak ke III dalam penilaian appraisal aset daerah dengan mendatangkan tenaga ahli tidak dapat dilaksanakan.

Solusi :

Pada tahun anggaran berikutnya akan kami cermati dalam perencanaan kerjasama agar realisasi anggaran bisa sesuai capaian kerja yang diharapkan.

❖ Bapenda

Permasalahan :

1. Kurangnya kwantitas SDM petugas pungut
2. Kurangnya pemahaman wajib pajak tentang perpajakan
3. Belum optimalnya penggalian potensi terhadap pajak daerah
4. Kurangnya akurasi data pajak daerah

Solusi :

1. Kwantitas SDM petugas pungut yang ada merupakan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian realisasi pajak diatas target yang ada, dengan tuntutan selalu mengalami kenaikan dari tahun ketahun. Sesuai tingkat kondisi kwantitas SDM di Pemerintah Kota Madiun maka untuk mengatasi permasalahan tersebut Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun Mengambil langkah yaitu memaksimalkan kwantitas SDM yang ada semaksimal mungkin dengan pembagian tugas secara tepat dan terbagi habis.

2. Solusi atas pemahaman wajib pajak tentang perpajakan yaitu dengan melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
   - Kegiatan pelayanan perpajakan daerah di tempat pelayanan pajak daerah terpadu dengan harapan dapat membantu penyelesaian pengajuan permohonan oleh wajib pajak
   - Kegiatan sosialisasi penyebarluasan informasi perpajakan daerah dengan sasaran bahwa penyebarluasan informasi sebagai upaya peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang perpajakan daerah
3. Solusi terhadap belum optimalnya penggalian potensi terhadap pajak daerah yaitu dengan melaksanakan kegiatan kegiatan sebagai berikut:
   - Kegiatan pengamanan penerimaan pajak daerah dengan hasil yang diharapkan sebagai upaya untuk pengamanan target penerimaan pajak daerah
   - Kegiatan pemberian hadiah gebyar undian PBB dan wajib pajak dalam melaksanakan pembayaran yang tepat waktu
4. Solusi keakurasian data pajak daerah yaitu sebagai berikut :
   - Kegiatan pemeliharaan basis data dan obyek pajak merupakan upaya untuk mewujudkan pemutakiran data pendaftaran SPTPD dan peremajaan
   - Kegiatan pemeliharaan basis data PBB merupakan upaya untuk mewujudkan keakuratan data subyek dan obyek pajak dalam basis data SPOP, LSPOP, Peta dan pemutakiran basis data SISMIOP

11. FUNGSI PENUNJANG PERENCANAAN

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan Fungsi Penunjang Perencanaan.

b. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Fungsi Penunjang Perencanaan yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kota Madiun pada Tahun Anggaran 2019, yaitu sebagai berikut:

Tabel III.50
Program dan Kegiatan Fungsi Penunjang Perencanaan
di Kota Madiun Tahun 2019

No	Program	Kegiatan	
1	program pelayanan administrasi perkantoran	1	kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor
		2	kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah
2	program pemeliharaan barang milik daerah	1	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan
		2	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas
		3	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala sarana prasarana kantor
3	program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1	kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor
4	program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1	kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah
5	program perencanaan pembangunan daerah	1	kegiatan perencanaan pemerintahan umum
		2	kegiatan pengendalian, monitoring dan evaluasi pembangunan
6	program perencanaan pembangunan prasarana wilayah	1	kegiatan perencanaan umum tata ruang dan lingkungan hidup
		2	kegiatan perencanaan sarana prasarana perkotaan
		3	program perencanaan pembangunan ekonomi
		4	kegiatan perencanaan bidang ekonomi
7	program perencanaan pembangunan bidang sosial budaya	1	kegiatan perencanaan bidang sosial budaya
8	program pengembangan kajian dan penelitian	1	kegiatan penelitian dan pengembangan bidang ekonomi, sosial, budaya dan pemerintahan umum
		2	kegiatan penelitian dan pengembangan bidang fisik dan prasarana

c. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Jumlah Pegawai	Kepangkatan	Tingkat Pendidikan	Struktural/ Eselon	Fungsional	Staf
34	Gol I = 0 Gol II = 3 Gol III = 27 Gol IV = 4	SD = 0 SMP = 0 SMA = 6 D3 = 3 D4/ S1 = 21 S2 = 4	II = 1 III = 4 IV = 11 V = 0	**2**	**18**

d. Alokasi dan Realisasi Anggaran

1. Realisasi Program dan Kegiatan

NO		URAIAN	TARGET	REALISASI
1	program pelayanan administrasi perkantoran		1.278.207.840,00	1.115.718.957,00
	1	kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	826.902.000,00	701.413.277,00
		Output : Peralatan Barang dan Jasa Kantor	11 paket	11 paket
		Outcome : terlaksananya administrasi perkantoran	100%	100%
	2	kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	451.305.840,00	451.305.685,00
		Output : Jumlah perjalanan Dinas	9 kali	9 kali
		Outcome : terlaksananya administrasi perkantoran	100%	100%
2	program pemeliharaan barang milik daerah		101.575.600,00	93.436.450,00
	1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan	25.000.000,00	24.983.100,00
		Output : jumlah gedung yang diperbaiki	1 gedung	1 gedung
		Outcome : presentase barang inventaris kantor dalam kondisi baik	100 %	100 %
	2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	31.035.000,00	22.983.100,00
		Output: Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara	28 Kendaraan	28 Kendaraan
		Outcome : presentase barang inventaris kantor dalam kondisi baik	100 %	100 %
	3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kantor	45.540.000,00	45.527.250,00
		Output :jumlah sarpras kantor yang layak pakai	1 paket	1 paket
		Outcome : presentase barang inventaris kantor dalam kondisi baik	100 %	100 %
3	program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		440.400.000,00	412.243.600,00
	1	Kegiatan Pengadaan Sarana & Prasarana Kantor	445.400.000,00	412.243.600,00
		Output : jumlah paket peralatan	1 paket	3 paket
		Outcome :presentase pemenuhan	100 %	

NO		URAIAN	TARGET	REALISASI
		kebutuhan sarana dan prasarana Aparatur		100 %
4		program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	96.096.800,00	86.270.563,00
	1	Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	96.096.800,00	86.270.563,00
		Output : Dokumen yang disusun	12 dokumen	12 dokumen
		Outcome : prosentase dokumen Perencanaan/Laporan yang disusun tepat waktu	100%	100%
5		program perencanaan pembangunan daerah	1.515.484.400,00	1.469.429.059,00
	1	Kegiatan Perencanaan Pemerintahan Umum	1.396.390.400,00	1.367.797.606,00
		Output : jumlah dokumen	7 dokumen	7 dokumen
		Outcome : tingkat kontribusi RKPD terhadap RPJMD	100 %	100 %
	2	Kegiatan Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	119.094.000,00	101.631.453,00
		Output : jumlah dokumen	5 dokumen	5 dokumen
		Outcome : persentase pelaksanaan program pembangunan yang sesuai dengan perencanaan.	100 %	100 %
6		program perencanaan pembangunan prasarana wilayah	338.531.600,00	319.591.361
	1	Kegiatan Perencanaan Umum Tata ruang dan Lingkungan Hidup	220.109.600,00	209.941.687,00
		Output : jumlah dokumen	1 dokumen	1 dokumen
		Outcome : tingkat kontribusi Renstra OPD terhadap RPJMD	100%	100%
	2	Kegiatan Perencanaan Sarana Prasarana Perkotaan	118.422.000,00	109.649.674,00
		Output : jumlah dokumen	2 dokumen	2 dokumen
		Outcome : tingkat kontribusi Renstra OPD terhadap RPJMD	100%	100%
7		program perencanaan pembangunan ekonomi, social, dan budaya	135.718.000,00	192.921.322
	1	Kegiatan Perencanaan Ekonomi	135.718.000,00	119.818.270,00
		Output : jumlah dokumen	1 dokumen	1 dokumen
		Outcome : tingkat kontribusi Renstra OPD terhadap RPJMD	100%	100%
	2	Kegiatan Perencanaan Bidang Sosial Budaya	120.276.000,00	73.103.052,00
		Output : jumlah Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
		Outcome : tingkat kontribusi Renstra OPD terhadap RPJMD	100 %	100 %
8		program pengembangan kajian dan penelitian	824.964.800,00	735.711.645,00
	1	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Fisik dan Prasarana	551.476.400,00	495.645.006,00
		Output : jumlah dokumen	2 dokumen	2 dokumen
		Outcome : Tingkat kontribusi APBD terhadap RKPD	100%	100%
	2	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pemerintahan	273.488.400,00	240.066.639,00

NO		URAIAN	TARGET	REALISASI
		Umum		
		Output : jumlah dokumen	2 dokumen	2 dokumen
		Outcome : Tingkat kontribusi APBD terhadap RKPD	100%	100%

2. Realisasi Anggaran Total Belanja

No	Uraian	Alokasi	Realisasi
1.	Urusan Perencanaan		
	Belanja Tidak Langsung	3,147,724,500	2,890,362,736
	Belanja Langsung	3,638,440,000	3,346,742,218
	Total Belanja	6,786,164,500	6,237,104,954

3. Asset yang Dikuasai

No.	Urusan	Nilai Asset	Keterangan
1	Perencanaan	Rp. 2.651.380.529	-

e. Proses Perencanaan Pembangunan Daerah

Dalam rangka menyusun Rencana Kerja SKPD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, maka Pemerintah Daerah perlu menyelenggarakan forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang, mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, kota hingga tingkat propinsi, termasuk menyelenggarakan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (Forum SKPD). Untuk persiapan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Kepala Bappeda sebagai ketua tim Penyelenggara yang akan menetapkan tata cara penyelenggaraan forum. Tim inilah yang akan mengkompilasi daftar prioritas yang telah ditetapkan dari Musrenbang Kecamatan, mengidentifikasi daftar prioritas serta memperkirakan anggaran tiap prioritas kegiatan yang selama ini lebih dikenal sebagai Arah dan Kebijakan Umum, keluaran dari pelaksanaan Forum SKPD ini berupa Rancangan Rencana Kerja-SKPD (Renja-SKPD) yang memuat kerangka regulasi dan kerangka anggaran SKPD yang akhirnya menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

f. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1	Gedung	1	Baik
2	Kendaraan	24	Baik
3	Alat Kantor		
a	Ruang Kerja	5 (Sekretariat, Ruang Kepala BAPPEDA, Ruang Bid. Eksosbud, Ruang Bidang Fisrana, Ruang Bid. PPU)	Baik
b	Ruang Rapat lengkap dengan perlengkapan Sound system, Layar Proyektor, meja kursi rapat, koneksi internet, AC	Ruang Rapat Besar 1 ruangan Ruang rapat Kecil 1 ruangan	Baik
c	Ruang Tamu	2 ruangan (Selasar Utara dan Ruang Kaban)	Baik
d	Meja Kerja	89 Buah	Baik
e	Kursi Kerja	139 Buah	Baik
f	Air Conditioner (AC)	18 Buah	Baik
g	Kamar Mandi	7 Buah	Baik
h	Komputer Desktop	11 Buah	Baik
i	Komputer Laptop	46 Buah	Baik
j	Printer	35 Buah	Baik
k	Scanner	2 Buah	Baik
l	Mesin Ketik	5 Buah	Baik
m	Televisi	5 Buah (Sekretariat 2, Ruang Bid. Eksosbud, Ruang Bidang Fisrana, Ruang Bid. PPU)	Baik
n	Almari Arsip	58 Buah	Baik
o	Mobil Dinas	1 Mobil Dinas	Baik
p	Sepeda Motor Dinas	29 Buah	Baik
q	Papan Visuil (Papan Jadwal)	2 Buah (Sekretariat dan Ruang Kaban)	Baik

12. FUNGSI PENUNJANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan.

b. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kota Madiun pada Tahun Anggaran 2019, yaitu sebagai berikut

Tabel III.51
Program dan Kegiatan Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan
di Kota Madiun Tahun 201

No	Program	Kegiatan	
1	Program Pengembangan Kajian dan Penelitian	1	Kegiatan Penyusunan Kajian/Penelitian Bidang Eksosbud dan Pemerintahan Umum
		2	Kegiatan Penyusunan Kajian/Penelitian Bidang Fisik dan Prasarana

c. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Jumlah Pegawai	Kepangkatan	Tingkat Pendidikan	Struktural/ Eselon	Fungsional	Staf
4	Gol I = 0 Gol II = 3 Gol III = 1 Gol IV = 0	SD = 0 SMP = 0 SMA = 0 D3 = 0 D4/S1 = 4 S2 = 0	II = 0 III = 1 IV = 2 V = 0	-	1

d. Alokasi dan Realisasi Anggaran

1. Realisasi Program dan Kegiatan

No	Uraian	Target	Realisasi
1	Program Pengembangan Kajian dan Penelitian	824.964.800,00	735.711.645,00
1	Kegiatan Penyusunan Kajian/Penelitian Bidang Fisik dan Prasarana	551.476.400,00	495.645.006,00
	Output : 2 dokumen		
	Outcome : Tingkat kontribusi APBD terhadap RKPD		
2	Kegiatan Penyusunan Kajian/Penelitian Bidang Eksosbud dan Pemerintahan Umum	273.488.400,00	240.066.639,00
	Output : 2 dokumen		
	Outcome : Tingkat kontribusi APBD terhadap RKPD		

2. Realisasi Anggaran Total Belanja

No	Uraian	Alokasi	Realisasi
1.	Urusan Penelitian dan Pengembangan		
	Belanja Tidak Langsung	1,049,241,500	963,454,579
	Belanja Langsung	1,212,813,760	1,115,580,739
	Total Belanja	2,262,055,260	2,079,035,318

3. Asset yang Dikuasai

No.	Urusan	Nilai Asset	Keterangan
1	Penelitian dan Pengembangan	Rp. 6.017.416.610	-

e. Proses Perencanaan Pembangunan Daerah

Pembangunan pendidikan di Kota Madiun dilaksanakan dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun Tahun 2014-2019, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kota Madiun Tahun 2014-2019, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Madiun Tahun 2019 dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kota Madiun Tahun 2019.

f. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1	Gedung	1	Baik
2	Kendaraan	3	Baik
3	Alat Kantor		
A	Ruang Kerja	1 (Ruang Bid. Litbang)	Baik
B	Meja Kerja	6 Buah	Baik
C	Kursi Kerja	6 Buah	Baik
D	Air Conditioner (AC)	2 Buah	Baik
E	Komputer Desktop	2 Buah	Baik
f	Komputer Laptop	2 Buah	Baik
g	Printer	5 Buah	Baik
h	Mesin Ketik	1 Buah	Baik
i	Televisi	1 Buah (Ruang Bid. Litbang)	Baik
j	Almari Arsip	4 Buah	Baik
k	Sepeda Motor Dinas	3 Buah	Baik

13. FUNGSI PENUNJANG KECAMATAN

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Kecamatan menyelenggarakan Fungsi Penunjang Kecamatan.

b. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Fungsi Penunjang Kecamatan yang dilaksanakan Kecamatan di Kota Madiun pada Tahun Anggaran 2019, yaitu sebagai berikut:

Tabel III.52
Program dan Kegiatan Fungsi Penunjang Kecamatan
di Kota Madiun Tahun 2019

❖ Kecamatan Kartoharjo

No	Uraian	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	
	1	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	2	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
2	Program pemeliharaan barang milik daerah	
	1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan
	2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
	3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kantor
3	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	
	1	Kegiatan Pengadaan Sarana & Prasarana Kantor
	2	Kegiatan Rehab Gedung/Bangunan
4	Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	
	1	Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
	2	Penyusunan buku profil kelurahan dan monografi kecamatan dan kelurahan
	3	Kegiatan Penyusunan Buku Kecamatan dalam Angka
5	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Keamanan dan Ketertiban	
	1	Kegiatan Koordinasi Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
6	Program Penyelenggaraan Kelurahan	
	1	Penyelenggaraan Kelurahan Kartoharjo
	2	Penyelenggaraan Kelurahan Klegen
	3	Penyelenggaraan Kelurahan kanigoro
	4	Penyelenggaraan Kelurahan Oro-oro Ombo
	5	Penyelenggaraan Kelurahan Rejomulyo
	6	Penyelenggaraan Kelurahan Pilang Bango
	7	Penyelenggaraan Kelurahan Sukosari
	8	Penyelenggaraan Kelurahan Kelun
	9	Penyelenggaraan Kelurahan Tawang Rejo
7	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pembangunan kelurahan	
	1	Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Kelurahan
8	Program peningkatan keberdayaan masyarakat Pedesaan/Kelurahan	
	1	Kegiatan Penguatan Lembaga Kemasyarakatan

❖ Kecamatan Manguharjo

No	Program	Kegiatan	
1	program pelayanan administrasi perkantoran	1	kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor
		2	kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah
2	program pemeliharaan barang milik daerah	1	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan
		2	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas
		3	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala sarana prasarana kantor
3	program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1	kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah
		2	kegiatan penyusunan buku kecamatan dalam angka
		3	kegiatan penyusunan buku profil kelurahan dan monografi kecamatan dan kelurahan
4	program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kelurahan	1	Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Kelurahan
5	program peningkatan keberdayaan masyarakat kelurahan	1	Kegiatan Penguatan Lembaga Kemasyarakatan
6	program penyelenggaraan kelurahan	1	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Madiun Lor
		2	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Manguharjo
		3	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Nambangan Kidul
		4	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Nambangan Lor
		5	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Ngegong
		6	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan
		7	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Patihan
		8	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Sogaten
		9	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Winongo
7	program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban	1	Kegiatan Koordinasi Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

❖ Kecamatan Taman

No	Program	Kegiatan	
1	program pelayanan administrasi perkantoran	1	kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor
		2	kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah
2	program pemeliharaan barang milik daerah	1	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan
		2	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas
		3	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala sarana prasarana kantor
3	program peningkatan	1	kegiatan penyusunan laporan

No	Program	Kegiatan	
	pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah
		2	kegiatan penyusunan buku kecamatan dalam angka
		3	kegiatan penyusunan buku profil kelurahan dan monografi kecamatan dan kelurahan
4	program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kelurahan	1	Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Kelurahan
5	program penyelenggaraan kelurahan	1	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Mojorejo
		2	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pandean
		3	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Banjarejo
		4	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Kuncen
		5	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Manisrejo
		6	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Kejuron
		7	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Josenan
		8	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Demangan
		9	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Taman
6	program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban	1	Kegiatan Koordinasi Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

c. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

❖ Kecamatan Kartoharjo

Jumlah Pegawai	Kepangkatan	Tingkat Pendidikan	Struktural / Eselon	Fungsional	Staf
PNS = 63	Gol I = 1 Gol II = 7 Gol III = 52 Gol IV = 3	SD = 1 SMP = 0 SMA = 32 D3 = 3 D4/S1 = 24 S2 = 3	II = 0 III = 2 IV = 38 V = 0	0	23 orang

❖ Kecamatan Manguharjo

Jumlah Pegawai	Kepangkatan	Tingkat Pendidikan	Struktural/ Eselon	Fungsional	Staf
PNS = 66	Gol I = 2 Gol II = 7 Gol III = 57 Gol IV = 2	SD = 1 SMP = 2 SMA = 35 D3 = 4 D4/ S1 = 22 S2 = 2	II = - III = 2 IV = 38 V = -		26

❖ Kecamatan Taman

Jumlah Pegawai	Kepangkatan	Tingkat Pendidikan	Struktural / Eselon	Fungsional	Staf
69	Gol I = Gol II = 13 Gol III = 54 Gol IV = 2	SD = SMP = 1 SMA = 32 D3 = 4 D4/ S1 =29 S2 = 3	II = III = 2 IV = 39 V =		**28**

d. Alokasi dan Realisasi Anggaran

1. Realisasi Program dan Kegiatan

❖ Kecamatan Kartoharjo

No	Uraian	Target	Realisasi
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.151.076.350,00	977.117.160,00
1	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.053.115.350,00	883.056.611,00
	Output : Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7 jenis	7 jenis
	Outcome : Prosentase Terlaksananya Administrasi Perkantoran	100%	100%
2	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	97.961.000,00	94.060.549,00
	Output : Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	16 kali	16 kali
	Outcome : Prosentase Terlaksananya Administrasi Perkantoran	100%	100%
2	Program pemeliharaan barang milik daerah	96.053.600,00	93.489.659,00
1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan	35.000.000,00	34.998.000,00
	Output : Jumlah Gedung/ Bangunan	1 gedung	1 gedung
	Outcome : Prosentase Barang Inventaris dalam Kondisi Baik	100%	100%
2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	30.653.600,00	28.093.259,00
	Output : Jumlah Kendaraan Dinas	2 unit mobil, 14 unit motor	2 unit mobil, 14 unit motor
	Outcome : Prosentase Barang Inventaris dalam Kondisi Baik	100%	100%
3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kantor	30.400.000,00	30.398.400,00
	Output : Jumlah Sarana Prasarana Kantor	3 jenis	3 jenis
	Outcome : Prosentase Barang Inventaris dalam Kondisi Baik	100%	100%

No	Uraian	Target	Realisasi
3	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	259.950.000,00	240.766.000,00
1	Kegiatan Pengadaan Sarana & Prasarana Kantor	174.950.000,00	173.566.000,00
	Output : Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor	2 paket	2 paket
	Outcome : Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%
2	Kegiatan Rehab Gedung/Bangunan	85.000.000,00	67.200.000,00
	Output : Jumlah Gedung	1 gedung	1 gedung
	Outcome : Prosentase pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%
4	Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	62.964.000,00	58.093.980,00
1	Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	30.273.600,00	27.888.044,00
	Output : Jumlah dokumen	8 dokumen	8 dokumen
	Outcome : Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100%	100%
2	Penyusunan buku profil kelurahan dan monografi kecamatan dan kelurahan	22.883.280,00	20.594.956,00
	Output : Jumlah dokumen	2 dokumen	2 dokumen
	Outcome : Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100%	100%
3	Kegiatan Penyusunan Buku Kecamatan dalam Angka	9.807.120,00	9.610.980,00
	Output : Jumlah dokumen	1 dokumen	1 dokumen
	Outcome : Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100%	100%
5	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Keamanan dan Ketertiban	222.462.600,00	157.035.000,00
1	Kegiatan Koordinasi Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	222.462.600,00	157.035.000,00
	Output : Prosentase kehadiran peserta koordinasi peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat	100%	100%
	Outcome : Jumlah partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban	370 orang	370 orang
6	Program Penyelenggaraan Kelurahan	8.571.398.430,08	7.563.633.070,00
1	Penyelenggaraan Kelurahan Kartoharjo	913.840.800,00	799.700.312,00
	Output : Prosentase terselesaikannya	100%	100%

No	Uraian	Target	Realisasi
	permohonan rekomendasi di Kelurahan Kartoharjo		
	Outcome : Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan	100%	100%
2	Penyelenggaraan Kelurahan Klegen	1.038.835.510,00	905.888.668,00
	Output : Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan Klegen	100%	100%
	Outcome : Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan	100%	100%
3	Penyelenggaraan Kelurahan Kanigoro	1.040.438.440,00	895.279.986,00
	Output : Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan Kanigoro	100%	100%
	Outcome : Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan	100%	100%
4	Penyelenggaraan Kelurahan Oro-Oro Ombo	976.466.800,00	840.059.466,00
	Output : Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan Oro-Oro Ombo	100%	100%
	Outcome : Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan	100%	100%
5	Penyelenggaraan Kelurahan Rejomulyo	1.004.175.540,00	931.973.086,00
	Output : Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan Rejomulyo	100%	100%
	Outcome : Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan	100%	100%
6	Penyelenggaraan Kelurahan Pilang Bango	917.051.340,08	788.979.853,00
	Output : Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di	100%	100%

No	Uraian	Target	Realisasi
	Kelurahan Pilangbango		
	Outcome : Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan	100%	100%
7	Penyelenggaraan Kelurahan Sukosari	871.594.440,00	774.784.362,00
	Output : Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan Sukosari	100%	100%
	Outcome : Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan	100%	100%
8	Penyelenggaraan Kelurahan Kelun	929.073.040,00	838.741.986,00
	Output : Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan Kelun	100%	100%
	Outcome : Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan	100%	100%
9	Penyelenggaraan Kelurahan Tawang Rejo	879.922.520,00	788.225.351,00
	Output : Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan Tawangrejo	100%	100%
	Outcome : Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan	100%	100%
7	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pembangunan kelurahan	104.255.580,00	95.017.500,00
1	Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Kelurahan	104.255.580,00	95.017.500,00
	Output : Jumlah pelaksanaan Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan	10 kali	10 kali
	Outcome : Prosentase kehadiran dalam perencanaan pembangunan kelurahan	100%	100%
8	Program peningkatan keberdayaan masyarakat Pedesaan/Kelurahan	48.696.540,00	43.477.500,00
1	Kegiatan Penguatan Lembaga Kemasyarakatan	48.696.540,00	43.477.500,00
	Output : Jumlah pelaksanaan kegiatan penguatan lembaga kemasyarakatan	1 kali	1 kali
	Outcome : Prosentase kehadiran peserta penguatan lembaga kemasyarakatan	100%	100%

❖ Kecamatan Manguharjo

NO		URAIAN	TARGET	REALISASI
1	program pelayanan administrasi perkantoran		1.098.422.400,00	894.624.843,00
	1	kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	974.600.400,00	775.454.394,00
		Output : Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	7 Jenis	7 Jenis
		Outcome : Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kecamatan	100%	100%
	2	kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	123.822.000,00	110.170.449,00
		Output : Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	1936 kali	1454 kali
		Outcome : Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kecamatan	100%	100%
2	program pemeliharaan barang milik daerah		176.377.200,00	115.560.316,00
	1	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan	71.298.000,00	50.055.576,00
		Output : Jumlah gedung	1 Gedung	1 Gedung
		Outcome : Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kecamatan	100%	100%
	2	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas	59.779.200,00	39.862.40,00
		Output : Jumlah kendaraan dinas	16 unit	16 unit
		Outcome : Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kecamatan	100%	100%
	3	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala sarana prasarana kantor	45.300.000,00	25.642.000,00
		Output : Jumlah sarana dan prasarana kantor	3 jenis	3 jenis
		Outcome : Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kecamatan	100%	100%
3	program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		101.505.600,00	97.875.794,00
	1	kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	43.120.800,00	42.708.683,00
		Output : jumlah dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen
		Outcome : jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100%	100%
	2	kegiatan penyusunan buku kecamatan dalam angka	29.192.400,00	28.717.875,00
		Output : jumlah dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
		Outcome : jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100%	100%
	3	kegiatan penyusunan buku profil kelurahan dan monografi kecamatan dan kelurahan	29.192.400,00	26.449.236,00
		Output : jumlah dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
		Outcome : jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang	100%	100%

NO		URAIAN	TARGET	REALISASI
		disusun tepat waktu		
4		program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kelurahan	129.511.520,00	128.444.909,00
	1	Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Kelurahan	129.511.520,00	128.444.909,00
		Output : Jumlah pelaksanaan musrenbang kelurahan dan kecamatan	10 kali	10 Kali
		Outcome : Prosentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam Musrenbang Kota	100%	100%
5		program peningkatan keberdayaan masyarakat kelurahan	71.365.020,00	62.833.744,00
	1	Kegiatan Penguatan Lembaga Kemasyarakatan	71.365.020,00	62.833.744,00
		Output : Jumlah pelaksanaan kegiatan penguatan lembaga kemasyarakatan	9 Kali	9 Kali
		Outcome : Prosentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam Musrenbang Kota	100%	100%
6		program penyelenggaraan kelurahan	8.601.110.810,00	7.069.355.549,00
	1	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Madiun Lor	956.749.800,00	791.365.795,00
		Output : Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan Madiun Lor	100%	100%
		Outcome : Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kecamatan	100%	100%
	2	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Manguharjo	984.188.090,00	805.429.425,00
		Output : Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan Manguharjo	100%	100%
		Outcome : Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kecamatan	100%	100%
	3	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Nambangan Kidul	1.023.256.940,00	859.041.477,00
		Output : Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan Nambangan kidul	100%	100%
		Outcome : Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kecamatan	100%	100%
	4	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Nambangan Lor	1.116.187.080,00	925.468.470,00
		Output : Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan Nambangan Lor	100%	100%
		Outcome : Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kecamatan	100%	100%
	5	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Ngegong	860.762.740,00	698.860.603,00

NO		URAIAN	TARGET	REALISASI
		Output : Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan Ngegong	100%	100%
		Outcome : Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kecamatan	100%	100%
	6	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	866.600.800,00	696.921.049,00
		Output : Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan Pangongangan	100%	100%
		Outcome : Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kecamatan	100%	100%
	7	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Patihan	878.807.940,00	729.283.241,00
		Output : Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan Patihan	100%	100%
		Outcome : Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kecamatan	100%	100%
	8	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Sogaten	921.630.440,00	769.474.478,00
		Output : Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan Sogaten	100%	100%
		Outcome : Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kecamatan	100%	100%
	9	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Winongo	992.926.980,00	793.511.011,00
		Output : Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan Winongo	100%	100%
		Outcome : Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kecamatan	100%	100%
7		program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban	380.339.240,00	280.550.000,00
	1	Kegiatan Koordinasi Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	380.339.240,00	280.550.000,00
		Output : Prosentase kehadiran peserta Koordinasi peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat	100%	100%
		Outcome : Jumlah koordinasi keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan yang terfasilitasi	12 Kali	12 Kali

❖ Kecamatan Taman

NO		URAIAN	TARGET	REALISASI
1	program pelayanan administrasi perkantoran		1.016.228.428,00	782.626.274,00
	1	kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	916.435.428,00	682.833.274,00
		Output : Jumlah peralatan kantor	9 paket	9 paket
		Outcome : Terselesainya Permohonan Rekomendasi di Kec.	9 paket	9 paket
	2	kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	99.793.000,00	99.793.000,00
		Output : Jumlah Koordinasi keluar daerah	21 kali	21 kali
		Outcome : Prosentase terselesaikanya rekomendasi di Kecamatan	100%	100%
2	program pemeliharaan barang milik daerah		119.948.000,00	105.312.925,00
	1	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan	35.000.000,00	35.000.000,00
		Output : Jumlah Gedung dan Bangunan	1 unit	1 unit
		Outcome : Prosentase terselesaikanya rekomendasi di Kecamatan	100%	100%
	2	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas	48.448.000,00	38.589.650,00
		Output : Jumlah Kendaraan Dinas	16	16
		Outcome : Prosentase jumlah kendaraan dalam kondisi baik	100%	100%
	3	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala sarana prasarana kantor	36.500.000,00	31.723.275,00
		Output :Prosentase Pemenuhan Kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	100%
		Outcome : Prosentase terselesaikanya rekomendasi di Kecamatan	100%	100%
3	program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		97.079.040,00	96.084.336,00
	1	kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	41.395.968,00	41.378.160,00
		Output : Jumlah Dokumen	8 Dok	8 Dok
		Outcome : Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	8 dok	8 dok
	2	kegiatan penyusunan buku kecamatan dalam angka	27.841.536,00	27.498.096,00
		Output :Jumlah Dokumen	1 dokumen	1 dokumen
		Outcome : Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	1 dokumen	1 dokumen
	3	kegiatan penyusunan buku profil kelurahan dan monografi kecamatan dan kelurahan	27.841.536,00	27.208.0080,00
		Output : Jumlah Dokumen	2 dokumen	2 dokumen
		Outcome : Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	2 dokumen	2 dokumen

NO		URAIAN	TARGET	REALISASI
4	program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kelurahan		160.808.596,00	158.311.032,00
	1	Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Kelurahan	160.808.596,00	158.311.032,00
		Output :Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan dan kecamatan	10 kali	10 kali
		Outcome :Tingkat Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah	100%	100%
5	program penyelenggaraan kelurahan		7.875.206.020,00	6.754.703.503,00
	1	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Mojorejo	936.227.640,00	850.140.739,00
		Output : Prosentase terselesaikanya rekomendasi di Kelurahan	100%	100%
		Outcome : Prosentase terselesaikanya rekomendasi di Kecamatan	100%	100%
	2	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pandean	909.132.680,00	813.027.087,00
		Output : Prosentase terselesaikanya rekomendasi di Kelurahan	100%	100%
		Outcome : Prosentase terselesaikanya rekomendasi di Kecamatan	100%	100%
	3	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Banjarejo	844.534.040,00	751.220.558,00
		Output : Prosentase terselesaikanya rekomendasi di Kelurahan	100%	100%
		Outcome : Prosentase terselesaikanya rekomendasi di Kecamatan	100%	100%
	4	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Kuncen	715.549.420,00	543.264.394,00
		Output : Prosentase terselesaikanya rekomendasi di Kelurahan	100%	100%
		Outcome : Prosentase terselesaikanya rekomendasi di Kecamatan	100%	100%
	5	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Manisrejo	973.398.560,00	822.132.723,00
		Output : Prosentase terselesaikanya rekomendasi di Kelurahan	100%	100%
		Outcome : Prosentase terselesaikanya rekomendasi di Kecamatan	100%	100%
	6	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Kejuron	913.213.680,00	786.398.642,00
		Output : Prosentase terselesaikanya rekomendasi di Kelurahan	100%	100%
		Outcome : Prosentase terselesaikanya rekomendasi di Kecamatan	100%	100%

NO		URAIAN	TARGET	REALISASI
	7	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Josenan	820.765.560,00	712.605.417,00
		Output : Prosentase terselesaikanya rekomendasi di Kelurahan	100%	100%
		Outcome : Prosentase terselesaikanya rekomendasi di Kecamatan	100%	100%
	8	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Demangan	844.759.400,00	735.347.360,00
		Output : Prosentase terselesaikanya rekomendasi di Kelurahan	100%	100%
		Outcome : Prosentase terselesaikanya rekomendasi di Kecamatan	100%	100%
	9	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Taman	917.625.040,00	740.566.583,00
		Output : Prosentase terselesaikanya rekomendasi di Kelurahan	100%	100%
		Outcome : Prosentase terselesaikanya rekomendasi di Kecamatan	100%	100%
6		program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban	154.401.296,00	143.865.365,00
	1	Kegiatan Koordinasi Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	154.401.296,00	143.865.365,00
		Output : Prosentase kehadiran peserta	100%	100%
		Outcome : Prosentase konflik masyarakat yang tertangani	100%	100%

5. Alokasi dan Realisasi Belanja

❖ Kecamatan Kartoharjo

Uraian	Alokasi	Realisasi
Urusan Penunjang Kecamatan		
Belanja Tidak Langsung	Rp 10.873.916.900,00	Rp 7.587.014.484,00
Belanja Langsung	Rp 10.516.857.100,00	Rp 9.228.629.869,00
Total Belanja	Rp21.390.774.000,08	Rp 16.815.644.353,00

❖ Kecamatan Manguharjo

Uraian	Alokasi	Realisasi
Urusan Kecamatan		
Belanja Tidak Langsung	Rp. 9.670.037.000	Rp. 7.870.436.000
Belanja Langsung	Rp. 10.558.631.790	Rp. 8.649.245.155
Total Belanja	Rp. 20.228.668.790	Rp. 16.519.681.155

❖ Kecamatan Taman

Uraian	Alokasi	Realisasi
Urusan Kecamatan		
Belanja Tidak Langsung	Rp. 9.257.746.664	Rp. 8.424.220.416
Belanja Langsung	Rp. 9.423.671.380	Rp. 8.040.903.435
Total Belanja	Rp. 18.681.418.044	Rp. 16.465.123.851

6. Asset yang Dikuasai

❖ Kecamatan Kartoharjo

No.	Urusan	Nilai Asset	Keterangan
1.	Fungsi penunjang Kecamatan	99.739.017.112,15	

❖ Kecamatan Manguharjo

No.	Urusan	Nilai Asset	Keterangan
1.	Kecamatan	Rp. 72.305.538.902,49	

❖ Kecamatan Taman

No.	Urusan	Nilai Asset	Keterangan
1.	Kecamatan	Rp. 72.688.685.434	Baik

e. Proses Perencanaan Pembangunan Daerah

Pembangunan berarti usaha untuk melakukan perubahan keadaan menuju perbaikan. Pembangunan itu sendiri diharapkan berkelanjutan menuju peningkatan kemajuan daerah terutama kesejahteraan masyarakat, oleh karenanya pembangunan itu sendiri perlu direncanakan dengan sebaik-baiknya. Dalam menyusun rencana pembangunan diperlukan suatu system perencanaan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintah dengan melibatkan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan di semua tingkatan sangan dibutuhkan, karena masyarakat adalah pelaku utama pembangunan. Pelaksanaan Proses Perencanaan pembangunan di Kota Madiun di dilakukan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) secara berjenjang dari tingkat kelurahan, tingkat Kecamatan hingga tingkat Kota. Di Kecamatan Taman proses perencanaan pembangunan ini juga dilaksanakan melalui proses forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang diawali dari tingkat Kelurahan untuk mendapatkan kesepakatan prioritas pembangunan yang diusulkan masyarakat dari tingkat RT/RW. Dari hasil Musrenbang yang dilaksanakan oleh 9 Kelurahan di Kecamatan Taman kemudian dilaksanakan Musrenbang tingkat Kecamatan untuk mendapatkan kesepakatan prioritas pembangunanan yang diusulhan ke pemerintah Kota Madiun. Melalui kegiatan yang disebut Musyawarah Perencanaan Pembangnan atau sering disebut Musrenbang inilah peran serta aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan sangat diperlukan.

f. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

❖ Kecamatan Kartoharjo

No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1.	Tanah	220 lahan	Baik
2.	Gedung	56 gedung	Baik
3.	Kendaraan	122 kendaraan	Baik
4.	Alat Bengkel dan alat ukur	13 buah	Baik
5.	Alat pertanian	77 buah	Baik
6.	Alat kantor dan rumah tangga	5.161 buah	Baik
7.	Alat studio dan alat komunikasi	105 buah	Baik
8.	Alat laboratorium	79 buah	Baik
9.	Monumen	10 buah	Baik
10.	Jalan dan Jembatan	17 bangunan	Baik
11.	Bangunan Air/Irigasi	168 bangunan	Baik
12.	Barang bercorak kebudayaan	1 buah	Baik

❖ Kecamatan Manguharjo

No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1.	Tanah	201	Baik
2.	Alat alat besar	1	Baik
3.	Alat alat angkutan	140	Baik
4.	Alat Bengkel dan alat Ukur	0	-
5.	Alat pertanian	11	Baik
6.	Alat kantor dan rumah tangga	4.568	Baik
7.	Alat studio dan alat komunikasi	84	Baik
8.	Alat Laboratorium	51	Baik
9.	Bangunan Gedung	39	Baik
10.	Monumen	8	Baik
11.	Bangunan Air/irigasi	149	Baik
12.	Instalasi	3	Baik

❖ Kecamatan Taman

No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1.	Tanah	220	Baik
2.	Alat Angkutan	154	Baik
3.	Alat Pertanian	1	Baik
4.	Alat Kantor dan rumah tangga	2.947	Baik
5.	Alat Komunikasi	71	Baik
6.	Alat Laboratorium	23	Baik
7.	Bangunan Gedung	61	Baik
8.	Monumen	12	Baik
9	Sarana Irigasi	180	Baik
10.	Instalasi	4	Baik
11.	Buku Perpustakaan	242	Baik
12.	Barang bercorak kebudayaan	1	Baik

g. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

1. Permasalahan umum dalam Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu proses yang ditentukan oleh kemauan dan kepedulian sosial dari warga masyarakat. Di era saat ini semangat kepedulian dari warga masyarakat semakin menurun sebagai akibat dari berkembangnya semangat materialistis dan individualistis.
2. Kurang optimalnya pelayanan prima kepada masyarakat disebabkan karena kurangnya Sumber Daya Aparatur Kecamatan dan Kelurahan yang masih kurang baik dari segi kuantitas maupun kualitas, masih kurang optimalnya koordinasi baik antar instansi maupun antara kecamatan/ kelurahan dengan masyarakat, kurang optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai dan masih kurangnya fasilitas-fasilitas pelayanan kepada masyarakat

Solusi :

1. Diusahakan menumbuhkembangkan semangat gotong royong dan kepedulian sosial, termasuk meningkatkan interaksi sosial diantara sesama warga masyarakat, melalui program-program kegiatan pemberdayaan masyarakat, seperti kegiatan BBGRM, kegiatan lomba-lomba di kelurahan, kegiatan pembangunan yang bersifat padat karya dan lain-lain yang melibatkan peran serta masyarakat.
2. Untuk mengatasi permasalahan kurang optimalnya pelayanan prima kepada masyarakat adalah dengan meningkatkan Sumber Daya Aparatur Kecamatan dan Kelurahan baik dari kuantitas maupun kualitas, mengoptimalkan koordinasi baik antar instansi maupun antara kecamatan/ kelurahan dengan masyarakat, mengoptimalkan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai dan menambah ketersediaan fasilitas-fasilitas pelayanan kepada masyarakat.

C. RINGKASAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM (KESBANGPOL)

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

a. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Berdasarkan Surat Edaran Nomor : 100/2215/SJ tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum bahwa Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah belum ditetapkan, maka Urusan Pemerintahan Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (5) dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah belum dapat dilaksanakan.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk mencegah terjadinya stagnasi pemerintahan dan kekosongan dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum, maka status Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun adalah tetap berstatus sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa, dan Politik Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Adapun pendanaan untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2018 tetap bersumber dari dan atas beban Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Madiun.

b. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Fungsi Penunjang Kecamatan yang dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kota Madiun pada Tahun Anggaran 2019, yaitu sebagai berikut:

Tabel III.52
Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum
di Kota Madiun Tahun 2019

No	Program	Kegiatan	
1	program pelayanan administrasi perkantoran	1	kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor
		2	kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah
2	program pemeliharaan barang milik daerah	1	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan
		2	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas
		3	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala sarana prasarana kantor
3	program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1	kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah
4	program pendidikan politik masyarakat dan organisasi kemasyarakatan	1	Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Parpol
		2	Kegiatan Penyuluhan Kepada Masyarakat
		3	Kegiatan Pembinaan, Verifikasi dan

No	Program	Kegiatan	
			Evaluasi Organisasi Kemasyarakatan/LSM
		4	Kegiatan Fasilitasi Komunikasi dan Koordinasi Ormas/LSM dan Pemuda
		5	kegiatan posko dan monitoring pemilu Legislatif dan Presiden dan Wakil Presiden
5	program pengembangan wawasan kebangsaan	1	Kegiatan Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat
		2	Kegiatan Pemantapan Idiologi dan HAM
6	program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	1	Kegiatan Peningkatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara
		2	Kegiatan Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa
		3	Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama
		4	Kegiatan Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan
		5	Kegiatan Pembinaan Generasi Muda dalam memperkokoh NKRI dengan Penanggulangan Narkoba dan Kenakalan Remaja
		6	Kegiatan Peningkatan Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME
7	program pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal	1	Kegiatan Penanganan Terpadu Gangguan Keamanan
		2	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
		3	Kegiatan Pemantauaan Situasi dan Kondisi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
		4	Kegiatan Peningkatan SDM, Sinkronisasi cegah dini dan deteksi dini terhadap gangguang kamtibmas
		5	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Ijin Survey/Penelitian

c. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Jumlah Pegawai	Kepangkatan	Tingkat Pendidikan	Struktural/ Eselon	Fungsional	Staf
27	Gol I = - Gol II = 4 Gol III = 17 Gol IV = 6	SD = - SMP = 1 SMA = 9 D3 = 3 D4/ S1 = 11 S2 = 3	II = 1 III = 4 IV = 9 V =		

d. Alokasi dan Realisasi Anggaran

1. Realisasi Program dan Kegiatan

NO		URAIAN	TARGET	REALISASI
1		program pelayanan administrasi perkantoran	670.381.626,00	495.822.607
	1	kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	550.381.626,00	375.968.857
		Output : Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	10 jenis	10 jenis
		Outcome : Persentase terlaksananya administrasi perkantoran	100%	100%
	2	kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	120.000.000,00	119.853.750
		Output : Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	69 kali	60 kali
		Outcome : Persentase terlaksananya administrasi perkantoran	100%	100%
2		program pemeliharaan barang milik daerah	78.789.200,00	67.689.500
	1	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan	4.000.000,00	3.950.000
		Output : Jumlah gedung/ bangunan yang terpelihara	1 gedung	1 gedung
		Outcome : Persentase terlaksananya administrasi perkantoran	100%	100%
	2	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas	39.789.200,00	29.044.500
		Output : Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	24 unit	24 unit
		Outcome : Persentase terlaksananya administrasi perkantoran	100%	100%
	3	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala sarana prasarana kantor	35.000.000,00	34.695.000
		Output : Jumlah sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	7 jenis	7 jenis
		Outcome : Persentase terlaksananya administrasi perkantoran	100%	100%
3		program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	97.392.640,00	38.159.000
	1	kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	97.392.640,00	38.159.000
		Output : Jenis dokumen perencanaan dan laporan yang disusun	12 dokumen	12 dokumen
		Outcome : Persentase dokumen perencanaan /laporan yang disusun tepat waktu	100%	100%
4		program pendidikan politik masyarakat dan organisasi kemasyarakatan	833.136.148,00	801.330.051
	1	Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Parpol	24.381.684,00	19.167.080
		Output : Jumlah peserta		

NO		URAIAN	TARGET	REALISASI
		Pengelolaan		
		Outcome : Persentase parpol dan orkemas yang memahami regulasi	100%	100%
	2	Kegiatan Penyuluhan Kepada Masyarakat	199.364.048,00	191.372.927
		Output : Jumlah peserta penyuluhan		
		Outcome : Persentase parpol dan orkemas yang memahami regulasi	100%	100%
	3	Kegiatan Pembinaan, Verifikasi dan Evaluasi Organisasi Kemasyarakatan/LSM	45.015.184,00	43.257.517
		Output : Jumlah pengurus orkemas /LSM yang memperoleh pembinaan	300 orang	300 orang
		Outcome : Persentase parpol dan orkemas yang memahami regulasi	100%	100%
	4	Kegiatan Fasilitasi Komunikasi dan Koordinasi Ormas/LSM dan Pemuda	42.969.344,00	40.725.968
		Output : Jumlah peserta sarasehan	300 orang	300 orang
		Outcome : Persentase parpol dan orkemas yang memahami regulasi	100%	100%
	5	kegiatan posko dan monitoring pemilu Legislatif dan Presiden dan Wakil Presiden	521.405.888,00	506.806.559
		Output : Petugas Caraka	715 orang	715 orang
		Outcome : Persentase parpol dan orkemas yang memahami regulasi	100%	100%
5	program pengembangan wawasan kebangsaan		205.818.052,00	197.153.729
	1	Kegiatan Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat	158.895.368,00	154.568.421
		Output : Jumlah peserta sosialisasi dan lomba	680 orang	680 orang
		Outcome : Konflik horizontal di dalam masyarakat	0	0
	2	Kegiatan Pemantapan Idiologi dan HAM	46.922.684,00	42.585.308
		Output : Jumlah peserta sosialisasi	200 orang	200 orang
		Outcome : Konflik horizontal di dalam masyarakat	0	0
6	program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan		663.726.664,00	566.390.109
	1	Kegiatan Peningkatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara	353.995.768,00	338.794.465
		Output : Jumlah peserta pelatihan dan penyuluhan	400 orang	400 orang
		Outcome : Jumlah kemitraan dengan elemen masyarakat	9	9
	2	Kegiatan Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa	64.424.944,00	56.129.174
		Output : Jumlah peserta sarasehan	230 orang	230 orang
		Outcome : Jumlah kemitraan	9	9

NO		URAIAN	TARGET	REALISASI
		dengan elemen masyarakat		
	3	Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama	64.073.004,00	21.252.208
		Output : Jumlah pertemuan FKUB	3 kali	1 kali
		Outcome : Jumlah kemitraan dengan elemen masyarakat	9	9
	4	Kegiatan Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan	65.961.092,00	58.536.282
		Output : Jumlah peserta sarasehan	230 orang	230 orang
		Outcome : Jumlah kemitraan dengan elemen masyarakat	9	9
	5	Kegiatan Pembinaan Generasi Muda dalam memperkokoh NKRI dengan Penanggulangan Narkoba dan Kenakalan Remaja	70.624.384,00	52.238.800
		Output : Jumlah peserta pembinaan	300 orang	300 orang
		Outcome : Jumlah kemitraan dengan elemen masyarakat	9	9
	6	Kegiatan Peningkatan Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME	44.647.472,00	39.439.180
		Output : Jumlah peserta sarasehan	175 orang	175 orang
		Outcome : Jumlah kemitraan dengan elemen masyarakat	9	9
7	program pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal		574.829.974,00	431.565.448
	1	Kegiatan Penanganan Terpadu Gangguan Keamanan	111.084.302,00	101.254.108
		Output : Jumlah rakor dan sosialisasi	2 kali	2 kali
		Outcome : Jumlah tindak kriminal dalam masyrakat	17	17
	2	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	382.680.136,00	274.639.623
		Output : Jumlah rakor dan sosialisasi	13 kali	10 kali
		Outcome : Jumlah tindak kriminal dalam masyrakat	17	17
	3	Kegiatan Pemantauaan Situasi dan Kondisi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	11.285.184,00	-
		Output : Jumlah pemantauan Kamtibmas	72 kali	72 kali
		Outcome : Jumlah tindak kriminal dalam masyrakat	17	17
	4	Kegiatan Peningkatan SDM, Sinkronisasi cegah dini dan deteksi dini terhadap gangguang kamtibmas	58.495.168,00	55.671.717
		Output : Jumlah peserta sosialisasi	200 orang	200 orang
		Outcome : Jumlah tindak kriminal dalam masyrakat	17	17
	5	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Ijin Survey/Penelitian	11.285.184,00	-
		Output : Jumlah ijin survey/penelitian yang dimonitor	250 ijin	387 ijin
		Outcome : Jumlah tindak kriminal dalam masyrakat	17	17

2. Alokasi dan Realisasi Belanja

No	Uraian	Alokasi	Realisasi
1.	Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik		
	Belanja Tidak Langsung	3.120.929.685,00	2.631.302.205,00
	Belanja Langsung	3.124.074.304,00	2.607.705.904,00
	Total Belanja	6.245.003.989,00	5.239.008.109,00

3. Asset yang dikuasai

No.	Urusan	Nilai Asset	Keterangan
1.	Urusan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Rp. 1.314.633.125,12	Berdasarkan (KIB) B Tahun 2019

e. Proses Perencanaan Pembangunan Daerah

Penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun Tahun 2019 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun yang telah di sinkronkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2014-2019.

Keberhasilan Program dan Kegiatan yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun dalam mencapai target visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan, sangat tergantung pada komitmen pimpinan dan segenap staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun.

Sehingga Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun Tahun 2019 ini dapat Terwujud sesuai dengan harapan dan cita-cita bersama seluruh Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun.

f. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1.	Gedung	-	-
2.	Kendaraan	23 unit	Baik
3.	Alat Kantor	167 jenis	120 baik
	..... (lainnya)		47 rusak berat

g. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

1. Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama tidak dapat diserap secara maksimal karena FKUB ada dana hibah dan bentuk kegiatan hampir sama oleh karena itu yang diserap dari anggaran hibah sedangkan di kegiatan tidak diserap untuk efisiensi penggunaan anggaran.

2. Ada 3 kegiatan yang isinya hanya Uang Kinerja Kegiatan (UKK) karena UKK sudah tercukupi sehingga tidak bisa diserap (ada 2 kegiatan yang isinya hanya UKK yang seharusnya sudah dihilangkan pada waktu RDP dengan DPRD ternyata waktu keluar DPA masih muncul sehingga anggaran tidak diserap 1. Kegiatan Pemantauaan Situasi dan Kondisi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat , 2. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Ijin Survey/Penelitian)

Solusi :

Untuk Perencanaan kedepannya lebih ditingkatkan dan untuk pengajuan anggaran lebih teliti lagi sehingga tidak terjadi hal-hal yang seperti diatas untuk kedepannya

D. INDIKATOR KINERJA KUNCI

1. TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN

a. Ketentraman dan Ketertiban Umum Daerah

Indikator Kinerja Kunci pada Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum daerah meliputi Keberadaan Perda IMB, Rasio rumah yang memiliki IMB, Keberadaan Perda tentang Ketertiban Umum, Pengurusan KTP, Pengurusan KIA, Rasio personil SATPOL PP terhadap jumlah penduduk, Kebijakan bidang Penanganan Bencana dan Keberadaan peraturan tentang kebersihan kota.

Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Madiun diatur dalam Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2011 Tentang retribusi IMB. Berdasarkan data hingga akhir Tahun 2019 rasio Rumah yang memiliki IMB di Kota Madiun sebesar 73,60%. Penduduk yang sudah terekam E-KTP hingga akhir Tahun 2019 mencapai 98,35%, dari 161.427 penduduk yang wajib ber-EKTP. Sedangkan jumlah anak yang sudah memiliki KIA sebesar 81,82% dari 48.647 anak di Kota Madiun.

Dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kota Madiun didukung oleh Aparat Satpol, dengan rasio PNS Satpol PP terhadap jumlah penduduk mencapai 4,6%. Kemudian, Kebijakan tentang Penanganan Bencana diatur melalui Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2014 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bencana. Sedangkan Peraturan tentang kebersihan diatur dalam Peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan.

b. Keselarasan dan Efektivitas Hubungan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah serta antar Pemerintah Daerah dalam rangka Pengembangan Otonomi Daerah

Guna mengukur tingkat kinerja perangkat daerah serta efisiensi penggunaan anggaran secara transparan, dilakukan evaluasi kinerja dalam bentuk Penyampaian LAKIP kepada MenPAN, Laporan Keuangan, Penyampaian LKPJ kepada DPRD, LPPD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur serta RLPPD kepada masyarakat yang penyampaiannya dilakukan setiap tahun secara tepat waktu yaitu selambatnya 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Bidang

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat serta Bidang Sosial.

Dalam rangka mewujudkan Kota Madiun yang lebih maju dan sejahtera, salah satu upayanya adalah melalui Kerjasama Daerah. Kerjasama daerah yang dilaksanakan Pemerintah Kota Madiun dan masih berlaku pada tahun 2019 sebanyak 9 MoU.

c. Keselarasan antara Kebijakan Pemerintahan Daerah dengan Kebijakan Pemerintah

Pemerintah Kota Madiun telah melaksanakan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah dengan prioritas pembangunan daerah (RKPD) sebanyak 5 program dari jumlah prioritas pembangunan nasional sebanyak 5 program..

Pemerintah Kota Madiun telah menyelenggarakan 34 urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari 23 urusan wajib dari 24 Urusan Wajib yang ditetapkan Pemerintah. Urusan yang tidak dilaksanakan di Kota Madiun yaitu Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Urusan Wajib dan Urusan Pilihan di Kota Madiun ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Peraturan Daerah Kota Madiun sebagai wujud pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.

Peraturan Daerah APDB Kota Madiun Tahun 2019 yang ditetapkan pada Perda Nomor 40 Tahun 2018 ditetapkan tepat waktu sebelum dimulai yaitu tanggal 27 Desember 2018. Selain itu, berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kota Madiun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dengan melakukan modifikasi program dan kegiatan yang disesuaikan dengan rencana strategis Pemerintah Kota Madiun yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Jumlah belanja untuk pelayanan dasar pada Tahun 2019 sebesar 61,29%, yaitu jumlah belanja pelayanan dasar APBD sebesar Rp. 844.570.680.336,00 (total dari belanja Urusan Pendidikan, Kesehatan, Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Urusan Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman, Urusan Trantibum dan Linmas, Urusan Sosial) dari total belanja APBD sebesar Rp. 1.377.795.868.937,22. Sedangkan jumlah

belanja untuk urusan pendidikan dan kesehatan sebesar Rp. 545.879.321.695,00 dengan capaian sebesar 48% dari total belanja APBD.

Standar peningkatan Pelayanan Publik pada Tahun 2017 di Kota Madiun sudah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik.

Ratio PNS terhadap penduduk sebesar 1,56% dilihat dari jumlah PNS sejumlah 3.287 orang dibagi jumlah penduduk 210.115 orang. Sedangkan jumlah PNS yang memiliki kualifikasi pendidikan tinggi minimal D3 sebanyak 2.531 orang, sehingga rasio terhadap jumlah PNS keseluruhan sebesar 77%.

Selanjutnya guna mendukung program penyelenggaraan pemerintah daerah, pembentukan OPD telah sesuai berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, dengan jumlah Perangkat Daerah yaitu 1 Sekretariat Bagian, 15 unit Dinas, 6 unit Badan, 1 Unit Sekretariat Dewan, 1 Unit Inspektorat, 1 Unit Satpol PP, 3 unit Kecamatan, dan 27 unit Kelurahan.

d. Efektivitas Hubungan antara Pemerintah Daerah dan DPRD

Raperda yang diajukan Eksekutif pada tahun 2019 kepada DPRD sebanyak 17 Raperda dan seluruhnya telah ditetapkan dan disetujui menjadi Perda atau 100%.

e. Efektivitas Proses Pengambilan Keputusan oleh DPRD Beserta Tindak Lanjut Pelaksanaan Keputusan

Keputusan DPRD yang dihasilkan pada tahun 2019 sebanyak 31 keputusan dan ditindaklanjuti seluruhnya atau 100%.

f. Efektivitas Proses Pengambilan Keputusan oleh Kepala Daerah Beserta Tindak Lanjut Pelaksanaan Keputusan

Kebijakan pembangunan dalam rangka pengelolaan pranata hukum di Kota Madiun diarahkan pada peningkatan kualitas dan kuantitas produk hukum daerah, sehingga produk hukum yang dihasilkan dapat sesuai dengan inspirasi dan prinsip dasar otonomi daerah yang diharapkan dapat dilaksanakan dan diterima oleh masyarakat.

Produk hukum yang dihasilkan oleh Pemerintah Kota Madiun pada Tahun 2019 yaitu berupa Keputusan Walikota sebanyak 246 keputusan dan Peraturan Walikota sebanyak 50 buah.

g. Ketaatan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Peraturan Perundang-undangan

Pemerintah Kota Madiun senantiasa mengajukan Rancangan Peraturan Daerah ke Provinsi untuk dievaluasi. Dan sebagai hasil evaluasi Pemerintah yang diusulkan, tidak ada perda yang dibatalkan.

h. Intensitas dan Efektivitas Proses Konsultasi Publik antara Pemerintah Daerah dengan Masyarakat atas Penetapan Kebijakan Publik yang Strategis dan Relevan untuk Daerah

Peraturan Daerah tentang Konsultasi Publik telah ditetapkan dengan Perda Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda No. 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik dan Perwal Nomor 21 tahun 2014 tentang Tata Kerka Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

Sedangkan sebagai upaya mewujudkan pemerataan publikasi informasi kepada masyarakat Pemerintah Kota Madiun menyediakan media informasi yang dapat diakses oleh publik, antara lain Website Pengelola Layanan Informasi (PPID) Kota Madiun https://madiunkota.go.id/ppid-kota-madiun/, yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Madiun No. 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun, **Radio Suara Madiun** yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 11 Tahun 2011 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun, **Call Center 112** yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 Kota Madiun.

i. Transparansi dalam Pemanfaatan Alokasi, Pencairan dan Penyerapan DAU, DAK, dan Bagi Hasil

Dana Perimbangan di Kota Madiun pada tahun 2019 terealisasi sebesar Rp. 681.537.181.650,00 dari target sebesar Rp.733.188.381.000 atau 93%.

Perbandingan antara Belanja langsung APBD terhadap DAU pada 2019 mencapai 142% dapat dilihat dari perbandingan antara alokasi belanja langsung yang dialokasikan kepada semua dinas teknis yaitu sebesar Rp.742.013.101.222,29 terhadap Dana Alokasi Umum yang diterima pada tahun anggaran 2019 yaitu sebesar Rp. 522.596.024.000,00

Perbandingan Belanja langsung APBD sebesar Rp.742.013.101.222,29 dibanding realisasi belanja APBD Rp. 1.148.511.321.355,75 adalah 65%.

j. Intensitas, Efektivitas, dan transparansi Pemungutan Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah dan Pinjaman/Obligasi Daerah

Besaran realisasi PAD terhadap total pendapatan dalam APBD tahun 2019 sebesar 23%. Penerimaan dari sektor PAD terealisasi sebesar Rp.251.981.381.696,21 dari jumlah realisasi total pendapatan yaitu senilai Rp.1.094.312.970.048,58.

k. Efektivitas Perencanaan, Penyusunan, Pelaksanaan Tata Usaha, Pertanggung Jawaban Dan Pengawasan APBD.

Jenis opini BPK terhadap hasil laporan keuangan daerah dua tahun terakhir, yaitu tahun 2018 dan 2019 adalah WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

Besaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) sebesar Rp. 223.580.475.124,05 dibanding realisasi total pendapatan tahun 2019 adalah 20%. Sedangkan realisasi belanja sebesar Rp. 1.148.511.321.355,75 dibanding total alokasi anggaran belanja adalah 83,36%.

Temuan BPK yang hingga akhir tahun 2019 adalah sebanyak 600 temuan dan semua telah ditindaklanjuti.

l. Pengelolaan Potensi Daerah

Realisasi PAD terhadap potensi PAD pada tahun 2019 mencapai 149% atau terealisasi Rp.251.981.381.696,21 dari target Rp.169.000.128.482,14 yang ditetapkan pada Tahun anggaran 2019. Pencapaian realisasi tersebut dilakukan dengan pengembangan kerjasama di bidang pajak, retribusi daerah, lain-lain pendapatan yang sah serta optimalisasi pemanfaatan asset dan pengelolaan BUMD serta peningkatan pelayanan kekayaan daerah. Kondisi PAD pada tahun 2019 sebesar Rp 251.981.381.696,21 mengalami kenaikan sebesar 9,15%.

m. Terobosan/ Inovasi Baru Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Terobosan/ inovasi baru dilihat dari jumlah penghargaan yang diterima oleh Pemerintah Kota Madiun. Pada tahun 2019 di Kota Madiun mendapat 27 buah penghargaan tingkat Provinsi maupun nasional dari Pemerintah Pusat, antara lain :

1. Juara I Lomba Best Practice Kepala Sekolah Dasar kategori Naskah Terbaik (Dra. Sri Mugi Lestari, Kepala SDN Mojorejo 2)
2. Predikat Kota Layak Anak Tingkat Nasional
3. Penghargaan Pembina Forum Anak Terbaik Tingkat Nasional
4. Juara II Tingkat Nasional Lomba FLSSN kategori Solo Vokal (Bernadita Salwa N.K., pelajar SMP St. Yusuf)
5. Piagam WTP dari Kementerian Keuangan
6. Piagam Penghargaan Clinical Service Improvement Project untuk RSUD Kota Madiun dalam rangka PERSI Award
7. Wahana Tata Nugraha Tahun 2019
8. Penghargaan Menteri Kominfo Jonny G Plate atas Penyelesaian Masterplan Smart City
9. Juara I Lomba Sekolah Sehat (LSS) Tingkat Nasional untuk TK/RA kategori Pencapaian Terbaik (TK Negeri Pembina)

10. Juara Sekolah Sehat Tingkat Nasional (TK Pembina)
11. RKCI 2019 kategori Smart Health dan RKCI 2019 kategori Digital Government Readiness
12. Penghargaan SWASTI SABA WISTARA
13. Penghargaan Role Model Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori "Sangat Baik" dari Kementerian PAN dan RB (Dinas Kependudukan dan Capil)
14. Penghargaan Top 30 Kompetisi SistemPengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) LAPOR! Kemenpan RB
15. Penghargaan Wilayah Bebas Korupsi Kemenpan dan RB (Dinas Kependudukan dan Capil)
16. Penghargaan Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM)
17. Juara II Predikat Kota Ramah Lansia Tingkat Provinsi
18. Juara III Kategori Infografi pada Anugerah Pewarta Warga (APW) Award Tingkat Provinsi
19. Juara III Lomba Cerdas Cermat Komunikatif (LCKK) tingkat Provinsi Jawa Timur (KIM Anyelir)
20. Juara III Duta Putri Gemar Makan Ikan Tingkat Provinsi Jawa Timur
21. Penghargaan BBGRM kategori Pelaksana Gotong Royong Terbaik Tingkat Provinsi Jawa Timur (Kelurahan Nambangan Kidul)
22. Program Unggulan Radio LPPL Terbaik dalam Anugerah Penyiaran KPID Award Provinsi Jawa Timur
23. Juara III Kelompok Usaha Bersama (Kube) Tingkat Provinsi Jawa Timur (Kube PKH Abadi Jaya, Kelurahan Pandean)
24. Juara III Pendamping Kube Terbaik Tingkat Provinsi Jawa Timur (Fepi Aryani, Peksos Supervisor PKH Kota Madiun)
25. Juara III Lomba Cerdas Cermat Keluarga Sadar Hukum Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2019
26. Juara I Yel-Yel Keluarga Sadar Hukum Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2019
27. Keterbukaan Informasi Publik Kategori A (Informatif) PPID Award Provinsi Jawa Timur 2019

Untuk Pengadaan barang dan jasa di Kota Madiun , penerapan E procurement telah mulai operasi pada bulan Desember Tahun 2011. Tahun 2012 sampai Tahun 2014 pelaksanaan E – Procurement dilakukan secara Semi Manual (Penerapan sistem baru sebatas Pengumuman Lelang). Tahun 2015 telah dilaksanakan lelang (by full sistem) sejumlah 85 paket. Tahun 2016 telah dilaksanakan lelang (by full sistem) sejumlah 144 paket.Tahun 2017 telah dilaksanakan lelang (by full sistem) sejumlah 128 paket.Tahun 2018 telah dilaksanakan lelang (by full sistem) sejumlah 161 paket dan Tahun

2019 telah dilaksanakan lelang (by full sistem) sejumlah 169 paket telah didukung dengan adanya E-procurement yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 28 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Madiun.

Jumlah persetujuan investasi pada tahun 2019 di Kota Madiun sebanyak 1.107 ijin.

2. TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN

Penilaian pada tataran Pelaksana Kebijakan yaitu penilaian yang dilakukan terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terdiri dari 8 aspek umum. Penilaian 8 aspek umum diberlakukan terhadap seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait dalam melaksanakan 6 Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar, 23 Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan dasar, 6 Urusan Pemerintahan Pilihan, dan 7 Fungsi Penunjang Pemerintahan, setiap aspek pelaksana kebijakan dirinci ke dalam fokus, dan fokus dirinci lagi menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagaimana lampiran II.2 dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Aspek kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan dinilai berdasarkan indikator kinerja kunci (IKK) Jumlah program yang berkaitan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program NonTeknis) dan keberadaan SOP.

Keberadaan SOP (Standard Operating Procedure) telah dimiliki dan diterapkan di masing-masing OPD di lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

b. Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Aspek ketaatan terhadap peraturan per undang- undangan di Kota Madiun dinilai dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

c. Penataan Kelembagaan Daerah

Penataan kelembagaan daerah dinilai berdasarkan indikator kinerja kunci jumlah struktur jabatan eselonering yang terisi dan terdapat jabatan fungsional dalam struktur organisasi beberapa OPD.

Struktur Organisasi OPD mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Kemudian struktur organisasi setiap OPD berdasarkan Peraturan Walikota sesuai dengan yang ditetapkan. Terdapat 26 Peraturan Walikota yang ditetapkan untuk mengatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja OPD di Kota Madiun. Semua Perwal tersebut ditetapkan pada tanggal 7 Desember 2016.

d. Pengelolaan Kepegawaian Daerah

Pemerintah Daerah sebagai lembaga pelayanan masyarakat yang tersusun dan terorganisasi dalam suatu kelembagaan perangkat daerah pada Pemerintah Kota Madiun Tahun 2018 didukung oleh sumber daya aparatur sebanyak 3.287 orang. Sedangkan jabatan yang ada di Madiun antara lain pejabat struktural dan fungsional.

Pada tahun 2019 jumlah Jabatan Struktural yang telah memenuhi persyaratan pendidikan formal mencapai 100%, kepangkatan mencapai 100% dan Diklatpim yang dipersyaratkan mencapai 100%.

e. Perencanaan Pembangunan Daerah

Pembangunan di bidang perencanaan dan evaluasi pembangunan serta penataan wilayah diarahkan pada perencanaan yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Usulan kebutuhan masyarakat ini selanjutnya dipertemukan dengan rancangan kegiatan dan program pembangunan berdasarkan RENSTRA pada saat MUSRENBANG di tingkat kota. Hasil dari MUSRENBANG Kota merupakan materi untuk menyusun RKPD Kota yang selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dengan memperhatikan pokok-pokok pikiran DPRD. KUA dan PPAS ini menjadi dasar dalam menyusun RAPBD.

Setiap OPD telah menyusun RENSTRA, RENJA dan RKA sebagai acuan pelaksanaan kegiatan OPD. RKPD Tahun 2019 disusun simultan dengan Renja SKPD, prosentase program RKPD yang tidak diakomodasi dalam Renja SKPD amat kecil. Berbeda dengan prosentase Renja SKPD yang tidak diakomodasi dalam RKA SKPD, karena keterbatasan anggaran dan ketidaksinkronan antara usulan kegiatan dengan prioritas pembangunan daerah menyebabkan program-program Renja SKPD tidak bisa diakomodasi semua dalam RKA SKPD. Hal sama berlaku untuk prosentase program-program Renja SKPD yang tidak bisa diakomodasi dalam DPA.

f. Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan Keuangan Daerah sangat dipengaruhi oleh alokasi sumber dana dalam pelaksanaan Pembangunan dan perencanaan daerah secara sistematis, konsisten dan berkesinambungan dengan memperhatikan asas manfaat. Sedangkan untuk alokasi dan realisasi belanja daerah Kota Madiun secara keseluruhan adalah sebagaimana tabel berikut di bawah ini.

Ringkasan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2019

Uraian	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	**544.763.013.542,14**	**406.498.199.329,08**	**74,62**
Belanja Pegawai	446.900.407.136,00	375.303.304.387,00	83,98
Belanja Hibah	16.489.695.000,00	15.422.819.810,08	93,53
Belanja Bantuan Sosial	17.630.500.000,00	15.001.277.870,00	85,09
Belanja Bantuan Keuangan	651.920.000,00	651.920.000,00	100
Belanja Tidak Terduga	63.090.491.406,14	118.877.262,00	0,19
BELANJA LANGSUNG	**833.032.855.395,08**	**742.013.101.222,29**	**89,07**
Belanja Pegawai	80.661.962.645,00	64.919.057.388,00	80,48
Belanja Barang dan Jasa	407.719.198.568,00	369.278.910.242,30	90,57
Belanja Modal	344.651.694.182,08	307.800.742.344,06	89,31

Sumber : BPKAD Kota Madiun

g. Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pemerintah Kota Madiun dalam pengelolaan aset berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah.

h. Pemberian Fasilitasi terhadap Partisipasi Masyarakat

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi serta dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kota Madiun terus berusaha mengembangkan teknologi infomasi melalui pengembangan sarana dan prasarana guna memaksimalkan tugas-tugas pelayanan. Data dan informasi tentang Kota Madiun telah tersedia secara online melalui Website Kota Madiun yaitu www.madiunkota.go.id yang dapat diakses langsung oleh masyarakat umum. Selain itu dalam rangka fasilitasi terhadap partisipasi masyarakat, Pemerintah Kota Madiun menyediakan fasilitas atau prasarana informasi berupa : Papan pengumuman, Pos Pengaduan, Website, Leaflet atau brosur di masing-masing OPD, Mobil Keliling dan Pengumuman di Media Massa.

Untuk mengetahui tingkat Kepuasan masyarakat dan sebagai bahan evaluasi terhadap pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat, maka dilaksanakan Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) setiap tahunnya.

3. CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN

I. URUSAN WAJIB

a. Urusan Pendidikan

Sasaran capaian kinerja dalam penyelenggaraan urusan pendidikan dapat dilihat dari Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai berikut :

1) *Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi dalam PAUD*

Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi dalam PAUD pada tahun 2019 mencapai 88,30%. Dengan jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di PAUD sebesar 2.469 anak dan jumlah anak usia 5-6 tahun yang berada di Kota Madiun sebesar 2.796 anak.

Capaian Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini pada tahun 2018 adalah sebesar 106,66%, sehingga terdapat penurunan sebesar 18,36%. Hal ini disebabkan karena pada Tahun 2019 ada perubahan regulasi.

2) *Persentase Pendidik PAUD yang Memiliki Ijazah Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S1) Bidang Pendidikan Aanak Usia Dini, Kependidikan Lain, atau Psikologi dan Sertifiat Profesi Guru Penddikan Anak Usia Dini*

Capaian tingkat Pendidik PAUD yang Memiliki Ijazah Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S1) Bidang Pendidikan Aanak Usia Dini, Kependidikan Lain, atau Psikologi dan Sertifiat Profesi Guru Penddikan Anak Usia Dini tahun 2019 mencapai 88,05%. Dengan jumlah pendidik PAUD yang memiliki ijazah D IV atau S1 dan sertifikat profesi guru pendidik PAUD sebanyak 420 orang dan jumlah pendidik PAUD keseluruhan sebanyak 477 orang.

3) *Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi*

Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang Terakreditasi pada tahun 2019 sebanyak 66 PAUD, dengan jumlah PAUD keseluruhan 93. Sehingga capaian Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi di Kota Madiun pada tahun 2019 sebesar 70,96%.

4) *Penduduk yang Berusia >15 tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara)*

Angka Melek Huruf diatas usia 15 tahun pada tahun 2018 sudah mencapai 100% demikian juga pada tahun 2019 angka melek huruf sudah 100%

5) *Tingkat Partisipasi Warga Negara usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar*

Untuk usia sekolah dasar yaitu usia 7-12 tahun capaiannya pada tahun 2018 adalah sebesar 134,97% sedangkan capaian pada tahun 2019 adalah sebesar 143,28%. Dibandingkan dengan tahun 2018 ada kenaikan sebesar 8,31%. Jumlah penduduk usia 7-12 tahun Sekolah dasar di Kota Madiun sebanyak 14.534 orang, sedangkan jumlah jumlah siswa Sekolah Dasar usia 7-12 tahun adalah sejumlah 20.824 orang.

Secara umum APS ini menunjukkan bahwa semua anak usia sekolah pendidikan dasar di Kota Madiun telah mendapat akses layanan pendidikan di jenjang pendidikan baik SD/MI. Hal ini juga disebabkan karena pembangunan pendidikan di Kota Madiun sudah sesuai sasaran yaitu meningkatkan akses dan mutu pendidikan melalui kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan sarana prasarana pendidikan di Kota Madiun. Banyaknya jumlah siswa usia 7-12 karena ada siswa dari luar Kota Madiun yang sekolah di Kota Madiun.

6) *Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama*

Capaian Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama sebesar 170,76%. Dengan jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama sebanyak 10.977 anak dan jumlah anak usia 13-15 tahun keseluruhan sebanyak 6.428 anak

7) *Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI*

Angka putus sekolah pendidikan dasar pada tahun 2018 adalah 0. Angka Putus sekolah pada tahun 2019 adalah 0, atau dengan kata lain bahwa di Kota Madiun tidak ada pelajar yang putus sekolah. Hal ini disebabkan karena Masyarakat Kota Madiun sudah menyadari akan pentingnya pendidikan dan karena adanya dukungan anggaran dari pemerintah Kota Madiun melalui Program Pendidikan dasar dan Program BOS dari Pemerintah Pusat.

8) *Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs*

Angka putus sekolah (APS) SMP/MTs di Kota Madiun tahun 2019 sebesar 0%. Dengan kata lain tidak ada pelajar SMP/MTs yang putus sekolah di Kota Madiun.

9) *Persentase Pendidik Pada Jenjang Sekolah Dasar yang Memiliki Ijazah Diploma (D-IV) atau Sarjana (S1) dan Sertifikat Pendidik*

Persentase Pendidik Pada Jenjang Sekolah Dasar yang Memiliki Ijazah Diploma (D-IV) atau Sarjana (S1) dan Sertifikat Pendidik pada tahun 2019

mencapai 97,75%. Dimana jumlah Pendidik Pada Jenjang Sekolah Dasar yang Memiliki Ijazah Diploma (D-IV) atau Sarjana (S1) dan Sertifikat Pendidik sebanyak 824 pendidik, dengan jumlah pendidik jenjang Sekolah Dasar keseluruhan sebanyak 843 pendidik.

10) *Persentase Pendidik Pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama yang Memiliki Ijazah Diploma (D-IV) atau Sarjana (S1) dan Sertifikat Pendidik*

Jumlah Pendidik Pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama yang Memiliki Ijazah Diploma (D-IV) atau Sarjana (S1) dan Sertifikat Pendidik sebanyak 646 pendidik. Sedangkan jumlah pendidik jenjang menengah pertama sebanyak 653 pendidik. Sehingga capaian persentase Pendidik Pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama yang Memiliki Ijazah Diploma (D-IV) atau Sarjana (S1) dan Sertifikat Pendidik sebesar 98,92%.

11) *Persentase SD dan SMP Terakreditasi*

Jumlah satuan pendidikan SD dan SMP di Kota Madiun sebanyak 95 buah dan hanya 1 yang belum terakreditasi. Sehingga capaian persentase SD dan SMP terakreditasi sebanyak 99%.

12) *Angka Kelulusan (AL) SD/MI*

Angka kelulusan SD/MI pada tahun 2018 capaiannya adalah 100%, demikian juga angka kelulusan SD/MI pada tahun 2019 capaiannya adalah 100%. Hal ini disebabkan karena adanya dukungan dari pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Pendidikan dengan mengadakan program dan kegiatan yang ditujukan pada siswa yaitu adanya kegiatan Uji Coba UN bagi sisw SD yang dilaksanakan di Sekolah maupun dilaksanakan Tingkat Kota

13) *Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs*

Capaian angka kelulusan SMP/MTs tahun 2018 dan 2019 adalah 100%. Hal ini disebabkan karena adanya dukungan dari pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Pendidikan dengan mengadakan program Uji Coba UN bagi SMP/MTs baik yang dilaksanakan di Sekolah maupun dilaksanakan Tingkat Kota.

14) *Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs*

Angka Melanjutkan (AM) dari SD/Mi ke SMP/MTs mencapai lebih dari 100%, yaitu 111,35%. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk Kota Madiun usia sekolah dasar di Kota Madiun telah mendapatkan pelayanan pendidikan dasar. Ini di sebabkan antara lain :

a. Sudah terpenuhinya akses pendidikan dasar dan makin meningkatnya mutu pendidikan dasar serta adanya program wajib belajar pendidikan dasar Sembilan tahun dengan tersedianya dana

BOS dari Pemerintah Pusat dan anggaran Program Sekolah Dasar dari APBD Pemerintah KotaMadiun.

b. Terdapat Siswa dari luar Kota Madiun yang bersekolah di Kota Madiun.

15) *Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berpartisipasi dalam pendidikan Kesetaraan*

Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan Menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan sebanyak 96 dari 34.249 anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah. Sehingga capaiannya sebesar 0,28%.

b. Urusan Kesehatan

Sasaran capaian kinerja dalam penyelenggaraan urusan kesehatan dapat dilihat dari Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai berikut :

1) *Rasio Daya Tampung Rumah Sakit terhadap Jumlah Penduduk*

Jumlah Rumah Sakit di Kota Madiun sebanyak 8 rumah sakit dengan daya tampung sebesar 980. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk 210.115 jiwa, maka rasio daya tampung terhadap jumlah penduduk sebesar 0,47%.

2) *Persentase Rumah Sakit Rujukan Tingkat Kota Yang Terakreditasi*

Sampai tahun 2019, jumlah rumah sakit di Kota Madiun masih sejumlah 8 rumah sakit dengan status terakreditasi.

3) *Rasio Tenaga Kesehatan terhadap Jumlah Penduduk Kota*

Tenaga kesehatan adalah tenaga kesehatan yang berada di Puskesmas dan Rumah Sakit di Kota Madiun selain dokter. Jumlah tenaga kesehatan lainnya pada Tahun 2019 adalah 2.483 orang. Jumlah penduduk Kota Madiun sebanyak 210.115 jiwa. Sehingga rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk mencapai 84,62.

4) *Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil*

Capaian bu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil adalah 100%. Hal ini dikarenakan Pemerintah Kota Madiun sangat memperhatikan kondisi kesehatan ibu hamil mulai awal kehamilan hingga melahirkan. Jumlah ibu hamil di tahun 2019 sebanyak 2.524.

5) *Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan*

Jumlah ibu bersalin di Kota Madiun sebanyak 2.523 dan sebanyak 2.524 ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan. Sehingga capaiannya sebesar 100,04%.

6) *Persentase Bayi Baru lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir*

Capaian Persentase Bayi Baru lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sebesar 100%

7) *Persentase Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar*

Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar mencapai 100,12%. Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sebanyak 9.481 balita, dengan jumlah balita di Kota Madiun sebanyak 9.470 balita.

8) *Persentase Anak Usia Pendidikan dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*

Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar mencapai 97,51%. Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sebanyak 31.639 anak, dengan jumlah anak usia pendidikan dasar di Kota Madiun sebanyak 32.447 anak.

9) *Persentase Orang Usia 15-29 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar*

Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar mencapai 107,18%. Jumlah orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sebanyak 123.903 orang. Sedangkan jumlah orang usia 15-29 tahun di Kota Madiun sebanyak 115.602 orang.

10) *Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun ke atas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar*

Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar mencapai 93,20%. Jumlah warga usia 60 tahun keatas yang mendapatkan skrening kesehatan sebanyak 23.556 orang. Sedangkan jumlah warga usia diatas 60 tahun di Kota Madiun sebanyak 25.275 orang.

11) Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan sebanyak 59.911 orang, dengan jumlah penderita hipertensi di Kota Madiun sebanyak 67.155 orang. Sehingga capaiannya sebesar 89,21%.

12) *Persentase Penderita DM yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*

Persentase Penderita DM yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar mencapai 106,54%. Jumlah penderita DM yang terlayani sebanyak 8.450 orang, dengan jumlah penderita DM di Kota Madiun sebanyak 7.931 orang.

13) *Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar*

Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar mencapai 107,44%. Jumlah penderita ODGI yang mendapatkan pelayanan sebanyak 361 orang, dengan jumlah penderita ODGI di Kota Madiun sebanyak 336 orang.

14) Persentase Orang Terduga TBC Mendapatkan Pelayanan TBC sesuai Standar

Persentase Penderita TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati di Kota Madiun pada tahun 2019 sebesar 83,43%. Penderita baru TBC yang ditemukan dan diobati berjumlah 3.957 orang, sedangkan jumlah penderita baru TBC sebanyak 4.743 orang.

15) *Persentase Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan Deteksi Dini HIV Sesuai Standar*

Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sebanyak 6.306 orang. Jumlah orang yang terinfeksi HIV di Kota Madiun sebanyak 6.081 orang. Sehinggga capaiannya 103,70%.

16) *Cakupan Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)*

Jumlah Kelurahan UCI di Kota Madiun pada tahun 2019 sejumlah 27 Kelurahan atau 100%.

17) *Cakupan Balita Gizi Buruk/Stunting mendapat perawatan*

Balita Gizi Buruk yang tertangani yaitu 100%. Jumlah balita yang mengalami stunting sebanyak 900 balita dan keseluruhan bayi stunting mendapatkan perawatan.

18) *Persentase Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD*

Pada Tahun 2019 terdapat 245 kasus DBD dan keseluruhannya 100% mendapatkan penanganan. Tahun 2019 *Case Fatality Rate* (CFR) DBD sebesar 0,82%, yang berarti 0,82% kasus kematian akibat penyakit DBD. Hasil capaian ini sudah mencapai target nasional dimana untuk target CFR sebesar <1%.

Untuk cakupan penanganan kasus DBD mencapai target 100%, hal ini ditunjang dari keterlibatan lintas program dan lintas sektor terkait mulai

dari koordinasi dengan Rumah Sakit yang ada di Kota Madiun dalam pelaporan kasus serta penanganan yang cepat dari pihak Puskesmas dan Dinas Kesehatan & KB mulai dari Penyelidikan Epidemiologi, Penyuluhan Pemberantasan Sarang Nyamuk, Larvasidasi maupun Fogging fokus sehingga tidak terjadi penularan penyakit DBD secara luas. Peran serta dari para kader jumantik RT dan lintas sektor terkait (OPD, sekolah, PKK, FKMS, Kelurahan dan Kecamatan) dalam menggerakkan PSN di masyarakat juga penting dalam meningkatkan Angka Bebas Jentik di Kota Madiun.

19) *Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiraan Hidup*

Angka Kematian Ibu (AKI) pada Tahun 2019 sebesar 39,52, artinya terdapat kematian ibu sebanyak 39,52 orang ibu dari 100.000 kelahiran hidup. Secara absolut jumlah kematian ibu sebanyak 1 orang ibu. Kematian tersebut disebabkan karena adanya penyakit penyerta berat yaitu Kanker pada Hati (Ca Hepar) yang ditemukan pada saat pelaksanaan operasi kelahiran di Rumah Sakit. Hal itu terjadi dengan pemeriksaan kehamilan sesuai standar yang direkomendasikan oleh kementerian kesehatan belum bisa mendeteksi adanya kanker pada hati. Capaian ini masih diatas target 2019 yaitu sebesar 38,59 hal ini disebabkan perkiraan kelahiran pada tahun 2019 sebanyak 2.591 kelahiran hidup, tetapi dari nilai absolut tidak melebihi target yaitu sebanyak 1 kematian.

c. Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

1) *Panjang Jalan Kota dalam Kondisi Baik*

Rasio panjang jalan dalam kondisi baik pada tahun 2019 adalah 93,64 % atau 405,540 Km, jika dibandingkan dengan tahun 2018 terealisasi 94,51 % atau 397,480 Km sehingga ada peningkatan jalan dalam 8,060 Km, dimana pekerjaan yang dilaksanakan berupa pengaspalan jalan/overlay dan peningkatan kapasitas jalan (pelebaran).

Dalam rangka menjaga kondisi jalan yang tetap mantap dan memadai, Pemerintah Kota Madiun telah melaksanakan langkah-langkah pemeliharaan jalan setiap tahun dengan kondisi jalan baik dilaksanakan dengan sistim pemeliharaan rutin, kondisi jalan sedang dilaksanakan dengan pemeliharaan berkala, dan kondisi rusak dilaksanakan sistem pemeliharaan berkala atau dengan peningkatan jalan.

2) *Persentase Panjang Jalan Kota yang Direhabilitasi/Direkontruksi*

Panjang jalan kota yang direhabilitasi/direkontruksi tahun 2019 adalah 40,19 km, dengan panjang jalan yang seharusnya direhabilitasi/direkonstruksi sebesar 52,70 km. Sehingga capaiannya sebesar 76,27%.

3) *Rasio Luas Kawasan permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Infrastuktur Pengendalian Banjir di WS Kewenangan Kota*

Rasio Luas Kawasan permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Infrastuktur Pengendalian Banjir di WS Kewenangan Kota Tahun 2019 sebesar 78,98%.

4) *Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan Perpipaan Dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi terhadap Rumah Tangga di Seluruh Kota*

Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui spam jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di Kota Madiun mencapai 95,67%. Jumlah kumulatif masyarakat rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui spam jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi sebanyak 201.715 rumah tangga. Dengan jumlah rumah tangga di Kota Madiun Tahun 2019 sebanyak 210.846 rumah tangga.

5) *Persentase jumlah Rumah yang Memperoleh Layanan Air Limbah Domestik*

Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk dan jumlah rumah tangga yang lumpur tinjanya telah di olah di PLT dan jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD mencapai 41.542 rumah. Jumlah rumah di Kota Madiun sebanyak 41.958. Dengan demikian, persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan air limbah domestik mencapai 99%.

6) *Persentase Tenaga Operator/Teknisi/Analis yang Memiliki Sertifikat Kompetensi*

Jumlah petugas K-3 yang memiliki sertifikat sebanyak 41 orang, sedangkan jumlah kebutuhan petugas K-3 sebanyak 50 orang. Sehingga persentase tenaga K-3 yang memiliki sertifikat mencapai 82%.

Jumlah mandor pasang beton precast sebanyak 49 orang, sedangkan kebutuhan mandor pasang beton precast sebanyak 120 orang. Sehingga persentase mencapai 40,83%

7) *Rasio Proyek yang menjadi Kewenangan Pengawasannya Tanpa Kecelakaan Konstruksi*

Pada tahun 2019 di Kota Madiun tidak terdapat proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya yang terjadi kecelakaan konstruksi.

8) *Rumah Tangga Bersanitasi*

Jumlah rumah tangga bersanitasi sebanyak 41.542 rumah tangga. Sedangkan jumlah seluruh rumah tangga di Kota Madiun sebanyak 41.958 rumah tangga. Sehingga capaian rumah tangga bersanitasi sebesar 99,71%.

9) *Rumah Tangga Pengguna Air Bersih*

Berdasarkan Undang-Undang RI No.7 Tahun 2004 dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907 Tahun 2002, disebutkan bahwa difinisi air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak. Dengan kata lain air bersih merupakan salah satu jenis sumber daya berbasis air bermutu baik dan biasa dimanfaatkan oleh manusia untuk dikonsumsi atau dalam melakukan aktivitas mereka sehari hari. Dengan Perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah rumah tangga pengguna air bersih}}{\text{Jumlah seluruh rumah tangga}} \times 100\%$$

$$= \frac{41.836}{41.958} \times 100\% = 99,71\ \%$$

10) *Kawasan Kumuh*

Untuk Indikator Kinerja Lingkungan Pemukiman Kumuh jika didasarkan pada kriteria yang ada maka di Kota Madiun sudah tidak terdapat lingkungan pemukiman kumuh.

11) *Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah*

Tahun 2019 Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH) terealisasi 20,01 % dan tahun 2018 terealisasi 19,55 % sehingga ada peningkatan 0,46 %.

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tahun 2019 sebagai Pengendalian Pemanfaatan Ruang khususnya Ruang Terbuka Hijau Privat. Dalam penyelenggaraan tupoksi dimaksud, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang memberikan rekomendasi terkait permohonan pendirian bangunan baru/rehabilitasi. Dalam hal penyediaan tanah untuk RTH Publik diarahkan/disarankan pada pemenuhan RTH Publik di masing-masing kelurahan melalui pemanfaatan dan penggunaan tanah bengkok yang ada di wilayah Kelurahan masing-masing. Disamping tanah bengkok juga diutamakan pengembang untuk memenuhi RTH.

Tabel
Ruang Terbuka Hijau

RTH	Luas	Satuan
RTH Jalur Jalan Kota	57,90	Ha
RTH Taman, Monumen, Gerbang Kota	59,62	Ha
RTH Lapangan Olahraga dan Makam	40,61	Ha
RTH Hutan	14,62	Ha
RTH Pengaman Jalur KA, SUTT dan Sungai	120,33	Ha
RTH Privat		
- Lahan Pekarangan	365,52	Ha
- RTH Taman	1,66	Ha
- RTH Jalur Jalan	4,67	Ha
Jumlah Total	**664,93**	**Ha**

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Madiun

d. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1) *Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Kota*

Tahun 2019 di Kota Madiun tidak terjadi bencana yang mengharuskan rehabilitasi rumah layak huni.

2) *Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kota*

Tahun 2019 di Kota Madiun tidak terjadi bencana yang terdampak relokasi rumah layak huni.

3) *Persentase Kawasan permukiman Kumuh Dibawah 10 ha di Kab/Kota yang Ditangani*

Di Kota Madiun tidak terdapat kawasan permukiman kumuh, sehingga capaiannya 0%.

4) *Berkurangnya Jumlah Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)*

Jumlah unit rumah kumuh sebanyak 20 unit, dengan jumlah rumah di Kota Madiun sebanyak 42.849 unit. Sehingga persentase berkurangnya jumlah RTLH sebesar 0,05%

5) *Jumlah Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)*

Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Kota Madiun mencapai 100%.

6) *Rumah Layak Huni*

Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) belum mencapai target karena mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 tidak ada program bantuan RTLH. Hal tersebut disebabkan adanya peraturan baru mengenai Hibah dan Bansos sehingga baru tahun 2018 program bantuan RTLH tersebut dilaksanakan. Setelah dilakukan verifikasi pada tahun 2019 didapatkan sebanyak 132 rumah yang berhak menerima Bansos RTLH. Adapun dari 430 unit rumah yang tidak layak masih terdapat 20 unit rumah yang tidak menerima bantuan RTLH disebabkan beberapa hal

antara lain : target sasaran penerima bantuan yang tidak masuk pada Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 57/HUK/2017 tentang Penetapan data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin Tahun 2017, warga melakukan perbaikan sendiri serta adanya penolakan dari penerima bantuan yang menolak program tersebut. Perhitungan Rasio Rumah layak Huni sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah rumah layak huni}}{\text{Jumlah seluruh rumah}} \times 100\% = \frac{42.849}{42.869} \times 100\% = 99{,}95\%$$

e. Urusan Ketentraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

1) Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan

Jumlah penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) yang tertangani dibandingkan dengan pelanggaran K3 yang masuk mengalami kenaikan di tahun 2019 sebesar 100%.

Capaian target indikator kinerja sasaran ditahun 2019 sebesar 98% sehingga telah mencapai target RKT tahun 2019. Kenaikan ini terjadi dikarenakan bahwa isu strategis pelanggaran ketertiban umum ditahun 2019 pada pelanggaran reklame. Hal ini dikarenakan adanya kebijakan Bapak Walikota Madiun untuk penataan reklame di Kota Madiun agar wilayah Kota Madiun indah dan bersih, selain itu juga menuju Kota Smartcity dimana reklame ditata sesuai dengan aturan dan peruntukkannya. Sehingga pelanggaran reklame yang ada baik reklame insidentil dan permanen yang sudah rusak, melanggar dan tidak berijin ditindaklanjuti oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja melalui kegiatan penertiban pelanggaran Perda dan patroli wilayah pelanggaran Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

2) Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan

Dihitung dengan rumus :

$$= \frac{\text{Jumlah penyelesaian pelanggaran Perda}}{\text{Jumlah pelanggaran perda yang masuk}} \times 100\%$$

$$= \frac{38}{38} \times 100\% = 100\%$$

Dengan demikian indikator kinerja sasaran Persentase Penegakan Peraturan Daerah ditahun 2019 sebesar 100% dan ditahun 2018 sebesar 100%.

Capaian target indikator kinerja sasaran ditahun 2019 sebesar 100% sehingga mencapai target RKT tahun 2019, bahwa pelanggaran Perda yang dilakukan oleh masyarakat ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota. Satuan Polisi Pamong Praja dalam

melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011, dengan ruang lingkup meliputi :

a. Melakukan pengarahan kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar Peraturan daerah
b. Melakukan pembinaan dan atau sosialisasi kepada masyarakat dan badan Hukum
c. Prefentif non yustisial
d. Penindakan yustisial

Pada tahapan Penindakan Yustisi dilakukan penyidikan dan penuntutan ke Pengadilan melalui Korwas PPNS Polres Madiun Kota. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam melaksanakan penegakkan Perda.

3) *Jumlah warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana*

Warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana di Kota Madiun sebanyak 3.350 orang

4) *Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana*

Warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana di Kota Madiun pada Tahun 2019 berjumlah 870 orang.

5) *Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana*

Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana di Kota Madiun mencapai 100%.

6) *Waktu Tanggap (Response Time)*

Untuk tahun 2019 Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajamen Kebakaran (WMK) sebesar 100% sehingga pencapaiannya sama dengan tahun 2018. Dan telah memenuhi target tahun 2019.

Hal ini dikarenakan setiap adanya laporan pengaduan kejadian kebakaran yang dilaporkan oleh masyarakat dan intansi pemerintah maupun swasta baik secara langsung maupun melalui telepon segera ditindaklanjuti oleh Petugas Pemadam Kebakaran dengan langsung kelokasi kebakaran dan melaksanakan Operasi Pemadaman Kebakaran sesuai Standar Operasional Prosedur Penanggulangan Pemadaman Kebakaran. Dengan misi kemanusiaan anggota Pemadam Kebakaran dengan sigap dan tanggap dalam melaksanakan tugas.

7) *Persentase Personil Satpol PP Berkualitas PPNS*

Jumlah personil Satpol PP berkualitas PPNS adalah 3 orang. Jumlah personil Satpol PP adalah 41 orang. Capaian personil Satpol PP berkualitas PPNS sebesar 7,32%

f. Urusan Sosial

1) *Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti*

Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti sebanyak 930 orang. Sedangkan jumlah populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis berjumlah 804 orang. Sehingga capaiannya 115,7%.

2) *Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kota*

Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah di Kota Madiun sebesar 0%. Karena pada tahun 2019, di Kota Madiun tidak terjadi bencana alam yang menimbulkan korban.

3) *Rasio Rumah Singgah/Shelter/Tempat Tinggal Sementara yang Dimiliki Sesuai Standar dengan Jumlah Penyandang Disabilitas terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng*

Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar sebanyak 17 buah. Sedangkan jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng sebanyak 896 orang. Sehingga capaiannya sebesar 1,9%.

4) *Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang Direunifikasi dengan Keluarga*

Capaian persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga mencapai 49%. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga sebanyak 72 orang. Sedangkan penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dibina sebanyak 930 orang.

5) *Rasio Pekerja Sosial Profesional dan/atau TKS dan/atau Relawan Sosial yang Disediakan*

Jumlah pekerja sosial profesional dan atau tenaga kerja sosial dan atau relawan sosial yang ada sebanyak 473 orang. Sedangkan penyandang

disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dibina sebanyak 930 orang. Sehingga capaiannya sebesar 50,9%.

g. Urusan Tenaga Kerja

1) Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja

2) Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu RTKD sebanyak 11 kegiatan. Sedangkan jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di Kota Madiun pada tahun 2019 sebanyak 13 kegiatan. Dengan demikian persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja mencapai 84,6%.

3) Persentase Tingkat Kerja Bersertifikat Kompetensi

Persentase tingkat kerja bersertifikat kompetensi mencapai 7,70%. Dengan jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi sebanyak 1.296 orang dan jumlah tenaga kerja keseluruhan sebanyak 16.821 orang.

4) Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja

Tingkat produktivitas tenaga kerja di Kota Madiun mencapai 11.570,32%

5) Persentase Perusahaan yang Menerapkan tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)

Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak di Kota Madiun pada tahun 2019 mencapai 78%. Dengan jumlah keseluruhan perusahaan sebanyak 718 dan perusahaan yang telah menerapkan tata kelola kerja yang layak sebanyak 558 perusahaan.

6) Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kota

Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja di Kota Madiun mencapai 85,52%. Dengan jumlah pencari kerja sebanyak 721 dan jumlah pencari kerja yang terdaftar sebanyak 843.

7) Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang Diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial.

Reformasi telah membukakan pemikiran bagi terjadinya perubahan menuju penyelenggaraan Negara yang lebih demokratis, transparan dan memiliki akuntabilitas tinggi serta terwujudnya good governance. Perubahan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28 E ayat (3), UU NO 21 tahun 2000, KEP/16/MEN/2001, merupakan dasar hukum dalam melakanakan Organisasi Serikat Pekerja (SP). Dalam konteks Ketenagakerjaan kita menerapkan sistem Hubungan Industrial Pancasila,

yang harus di pahami secara mendalam substansi dan implikasinya oleh Pekerja dan Pengusaha.

Pekerja atau buruh, pengusaha dan pemerintah bersama- sama menegakkan dan mematuhi undang- undang ketenagakerjaan dengan mengadakan kesepakatan bersama untuk menyelesaikan segala perselisihan yang terjadi dengan berdasarkan perjanjian kerja dan perjanjian bersama (PB).

Meskipun sudah adanya PB yang disepakati anatar pekerja atau buruh, pengusaha dan pemerintah, namun masih terdapat sengketa antara pekerja atau buruh dan pengusaha. Untuk Kota Madiun jumlah pengaduan sengketa pekerja atau buruh dengan pengusaha ditahun 2019 yang terdaftar sejumlah 27 pengaduan dapat terselesaikan semua.

8) *Persentase Instruktur Bersertifikat Kompetensi*

Jumlah instruktur bersertifikat kompetensi pada tahun 2019 sebanyak 45 instruktur, dengan jumlah instruktur keseluruhan sebanyak 90. Sehingga capaiannya sebesar 50%.

9) *Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Yang Memiliki Perizinan*

Lembaga pelatihan kerja di Kota Madiun yang memiliki perizinan mencapai 100%, dengan jumlah lembaga pelatihan sebanyak 22 lembaga.

h. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1) *Persentase ARG pada belanja langsung APBD*

Persentase ARG pada belanja langsung APBD mencapai 3,01%. Jumlah ARG pada belanja langsung APBD sebesar Rp. 25.075.903.376 dan jumlah belanja APBD sebesar Rp. 833.032.855.395,08

2) *Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kota*

Jumlah anak korban kekerasan yang ditangani pada tahun 2019 sebanyak 5 anak, dengan jumlah anak usia kurang dari 18 tahun sebanyak 48.873 anak. Dengan demikian persentase anak korban kekerasan yang ditangani sebesar 0,01%.

3) *Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)*

Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO per 100.000 penduduk perempuan mencapai 10,255. Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan sebanyak 11 orang.

4) *Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani*

Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani mencapai 100%, dengan jumlah korban kekerasan sebanyak 11 orang.

5) *Partisipasi angkatan kerja perempuan*

Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan sebanyak 68.430 orang dengan jumlah angkatan kerja perempuan sebanyak 72.940 orang. Sehingga capaian partisipasi angkatan kerja perempuan sebesar 93,81%

i. Urusan Pangan

1) *Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan)*

Rasio ketersediaan pangan utama dihitung dari jumlah ketersediaan beras dibagi jumlah penduduk Kota Madiun. Ketersediaan beras menggambarkan jumlah produksi beras domestik dikurangi ekspor ditambah dengan impor/ pasokan dari luar daerah serta stok yang ada dalam setahun. Adapun rumus perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Ketersediaan Pangan Utama} = \frac{\text{Jumlah Cadangan Pangan}}{\text{Jumlah kebutuhan Pangan}} \times 100\%$$

Data rasio ketersediaan pangan utama Januari sampai Desember 2019 adalah 154,44 kg/kapita yang dihitung dari jumlah ketersediaan pangan utama / beras sebesar 32.450 ton dibagi dengan jumlah penduduk 210.115 jiwa (Dispendukcapil, 2019). Seperti halnya data tahun 2018, rasio ketersediaan pangan tahun 2019 melibatkan data produksi dan data pasokan, tetapi tidak memperhitungkan beras yang dijual keluar wilayah Kota Madiun.

Rasio ketersediaan pangan utama tahun 2019 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 15,7% karena pada tahun 2018 diperhitungkan menggunakan jumlah penduduk dari data BPS Kota Madiun, sedangkan pada tahun 2018 menggunakan penyeragamam data jumlah penduduk dari Dispendukcapil. Walaupun terjadi perbedaan basis data perhitungan jumlah penduduk, namun capaian rasio ketersediaan pangan utama tahun 2018 masih memenuhi target yang telah ditentukan.

Jika dibandingkan dengan target yang ditentukan, capaian rasio ketersediaan pangan utama tahun 2019 mengalami kenaikan yang sangat tinggi. Hal ini karena penentuan target rasio ketersediaan pangan hanya memperhitungkan jumlah produksi beras di wilayah Kota Madiun. Sedangkan perhitungan capaian rasio ketersediaan pangan tidak hanya memperhitungkan jumlah produksi beras tetapi juga jumlah pasokan.

2) *Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan*

Di Kota Madiun terdapat infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan

j. Urusan Pertanahan

1) Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan

Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan mencapai 1005, dengan luas tanah yang sesuai untuk peruntukan ijin lokasi sebesar 10.534 meter persegi.

2) Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum

3) Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal

Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai peruntukkannya di atas izin lokasi berjumlah 26.975 m^2. Dan keseluruhannya telah diterbitkan izin lokasi. Dengan kata lain, capaiannya sebesar 100%.

4) Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee

Di Kota madiun tidak terdapat tanah obyek landreform.

5) Luas lahan bersertifikat

Luas lahan bersertifikat di Kota Madiun mencapai 98,20% dari 32.230.000 m^2 luas lahan yang seharusnya bersertikat.

6) Tersedianya tanah untuk masyarakat

Di Kota Madiun tidak terdapat luas tanah yang dimanfaatkan berdasarkan izin membuka tanah.

7) Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi

Tahun 2019 tidak terdapat sengketa tanah garapan.

k. Urusan Lingkungan Hidup

Sasaran capaian kinerja dalam penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup dapat dilihat dari Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai berikut:

1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebagai indikator pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia digunakan untuk menilai kinerja program perbaikan kualitas lingkungan hidup. IKLH juga dapat digunakan sebagai bahan informasi dalam mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Kriteria yang digunakan untuk menghitung IKLH adalah : (1) Kualitas Air, (2) Kualitas Udara, dan (3) Kualitas Tutupan Lahan. Adapun pembobotan untuk setiap indikator terdiri dari 30 % untuk pencemaran air, 30 % untuk pencemaran udara, dan 40 % untuk tutupan hutan.

IKLH Kota Madiun tahun 2019 dengan target yang tidak tercapai dan mengalami penurunan bila dibandingkan IKLH tahun 2018, maka secara otomatis target RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) juga dan tidak tercapai. Bila dibandingkan dengan target dan capaian IKLH Provinsi Jawa Timur untuk Kota Madiun masih berada dibawahnya. Penurunan IKLH Kota Madiun dipengaruhi oleh penurunan nilai Indek Kualitas Air (IKA) dan nilai Indek Kualitas Udara (IKU). Kondisi di Kota Madiun tahun 2019 nilai IKA dan IKU mengalami penurunan sedangkan IKTL mengalami kenaikan.

a. Penurunan IKA

Hasil perhitungan Indeks Kualitas Air Tahun 2019sebesar 76,70 menurun dibandingkan IKA tahun 2018 sebesar 76,89.Dari data hasil uji laboratorium air sungai selama setahun menunjukkan bahwa beberapa parameter melebihi baku mutu. Penurunan kualitas air dipengaruhi oleh terjadinya kemarau panjang sehingga konsentrasi pollutan dalam air sungai tinggi yang tentu saja sangat berpengaruh terhadap kualitas air sungai yang dipantau. Selain itu angka parameter total coliform sangat tinggi di atas baku mutu, total coliform merupakan indikasi adanya limbah pembuangan kotoran manusia dan hewan dalam aliran air sungai. Dimana di Kota Madiun belum ada IPLT untuk menampung limbah tinja, sehingga dimungkinkan limbah tinja dibuang ke sungai yang akan mencemari air sungai.

b. Penurunan IKU

Hasil perhitungan Indeks Kualitas Udara Tahun 2019 sebesar 84,38 masih berada pada kategori relatif baikmeskipun menurun dibandingkan IKU tahun 2018 sebesar 85,50. Namun, secara umum menurunnya curah hujan akibat musim kemarau merupakan penyebab utama penurunan kualitas udara di Kota Madiun. Kemarau panjang menyebabkan tidak ada hujan yang bisa mengurangi pengendapan (pencucian) polutan di udara oleh proses yang dinamakan *rain washing*. Dengan kondisi udara yang stagnan, cuaca cerah, lapisan inversi suhu atau kecepatan angin yang rendah itulah memungkinkan polusi udara tetap berada di udara sehingga mengakibatkan peningkatan konsentrasi polutan yang tinggi.Selain itu meningkatnya jumlah kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4

di Wilayah Kota Madiun juga berpotensi meningkatkan emisi gas buang kendaraan bermotor yang dapat mencemari kualitas udara.

c. Peningkatan IKTL

Hasil perhitungan Indeks Kualitas Tutupan Lahan Tahun 2019 sebesar 38,87 meningkat dibanding tahun 2018 yaitu 38,76. Peningkatan IKTL dipengaruhi adanya penambahan ruang terbuka hijau dari 632,21 Ha menjadi 634,86.

2) Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kota

Prosentase penanganan sampah untuk realisasi tahun 2019 adalah 94,001% melebihi realisasi tahun 2018 yang 93,68 dan juga melebihi target yang telah ditentukan tahun 2018 yang 93,65%.

Sedangkan berdasarkan data pada akhir Bulan Desember 2019, Prosentase Penanganan Sampah dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Volume sampah yang ditangani}}{\text{Volume Produksi Sampah}} \times 100\% = \frac{119.970{,}181}{127.626{,}508} \times 100\%$$

= 94,001%

3) Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota

Di Kota Madiun tidak terdapat penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota.

l. Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

1) Persentase Penduduk usia 0 - 18 tahun Yang Mempunyai Akte Kelahiran

Jumlah penduduk usia 0 - 18 tahun yang mempunyai akte kelahiran sebanyak 51.239. Sedangkan jumlah penduduk usia 0-18 tahun sebanyak 52.019. Dengan demikian persentase penduduk usia 0 - 18 tahun yang mempunyai akte kelahiran mencapai 98,50%.

2) Persentase Penduduk berumur dari 17 tahun ke atas yang mempunyai KTP Elektronik

Persentase penduduk berumur dari 17 tahun ke atas yang mempunyai ktp elektronik mencapai 98,22%. Jumlah penduduk berumur dari 17 tahun ke atas yang mempunyai ktp elektronik adalah 158.559, sedangkan jumlah penduduk 17 tahun keatas adalah 161.427 jiwa.

m. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1) *Persentase pengentasan desa tertinggal*

Di Kota Madiun tidak terdapat desa tertinggal.

2) *Persentase peningkatan status desa mandiri*

Persentase peningkatan status desa mandiri di Kota Madiun mencapai 100%, dengan jumlah kelurahan sebanyak 27.

3) *PKK aktif*

Capaian PKK aktif di Kota Madiun sebesar 100%, dengan jumlah PKK sebanyak 31.

4) *Posyandu*

Jumlah posyandu aktif adalah 265 posyandu. Jumlah seluruh posyandu 270. Dengan demikian capaian yang diperoleh sebesar 98,15%.

n. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1) *TFR (Angka Kelahiran Total)*

Menurut data BPS, Angka Kelahiran Total tahun 2019 mencapai 1,94

2) *Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)*

Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur 15-19 tahun adalah 33 kelahiran. Sedangkan jumlah penduduk perempuan krelompok umur 15-19 tahun pada pertengahan tahun yang sama sebanyak 7.400. Sehingga capaian angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun sebesar 0,45%.

3) *Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)*

Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) mencapai 78,8%, dengan jumlah peserta KB aktif modern sebanyak 21.633 dan jumlah pasangan usia subur 27.452

4) *Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)*

Jumlah PUS yang ingin ber KB tetapi tidak terlayani sebanyak 1.153 PUS. Sedangkan jumlah PUS sebanyak 27.452. Sehingga persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi mencapai 4,2%.

o. Urusan Perhubungan

1) *Rasio konektivitas Kota*

Rasio konektivitas Kota Madiun sebesar 0

2) *Kinerja lalulintas Kota*

Kinerja lalu lintas di Kota Madiun mencapai 0,45

p. Urusan Komunikasi dan Informatika

1) *Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo*

   Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang terhubung akses internet yang disediakan Dinas Kominfo adalah 100%.

2) *Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi*

   Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi mencapai 100%. Jumlah layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi adalah 3 aplikasi, sedangkan jumlah layanan publik sebanyak 3, yaitu Call Centre, PPID dan Service Desk.

3) *Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kota*

   Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah Kota Madiun sebanyak 77.633, sedangkan jumlah penduduk Kota Madiun sebanyak 210.115. Sehingga persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah Kota Madiun mencapai 36.95%.

4) *Peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government*

   Peraturan Walikota terkait implementasi e government ditetapkan dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 30 tahun 2019 tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

5) *Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo*

   Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo mencapai 28,57%. Jumlah ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi adalah 2 orang dan jumlah ASN pengelola TIK yang seharusnya tersertifikasi kompetensi adalah 7 orang.

q. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

1) *Meningkatnya Koperasi yang berkualitas*

   Jumlah koperasi di Kota Madiun adalah 308 koperasi. Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset adalah 150 koperasi. Sehingga capaian koperasi yang berkualitas mencapai 48,70%.

2) *Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha*

Jumlah usaha mikro di Kota Madiun yang menjadi wirausaha adalah 97dan jumlah usaha mikro keseluruhan adalah 21.038. Capaian usaha mikro yang menjadi wirausaha sebesar 0,46%.

3) *Persentase jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha*

Persentase jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha mencapai 25,81% dari 1.038 usaha kecil keseluruhan.

4) *Koperasi aktif*

Jumlah Koperasi keseluruhan yang ada di Kota Madiun sampai dengan akhir bulan Desember 2019 sejumlah 308 unit, yang terdiri dari 302 unit Koperasi aktif dan 6 unit Koperasi tidak aktif, adapun data koperasi tidak aktif adalah sebagai berikut:

- Koperasi Cokroaminoto
- Koperasi Dian Sejahtera
- Koperasi Sanggar Busana
- Koperasi Kharisma Utaman
- Koperasi Masyarakat Bumi Putra
- Koperasi KPPU

Dari 6 koperasi tersebut telah dilakukan pembinaan dari aspek administrasi organisasi, kelembagaan dan usaha agar Koperasi tersebut dapat aktif baik kelembagaan maupun usahanya. Untuk perhitungan Persentase Koperasi Aktif didapat dari perbandingan jumlah koperasi aktif dibanding jumlah koperasi keseluruhan baik aktif maupun tidak aktif.

r. Urusan Penanaman Modal

1) *Persentase peningkatan investasi di Kota*

Jumlah investasi tahun 2019 sebesar Rp. 968.702.041.674. Jumlah investasi tahun 2018 sebesar Rp. 966.733.731.153. Sehingga persentase peningkatan investasi di Kota Madiun mencapai 0,20%

s. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Sasaran capaian kinerja dalam penyelenggaraan urusan Kepemudaan dan Olahraga dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja kunci (IKK), antara lain:

1) *Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri*

Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di Kota Madiun sebanyak 107 orang. Jumlah pemuda usia 16-30 tahun sebanyak 42.859.

Sehingga tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri mencapai 0,25%.

2) *Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan*

Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan mencapai 0,31%. Dengan jumlah pemuda usia 16-30 tahun yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi social kemasyarakatan sebanyak 135 pemuda. Sedangkan jumlah seluruh pemuda sebanyak 42.859.

3) *Peningkatan prestasi olahraga*

Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional adalah 50 medali.

- Kejuaraan PORPROV JATIM :
  1) 2 medali perunggu cabang olahraga angkat besi
  2) 1 medali perunggu cabang olahraga atletik (lompat jauh)
  3) 1 medali perunggu cabang olahraga billiard
  4) 1 medali emas cabang olahraga gulat
  5) 2 medali perunggu cabang olahraga gulat
  6) 4 medali perunggu cabang olahraga judo
  7) 1 medali perunggu cabang olahraga karate
  8) 1 medali perak cabang olahraga karate
  9) 4 medali perunggu cabang olahraga muathay
  10) 1 medali perak cabang olahraga muathay
  11) 2 medali emas cabang olahraga muathay
  12) 1 medali perak cabang olahraga renang
  13) 1 medali perunggu cabang olahraga senam
  14) 3 medali perunggu cabang olahraga taekwondo
  15) 2 medali perak cabang olahraga tenis meja
  16) 1 medali perunggu cabang olahraga tenis meja
  17) 1 medali perak cabang olahraga tinju
  18) 7 medali emas cabang olahraga jujitsu
  19) 2 medali perak cabang olahraga jujitsu
  20) 5 medali perunggu cabang olahraga jujitsu
  21) 1 medali perak cabang olahraga judo beregu
  22) 1 medali peunggu cabang olahraga tenis meja beregu
- Kejuaraan diluar PORPROV JATIM 2019:
  1) 2 medali emas cabang olahraga atletik
  2) 2 medali emas cabang olahraga sepak takraw
  3) 1 medali emas cabang olahraga pencak silat

4) *Presentase Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan-satuan pendidikan*

Presentase jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan-satuan pendidikan mencapai 100%, dengan jumlah pelatih olahraga yang memiliki kompetensi sebanyak 158 pelatih.

t. Urusan Statistik

1) *Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah*

Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah mencapai 100%. Hal ini dikarenakan setiap OPD menggunakan data statistik dalam penyusunan perencanaan pembangunan.

2) *Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah*

Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah mencapai 100%.

u. Urusan Persandian

1) *Tingkat keamanan informasi pemerintah*

Jumlah nilai per area keamanan informasi adalah 1.035 radiogram, dengan jumlah area penilaian sebanyak 34 OPD. Sehingga tingkat keamanan informasi pemerintah mencapai 30,44%.

v. Urusan Kebudayaan

1) *Terlestarikannya Cagar Budaya*

Jumlah cagar budaya yang dilestarikan di Kota Madiun sebanyak 21 buah, dengan jumlah cagar budaya yang terdata sebanyak 146 buah. Sehingga capaian terlestarinya cagar budaya sebanyak 14,38%.

2) *Penyelenggaraan festifal seni & budaya*

Penyelenggaraan festival seni dan budaya pada Tahun 2019 sebanyak 58 (lima puluh delapan) festival yaitu :

- Festival Vokal Lagu Madiun Nyaman dan Damai
- Festival Dalang Lanjutan
- Festival Dalang Pemula
- Festival Vokal Sindenan
- Festival Upacara Adat
- Festival Seni Karawitan Tingkat Kota
- Festival Dongeng Kesejarahan

- Festival Geguritan
- Festival Gembrung
- Festival Syubahanul Wathon
- Festival Tari Sufi
- Festival Puji-Pujian
- Festival Hadroh Banjari
- Festival Qosidah Modern
- Festival Wayang Kulit Kecamatan Manguharjo
- Festival Lagu Koes Plus Kecamatan Kartoharjo
- Festival Wayang Kulit Kecamatan Taman
- Festival Reog dan Karawitan Kelurahan Tawangrejo
- Festival Reog dan Gambyong Kelurahan Kelun
- Festival Reog dan Campursari Kelurahan Sukosari
- Festival Reog dan Uyon-Uyon Kelurahan Kartoharjo
- Festival Reog dan Campursari Kelurahan Oro Oro Ombo
- Festival Reog dan Campursari Kelurahan Nambangan Kidul
- Festival Reog Kelurahan Demangan
- Festival Reog Kelurahan Nambangan Lor
- Festival Reog Kelurahan Banjarejo
- Festival Tari, Reog dan Campursari Kelurahan Pangongangan
- Festival Gembrung, Reog, Hadroh Kelurahan Kuncen
- Festival Reog dan Jaranan Kelurahan Pilangbango
- Festival Reog dan Jaranan Kelurahan Mojorejo
- Festival Reog, Campursari dan Jaranan Kelurahan Madiun Lor
- Festival Uyon-Uyon, Gambyongan, dan Campursari Keluraha Sogaten
- Festival Reog, Uyon-Uyon, Barongsai dan Dongkrek Kelurahan Pandean
- Festival Reog dan Tari Kelurahan Manguharjo
- Festival Wayang Kulit Kelurahan Patihan
- Festival Reog, Campursari, Tari, dan Hadroh Kelurahan Manisrejo
- Festival Campursari dan Reog Kelurahan Ngegong
- Festival Reog Kelurahan Josenan
- Festival Reog dan Campursari Kelurahan Klegen
- Festival Reog Kelurahan Kanigoro
- Festival Reog Kelurahan Rejomulyo
- Festival Band Pelajar
- Festival Band Umum

- Festival Lagu Anak
- Festival Lagu Nasional
- Festival Lagu Daerah
- Festival Vokal Keroncong Pelajar
- Festival Campursari Pelajar
- Festival Vokal Keroncong Umum
- Festival Campursari Umum
- Festival Wayang Kulit
- Festival Grebeg Maulud
- Festival Perayaan Malam Tahun Baru
- Festival Pentas Seni Periodik
- Festival Campursari di Madioen Tempo Doeloe
- Festival Dangdut di Madioen Tempo Doeloe
- Festival Lagu-Lagu Koes Plus di Madioen Tempo Doeloe
- Festival Band Nusantara di Madioen Tempo Doeloe

w. Urusan Perpustakaan

1) *Nilai Budaya Baca*

   Nilai budaya baca di Kota Madiun pada tahun 2019 mencapai 54,99%

2) *Persentase naskah kuno dan koleksi budaya etnis nusantara yang dikelola dan dilestarikan*

   Persentase naskah kuno dan koleksi budaya etnis nusantara yang dikelola dan dilestarikan mencapai 100%.

3) *Koleksi buku yg tersedia di perpustakaan daerah*

   Jumlah Koleksi buku pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun per 31 Desember 2019 sebanyak 51.986 eksemplar dengan target Tahun 2019 sebanyak 45.255 eksemplar. Sedangkan jumlah koleksi judul buku sebanyak 22.100 judul buku.

x. Urusan Kearsipan

1) *Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (Ps40 dan 59 U 43/2009)*

   Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional mencapai 75%.

2) *Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat*

Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat di Kota Madiun pada tahun 2019 mencapai 70%.

II. URUSAN PILIHAN

a. Urusan Kelautan dan Perikanan

Indikator Kinerja Kunci yang menunjukkan perkembangan penyelenggaraan urusan Perikanan adalah sebagai berikut:

1) *Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kota (sumber data: one data KKP)*

Jumlah produksi perikanan terdiri dari produksi perikanan budidaya yang berasal dari kegiatan budidaya ikan air tawar di kolam dan produksi perikanan tangkap yang berasal dari kegiatan penangkapan ikan di sungai. Berdasarkan Tabel IV di atas produksi perikanan tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 12,5% dibandingkan tahun 2018, hal ini dikarenakan musim kemarau yang terlalu panjang sehingga mempengaruhi produksi budidaya ikan di kolam maupun tangkap.

2) *Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional*

Di Kota Madiun tidak terdapat tempat pelelangan ikan.

b. Urusan Pariwisata

1) *Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan*

Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan Yang datang ke Kota Madiun tahun 2019 mencapai 1,4%. Jumlah wisatawan yang datang sebanyak 12.514 wisatawan. Sedangkan pada tahun 2018 jumlah wisatawan yang datang sebanyak 10.921 wisatawan.

2) *Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kota*

Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kota Madiun pada tahun 2019 mencapai 2,23%

3) *Tingkat hunian akomodasi*

Tingkat hunian akomodasi di Kota Madiun tahun 2019 mencapai 78,87%. Dengan jumlah kamar yang terjual sebanyak 1.023 buah dan kamar yang tersedia sebanyak 1.297 buah.

4) *Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku*

Menurut data BPS, kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB sebesar 8,67%.

5) *Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD*

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Tahun 2019 sebesar 489,4%.

c. Urusan Pertanian

Sasaran capaian kinerja dalam penyelenggaraan urusan Pertanian dapat dilihat dari indikator kinerja kunci (IKK), sebagai berikut :

1) *Produktivitas pertanian per hektar per tahun*

Indikator ini dihitung dengan membandingkan capaian rata-rata produktivitas padi sampai Bulan Desember tahun 2019 (yaitu 7,21 ton/ha) dengan target RPJMD 2019 (sebesar 6,94 ton/ha) dikali 100%. Dengan demikian capaian produktivitas padi sampai Desember 2019 adalah 103,9% dibandingkan target akhir RPJMD. Bila dibadingkan dengan tahun 2018 capaian produktivitas ini naik dari 103,1% menjadi 103,9%. Kenaikan tersebut karena dukungan musim dengan intensitas matahari dan pengairan yang cukup, tidak adanya ledakan populasi hama dan penyakit yang besar, serta peningkatan penggunaan pupuk organik yang ikut membantu terjaganya struktur dan kesuburan tanah.

2) *Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Tahun 2019*

Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB terus mengalami penurunan mengingat laju pertumbuhan dan kontribusi sektor lain seperti industri pengolahan, perdagangan, dan jasa yang lebih tinggi. Bila data proyeksi kontribusi sektor pertanian tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2017 terjadi penurunan sekitar 0,03 dari 0,83 di tahun 2017 menjadi 0,80 di tahun 2018. Penurunan kontribusi dan pertumbuhan sektor pertanian juga disebabkan menurunnya jumlah lahan produktif yang mengakibatnya turunnya produksi pertanian yaitu dari 1.025 ha di tahun 2017 menjadi 1.015 ha di tahun 2018. Hal tersebut berimbas pada turunnya PDRB sektor pertanian dan rendahnya pertumbuhan sektor pertanian khususnya sub sektor tanaman hortikultura dan perkebunan di Kota Madiun.

3) *Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular*

Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular mencapai 27,5%

d. Urusan Energi Sumber Daya Mineral

1) *Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota*

Kota Madiun tidak mempunyai keweangan dalam pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin karena merupakan kewenangan Provinsi.

e. Urusan Perdagangan

1) *Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB Tahun 2019*

Menurut data BPS, kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB tahun 2019 sebesar 26,06%.

2) *Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)*

Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) di Kota Madiun mencapai 100%, dengan jumlah pelaku usaha yang memiliki izin sebanyak 56.

3) *Persentase kinerja realisasi pupuk*

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyaluran pupuk bersubsidi, maka kebutuhan pupuk harus berdasarkan kebutuhan riil petani, pekebun, peternak dan petambak yang disusun secara berkelompok dalam bentuk Rencana Definitif Kebutuhan kelompok (RDKK). Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Pupuk Bersubsidi (RDKK Pupuk Bersubsidi) merupakan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi untuk 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani.Persentase kinerja realisasi pupuk di Kota Madiun tahun 2019 mencapai 99,99% Jumlah realisasi pupuk sebesar 1.021,15 sedangkan RDKK sebesar 1.022,38.

4) *Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkap annya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku*

Jumlah UTTP bertanda tera sah yang berlaku tahun 2019 sebanyak 6.794 UTTP, dengan jumlah potensial UTTP yang wajib ditera dan ditera ulang sebanyak 7000 UTTP. Sehingga capaian yang diperoleh sebesar 97,05%.

f. Urusan Perindustrian

1) *Pertambahan jumlah industri besar di kota*

Pertambahan jumlah industri besar di Kota Madiun mencapai 7,438%. Jumlah industri kecil dan menengah pada tahun 2019 adalah 390 industri. Sedangkan jumlah industri tahun 2018 sebanyak 363 buah.

2) *Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN (Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional) yang ditetapkan dalam RPIP (Rencana Pembangunan Industri Provinsi)*

Di Kota Madiun tidak terdapat pembangunan industri yang merupakan turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN (Rencana Induk

Pembangunan Industri Nasional) yang ditetapkan dalam RPIP (Rencana Pembangunan Industri Provinsi)

3) *Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait*

Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait mencapai 100%. Dengan jumlah izin yang dipantau dan dianalisis serta yang telah dikeluarkan sebanyak 390 izin.

4) *Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait*

Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah merupakan kewenangan provinsi, sehingga Kota Madiun tidak mengeluarkan izin tersebut.

5) *Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kota*

Kota Madiun tidak menerbitkan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI).

g. Urusan Transmigrasi

1) *Jumlah Satuan Pemukiman Transmigrasi yang Difasilitasi Pembangunan dan Pembinaannya*

Kota Madiun tidak memiliki pemukiman transmigrasi. Kegiatan ketransmigrasian dilaksanakan di Kota Madiun dengan kegiatan sosialisasi ketransmigrasian yang ditujukan kepada masyarakat Kota Madiun. Pada tahun 2019, kegiatan sosialisasi ketransmigrasian dilaksanakan 1 kali pelaksanaan dengan peserta dari 3 kecamatan dengan peserta terdiri dari masing- masing kecamatan yang dihadiri 36 orang sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 108 peserta.

Untuk pelaksanaan sosialisasi di tahun 2019 dilaksanakan sekali pelaksanaan dikarenakan adanya kuota transmigran dari pemerintah pusat ke pemerintah propinsi Jawa Timur hanya 64 peserta dan yang diutamakan pemerintah kabupaten dan diprioritaskan petani. Selain itu animo masyarakat Kota Madiun untuk mengikuti kegiatan transmigrasi sangat rendah.

III. FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Sasaran capaian kinerja dalam penyelenggaraan urusan Otonomi Daerah dapat dilihat dari indikator kinerja kunci (IKK), sebagai berikut:

1) *Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan Kota*

   Jumlah sistem informasi manajemen pemerintahan Kota Madiun adalah 89 aplikasi.

2) *Penjabaran program RPJMD dalam RKPD*

   Capaian Penjabaran program RPJMD dalam RKPD adalah 100%. Jumlah program RPJMD dalam RKPD sebanyak 104 program dan seluruhnya telah dilaksanakan.

3) *Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan*

   Jumlah belanja pegawai selain guru dan tenaga kesehatan sebesar Rp. 601.631.999.660. Sedangkan jumlah APBD tahun 2019 sebesar Rp. 1.377.795.868.937. Sehingga rasio belanja pegawai selain guru dan tenaga kesehatan terhadap jumlah APBD adalah sebesar 43,66%.

4) *Rasio PAD*

   Rasio PAD terhadap PDRB non migas adalah sebesar 1,77%

5) *Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)*

   Jumlah belanja urusan pemerintahan dikurangi transfer expenditures adalah sebesar Rp. 372.719.799.732,06. Sedangkan jumlah belanja APBD adalah Rp 1.148.511.321.355,75. Sehingga rasio belanja urusan pemerintahan umum (dikurangi transfer expenditures) adalah sebesar 32,45%.

6) *Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)*

   Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kota Madiun mencapai level 3, dengan capaian kinerja sebesar 3,0375. Ini berarti bahwa Kota Madiun telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik. Namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai.

7) *Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)*

   Hasil penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kota Madiun tahun 2019 hingga saat ini masih belum ada.

8) *Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama*

   Pada tahun 2019 tidak terdapat kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang memerlukan pembangunan dalam 3 kuartal.

9) *Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif*

Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif adalah sebanyak 169 pengadaan, sedangkan jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif adalah sebanyak 4.295. Dengan demikian persentase capaiannya sebesar 3,93%.

10) *Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan*

Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan terhadap total belanja langsung mencapai 83,35%

11) *Persentase Pegawai Fungsional terhadap Seluruh Jumlah Pegawai Pemerintah daerah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)*

12) Jumlah pegawai PNS fungsional selain guru dan tenaga kesehatan tahun 2019 adalah 84 orang, sedangkan jumlah seluruh PNS selain guru dan tenaga kesehatan adalah 1.570 orang. Sehingga persentase pegawai fungsional terhadap seluruh jumlah pegawai pemerintah daerah (pns tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) sebesar 5,35%

13) *Persentase Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)*

Persentase Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) mencapai 65,48%. Jumlah pegawai fungsional yang bersertifikat adalah 55 orang, sedangkan seluruh jumlah pegawai fungsional selain guru dan tenaga medis adalah 84 orang.

14) *Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD*

Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD mencapai 110,78%. Nilai absolut dari total belanja dalam realisasi adalah sebesar Rp. 1.148.511.321.355,75. Sedangkan total belanja APBD dikurangi satu adalah sebesar Rp. 1.036.658.830.577,88

15) *Assets management*

Kota Madiun telah menerapkan manajemen asset yang baik. Pengelolaan asset dilakukan secara tertib dengan menyusun daftar asset tetap, inventarisasi asset tahunan hingga mencantumkan nilai asset dalam laporan anggaran.

16) *Cash Management: Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya*

Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya mencapai 21,3%. Nilai realisasi SILPA tahun 2019 sebesar Rp. 223.580.475.124,05, sedangkan total belanja APBD tahun sebelumnya (tahun 2018) adalah sebesar Rp.1.036.658.830.577,88

17) *Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)*

Belanja anggaran untuk unit pelayanan yang dapat diakses website Pemerintah Kota Madiun adalah sebesar Rp. 274.462.277, dengan realisasisebesar Rp. 285.500.000.

18) *Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)*

Jumlah dokumen yang telah dipublikasikan di website Pemerintah Kota Madiun selama tahun 2019 adalah sebanyak 47 dokumen.

IV. URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

1) *Pembinaan politik daerah*

Adapun pembinaan politik daerah yang dilaksanakan Pemerintah Kota Madiun pada tahun 2019 sebanyak 1 kali. Dalam target dan realisasi tiap tahunnya jumlah partai politik tidak mengalami penurunan ataupun kenaikan (tidak ada perubahan) karena indikator ini bersifat lima tahunan dan ada perubahan setelah ada Pemilu, jumlahnya mengikuti hasil Pemilu.

2) *Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP*

Pada tahun 2019 Bakesbangpol melakukan pembinaan terhadap Orkemas/LSM sebanyak 4 kali, baik terhadap pengurus maupun anggota Orkemas/LSM.

- Kegiatan Pembinaan, Verifikasi dan Evaluasi Organisasi Kemasyarakatan/LSM dan Pemuda dilaksanakan 1 kali dalam bentuk pembinaan kepada pengurus Orkemas/LSM.
- Kegiatan Fasilitasi Komunikasi dan Koordinasi Ormas/LSM dilakasanakan 3 kali dalam 1 tahun dalam bentuk sarasehan.

BAB IV
REALISASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) TAHUN 2019

4.1. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Kota Madiun Tahun 2019

Prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kota Madiun merupakan integrasi kebijakan pembangunan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan capaian kinerja program dan kegiatan daerah serta permasalahan dan tantangan yang harus dihadapi. Dengan memperhatikan dan mengacu pada tema RKP Nasional, RKPD Provinsi Jawa Timur dan arahan kebijakan pembangunan dalam RPJMD Kota Madiun tahun 2014-2019 serta mempertimbangkan eksistensi kondisi dan potensi daerah Kota Madiun, maka tema pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2019 adalah **"Pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah melalui optimalisasi potensi ekonomi lokal dan pelayanan publik".**

Pengambilan tema ini didasarkan pada kondisi eksisting Kota Madiun dimana semakin pentingnya kemandirian dan daya saing ekonomi daerah yang ditopang sumberdaya manusia atau tenaga kerja yang handal, pengentasan kemiskinan dan pengembangan ekonomi lokal melalui pengembangan industri kecil dan menengah. Selain itu, Penyiapan sumberdaya manusia yang handal melalui pelayanan prima di bidang pendidikan dan kesehatan, peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur kota merupakan fokus dari tahun ketiga RPJMD Kota Madiun 2014-2019.

Mengacu kepada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun dan arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi tersebut di atas, serta dengan memperhatikan kondisi, aspirasi dan kebutuhan masyarakat Kota Madiun, maka Pemerintah Kota Madiun pada Tahun 2019 menetapkan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan untuk meningkatkan kualitas SDM serta percepatan penanggulangan kemiskinan.
2. Peningkatan Infrastruktur untuk pertumbuhan ekonomi dan sanitasi kota untuk meningkatkan kualitas hidup
3. Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah
4. Peningkatan ketahanan pangan serta kualitas lingkungan hidup
5. Peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta fasilitasi penyelenggaraan pemilu yang sukses.

Tabel IV.1
Prioritas Nasional/Prioritas Provinsi/Prioritas Kota/Program Prioritas

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KOTA MADIUN	PROGRAM PRIORITAS KOTA MADIUN
1	2	4	6	7
1	Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar	Peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan penanggulangan kemiskinan	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan untuk meningkatkan kualiats SDM serta percepatan penangglangan kemiskinan	Program Pendidikan Anak Usia Dini
				Program Pendidikan Dasar
				Program Pendidikan Non Formal
				Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
				Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
				Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
				Program upaya kesehatan masyarakat
				Program pencegahan dan pengendalian penyakit
				Program Peningkatan Pelayanan dan Sumberdaya Kesehatan
				Program penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan BLUD
				Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata
				Program keluarga berencana dan Keluarga Sejahtera
				Program pelayanan rehabilitasi dan pemberdayaan kesejahteraan sosial
2	Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektifitas dan kemaritiman	Pemerataan pembangunan antar wilayah melalui pengembangan infrastruktur ekonomi untuk menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan	Peningkatan Infrastruktur untuk peningkatan pertumbuhan Ekonomi dan Sanitasi Kota untuk meningkatkan kualitas hidup	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
				Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
				Program peningkatan kualitas pembangunan gedung dan infrastruktur kota
				Program pengendalian banjir
				Program pembangunan saluran/drainase/ gorong-gorong;
				Program lingkungan sehat perumahan
				Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana fasilitas LLAJ
				Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
				Program peningkatan pelayanan angkutan
3	Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri dan	Peningkatan agroindustri melalui nilai tambah pengembangan agromaritim	Peningktan daya saing perekonomian daerah	Program Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi
				Program peningkatan pelayanan perizinan
				Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KOTA MADIUN	PROGRAM PRIORITAS KOTA MADIUN
1	2	4	6	7
	jasa produksi	serta akselerasi kepariwisataan		Kerja
				Program Perlindungan dan Pengembangan kelembagaan Ketenagakerjaan
				Program ketransmigrasian
				Program Stabilisasi Ekonomi Daerah
				Program Pengembangan Sistem Pendukung kewirausahaan dan keunggulan kompetitif KUMKM
				Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
				Program Pengembangan industri kecil menengah
				Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
				Program Pembinaan PKL dan Asongan
				Program pengelolaan pasar rakyat
				Program Peningkatan dan pengembangan ekspor serta Efisiensi Perdagangan dalam Negeri
				Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi
				Program pengembangan komunikasi informasi dan media massa
				Program pengembangan data / informasi / statistik daerah
				Program Pengembangan Tata Kelola Persandian
				Program Penyelamatan, Peningkatan SDM dan Layanan Arsip Daerah
4	Pemantapan ketahanan energi, pangan dan sumber daya air	Peningkatan ketahanan pangan dan energi serta tata kelola sumber daya air dan pelestarian sumber daya alam lingkungan hidup berkelanjutan	Peningkatan ketahanan pangan serta kualitas lingkungan hidup	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
				Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
				Program peningkatan produksi hasil peternakan dan pelayanan kesehatan hewan
				Program peningkatan produksi dan pengolahan / pemasaran hasil perikanan
				Program perencanaan, Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang
				Program penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
				Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
				Program perlindungan dan konservasi lingkungan hidup
				Program Pengembangan Kinerja

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KOTA MADIUN	PROGRAM PRIORITAS KOTA MADIUN
1	2	4	6	7
				Pengelolaan Persampahan
				Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
				Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Lingkungan Hidup
5	Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu	Peningkatan ketentraman dan ketertiban serta kesuksesan pelaksanaan Pemilu	Peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta fasilitasi penyelenggaraan pemilu yang sukses	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan
				Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan
				Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
				Program peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan perempuan dan anak
				Program implementasi sistem informasi administrasi kependudukan
				Program pelayanan dan penataan administrasi pencatatan sipil
				Program pelayanan dan penataan administrasi kependudukan
				Program penyelenggaraan kelurahan
				Program penataan daerah otonom baru
				Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah
				Program penataan peraturan perundang-undangan
				Program peningkatan ketatalaksanaan perangkat daerah
				Program pengembangan kinerja dan kelembagaan perangkat daerah
				Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah
				Program peningkatan manajemen pelayanan kepegawaian
				Program pembinaan dan pengembangan aparatur
				Program penataan aparatur
				Program fasilitasi kesejahteraan PNS
				Program peningkatan kapasitas SDM aparatur
				Program pengembangan kajian dan penelitian
				Program perencanaan pembangunan bidang sosial budaya
				Program perencanaan

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KOTA MADIUN	PROGRAM PRIORITAS KOTA MADIUN
1	2	4	6	7
				pembangunan ekonomi
				Program perencanaan pembangunan prasarana wilayah
				Program perencanaan pembangunan daerah
				Program peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
				Program Peningkatan fasilitasi pengadaan barang dan jasa
				Program peningkatan kapasitas DPRD
				Program peningkatan sistem pengawasan internal & pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
				Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
				Program percepatan tindak lanjut hasil pengawasan
				Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
				Program peningkatan dan pengembangan penatausahaan keuangan daerah
				Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan aset daerah
				Program Pengelolaan Anggaran Daerah
				Program Peningkatan Pendataan dan Potensi Pajak Daerah
				Program peningkatan pelayanan dan manajemen pengelolaan pajak daerah
				Program pendidikan politik masyarakat dan organisasi kemasyarakatan
				Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
				Program pengembangan wawasan kebangsaan
				Program pembinaan pemuda dan olah raga
				Program pengembangan pemasaran dan destinasi pariwisata
				Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
				Program Peningkatan Kualitas Hidup Beragama
				Program Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan daerah dan Peraturan Walikota
				Program Pemberdayaan Satuan

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KOTA MADIUN	PROGRAM PRIORITAS KOTA MADIUN
1	2	4	6	7
				polisi pamong praja dalam Pelaksanaan Tugas
				Program Peningkatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat
				Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
				Program Pemeliharaan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Kriminal
				Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana Alam
				Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
				Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban

BAB V

TUGAS PEMBANTUAN

Tugas Pembantuan merupakan penugasan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan, seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Tugas Pembantuan bertujuan memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan pembangunan daerah. Sebagai konsekuensi penyelenggaraan tugas pembantuan ini, pemerintah pusat sebagai pemberi tugas mengalokasikan anggaran serta pedoman pelaksanaannya dari masing–masing Kementerian/ Lembaga/ Departemen/ Direktorat Jenderal (Ditjen) melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Bendahara Umum Negara) berupa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kepada Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di daerah, sehingga pemerintah daerah berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaannya kepada pemberi tugas pembantuan.

Penugasan dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada Pemerintah Kota Madiun untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun

Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan Kegiatan Peanekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan

A. DASAR HUKUM

Melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur No : SP DIPA - 018.11.3.059444/2019 tanggal 5 Desember 2018

B. INSTANSI PEMBERI TUGAS PEMBANTUAN

Instansi yang memberikan tugas pembantuan adalah Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur.

C. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan dari Badan Ketahanan Pangan yang dananya bersumber dari APBN melingkupi :

1. Program :

Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

2. Kegiatan :

   Pembinaan Pemanfaatan Lahan Pekarangan dengan Konsep Rumah Pangan Lestari (KRPL)

D. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

1. Lokasi

   Kegiatan Pembinaan Pemanfaatan Lahan Pekarangan dengan Konsep Rumah Pangan Lestari (KRPL) Tahun 2019 dilaksanakan di Kota Madiun pada 2 Kecamatan.

2. Waktu

   Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, kegiatan Pembinaan Pemanfaatan Lahan Pekarangan dengan Konsep Rumah Pangan Lestari (KRPL) Tahun 2019 dilaksanakan mulai Bulan Januari s/d Desember 2019.

E. SUMBER DAN JUMLAH ANGGARAN YANG DIGUNAKAN

Pada tahun 2019 Pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur mendapatkan Dana Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian Republik Indonesia Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan kegiatan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan sebesar Rp 75.000.000,00 kepada kelompok Konsep Rumah Pangan Lestari (KRPL) penerima manfaat sebagai berikut:

1. Kelompok KRPL Permata Hijau Kelurahan Kartoharjo, Kecamatan Kartoharjo ;
2. Kelompok KRPL Mulya Sejahtera Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kartoharjo ;
3. Kelompok KRPL Wanita Niti Boga Kelurahan Demangan, Kecamatan Taman ;
4. Kelompok KRPL Respati Manis Hijau Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman ; dan
5. Kelompk KRPL Sukokaryo Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Taman.

F. SKPD YANG MELAKSANAKAN TUGAS PEMBANTUAN

SKPD yang melaksanakan tugas pembantuan adalah Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kota Madiun

G. JUMLAH PEGAWAI, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, PANGKAT DAN GOLONGAN

Jumlah pegawai yang melaksanakan kegiatan Dana Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian Republik Indonesia Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat adalah 6 orang, terdiri dari 4 orang pejabat struktural, 6 orang PNS. Dengan

tingkat pendidikan terakhir SMA sebanyak 1 orang, S1 (Sarjana) sebanyak 4 orang dan S2 (Magister) sebanyak 1 orang.

Berdasarkan Golongan/Pangkat, pegawai yang melaksanakan kegiatan Dana Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian Republik Indonesia Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian terdiri dari:

- Pegawai golongan IV sebanyak 1 orang
- Pegawai golongan III sebanyak 5 orang

H. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Tidak ada permasalahan yang berarti yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Dana Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian Republik Indonesia Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, karena tidak ada kendala dalam melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

2. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

A. DASAR HUKUM

Melaksanakan program prioritas Nasional , yaitu :

1. Program Keluarga Harapan (PKH)

   Dengan dasar hukum pelaksanaan :

   a. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015;
   b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016;
   c. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial ;
   d. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan;

2. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

   Dengan dasar hukum pelaksanaan :

   a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
   b. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015;

c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016;
d. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial ;
e. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara Non Tunai

3. Kartu Indonesia Sehat (KIS)
   a. Undang Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial
   b. Undang Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
   c. Undang Undang No 44 Tahun 2009 tentang Rumah sakit
   d. Undang Undang No: 19 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2013
   e. Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan
   f. Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota
   g. Peraturan presiden No. 34 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan organisasi Kementerian Negara
   h. Peraturan Menteri Keuangan No. 171/PMK.05/2007 tentang sistem akuntasi dan pelaporan keuangan Pemerintah Pusat.
   i. Peraturan menteri Kesehatan No. 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Kesehatan
   j. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 374 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional

B. INSTANSI PEMBERI TUGAS PEMBANTUAN
   1. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program dari Kementerian Sosial RI
   2. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan program dari Kementerian Sosial yang merupakan program lintas kementerian dibawah koordinasi Menko PMK
   3. Kartu Indonesia Sehat (KIS) merupakan program dari Kementerian Kesehatan dan Kemensos RI

C. PROGRAM DAN KEGIATAN
   1. Program Keluarga Harapan (PKH)

      Pemberian Bantuan Sosial bersyarat untuk keluarga tidak mampu dengan indeks bantuan sesuai jumlah kategori yang ada dalam satu keluarga. Keluarga dengan komponen Kesehatan sejumlah Rp.

2.400.000/tahun/kategori. Keluarga dengan komponen pendidikan sejumlah Rp. 900.000/tahun/ kategori anak SD,sejumlah Rp. 1.500.000/tahun/kategori anak SMP dan sejumlah Rp 2.000.000,-/tahun/kategori anak SMA. Sedangkan keluarga dengan komponen Kesejahteraan Sosial mendapat bantuan sejumlah Rp 2.400.000/tahun/kategori Disabilitas atau Kategori Lansia.

Jumlah Penerima Manfaat PKH Kota Madiun pada tahun 2019 sebanyak 3.269 keluarga.

2. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

   Pemberian bantuan pangan dengan mekanisme non tunai sejumlah Rp. 110.000/bulan/keluarga. Jumlah Penerima manfaat BPNT Kota Madiun sejumlah 4.833 keluarga.

3. Kartu Indonesia Sehat (KIS)

   Merupakan jaminan sosial bagi masyarakat tidak mampu yang memberikan jaminan pemberian layanan pengobatan gratis kelas 3 untuk 29.201 jiwa penduduk Kota Madiun. Bidang sosial bertanggung jawab terhadap verifikasi dan validasi penerima manfaat KIS.

D. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

1. Program Keluarga Harapan (PKH)

   Jumlah KPM PKH pada akhir tahun 2019 sebanyak 3.269. Penyaluran bantuan telah dilakukan sesuai dengan tahapan dengan realisasi : ada 1 KPM yang belum menerima bantuan dikarenakan terdapat perbedaan data rekening yang ada diKPM dengan data yang ada pada system bank.

2. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

   Bantuan rutin diterima setiap bulan sebesar Rp 110.000,-

E. SUMBER DAN JUMLAH ANGGARAN YANG DIGUNAKAN

1. Program Keluarga Harapan (PKH)

   Sumber Anggaran : APBN

   Jumlah Anggaran : Rp. 10.900.350.000,-

2. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

   Sumber Anggaran : APBN

   Jumlah Anggaran : Rp. 6.379.560.000,-

F. SKPD YANG MELAKSANAKAN TUGAS PEMBANTUAN

SKPD yang melaksanakan tugas pembantuan adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

G. JUMLAH PEGAWAI, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, PANGKAT DN GOLONGAN

NO	NAMA	PENDIDIKAN	JABATAN
A.	**SDM PELAKSANA PKH**		
1	TRI YUNIWATI, S.IP	S1	KOORDINATOR KOTA
2	FEPI ARYANI S.Sos	S1	PEKERJA SOSIAL SUPERVISOR
3	WIDARTO SETIAWAN, A.Md	D3	DATA BASE ADMINISTRATION
4	MARSISWO DIRGANTORO, A.Md	D3	DATA BASE ADMINISTRATION
5	AGUS MISRI ACHMADI, IR.	S1	PENDAMPING
6	AGUS SUPRIYANTO, A.Md	D3	PENDAMPING
7	ALIF NURHIDAYAH, S.Pd.Si	S1	PENDAMPING
8	AMRINA MARDIYANTI, S.PAR	S1	PENDAMPING
9	RAHMAT PRAYITNO, S.Pd.I	S1	PENDAMPING
10	RISMA HASNA YUNITA, SP	S1	PENDAMPING
11	JUAF TIKA, S.Tr.Sos	D4	PENDAMPING
B.	**SDM PELAKSANA BPNT**		
1	WAHYU SULISTYONO,SE	S1	KOORDINATOR TKS
2	ERNA ERMAWATI	SMA	TKSK KARTOHARJO
3	WIWIK SUMARTININGSIH	SMA	TKSK MANGUHARJO
4	NUR DAYAT	SMA	TKSK TAMAN

H. KONDISI SARANA DAN PRASARANA YANG DIGUNAKAN

NO	SARPRAS	JUMLAH	KONDISI
1	SERVER	1 UNIT	SERING MATI KARENA VOLTASE TIDAK STABIL DAN SUHU RUANGAN KURANG DINGIN
2	KOMPUTER PC	2 UNIT	BAIK
3	TABLET	1 UNIT	BAIK

I. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Masih terdapat data yang belum sesuai dengan kondisi riil di masyarakat, masih dijumpai inclusion error dan exclusion error sebagai bagian dari dinamika masyarakat yang terus mengalami perubahan status sosial ekonomi.

Untuk mengatasi masalah tersebut Kementerian Sosial mempunyai kegiatan pemutakhiran data terpadu setiap 6 bulan sekali, untuk mengakomodir dan exclusion error untuk di mutakhirkan melalui Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial New Generation (SIKS NG) dan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT).

J. HAL LAIN YANG DIANGGAP PERLU DILAPORKAN

1. MANFAAT

a. Program Keluarga Harapan (PKH)

- PKH bertujuan untuk memberikan transfer sosial bagi orang miskin dan untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan dengan memberikan insentif pada keluarga miskin untuk berinvestasi dalam modal sumber daya manusia anak-anak mereka;
- PKH mempromosikan perubahan sosial melalui
- Insentif perubahan perilaku melalui prasyarat kesehatan dan pendidikan bagi anak-anak dan ibu hamil atau ibu menyusui untuk pencairan bantuan
- Memfasilitasi sesi FDS yang di antaranya berfokus pada mempromosikan pengelolaan keuangan rumah tangga yang lebih baik, praktik pengasuhan, perilaku kesehatan
- Memberikan layanan inklusif bagi lansia dan penyandang disabilitas berat

b. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

- Meningkatnya ketahanan pangan di tingkat KPM sekaligus sebagai mekanisme perlindunhan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
- Meningkatnya efisiensi penyaluran bantuan sosial;
- Meningkatnya transaksi non tunai dalam agenda Gerakan Nasional Non Tunai;
- Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan.

c. Kartu Indonesia Sehat (KIS)

Memberikan jaminan kesehatan yang komprehensif (preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif), berjenjang (rawat jalan dan rawat inap di Puskesmas, rawat jalan spesialistik di rumah sakit dan rawat inap di rumah sakit), tanpa batasan nilai rupiah.

Mengganti biaya layanan kesehatan sesuai dengan indikasi medis pasien, tetapi membatasi jenis layanan (kosmetika dan fertilitas) dan tanpa iur biaya (peserta tidak harus membayar biaya apapun). Jenis pelayanan yang dicakup relatif komprehensif termasuk layanan kasus katastropik seperti operasi jantung, hemodialisa dan operasi cesar, sehingga upaya mencapai kesejahteraan masyarakat terus menjadi prioritas utama pemerintah.

2. PENGARUH KE MASYARAKAT

Program Nasional sangat berpengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakat, karena mendapat jaminan sosial dan bantuan sosial yang sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar terutama bagi PMKS yang tentunya merupakan masyarakat tidak mampu dan rentan.

Perlunya Program dampingan untuk mendukung program nasional sehingga lebih efektif dalam penanggulangan kemiskinan dan mengurangi permasalahan sosial.

BAB VI

TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

A. KERJASAMA ANTAR DAERAH

1. Sekretariat DPRD Kota Madiun

a. Daerah yang diajak kerjasama

- DPRD Kota Makassar
- DPRD Kabupaten Maros
- Pemerintah Kota Makassar
- DPRD Kabupaten Kubu Raya
- DPRD Provinsi Kalimantan Barat
- DPRD Kota Cimahi
- DPRD Kota Bandung
- DPRD Kabupaten Situbondo
- DPRD Kabupaten Banyuwangi
- DPRD Kota Bekasi
- DPRD Kota Tangerang
- DPRD Kabupaten Jember
- DPRD Kabupaten Bondowoso
- DPRD Kabupaten Bandung
- DPRD Kabupaten Karang Asem
- DPRD Kabupaten Klungkung
- DPRD Kabupaten Gianyar
- DPRD Kota Depok
- DPRD Kota Semarang
- DPRD Kabupaten Semarang
- DPRD Kota Serang
- DPRD Kabupaten Badung
- DPRD Kota Denpasar
- DPRD Kota Bogor
- DPRD Kabupaten Probolinggo
- DPRD Kabupaten Lumajang
- DPRD Kabupaten Sukoharjo
- DPRD Kota Surakarta
- DPRD Kabupaten Boyolali
- DPRD Kabupaten Salatiga

b. Dasar Hukum
   - Rencana Kerja DPRD Kota Madiun Tahun 2019;
   - DPA Tahun 2019

c. Bidang Kerjasama
   - Komisi I membidangi Pemerintahan, Hukum, SDM, Pendidikan dan Sosial Budaya
   - Komisi II membidangi Keuangan, Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat
   - Komisi III membidangi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

d. Nama Kegiatan

   Kunjungan Kerja

e. SKPD Penyelenggara Kerjasama antar daerah

   Sekretariat DPRD Kota Madiun

f. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

No	Jumlah Pegawai	Kualifiaksi Pendidikan	Pangkat dan Golongan
1	PNS = 24 Honorer = 4	S-2 = 3 S-1 = 13 SMA = 8	Gol. IV/b = 1 Gol. IV/a = 2 Gol. III/d = 5 Gol. III/c = 4 Gol. III/b = 4 Gol. III/a = 1 Gol. II /d = 2 Gol. II /c = 3 Gol. II /b = - Gol. II /a = 2
Jumlah	28	24	24

g. Sumber dan Jumlah Anggaran

   Anggaran berasal dari APBD sebesar Rp 5.015.427.000,00

h. Jangka waktu kerjasama

   Jangka waktu kerjasama ini mulai Januari sampai dengan Desember 2019

i. Hasil (output) dari Kerjasama

   Melalui kegiatan kunjungan kerja ini, maka para anggota dewan mendapatkan masukan sebagai bahan perbandingan dalam pengambilan kebijakan sesuai dengan bidangnya.

j. Permasalahan dan Solusi

   a. Permasalahan :

      Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang harus dipenuhi oleh Pemerintah.

Solusi :

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berinisiatif mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Sistem Kesehatan Daerah untuk menjamin masyarakat mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang memadai.

b. Permasalahan :

Perubahan Iklim, praktik ekonomi biaya tinggi dan Pasar global dapat mempengaruhi situasi pasar yang dapat merugikan petani.

Solusi :

Untuk mewujudkan kesejahteraan petani Pemerintah Daerah perlu hadir untuk memberikan pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan kelembagaan petani.

Upaya tersebut diwujudkan dengan dikeluarkannya Peraturan daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

c. Permasalahan

Kesejahteraan sosial dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup merupakan hak asasi manusia merupakan kewajiban Pemerintah yang harus diperhatikan.

Solusi :

Untuk memberikan kepastian hukum Pemerintah Daerah dalam menangani Gelandangan dan Pengemis Dewan Perwakilan Rakyat mengeluarkan Perda Inisiatif Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis

2. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum

a. Penerimaan Kunjungan Kerja DPRD

i. Daerah yang diajak kerjasama

Kab. Tuban, Gunung Kidul, Kab. Kulon Progo, Kab. Batang, Kab. Purworejo, Kab. Pemalang, Kab. Temanggung, Pemerintah Kota Banjarbaru, Kab. Magelang, Kota Surakarta, Kab. Sumedang, Kab. Bantul, Kabupaten Boyolali, Kab. Pekalongan, Kab. Banjarnegara, Kab. Rembang, Kab. Mojokerto, Kab. Demak, Kab. Rembang, Kab. Sidoarjo, Kab. Jepara, Kab. Lumajang, Kab. Tegal, Kab. Malang, Kab. Pasuruan, Kab. Kendal, Pemerintah Kota Cirebon, Kab. Sleman.

ii. Dasar Hukum

Peraturan Daerah Nomor 40 Tahun 2018 tentang APBD Kota Madiun Tahun 2019

iii. Bidang Kerjasama

Studi Banding

iv. Nama Kegiatan

Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/ Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/ Luar Negeri

v. SKPD Penyelenggara Kerjasama antar daerah

Bagian Administrasi Pemerintahan Umum

vi. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

Jumlah Pegawai	Kepangkatan	Tingkat Pendidikan	Struktural/ Eselon	Fungsional
11	Gol I = - Gol II = - Gol III = 10 Gol IV = 1	SD = - SMP = - SMA = - D3 = 1 D4/ S1 = 10 S2 = -	II = - III = 1 IV = 3 V = -	- Jabatan fungsional pemetaan surveyor - Jabatan fungsional statistisi

vii. Sumber dan Jumlah Anggaran

APBD Tahun 2019 dengan jumlah anggaran Rp. 145.226.000

viii. Jangka waktu kerjasama

1 (satu) tahun selama Tahun 2019

ix. Hasil (output) dari Kerjasama

Mendapatkan masukan dalam pengambil kebijakan

x. Permasalahan dan Solusi

Tidak Ada

xi. Hal lain yang dianggap perlu dilaporkan

Tidak Ada

b. Kesepakatan Bersama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah

i. Daerah yang diajak kerjasama

Pemerintah Provinsi Jawa Timur

ii. Dasar Hukum

Nomor : 120.23/34/033.4/KSB/2019 dan Nomor : 130/1/401.011/2019

iii. Bidang Kerjasama

Kerja Sama Pembangunan Daerah

iv. Nama Kegiatan

Kegiatan Koordinasi Penyusunan MoU

v. SKPD Penyelenggara Kerjasama antar daerah

Bagian Administrasi Pemerintahan Umum

vi. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

Jumlah Pegawai	Kepangkatan	Tingkat Pendidikan	Struktural/ Eselon	Fungsional
11	Gol I = - Gol II = - Gol III = 10 Gol IV = 1	SD = - SMP = - SMA = - D3 = 1 D4/ S1 = 10 S2 = -	II = - III = 1 IV = 3 V = -	- Jabatan fungsional pemetaan surveyor - Jabatan fungsional statistisi

vii. Sumber dan Jumlah Anggaran

APBD Tahun 2019 dengan jumlah anggaran Rp. 20.313.000

viii. Jangka waktu kerjasama

- (satu) tahun selama Tahun 2019

ix. Hasil (output) dari Kerjasama

Pengelolaan potensi sumber daya lebih optimal dan berkelanjutan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat.

x. Permasalahan dan Solusi

Tidak Ada

xi. Hal lain yang dianggap perlu dilaporkan

Tidak Ada

c. Perjanjian Kerja Sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tentang Peningkatan Program Puskesmas Tahun 2019

i. Daerah yang diajak kerjasama

Pemerintah Provinsi Jawa Timur

ii. Dasar Hukum

Nomor : 120.23/39/PKS/033.4/2019 dan Nomor : 440/04/401.013/2019

iii. Bidang Kerjasama

Peningkatan Program Puskesmas

iv. Nama Kegiatan

Kegiatan Koordinasi Penyusunan MoU

v. SKPD Penyelenggara Kerjasama antar daerah

Bagian Administrasi Pemerintahan Umum

vi. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

Jumlah Pegawai	Kepangkatan	Tingkat Pendidikan	Struktural/ Eselon	Fungsional
11	Gol I = - Gol II = - Gol III = 10 Gol IV = 1	SD = - SMP = - SMA = - D3 = 1 D4/ S1 = 10 S2 = -	II = - III = 1 IV = 3 V = -	- Jabatan fungsional pemetaan surveyor - Jabatan fungsional statistisi

vii. Sumber dan Jumlah Anggaran

APBD Tahun 2019 dengan jumlah anggaran Rp. 20.313.000

viii. Jangka waktu kerjasama

- (satu) tahun selama Tahun 2019

ix. Hasil (output) dari Kerjasama

Optimalisasi pemberian layanan kesehatan kepada masyarakat melalui penyediaan tenaga dokter umum yang ditempatkan pada Puskesmas Rawat Inap sesuai standart.

x. Permasalahan dan Solusi

Tidak Ada

xi. Hal lain yang dianggap perlu dilaporkan

Tidak ada

d. Kesepakatan Bersama dengan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika

i. Mitra yang diajak kerjasama

Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika

ii. Dasar Hukum

Nomor : 39/KOMINFO/HK.03.02/05/2019 dan Nomor : 130/5/401.011/2019

iii. Bidang Kerjasama

Implementasi Gerakan Menuju 100 Smart City Kota Madiun

iv. Nama Kegiatan

Kegiatan Koordinasi Penyusunan MoU

v. SKPD Penyelenggara Kerjasama antar daerah

Bagian Administrasi Pemerintahan Umum

vi. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

Jumlah Pegawai	Kepangkatan	Tingkat Pendidikan	Struktural/ Eselon	Fungsional
11	Gol I = - Gol II = - Gol III = 10 Gol IV = 1	SD = - SMP = - SMA = - D3 = 1 D4/ S1 = 10 S2 = -	II = - III = 1 IV = 3 V = -	- Jabatan fungsional pemetaan surveyor - Jabatan fungsional statistisi

vii. Sumber dan Jumlah Anggaran

APBD Tahun 2019 dengan jumlah anggaran Rp. 20.313.000

viii. Jangka waktu kerjasama

1 (satu) tahun selama tahun 2019

ix. Hasil (output) dari Kerjasama

Masterplan Smart City Kota Madiun

x. Permasalahan dan Solusi

Tidak ada

xi. Hal lain yang dianggap perlu dilaporkan

Tidak ada

e. Kesepakatan Bersama dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II

i. Mitra yang diajak kerjasama

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II

ii. Dasar Hukum

Nomor : 130/10/401.011/2019 dan Nomor : KEP-366/WPJ.24/2019

iii. Bidang Kerjasama

Optimalisasi Penerimaan Pajak Pusat dan Pajak Daerah

iv. Nama Kegiatan

Kegiatan Koordinasi Penyusunan MoU

v. SKPD Penyelenggara Kerjasama antar daerah

Bagian Administrasi Pemerintahan Umum

vi. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

Jumlah Pegawai	Kepangkatan	Tingkat Pendidikan	Struktural/ Eselon	Fungsional
11	Gol I = - Gol II = - Gol III = 10 Gol IV = 1	SD = - SMP = - SMA = - D3 = 1 D4/ S1 = 10 S2 = -	II = - III = 1 IV = 3 V = -	- Jabatan fungsional pemetaan surveyor - Jabatan fungsional statistisi

vii. Sumber dan Jumlah Anggaran

APBD Tahun 2019 dengan jumlah anggaran Rp. 20.313.000

viii. Jangka waktu kerjasama
1 (satu) tahun

ix. Hasil (output) dari Kerjasama
Pemanfaatan Sistem Informasi Perpajakan Pajak Pusat dan Pajak Daerah

x. Permasalahan dan Solusi
Tidak ada

xi. Hal lain yang dianggap perlu dilaporkan
Tidak ada

3. Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun

Bentuk kerjasama antar daerah yang dilaksanakan berupa forum SKPD daerah dengan urusan penanganan pengumpulan pajak daerah. Kegiatan dalam forum merupakan sering terhadap beberapa permasalahan dan solusi yang dilakukan mengingat permasalahan yang ada di masing masing daerah mempunyai karakteristik tersendiri.

Peserta forum SKPD dengan urusan pengumpulan pajak daerah yaitu daerah ex Karisidenan Madiun antara lain :

a. Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun
b. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun
c. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pononorogo
d. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan
e. Badan Keuangan Kabupaten Ngawi
f. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan
g. Badan Pendapatan Kabupaten Nganjuk
h. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung
i. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek
j. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri
k. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri

B. KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA

1. Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun

Pemerintah Kota Madiun telah melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga yaitu PT. Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) Area Madiun dalam hal pemungutan dan penyetoran pajak penerangan jalan serta rekening listrik pemerintah Kota Madiun.

Dalam hal kerja sama tersebut perlu di sampaikan yaitu :

1. Dasar Hukum adalah surat perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kota Madiun dengan PT.Perusahaan Listrik Negara (Persero) Area Madiun tentang peningkatan pelayanan kelistrikan di Kota Madiun Nomor : 130/4/401.011/2019
   00.1 MOU/HKM.00.01/UP3-MDN/2019 Tanggal 2 Januari 2019
2. Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan kerja sama Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun
3. Surat Perjanjian berlaku sejak di tanda tanganinya kesepakatan bersama dan berahir pada tanggal 31 Desember 2019
4. Hasil yang di capai yaitu peningkatan capaian pendapatan asli daerah (PAD) dari unsur Pajak Daerah

2. Bagian Administrasi Pembangunan

a. Mitra yang diajak kerjasama :
   Lembaga Pengabdian, Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Masyarakat Universitas Airlangga Surabaya
b. Dasar Hukum :
   Surat Perjanjian Kerjasama Kepala Bagian Administrasi Pembangunan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Ketua Lembaga Pengabdian, Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Masyarakat (LP4M) Universitas Airlangga Surabaya untuk melaksanakan pekerjaan Swakelola Penyusunan Standar Harga Satuan Barang Kebutuhan Pemerintah dan Analisa Harga Satuan Kegiatan Konstruksi Kota Madiun Tahun 2020 Nomor : 027/KPA-PPK/323/401.012/2019
c. Bidang Kerjasama :
   Peningkatan Fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa
d. Nama Kegiatan :
   Penyusunan Standar Harga Barang Kebutuhan dan Standar Kegiatan Konstruksi
e. SKPD Penyelenggara Kerajasama dengan Pihak Ketiga :
   Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Madiun
f. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan :

Jumlah Pegawai	**Kualifikasi Pendidikan**	**Pangkat dan Golongan**
PNS : 14 Honorer : 0 Upahan : 1	S2 : 2 S1 : 9 D3 : 1 SMA : 2 SMP : 1	Pembina Tk I /IVb : **1** Penata Tk I/IIId : **1** Penata /IIIc : **5** Penata Md Tk I/IIIb : **2** Penata Muda/IIIa : **3** Pengatur Tk I/IId : **1** Pengatur/IIc : **1**

g. Sumber dan Jumlah Anggaran :

Sumber Anggaran : APBD Pemerintah Kota Madiun TA 2019

Jumlah Anggaran : Rp. 211.486.000

h. Jangka waktu kerjasama :

150 hari kalender mulai tanggal 19 Maret 2019 s/d 16 Agustus 2019

i. Hasil (output) dari Kerjasama

Buku Dokumen Standar Harga Satuan Barang Kebutuhan dan Analisa Harga Satuan Kegiatan Konstruksi Pemerintah Kota Madiun TA 2020

j. Permasalahan dan Solusi :

Permasalahan :

- Data Input asumsi kuantitas barang dan jenis barang kebutuhan dari instansi terkait yang sering berubah
- Terdapat beberapa harga barang kebutuhan dari hasil survey yang tidak sinkron dengan harga barang kebutuhan pelaksanaan di lapangan

Solusi :

- Membentuk Tim Teknis dari OPD yang terkait
- Perlu dilakukan Rapat Koordinasi dan Evaluasi serta Rapat Pleno bersama Tim Pengarah, Tim Teknis dan Tim Konsultan

k. Hal lain yang dianggap perlu dilaporkan :

Buku Dokumen Standar Harga Satuan Barang Kebutuhan dan Analisa Harga Satuan Kegiatan Konstruksi Pemerintah Kota Madiun TA 2020 telah di edarkan kepada seluruh OPD Pemerintah Kota Madiun dan di berikan kepada Instansi Vertikal terkait.

3. Badan Kepegawaian Daerah Kota Madiun

3.1 Diklat Kepemimpinan Tingkat II

a. Mitra yang diajak kerjasama

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur

b. Dasar Hukum

i. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

ii. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;

iii. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;

iv. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II.

v. Nota Perjanjian Kerja Sama antara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur dengan Badan Kepegawaian Daerah Kota Madiun Nomor $\frac{893.2/13506/205/2019}{893.2/535/401.201/2019}$ Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan V Tahun 2019.

c. Bidang Kerjasama

Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II

d. Nama Kegiatan

Diklat Kepemimpinan Tingkat II

e. SKPD Penyelenggara Kerjasama antar daerah

BKD Kota Madiun

f. Jumlah Peserta

2 (dua) orang Pejabat Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun

g. Sumber dan Jumlah Anggaran

APBD Kota Madiun Rp 100.710.000,-

h. Jangka waktu kerjasama

Tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 20 Juli 2019

i. Hasil (output) dari Kerjasama

Jumlah Pejabat Eselon II yang lulus Diklat Kepemimpinan Tingkat II

j. Permasalahan dan Solusi

i. Permasalahan

Jadwal Kegiatan Pejabat Eselon II yang padat dan tidak dapat ditinggalkan.

ii. Solusi

Mengusahakan agar Pejabat Eselon II tetap dapat mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat II

3.2 Diklat Kepemimpinan Tingkat III

a. Mitra yang diajak kerjasama

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur.

b. Dasar Hukum

i. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

ii. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;

iii. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;

iv. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III.

v. Nota Perjanjian Kerja Sama antara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur dengan Badan Kepegawaian Daerah Kota Madiun Nomor $\frac{893.2/34503/205/2019}{893.2/1376/401.201/201}$ Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat III Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun 2019.

c. Bidang Kerjasama

Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III

d. Nama Kegiatan

Diklat Kepemimpinan Tingkat III

e. SKPD Penyelenggara Kerjasama antar daerah

BKD Kota Madiun

f. Jumlah Peserta

5 (lima) orang Pejabat Eselon III di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun

g. Sumber dan Jumlah Anggaran

APBD Kota Madiun Rp 192.680.000,-

h. Jangka waktu kerjasama

Tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 8 November 2019

i. Hasil (output) dari Kerjasama

Jumlah Peserta Diklatpim Tk. III yang lulus Diklat

j. Permasalahan dan Solusi

i. Permasalahan

a) Jadwal Penyelenggaraan Diklatpim yang padat

b) Banyaknya Pejabat Eselon III di lingkungan Pemerintah Kota Madiun yang tidak memenuhi syarat batas usia peserta Diklatpim Tk. III

ii. Solusi

a) Koordinasi dengan pihak BPSDM Provinsi Jawa Timur

k. Hal lain yang dianggap perlu dilaporkan

3.3 Diklat Kepemimpinan Tingkat IV

a. Mitra yang diajak kerjasama

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur

b. Dasar Hukum

i. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

ii. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;

iii. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;

iv. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV.

v. Nota Perjanjian Kerja Sama antara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur dengan Badan Kepegawaian Daerah Kota Madiun Nomor $\frac{893.2/4252/205.2.2/2019}{893.2/1376/401.201/201}$ Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan I Tahun 2019.

c. Bidang Kerjasama

Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV dengan pola kemitraan

d. Nama Kegiatan

Diklat Kepemimpinan Tingkat IV

e. SKPD Penyelenggara Kerjasama antar daerah

BKD Kota Madiun

f. Jumlah Peserta

28 (dua puluh delapan) orang pejabat pengawas (eselon IV) di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun

g. Sumber dan Jumlah Anggaran

APBD Kota Madiun Rp 529.919.000,-

h. Jangka waktu kerjasama :

4 Februari 2019 sampai dengan tanggal 22 Mei 2019

i. Hasil (output) dari Kerjasama

Jumlah Peserta Diklatpim Tingkat IV yang lulus

j. Permasalahan dan Solusi

i. Permasalahan

-

ii. Solusi

-

k. Hal lain yang dianggap perlu dilaporkan

-

3.4 Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil

a. Mitra yang diajak kerjasama
   i. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur
   ii. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Regional Yogyakarta

b. Dasar Hukum
   i. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
   ii. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
   iii. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil;
   iv. Nota Perjanjian Kerja Sama antara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur dengan Badan Kepegawaian Daerah Kota Madiun Nomor 893.2/26504/205.2.2/2019 / 893.2/1029/401.201/2019 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun 2019;
   v. Nota Kesepahaman antara Badan Kepegawaian Daerah Kota Madiun dengan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Regional Yogyakarta
   Nomor 893.4/570/401.201/2019 / 893.4/03.448/PPSDM tentang Penyelenggaraan Pelatihan Dasar bagi Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun 2019.

c. Bidang Kerjasama
   Penyelenggaraan Pelatihan Dasar bagi Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun dengan pola Kontribusi.

d. Nama Kegiatan
   Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil

e. SKPD Penyelenggara Kerjasama antar daerah
   BKD Kota Madiun

f. Jumlah Peserta
   i. 35 (tiga puluh lima) orang mengikuti Pelatihan Dasar CPNS di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur.
   ii. 136 (seratus tiga puluh enam) orang mengikuti Pelatihan Dasar CPNS di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri Regional Yogyakarta.

g. Sumber dan Jumlah Anggaran
   APBD Kota Madiun Rp 2.404.350.000,-

h. Jangka waktu kerjasama

Bulan Juni 2019 sampai dengan bulan November 2019

i. Hasil (output) dari Kerjasama

Calon Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan persyaratan pengangkatan untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

j. Permasalahan dan Solusi

i. Permasalahan

-

ii. Solusi

-

k. Hal lain yang dianggap perlu dilaporkan

-

3.5 Diklat Teknis Fungsional

a. Mitra yang diajak kerjasama

i. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur;

ii. Lembaga Diklat yang terakrediasi.

b. Dasar Hukum

i. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;

ii. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 893.3/1176/diklat tanggal 23 Agustus 2002 tentang Program Diklat PNS di Lingkungan Depdagri dan Pemerintah Daerah;

iii. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional;

iv. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Pola Penjenjangan Pendidikan dan Pelatihan Teknis;

v. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 40 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Madiun.

c. Bidang Kerjasama

Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional bagi pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

d. Nama Kegiatan

Diklat Teknis Fungsional

e. SKPD Penyelenggara Kerjasama antar daerah

BKD Kota Madiun

f. Jumlah Peserta
   - Diklat Excellent Frontliner : 35 (tiga puluh lima) orang
   - Diklat Kearsipan Tahun 2019 : 34 (tiga puluh empat) orang
   - Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2019 : 72 (tujuh puluh dua) orang
   - Diklat Teknis/Fungsional (Pengiriman) : 96 (Sembilan puluh enam) orang
   - Evaluasi Dampak Diklalt (EDD) Tahun 2019 : 78 (tujuh puluh delapan) orang

g. Sumber dan Jumlah Anggaran
   APBD Kota Madiun Rp 1.290.010.200,-

h. Jangka waktu kerjasama
   Selama tahun 2019

i. Hasil (output) dari Kerjasama
   Pegawai Pemerintah Kota Madiun yang telah mengikuti diklat teknis dan diklat fungsional yang dibutuhkan untuk menunjang tupoksinya.

j. Permasalahan dan Solusi
   a. Permasalahan
      -
   b. Solusi
      -

k. Hal lain yang dianggap perlu dilaporkan

3.6 Assessment Kompetensi Bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

a. Mitra yang diajak kerjasama
   Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret Surakarta.

b. Dasar Hukum
   i. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
   ii. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
   iii. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
   iv. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 40 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Madiun;
   v. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kota Madiun dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas

Sebelas Maret Nomor 800/2228/401.201/2019 3153.1/UN27.21/KS/2019 tentang Penyelenggaraan Assessment Kompetensi pada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

c. Bidang Kerjasama

Assessment Kompetesi bagi pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun

d. Nama Kegiatan

Asseesment Kompetensi bagi JPTP Tahun 2019

e. SKPD Penyelenggara Kerjasama antar daerah

BKD Kota Madiun

f. Jumlah Peserta

22 orang

g. Sumber dan Jumlah Anggaran

APBD Kota Madiun Rp 210.450.000,-

h. Jangka waktu kerjasama

Bulan November 2019

i. Hasil (output) dari Kerjasama

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang telah di assessment

4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun

a. Mitra yang diajak kerjasama : PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Madiun dengan Nomor : 900/06/401.202/2019 dan Nomor : 058/05.B/MDN/PN/PKS

b. Dasar Hukum : Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor : 900-401.202/201/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2019

c. Bidang Kerjasama : penunjukan Bank sebagai penempatan rekening kas umum daerah Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2019

d. Nama Kegiatan : -

e. SKPD Penyelenggara Kerjasama antar daerah : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun

f. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

Jumlah Pegawai	Kepangkatan	Tingkat Pendidikan	Struktural Eselon	Fungsional	Staf
PNS= 34 Tenaga Upahan= 8	Gol I = 0 Gol II = 7 Gol III = 22 Gol IV = 5	SD = 1 SMP = - SMA = 12 D3 = 2 D4/ S2 = 15 S2 = 4	II = - III = 4 IV = 9 V = -	2 orang	19 orang

g. Sumber dan Jumlah Anggaran : APBD Tahun Anggaran 2019

h. Jangka waktu kerjasama : 1 tahun

i. Hasil (output) dari Kerjasama :

i. Pihak pertama mengelola uang kas daerah Pemerintah Kota Madiun yang memenuhi azas akuntabilitas, efesiensi dan efektif ;

ii. Memberikan pelayanan yang tepat, mudah dan transparan, dengan meningkatkan ketertiban dan ketaatan administrasi keuangan melalui terlaksananya sistem pengelolaan keuangan daerah dan menjamin keamanan uang kas daerah Pemerintah Kota Madiun.

5. Sekretariat DPRD Kota Madiun

a. Mitra yang diajak kerjasama

i. Pembahasan dan Pengkajian Raperda tentang Sistem Kesehatan Daerah, Perda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, dan Perda tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis dengan P3KHAM LPPM Universitas Sebelas Maret Surakarta

ii. Pengkajian dan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Madiun Tahun 2018 oleh DPRD Kota Madiun dengan tenaga ahli LPPM Universitas Bhayangkara (UBHARA) Surabaya.

iii. Pengkajian dan pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Madiun Tahun 2018 oleh DPRD Kota Madiun dengan tenaga ahli LPPM Universitas Wisnuwardhana Malang.

iv. Pengkajian dan pembahasan KUA-PPAS Kota Madiun Tahun 2020 oleh DPRD Kota Madiun dengan tenaga ahli LPPM Universitas Wisnuwardhana Malang

v. Pengkajian dan pembahasan KUPA PPAS-P dan RKPD Perubahan Kota Madiun Tahun 2019 oleh DPRD Kota Madiun dengan tenaga ahli LPPM Universitas Wisnuwardhana Malang.

vi. Pendampingan penyusunan rancangan peraturan DPRD Kota Madiun tentang tata tertib DPRD oleh tim penyusun rancangan peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD Kota Madiun dengan tenaga ahli P3KHAM LPPM Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta.

b. Dasar Hukum

i. No.175/185/401.040/2019
No.173/UN27.21/KS/2019

Berlaku sejak tanggal penandatanganan tanggal 25 Januari 2019 dan akan berakhir dengan sendirinya apabila kegiatan yang diberikan telah selesai seluruhnya dikerjakan

ii. No.175/184/401.040/2019
No.175/UN27.21/KS/2019

Berlaku sejak tanggal penandatanganan tanggal 25 Januari 2019 dan akan berakhir dengan sendirinya apabila kegiatan yang diberikan telah selesai seluruhnya dikerjakan

iii. No.175/186/401.040/2019
No.176/UN27.21/KS/2019

Berlaku sejak tanggal penandatanganan tanggal 25 Januari 2019 dan akan berakhir dengan sendirinya apabila kegiatan yang diberikan telah selesai seluruhnya dikerjakan

6. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum

a. Kesepakatan Bersama dengan Organisasi Bantuan Hukum Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Cabang Madiun

i. Mitra yang diajak kerjasama

Organisasi Bantuan Hukum Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Cabang Madiun

ii. Dasar Hukum

Nomor : 180/2/401.011/2019 dan Nomor : 0001/PBH.MADIUN/III/2019

iii. Bidang Kerjasama

Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin

iv. Nama Kegiatan

Kegiatan Koordinasi Penyusunan MoU

v. SKPD Penyelenggara Kerjasama antar daerah

Bagian Administrasi Pemerintahan Umum

vi. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

Jumlah Pegawai	Kepangkatan	Tingkat Pendidikan	Struktural / Eselon	Fungsional
11	Gol I = - Gol II = - Gol III = 10 Gol IV = 1	SD = - SMP = - SMA = - D3 = 1 D4/ S1 = 10 S2 = -	II = - III = 1 IV = 3 V = -	- Jabatan fungsional pemetaan surveyor - Jabatan fungsional statistisi

vii. Sumber dan Jumlah Anggaran

APBD Tahun 2019 dengan jumlah anggaran Rp. 20.313.000

viii. Jangka waktu kerjasama

1 (satu) tahun selama tahun 2019

ix. Hasil (output) dari Kerjasama

Penguatan penyelenggaraan bantuan hukum untuk masyarakat miskin Kota Madiun

b. Kesepakatan Bersama dengan Lembaga Bantuan Hukum Imparcial Madiun

i. Mitra yang diajak kerjasama

Lembaga Bantuan Hukum Imparcial Madiun

ii. Dasar Hukum

Nomor : 180/3/401.011/2019 dan Nomor : 001/IMP.MN/II/2019

iii. Bidang Kerjasama

Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin

iv. Nama Kegiatan

Kegiatan Koordinasi Penyusunan MoU

v. SKPD Penyelenggara Kerjasama antar daerah

Bagian Administrasi Pemerintahan Umum

vi. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

Jumlah Pegawai	Kepangkatan	Tingkat Pendidikan	Struktural / Eselon	Fungsional
11	Gol I = - Gol II = - Gol III = 10 Gol IV = 1	SD = - SMP = - SMA = - D3 = 1 D4/ S1 = 10 S2 = -	II = - III = 1 IV = 3 V = -	- Jabatan fungsional pemetaan surveyor - Jabatan fungsional statistisi

vii. Sumber dan Jumlah Anggaran

APBD Tahun 2019 dengan jumlah anggaran Rp. 20.313.000

viii. Jangka waktu kerjasama

1 (satu) tahun selama tahun 2019

ix. Hasil (output) dari Kerjasama

Penguatan penyelenggaraan bantuan hukum untuk masyarakat miskin Kota Madiun

x. Permasalahan dan Solusi

Tidak ada

xi. Hal lain yang dianggap perlu dilaporkan

Tidak ada

c. Kesepakatan Bersama dengan Kantor Pertanahan Kota Madiun

i. Mitra yang diajak kerjasama

Kantor Pertanahan Kota Madiun

ii. Dasar Hukum

Nomor : 130/7/401.011/2019 dan Nomor : 11.1/100.2-35.77/IV/2019

iii. Bidang Kerjasama

Kerjasama Bidang Pertanahan

iv. Nama Kegiatan

Kegiatan Koordinasi Penyusunan MoU

v. SKPD Penyelenggara Kerjasama antar daerah

Bagian Administrasi Pemerintahan Umum

vi. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

Jumlah Pegawai	Kepangkatan	Tingkat Pendidikan	Struktural/ Eselon	Fungsional
11	Gol I = - Gol II = - Gol III = 10 Gol IV = 1	SD = - SMP = - SMA = - D3 = 1 D4/ S1 = 10 S2 = -	II = - III = 1 IV = 3 V = -	- Jabatan fungsional pemetaan surveyor - Jabatan fungsional statistisi

vii. Sumber dan Jumlah Anggaran

APBD Tahun 2019 dengan jumlah anggaran Rp. 20.313.000

viii. Jangka waktu kerjasama

3 (tiga) tahun

ix. Hasil (output) dari Kerjasama

Validitas data pertanahan di kota madiun

x. Permasalahan dan Solusi

Tidak ada

xi. Hal lain yang dianggap perlu dilaporkan

Tidak ada

d. Kesepakatan Bersama dengan PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Madiun

i. Mitra yang diajak kerjasama

PT. PLN (Persero)

ii. Dasar Hukum

Nomor : 130/4/401.011/2019 dan Nomor : 0001.MOU/HKM.00.01/UP3-MDN/2019

iii. Bidang Kerjasama

Pelayanan Kelistrikan

iv. Nama Kegiatan

Kegiatan Koordinasi Penyusunan MoU

v. SKPD Penyelenggara Kerjasama antar daerah

Bagian Administrasi Pemerintahan Umum

vi. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

Jumlah Pegawai	Kepangkatan	Tingkat Pendidikan	Struktural/ Eselon	Fungsional
11	Gol I = - Gol II = - Gol III = 10 Gol IV = 1	SD = - SMP = - SMA = - D3 = 1 D4/ S1 = 10 S2 = -	II = - III = 1 IV = 3 V = -	- Jabatan fungsional pemetaan surveyor - Jabatan fungsional statistisi

vii. Sumber dan Jumlah Anggaran

APBD Tahun 2019 dengan jumlah anggaran Rp. 20.313.000

viii. Jangka waktu kerjasama

1 (satu) tahun selama tahun 2019

ix. Hasil (output) dari Kerjasama

Penyediaan tenaga listrik dalam jumlah dan mutu yang memadai untuk kepentingan umum

x. Permasalahan dan Solusi

Tidak ada

xi. Hal lain yang dianggap perlu dilaporkan

Tidak ada

e. Kesepakatan Bersama dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk

i. Mitra yang diajak kerjasama

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk

ii. Dasar Hukum

Nomor : 130/8/401.011/2019 dan Nomor : 058/062/DIR/HKB/MOU

iii. Bidang Kerjasama

Elektronifikasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Optimalisasi Penerimaan Daerah di Kota Madiun

iv. Nama Kegiatan

Kegiatan Koordinasi Penyusunan MoU

v. SKPD Penyelenggara Kerjasama antar daerah

Bagian Administrasi Pemerintahan Umum

vi. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

Jumlah Pegawai	Kepangkatan	Tingkat Pendidikan	Struktural/ Eselon	Fungsional
11	Gol I = - Gol II = - Gol III = 10 Gol IV = 1	SD = - SMP = - SMA = - D3 = 1 D4/ S1 = 10 S2 = -	II = - III = 1 IV = 3 V = -	- Jabatan fungsional pemetaan surveyor - Jabatan fungsional statistisi

vii. Sumber dan Jumlah Anggaran

APBD Tahun 2019 dengan jumlah anggaran Rp. 20.313.000

viii. Jangka waktu kerjasama

1 (satu) tahun selama tahun 2019

ix. Hasil (output) dari Kerjasama

Pelayanan Elektronifikasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Optimalisasi Penerimaan Daerah

x. Permasalahan dan Solusi

Tidak ada

f. Kesepakatan Bersama dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Madiun

i. Mitra yang diajak kerjasama

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Madiun

ii. Dasar Hukum

Nomor : 460/8/401.011/2019 dan Nomor : MAD/5.5/0003/2019

iii. Bidang Kerjasama

Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai Daerah

iv. Nama Kegiatan

Kegiatan Koordinasi Penyusunan MoU

v. SKPD Penyelenggara Kerjasama antar daerah

Bagian Administrasi Pemerintahan Umum

vi. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

Jumlah Pegawai	Kepangkatan	Tingkat Pendidikan	Struktural/ Eselon	Fungsional
11	Gol I = - Gol II = - Gol III = 10 Gol IV = 1	SD = - SMP = - SMA = - D3 = 1 D4/ S1 = 10 S2 = -	II = - III = 1 IV = 3 V = -	- Jabatan fungsional pemetaan surveyor - Jabatan fungsional statistisi

vii. Sumber dan Jumlah Anggaran

APBD Tahun 2019 dengan jumlah anggaran Rp. 20.313.000

viii. Jangka waktu kerjasama

1 (satu) tahun selama tahun 2019

ix. Hasil (output) dari Kerjasama

Penyediaan, Pendistribusian, Pembagian, Pelaksanaan Koordinasi, Pengembangan dan Pelaksanaan Strategi Program Bantuan Pangan Non Tunai Daerah

x. Permasalahan dan Solusi

Tidak ada

xi. Hal lain yang dianggap perlu dilaporkan

Tidak ada

7. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Madiun

a. BIDANG CIPTA KARYA

i. Mitra yang diajak kerjasama

LPPM ITS (Institut Teknologi Sepuluh Nopember) Surabaya

ii. Dasar Hukum

iii. Bidang Kerjasama

Perjanjian kerjasama Swakelola Non Swadana

iv. Nama Kegiatan

Kegiatan Pendataan Bangunan Gedung Pemerintah

v. SKPD Penyelenggara Kerjasama Dengan Pihak Ketiga

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Madiun

vi. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

Jumlah Pegawai	Kepangkatan	Tingkat Pendidikan	Struktural / Eselon	Fungsional	Staf
9	Gol I = - Gol II = 3 Gol III = 5 Gol IV = 1	SD = - SMP = - SMA = 3 D3 = - D4/S1 = 5 S2 = 1	II = - III = 1 IV = 3 V = -	-	5

vii. Sumber dan Jumlah Anggaran

P-APBD Tahun 2019 dan Jumlah Anggaran Rp. 100.000.000,00

viii. Jangka waktu kerjasama

Bulan Oktober sampai dengan Desember 2019

ix. Hasil (output) dari Kerjasama

Database bangunan gedung Pemerintah Kota Madiun (Stadion, GOR, Asrama Haji dan Kantor DPRD Kota Madiun)

x. Permasalahan dan Solusi

Kegiatan dilaksanakan dengan baik sesuai dengan petunjuk

xi. Hal lain yang dianggap perlu dilaporkan

Realisasi kegiatan ini dapat mendukung penyelenggaraan Bangunan Gedung di Kota Madiun sebagai wujud implementasi Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 7 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung

b. BIDANG TATA KOTA

i. Mitra yang diajak kerjasama

Lembaga Pusat Penelitian dan Pengembangan Konstitusi dan Hak AsasiManusia (P3KHAM) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta

ii. Dasar Hukum

Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Madiun dengan Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta tentang Peningkatan Program Pembangunan dan Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor 130/9/401.040/2016 dan Nomor 9264/UN27/KS/2016 tanggal 10 Agustus 2016

iii. Bidang Kerjasama

Penyusunan Raperda Kota Madiun tentang urusan pekerjaan umum dan penataan ruang Kota Madiun Tahun 2019

iv. Nama Kegiatan

Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Bangunan (AP)

- Penyusunan Draft Naskah Akademik dan Raperda tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan Daerah

v. SKPD Penyelenggara Kerjasama Dengan Pihak Ketiga

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Madiun

vi. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

Jumlah Pegawai	Kepangkatan	Tingkat Pendidikan	Struktural/ Eselon	Fungsional	Staf
9	Gol I = - Gol II = 3 Gol III = 6 Gol IV = -	SD = - SMP = - SMA = 4 D3 = 1 D4/S1 = 4 S2 = -	II = - III = 1 IV = 2 V = -	-	6

vii. Sumber dan Jumlah Anggaran

APBD Tahun 2019

viii. Jangka waktu kerjasama

Bulan September sampai dengan Desember 2019

ix. Hasil (output) dari Kerjasama

Draft Naskah Akademik Raperda

x. Permasalahan dan Solusi

Kegiatan dilaksanakan dengan baik sesuai dengan petunjuk

xi. Hal lain yang dianggap perlu dilaporkan

8. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun

a. Mitra yang diajak kerjasama

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun melakukan nota persetujuan atau *Memorandum of Agreement (MOA)* dengan Program Studi S1 Informatika, Fakultas Teknik, Universitas PGRI Madiun (UNIPMA), berupa kerjasama dalam pengembangan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi (TI) dan komunikasi. Tujuan dari kerjasama ini adalah untuk meningkatan kemampuan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat mahasiswa dan dosen dari hasil riset bersama (mahasiswa, dosen informatika UNIPMA dan pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun).

b. Bidang Kerjasama, mencakup :

i. Riset dan penelitian di bidang aplikasi teknologi informasi dan komunikasi

ii. Program Kerja Praktek Mahasiswa

iii. Menyelenggarakan kegiatan ilmiah, seminar, lokakarya dan pengabdian masyarakat.

c. SKPD Penyelenggara Kerjasama antar daerah

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun

d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

Jumlah Pegawai	Kepangkatan	Tingkat Pendidikan	Struktural/ Eselon	Fungsional	Staf
28	Gol I = Gol II = 5 Gol III = 20 Gol IV = 3	SD = SMP = SMA = 5 D3 = 8 D4/ S1 = 13 S2 = 2	II = 1 III = 3 IV = 5 V =	**10**	**9**

e. Jangka waktu kerjasama

Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 4 Januari 2019 s/d 3 Januari 2020, dengan ketentuan dapat diperpanjang setelah dilakukan peninjauan 2 (dua) bulan sebelum masa berakhirnya persetujuan.

C. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH

1. Dinas Perhubungan Kota Madiun

a. Forum Koordinasi

Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Madiun

b. Materi Koordinasi

Tentang permasalahan-permasalahan transportasi darat di kota Madiun.

c. Instansi Vertikal yang terlibat

- Dinas Perhubungan.
- Kepolisian
- Dinas Pekerjaan Umum.
- Satuan Polisi Pamong Praja.
- Dinas lingkungan Hidup.
- Dinas Pemukiman.
- Kecamatan di kota Madiun,
- Kelurahan di kota Madiun.

d. Sumber dan Jumlah Anggaran

Sumber dana APBD Kota Madiun Tahun 2019

Jumlah anggaran Rp.660,000,000

e. SKPD Penyelenggara Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah

Dinas Perhubungan Kota Madiun

f. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

Dari Dinas Perhubungan = 20 orang

S2 = 3 orang ,Pembina Tingkat I/IVb=1 orang,Pembina/IVa=2 orang

S1 = 8 orang,Penata Tingkat I =7 orang, Penata Muda=1 orang

D3 = 2orang, Penata Muda/ IIIa=1 orang, Penata Muda TK.I/IIIb=1 orang SMA =7 orang tenaga kontrak,

g. Jumlah Kegiatan Koordinasi yang dilaksanakan
   6 kali kegiatan
h. Hasil dan Manfaat Koordinasi
   Manfaat koordinasi;
   - menyamakan persepsi/pemahaman tentang penanganan permasalahan LLAJ.
   - Memadukan sinergitas kesiapan seluruh OPD untuk menangani permasalahan LLAJ
   - Tercukupinya hubungan kerjasama antar OPD/Instansi terkait dalam Tim Forum LLAJ guna menangani masalah lalu lintas
i. Tindak Lanjut Hasil Koordinasi
   - dilakukan manajemen rekayasa lalu lintas ruas jalan
   - Penanganan lokasi rawan kecelakaan di ringroad
   - Penanganan manajemen dan rekayasa lalu lintas pada Hari Lebaran dan Natal Tahun Baru
j. Hal lain yang dianggap perlu dilaporkan
   Semua hasil Rapat Forum LLAJ Di laporkan kepada Bapak Walikota Madiun sebagai Pembina Forum LLAJ Kota Madiun secara tertulis

i. Bagian Kesejahteraan Rakyat

a. Forum Koordinasi
   Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur
b. Materi Koordinasi
   - Koordinasi terkait pembinaan kinerja BUMD
   - Koordinasi terkait pelaksanaan BUMD Expo
   - Koordinasi terkait pelaksanaan BUMD Award
c. Instansi Vertikal yang terlibat
   Pemerintah Provinsi Jawa Timur
d. Sumber dan Jumlah Anggaran
   APBD (SPPD) > Rp 180.000.000
e. SKPD Penyelenggara Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah
   Biro Perekonomian setda Provinsi Jatim
f. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan
   Jumlah Pegawai = 3, min S1, Pangkat : Penata Tk. I , Gol III d
g. Jumlah Kegiatan Koordinasi yang dilaksanakan
   - 3 Kegiatan

h. Hasil dan Manfaat Koordinasi
   i. Mengetahui prosedural pembinaan BUMD untuk meningkatkan PAD
   ii. Persiapan yang lebih matang terkait pelaksanaan BUMD Expo
   iii. Mengetahui materi penilaian BUMD Award

h. Tindak Lanjut Hasil Koordinasi
   i. Laporan hasil pembinaan BUMD
   ii. Laporan hasil rapat terkait BUMD Expo
   iii. Laporan hasil rapat terkait BUMD Award

i. Hal lain yang dianggap perlu dilaporkan
   Tidak ada

3. Bagian Kesejahteraan Rakyat

a. Forum Koordinasi
   Forum Koordinasi TPID, DBHCHT, Tim Percepatan Berudsaha, KUR

b. Materi Koordinasi
   - Laporan Perkembangan Inflasi
   - HLM (Hight Level Meeting) TPID
   - Laporan Program/ Kegiatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)
   - Laporan Realisasi kegiatan DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau)
   - Asistensi Kegiatan DBHCHT
   - Rekonsiliasi DBHCHT
   - Koordinasi / konsultasi masalah ijin berusaha

c. Instansi Vertikal yang terlibat
   - Pemerintah Provinsi Jawa Timur ;
   - Pemerintah Pusat.

d. Sumber dan Jumlah Anggaran
   - APBN (sesuai pagu yang ditetapkan / +_17 M)
   - APBD (150.000.000)

e. SKPD Penyelenggara Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah
   - Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jatim
   - Kementrian Keuangan RI
   - Kemendagri

f. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan
   Jumlah Pegawai = 4, min S1, Pangkat : Penata Tk. I , Gol III d

g. Jumlah Kegiatan Koordinasi yang dilaksanakan
   Jumlah Koordinasi dalam sebanyak 8 Kali ;

h. Hasil dan Manfaat Koordinasi
   - Mengetahui Perkembangan Inflasi yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan dampak pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat;
   - Mengetahui kegiatan DBHCHT yang sesuai dengan regulasi yang ditetapkan agar manfaat sampai pada sasaran;
   - Menyelesaikan masalah perijinan berusaha

i. Tindak Lanjut Hasil Koordinasi
   - Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan TPID
   - Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan DBHCHT

j. Hal lain yang dianggap perlu dilaporkan :
   - Tidak ada

4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

a. Forum Koordinasi

   Pendampingan pengelolaan keuangan daerah

b. Materi Koordinasi

   Koordinasi terkait rencana lelang, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan yang dilakukan OPD dilingkungan Pemkot Madiun

c. Instansi Vertikal yang terlibat
   - Kejaksaan Negeri

d. Sumber dan Jumlah Anggaran
   - APBD Tahun Anggaran 2019 dengan dana Rp. 546.100.000,- (30 kali)

e. SKPD Penyelenggara Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah
   - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun

f. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan :

Jumlah Pegawai	Kepangkatan	Tingkat Pendidikan	Struktural/ Eselon	Fungsional	Staf
PNS= 34 Tenaga Upahan= 8	Gol I = 0 Gol II = 7 Gol III = 22 Gol IV = 5	SD = 1 SMP = - SMA = 12 D3 = 2 D4/ S1 = 15 S2 = 4	II = - III = 4 IV = 9 V = -	2 orang	19 orang

g. Jumlah Kegiatan Koordinasi yang dilaksanakan :

   62 kali

h. Hasil dan Manfaat Koordinasi :

   Koordinasi dan konsultasi terkait perencanaan dan tahap pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dimonitoring oleh TP4D

i. Tindak Lanjut Hasil Koordinasi :

   mengevaluasi kegiatan secara berkelanjutan

5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun

a. Forum Koordinasi
   i. FORUM FORKOPIMDA
   ii. FORUM KEWASPADAAN DINI
   iii. TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK

b. Materi Koordinasi
   i. Meningkatkan koordinasi antar unsur penyelenggara kamtibmas
   ii. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam deteksi dini dan cegah dini terhadap gangguan kamtibmas
   iii. Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan aparat intelijen
   iv. Meningkatkan koordinasi tentang perkembangan Situasi dan kondisi yang sedang terjadi pada saat ini

c. Instansi Vertikal yang terlibat Rapat koordinasi terdiri dari :
   i. Walikota Madiun
   ii. Ketua DPRD
   iii. KODIM 0803 ;
   iv. POLRESTA Madiun ;
   v. Kejaksaan Negeri Madiun ;
   vi. Kantor Imigrasi ;
   vii. Kantor Bea Cukai ;
   viii. Dan Lanud Iswahyudi

d. Sumber dan Jumlah Anggaran
   APBD Tahun 2019 sebesar Rp. 493.764.438,00

e. SKPD Penyelenggara Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah
   Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun

f. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

g. Jumlah Kegiatan Koordinasi yang dilaksanakan
   i. Forum Forkopimda Jumlah Koordinasi dalam 1 Tahun sebanyak 11 Kali
   ii. Forum Kewaspadaan Dini Jumlah Koordinasi dalam 1 Tahun sebanyak 2 Kali
   iii. Tim Terpadu Penanganan Konflik Jumlah Koordinasi dalam 1 Tahun sebanyak 12 Kali

h. Hasil dan Manfaat Koordinasi
   i. Terpeliharanya Stabilitas Daerah dengan upaya pencegahan akan terjadinya peristiwa-peristiwa yang berpotensi menimbulkan kerawanan.
   ii. Peningkatan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta pencegahan tindak kriminal

i. Tindak Lanjut Hasil Koordinasi
   - Informasi dan data dari hasil pemantauan Kamtibmas

j. Hal lain yang dianggap perlu dilaporkan :
   - Jumlah angka kriminalitas
   - Jumlah demontrasi
   - Jumlah gangguan kamtibmas

6. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Madiun

a. BIDANG CIPTA KARYA

i. Forum Koordinasi
   a) Workshop/Pelatihan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara
   b) Koordinasi persiapan pelatihan SKT

ii. Materi Koordinasi
   a) Penyusunan (HSBGN) Harga Satuan Bangunan Gedung Negara
   b) Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
   c) Pemeriksaan Kelayakan Bangunan

iii. Instansi Vertikal yang terlibat
   a) Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Timur, Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Kementrian PUPR
   b) Balai Jasa Konstruksi Wilayah IV, DJBK
   c) Kementrian PUPR

iv. Sumber dan Jumlah Anggaran
   APBD 2019 dan jumlah anggaran menyesuaikan

v. SKPD Penyelenggara Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah
   Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Madiun

vi. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

Jumlah Pegawai	Kepangkatan	Tingkat Pendidikan	Struktural/ Eselon	Fungsional	Staf
9	Gol I = - Gol II = 3 Gol III = 5 Gol IV = 1	SD = - SMP = - SMA = 3 D3 = - D4/S1 = 5 S2 = 1	II = - III = 1 IV = 3 V = -	-	5

vii. Jumlah Kegiatan Koordinasi yang dilaksanakan
   - Kegiatan Operasional Pembinaan Jasa Konstruksi

viii. Hasil dan Manfaat Koordinasi
   a) SK Walikota tentang Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN) Kota Madiun Tahun 2019
   b) Pelatihan dan Sertifikasi SKT
   c) Membuat rekomendasi kelayakan bangunan

ix. Tindak Lanjut Hasil Koordinasi

- SK Walikota tentang Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN) Kota Madiun Tahun 2018 nantinya dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKA tahun selanjutnya
- Pemeriksaan kelayakan bangunan dengan melaksanakan survey lapangan ke lokasi pemohon

x. Hal lain yang dianggap perlu dilaporkan

Pemeriksaan kelayakan bangunan merupakan tindak lanjut permohonan SLF (Sertifikat Laik Fungsi) bangunan, dimana pengajuan berkas SLF di PTSP dan untuk pemeriksaan kelayakan fungsi bangunan adalah kewenangan OPD teknis (DPUTR).

b. BIDANG TATA KOTA

i. Forum Koordinasi

Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD)

ii. Materi Koordinasi

Diskusi pemanfaatan ruang atas permohonan masyarakat

iii. Instansi Vertikal yang terlibat

Kantor Pertanahan Kota Madiun

iv. Sumber dan Jumlah Anggaran

APBD 2019 dan jumlah anggaran menyesuaikan

v. SKPD Penyelenggara Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Madiun selaku Sekretariat TKPRD

vi. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

Jumlah Pegawai	Kepangkatan	Tingkat Pendidikan	Struktural/ Eselon	Fungsional	Staf
9	Gol I = - Gol II = 3 Gol III = 6 Gol IV = -	SD = - SMP = - SMA = 4 D3 = 1 D4/S1 = 4 S2 = -	II = - III = 1 IV = 2 V = -	-	6

vii. Jumlah Kegiatan Koordinasi yang dilaksanakan

- Berdasarkan permohonan masyarakat

viii. Hasil dan Manfaat Koordinasi

- Ditolak
- Diperbolehkan tanpa syarat
- Diperbolehkan dengan syarat

ix. Tindak Lanjut Hasil Koordinasi

- Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
- Pembongkaran
- Sanksi
- Rekonstruksi Batas Saluran/Sungai

D. PEMBINAAN BATAS WILAYAH (Tidak Ada)

E. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko bencana baik melalui pengurangan ancaman resiko bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.

Sedangkan Penanggulangan Bencana merupakan salah satu wujud perlindungan kepada masyarakat. Oleh karenanya Penanggulangan Bencana tidak dapat hanya dibebankan kepada satu pihak saja, tetapi merupakan tanggungjawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Madiun adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana.

1. Bencana yang terjadi dan penanggulangannya.

   Selama Tahun 2019, di wilayah Kota Madiun telah terjadi bencana sebanyak :

No.	Nama Bencana	Jumlah kejadian	Ket.
1.	Angin Puting Beliung/Angin Kencang	72 kali	
2.	Kebakaran	38 kali	
3.	Pencarian dan Pertolongan	41 kali	
4.	Banjir/Genangan Air	33 kali	
5.	Kekeringan	2 kali	
6.	Sosial	1 kali	

   Guna mengantisipasi dan atau melaksanakan fungsi pencegahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun setiap harinya melakukan kegiatan Piket Siaga Bencana oleh para Relawan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun yang terbagi dalam 3 (tiga) regu dan 2 (dua) shift melalui pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana.

   Penanganan bencana melalui kegiatan Mitigasi Penanggulangan Bencana berupa Pelatihan SAR (Search and Rescue) agar petugas lebih tanggap, tangguh, sigap dan responsif dalam menjalankan tugas demi kemanusiaan.

   Adapun langkah - langkah yang telah dilakukan dalam penanggulangan bencana :

   - Patroli kebencanaan setiap hari ;
   - Penanganan angin putting beliung ;
   - Penanganan banjir / genangan ;
   - Bersih - bersih sungai (Kerja Bhakti) ;
   - Pemadaman Kebakaran ;
   - Mengevakuasi korban.

2. Status Bencana

   Bencana yang terjadi di Kota Madiun pada umumnya masih termasuk dalam kategori status lokal/kota karena dampak yang ditimbulkan kecil atau tidak terlalu besar dan tidak berakibat fatal serta mampu diatasi Pemerintah Kota Madiun melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun.

3. Sumber dan Jumlah Anggaran

   Dalam rangka mendukung operasional sesuai tugas pokok fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun untuk tahun anggaran Tahun 2019 sebesar Rp. 2.350.428.000,00 (Dua Milyard Tiga Ratus Lima Puluh Juta Empat Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah) dari Dana APBD Kota Madiun.

4. Antisipasi daerah dalam menghadapi kemungkinan bencana

   Guna mengantisipasi terjadinya bencana maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun telah melaksanakan ;

   a. Piket siaga bencana ;
   b. Patroli kebencanaan ;
   c. Bersih bersih sungai ;
   d. Penyuluhan atau Sosialisasi Penanggulangan Bencana ;
   e. Mitigasi Penanggulangan Bencana.

5. Potensi Bencana yang diperkirakan terjadi

   Berdasarkan informasi perkiraan cuaca yang dikeluarkan oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Klas I Juanda disampaikan bahwa memasuki awal musim hujan di Wilayah Jawa Timur termasuk Kota Madiun curah hujan cukup tinggi, disertai petir dan angin, maka diprediksi potensi bencana yang terjadi adalah banjir lokal.

6. Perangkat Daerah yang menangani bencana

   Undang undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengamanahkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi penanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

   Sejalan hal tersebut Pemerintah Kota Madiun sejak tanggal 4 Januari 2011 telah membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta ditindaklanjuti dengan peraturan Walikota Madiun tanggal 5 Januari Tahun 2011 dan telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 46 tahun 2018 tentang Perubahan kedua Peraturan Walikota Madiun Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun, maka secara administratif maupun teknis operasional penanganan bencana di wilayah Kota Madiun, menjadi tanggung jawab Badan Penanggulangan Bencana Kota Madiun

selaku koordinator dan komando penanganan bencana sekaligus sebagai pelaksana.

7. Jumlah Pegawai, Kualifiskasi, Pendidikan, Pangkat dan Golongan

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun didukung oleh pegawai sejumlah 8 (delapan) orang PNS, dengan perincian sebagai berikut :

Jumlah PNS		Pendidikan						Golongan					Jabatan / Eselon			
L	P	SD	SMP	SMA	Sarmud	S1	S2	IV	III	II	I	TK	II	III	IV	Staf
6	2	-	-	5	0	1	2	1	5	2	-	-	-	1	3	4

Selain itu didukung oleh para Relawan Siaga Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun sejumlah 30 (tiga puluh) orang.

F. PENGELOLAAN KAWASAN KHUSUS (Tidak Ada)

G. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

BAB VII

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM

A. BIDANG PENDIDIKAN

1. Jenis Pelayanan Dasar

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, adalah sebagai berikut :

a. Pendidikan Dasar

b. Pendidikan kesetaraan

c. Pendidikan anak usia dini

2. Indikator dan Nilai Standar Pelayanan Minimal serta Batas Waktu Pencapaian Standar Pelayanan Minimal secara Nasional

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Nilai	Batas Waktu Capaian
1.	Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTS)	100	Setiap tahun
2.	Pendidikan kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100	Setiap tahun
3.	Pendidikan anak usia dini	Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100	Setiap tahun

3. Realisasi Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Data Tahun 2018	Target Tahun 2019	Capaian Indikator SPM
1.	Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTS)	140,16	100	116,68
2.	Pendidikan kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100	100	0,65
3.	Pendidikan anak usia dini	Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	106,7	100	88,30

Perhitungan :

1. Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTS)

   Perhitungan :

   = Jumlah Siswa usia 7-15 tahun x 100% = 28.129 x 100 % = 116,68%
   Jumlah penduduk usia 7-15 tahun 24.108

   Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTS) tahun 2019 capaiannya adalah 135,10%. Dibandingkan dengan Tahun 2018 dengan capaian sebesar 140,16% maka pada Tahun 2019 ada penurunan sebesar 5,06. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2019 jumlah usia sekolah usia 7-15 tahun yang bersekolah pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs adalah sebanyak 28.129 orang dengan jumlah penduduk usia 7-15 sebanyak 20.995 orang. Dibandingkan dengan tahun 2018 jumlah usia sekolah usia 7-15 tahun yang bersekolah pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs adalah sebanyak 28.364 orang, sedangkan jumlah penduduk usia 7-15 tahun sebanyak 21.104 orang. Sehingga pada tahun 2019 ada penurunan baik jumlah usia sekolah usia 7-15 tahun yang ada pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs maupun jumlah penduduk usia 7-15 tahun. Selain dari pada itu ada perubahan regulasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru pada tahun 2019 yang menggunakan sistem Zonasi, sehingga mempengaruhi jumlah siswa jenjang SD/MI dan SMP/MTs yang diterima di Kota Madiun.

2. Jumlah warga negara usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.

   Perhitungan :

   = Jumlah peserta pendidikan kesetaraan x 100% = 96 x 100 % = 0,28%
   Jumlah penduduk uisa 7-18 tahun 34.249

   Jumlah warga negara usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan tahun 2019 capainnya adalah 0,28%.

   Capaian jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah sebesar 0,28% menandakan bahwa di Kota Madiun usia 7-18 tahun sebanyak 99,72% warga Kota Madiun sudah atau sedang bersekolah pada jenjang formal SD, SMP dan SMA.

3. Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD

   Perhitungan :

   = Jumlah siswa PAUD usia 5-6 tahun x 100% = 2.469 x 100 % = 88,30%
   Jumlah penduduk usia 5-6 tahun 2.796

Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD tahun 2019 capaiannya adalah 88,52%. Dibandingakan dengan capaian tahun 2018 capainnya adalah 106,7 maka pada tahun 2019 ada penurunan sebesar 17,86. Hal ini dikarenakan di Kota Madiun penduduk usia 6 tahun sudah ada yang masuk sekolah pada jenjang Sekolah Dasar utamanya pada Sekolah Swasta.

4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan pada Tahun 2019 sebesar Rp 89.101.125.319,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Sumber Anggaran	Alokasi Anggaran
1.	APBN	Rp. 20.096.760.019,00
2.	APBD Prop	-
3.	APBD Kota	Rp. 69.004.365.300,00

5. Dukungan Personil

Jumlah Pegawai	Kepangkatan	Tingkat Pendidikan	Struktural/ Eselon	Fungsional	Staf
1.395	Gol I = Gol II = 27 Gol III = 28 Gol IV = 4 Guru = Gol I = - Gol II = 48 Gol III = 625 Gol IV = 702 Pengawas = Gol III = - Gol IV = 16 Penilik = Gol III = 2 Gol IV = 2	SD = - SMP = - SMA = 29 D3 = 2 D4/ S1 = 26 S2 = 4 Guru = SMA = 11 D1 = 1 D2 = 12 D3 = 3 D4/S1= 1.233 S2 = 97 Pengawas = S1 = 6 S2 = 10 Penilik = S1 = 3 S2 = 1	II = 1 III = 3 IV = 14 V = -	**17**	**54**

6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

Dengan adanya regulasi SPM baru yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan maka indikator mengalami perubahan sehingga ada capaian indikator yang mengalami penurunan tetapi penurunan tersebut tidak siginifikan masih mendekati angka 100%

Solusi :

Mengikuti aturan yang ada.

B. BIDANG KESEHATAN

1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, jenis pelayanan yang tertuang adalah sebagai berikut:

a. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
d. Pelayanan kesehatan balita;
e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
i. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
k. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).

2. Indikator dan Nilai Standar Pelayanan Minimal serta Batas Waktu Pencapaian Standar Pelayanan Minimal secara Nasional

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kota Madiun dalam memberikan standar pelayanan Minimal bidang kesehatan dengan target capaian kinerja pemerintahan dalam pelayanan adalah 100 persen (%)

JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN (TAHUN)
	INDIKATOR	NILAI	
Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
Pelayanan kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun

JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN (TAHUN)
	INDIKATOR	NILAI	
Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah warga negara penderita diabetes melitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100%	Setiap Tahun
Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulusis	Jumlah warga negara terduga tuberculusis yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*)	Jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*human immunodefiviency virus*) yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun

3. Realisasi Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan

JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		CAPAIAN INDIKATOR SPM
	INDIKATOR	TARGET DAERAH	
Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil	100%	100%
Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan pesalinan	100%	100,04%
Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	100%
Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100%	100,12%
Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	97,51%
Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	107,18%
Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	93,20%
Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	89,21%
Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetus Melitus	Persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	106,54%
Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%	107,44%

JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		CAPAIAN INDIKATOR SPM
	INDIKATOR	TARGET DAERAH	
Pelayanan Kesehatan Orang Dengan TB	Persentase orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	100%	83,43%
Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV	Persentase orang berisiko HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	100%	103,70%

Perhitungan :

a. Pelayanan KesehatanIbu Hamil.

Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun
---------- x 100%
Jumlah sasaran ibu hamil di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama

2.643
= ---------- x 100% = 100 %
2.643

b. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun
---------- x 100%
Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama

2.524
= ---------- x 100% = 100,04%
2.523

c. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar dalam kurun waktu satu tahun
---------- x 100%
Jumlah sasaran bayi baru lahir di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama

2.403
= ---------- x 100% = 100%
2.403

d. Pelayanan Kesehatan Balita

Jumlah Balita usia 12-23 bulan yang mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai Standar (1) + Jumlah Balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (2) + Balita usia 36-59 bulan mendapakan pelayanan sesuai standar (3)
---------- x 100%
Jumlah Balita usia 12-59 bulan di wilayah kerja Kabupaten/kota tersebut pada kurun waktu satu tahun yang sama

9.481
= ---------- x 100% = 100,12%
9.470

e. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

Jumlah anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yg mendapat Pelayanan skrining kesehatan di satuan pendidikan dasar
---------- x 100%
Jumlah semua anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yg ada Di wilayah kerja di wil. Kab/kota tersebut dalam kurun waktu Satu satu ajaran

= 31.639 / 32.568 x 100% = 97,51%

f. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif

Jumlah orang usia 15–59 tahun di kab/kota yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun
---------- x 100%
Jumlah orang usia 15–59 tahun di kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama

= 123.903 / 115.602 x 100% = 107.18%

g. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut

Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun
---------- x 100%
Jumlah semua warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama

= 23.556 / 25.275 x 100% = 93,20%

h. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Jumlah penderita hipertensi usia >15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun
---------- x 100%
Jumlah estimasi penderita hipertensi usia >15 tahun yang berada di dalam wilayah kerjannya berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama.

= 59.911 / 67.155 x 100% = 89,21%

i. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetus Melitus

Jumlah penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun
---------- x 100%
Jumlah penyandang DM berdasarkan angka prevalensi DM nasional di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun pada tahun yang sama

= 8.450 / 7.931 x 100% = 106,54%

j. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat.

Jumlah ODGJ berat (psikotik) di wilayah kerja kab/kota yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun
---------- x 100%
Jumlah ODGJ berat (psikotik) yang ada di wilayah kerja kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama

361
= ---------- x 100% = 107,44%
336

k. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun.
---------- x 100%
Jumlah orang yang terduga TBC dalam kurun waktu satu tahun yang sama.

3.957
= ---------- x 100% = 83,43%
4.743

l. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus = HIV)

Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun
---------- x 100%
Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV dikab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama

6.306
= ---------- x 100% = 103,70%
6.081

4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan pada Tahun 2019 sebesar Rp. 66.335.829.000,- dengan rincian sebagai berikut:

NO	SUMBER ANGGARAN	ALOKASI ANGGARAN
1	APBD I (BK. PROV)	Rp. 207.529.000,00
2	APBD II.	Rp. 52.465.610.000,00
3	APBN	Rp. 13.662.690.000,00
JUMLAH		Rp. 66.335.829.000,00

Dana alokasi anggaran penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Tahun 2019 tersebut jika dibandingkan dengan alokasi anggaran di Tahun 2018 mengalami kenaikan, dimana alokasi anggaran di Tahun 2018 sebesar Rp. 63.317.459.000,-.

5. Dukungan Personil

Personil yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan sejumlah 408 tenaga bidang kesehatan dan juga mendapatkan dukungan dari 31 tenaga dari bidang pengendalian penduduk dan KB yang berada di Puskesmas dan di Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana. Dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah Pegawai	Struktural / Eselon	Jabatan Fungsional Tertentu	Staf Fungsional Umum
BIDANG KESEHATAN			
PNS : 299 Honorer : 109	II : 1 III : 4 IV : 26	- Dokter : 20 - Dokter Gigi : 7 - Apoteker : 7 - Asisten Apoteker : 26 - Bidan : 40 - Epidemiolog Kesehatan : 5 - Administrator kesehatan : 4 - Nutrisionis : 13 - Penyuluh Kesehatan Masyarakat : 8 - Perawat : 48 - Perawat Gigi : 17 - Pranata Labkes : 14 - Sanitarian : 12 - Teknisi Elektro Medis : 3 - Perencana : 1 - Analis Kepegawaian : 1 - Pranata Komputer : 1	- Bendahara : 1 - Pengadministrasi persuratan : 2 - Pengadministrasi kepegawaian :1 - Pengadministrasi keuangan : 1 - Pengadministrasi sarana dan prasarana : 1 - Pengelola Keuangan : 1 - Pengadministrasi Umum : 27 - Pengemudi Ambulan : 2 - Pengemudi : 1 - Petugas keamanan : 4
408	**31**	**227**	**41**
BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB			
PNS : 29 Honorer : 2	III : 1 IV : 1	- Epidemiolog Kesehatan : 1 - Penyuluh KB : 23 - Bidan : 2 - Pranata Komputer : 1	
31	**2**	**27**	

6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

Capaian pada indikator ini sebesar 97,51%, masih belum mencapai target 100% yang ditetapkan. Hal tersebut disebabkan:

1. Definisi operasional pelaksanaan indikator ini mengalami perubahan dari Permenkes RI Nomor 43 Tahun 2016 ke Permenkes RI Nomor 4 Tahun 2019, dimana sasaran pendidikan sekolah dasar sebelumnya hanya untuk anak sekolah kelas I dan VII, untuk yang terbaru sasaran anak sekolah dasar adalah anak sekolah kelas I sampai dengan kelas IX. Sehingga semakin banyak sasaran yang harus diberikan pelayanan.
2. Sosialisasi pelaksanaan Permenkes RI Nomor 4 Tahun 2019 diterima Kab/Kota sekitar Bulan Maret dimana kondisi sekolah pada Bulan April sampai dengan Bulan Agustus 2019, murid sekolah tidak dapat menerima kegiatan dari luar sekolah. Sehingga waktu yang tersedia sekitar Bulan September sampai dengan Bulan Desember 2019, itu harus dikurangi dengan hari pelaksanaan Penilaian Akhir Semester sehingga untuk melaksanakan skrening anak sekolah dasar untuk keseluruhan murid sekolah dasar tidak dapat dilaksanakan.

3. Kurangnya SDM tenaga kesehatan yang melaksanakan skrening pada sasaran usia pendidikan dasar kelas I sampai dengan kelas IX.

Solusi

1. Penyusunan jadwal pelaksanaan skrening di awal tahun, menyesuaikan dengan jadwal sekolah sehingga pelaksanaan kegiatan skrening bisa ke seluruh sasaran anak sekolah dasar.
2. Penambahan tenaga kesehatan sebagai tim skrening di sekolah tanpa mengganggu pelayanan kesehatan di dalam gedung Puskesmas.

Permasalahan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut

Capaian pada indikator ini sebesar 93,20%, masih belum mencapai target 100% yang ditetapkan.Hal tersebut disebabkan:

1. Masih kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang manfaat skrening kesehatan pada usia lebih dari 60 tahun.
2. Masih belum semua lansia mengikuti posyandu lansia sebagai tempat dilaksanakan skrening.
3. Ada sebagian lansia yang mempunyai profesi sebagai penjual keliling atau berjulan di tempat lain, sehingga ketika petugas melakukan kunjungan ke rumah tidak bertemu.
4. Masih kurangnya jumlah petugas pelaksana kegiatan skrening.

Solusi

1. Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya skrinining pada usia lebih dari 60 tahun sebagai bentuk deteksi dini terhadap kelompok resiko.
2. Pemberdayaan kader dan tokoh masyarakat dalam menggerakkan sasaran lansia ke posyandu lansia.
3. Pemberdayaan kader untuk memberikan informasi kepada lansia yang berprofesi di luar rumah untuk meluangkan waktu berkunjung ke Posyandu Lansia.
4. Penambahan tenaga kesehatan di kegiatan skrening lansia.

Permasalahan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Capaian pada indikator ini sebesar 89,21%, masih belum mencapai target 100% yang ditetapkan.Hal tersebut disebabkan:

1. Capaian ini merupakan kunjungan pemeriksaan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) hasil dari skrening awal di lapangan, sehingga sangat tergantung dari masyarakat yang menindaklanjuti hasil pemeriksaan untuk datang ke FKTP.

2. Masih belum keseluruhan dari FKTP yang ada di Kota Madiun melaporkan hasil pemeriksaan pasien Hipertensi.
3. Prevalensi Hipertensi untuk Kota Madiun berdasarkan Riskesdas 2018 mengalami kenaikan yang signifikan yang semula 38,5% menjadi 47,7% sehingga target pun mengalami kenaikan yang tinggi pula. Dimana sasaran dari indikator ini adalah besaran prevalensi dikalikan dengan jumlah penduduk usia diatas 15 tahun.

Solusi

1. Memberikan edukasi lebih untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan skrening dengan mendatangi FKTP.
2. Kerjasama dengan jejaring (poliklinik,klinik dan praktek dokter mandiri) yang ada di FKTP untuk mengirimkan laporan SPM ke puskesmas.

Permasalahan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (TB)

Capaian pada indikator ini sebesar 83,43%, masih belum mencapai target 100% yang ditetapkan.Hal tersebut disebabkan:

1. Adanya penurunan cakupan di RS dr. Sudono disebabkan karena adanya perubahan sistem rujukan berjenjang BPJS tidak bisa langsung ke RS dr. Sudono tetapi harus melewati RS tipe C di kab/kota yang sebelumnya/tahun sebelumnya langsung ke RS Dr. Sudono.
2. Pasien TB yang ditemukan di Kota Madiun hampir 56% berasal dari luar kota sehingga untuk investigasi kontak untuk mencari suspek kesulitan dan tidak dapat masuk di capaian Kota Madiun, dimana investigasi kontak dikembalikan ke Kab/Kota asal pasien.
3. Target yang diberikan Provinsi Jawa Timur ke Kota Madiun sebesar 144% untuk memenuhi kab/kota lain yang tidak mendapatkan target kurang dari 100%, sehingga membebani capaian cakupan indikator SPM ini di Kota Madiun.

Solusi

1. Melakukan penyisiran data di Rumah Sakit tidak hanya dari poli tetapi juga dari rekam medis.
2. Berkoordinasi dengan Kab/Kota asal pasien TB luar kota untuk menekan angka Drop Out (DO) dan kepatuhan minum obat pasien.
3. Koordinasi dengan pengelola program TB di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur untuk mengevaluasi capaian SPM Tahun 2019 untuk gambaran penentuan target 2020 supaya tidak mendapatkan target di atas 100%.

C. BIDANG PEKERJAAN UMUM

1. Jenis Pelayanan Dasar

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, adalah sebagai berikut :

a. Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari

b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik

2. Indikator dan Nilai Standar Pelayanan Minimal serta Batas Waktu Pencapaian Standar Pelayanan Minimal secara Nasional

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Nilai	Batas Waktu Capaian
1.	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	95	Setiap tahun
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	98	Setiap tahun

3. Realisasi Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Data Tahun 2018	Target Tahun 2019	Capaian Indikator SPM
1.	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	94,28	95	95.67
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	98,87	98	99

a. Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari.

$$\text{SPM Kab/Kota} = \frac{\text{Rumah tangga terlayani}}{\text{Rumah tangga di Kota Madiun}} \times 100\ \%$$

$$= \frac{201.715}{210.846} \times 100\ \% = 95.67\ \%$$

b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

$$\text{SPM Kab/Kota} = \frac{\text{Rumah tangga Bersanitasi}}{\text{Rumah tangga di Kota Madiun}} \times 100\ \%$$

$$= \frac{41.542}{41.958} \times 100\ \% = 99.00\ \%$$

4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum pada Tahun 2019 sebesar Rp.0 dengan rincian sebagai berikut :

No	Sumber Anggaran	Alokasi Anggaran
	APBN	-
	APBD Prop	-
	APBD Kota	-

5. Dukungan Personil

Jumlah Pegawai	Struktural/ Eselon	Jabatan Fungsional	Jumlah Staf
PNS = 71	II = 1 III = 4 IV = 11	6	49
Honorer =31			

6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

1. Pelaksanaan Penerapan dan Pencapaian SPM Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Madiun dilaksanakan oleh PDAM dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sehingga Dinas PU hanya menerima Data dan Hasil Evaluasi dari kedua Instansi tersebut.
2. Untuk Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Madiun hanya dapat memenuhi persentase rumah tangga di permukiman, karena sesuai Permen PUPR No. 29/PRT/M/2018 tentang Air Limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Madiun hanya bagian dari Air Limbah Domestik di permukiman dan selain di permukiman tidak mempunyai data.

Solusi

1. Diperlukan koordinasi dengan Instansi Terkait perihal Penerapan dan Pencapaian SPM Dinas Pekerjaan Umum sehingga menghasilkan Data yang akurat dan tepat.
2. Diperlukan suatu **Kebijakan Daerah** untuk memenuhi indikator dan Nilai Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan Pemerintah Pusat/Propinsi.

D. BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

1. Jenis Pelayanan Dasar

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, jenis pelayanan dasar Bidang Perumahan dan Permukiman adalah sebagai berikut :

a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota.

Merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kab/Kota dengan ketentuan :

- Pada saat masa pasca bencana
- Surat penetapan bencana dari Bupati/Walikota
- Dampak bencana di daerah administrasi kabupaten/kota
- Definisi Bencana adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam yang berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, kebakaran hutan dan alam, serta tanah longsor

b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota

Merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan dalam rangka mendukung:

- Pengurangan kawasan kumuh 5-10 Ha
- Penataan perumahan dan kawasan permukiman yang berada dilahan bukan fungsi permukiman dan “tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya” antara lain sempadan rel kereta api, bawah jembatan, daerah Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), Daerah Sempadan Sungai (DSS), daerah rawan bencana, dan daerah kawasan khusus seperti kawasan militer.

2. Indikator dan Nilai Standar Pelayanan Minimal serta Batas Waktu Pencapaian Standar Pelayanan Minimal secara Nasional

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Nilai	Batas Waktu Capaian
1.	Penyediaan & rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kab/Kota	jumlah unit rumah rusak akibat bencana yang akan direhabilitasi, dibangun kembali, dan/atau direlokasi serta rencana jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan akses rumah darurat layak huni sesuai rencana	100	Setiap tahun

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Nilai	Batas Waktu Capaian
		dalam dokumen Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi		
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota	jumlah Rumah Tangga terkena relokasi program pemerintah daerah, sesuai dengan jumlah rencana Rumah Tangga dalam rencana pemenuhan	100	Setiap tahun

3. Realisasi Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan dan Permukiman

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Data Tahun 2018	Target Tahun 2019	Capaian Indikator SPM
1.	Penyediaan & rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kab/Kota	jumlah unit rumah rusak akibat bencana yang akan direhabilitasi, dibangun kembali, dan/ atau direlokasi serta rencana jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan akses rumah darurat layak huni sesuai rencana dalam dokumen Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	-	100	0
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota	jumlah Rumah Tangga terkena relokasi program pemerintah daerah, sesuai dengan jumlah rencana Rumah Tangga dalam rencana pemenuhan	100	100	0

Keterangan :

Capaian Indikator SPM :

1. Penyediaan & rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kab/Kota

   Capaian SPM =

   $$= \frac{\textit{Jumlah unit rumah korban bencana yangditangani pada tahun n}}{\textit{Jumlah total rencana unit rumah korbanbencana yang akan ditangani pada tahun n}} \text{ x } 100\%$$

   $$= \frac{0}{0} \text{ x } 100\% = 0\%$$

   Capaian SPM tahun 2019 adalah 0% karena dikota madiun tidak terjadi bencana sehingga tidak ada yang ditangani dalam penyediaan & rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana. Adapun untuk penentuan total rencana unit rumah korban bencana baru dapat ditentukan pada saat pasca bencana dengan beberapa tahapan yang dilalui yaitu :

- ✓ Penetapan status bencana melalui SK Walikota Madiun dengan leading sector BPBD.
- ✓ Penanganan rumah terdampak bencana yang telah diidentifikasi oleh BPBD dengan penentuan lokasi penampungan dan rumah layak huni yang akan disediakan dan direhabilitasi.
- ✓ Skenario penanganan rumah terdampak bencana dilakukan secara bertahap sesuai dengan penetapan penerima bantuan yang telah dikoordinir oleh BPBD dan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan asumsi target kurun waktu 3 tahun dapat diselesaikan (tuntas) sehingga Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Madiun dapat menentukan rencana kinerja tahunannya terkait penanganan rumah terdampak bencana tersebut.

2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota

   Capaian SPM =

$$\frac{\textit{Rumah Tangga Penerima Fasilitasi PenggantianHak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan} + \textit{Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa} + \textit{Rumah Tangga Penerima Penyediaan RumahLayak Huni}}{\textit{Jumlah Total Rumah Tangga Terkena RelokasiProgram Pemerintah Daerah yang MemenuhiKriteria Penerima Pelayanan}} \text{x}100\%$$

   $= \frac{0}{0}$ x 100% = 0%

   Capaian SPM 2019 adalah 0% karena di Kota Madiun tidak terjadi relokasi program pemerintah sehingga tidak ada fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah.

4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat pada Tahun 2019 sebesar Rp.150.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :

No	Sumber Anggaran	Alokasi Anggaran
1	APBN	-
2	APBD Prop	-
3	APBD Kota	Rp.150.000.000

5. Dukungan Personil

Jumlah Pegawai	Struktural/ Eselon	Jabatan Fungsional	Jumlah Staf
PNS = 42	II = 1 III = 2 IV = 5 V = -	4	30
Honorer = 6			
Tenaga Upahan = 138			

6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

a. Apabila tidak terjadi bencana maupun relokasi akibat dari program pemerintah dalam penerapan SPM, maka dalam perhitungannya didapatkan nilai 0 karena bencana merupakan hal yang tidak terduga yang dapat menimpa siapa saja dan kita berharap tidak terjadi bencana serta untuk program pemerintah yang sifatnya relokasi perlu melibatkan semua pihak agar tidak terjadi benturan kepentingan yang dapat menggangu keamanan dan ketertiban masyarakat Kota Madiun.

b. Belum adanya Masterplan/kajian kebencanaan sehingga menyulitkan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Madiun untuk mengidentifikasi & menentukan prediksi warga terdampak bencana

Solusi

a. Perlunya persamaan persepsi dari kinerja penerapan SPM terutama dalam capaiannya 0% (capaian 0 dalam artian positif bukan negatif)

b. Perlunya Masterplan/kajian kebencanaan sehingga dapat mempermudah dalam mengidentifikasi dan penentuan prediksi lokasi dan korban terdampak bencana

E. BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Jenis Pelayanan Dasar

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/ Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/ Kota, adalah sebagai berikut :

a. Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum

b. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

2. Indikator dan Nilai Standar Pelayanan Minimal serta Batas Waktu Pencapaian Standar Pelayanan Minimal secara Nasional

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Nilai	Batas Waktu Capaian
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada	100%	Setiap tahun
2.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	Setiap tahun

3. Realisasi Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Daerah

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Data Tahun 2018	Target Tahun 2019	Capaian Indikator SPM
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada	0%	0%	100%
2.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	100%	100%

Keterangan :

1) Pelayanan Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari Penegakan hukum Perda dan Perkada

a. Pengertian

Warga Negara disini merupakan penduduk Kota Madiun dan luar Kota Madiun yang tinggal dan melakukan aktivitas di wilayah Kota Madiun yang berpotensi melakukan pelanggaran hukum Perda dan Perkada.

b. Definisi Operasional

Masyarakat yang taat Perda dan Perwal adalah masyarakat yang mematuhi dan melaksanakan peraturan sesuai Perda dan Perwal.

c. Rumus yaitu :

Pelayanan Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari Penegakan hukum Perda dan dan Perkada =

$$\frac{\text{Jumlah Warga Negara yang terkena dampak gangguan tramtibum akibat Penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada}}{\text{Jumlah pelayanan yang telah diberikan kepada Warga Negara yang terkena dampak gangguan tramtibum akibat Penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada meliputi :}} \times 100\%$$

a. Pelayanan kerugian materiil
b. Pelayanan pengobatan

d. Realisasi Tahun 2019

Pelayanan Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari Penegakan hukum Perda dan dan Perkada =

$$\frac{0}{0} \text{ X } 100\% = 0\%$$

Bahwa di tahun 2019 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada tidak ada Warga Negara yang terkena dampak gangguan tramtibum akibat Penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada. Sehingga tidak ada pelayanan yang diberikan kepada Warga Negara yang terkena dampak gangguan tramtibum akibat Penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada baik kerugian materiil maupun pengobatan.

e. Rujukan

a. SOP Satuan Polisi Pamong Praja

b. Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja.

f. Target

Target pelaksanaan Pelayanan Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari Penegakan hukum Perda dan dan Perkada sesuai dengan kondisi yang ada di Kota Madiun, dengan data pembuka dari tahun sebelumnya.

g. Langkah Kegiatan

1. Pemetaan

Ruang Lingkup penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat terdiri dari pembinaan dan operasi penertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang menjadi kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja antara lain,

- Tertib tata ruang.
- Tertib jalan.
- Tertib angkutan jalan dan angkutan sungai.
- Tertib jalur hijau, taman dan tempat umum.
- Tertib sungai, saluran, kolam, dan pinggir pantai.
- Tertib lingkungan.
- Tertib tempat usaha dan usaha tertentu.
- Tertib bangunan.
- Tertib sosial.

- Tertib kesehatan.
- Tertib tempat hiburan dan keramaian.
- Tertib peran serta masyarakat.
- Ketentuan lain sepanjang telah di tetapkan dalam peraturan daerah masing-masing

2. Pendeteksinian Dini

   Ruang lingkup pendeteksinian dini adalah upaya pencegahan terjadinya gangguan Tibumtramas dan pelangaran perda dan perkada sehingga dibutuhkan personil regu deteksi dini (Inteljen Satpol PP).

3. Pelaksanaan Patroli

   Pelaksanaan patroli dilakukan untuk pelayanan pencegahan gangguan tibumtramas dan dibutuhkan personil Regu Patroli untuk mengampu 3 wilayah kecamatan selama 24 jam.

   Adapun Ruang Lingkup Patroli diantaranya :

   - Tempat tempat atau lokasi yang dianggap rawan.
   - Antar batas wilayah.
   - Tempat keramaian/hiburan

4. Sumber Daya Manusia

   - Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun
   - Kebijakan

     Arah kebijakan yang diambil Satuan Polisi Pamong Praja adalah Menggalang kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

5. Pendataan

   Pendataan yang dilakukan sesuai dengan pelaporan hasil penertiban untuk ditindaklanjuti dan didata jumlah warga Negara yang berdampak akibat dari Penegakan hukum terhadap Perda dan Perkada.

2) Pelayanan Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

   a. Pengertian

      Pelayanan pemadam kebakaran pada saat tanggap darurat yang efektif, dan bereaksi cepat dan tepat tiba dilokasi kejadian kebakaran untuk pengurangan resiko kebakaran dengan waktu minimal yang diperlukan, dimulai saat menerima informasi dari warga/penduduk sampai tiba di tempat kejadian kebakaran, yang langsung melakukan tindakan pemadaman api, evakuasi korban kebakaran dan penyelamatan jiwa serta harta benda.

b. Definisi Operasional

Pelayanan Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran memuat :

1. Layanan respon cepat (response time) penanggulangan kejadian kebakaran.
2. Layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran.
3. Layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi.
4. Layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran.
5. Layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran.

c. Perhitungan :

Pelayanan Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran :

$$\frac{\text{Jumlah Layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota pada Tahun X dalam tingkat waktu tanggap (response time) oleh Pemadam Kebakaran dan Relawan serta Penyelamatan di Perangkat Daerah}}{\text{Jumlah kejadian kebakaran kota pada Tahun X}} \text{ X } 100\%$$

d. Realisasi Tahun 2019

Pelayanan Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

$$= \frac{86}{86} \text{ X } 100\% = 100\%$$

e. Rujukan

- Pedoman Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran
- Peralatan Operasional berdasarkan Standar Nasional Indonesia yang berlaku
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota

f. Target

Target pelaksanaan Pelayanan Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran sesuai dengan standar SPM untuk pencapaian target adalah 100% (seratus persen) dari Target dan Indikator penerima layanan setiap tahun.

g. Langkah Kegiatan

- Melakukan inventarisasi potensi/rentan dari bahaya kebakaran
- Melakukan inventarisasi data kasus kebakaran yang terjadi dalam jangkauan WMK
- Melakukan identifikasi Sarana dan prasarana pada Daerah Rawan Kebakaran

- Melakukan pengembangan Wilayah Manajemen Kebakaran
- Melakukan kesiapsiagaan Satgas Damkar
- Pengadaan Alat Komunikasi
- Mengadakan pelatihan/simulasi rutin teknis operasional bagi Satgas pemadam kebakaran
- Melakukan simulasi standar operation prosedur koordinasi waktu tanggap kebakaran
- Penyediaan dana tak terduga/dana siap pakai untuk tanggap darurat bencana kebakaran.

h. Sumber Daya Manusia

- Pranata Pemadam Kebakaran dan Barisan Relawan Pemadam Kebakaran (BALAKAR)
- Ahli yang ditugaskan dalam manajemen pencegahan dan penanggulangan kebakaran
- Masyarakat Satuan Pelaksana Pemadam Kebakaran (SATLAKAR) dan atau Masyarakat Pemadam Api (MPA).
- Kebijakan
- arah kebijakan untuk memenuhi Pelayanan Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dengan optimalisasi kinerja SDM Damkar dan kegiatan pencegahan serta inspeksi peralatan Damkar.

4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Tahun 2019 sebesar Rp 1.407.777.000,- dengan rincian sebagai berikut :

No	Sumber Anggaran	Alokasi Anggaran
	APBN	-
	APBD Prop	-
	APBD Kota	Rp. 1.407.777.000,-

5. Dukungan Personil

Jumlah Pegawai	Struktural/ Eselon	Jabatan Fungsional	Jumlah Staf
PNS = 41	II = 1 III = 1 IV = 7 V = -	-	32
Honorer = 45			
Tenaga Upahan = 11			

6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

1. Meningkatnya jumlah penertiban pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat data sampai dengan bulan Desember 2019 diantaranya :
   - Pelanggaran Reklame (baik Rusak, melanggar dan ijin sudah habis) sebanyak 2. 520 buah.
   - Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan jumlah pelanggaran 516 kasus.
   - Anak jalanan sejumlah 277 orang ; dan
   - Anak Bolos Sekolah sejumlah 114 pelajar.
2. Adanya perubahan iklim dengan kemarau panjang yang mengakibatkan intensitas kebakaran tinggi dengan jumlah kasus kebakaran sebanyak 86 kasus kejadian kebakaran.

Solusi

1. Seiring kemajuan tekhnologi yang rentan pelanggaran maka langkah-langkah yang diambil Satuan Polisi Pamong Praja untuk mengatasi permasalahan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat diantaranya
   - Dengan adanya kebijakan Bapak Walikota Madiun yang tidak mengijinkan pemasangan reklame secara fisik karena akan diganti dengan videotron, maka anggota Satuan Polisi Pamong Praja meningkatkan patroli kawasan pemasangan reklame di wilayah Kota Madiun. Sehingga pelanggaran reklame dapat diatasi dan diselesaikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur penertiban.
   - Sehubungan dengan implementasi Panca Karya Program Kegiatan Bapak Walikota Madiun, utamanya karya membangun. Banyak kebijakan yang dikeluarkan Bapak Walikota Madiun, diantaranya pembangunan taman dan infrastuktur Kota Madiun. Sehingga perlu penertiban dan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk ditertibkan dan berjualan di tempat yang telah disediakan. Seperti yang telah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan jajaran samping untuk penertiban pra yustisi pelanggaran Perda dan Perwal.
   - Untuk mengatasi pelanggaran anak jalanan Satuan Polisi Pamong Praja mengoptimalkan patroli wilayah Kota Madiun utamanya di perempatan traficlight di wilayah Kota Madiun. Sehingga setiap penertiban anak jalanan diberikan pembinaan dan pengarahan untuk tidak mengamen di lampu merah dan mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

- Dengan mengoptimalkan patroli dan jejaring sosial untuk mendapatkan informasi pelanggaran anak sekolah yang bolos sekolah, Satuan Polisi Pamong Praja mengadakan operasi penertiban anak sekolah yang bolos sekolah di jam belajar. Dan dilakukan pembinaan yang selanjutnya diserahkan kepada pihak sekolahan melalui Dinas Pendidikan dan memanggil orang tua pelajar.

2. Dengan banyaknya kasus kebakaran di Kota Madiun maka Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pemadaman kejadian kebakaran sesuai SOP dan melakukan pencegahan dan pelatihan pemadaman kebakaran.

SUB URUSAN BENCANA DAERAH

1. Jenis Pelayanan Dasar

   Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Stándar Teknis Pelayanan Dasar pada Estándar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, adalah adalah sebagai berikut :

   a. Pelayanan informasi rawan bencana
   b. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
   c. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

2. Indikator dan Nilai Standar Pelayanan Minimal

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Nilai	Batas Waktu Capaian
1.	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	Setiap tahun
2.	Pelayanan pencehan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	Setiap tahun
3.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	Setiap tahun

3. Realisasi Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub – Urusan Bencana Daerah

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Data Tahun 2018	Target Tahun 2019	Capaian Indikator SPM
1.	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	100	100
2.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	100	100

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Data Tahun 2018	Target Tahun 2019	Capaian Indikator SPM
3.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.	100	100	100

Capaian Indikator SPM :

1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana

   Daerah Rawan Bencana adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam. Suatu kawasan disebut sebagai rawan bencana jika dalam jangka waktu tertentu mempunyai kondisi dan karakter geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi yang kurang mempunyai kemampuan untuk mencegah, meredam, dan mencapai kesiapan dalam menanggapi dampak buruk dari bahaya bencana.

   Kawasan Rawan Bencana antara lain adalah kawasan rawan letusan gunung berapi, kawasan rawan gempa bumi, kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang, dan kawasan rawan banjir. Untuk daerah Kota Madiun masuk pada kawasan rawan bencana banjir (genangan air).

   Dalam penentuan kawasan rawan bencana dilakukan kegiatan - kegiatan seperti pengidentifikasian sumber bencana, penggolongan kawasan-kawasan yang berpeluang terkena bencana berdasarkan jenis dan tingkat besar/kecilnya ancaman bencana serta dampak bencana yang ditimbulkan, serta penginformasian tingkat kerentanan wilayah terhadap masing-masing jenis ancaman bahaya. Dengan dilakukannya mitigasi seperti itu maka akan tersedia informasi dan peta kawasan rawan bencana untuk tiap jenis bencana.

   Rumus perhitungan Capaian SPM :

   $$\frac{\text{Jumlah dokumen Informasi Rawan Bencana}}{\text{Jumlah dokumen Informasi Rawan Bencana yang telah disusun}} \text{ X } 100\%$$

   $$= \frac{1}{1} \text{ X } 100\% = 100\%$$

   Capaian SPM Tahun 2019 untuk Pelayanan informasi rawan bencana adalah 100% karena telah terlayaninya untuk informasi daerah rawan bencana dengan adanya Peta Daerah Rawan Bencana yang tersedia.

2. Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana

   Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan dengan Sosialisasi atau Penyuluhan Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana maupun Mitigasi Penanggulangan Bencana.

   Di dalam Mitigasi Penanggulangan Bencana ini dilakukan juga Sosialisasi demi meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat yang bermukim di daerah rawan dalam menghadapi bencana. Sehingga mereka mengetahui apa yang perlu dilakukan dan dihindari, serta mengetahui cara penyelamatan diri jika bencana terjadi.

   Dimana pelayanan pencegahan dan mitigasi yang ditempuh dengan mengupayakan penanganan preventif agar kerusakan dan korban jiwa dapat diminimalkan apabila terjadi bencana.

   Rumus perhitungan Capaian SPM :

   $$\frac{\text{Jumlah peserta kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan}}{\text{Jumlah peserta yang hadir}} \text{ X } 100\%$$

   $$= \frac{870}{870} \text{ X } 100\% = 100\%$$

   Capaian SPM Tahun 2019 untuk Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana adalah 100% karena telah dilaksanakannya Kegiatan Sosialisasi / Penyuluhan Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana serta Mitigasi Penanggulangan Bencana kepada masyarakat.

3. Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana

   Bencana baik dalam skala kecil maupun besar dapat mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, cacat, luka, hilang, pengungsi, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Untuk mengurangi dampak bencana terhadap korban, pada tahap tanggap darurat dilakukan upaya penyelamatan, melalui pencarian, pertolongan, dan evakuasi. Upaya penyelamatan masyarakat terkena bencana dilaksanakan oleh Tim Reaksi Cepat (TRC) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun.

   Rumus perhitungan Capaian SPM =

   $$\frac{\text{Jumlah layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang tertangani}}{\text{Jumlah korban bencana}} \text{ X } 100\%$$

   $$= \frac{1}{1} \text{ x } 100\% = 100\%$$

   Capaian SPM Tahun 2019 untuk Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana adalah 100% dimana untuk penyelamatan dan evakuasi korban bencana telah tertangani semua dengan baik.

4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah pada Tahun 2019 sebesar Rp. 936.028.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Sumber Anggaran	Alokasi Anggaran
1	APBN	-
2	APBD Prop	-
3	APBD Kota	Rp. 936.028.000,00

5. Dukungan Personil

Jumlah Pegawai	Struktural / Eselon	Jabatan Fungsional	Jumlah Staf
PNS = 8 orang	II = 0 orang III = 1 orang IV = 3 orang V = 0 orang		4
Tenaga Upahan = 31 orang			

6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

Apabila lembaga, masyarakat dan para pihak mempunyai tingkat kesadaran dan kepedulian yang tinggi maka kecenderungan resiko korban jiwa dan harta benda akan berkurang atau tidak sama sekali mengalami kerugian.

Solusi :

Perlunya peran serta semua pihak untuk meningkatkan kepedulian terhadap bencana dengan kesiapsiagaan dan pencegahan dini terhadap bahaya bencana.

F. BIDANG SOSIAL

1. Jenis Pelayanan Dasar

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota, adalah sebagai berikut :

a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas terlantar di Luar Panti
b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti
c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia telantar di Luar Panti
d. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial khususnya gelandangan dan pengemis di Luar Panti
e. Perlindungan dan Jaminan sosial pada saat tanggap paska bencana bagi korban bencana Kab/Kota

2. Indikator dan Nilai Standar Pelayanan Minimal serta Batas Waktu Pencapaian Standar Pelayanan Minimal secara Nasional

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Nilai	Batas Waktu Capaian
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas terlantar di luar Panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	66	Setiap Tahun
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	Jumlah Anak Terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar Panti	45	Setiap Tahun
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	161	Setiap Tahun
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial khususnya gelandangan dan penge,is di luar panti	Jumlah Warga negara/gelandangan dan pengeis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	38	Setiap Tahun
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap paska bencana bagi korban bencana Kab/Kota	Jumlah warga negara korban bencana Kab/ Kota yang memperoleh perlindungan dan Jaminan Sosial	90	Setiap Tahun

3. Realisasi Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Data Tahun 2018	Target Tahun 2019	Capaian Indikator SPM
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	32	66	167,27
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di luar panti	Jumlah Anak Terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	10	45	300
3.	Rehabilitasi Sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	134	161	404,97
4.	Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara / gelandangan dan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	140	38	135,21
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap paska bencana bagi korban bencana Kab/Kota	Jumlah Warga Negara Korban Bencana Kab/Kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	0	90	0

Perhitungan :

1. Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti sebanyak 92 orang. Sehingga capaian yang diperoleh :

   $$\frac{92}{66} x100\% = 167{,}27\%$$

2. Jumlah Anak Terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sebanyak 135 orang.

   Capaian yang diperoleh adalah

   $$\frac{135}{45} x100\% = 300\%$$

3. Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sebanyak 652 orang.

   $$\frac{652}{161} x100\% = 404{,}97\%$$

4. Jumlah warga negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti sebanyak 51 orang. Sehingga capaian yang diperoleh :

   $$\frac{51}{32} x100\% = 135{,}21\%$$

5. Pada tahun 2019 tidak terjadi bencana di Kota Madiun, sehingga tidak ada warga korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial. Sehingga capaiannya 0%.

4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial pada Tahun 2019 sebesar Rp 710.763.736 (tujuh ratus sepuluh juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Sumber Anggaran	Alokasi Anggaran
1	APBN	
2	APBD Prop	
3	APBD Kota	710.763.736

5. Dukungan Personil

Jumlah Pegawai	Struktural/Eselon	Jabatan Fungsional	Jumlah Staf
PNS =	II III IV	- - -	- 3 3
Honorer =	2 Orang	-	-

6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

Banyaknya pekerjaan yang belum tertangani dikarenakan kurangnya personil yang ada di Bidang Sosial dan kebanyakan klien dari luar kota serta terlalu lama tinggal di shelter.

Solusi

Adanya koordinasi dengan dinas terkait atau dinas dimana klien tersebut berasal.

BAB VIII

AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH

Akuntabilitas kinerja merupakan suatu kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pemberi amanah maupun pihak-pihak lain yang berwenang menerima pelaporan.

Dalam hal ini, laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah). Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Madiun tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur, tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi actuating dari berbagai piranti perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga kemudian sampailah pada saat pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya.

Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggung jawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat.

A. PENGUKURAN DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

1) Metode Penyimpulan Capaian Sasaran

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

No	Kriteria Pengukuran	Predikat
1	X ≥ 100 %	Sangat Baik
2	85 % ≤ X < 100 %	Baik
3	60 % ≤ X <85 %	Cukup Baik
4	X <60 %	Kurang Baik

Adapun pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap IndIkator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (peformance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (performance improvement). Adapun dalam memberikan penilaian tingkat Realisasi kinerja setiap sasaran, menggunakan rumus sebagai berikut:

(1) **Tingkat Realisasi Positif** yaitu apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\ \%$$

(2) **Tingkat Realisasi Negatif** yaitu apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\ \%$$

Atau:

$$\text{Capaian kinerja} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2) Hasil Pengukuran Kinerja

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran strategis dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Madiun Tahun 2019 disajikan sebagai berikut :

Tabel VIII.1
Pengukuran Realisasi Kinerja 2019

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
Misi 1 : Mewujudkan Pembangunan berbasis pada Partisipasi Masyarakat					
1.1.1	Meningkatnya partisipasi masyarakat dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dalam Pembangunan	Presentase Usulan Masyarakat yang diakomodir dalam RKPD	81%	81,13%	100,16%
1.1.2	Meningkatnya pemberdayaan perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93,89	94,05	100,27%
Misi 2 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa					
2.1.1	Meningkatnya tata kelola birokrasi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Sangat tinggi	Sangat tinggi	Sangat tinggi
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	BB	B	96%
		Indeks Kepuasan Masyarakat	79,5	88,45	111,26 %

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
2.1.2	Meningkatnya pengelolaan keuangan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	WTP	WTP	100%
		Tingkat keterbukaan informasi publik	A	A	100%
Misi 3 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar					
3.1.1	Meningkatnya kualitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	0,76	0,77	101,30%
3.1.2	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	72,59 tahun	72,75 tahun	100,20%
3.1.3	Meningkatnya kualitas infrastruktur, permukiman dan prasarana transportasi kota	Rasio Panjang Jalan Kota dalam kondisi baik	93%	93,64%	100,69%
		Rasio Rumah layak Huni	99,42%	99,95%	100,53%
		Persentase Penurunan Angka Kecelakaan	1,50%	1,64%	100,69%
3.1.4	Meningkatnya penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	68,51	63,80	93,13%
		Presentase pemanfaatan ruang sesuai RTRW	100%	100%	100%
Misi 4 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat					
4.1.1	Meningkatnya iklim investasi yang kondusif dan penyerapan tenaga kerja	Persentase pertumbuhan nilai investasi	3,14%	0,63%	20%
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,08	4,01	121,06%
4.1.2	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor-sektor unggulan daerah	Persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	23,86%	25,93%	108,70%
		Persentase pertum-buhan PDRB sektor industri	17,2%	17,68%	103,70%
		Persentase pertumbuhan PDRB sektor pariwisata	6,29%	8,95%	142,36%
4.1.3	Meningkatnya keamanan, ketertiban dan kerukunan dalam masyarakat	Persentase penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	98%	100%	102,04%
		Persentase potensi konflik yang diselesaikan	100%	100%	100%

3) Evaluasi dan Analisis Realisasi Kinerja

Pengukuran kinerja Pemerintah Kota Madiun Tahun 2019 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran Pemerintah Kota Madiun Tahun 2019 disajikan sebagai berikut :

1. Misi Pertama : Mewujudkan Pembangunan berbasis pada Partisipasi Masyarakat

Tujuan Pertama : Terwujudnya Partisipasi Pemangku Kepentingan Dalam Pembangunan

Tabel VIII.2
Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan I

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target Akhir Tahun RPJMD	Realisasi	
				2018 (n-1)	2019 (n)
1	Meningkatnya partisipasi masyarakat dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dalam Pembangunan	Presentase Usulan Masyarakat yang diakomodir dalam RKPD	81%	79,63%	81,13%
2	Meningkatnya pemberdayaan perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93,89	93,66	94,05

Sumber Data : Bappeda Kota Madiun dan BPS

Tabel VIII.3
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target Akhir Tahun RPJMD	Realisasi Tahun 2019	% Capaian Kinerja
1	Meningkatnya partisipasi masyarakat dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dalam Pembangunan	Presentase Usulan Masyarakat yang diakomodir dalam RKPD	81%	81,13%	100,16%
2	Meningkatnya pemberdayaan perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93,89	94,05	100,27%

Sumber Data : Bappeda Kota Madiun dan BPS

Tabel VIII.4
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Provinsi dan Nasional

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Provinsi 2019	Realisasi Nasional 2019
1	Meningkatnya partisipasi masyarakat dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dalam Pembangunan	Presentase Usulan Masyarakat yang diakomodir dalam RKPD	81%	-	-
2	Meningkatnya pemberdayaan perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	94,05	90.91	91,07

Sumber Data : Bappeda Kota Madiun dan BPS

1. Presentase Usulan Masyarakat yang diakomodir dalam RKPD

   Meningkatnya partisipasi masyarakat dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan diukur menggunakan indikator persentase masyarakat yang diakomodir dalam RKPD dapat dihitung dengan membandingkan jumlah jenis usulan yang masuk RKPD dibagi jumlah jenis usulan masyarakat dikali 100%.

   Pada Tahun 2016 jumlah jenis usulan masyarakat sebanyak 38 jenis usulan sehingga realisasi yang didapat sebear 76,32%, sedangkan di tahun berikutnya jumlah jenis usulan yang masuk RKPD sebanyak 43 jenis usulan dan jenis usulan masyarakat sebanyak 55 jenis usulan sehingga didapatkan realisasi 78,18%. Tahun 2018 jumlah jenis usulan yang masuk RKPD sebanyak 43 jenis usulan dan jumlah jenis usulan masyarakat sebanyak 54 jenis usulan sehingga realisasi yang didapat sebesar 79,63%. Dan di tahun 2019 terdapat peningkatan yaitu jumlah jenis usulan yang masuk RKPD sebanyak 43 jenis usulan dan jumlah jenis usulan masyarakat sebanyak 53 jenis usulan sehingga realisasi yang didapat sebesar 81,13% dengan capaian sebesar 100,16%.

2. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

   Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan salah satu Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Madiun. Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan salah satu ukuran tingkat keberhasilan capaian pembangunan yang sudah mengakomodasi persoalan gender. IPG adalah ukuran pembangunan manusia berbasis gender dilihat dari tiga dimensi capaian dasar manusia yaitu dimensi umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. IPG merupakan rasio antara IPM perempuan dan laki-laki, dimana semakin mendekati 100, maka semakin baik kesetaraan gender suatu wilayah.

   Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kota Madiun mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 92,95 dan ada peningkatan di tahun berikutnya sebesar 93,44, di tahun 2017 sebesar 93,66, sedangkan 2018 sebesar 93,47. Untuk tahun 2019 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Madiun mengalami kenaikan menjadi 94,05 lebih tinggi dari IPG Provinsi Jawa Timur 90,91 maupun IPG Nasional 91,07. Hal ini mengindikasikan bahwa ketimpangan antara penduduk laki-laki dan perempuan semakin mengecil.

Gambar VIII.1
Perkembangan Indeks Pembangunan Gender Kota Madiun tahun 2015-2019

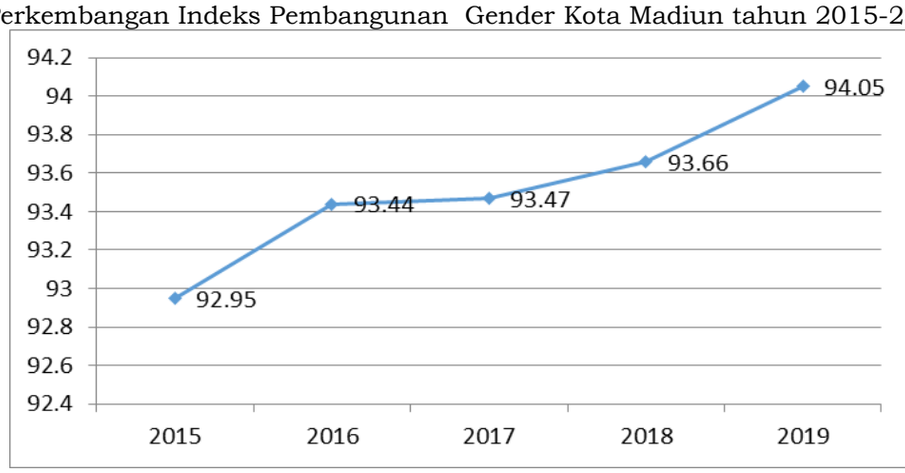

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Madiun dalam rangka mencapai IPG Kota Madiun adalah sebagai berikut :

Pertama, meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai pembangunan yang dilakukan melalui strategi :

a. Peningkatan pemahaman dan komitmen para pelaku pembangunan tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam berbagai tahapan, proses, dan bidang pembangunan melalui sosialisasi maupun pembinaan
b. Penerapan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di berbagai program dan kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun
c. Peningkatan pemahaman masyarakat dan dunia usaha tentang kesetaraan gender melalui sosialisasi maupun pembinaan kepada masyarakat maupun dunia usaha

Kedua, meningkatkan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan yang dilakukan melaui strategi:

a. Peningkatan pemahaman tentang tindak kekerasan terhadap perempuan serta nilai-nilai sosial dan budaya yang melindungi perempuan dari berbagai tindak kekerasan melalui sosialisasi maupun pembinaan
b. Perlindungan hukum dan pengawasan pelaksanaan penegakan hukum terkait kekerasan terhadap perempuan;
c. Peningkatan efektivitas pelayanan bagi perempuan korban kekerasan

Ketiga, meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan. Strategi untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan antara lain untuk :

a. Penyempurnaan proses pembentukan peraturan perundang-undangan dan kebijakan agar selalu mendapatkan masukan dari perspektif gender;
b. Pelaksanaan *review* dan harmonisasi seluruh peraturan perundang-undangan agar berspektif gender;
c. Peningkatan kapasitas SDM dalam rangka penanganan tindak kekerasan

d. Penguatan mekanisme koordinasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, dunia usaha dalam penerapan PUG;
e. Penguatan lembaga/jejaring PUG di pusat dan daerah, termasuk perguruan tinggi, pusat studi wanita/gender, dan organisasi masyarakat;
f. Penguatan sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data terpilah;
g. Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil PUG.

2. Misi Kedua : *Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*

Tujuan Pertama : *Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*

Tabel VIII.5
Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan I

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target Akhir Tahun RPJMD	Realisasi	
				2018 (n-1)	2019 (n)
1	Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	BB	B	B
		Indeks Kepuasan Masyarakat	79,5	82,85	88,45
2	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP
		Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	B	A	A

Sumber Data : Bagian Administrasi Pemerintahan, Bagian Organisasi, BPKAD, Dinas Komunikasi dan Informatika

Tabel III.7
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target Akhir Tahun RPJMD	Realisasi Tahun 2019	% Capaian Kinerja
1	Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Tinggi	Sangat Tinggi	100%
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	BB	B	96%
		Indeks Kepuasan Masyarakat	79,5	88,45	111,26%
2	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	100%
		Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	B	A	100%

Sumber Data : Bagian Adm. Pemerintahan, Bagian Organisasi, BPKAD, Dinas Kominfo

Tabel III.8
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Provinsi dan Nasional

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Provinsi 2019	Realisasi Nasional 2019
1	Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	N/A
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	B	A	N/A
		Indeks Kepuasan Masyarakat	88,45	81,33	N/A
2	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	N/A
		Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	A	A	N/A

Sumber Data : Bagian Administrasi Pemerintahan, Bagian Organisasi, BPKAD, Dinas Komunikasi dan Informatika, Biro Organisasi Provinsi Jawa Timur

Pada Misi 2 Tujuan 1 dan Sasaran 1 terdapat 3 indikator keberhasilan yaitu :

1. Nilai Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

   Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 118-8840 Tahun 2018 tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional, Pemerintah Kota Madiun meraih nilai 3,3056 dengan predikat Sangat Tinggi. Hal ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan Tahun 2018 yang memperoleh nilai 3,2399 dan Tahun 2017 termasuk dalam kategori peringkat dan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tidak ditampilkan (N/A, Not Available). Sedangkan berturut-turut untuk Tahun 2015 : 3,3702, Tahun 2016 3,2055. Capaian kinerja indikator Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Madiun adalah 100%. Hal ini merupakan bukti adanya partnership yang sangat baik antar stakeholder antara pemerintah eksekutif dengan legislatif dan juga partisipasi dari mayarakat.

Tabel VIII.6
Tabel Nilai EKPPD tahun 2015-2019

No	Tahun	Peringkat	Skor	Status
1	2015	1	3,3702	Sangat Tinggi
2	2016	5	3,2055	Sangat Tinggi
3	2017	N/A	-	-
4	2018	25	3,2399	Sangat Tinggi
5	2019	7	3,3056	Sangat Tinggi

Sumber Data : Bagian Administrasi Pemerintahan

2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka telah dilakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kota Madiun oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan kategori hasil penilaian SAKIP adalah sebagai berikut :

No.	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>90 -100	**Sangat Memuaskan**
2	A	>80 - 90	**Memuaskan**, memimpin perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel
3	BB	>70 - 80	**Sangat Baik**, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang handal
4	B	>60 -70	**Baik**, Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja
5	CC	>50 -60	**Cukup (Memadai)**, Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar
6	C	>50 -60	**Kurang,** Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar
7	D	>50 -60	**Sangat Kurang,** Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja, perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar

Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas kinerja atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan. Adapun komponen-komponen penilaian SAKIP yaitu :

1. Perencanaan Kinerja dengan bobot 30%
2. Pengukuran Kinerja dengan bobot 25%
3. Pelaporan Kinerja dengan bobot 15 %
4. Evaluasi Internal dengan bobot 10%
5. Capaian Kinerja dengan bobot 20%

Berdasarkan surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor : B/657/AA.05/2019 tanggal 30 Desember 2019 perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019, hasil evaluasi Pemerintah Kota Madiun mendapatkan nilai 68,20. Secara umum

perkembangan nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Madiun cenderung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. ”Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Madiun” selama kurun waktu 5 (lima) tahun berturut-turut sejak tahun 2014, 2015, 2016, 2017 dan 2018 capaian kinerjanya mengalami kenaikan namun secara kategori nilai akuntabilitas Pemerintah Kota Madiun masih tetap bernilai B.

Gambar VIII.2
Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kota Madiun tahun 2015-2019

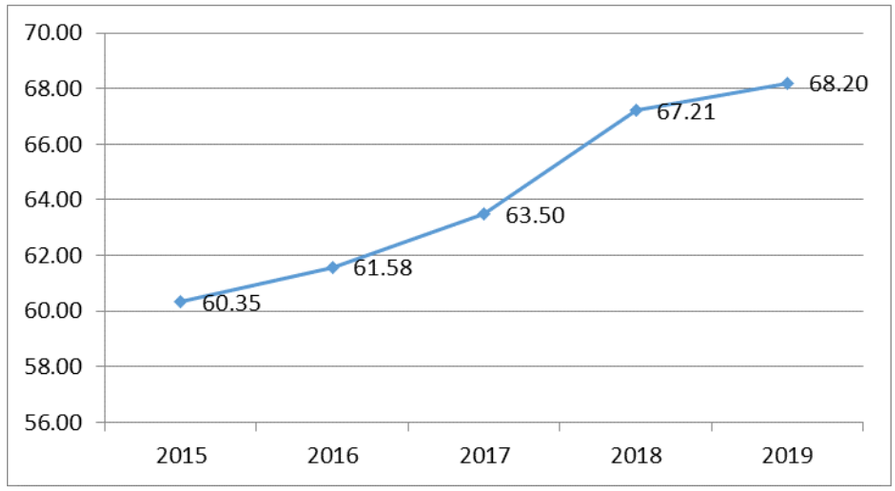

Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Madiun dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerjanya adalah sebagai berikut :

1. Melakukan penetapan RPJMD dan Penetapan RENSTRA Perangkat Daerah
2. Melakukan asistensi/pendampingan penyusunan Perjanjian Kinerja pada Perangkat Daerah mulai dari Kepala Perangkat Daerah sampai dengan Pelaksana dan penandatanganan Perjanjian Kinerja
3. Melakukan penyusunan RENSTRA Tahun 2019-2024 dengan pendekatan yang menggambarkan tingkat keberhasilan yang ingin dicapai dan keterkaitan dengan sasaran RPJMD serta tupoksi,untuk penyusunan lebih lanjut sesuai regulasi , bersamaan dengan review RPJMD dan RENSTRA tentang implementasi Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang berlaku secara serentak bagi pemerintah daerah
4. Melakukan asistensi/pendampingan penyusunan Cascading Perangkat Daerah Tahun 2019-2020
5. Perencanaan penganggaran untuk kedepan akan difokuskan pada prioritas pencapaian tujuan dan sasaran
6. Saat ini sedang dilakukan restrukturisasi e sakip yang diintegrasikan dengan e planning dan si monev bersama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika , karena waktu perpindahan server dari pihak ketiga ke Dinas Komunikasi dan Informatika terdapat beberapa item yang error.

7. Melakukan asistensi/pendampingan penyusunan LKj Perangkat Daerah Tahun 2019 yang dilaporkan Tahun 2020, dengan penekanan pada analisis terhadap capaian kinerja serta rencana aksi/tindak lanjut tahun berikutnya, cascading dan peta proses bisnis Perangkat daerah
8. Meningkatkan kapasitas evaluator dengan akan dilakukannya BIMTEK bagi evaluator, melakukan pendampingan dengan Inspektorat Provinsi/ Biro Organisasi, dan study banding

3. Indeks Kepuasan Masyarakat

Dalam rangka menjaga kepercayaan dari masyarakat, salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah dengan melakukan survey kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan. Survey Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Mengingat jenis layanan publik sangat beragam dengan sifat dan karakteristik yang berbeda, maka Survey Kepuasan Masyarakat dapat menggunakan metode dan teknik survey yang telah ditentukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Dari hasil atas Survey Kepuasan Masyarakat akan dibuat suatu penelitian dengan menggunakan analisis statistik atau metode tertentu. Dari hasil penelitian ini diperoleh tingkat kepuasan masyarakat terhadap masing-masing unit penyelenggara pelayanan publik di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun. Sehingga dapat diketahui kekurangan dari masing-masing unit tersebut yang kemudian dapat diperoleh saran perbaikan terhadap peningkatan kualitas pelayanan.

Pada tahun 2019, berdasarkan hasil survey pada beberapa perangkat daerah dan unit kerja, diperoleh nilai sebesar 88,45 yaitu meningkat dari tahun sebelumnya dengan indeks 82,85. Nilai tersebut telah berhasil memenuhi target yang ditetapkan untuk tahun 2019 yaitu sebesar 81, sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 111,26%. Perkembangan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dari Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut :

Gambar VIII.3
Perkembangan Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Madiun tahun 2015-2019

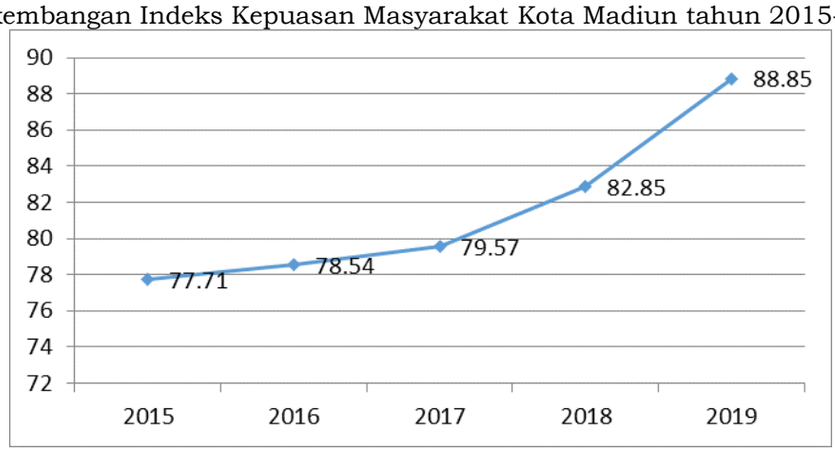

Pada Misi 2 Tujuan 1 dan Sasaran 2 terdapat 2 indikator keberhasilan yaitu :

1. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Opini BPK diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan secara periodik terhadap laporan keuangan Pemerintah Kota Madiun tahun 20169 yang mencakup pemeriksaan terhadap 1. Laporan Realisasi Anggaran, 2. Laporan perubahan saldo akhir kas, 3. Neraca, 4. Laporan operasional, 5. Laporan perubahan ekuitas, 6. Laporan Arus Kas, dan 7. Catatan atas Laporan Keuangan adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Predikat tersebut telah berhasil memenuhi target yang ditetapkan untuk tahun 2019. Realisasi atas target kinerja yang ditetapkan menunjukkan hasil yang sangat baik. Adapun opini BPK mulai tahun 2015-2019 disajikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel III.9.
Hasil Capaian Opini BPK Kota Madiun Tahun 2015-2019

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Opini	WTP	WTP	WDP	WTP	WTP

Sumber Data : BPKAD Kota Madiun

2. Tingkat Keterbukaan Informasi Publik

Tingkat keterbukaan informasi publik merupakan indikator yang digunakan untuk menjalankan amanat Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penilaian terhadap tingkat keterbukaan informasi publik dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat terhadap beberapa indikator yang antara lain meliputi : mengumumkan informasi publik, menyediakan informasi publik, pelayanan informasi publik, serta pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik. Hasil penilaian tingkat keterbukaan informasi publik Kota Madiun tahun 2019 menunjukkan nilai A yaitu 96,2. Nilai tersebut telah berhasil

melampaui target yang ditetapkan tahun 2019 yaitu nilai B dengan nilai range 80-96 (menuju informatif).

Upaya yang sudah dilakukan pada tahun 2019 dalam rangka mancapai tingkat keterbukaan informasi publik adalah :

1. Melakukan pengintegrasian sistem e-goverment;
2. Pengelolaan website Pemerintah Kota secara terintegrasi;
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayananan publikasi informasi ke masyarakat;
4. Menjalin kerjasama dan hubungan yang lebih harmonis dengan media massa dan instansi terkait;
5. Menyediakan layanan publik berbasis Teknologi Informasi;
6. Menyediakan saluran informasi dan komunikasi yang memadai bagi masyarakat berkaitan dengan implementasi kebijakan dan pembangunan Pemerintah Kota;
7. Mengoptimalkan PPID;
8. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder masyarakat;

3. Misi Ketiga : Meningkatkan Kulitas dan Kuantitas Pelayanan Masyarakat

Tujuan Pertama : Meningkatnya Aksesbilitas dan Kualitas Pendidikan

Tabel VIII.7
Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan I

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target Akhir Tahun RPJMD	Realisasi	
				2018 (n-1)	2019 (n)
1	Meningkatnya Aksesbilitas dan Kualitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	0,76	0,76	0,77

Sumber Data : Badan Pusat Statistik

Tabel VIII.8
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target Akhir Tahun RPJMD	Realisasi Tahun 2019	% Capaian Kinerja
1	Meningkatnya Aksesbilitas dan Kualitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	0,76	0,77	101,31%

Sumber Data : Badan Pusat Statistik

Tabel VIII.9
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Provinsi dan Realisasi Nasional

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Provinsi 2019	Realisasi Nasional 2019
1	Meningkatnya Aksesbilitas dan Kualitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	0,77	0,62	-

Sumber Data : Badan Pusat Statistik

Indeks pendidikan merupakan pencerminan hasil pembangunan bidang pendidikan. Indikator pembentuk indeks Pendidikan adalah Angka Melek Huruf dan Angka Rata-rata lama Sekolah.

1. Angka melek huruf usia 15 tahun ke atas

   Angka Melek Huruf Usia 15 Tahun ke atas (sampai dengan 59 tahun, sesuai dengan indikator dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional) Angka Melek Huruf usia 15 tahun keatas (sampai dengan 59 tahun, sesuai dengan indikator dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional) Angka Melek Huruf diatas usia 15 tahun, pada tahun 2019 angka melek huruf di Kota Madiun sudah mencapai 100%

2. Angka Rata-rata Lama Sekolah

   Angka rata-rata lama sekolah menggambarkan rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk dalam menempuh semua jenis pendidikan formal. Angka rata-rata lama sekolah tahun 2018 adalah 11,11. Sedangkan data sementara dari BPS Kota Madiun tahun 2019 untuk rata-rata lama sekolah yaitu 11,13. Dengan nilai rata-rata lama sekolah sebesar 11,13 maka artinya bahwa sebagian besar penduduk Kota Madiun telah menamatkan pendidikan sampai dengan jenjang pendidikan dasar dan melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah. Hal ini disebabkan makin sadar akan pentingnya pendidikan dan adanya suport dari Pemerintah Kota Madiun yaitu Program Pendidikan Dasar, Peningkatan sarana dan Prasarana Sekolah SD dan SMP dan Program BOS dari Pemerinah Pusat.

Indeks Pendidikan cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tahun 2015 Indeks Pendidikan Kota Madiun baru mencapai angka 0,74. Angka tersebut terus meningkat menjadi 0,76 pada tahun 2016 dan 2017, serta meningkat lagi menjadi 0,77 pada tahun 2018 dan 2019. Untuk tahun 2019 Indeks Pendidikan di Kota Madiun lebih tinggi daripada Indeks Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Trend kenaikan Indeks Pendidikan sebagaimana tersaji pada grafik sebagai berikut :

Gambar III.4
Perkembangan Indeks Pendidikan Kota Madiun tahun 2015-2019

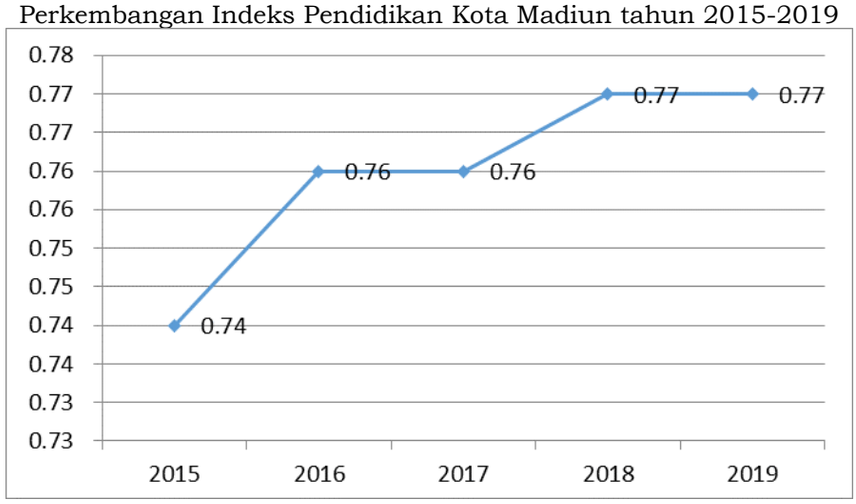

Upaya dalam rangka meningkatkan indeks pendidikan di Kota Madiun dilakukan melalui program-program sebagai berikut :

1. Program manajemen pelayanan pendidikan
2. Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
3. Program pendidikan dasar
4. Program pendidikan anak usia dini
5. Program pendidikan non formal

Penghargaan yang diterima Dinas Pendidikan pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

a. Juara I Nasional Lomba UKS (TK Negeri Pembina)
b. Juara I Nasional Kepala Sekolah Berinovasi dalam penjaminan mutu sekolah rujukan (Dra. Sri Mugi Lestari, M.Si Ka. SDN 02 Mojorejo)
c. Juara I Nasional PAUD Aku Anak Indonesia Gemar Makan Ikan (KB Joy) d. Juara II Nasional SDN 02 Mojorejo Lomba Budaya Mutu
d. Juara II Nasional Lomba FLSSN kategori menyanyi solo (Bernaditta Salwa)
e. Juara I Propinsi Jawa Timur Lomba POCIL SDN 03 Madiun Lor.
f. Juara I Propinsi Lomba Pelopor Keselamatan Lalu Lintas SMPN
g. Juara I Propinsi Lomba Pengawas Sekolah Berprestasi (Sri Mulyani, S.Pd)
h. Juara II Propinsi Jawa Timur Kepala Sekolah Berprestasi (Sri Istiana S.Pd PAUD Ka. TK Kartika IX/3)
i. Juara III Propinsi Jawa Timur Guru Berprestasi TK Kartika IX/3 (Supini, S.Pd PAUD)

Tujuan Kedua : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Tabel VIII.10
Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan II

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target Akhir Tahun RPJMD	Realisasi	
				2018 (n-1)	2019 (n)
1	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	72,59 tahun	72,59 tahun	72,75 tahun

Sumber Data : Badan Pusat Statistik

Tabel VIII.11
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target Akhir Tahun RPJMD	Realisasi Tahun 2019	% Capaian Kinerja
1	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	72,59 tahun	72,75 tahun	100,22%

Sumber Data : Badan Pusat Statistik

Tabel VIII.12
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Provinsi dan Realisasi Nasional

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Provinsi 2019	Realisasi Nasional 2019
1	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	72,75 tahun	71,18 tahun	71,20 tahun

Sumber Data : Badan Pusat Statistik

Sasaran meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat diukur dengan indikator kinerja yaitu Angka Harapan Hidup (AHH). Angka harapan hidup menunjukkan rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. Semakin tinggi angka harapan hidup suatu daerah, maka menunjukkan semakin panjang pula tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang lahir di daerah itu pada kurun waktu tersebut. Data Angka Harapan Hidup (AHH) perhitungan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Madiun 2019 yaitu sebesar 72,75 Tahun, diatas target yang ditetapkan yaitu sebesar 72,59 Tahun. Angka harapan hidup warga Kota Madiun selalu mengalami peningkatan dalam setiap tahun, dan hal tersebut akan selalu di dukung oleh perangkat daerah terkait dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

Adapun trend Angka Harapan Hidup (AHH) Kota Madiun pada Tahun 2016 sampai dengan 2019 dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar VIII.5
Trend Angka Harapan Hidup Kota Madiun tahun 2015-2019

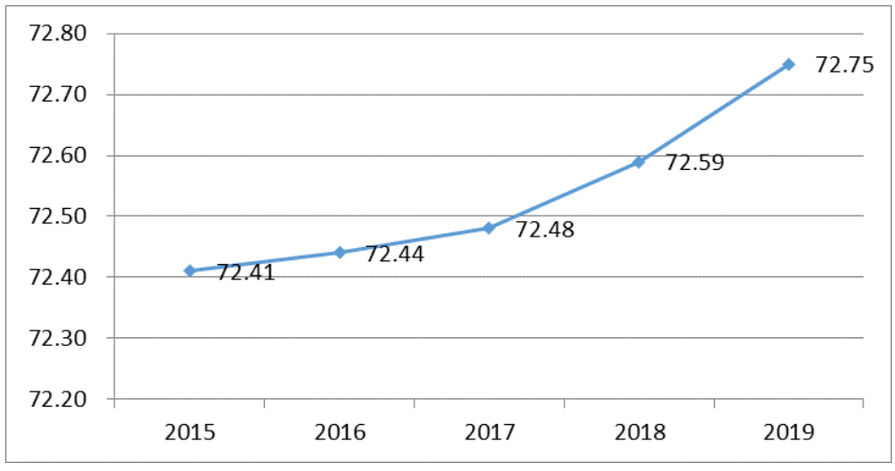

Dari grafik tersebut dapat dilihat adanya tren kenaikan dari AHH di Kota Madiun, dari Tahun 2016 ke Tahun 2019 mengalami kenaikan, hal tersebut disebabkan karena dukungan faktor kesehatan berupa:

a. Pemantauan status kesehatan mulai dari pelayanan kesehatan ibu hamil, pelayanan kesehatan ibu bersalin, pelayanan kesehatan bayi baru lahir, pelayanan kesehatan balita, pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, pelayanan kesehatan pada usia produktif dan pelayanan kesehatan pada usia

lanjut sudah dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditentukan.

b. Adanya skrining faktor resiko penyakit tidak menular (PTM) pada kelompok usia produktif dan lansia, dimana adanya transisi epidemiologi dimana penyakit tidak menular trennya meningkat daripada penyakit menular sehingga dengan diadakannya skrining faktor resiko PTM akan berdampak ditemukan sedini mungkin.

c. Peningkatan penemuan kasus pada penyakit menular untuk pengendalian penularan dan penurunan mortalitas akibat penyakit

Tujuan Ketiga : Meningkatnya kualitas infrastruktur, prasarana transportasi serta daya dukung kota yang berwawasan lingkungan

Tabel VIII.13
Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan III

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target Akhir Tahun RPJMD	Realisasi	
				2018 (n-1)	2019 (n)
1	Meningkatnya kualitas infrastruktur, permukiman dan prasarana transportasi	Rasio panjang jalan kota dalam kondisi baik	93%	94,51%	93,64%
		Rasio rumah layak huni	99,42%	99,65%	99,95%
2	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Persentase penurunan angka kecelakaan	1,50%	1,61%	1,64%
3	Meningkatnya Penataan Ruang dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	68,87	64,22	63,87
		Prosentase Ruang Yang Dimanfaatkan RTRW	100%	100%	100%

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Perhubungan

Tabel III.14
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target Akhir Tahun RPJMD	Realisasi Tahun 2019	% Capaian Kinerja
1	Meningkatnya kualitas infrastruktur, permukiman dan prasarana transportasi	Rasio panjang jalan kota dalam kondisi baik	93%	93,64%	100,68%
		Rasio rumah layak huni	99,42%	99,95%	100,53%
2	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Persentase penurunan angka kecelakaan	1,50%	1,64%	100,69%
3	Meningkatnya Penataan Ruang dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	68,87	63,87	93,23%
		Prosentase Ruang Yang Dimanfaatkan RTRW	100%	100%	100%

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Perhubungan

Tabel VIII.15
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Provinsi dan Nasional

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Provinsi 2019	Realisasi Nasional 2019
1	Meningkatnya kualitas infrastruktur, permukiman dan prasarana transportasi	Rasio panjang jalan kota dalam kondisi baik	93,64%	-	-
		Rasio rumah layak huni	99,95%	-	-
2	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Persentase penurunan angka kecelakaan	1,64%	-	-
3	Meningkatnya Penataan Ruang dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	63,87	65,09	-
		Prosentase Ruang Yang Dimanfaatkan RTRW	100%	-	-

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Perhubungan

Tujuan 3 Misi 3 dan Sasaran 1 terdapat 3 indikator keberhasilan yaitu :

1. Rasio panjang jalan kota dalam kondisi baik

   Rasio panjang jalan dalam kondisi baik pada tahun 2019 adalah 93,64 % atau 405,540 Km, jika dibandingkan dengan tahun 2018 terealisasi 94,51 % atau 397,480 Km sehingga ada peningkatan jalan dalam 8,060 Km, dimana pekerjaan yang dilaksanakan berupa pengaspalan jalan/overlay dan peningkatan kapasitas jalan (pelebaran). Adapun perkembangan kondisi jalan di Kota Madiun adalah sebagai berikut :

Tabel VIII.16
Perkembangan Kondisi Jalan di Kota Madiun dalam Km

Uraian	2018	2019
Kondisi Baik	397,480	405,540
Kondisi Sedang	31,520	26,250
Rusak Ringan	1,470	-
Rusak (Tanah)	2,625	1,305
Panjang Jalan Total	433,095	433,095

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dalam rangka menjaga kondisi jalan yang tetap mantap dan memadai, Pemerintah Kota Madiun telah melaksanakan langkahlangkah pemeliharaan jalan setiap tahun dengan kondisi jalan baik dilaksanakan dengan sistim pemeliharaan rutin, kondisi jalan sedang dilaksanakan dengan pemeliharaan berkala, dan kondisi rusak dilaksanakan sistem pemeliharaan berkala atau dengan peningkatan jalan. Panjang jalan Kota pada tahun 2019 adalah 405,540 km atau 93,64 % dalam kondisi baik, 6,06 % dalam kondisi sedang, dan sisanya sebesar 0,30 % dalam keadaan rusak ringan.

Untuk informasi lebih rinci kondisi jalan di Kota Madiun sampai dengan Tahun 2019 dapat dilihat sebagai berikut :

Gambar VIII.6
Grafik Kondisi Jalan di Kota Madiun

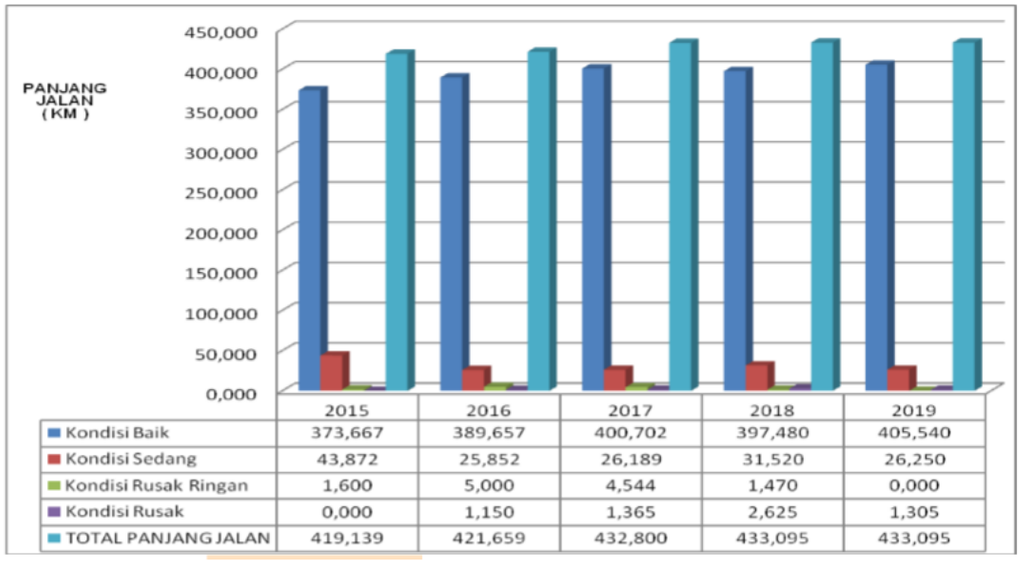

	2015	2016	2017	2018	2019
Kondisi Baik	373,667	389,657	400,702	397,480	405,540
Kondisi Sedang	43,872	25,852	26,189	31,520	26,250
Kondisi Rusak Ringan	1,600	5,000	4,544	1,470	0,000
Kondisi Rusak	0,000	1,150	1,365	2,625	1,305
TOTAL PANJANG JALAN	419,139	421,659	432,800	433,095	433,095

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Tabel VIII.17
Kondisi Jalan Di Kota Madiun

NO	TYPE PERKERASAN		JALAN		
			KONDISI	PANJANG RUAS KONDISI JALAN (KM)	PANJANG TYPE JALAN TOTAL (KM)
Jalan Nasional di Kota Madiun					
1	ASPAL	a	Baik	4,295	4,295
		b	Sedang	12,245	12,245
		c	Rusak Ringan	-	-
		d	Rusak Berat	-	-
TOTAL					**16,540**
Jalan Propinsi di Kota Madiun					
2	ASPAL	a	Baik	-	
		b	Sedang	-	
		c	Rusak Ringan	-	
		d	Rusak Berat	-	
TOTAL					
Jalan Kota di Kota Madiun					
3	ASPAL	a	Baik	405,540	**433,095**
		b	Sedang	26,250	
		c	Rusak Ringan	-	
		d	Rusak Berat	1,305	
TOTAL					**449,635**

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dengan selesainya Kegiatan Pemeliharaan Jalan, maka kegiatan penyelenggaraan jalan sekarang menjadi berubah penekanannya, jalan yang selesai dibangun ataupun setelah dilaksanakan pemeliharaan berkala pada tahun sebelumnya akan mengalami penurunan kondisi sesuai dengan bertambahnya umur sehingga dari jalan kondisi baik menjadi kondisi sedang, kondisi sedang menjadi kondisi rusak ringan dan seterusnya.

Sedangkan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan pada tahun 2019 dilaksanakan pekerjaan penambalan jalan berlubang, pengedukan saluran, pengeprasan bahu jalan, pembersihan trotoar, perbersihan semak disekitar jembatan, pemasangan trotoar keramik pada jembatan, pengecatan leuneng dan kanstin, pembersihan goronggorong dengan tujuan untuk mempertahankan kondisi konstruksi dan kelengkapan jalan dan jembatan agar tetap berfungsi dalam melayani lalu lintas sehingga keselamatan dan kenyamanan lalu lintas pengguna jalan terjamin dan pelayanan kinerja jalan meningkat.

a. Memperkecil biaya operasi kendaraan yang dipengaruhi oleh jenis kendaraan, geometrik dan kondisi jalan.
b. Mencegah kerusakan atau mengurangi laju kerusakan (rate of deterioration) sehingga diharapkan dapat memperpanjang umur rencana.

Dampak positif kegiatan pemeliharaan jalan di Kota Madiun :

a. Kelancaran lalu lintas Manfaat langsung dari pemeliharaan jalan baik perkerasan jalan maupun pada bangunan pelengkap jalan adalah meningkatnya kelancaran arus lalu lintas atau angkutan barang dan orang khususnya dalam menghubungkan daerah satu ke daerah lainnya di wilayah Kota Madiun. Dengan semakin lancarnya arus lalu lintas berarti lebih mengefisiensikan waktu dan biaya.
b. Merangsang tumbuhnya aktivitas perekonomian Manfaat langsung ini terlihat ketika diadakannya kegiatan trotoarisasi yang bebasiskan lantai keramik dengan ditandai tumbuhnya aktivitas perekonomian berupa aktivitas PKL di sekitar trotoar yang selesai dibangun.
c. Pertumbuhan PDRB daerah Semakin lancarnya transportasi akan menimbulkan dampak pergerakan orang maupun barang. Dengan demikian akan memicu peningkatan jumlah penduduk. Meningkatnya jumlah penduduk akan merangsang naiknya permintaan barang dan jasa. Selanjutnya akan merangsang meningkatnya kegiatan perekonomian, berkembangnya usaha di sektor pertanian, industri, perdagangan, jasa dan meningkatnya arus barang masuk ke Kota Madiun

Pada tahun 2019 persentase tersedianya informasi data base jalan sudah terealisasi 100%, dikarenakan seluruh data jalan yang ada di Kota Madiun sudah tercover dalam GIS (Geographic Information System) sehingga tidak mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

Berikut ini contoh tampilan aplikasi GIS (Geographic Information System) di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Madiun :

Gambar III.6
Geographic Information System

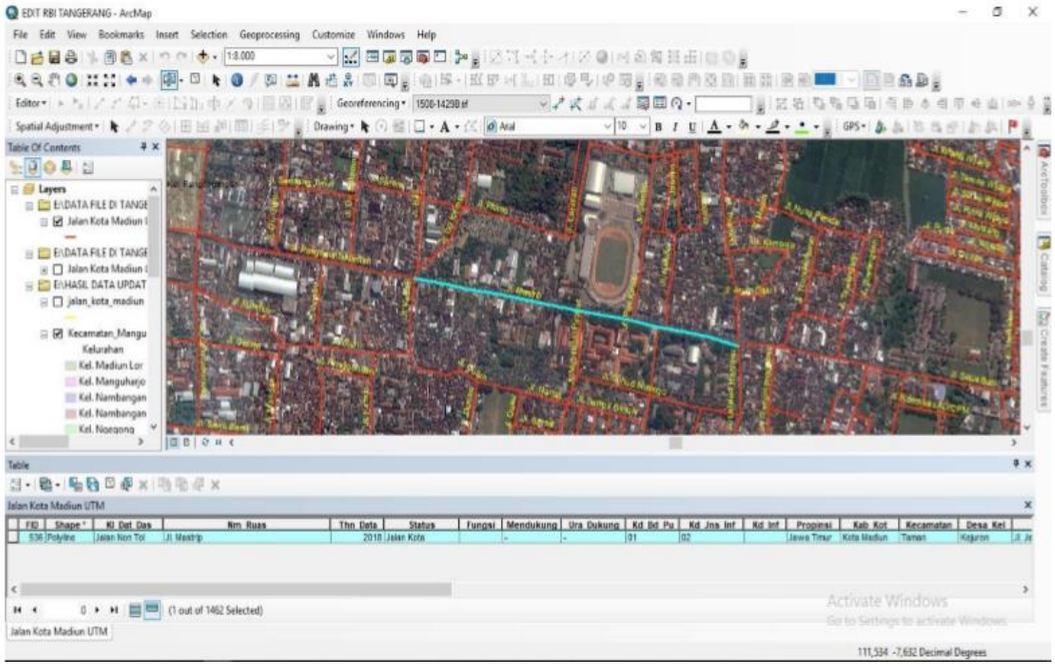

2. Rasio rumah layak huni

Untuk realisasi Rasio Rumah Layak Huni yang dilakukan melalui program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) belum mencapai target karena mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 tidak ada program bantuan RTLH. Hal tersebut disebabkan adanya peraturan baru mengenai Hibah dan Bansos sehingga baru tahun 2018 program bantuan RTLH tersebut dilaksanakan. Setelah dilakukan verifikasi pada tahun 2019 didapatkan sebanyak 132 rumah yang berhak menerima Bansos RTLH.

Adapun dari 430 unit rumah yang tidak layak masih terdapat 20 unit rumah yang tidak menerima bantuan RTLH disebabkan beberapa hal antara lain : target sasaran penerima bantuan yang tidak masuk pada Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 57/HUK/2017 tentang Penetapan data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin Tahun 2017, warga melakukan perbaikan sendiri serta adanya penolakan dari penerima bantuan yang menolak program tersebut. Perhitungan Rasio Rumah layak Huni sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah rumah layak huni}}{\text{Jumlah seluruh rumah}} \times 100\% = \frac{42.849}{42.869} \times 100\% = 99{,}95\%$$

3. Persentase penurunan angka kecelakaan

Indikator kinerja persentase penurunan angka kecelakaan mengalami peningkatan dari target 1.50% menjadi 1.64% yang berarti capaian kinerjanya adalah 109%. Dalam peningkatan kinerja dibanding dari realisasi tahun 2018 juga mengalami peningkatan dari 1.61 % menjadi 1.64%. Persentase ini didapat dari

data kecelakaan yaitu berturut-turut dari tahun 2018 dan 2019 yaitu 244 dan 240 kejadian kecelakaan dengan menggunakan rumus penghitungan sebagai berikut :

$$\% = \frac{Jml\ Laka\ Th.\ 2018 - Jml\ Laka\ Th.2019}{Jml\ Laka\ Th.\ 2018}$$

$$\% = \frac{244 - 240}{244}$$

$$= 1{,}64\ \%$$

Prestasi penghargaan yang diraih oleh Dinas Perhubungan Kota Madiun pada tahun 2019 yaitu Penghargaan Wahana Tata Nugraha dari Kementerian Perhubungan RI.

Tujuan 3 Misi 3 dan Sasaran 2 terdapat 2 indikator keberhasilan yaitu :

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

   Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebagai indikator pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia digunakan untuk menilai kinerja program perbaikan kualitas lingkungan hidup. IKLH juga dapat digunakan sebagai bahan informasi dalam mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Indeks kualitas lingkungan hidup yang didasarkan pada data Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas udara, Indeks Kualitas Tutupan lahan. Adapun pembobotan untuk setiap indikator terdiri dari 30 % untuk pencemaran air, 30 % untuk pencemaran udara, dan 40 % untuk tutupan hutan.

   IKLH Kota Madiun tahun 2019 dengan target yang tidak tercapai dan mengalami penurunan bila dibandingkan IKLH tahun 2018, maka secara otomatis target RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) juga dan tidak tercapai. Bila dibandingkan dengan target dan capaian IKLH Provinsi Jawa Timur untuk Kota Madiun masih berada dibawahnya.

   Penurunan IKLH Kota Madiun dipengaruhi oleh penurunan nilai Indek Kualitas Air (IKA) dan nilai Indek Kualitas Udara (IKU). Kondisi di Kota Madiun tahun 2019 nilai IKA dan IKU mengalami penurunan sedangkan IKTL mengalami kenaikan.

   a. Penurunan IKA Hasil perhitungan Indeks Kualitas Air Tahun 2019 sebesar 76,70 menurun dibandingkan IKA tahun 2018 sebesar 76,89.Dari data hasil uji laboratorium air sungai selama setahun menunjukkan bahwa beberapa parameter melebihi baku mutu. Penurunan kualitas air dipengaruhi oleh terjadinya kemarau panjang sehingga konsentrasi pollutan dalam air sungai tinggi yang tentu saja sangat berpengaruh terhadap kualitas air sungai yang dipantau. Selain itu angka parameter total coliform sangat tinggi di atas baku mutu, total coliform merupakan indikasi adanya limbah pembuangan kotoran manusia dan hewan dalam aliran air sungai. Dimana di Kota Madiun belum

ada IPLT untuk menampung limbah tinja, sehingga dimungkinkan limbah tinja dibuang ke sungai yang akan mencemari air sungai.

b. Penurunan IKU Hasil perhitungan Indeks Kualitas Udara Tahun 2019 sebesar 84,38 masih berada pada kategori relatif baikmeskipun menurun dibandingkan IKU tahun 2018 sebesar 85,50. Namun, secara umum menurunnya curah hujan akibat musim kemarau merupakan penyebab utama penurunan kualitas udara di Kota Madiun. Kemarau panjang menyebabkan tidak ada hujan yang bisa mengurangi pengendapan (pencucian) polutan di udara oleh proses yang dinamakan rain washing. Dengan kondisi udara yang stagnan, cuaca cerah, lapisan inversi suhu atau kecepatan angin yang rendah itulah memungkinkan polusi udara tetap berada di udara sehingga mengakibatkan peningkatan konsentrasi polutan yang tinggi. Selain itu meningkatnya jumlah kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 di Wilayah Kota Madiun juga berpotensi meningkatkan emisi gas buang kendaraan bermotor yang dapat mencemari kualitas udara.

c. Peningkatan IKTL Hasil perhitungan Indeks Kualitas Tutupan Lahan Tahun 2019 sebesar 38,87 meningkat dibanding tahun 2018 yaitu 38,76. Peningkatan IKTL dipengaruhi adanya penambahan ruang terbuka hijau dari 632,21 Ha menjadi 634,86. Realisasi tahun 2019 diperoleh dengan rincian sebagai berikut :

   = (Indeks penc. airx30%)+(Indeks penc.udarax30%)+ (Indeks tutupan lahanx40%) =(30% X 76,70) + (30% X 84,38) + (40% X 38,87)

   = 23,01 + 25,314 + 15,55

   = 63,87

   Untuk penambahan RTH ditangani oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Kota Madiun dalam upaya menjaga kualitas lingkungan di Kota Madiun yaitu :

a. Dengan makin banyaknya industri maka Dinas Lingkungan Hidup harus lebih sering melakukan monitoring dan evaluasi terhadap industriindustri tersebut mulai dari awal pendirian sampai dengan pelaksanaan operasional kegiatan ;

b. Sarana dan prasarana sudah banyak di penuhi dan meningkatnya volume sampah dapat ditekan karena banyak berdiri bank-bank sampah baik yang sudah berbadan hukum atau belum, dengan sarana prasarana yang tersedia kinerja meningkat, kerjasama yang baik dengan satgas kebersihan yang masuk ke TPS serta pekerja profesional di TPA yang memilah sampah. Sehingga sampah dari tahun ke tahun yang masuk ke TPA di Winongo dapat di tekan;

c. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam upaya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan/pelestarian lingkungan hidup maka Dinas

Lingkungan Hidup meningkatkan sosialisasi dan pendekatan serta meningkatkan kerjasama dengan masyarakat, Dinas terkait dan pihak-pihak yang terkait untuk memberikan yang terbaik berkenaan dengan lingkungan hidup Kota Madiun agar semakin baik dan sehat

d. Menghadapi permasalahan adanya badan usaha/instansi yang belum mempunyai dokumen lingkungan maka ditingkatkan sosialisasi, pembinaan dan pengawasan serta pendekatan kepada pelaku usaha agar segera memiliki dokumen pengelolaan lingkungan sesuai prosedur yang berlaku.
e. Adanya usaha/kegiatan yang belum memenuhi persyaratan administratif dan teknis tentang pengelolaan limbah B3. Tahun 2018 sudah banyak yang melakukan koordinasi pada DLH tetapi belum memenuhi persyaratan sehingga akan lebih intensif melakukan pembinaan ,sosialisasi dan pemantauan
f. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dengan Dinas terkait

2. Prosentase Ruang Yang Dimanfaatkan RTRW

Pada pelaksanaan tahun 2019 untuk indikator kinerja sasaran Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai RTRW mencapai realisasi 100% dari target 100% dengan capaian sebesar 100%. Pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsinya sudah dilakukan pengendalian melalui monitoring, pendataan dimana 100% wilayah perkotaan sudah dimanfaatkan.

Upaya yang sudah dilakukan pada tahun 2019 adalah :

1. Perlindungan dan Konservasi lingkungan hidup
2. Peningkatan kualitas dan akses informasi lingkungan hidup
3. Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
4. Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
5. Perencanaan, pengendalian dan pemanfaatan ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tahun 2019 sebagai Pengendalian Pemanfaatan Ruang khususnya Ruang Terbuka Hijau Privat. Dalam penyelenggaraan tupoksi dimaksud, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang memberikan rekomendasi terkait permohonan pendirian bangunan baru/rehabilitasi. Dalam hal penyediaan tanah untuk RTH Publik diarahkan/disarankan pada pemenuhan RTH Publik di masing-masing kelurahan melalui pemanfaatan dan penggunaan tanah bengkok yang ada di wilayah Kelurahan masing-masing. Disamping tanah bengkok juga diutamakan pengembang untuk memenuhi RTH

Tabel VIII.18
Ruang Terbuka Hijau di Kota Madiun

RTH	Luas	Satuan
RTH Jalur Jalan Kota	57,90	Ha
RTH Taman, Monumen, Gerbang Kota	59,62	Ha
RTH Lapangan Olahraga dan Makam	40,61	Ha
RTH Hutan	14,62	Ha
RTH Pengaman Jalur KA, SUTT dan Sungai	120,33	Ha
RTH Privat		
- Lahan Pekarangan	365,52	Ha
- RTH Taman	1,66	Ha
- RTH Jalur Jalan	4,67	Ha
Jumlah Total	**664,93**	**Ha**

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

4. Misi Keempat : Meningkatkan dan Memeratakan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat

Tujuan Pertama : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataaan Kesejahteraan Masyarakat

Tabel VIII.19
Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan I

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target Akhir Tahun RPJMD	Realisasi	
				2018 (n-1)	2019 (n)
1	Meningkatnya Iklim Investasi yang Kondusif dan Penyerapan Tenaga Kerja	Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi	3,14%	-30,38%	0,63%
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,08	0,81	4,01
2	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor-Sektor Unggulan Daerah	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	23,86%	23,21%	25,93%
		Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri	17,2%	17,48%	17,68%
		Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata	6,29%	8,63%	8,95%

Sumber Data : DPMPTSP, Badan Pusat Statistik

Tabel VIII.20
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target Akhir Tahun RPJMD	Realisasi Tahun 2019	% Capaian Kinerja
1	Meningkatnya Iklim Investasi yang Kondusif dan Penyerapan Tenaga Kerja	Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi	3,14%	0,63%	20%
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,08	4,01	121,06%
2	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor-Sektor Unggulan Daerah	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	23,86%	25,93%	108,70%
		Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri	17,2%	17,68%	103,7%
		Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata	6,29%	8,95%	142,36%

Sumber Data : DPMPTSP, Badan Pusat Statistik

Tabel VIII.23
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Provinsi dan Realisasi Nasional

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Provinsi 2019	Realisasi Nasional 2019
1	Meningkatnya Iklim Investasi yang Kondusif dan Penyerapan Tenaga Kerja	Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi	0,63%	-	-
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,01	3,92	5,28
2	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor-Sektor Unggulan Daerah	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	25,93%	18,66%	-
		Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri	17,68%	30,24%-	-
		Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata	8,95%	6,36%	-

Sumber Data : DPMPTSP, Badan Pusat Statistik

Tujuan 1 Misi 4 dan Sasaran 1 terdapat 2 indikator keberhasilan yaitu :

1. Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi

Pada indikator nilai realisasi investasi DPMPTSP mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.968.310.521. Dari realisasi tahun 2018 Rp. 966.733.731.153 menjadi sebesar Rp. 968.702.041.674 pada tahun 2019, Indikator nili realisasi investasi tahun 2019 telah melebihi target RPJMD yaitu Rp. 361.000.000.000.

Nilai investasi sangat bergantung pada pihak ketiga (investor) dan dipengaruhi oleh banyak faktor sehingga cenderung sulit diprediksi dan nilainya sangat

fluktuatif. Sedangkan untuk kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN Nilai investasi PMDN tahun 2019 naik sebesar 20,06% diperoleh dengan rumus :

$$= \frac{\text{Realisasi Investasi PMDN 2019 - Realisasi investasi PMDN 2018}}{\text{Realisasi PMDN Tahun 2018}} \times 100\%$$

$$= \frac{968.702.041.674 - 962.596.618.711}{962.596.618.711} \times 100\ \%$$

$$= 0{,}63\ \%$$

Perkembangan nilai investasi selama rentang waktu tahun 2015 sampai dengan 2019 sebagaimana grafik di bawah

Gambar VIII.6
Perkembangan Nilai Investasi Kota Madiun tahun 2015-2019

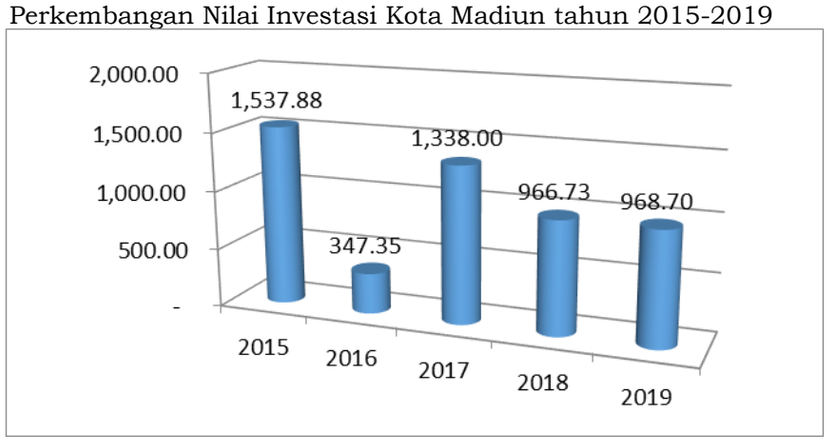

Upaya-upaya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Madiun dalam rangka meningkatkan nilai investasi di Kota Madiun adalah sebagai berikut :

a. Melakukan promosi investasi
b. Melakukan koordinasi dan evaluasi pelaskanaan investasi
c. Melakukan kerjasama investasi
d. Penyusunan rencana umum penanaman modal (RUPM)
e. Peningkatan pelayanan perijinan dengan membangun sistem informasi pelayanan perijinan dan administrasi pemerintah

2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pengangguran Terbuka atau sering juga diistilahkan dengan pengangguran penuh adalah jumlah penduduk usia kerja yang sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan usaha, atau merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, atau sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah perbandingan antara jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja. Kegunaan dari indikator pengangguran terbuka ini baik dalam satuan unit (orang) maupun persen berguna sebagai acuan pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru.

Selain itu, perkembangannya dapat menunjukkan tingkat keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun. Lebih penting lagi, indikator ini digunakan sebagai bahan evaluasi keberhasilan pembangunan perekonomian, selain angka kemiskinan. Tingkat pengangguran Terbuka (TPT) Kota Madiun juga merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pengggangguran.

Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Madiun Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut :

Gambar VIII.7
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Madiun tahun 2015-2019

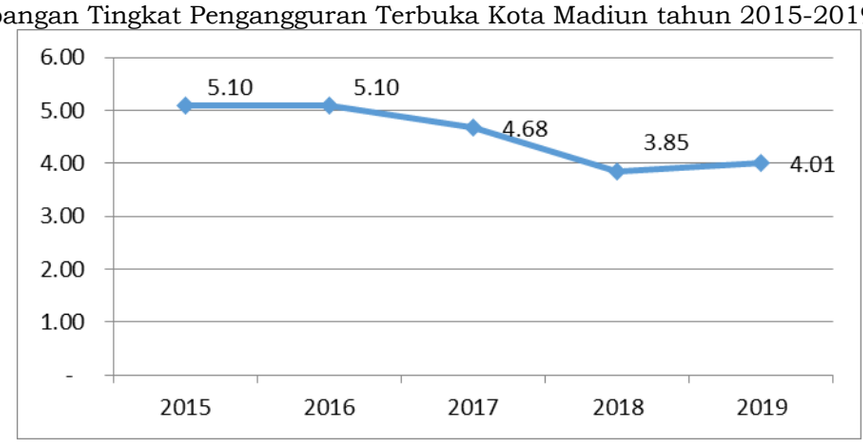

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Madiun, Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Madiun Tahun 2019 adalah sebesar 4,01 %, yaitu perbandingan antara pengangguran sebesar 3.776 orang dengan angkatan kerja sebesar 94.105 orang. Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 0,16 % dari TPT tahun 2018 yaitu sebesar 3,85 % atau 3.483 orang, dengan kenaikan jumlah pengangguran sebanyak 293 orang. Peningkatan Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2019 ini dikarenakan adanya peningkatan jumlah penduduk usia kerja (15 tahun lebih) sebesar 0,52 % dari tahun sebelumnya atau naik sebanyak 732 orang. Peningkatan jumlah usia kerja di Kota Madiun ini dibarengi dengan peningkatan angkatan kerja sebanyak 3.747 orang, 293 orang diantaranya belum tertampung dalam lapangan kerja dan yang 3.454 orang sudah tertampung (bekerja). Apabila di bandingkan dengan target TPT

tahun 2019 sebesar 5,08 %, realisasi TPT tahun 2019 sebesar 4,01 % maka capaian kinerja adalah sebesar 121,06%. Namun apabila Capaian Kinerja TPT lebih kecil dari target maka Capaian kinerja semakin baik, karena angka pengangguran lebih kecil dari target.

Peningkatan jumlah penduduk usia kerja (15 tahun lebih) sebesar 0,52 % dari tahun sebelumnya atau naik sebanyak 732 orang dapat disampaikan sebagai berikut :

Tabel III.22
Penduduk Usia 15 Tahun Kota Madiun
ke atas menurut kegiatan Agustus Tahun 2018-2019

Kegiatan	2018	2019
Angkatan Kerja	**90.358**	**94.105**
- Bekerja	86.875	90.329
- Pengangguran	3.483	3.776
Bukan Angkatan Kerja	**49.932**	**46.917**
- Sekolah	11.526	13.199
- Mengurus Rumah tangga	32708	28.445
- Lainnya	5.698	5.273
Jumlah	**140.290**	**141.022**

Sumber Data : Badan Pusat Statistik

Adapun jumlah pengangguran terbuka tahun 2019 sejumlah 3.776 orang tersebut di atas dapat dikelompokan sebagai berikut :

Tabel VIII.23
Kategori Pengangguran Terbuka di Kota Madiun Tahun 2019

No	Kategori	Jumlah
1	Tidak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan	2.735
2	Tidak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha	272
3	Tidak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan	171
4	Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja	598

Sumber Data : Badan Pusat Statistik

Memperhatikan jumlah kondisi tersebut maka upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Madiun adalah :

a. Meningkatkan kualitas pencari kerja dengan memberikan pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja
b. Menyelenggarakan lomba cipta inovasi teknologi tepat guna dan gelar teknologi tepat guna tingkat nasional dalam rangka mendorong dan memotivasi masyarakat terutama generasi muda untuk berinovasi sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat
c. Optimalisasi Informasi antar Kerja Melalui Peningkatan Efektifitas Informasi Pasar Kerja (IPK)

d. Melakukan Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat
e. Pengembangan Kelembagaan Produktifitas dan Pelaksanaan Kewirausahaan
f. Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja
g. Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai
h. Menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan untuk membuka peluang pekerjaan
i. Updating data pengangguran tenaga kerja sebagai bahan untuk pengambilan kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah penganggutan di Kota Madiun

Selanjutnya untuk Sasaran Strategis "Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor-Sektor Unggulan Daerah" terdiri dari 3 indikator yang berkaitan dengan sektor perdagangan, industri dan pariwisata. Sektor perdagangan, industri dan pariwisata (akomodasi dan makan minum) merupakan sektor yang dominan kontribusinya terhadap PDRB Kota Madiun dalam beberapa tahun terakhir. Sektor-sektor tersebut memang memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan karena Kota Madiun merupakan pusat perdagangan serta perbelanjaan di wilayah Jawa Timur Bagian Barat. Selain itu dengan semakin berkembangnya usaha ritel seperti supermarket dan swalayan secara tidak langsung akan mampu meningkatkan peranan sektor ini.

Indikator kinerja persentase pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan, industri dan pariwisata digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor-sektor unggulan daerah. Persentase pertumbuhan dihitung menggunakan angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK), yaitu dengan membandingkan selisih antara angka PDRB tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya pada masing-masing sektor tersebut, dibagi dengan angka PDRB sektor tersebut pada tahun sebelumnya dikalikan 100%.

Indikator keberhasilan untuk Misi 4 Tujuan 1 Sasaran 2 terdiri dari 3 Indikator yaitu :

1. Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan

   Besaran pertumbuhan sektor perdagangan tahun 2019 adalah sebesar 25,93%

   Fasilitas perdagangan yang berperan menggerakkan perekonomian di Kota Madiun diantaranya adalah tersedianya pasar, baik pasar tradisional maupun pasar modern. Aktivitas perdagangan di pasar-pasar tersebutlah yang sangat berperan dalam meningkatkan kontribusi sektor perdagangan. Jumlah pasar yang dikelola oleh Dinas Perdagangan Kota Madiun adalah sejumlah 17 unit pasar yang tersebar dalam 3 Kecamatan di Kota Madiun, dengan salah satu diantaranya

adanya Pasar Besar Madiun yang menampung pedagang dari wilayah Kota Madiun dan sekitarnya

2. Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri

Sektor industri merupakan kontributor terbesar kedua terhadap PDRB Kota Madiun. Pada tahun 2019 sektor industri mampu memberikan kontribusi sebesar 17,68%. Peranan terbesar pada sektor industri adalah pada sub sektor industri alat angkutan serta industri makanan dan minuman. Industri alat angkutan didominasi oleh industri besar, sedangkan industri makanan dan minuman didominasi oleh industri kecil. Melihat luas wilayah Kota Madiun yang relative kecil, pengembangan industri kecil dan industri rumah tangga merupakan pilihan strategi yang lebih realistis. Beberapa pelatihan telah diberikan kepada industri kecil dan industri rumah tangga, seperti pelatihan pembuatan aneka kue maupun pelatihan pengemasan makanan yang ditujukan bagi pelaku industri makanan dan minuman. Secara umum, besarnya kontribusi sektor industri akan sangat tergantung pada kedua sub sektor tersebut. Apabila kontribusi kedua sub sektor ini naik, maka kontribusi sektor industri juga akan naik, namun manakala kontribusi kedua sub sektor ini turun, maka akan menurun pula kontribusi sektor industri terhadap PDRB.

3. Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata

Untuk pertumbuhan sektor pariwisata di Kota Madiun adalah sebesar 8,95%. Dikarenakan Kota Madiun tidak mempunyai destinasi wisata yang bersifat alam, maka upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kontribusi sektor tersebut adalah dengan mengembangkan wisata buatan maupun wisata budaya. Sektor pariwisata merupakan sektor yang masih potensial untuk dikembangkan, terutama dari subsektor penyediaan akomodasi. Dengan semakin banyaknya hotel yang berdiri di Kota Madiun, seharusnya juga diimbangi dengan pengembangan berbagai fasilitas pendukung untuk menarik wisatawan datang dan berkunjung ke Kota Madiun. Misalnya melalui pengembangan budaya khas Kota Madiun, pengembangan makanan khas, serta memperbanyak even-even yang diselenggarakan di Kota Madiun.

Adapun Program Kerja 2019-2020 dalam rangka meningkatkan destinasi pariwisata di Kota Madiun adalah sebagai berikut :

1. Mengembangkan Sunday Market
2. Pembangunan Patung Pendekar di Proliman Jalan Thamrin
3. Pembangunan dan penataan pusat kuliner di Jalan Rimba Kaya
4. Penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima
5. Penataan Pasar Bunga
6. Penataan Pedistrian sepanjang Jalan Pahlawan
7. Pujasera Pasar Sleko

8. Penggantian pohon yang sudah tua dan lapuk dengan pohon berbunga
9. Pembangunan monumen selamat datang
10. Taman Nambangan jalan Mayjend Sungkono
11. Pembangunan Pecel Land
12. Penataan Sumber Umis dan Pasar Seni dan Sentra Oleh-Oleh
13. Menambah event-event tingkat kota, provinsi aupun nasional
14. Menyelenggarakan festival seni dan budaya

Gambar VIII.8
Penyelenggaraan Festival seni dan budaya Kota Madiun

15. Melakukan pemeliharaan terhadap cagar budaya terutama Masjid dan Makam Kuncen serta Masjid dan Makam Taman agar lebih terawat dan menarik minat wisatawan untuk mengunjunginya serta berusaha untuk melakukan penelitian keabsahan benda/bangunan yang diduga cagar budaya yang masih tersisa untuk ditetapkan sebagai benda/bangunan cagar budaya yang bisa dilestarikan.

Tujuan Kedua : Mewujudkan Stabilitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Dinamis dan Kondusif

Tabel VIII.24
Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan II

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target Akhir Tahun RPJMD	Realisasi	
				2018 (n-1)	2019 (n)
1	Meningkatnya Keamanan, Ketertiban dan Kerukunan dalam Masyarakat	Persentase Penyelesaian K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	98%	100%	100%
		Prosentase Potensi Konflik yang Diselesaikan	100%	100%	100%

Sumber Data : Satpol PP, Bakesbangpol

Tabel VIII.25
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target Akhir Tahun RPJMD	Realisasi Tahun 2019	% Capaian Kinerja
1	Meningkatnya Keamanan, Ketertiban dan Kerukunan dalam Masyarakat	Persentase Penyelesaian K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	98%	100%	102,04%
		Prosentase Potensi Konflik yang Diselesaikan	100%	100%	100%

Sumber Data : Satpol PP, Bakesbangpol

Tabel VIII.26
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Provinsi dan Realisasi Nasional

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Provinsi 2019	Realisasi Nasional 2019
4.1.3	Meningkatnya Keamanan, Ketertiban dan Kerukunan dalam Masyarakat	Persentase Penyelesaian K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	100%	-	-
		Prosentase Potensi Konflik yang Diselesaikan	100%	-	-

Sumber Data : Satpol PP, Bakesbangpol

Sasaran Meningkatnya Keamanan, Ketertiban dan Kerukunan dalam Masyarakat dengan indikator keberhasilan :

1. Persentase Penyelesaian K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)

   Penghitungan rumus Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) Kota dapat dihitung dengan menggunakan rumus : jumlah penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) yang tertangani dibandingkan dengan pelanggaran K3 yang masuk mengalami kenaikan di tahun 2019 sebesar 100%. Dengan demikian indikator kinerja sasaran Angka Pelanggaran Ketertiban dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 98,95% mengalami kenaikan sebesar 1,05%.

   $$= \frac{\text{Jumlah penyelesaian pelanggaran K3}}{\text{Jumlah pelanggaran K3 yang masuk}} \times 100\%$$

   $$= \frac{3.628}{3.628} \times 100\% = 100\%$$

   Capaian target indikator kinerja sasaran ditahun 2019 sebesar 98% sehingga telah mencapai target RKT tahun 2019. Kenaikan ini terjadi dikarenakan bahwa isu strategis pelanggaran ketertiban umum ditahun 2019 pada pelanggaran reklame. Hal ini dikarenakan adanya kebijakan Bapak Walikota Madiun untuk penataan reklame di Kota Madiun agar wilayah Kota Madiun indah dan bersih, selain itu juga menuju Kota Smartcity dimana reklame ditata sesuai dengan aturan dan peruntukkannya. Sehingga pelanggaran reklame yang ada baik reklame insidentil dan permanen yang sudah rusak, melanggar dan tidak berijin ditindaklanjuti oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja melalui kegiatan

penertiban pelanggaran Perda dan patroli wilayah pelanggaran Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Adapun upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka mengantisipasi dan menekan angka pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah :

a. Dengan adanya kebijakan Bapak Walikota Madiun yang tidak mengijinkan pemasangan reklame secara fisik karena akan diganti dengan videotron, maka anggota Satuan Polisi Pamong Praja meningkatkan patroli kawasan pemasangan reklame di wilayah Kota Madiun. Sehingga pelanggaran reklame dapat diatasi dan diselesaikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur penertiban.
b. Sehubungan dengan implementasi Panca Karya Program Kegiatan Bapak Walikota Madiun, utamanya karya membangun. Banyak kebijakan yang dikeluarkan Bapak Walikota Madiun, diantaranya pembangunan taman dan infrastuktur Kota Madiun. Sehingga perlu penertiban dan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk ditertibkan dan berjualan di tempat yang telah disediakan. Seperti yang telah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan jajaran samping untuk penertiban pra yustisi pelanggaran Perda dan Perwal.
c. Untuk mengatasi pelanggaran anak jalanan Satuan Polisi Pamong Praja mengoptimalkan patroli wilayah Kota Madiun utamanya di perempatan traficlight di wilayah Kota Madiun. Sehingga setiap penertiban anak jalanan diberikan pembinaan dan pengarahan untuk tidak mengamen di lampu merah dan mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
d. Dengan mengoptimalkan patroli dan jejaring sosial untuk mendapatkan informasi pelanggaran anak sekolah yang bolos sekolah, Satuan Polisi Pamong Praja mengadakan operasi penertiban anak sekolah yang bolos sekolah di jam belajar. Dan dilakukan pembinaan yang selanjutnya diserahkan kepada pihak sekolahan melalui Dinas Pendidikan dan memanggil orang tua pelajar.

2. Prosentase Potensi Konflik yang Diselesaikan

Penghitungan rumus potensi konflik yang diselesaikan Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Potensi konflik yang tidak terjadi}}{\text{Potensi konflik seluruhnya}} \times 100$$

$$= \frac{50}{52} \times 100 = 96{,}15\%$$

Pada Tahun 2019 terjadi konflik sosial di dalam tubuh Perguruan Pencak Silat Persaudaraan Setia Hati Terate dimana terjadi perselisihan antar 2 (dua) kubu yaitu Kubu Parapatan Luhur 2016 dan Kubu Parapatan Luhur 2017. Perselisihan

terjadi di Jl Jati Wangi Kel. Klegen Kec Kartoharjo dan di Padepokan Setia Hati Terate Jl Merak Kel. Nambangan Kidul Kec Manguharjo Kota Madiun. Namun demikian kedua konflik sosial tersebut telah dapat diselesaikan dengan baik oleh Tim Penanganan Terpadu Konflik Sosial dan Forkopimda Kota Madiun melalui Rapat Koordinasi dan mediasi kesepakatan kedua kubu sehingga tidak menimbulkan gangguan kerawanan sosial dan kondisi keamanan, ketertiban dan ketentraman Kota Madiun tetap kondusif. Sedangkan untuk kepengurusan Persaudaraan Setia Hati Terate diserahkan kepada internal Persaudaraan Setia Hati Terate

Gambar VIII.9.
Gambar potensi Konflik di Kota Madiun Tahun 2015-2019

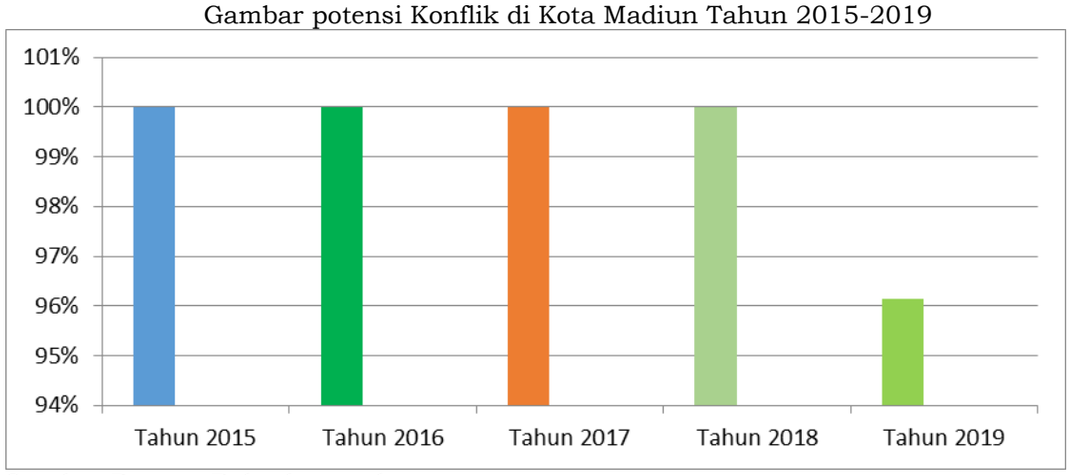

Sumber Data : Bakesbangpol

Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka meminimalisir terjadinya konflik di Kota Madiun yaitu :

1. Sosialisasi, sarasehan dan pembinaan kepada berbagai elemen masyarakat, pelajar dan generasi muda tentang kehidupan berbangsa dan bernegara,
2. Membentuk Forum Pembauran Kebangsaan dan Forum Kerukunan Umat Beragama sehingga tidak terjadi gesekan-gesekan dalam masyarakat untuk menciptakan rasa aman dan kondusif di Kota Madiun.
3. Penyusunan Peta Rawan Konflik yaitu suatu kajian tentang wilayah rawan konflik di Kota Madiun. Hasil yang diharapkan dari Pemetaan rawan konflik adalah untuk mengantisipasi tidak terjadinya potensi konflik sosial terutama memberikan gambaran dan pemetaan rawan konflik sosial di Kota Madiun, sehingga potensi konflik bisa terdeteksi dan tidak terjadi di Kota Madiun.

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kota Madiun tahun 2019, total anggaran belanja tahun 2019 adalah sebesar Rp. 1.285.587.599.826,46. Anggaran sebesar itu terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 588.015.295.942,46 dan belanja langsung sebesar Rp. 697.572.303.884,00. Belanja tidak langsung terdiri dari jenis belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung terdiri dari jenis belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Belanja langsung digunakan untuk mendanai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Madiun, sebagai penjabaran strategi dan kebijakan sebagaimana yang dimuat dalam dokumen perencanaan. Penganggaran program dan kegiatan pada belanja langsung dilaksanakan untuk mencapai target sasaran, sehingga diharapkan secara langsung akan dapat berpengaruh terhadap pencapaian target sasaran strategis. Sedangkan realisasi belanja APBD Kota Madiun tahun 2019 berdasarkan kelompok belanja adalah sebagai berikut

Tabel VIII.27
Realisasi APBD Kota Madiun tahun 2019

Kelompok Belanja	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Tidak Langsung	544.763.013.542,14	406.498.220.133,46	**74,62**
Belanja Langsung	833.032.855.395,08	742.013.101.222,29	**89,07**
Total APBD	**1.377.795.868.937,22**	**1.148.511.321.355,75**	**83,35**

Sumber Data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun

Anggaran Belanja Langsung sebagaimana tabel tersebut terdiri dari program-program rutin operasional kantor yang melekat pada seluruh perangkat daerah serta program-program strategis masing-masing perangkat daerah sesuai dengan bidang urusan yang menjadi kewenangannya. Adapun besaran anggaran dan realisasi belanja langsung untuk program rutin dan operasional seluruh perangkat daerah adalah sebagaimana berikut :

Tabel VIII.28
Realisasi Belanja Langsung untuk Program rutin dan operasional seluruh Perangkat Daerah

No	Program rutin operasional	Anggaran	Realisasi	(%)
1	**Program pendukung (4 program)**	**146.478.839.925,00**	**140.364.231.556,00**	**95,83**

Tabel VIII.29
Penyerapan anggaran per sasaran sesuai APBD tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.1.1	Meningkatnya partisipasi masyarakat dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dalam Pembangunan	Presentase Usulan Masyarakat yang diakomodir dalam RKPD	2.934.974.800	2.717.653.387	92.60
1.1.2	Meningkatnya pemberdayaan perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	3.065.883.782	2.697.043.863	87.97
2.1.1	Meningkatnya tata kelola birokrasi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	102.340.000	98.581.796	96.33
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	1.024.657.000	867.649.175	84.68
		Indeks Kepuasan Masyarakat	732.228.000	700.883.839	95.72
2.1.2	Meningkatnya pengelolaan keuangan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	1.736.992.000	1.659.981.518	95.57
		Tingkat keterbukaan informasi publik	28.193.568.000	27.575.061.736	97.81
3.1.1	Meningkatnya kualitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	100.461.546,38	91.182.672.181,18	90.76
3.1.2	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	76.879.019.000	60.320.215.640,1	78.46
3.1.3	Meningkatnya kualitas infrastruktur, permukiman dan prasarana transportasi kota	Rasio Panjang Jalan Kota dalam kondisi baik	96.749.198.360	88.957.917.483	91.95
		Rasio Rumah layak Huni	7.409.753.840	6.822.002.291,21	92.07
		Persentase Penurunan Angka Kecelakaan	6.792.121.000	6.007.066.399	88.44
3.1.4	Meningkatnya penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	2.383.006.000	1.936.671.097	81.27
		Presentase pemanfaatan ruang sesuai RTRW	775.039.920	600.656.009	77.50
4.1.1	Meningkatnya iklim investasi yang kondusif dan penyerapan tenaga kerja	Persentase pertumbuhan nilai investasi	969.231.000	820.060.472	84.61
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3.133.616.380	2.876.263.672	91.79
4.1.2	Meningkatnya pertumbuhan	Persentase pertumbuhan	7.175.045.504	5.089.678.751	70.94

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
	ekonomi sektor-sektor unggulan daerah	PDRB sektor perdagangan			
		Persentase pertumbuhan PDRB sektor industri	1.152.354.000	1.039.243.495	90.18
		Persentase pertumbuhan PDRB sektor pariwisata	2.172.902.080	1.656.267.059	76.22
4.1.3	Meningkatnya keamanan, ketertiban dan kerukunan dalam masyarakat	Persentase penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	1.936.793.000	1.547.710.672	79.91
		Persentase potensi konflik yang diselesaikan	869.544.716	763.543.838	87.81

Tabel VIII.30
Efisiensi anggaran belanja per sasaran tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Capaian Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
1.1.1	Meningkatnya partisipasi masyarakat dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dalam Pembangunan	Presentase Usulan Masyarakat yang diakomodir dalam RKPD	100.16	92.60	7.56
1.1.2	Meningkatnya pemberdayaan perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	100.27	87.97	12.3
2.1.1	Meningkatnya tata kelola birokrasi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	100	96.33	3.67
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	96	84.68	11.32
		Indeks Kepuasan Masyarakat	111.26	95.72	15.54
2.1.2	Meningkatnya pengelolaan keuangan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	100	95.57	4.43
		Tingkat keterbukaan informasi publik	100	97.81	2.19
3.1.1	Meningkatnya kualitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	101.30	90.76	10.54
3.1.2	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	100.20	78.46	21.74

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Capaian Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
3.1.3	Meningkatnya kualitas infrastruktur, permukiman dan prasarana transportasi kota	Rasio Panjang Jalan Kota dalam kondisi baik	100.69	91.95	8.74
		Rasio Rumah layak Huni	100.53	92.07	8.46
		Persentase Penurunan Angka Kecelakaan	100.69	88.44	12.25
3.1.4	Meningkatnya penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	93.13	81.27	11.86
		Presentase pemanfaatan ruang sesuai RTRW	100	77.50	22.5
4.1.1	Meningkatnya iklim investasi yang kondusif dan penyerapan tenaga kerja	Persentase pertumbuhan nilai investasi	20	84.61	-64.61
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	121.06	91.79	29.27
4.1.2	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor-sektor unggulan daerah	Persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	108.70	70.94	37.76
		Persentase pertumbuhan PDRB sektor industri	103.70	90.18	13.52
		Persentase pertumbuhan PDRB sektor pariwisata	142.36	76.22	66.14
4.1.3	Meningkatnya keamanan, ketertiban dan kerukunan dalam masyarakat	Persentase penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	102.04	79.91	22.13
		Persentase potensi konflik yang diselesaikan	100	87.81	12.19

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa secara umum target kinerja tahun 2019 pada masing-masing sasaran sudah berhasil dicapai, terlihat dengan nilai rata-rata capaian kinerja yang sudah mencapai 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa program dan kegiatan telah dilaksanakan dengan baik, namun keluaran dan hasilnya sudah efektif dalam mencapai target yang ditetapkan.

Adapun perbandingan antara pencapaian kinerja dan anggaran pada tabel di atas, tidak bisa serta merta ditetapkan tingkat efisiensinya, dikarenakan pada masing-masing indikator bisa jadi dibiayai oleh anggaran pada Perangkat lain yang justru tidak bersentuhan secara langsung. Karena pada dasarnya ada beberapa alokasi anggaran yang bersifat multiplier effect bagi indikator lainnya. Misalnya capaian kinerja yang cukup tinggi pada sektor pariwisata, tentunya meupakan efek samping dari pembangunan sarana prasarana jalan dan jembatan di Kota Madiun dan publikasi potensi Kota Madiun yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun.

LAMPIRAN: II.1 FORMAT IKK UNTUK KOTA
TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN
ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENIS DATA (TAHUN 2019)	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAERAH	Peraturan ttg Ketertiban Umum	1	Keberadaan PERDA IMB	Ada/tidak ada PERDA	Apabila ADA: Sebutkan legal formalnya. PERDA Nomor : ------ Tahun ------tentang ---	PERDA Nomor 04 Tahun 2011tentang Retribusi IMB	Ada	
			2	Rasio Rumah ber IMB	Jumlah Rumah ber IMB dibagi jumlah rumah 1 seluruhnya	- Jumlah rumah ber IMB sd. akhir Tahun 2019, sebanyak unit. - Jumlah seluruh rumah sd. akhir Tahun 2019, sebanyak Unit.	46.089 x 100% 57.568	80,06 %	
			3	Keberadaan PERDA tentang Ketertiban Umum	Ada/tidak ada PERDA Ketertiban Umum	Apabila ADA: Sebutkan legal formalnya.	PERDA Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Ada	
		Peraturan ttg kependudukan	4	Pengurusan E-KTP	Jumlah penduduk yang sudah terekam dalam E-KTP dibagi Jumlah penduduk yang wajib ber- KTP	- Jumlah penduduk yang sudah terekam dalam E-KTP - Jumlah penduduk yang wajib ber-KTP	158.762 x 100% 161.427	98,35 %	
			5	Pengurusan KIA	Prosentase Anak yang sudah memiliki KIA	- Jumlah Anak yang sudah memiliki KIA - Jumlah Anak yang seharusnya memiliki KIA	39.803 x 100% 48.647	81,82%	

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENIS DATA (TAHUN 2019)	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Personil Satpol PP (Kebijakan Ketersediaan aparat Trantibum)	6	Rasio personil SatpoL PP terhadap jumlah penduduk	Jumlah personil Satpol PP pada akhir tahun 2019 dibagi 10.000 penduduk x 100%	Personil Satpol PP (PNS) pada Tahun 2019, sebanyak = 41 orang Penduduk pada akhir tahun 2019, berjumlah = 210.115 orang	= 41 X 100% 210.115	4,6 per 10.000 penduduk	
		Kebijakan bidang Penanganan Bencana	7	Keberadaan PERDA tentang Penangangan Bencana	Ada atau tidak ada PERDA Penangangan Bencana	Apabila ADA: Sebutkan dasar hukumnya. PERDA Nomor : ------Tahun ------ tentang --- (yang mengatur Penanganan Bencana)	PERDA Nomor : 03 Tahun 2014 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana	Ada	
		Peraturan tentang Kebersihan Kota	8	Keberadaan peraturan tentang kebersihan Kota	Ada atau tidak ada PERDA Kebersihan Kota	Apabila ADA: Sebutkan dasar hukumnya, PERDA Nomor : ------Tahun ------ tentang -----	Perda Nomor 11 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	Ada	
2	KESELARASAN DAN EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DAN PEMERINTAH, SERTA ANTAR PEMERINTAHAN DAERAH DALAM RANGKA PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH	Penyampaian laporan kepada pemerintah	9	Ketepatan waktu penyampaian LPPD berdasarkan PP Nomor 13 tahun 2019,	Tepat atau tidak tepat penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan	Bukti Pengiriman : LPPD Tahun 2019 disampaikan pada tanggal 23 Maret 2020 sesuai surat pengantar Nomor 130/401.011/996/2020 tanggal 12 Maret 2020.	LPPD Tahun 2019 disampaikan pada tanggal 23 Maret 2020 sesuai surat pengantar Nomor 130/401.011/996/2020 tanggal 12 Maret 2020.	Tepat	
		Penyampaian laporan keuangan dan kinerja	10	Ketepatan waktu penyampaian Laporan keuangan dan Laporan kinerja berdasarkan PP 8/2008	Tepat atau tidak tepat penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan	Bukti Pengiriman: Laporan Keuangan 2019, disampaikan pada tanggal 2020 sesuai surat pengantar Nomor ----- tanggal -------2020	Laporan Keuangan 2019, disampaikan pada tanggal 29 Januari 2020 sesuai surat pengantar Nomor 900/337/401.202/2020 tanggal 28 Januari 2020	Tepat Tepat	

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENIS DATA (TAHUN 2019)	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						Laporan Kinerja tahun 2019. disampaikan pada tanggal 2020 sesuai surat pengantar Nomor------- tanggal 2020			
		Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)	11	Pemerintah Daerah yang Memiliki Peraturan tentang Penerapan SPM	Ada atau tidaknya Peraturan tentang penerapan SPM	Apabila ada, sebutkan		Ada	
		Hubungan antar daerah	12	Kerjasama dengan daerah lain	Jumlah MOU yang masih berlaku per tahun 2019	Jumlah MOU yang masih berlaku pada tahun 2019, sebanyak MOU yang terdiri dari: 1) MOU dengan tentang kerjasama --. 2) MOU dengan tentang kerjasama --. 3) Dst---	1) MOU dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah 2) MOU dengan PT PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Madiun tentang Peningkatan Pelayanan Kelistrikan 3) MOU dengan Organisasi Bantuan Hukum pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Cabang Madiun tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin 4) MOU dengan Lembaga Bantuan Hukum Imparcial Madiun tentang Bantuan	9 MOU	

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENIS DATA (TAHUN 2019)	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
							Hukum Untuk Masyarakat Miskin 5) MOU dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur tentang Elektronifikasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Optimalisasi Penerimaan Daerah 6) MOU dengan Kantor Pertanahan Kota Madiun tentang Kerjasama Bidang Pertanahan 7) MOU dengan Direktorat jendral Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika tentang Implementasi Gerakan Menuju 100 Smart City 8) MOU dengan PT BNI,TBk Cabang Madiun tentang Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai Daerah 9) MOU dengan Kantor		

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENIS DATA (TAHUN 2019)	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
							Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II tentang Optimalisasi Penerimaan Pajak Pusat dan Pajak Daerah		
3	KESELARASAN ANTARA KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH	Sinkronisasi Pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah	13	Kesesuaian prioritas pembangunan	Jumlah prioritas pembangunan daerah dibagi Jumlah prioritas pembangunan nasional [2]	- Prioritas pembangunan daerah (RKPD) mendukung prioritas pembangunan nasional, sebanyak 5 prioritas. - Prioritas pembangunan nasional ada sebanyak 5 program/agenda prioritas.	5 X 100% 5 -	100 %	
		Kewenangan	14	Urusan wajib yang diselenggarakan daerah	Jumlah urusan yang dilaksanakan daerah dibagi 24 (Jumlah urusan wajib di UU 23/2014) X 100%	Urusan Wajib yang dilaksanakan pada Tahun 2019 (APBD) = urusan.	23 Urusan Wajib x 100 % 24 Urusan Wajib	95,83 %	
		Keuangan	15	Waktu penetapan PERDA APBD 2019	Tepat atau tidak tepat waktu penetapan PERDA APBD 2019	Apabila TEPAT: Sebutkan dasar hukumnya. PERDA Nomor : ------Tahun tentang ----- APBD 2019. (Paling lambat tanggal 31 Desember 2018).	PERDA Nomor : 40 Tahun 2018 tentang Penyusunan APBD 2019 pada tanggal 27 Desember 2018	Tepat	
			16	Keberadaan PERDA tentang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP 58/2005	Ada atau tidak adanya PERDA ttg pengelolaan keuangan daerah	Apabila ADA: Sebutkan legal formalnya. PERDA Nomor : ------Tahun ------ tentang ---	PERDA Nomor : 8 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Ada	

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENIS DATA (TAHUN 2019)	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			17	Belanja untuk pelayanan dasar	Jumlah belanja untuk pelayanan dasar dibagi Jumlah total belanja X 100%	Belanja pelayanan dasar APBD Tahun 2019. 1) Urusan Pendidikan Rp. ----- 2) Urusan Kesehatan Rp. ------ 3) Urusan PU dan Penataan Ruang Rp. -- 4) Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Rp……. 5) Urusan Trantibum dan Linmas Rp. ------ 6) Urusan Sosial Rp…… Total Belanja pelayanan dasar Rp. ---- Total Belanja APBD 2019, sebesar Rp. -------	1. 293.051.278.058,56 2. 211.352.255.575,00 3. 196.735.860.199,74 4. 40.792.589.762,45 5. 14.641.172.131,00 6. 15.757.747.848,00 Total Belanja Pelayanan Dasar 772.330.903.574,75 Total Belanja APBD 2019, sebesar Rp.1.148.511.321.355,75	67,25 %	
			18	Belanja untuk urusan pendidikan dan kesehatan	Jumlah belanja untuk kesehatan dan pendidikan dibagi Jumlah total belanja X 100%	Belanja Pendidikan dan Kesehatan APBD Tahun 2019. 1) Urusan Pendidikan Rp. ------- 2) Urusan Kesehatan Rp. ----- Total Belanja Pend & Kes Rp. -------	1. 293.051.278.058,56 2. 211.352.255.575,00 Total Belanja Pend & Kes Rp. 504.403.533.633,56	43,92%	
		Pelayanan Publik	19	Keberadaan PERDA tentang Standar Pelayanan Publik 3 sesuai dengan	Ada atau tidak adanya standar pelayanan publik	Apabila ADA: Sebutkan hukumnya, PERDA Nomor ------ Tahun ------- tentang (standar pelayanan publik)	Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Publik	Ada	
		Kepegawaian	20	Ratio PNS terhadap penduduk	Jumlah PNS Kota dibagi jumlah penduduk	- Jumlah PNS Kota tahun 2019 sebanyak orang. - Jumlah penduduk Kota tahun 2019 sebanyak orang.	3.287 x 100% 210.115	1,56%	
			21	Rasio PNS Memiliki Kualifkasi Pendidikan Tinggi minimal DIII (PNS	Jumlah PNS Memiliki Kualifikasi Pendidikan Tinggi Minimal D III	- Jumlah PNS Kota tahun 2019 yang memiliki Kualifikasi Pendidikan Tinggi Minimal DIII (Diluar Guru dan Tenaga Kesehatan)... orang	2.531 x 100% 3.287	Ada 77%	

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENIS DATA (TAHUN 2019)	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	dibagi Jumlah PNS dikali 100%	- Jumlah PNS Kota Tahun 2019 ... orang Apabila ADA, sebutkan nama lengkap dari Sistem database (tentang kepegawaian)			
		Kelembagaan	22	Penataan Perangkat Daerah	Jumlah pembentukan Perangkat Daerah berdasarkan PP 18/2016	Jumlah Perangkat Daerah, sbb: 1) Bagian (Setda) = 6 unit 2) Dinas = 18 unit 3) Badan = 6 unit 4) Kantor = 0 unit 5) Rumah Sakit = 1 unit 6) Lembaga Teknis lainya= 3 unit 7) Kecamatan/Distrik = 3 unit Jumlah Perangkat Daerah = 37 unit		37 unit	
4	EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMDA DAN DPRD	Produk peraturan perundangan	23	PERDA yang ditetapkan	Jumlah PERDA yang ditetapkan dalam tahun 2019	PERDA yang ditetapkan dalam Tahun 2019, sebanyak 17 Perda (Daftar terlampir)		17 PERDA	
		RAPERDA yang diajukan tahun berjalan	24	RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2019	Jumlah RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2019 dibagi Jumlah RAPERDA yang diusulkan tahun 2019	RAPERDA yang disetujui tahun 2019, sebanyak 17 RAPERDA. RAPERDA yang di usulkan DPRD tahun 2019, sebanyak 17 PERDA.	17 x 100% 17	100%	
5	EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH DPRD BESERTA TINDAK LANJUT	Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti	25	Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti .	Jumlah keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh DPRD dibagi jumlah keputusan DPRD yang dihasilkan	Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh DPRD dalam tahun 2019, sebanyak 31 keputusan. Keputusan DPRD dalam tahun 2019, sebanyak 31 keputusan.	31 x 100% 31	100 %	

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENIS DATA (TAHUN 2019)	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	PELAKSANAAN KEPUTUSAN				dalam tahun 2019 x 100%				
6	EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH KEPALA DAERAH BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN	Tindaklanjut keputusan Walikota	26	Keputusan Walikota yang ditindaklanjuti	Jumlah keputusan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah keputusan walikota dalam tahun 2019 x 100%	Keputusan Walikota yang ditindaklanjuti tahun 2019, sebanyak 246 keputusan. Keputusan walikota tahun 2019 yangdi usulkan, sebanyak 246 keputusan.	246 x 100% 246	100%	
		Tindaklanjut Peraturan Walikota	27	Peraturan Walikota yang ditindaklanjuti	Jumlah Peraturan Walikota yang ditindak- lanjuti dibagi jumlah Peraturan Walikota dalam tahun 2019 x 100%	Peraturan Walikota yang ditindaklanjuti tahun 2019, sebanyak 50 Per-Walikota. Peraturan Walikota dalam tahun 2019 sebanyak 50 Per-Walikota.	50 x 100% 50	100%	
7	KETAATAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PERDA yang dibatalkan	28	Jumlah PERDA yang dibatalkan	Jumlah PERDA yang dibatalkan dibagi Jumlah PERDA yang dikirim ke pemerintah untuk dievaluasi x 100%	Perda yang dibatalkan, sebanyak 0 Perda yang dikirimkan untuk dievaluasi oleh Pemerintah sebanyak 17	0 x 100% 17	0%	
8	INTENSITAS DAN EFEKTIVITAS PROSES KONSULTASI PUBLIK ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN MASYARAKAT	PERDA tentang konsultasi publik	29	Keberadaan PERDA/PerBup tentang konsultasi publik	Ada/tidak PERDA/PerBup	Apabila ADA, Sebutkan dasar hukumnya: PERDA atau Perbup Nomor Tahun ------ tentang (konsultasi publik)	Perda Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Perda No. 15 tahun 2011 tentang Pelayanan Publik Perwal Nomor 21 Tahun 2014 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola	Ada	

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENIS DATA (TAHUN 2019)	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	ATAS PENETAPAN KEBIJAKAN PUBLIK YANG STRATEGIS DAN RELEVAN UNTUK DAERAH						Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun		
		Media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik	30	Adanya media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik (website Kota, pos, bag/biro humas, leaflet/brosur)	Ada atau tidak ada media Informasi yang ditetapkan dengan PerWali	Apabila ADA, - Sebutkan Nama Medianya :------ - Sebutkan Perbup nomor ------- tahun ------- tentang --.	- **Website** Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Madiun https://madiunkota.go.id/ppid-kota-madiun/# Peraturan Walikota Madiun No 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun - **Radio Suara Madiun** Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 11 Tahun 2011 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun - **Call Center 112** Peraturan Walikota	Ada	

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENIS DATA (TAHUN 2019)	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
							Madiun Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 Kota Madiun		
9	TRANSPARANSI DALAM PEMANFAATAN ALOKASI, PENCAIRAN DAN PENYERAPAN DAU, DAK DAN BAGI HASIL	Serapan dana perimbangan	31	Dana perimbangan yang terserap dibanding yang direncanakan	Jumlah dana perimbangan yang terserap dibagi jumlah dana perimbangan x 100%	Dana perimbangan yang terserap Tahun 2019 sebesar Rp. Dana perimbangan yang direncanakan sesuai dengan APBD Tahun 2019 sebesar Rp.	681.537.181.650,00 x 100 % 733.188.381.000,00	93 %	
		Alokasi Belanja pada APBD dari DAU	32	Belanja Publik terhadap DAU	Jumlah belanja publik dibagi DAU x 100%	- Realisasi Belanja langsung APBD tahun 2019, sebesar Rp - DAU Tahun 2019, sebesar Rp.	742.013.101.222,00 x 100% 522.596.024.000,00	142 %	
		Alokasi Belanja pada APBD	33	Belanja Langsung terhadap total APBD	Total realisasi belanja Langsung dibagi APBD x 100%	- Total realisasi Belanja langsung APBD tahun 2019, sebesar Rp - Total realisasi Belanja APBD Tahun 2019, Sebesar Rp	742.013.101.222,29 x 100% 1.148.511.321.355,75	65 %	
10	INTENSITAS, EFEKTIVITAS DAN TRANSPARANSI PEMUNGUTAN SUMBER- SUMBER PAD DAN PINJAMAN / OBLIGASI DAERAH	Besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD)	34	Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dlm APBD (Realisasi)	Jumlah PAD dibagi jumla total pendapatan APBD (realisasi) X 100%	- PAD APBD (Realisasi) Tahun 2019, sebesar Rp - Total Pendapatan dalam APBD (Realisasi) Tahun 2019, sebesar Rp.	251.981.381.696,21 x 100% 1.094.312.970.048,58	23 %	

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENIS DATA (TAHUN 2019)	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
11	EFEKTIVITAS PERENCANAAN, PENYUSUNAN, PELAKSANAAN TATA USAHA, PERTANGGUNG JAWABAN DAN PENGAWASAN APBD	Kewajaran Laporan Keuangan (Lapkeu)	35	Opini BPK terhadap LapKeu Daerah	Jenis opini BPK terhadap Hasil LapKeu Daerah Daerah untuk 2 tahun terakhir	- Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2018, dengan opini: WTP - Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2019, dengan opini: WTP		Opini tahun 2017 = WTP Opini tahun 2018= WTP	
		Besaran SILPA	36	Rasio SILPA thdp total pendapatan	Besaran SILPA dibagi jumlah pendapatan x 100%	- SILPA Tahun 2019, sebesar Rp - Total Pendapatan dalam APBD (Realisasi) Tahun 2019, sebesar Rp	223.580.475.124,05 x 100% 1.094.312.970.048,58	20 %	
		Realisasi belanja	37	Rasio realisasi belanja thd anggaran belanja	Realisasi belanja dibagi total anggaran belanja APBD X 100%	- Realisasi Belanja Tahun 2019,sebesar Rp - Total Anggaran Belanja dalam APBD Tahun 2019, sebesar Rp.	1.148.511.321.355,75 x100% 1.377.795.868.937,22	83,36 %	
		Pengawasan Inspektorat Kota	38	Rasio temuan BPK RI yang ditindaklanjuti	Jumlah temuan BPK RI yang ditindaklanjuti dibagi dengan temuan BPK RI sampai dengan akhir tahun 2019	Temuan BPK RI yang ditindaklanjuti sampai dengan Tahun 2019, sebanyak 600 temuan. Temuan BPK RI sampai dengan akhir tahun 2019 sebanyak 600 temuan.	600 x 100 % 600 Keterangan : Dari 600 rekomendasi yang telah ditindaklanjuti, sd Semester I Tahun 2019, sebanyak 582 rekomendasi telah dinyatakan selesai (92%) sedangkan hasil Semester II Tahun 2019 belum diperoleh	100 %	

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENIS DATA (TAHUN 2019)	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
12	PENGELOLAAN POTENSI DAERAH	Peta potensi daerah	39	Rasio realisasi PAD 2019 terhadap potensi PAD [4]	Jumlah realisasi PAD 2019 dibagi dengan potensi PAD X 100%	- Realisasi PAD Tahun 2019, sebesar Rp. - Potensi PAD pada APBD Tahun 2019 APBD	251.981.381.696,21 x 100% 169.000.128.482,14	149%	
		Peningkatan PAD	40	Peningkatan PAD	Kenaikan/penurunan PAD dibagi PAD tahun lalu x 100% (PAD 2019 - PAD 2018) : PAD 2018 X 100%	- Total PAD pada Tahun 2019 sebesar Rp. - Total PAD pada Tahun 2018 sebesar Rp	(251.981.381.696,21 - 230.847.977.128,73) x 100% 230.847.977.128,73	9,15%	
13	TEROBOSAN / INOVASI BARU DALAM PENYELENGGRAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Penghargaan	41	Penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemda dalam tahun 2019.	Jumlah penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemerintah Daerah dalam Tahun 2019	Penghargaan yang diterima, sebanyak yang terdiri dari 1) -------. 2) ---------. 3) ----------. 4) Dst --.	Penghargaan yang diterima, sebanyak 27 yang terdiri dari **Tingkat Nasional :** 1) Juara I Lomba Best Practice Kepala Sekolah Dasar kategori Naskah Terbaik (Dra. Sri Mugi Lestari, Kepala SDN Mojorejo 2) 2) Predikat Kota Layak Anak Tingkat Nasional 3) Penghargaan Pembina Forum Anak Terbaik Tingkat Nasional 4) Juara II Tingkat Nasional Lomba FLSSN kategori Solo Vokal (Bernadita Salwa N.K., pelajar SMP St. Yusuf) 5) Piagam WTP dari	27 Penghargaan	

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENIS DATA (TAHUN 2019)	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
							Kementerian Keuangan 6) Piagam Penghargaan Clinical Service Improvement Project untuk RSUD Kota Madiun dalam rangka PERSI Award 7) Wahana Tata Nugraha Tahun 2019 8) Penghargaan Menteri Kominfo Jonny G Plate atas Penyelesaian Masterplan Smart City 9) Juara I Lomba Sekolah Sehat (LSS) Tingkat Nasional untuk TK/RA kategori Pencapaian Terbaik (TK Negeri Pembina) 10) Juara Sekolah Sehat Tingkat Nasional (TK Pembina) 11) RKCI 2019 kategori Smart Health dan RKCI 2019 kategori Digital Government Readiness 12) Penghargaan SWASTI SABA WISTARA 13) Penghargaan Role Model Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori “Sangat Baik”		

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENIS DATA (TAHUN 2019)	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
							dari Kementerian PAN dan RB (Dinas Kependudukan dan Capil) 14) Penghargaan Top 30 Kompetisi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) LAPOR! Kemenpan RB 15) Penghargaan Wilayah Bebas Korupsi Kemenpan dan RB (Dinas Kependudukan dan Capil) 16) Penghargaan Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) **Tingkat Provinsi :** 1) Juara II Predikat Kota Ramah Lansia Tingkat Provinsi 2) Juara III Kategori Infografi pada Anugerah Pewarta Warga (APW) Award Tingkat Provinsi 3) Juara III Lomba Cerdas Cermat Komunikatif (LCKK) tingkat Provinsi Jawa Timur (KIM Anyelir)		

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENIS DATA (TAHUN 2019)	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
							4) Juara III Duta Putri Gemar Makan Ikan Tingkat Provinsi Jawa Timur 5) Penghargaan BBGRM kategori Pelaksana Gotong Royong Terbaik Tingkat Provinsi Jawa Timur (Kelurahan Nambangan Kidul) 6) Program Unggulan Radio LPPL Terbaik dalam Anugerah Penyiaran KPID Award Provinsi Jawa Timur 7) Juara III Kelompok Usaha Bersama (Kube) Tingkat Provinsi Jawa Timur (Kube PKH Abadi Jaya, Kelurahan Pandean) 8) Juara III Pendamping Kube Terbaik Tingkat Provinsi Jawa Timur (Fepi Aryani, Peksos Supervisor PKH Kota Madiun) 9) Juara III Lomba Cerdas Cermat Keluarga Sadar Hukum Tingkat Provinsi Jawa Timur		

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENIS DATA (TAHUN 2019)	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
							Tahun 2019 10) Juara I Yel-Yel Keluarga Sadar Hukum Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 11) Keterbukaan Informasi Publik Kategori A (Informatif) PPID Award Provinsi Jawa Timur 2019		
		Pengadaan barang dan jasa	42	Keberadaan E-procurement	Ada/Tidak	Apabila ADA Sebutkan Penerapan E-procurement mulai operasi pada bulan tahun --.	1. Sebutkan Penerapan E-procurement : Mulai operasi pada bulan Desember Tahun 2011. 2. Tahun 2012 s/d Tahun 2014 pelaksanaan E – Procurement Semi Manual (Penerapan sistem baru sebatas Pengumuman Lelang) 3. Tahun 2015 telah dilaksanakan lelang (by full sistem) sejumlah 85 paket 4. Tahun 2016 telah dilaksanakan lelang (by full sistem) sejumlah 144 paket 5. Tahun 2017 telah	Ada	

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENIS DATA (TAHUN 2019)	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
							dilaksanakan lelang (by full sistem) sejumlah 128 paket 6. Tahun 2018 telah dilaksanakan lelang (by full sistem) sejumlah 161 paket 7. Tahun 2019 telah dilaksanakan lelang (by full sistem) sejumlah 169 paket		
		Daya saing daerah	43	Jumlah persetujuan investasi	Jumlah ijin investasi dalam tahun 2019	Persetujuan ijin investasi pada Tahun 2019, sebanyak ijin	1.107 ijin	1.107 ijin	

LAMPIRAN: II.3 FORMAT IKK UNTUK KOTA
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN
ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
URUSAN WAJIB							
1	Pendidikan	1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD ---------- x 100 % Jumlah anak usia 5-6 tahun pada provinsi yang bersangkutan	2.469 ---------- x 100 % 2.796	88,30%	
		2	Persentase pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	Jumlah Pendidik PAUD yang memiliki Ijazah D IV atau sarjana (S1), dan sertifikat Profesi guru Pendidikan PAUD ---------- x 100 % Jumlah Pendidik PAUD	420 ---------- x 100 % 477	88,05%	
		3	Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang terakreditasi ---------- x 100 % Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini	66 -------- x 100 % 93	70,96.%	
		4	Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	Jumlah Penduduk usia 15 thn ke atas dapat baca tulis ---------- x 100 % Jumlah penduduk usia 15th ke atas	77.633 ---------- -- x 100 % 77.633	100%	
		5	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar ---------- x 100 % Jumlah anak usia 7-12 tahun pada kota yang bersangkutan	19.730 ---------- x 100 % 14.534	135,75.%	

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		6	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama ---------- x 100 % Jumlah anak usia 13-15 tahun pada kota yang bersangkutan	10.977 ---------- x 100 % 6.428	170,76%	
		7	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	Jumlah putus sekolah pd tingkat & jenjang SD/MI ---------- x 100 % Jumlah siswa pd tingkat yg sama dan jenjang SD/MI pd tahun ajaran sebelumnya	0 ---------- x 100 % 20.824	0%	
		8	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	Jumlah putus sekolah pd tingkat & jenjang SMP/MTs ---------- x 100 % Jumlah siswa pd tingkat yg sama dan jenjang SMP/MTs	0 ----------x 100 % 10.977	0%	
		9	Persentase pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	Jumlah Pendidik Jenjang Sekolah Dasar yang memiliki Ijazah (D IV) atau sarjana (S1), dan sertifikat Profesi guru Pendidikan PAUD ---------- x 100 % Jumlah Pendidik Jenjang Sekolah Dasar	824 ---------- x 100 % 843	97,75%	
		10	Persentase pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	Jumlah Pendidik Jenjang Menengah Pertama yang memiliki Ijazah D IV atau sarjana (S1), dan sertifikat Profesi guru Pendidikan PAUD ---------- x 100 % Jumlah Pendidik Jenjang Menengah Pertama	646 ---------- x 100 % 653	98,92%	
		11	Persentase SD dan SMP Terakreditasi	Jumlah Satuan Pendidikan SD dan SMP yang terakreditasi ---------- x 100 % Jumlah Satuan Pendidikan SD dan SMP	94 -------- x 100 % 95	99%	
		12	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI ---------- x 100 % Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya	3.739 ---------- x 100 % 3.739	100%	

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		13	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs ---------- x 100 % Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada tahun ajaran sebelumnya	3.737 ---------- x 100 % 3.737	100%	
		14	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs ---------- x 100 % Jumlah lulusan pd jenjang SD/MI tahun ajaran sebelumnya	4.063 ---------- x 100% 3.649	111,35%	
		15	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan ---------- x 100 % Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada provinsi yang bersangkutan	96 ---------- x 100 % 34.249	0,28%	
2	Kesehatan	16	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan ---------- x 100 % Jumlah Penduduk di Kota	$\frac{980}{210.115}$ x 100%	0,47%	
		17	Persentase RS Rujukan Tingkat Kota yang terakreditasi	Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi ---------- x 100 % Jumlah RS di Kota	$\frac{8}{8}$ x 100%	100%	
		18	Rasio Tenaga Kesehatan terhadap Jumlah Penduduk Kota	Jumlah Penduduk Kota ---------- Jumlah Tenaga Kesehatan	$\frac{210.155}{2.483}$	84,62	
		19	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ---------- x 100 % Jumlah ibu hamil di Kota	$\frac{2.643}{2.643}$ x 100%	100%	

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		20	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan ---------- x 100 % Jumlah ibu bersalin di Kota	$\frac{2.524}{2.523}$ x 100%	100,04%	
		21	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar ---------- x 100 % Jumlah bayi baru lahir di Kota	$\frac{2.403}{2.403}$ x 100%	100%	
		22	Presentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar ---------- x 100 % Jumlah balita di Kota	$\frac{9.481}{9.470}$ x 100%	100,12%	
		23	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar ---------- x 100 % Jumlah anak usia pendidikan dasar di Kota	$\frac{31.639}{32.447}$ x 100%	97,51%	
		24	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar ---------- x 100 % Jumlah orang usia 15-59 tahun di kota	$\frac{123.903}{115.602}$ x 100%	107,18%	
		25	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah warga negara usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar ---------- x 100 % Jumlah orang warga negara usia 60 tahun di Kota	$\frac{23.556}{25.275}$ x 100%	93,20%	
		26	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar ---------- x 100 % Jumlah penderita hipertensi di Kota	$\frac{59.911}{67.155}$ x 100%	89,21%	

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		27	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar ---------- x 100 % Jumlah penderita DM di Kota	$\frac{8.450}{7.931}$ x 100%	106,54%	
		28	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar ---------- x 100 % Jumlah penderita ODGJ di Kota	$\frac{361}{336}$ x 100%	107,44%	
		29	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar ---------- x 100 % Jumlah penderita TBC di Kota	$\frac{3.957}{4.743}$ x 100%	83,43%	
		30	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar ---------- x 100 % Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di Kota	$\frac{6.306}{6.081}$ x 100%	103,70 %	
		31	Persentase Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Jumlah Kelurahan UCI ---------- x 100 % Jumlah Seluruh Kelurahan	$\frac{27}{27}$ x 100%	100%	
		32	Presentase Balita Gizi Buruk/*Stunting* yg mendapatkan Perawatan/Pelayanan Kesehatan	Jumlah balita gizi buruk/stunting mendapat perawatan di sarana Pelay. Kes. Di satu wil. Kerja pd kurun wkt tertentu ----------x 100 % Jumlah seluruh balita gizi buruk/stunting yang ditemukan Di satu wilayah kerja dalam waktu yang sama	$\frac{900}{900}$ x 100%	100%	
		33	Persentase penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wil. Kerja selama 1 thn ----------x 100% Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam Kurun wkt yang sama	$\frac{245}{245}$ x 100%	100%	

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		34	Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup	Jumlah Kematian Ibu Melahirkan ----------x 100.000 Jumlah Kelahiran Hidup	$\frac{1}{2.530}\ x\ 100.000$	39,53	
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	35	Panjang jalan Kota dalam kondisi baik	Panjang jalan Kota dalam kondisi mantap (baik dan sedang) ---------- x 100 % Panjang seluruh jalan Kota di daerah tersebut	431,790 ---------- x 100 % 433,095	99,67 %	
		36	Presentase Panjang Jalan Kota yang di rehabilitasi/direkonstruksi	Panjang jalan Kota yang direhabilitasi/direkonstruksi ---------- x 100% Panjang Jalan Kota yang seharusnya direhabilitasi/ direkonstruksi	40,19 km ---------- x 100 % 52,70 km	76,27 %	
		37	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kota	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kota (ha) ---------- x 100 % Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kota (ha)	2,33 ----- x 100 2,95	78,98 %	
		38	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kota	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kota (m) ---------- x 100 % Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan Kota (m)			Kewenangan Provinsi
		39	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kota	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah Kota. ---------- x 100 % Jumlah total rumah tangga di seluruh Kota tersebut.	201.715 ---------- x 100 % 210.846	95,67 %	

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		40	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD ---------- x 100 % Jumlah rumah di Kota	41.542 -------- x 100 % 41.958	99 %	
		41	Persentase tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analis ---------- x 100 % Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analis di wilayah Kota	Sertifikasi Petugas K-3 41 ---- x 100 % 50 Mandor pasang beton precast 49 ---- x 100 % 120	82 % 40,83 %	
		42	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya yang terjadi kecelakaan konstruksi ---------- x 100 % Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	0 --- x 100% 0	0%	
		43	Rumah Tangga Bersanitasi	Jumlah rumah tangga ber sanitasi ---------- x 100 % Jumlah seluruh rumah tangga	41.542 x100 % 41.958	99,00%	
		44	Rumah tangga pengguna air bersih	Jumlah rumah tangga pengguna air bersih ---------- x 100 % Jumlah seluruh rumah tangga	41.836 x100 % 41.958	99,71 %	
		45	Kawasan Kumuh	Luas Kawasan Kumuh ---------- x 100 % Luas Wilayah	0 ha x 100% 3323 ha	0%	

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		46	Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah	Luas ruang terbuka hijau ---------- x 100 % Luas wilayah	664,93 ha x 100% 3323 ha	20,01%	
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	47	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kota	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n ---------- x 100 % Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n	0 x 100% 0	0%	
		48	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kota	Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni ---------- x 100 % Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan	0 x 100% 0	0%	
		49	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha) ---------- x 100 % Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha	0 x 100% 0	0%	
		50	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Jumlah unit rumah kumuh ---------- x 100 % Jumlah total unit rumah Kota	20 x 100% 42.869	0,05%	
		51	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU ---------- x 100 % Jumlah unit rumah kota	37 x 100% 37	100 %	
		52	Rumah layak huni	Jumlah rumah layak huni ---------- x 100% Jumlah seluruh rumah di wilayah pemda ybs.	42849 x 100% 42869	99,95 %	

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5	Ketentraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	53	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah pengaduan yang ditangani ---------- x 100 % Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk	34 x 100% 34	100%	
		54	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan ---------- x 100% Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi	38 x 100% 38	100%	
		55	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	3.350 orang	3.350 orang	
		56	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	870 orang	870 orang	
		57	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	390 orang	390 orang	
		58	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah ditambah jumlah layanan pemadaman di kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah ---------- x 100 %	90 x 100% 90	100%	
		59	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran		100%	
		60	Persentase Personil Satpol PP berkualitas PPNS	Jumlah Personil Satpol PP Berkualitas PPNS ---------- x 100 % Jumlah Personil Satpol PP	3 x 100% 41	7,32%	

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6	Sosial	61	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti ---------- x 100 % Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis	930 x 100% 804	115,7%	
		62	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran ---------- x 100 % Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah Kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kota	0 x 100% 0	0%	
		63	Rasio rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar dengan Jumlah Penyandang Diabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gepeng	Jumlah rumah singgah/shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar ---------- x100% Jumlah Penyandang Diabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gepeng	17 x 100% 896	1,9%	
		64	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga ---------- x 100 % Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng seharusnya dapat di	72 x 100% 147	49%	
		65	Rasio pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	Jumlah pekerja sosial profesional dan atau Tenaga Kerja Sosial dan atau relawan sosial yang ada ---------- x 100 % Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dibina	473 x 100% 930	50,9%	

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7	Tenaga Kerja	66	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD ---------- x 100% Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di Kota	11 x 100% 13	84,6%	
		67	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi ---------- x 100% Jumlah tenaga kerja keseluruhan	1.296 x 100% 16.821	7,70%	
		68	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan) ---------- x 100% Jumlah tenaga kerja	10.051.719,42 x 100% 86.875	11.570,32%	
		69	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak ---------- x 100% Jumlah Perusahaan	558 x 100% 718	78%	
		70	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kota	Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan ---------- x 100% Jumlah pencaker yang terdaftar	721 x 100% 843	85,52%	
		71	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan Melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial ---------- x 100% Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial	27 x 100% 27	100%	
		72	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	Jumlah Instruktur Bersertifikat Kompetensi ---------- x 100% Jumlah Instruktur	45 x 100% 90	50%	
		73	Persentase Lembaga Pelatihan Kerja yang memiliki perizinan	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang memiliki perizinan ---------- x 100% Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja	22 x 100% 22	100%	

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	74	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Jumlah ARG pada belanja langsung APBD ---------- x 100% Jumlah seluruh belanja langsung APBD	25.075.903.376 x 100% 833.032.855.395,08	3,01%	
		75	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kota	Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kota yang didampingi ---------- x 100% Jumlah Anak (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun)	5 x 100% 48.873	0,01%	
		76	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan ---------- x 100.000 Jumlah penduduk perempuan	11 x 100.000 107.264	10,255	
		77	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan yang terlayani ---------- x 100% Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan	11 x 100% 11	100%	
		78	Partisipasi angkatan kerja perempuan	Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan ---------- x 100 % Jumlah angkatan kerja perempuan	68.430 x 100% 72.940	93,81%	
9	Pangan	79	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan)	Jumlah cadangan pangan ---------- x 100% Jumlah kebutuhan pangan	32.450.160 kg 210.115 orang	154,44 kg/kapita/th	
		80	Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	Ada/tidak		Ada	
10	Pertanahan	81	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Luas tanah sesuai peruntukan ijin lokasi ---------- x 100% seluruh luas tanah yang diberikan ijin lokasi	10.534 x 100% 10.534	100%	

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		82	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum ---------- x 100% Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	179,08 x 100% 996,6	17,97%	
		83	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas izin lokasi ---------- x 100% Luas izin lokasi yang diterbitkan	26.975 x 100% 26.975	100%	
		84	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Jumlah luas Tanah Obyek Landreform (TOL) ---------- x 100% Jumlah penerima tanah obyek landreform	0 x 100% 0	0%	
		85	Luas lahan bersertifikat	Luas lahan bersertifikat di suatu daerah ---------- x 100 % Luas lahan yang seharusnya bersertifikat di suatu daerah	32.646.812 m^2 x 100% 32.230.000 m^2	98,20%	
		86	Tersedianya tanah untuk masyarakat.	Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan Izin Membuka Tanah ---------- x 100% Luas Izin Membuka Tanah yang diterbitkan	0 x 100% 0	0%	
		87	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani ---------- x 100% jumlah pengaduan sengketa tanah garapan	0 x 100% 0	0%	
11	Lingkungan Hidup	88	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota	= (Indeks penc. airx30%) + (Indeks penc.udarax 30%) + (Indeks tutupan lahanx40%) =(30% X 76,89) + (30% X 85,50) + (40% X 38,76)	= 23,01 + 25,314 + 15,528 =64,221	63,87	
		89	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kota	Total Vol sampah yang dapat ditangani ---------- x 100% Total vol timbunan sampah kota	119.970,181 X 100% 127.626,508	94,001%	

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		90	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota	Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Kota ---------- x 100% usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan	0/8 X 100%	0%	
12	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	91	Persentase Penduduk usia 0 - 18 tahun Yang Mempunyai Akte Kelahiran	Jumlah penduduk usia 0 – 18 Tahun tahun yang memiliki akte kelahiran ---------- x 100% Jumlah penduduk usia 0 – 18 tahun	51.239 x 100% 52.019	98,50%	
		92	Persentase Penduduk berumur dari 17 tahun ke atas yang mempunyai KTP Elektronik	Jumlah Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP ---------- x 100% Jumlah penduduk 17 tahun ke atas	158.559 x 100% 161.427	98,22%	
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	93	Persentase pengentasan desa tertinggal	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun ---------- x 100% Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun n)	0 x 100% 0	0%	
		94	Persentase peningkatan status desa mandiri	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun ---------- x 100% Jumlah desa berkembang (per-awal tahun n)	27 x 100% 27	100%	
		95	PKK aktif	Jumlah PKK aktif ---------- x 100 % Jumlah PKK	31 x 100% 31	100%	
		96	Posyandu	Jumlah Posyandu Aktif ---------- x 100 % Total Posyandu	265 x 100% 270	98,15%	

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	97	TFR (Angka Kelahiran Total)			1,94	BPS
		98	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur 15 – 19 Tahun ---------- x 100% Jumlah penduduk perempuan kelompok umur 15 – 19 tahun pada pertengahan tahun yg sama	33 x 100% 7.400	0,45%	
		99	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah peserta KB Aktif Modern ---------- x 100% Jumlas Pasangan Usia Subur	21.633 x 100% 27.452	78,8%	
		100	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani ---------- x 100% Jumlas Pasangan Usia Subur	1.153 x 100% 27.452	4,2%	
15	Perhubungan	101	Rasio konektivitas Kota	Rasio konektvitas Kabupaten atau Kota = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan) o IK1 (angkutan jalan) = (Jumlah trayek yg dilayani pd kabupaten/kota x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten/kota tersebut) o IK2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan)= jumlah lintas Penyeberangan yang beroperasi pd kabupaten/kota tsb x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada kabupaten/kota tersebut) Keterangan: IK1 (Angkutan Jalan) - Jumlah trayek yang dilayani adalah jumlah trayek perintis ditambah trayek AKAP - Jumlah kebutuhan trayek adalah jumlah kebutuhan		0	

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				trayek perintis dalam kurun waktu tertentu dan kebutuhan trayek AKAP dalam kurun waktu tertentu IK2 (Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan) - Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi adalah jumlah lintasa perintis ditambah lintasan komersil - Jumlah kebutuhan lintas adalah jumlah kebutuhan lintas penyeberangan baik lintas penyeberangan perintis maupun komersil untukmenghubungkan antar wilayah yang direncanakan dalam kurun waktu tertentu Bobot Angkutan Jalan atau Sungai, Danau dan Penyeberangan : Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih tinggi dibandingkan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 70, bobot angkutan jalan = 30) Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan sama dengan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP 50, bobot angkutan jalan = 50) Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 30 (bobot angkutan jalan = 70) Wilayah yang tidak memiliki angkutan penyeberangan dan laut (bobot angkutan SDP = 0, bobot angkutan jalan = 100) Bobot Trayek atau Lintas : a. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi tinggi (>5x dalam seminggu), bobot = 1 b. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi sedang (3-4 dalam seminggu), bobot = 0.8 c. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi rendah (<3 dalam seminggu), Bobot = 0.5			

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		102	Kinerja lalu lintas Kota	V/C Ratio di Jalan Kota	1397,48 x 100% 3285,83	0,45	
16	Komunikasi dan Informatika	103	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo ---------- x 100% Jumlah OPD	34 OPD ---------- x 100% 34 OPD	100%	
		104	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi ---------- x 100% Jumlah Layanan Publik	3 Aplikasi ---------- x 100% 3 Jumlah layanan Call Center, PPID, Service Desk	100%	
		105	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kota	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kota ---------- x 100% Jumlah penduduk	77.633 x 100% 210.115	36,95%	
		106	Peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	Peraturan Walikota Madiun Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun	Ada	
		107	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	Jumlah ASN Pengelola TIK yang tersertifikasi Kompetensi ---------- x 100% Jumlah ASN Pengelola TIK yang seharusnya tersertifikasi Kompetensi	2 ----- x 100 % 7	28,57%	
17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	108	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset ---------- x 100% Jumlah seluruh koperasi	150 ----- x 100 % 308	48,70 %	

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		109	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha ---------- x 100% Jumlah usaha mikro keseluruhan	97 ---------- x 100 % 21.038	0,46 %	
		110	Persentase jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	Jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha ---------- x 100% Jumlah usaha kecil keseluruhan	268 ------- x 100% 1.038	25,81 %	
		111	Koperasi aktif	Jumlah Koperasi aktif ---------- x 100 % Jumlah seluruh koperasi	302 ----- x 100% 308	98,05 %	
18	Penanaman Modal	112	Persentase peningkatan investasi di Kota	(Jumlah investasi tahun n- jumlah investasi tahun n-1) di kota ---------- x 100% Jumlah investasi tahun n-1 di kota	(968.702.041.674 – 966.733.731.153) x100 % 966.733.731.153	0,20%	
19	Kepemudaan dan Olahraga	113	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di kota ---------- x 100% Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kota	107 x 100% 42.859	0,25%	
		114	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yg menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi social kemasyarakatan di kota ---------- x 100% jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kota	135 x 100% 42.859	0,31%	
		115	Peningkatan prestasi olahraga	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional		50	
		116	Presentase Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	Jumlah Pelatih Olah Raga yang Memiliki Kompetensi di satuan Pendidikan ---------- x 100% jumlah Pelatih Olah Raga yang seharusnya Memiliki Kompetensi	158 x 100% 158	100%	

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
20	Statistik	117	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah ---------- x 100% jumlah OPD	34 ----- x 100 % 34	100%	
		118	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah ---------- x 100% Jumlah OPD	34 ----- x 100 % 34	100%	
21	Persandian	119	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Jumlah nilai per area keamanan informasi ---------- x 100% Jumlah area penilaian	1.035 (jumlah nilai surat/radiogram) ---------- x 100% 34 (OPD)	30,44%	
22	Kebudayaan	120	Terlestarikannya Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan ---------- x 100% Jumlah cagar budaya yang terdata	21 x 100% 146	14,38%	
		121	Penyelenggaraan festifal seni & budaya	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya		58	
23	Perpustakaan	122	Nilai Budaya Baca	Nilai budaya baca	87,64 + 44 + 33,33 3	54,99	
		123	Persentase naskah kuno dan koleksi budaya etnis nusantara yang dikelola dan dilestarikan	x = a'+b'/a+b × 100% x = persentase naskah kuno yang dikelola dan dilestarikan a' = naskah kuno yang dikelola dan dilestarikan (eks) b' = koleksi budaya etnis nusantara yang dikelola dan dilestarikan (eks) a = koleksi naskah kuno yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (eks) b = koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (eks)	= (56 + 0) x 100 (56 + 0)	100%	

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		124	Koleksi buku yg tersedia di perpustakaan daerah	Jumlah koleksi judul buku yg tersedia di perpustakaan daerah ---------- X 100 % Jumlah koleksi jumlah buku yg tersedia di perpustakaan daerah	22.100 x 100% 51.986	42,5%	
24	Kearsipan	125	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009)	T = (a + i + s + j)/4 T= tingkat ketersediaan arsip a = persentase arsip aktif yg telah dibuatkan daftar arsip i = persentase arsip inaktif yg telah dibuatkan daftar arsip s = persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik j = persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	(100+100+100+0) 4	75%	
		126	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	T = (m + b + g + a + c + i)/6 T= tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban m = tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK b = tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK g = tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran Daerah Kota dengan NSPK a = tingkat kesesuaian kegiatan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK c = tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK I = tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK	(0+100+100+100+60+60) 6 420 x 100% 6	70%	

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	URUSAN PILIHAN						
25	Kelautan dan Perikanan	127	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kota (sumber data: one data KKP)	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kota (sumber data: one data KKP)	produksi perikanan budidaya + produksi perikanan tangkap = 274,8 + 86,5	361,3 ton	
		128	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	Jumlah Tempat Pelelangan Ikan yang Operasional ---------- X 100 % Jumlah Tempat Pelelangan Ikan		Nihil	
26	Pariwisata	129	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	(Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n-1) ---------- x 100% Jumlah wisatawan tahun n-1	(12.514-10.921)x 100% 10.921	1,4%	
		130	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kota	(Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n-1) ---------- x 100% Jumlah wisatawan tahun n-1	(409.239-400.316) x100% 400.316	2,23%	
		131	Tingkat hunian akomodasi	Jumlah kamar yang terjual ---------- x 100% Jumlah kamar yang tersedia	1.023 x 100% 1.297	78,87%	
		132	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	(707,629.5 + 525,484.3) x 100% 14,208,213.5	8,67%	
		133	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	(707,629.5 + 525,484.3) x 100% 251.981,38	489,4%	
27	Pertanian	134	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun ---------- x 100% Luas Panen	17.642 x 100% 2.447	7,21 ton	
		135	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Tahun 2019	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertanian ---------- x 100% Jumlah total PDRB	106,814.5 x 100% 14,208,213.5	0,75%	

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		136	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Jumlah kejadian penyakit/kasus tahun berjalan (t) – jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t- 1) ---------- x 100% Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1)	(232-296) x 100% 296	27,5%	
28	Energi Sumber Daya Mineral	137	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin ---------- x 100% Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi			Kewenangan Provinsi
29	Perdagangan	138	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB Tahun 2019	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor perdagangan ---------- x 100% Jumlah total PDRB	3,702,617.1 x 100% 14208213.5	26,06%	BPS
		139	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan ---------- x 100% Jumlah pelaku usaha di wilayah Kab/Kota	56 x 100% 56	100%	
		140	Persentase kinerja realisasi pupuk	Realisasi ---------- x 100% RDKK	1.021,15 x 100% 1.022,38	99,99%	
		141	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkap annya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku pada tahun berjalan ---------- x 100% jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kota	jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku pada tahun berjalan = 6794 UTTP Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kota = 7000 UTTP	97,05 %	

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Realisasi Pendapatan Tera sah Rp. 67.285.000,- Target Pendapatan Tera sah Rp. 58.000.000,-	116,00 %	
30	Perindusrian	142	Pertambahan jumlah industri besar di kota	(Jumlah Industri kecil dan menengah tahun n– Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1) ---------- x 100% Jumlah industri besar tahun n-1	390-363 x 100% 363	7,438%	
		143	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN (Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional) yang ditetapkan dalam RPIP (Rencana Pembangunan Industri Provinsi)				Tidak Ada
		144	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan ----------x 100% Jumlah izin yang dikeluarkan	390 x 100% 390	100%	
		145	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan ----------x 100% Jumlah izin yang dikeluarkan			Kewenangan Provinsi
		146	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kota	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan ----------x 100% Jumlah izin yang dikeluarkan			Tidak Ada

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
31	Transmigrasi	147	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya dan pembinaannya	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya dan pembinaannya		0%	
	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
		1	Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan Kota	Menunjukkan jumlah Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan Kota	89 aplikasi	89	
		2	Penjabaran program RPJMD dalam RKPD	Penjabaran program RPJMD dalam RKPD ---------- x 100 % Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan	104 x 100 % 104	100%	
		3	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	Jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan ---------- x 100 % Jumlah APBD	187.830.120.920 x 100% 1.377.795.868.937	13,63%	
		4	Rasio PAD	Jumlah PAD ---------- X 100% Jumlah PDRB non migas	251.981,38x 100% 14.208.213,5	1,77%	
		5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Jumlah belanja urusan pemerintahan – transfer expenditures ---------- X 100% Jumlah belanja APBD	372.719.799.732,06 X 100% 1.148.511.321.355,75	32,45%	BL – B/J
		6	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP		3,0375	
		7	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP			Laporan Belum Turun

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		8	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n ---------- X 100% jumlah kontrak keseluruhan tahun n		0%	
		9	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif ----------X 100% Jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif	169 x 100% 4295	3,93%	
		10	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Jumlah nilai belanja langsung yang melalui pengadaan ---------- X 100% Total belanja langsung	618.505.000.000 x 100% 742.013.101.222,29	83,35	
		11	Persentase Pegawai Fungsional terhadap Seluruh Jumlah Pegawai Pemerintah daerah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan) ---------- X 100% Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	84 x 100% 1.570	5,35%	
		12	Persentase Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi ---------- X 100% Seluruh jumlah pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	55 x 100% 84	65,48 %	
		13	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Nilai absolut dari Total belanja dalam realisasi ---------- X 100% Total belanja APBD dikurangi satu	1.148.511.321.355,75 X 100% 1.036.658.830.577,88	110,78%	
		14	Assets management	Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak) Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak) Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan?		Ya Ya Ya	

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				(Ya/Tidak) Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)		Ya	
		15	Cash Management: Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Nilai Realisasi SiLPA ---------- X 100% Total Belanja Anggaran tahun sebelumnya	223.580.475.124,05 X 100% 1.036.658.830.577,88	21,57%	
		16	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda ---------- X 100% Realisasi belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda	274.462.277 X 100% 285.500.000	96,13%	
		17	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website Pemda ---------- X 100% total jumlah dokumen yang telah dirinci	47 x 100% 47	100%	
		URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					
		1	Kegiatan pembinaan politik di daerah	Menunjukkan jumlah kegiatan pembinaan politik	1 kegiatan	1 kegiatan	
		2	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, ORMAS dan OKP	Menunjukkan jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, ORMAS dan OKP	10 kegiatan	10 kegiatan	